



**PERUBAHAN  
RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2019-2023**





## GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

---

### **SAMBUTAN**

#### ***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 merupakan tonggak awal periode kepemimpinan Saya dalam membangun Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam perjalanannya, dihadapkan dengan adanya perubahan kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan di Provinsi NTB. Mempertimbangkan perubahan dan hasil evaluasi tersebut, maka perlu dilakukan Peninjauan RPJMD NTB, baik terhadap tujuan dan sasaran pembangunan, indikator kinerja, strategi, kebijakan dan program prioritas, dalam upaya memperlancar dan mempercepat keberhasilan pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi NTB tahun 2019-2023.

Setelah melalui persetujuan DPRD Provinsi NTB, penyesuaian dan perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Dokumen perubahan RPJMD ini merupakan dokumen resmi yang menjadi acuan rencana pembangunan Provinsi NTB untuk kurun waktu tiga tahun ke depan (Tahun 2021-2023). Dokumen RPJMD ini memuat secara lengkap dan sistematis tentang visi dan misi Kepala Daerah, tujuan dan sasaran pembangunan, strategi dan arah kebijakan, indikator kinerja program, tahapan pencapaian dan indikasi pendanaan program yang dibutuhkan.





Dalam perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, Visi dan Misi Pembangunan NTB tidak mengalami perubahan, dengan Visi “*Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang*”. “NTB GEMILANG” mengandung spirit bahwa pemerintah dan masyarakat Provinsi NTB berkeyakinan dapat berperan penting di kancah nasional dan internasional dengan komitmen bahwa percepatan pembangunan harus terus diikhtiarkan guna mewujudkan Provinsi NTB yang tertata rapi sebagai tempat hunian menyenangkan, masyarakatnya berdaya saing, tangguh dan berbudi luhur, serta pemerintahannya yang berorientasi pada pelayanan publik.

Telah banyak capaian pembangunan yang dihasilkan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu dan di dua tahun pertama kepemimpinan Saya yang harus kita syukuri, baik pada aspek pelayanan dasar, pemenuhan infrastruktur, maupun pengelolaan sumberdaya alam, meskipun berbagai cobaan dan bencana datang silih berganti, seperti gempa bumi dan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini berdampak langsung pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat di NTB. Namun Kita tetap harus menyadari, bahwa tantangan ke depan semakin berat dan pekerjaan kita masih sangat banyak yang harus dituntaskan. Kita dituntut untuk terus menjaga kebersamaan, berfikir cerdas, bekerja keras dan bersungguh-sungguh, serta merawat sikap konsisten dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Untuk itu dibutuhkan dukungan semua pihak dalam memberikan partisipasi dan kinerja terbaik demi kemaslahatan masyarakat NTB ke depan. Inshaa Allah segenap ikhtiar Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wata’ala. Tuhan Yang Maha Kuasa.

***Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Mataran, 11 Februari 2021  
Gubernur Nusa Tenggara Barat  
  
H. ZULKIEFLIMANSYAH



PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019- 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019- 2023 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
  - b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019- 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;
  10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
  11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1);



Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
dan  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
- BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;
- BAB V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
- BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
- BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- BAB IX : Penutup.

2. Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 11 Februari 2021  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 11 Februari 2021  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (2-40/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H.  
NIP. 19651231 199303 1 135





PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 20019  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019-2023

1. UMUM

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam RPJM Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan RPJM Daerah. (2) Dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian/Lembaga melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Nusa Tenggara Barat, maka harus berpedoman dan menyesuaikan dengan RPJMN yang telah ditetapkan. Arah pembangunan jangka menengah daerah diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdayasaing.

Sesuai dengan ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa Pemerintah Daerah dalam penyusunan rancangan awal RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. maka Pemerintah Provinsi NTB perlu menyusun penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2019-2023.



2. PASAL DEMI PASAL

1. Pasal I

Cukup jelas

2. Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 171



## DAFTAR ISI

<b>SAMBUTAN</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>2</b>
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya.....	7
1.4. Maksud dan Tujuan.....	10
1.5. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b> .....	<b>13</b>
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	13
2.1.1. Aspek Geografi.....	13
2.1.2. Aspek Demografi.....	23
2.1.3. Pengembangan Wilayah.....	26
2.1.4. Pengembangan Kawasan Strategis.....	38
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	43
2.2.1. Fokus Perkembangan dan Pemerataan Ekonomi.....	43
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat.....	50
2.3. Aspek Pelayanan Umum.....	68
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	68
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	81
2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	119
2.3.4. Fokus Layanan Urusan Penunjang.....	128
2.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	143
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	143
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	144
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi.....	154
2.5. Pencapaian RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	157
2.5.1. Pencapaian RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013- 2018.....	157
2.5.2. Pencapaian RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 Pada Tahun 2019.....	162
2.6. Pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	167





2.7	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	194
<b>BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....</b>		<b>197</b>
3.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu .....	197
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD .....	197
3.1.2.	Neraca Daerah.....	217
3.2.	Kebijakan Pengelolaan Masa Lalu.....	224
3.3.	Proyeksi Keuangan Tahun 2019-2023 .....	224
3.3.1.	Proyeksi Pendapatan Daerah .....	229
3.3.2.	Proyeksi Belanja Daerah .....	231
3.3.3.	Proyeksi Pembiayaan Daerah.....	232
3.3.4.	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah.....	232
3.4.	Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya .....	236
3.4.1.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).....	236
3.4.2.	Kolaborasi APBD Kabupaten/Kota .....	236
3.4.3.	Obligasi.....	236
3.4.4.	Pinjaman Daerah.....	237
3.4.5.	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).....	238
<b>BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH .....</b>		<b>242</b>
4.1.	Permasalahan Pembangunan .....	242
4.1.1.	Urusan Wajib.....	242
4.1.2.	Urusan Pilihan .....	252
4.1.3.	Urusan Penunjang.....	254
4.2.	Isu Strategis Daerah .....	254
4.2.1.	Analisis Isu Strategis Global .....	255
4.2.2.	Analisis Isu Strategis Nasional .....	259
4.2.3.	Analisis Isu Strategis Regional .....	259
4.2.4.	Isu Strategis Provinsi NTB.....	261
<b>BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....</b>		<b>265</b>
5.1.	Visi.....	265
5.2.	Misi.....	266
5.3.	Tujuan dan Sasaran.....	268
5.3.1.	Arahan, Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional.....	268
5.3.2.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	274
<b>BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>		<b>283</b>
6.1.	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional .....	283
6.2.	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah .....	289
6.3.	Program Pembangunan Daerah.....	295
6.3.1.	Program Strategis dan Program Unggulan Daerah.....	295



6.3.2. Program Pembangunan Daerah.....	299
6.3.3. Integrasi Program Unggulan ke dalam Program Pembangunan Daerah .....	303
6.4. Pagu Indikatif Pendanaan Program Pembangunan Daerah .....	311
6.5. Pola Hubungan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Provinsi NTB.....	362
<b>BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>366</b>
7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 .....	366
7.2. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 .....	431
<b>BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....</b>	<b>462</b>
8.1. Indikator Kinerja Utama.....	462
8.2. Indikator Kinerja Daerah.....	463
<b>BAB IX PENUTUP.....</b>	<b>469</b>
9.1. Pedoman Transisi.....	469
9.2. Kaidah Pelaksanaan .....	469





## DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Luas Wilayah Provinsi NTB Menurut Pulau Tahun 2019.....	13
Tabel 2-2 Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Th 2019 .....	13
Tabel 2-3 Inventarisasi Cekungan Air Tanah di Provinsi NTB.....	14
Tabel 2-4 Status Penyediaan Air Provinsi NTB .....	15
Tabel 2-5 Lokasi Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor .....	16
Tabel 2-6 Lokasi Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi.....	16
Tabel 2-7 Lokasi Kawasan Rawan Bencana Tsunami .....	17
Tabel 2-8 Lokasi Kawasan Rawan Bencana Angin Topan.....	18
Tabel 2-9 Lokasi Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang.....	18
Tabel 2-10 Lokasi Kawasan Rawan Bencana Kekeringan.....	19
Tabel 2-11 Lokasi Kawasan Rawan Bencana Akibat Kesalahan Manusia .....	19
Tabel 2-12 Jumlah dan Laju Penduduk Provinsi NTB Tahun 2015-2019.....	23
Tabel 2-13 Distribusi Penduduk Provinsi NTB Berdasarkan.....	23
Tabel 2-14 Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota .....	24
Tabel 2-15 Penduduk Usia Kerja serta Dependency Ratio Tahun 2015–2019 .....	25
Tabel 2-16 Rencana Sistem Pusat Perkotaan Provinsi Nusa Tenggara Barat .....	27
Tabel 2-17 PDRB ADHK Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTB Tahun 2015-2019 (Rp. Milyar).....	44
Tabel 2-18 Kontribusi Setiap Sektor terhadap PDRB Provinsi NTB.....	44
Tabel 2-19 Pertumbuhan Ekonomi utk Setiap Sektor di Provinsi NTB .....	45
Tabel 2-20 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019 (dalam ribuan orang) .....	50
Tabel 2-21 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Penduduk (P0) Provinsi NTB menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019 (Persen).....	51
Tabel 2-22 Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019 (Rp per kapita per bulan).....	53
Tabel 2-23 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019 .....	54
Tabel 2-24 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019 .....	54
Tabel 2-25 Perkembangan Komponen IPM Provinsi NTB Tahun 2015-2019 .....	57
Tabel 2-26 Perkembangan Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas..	58
Tabel 2-27 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2015 – 2019 .....	59
Tabel 2-28 Tabel Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Usia 25 tahun ke atas Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2015-2019.....	59
Tabel 2-29 Umur Harapan Hidup Provinsi NTB Tahun 2015 – 2019.....	60
Tabel 2-30 Tabel Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2015-2019 .....	61
Tabel 2-31 Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Provinsi NTB Tahun 2019 ...	62
Tabel 2-32 Prevalensi Kurang Gizi Tahun di Provinsi-NTB Thn 2015-2019 .....	62



Tabel 2-33 TPAK dan TPT di Provinsi NTB Thn 2015-2019.....	63
Tabel 2-34 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Sektor Ekonomi/Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2019 (Persen).....	65
Tabel 2-35 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2015-2019.....	67
Tabel 2-36 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi NTB Tahun 2015-2019.....	68
Tabel 2-37 Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Provinsi NTB Tahun 2015-2019....	68
Tabel 2-38 Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi NTB Tahun 2015 -2019 .....	69
Tabel 2-39 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi NTB Thn 2015-2019 .....	69
Tabel 2-40 Jumlah Kasus Kematian Bayi (AKB) di Prov. NTB Thn 2015-2019.....	71
Tabel 2-41 Proporsi Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Provinsi NTB Tahun 2015-2019.....	72
Tabel 2-42 Jumlah Kasus Kematian Ibu (AKI) di Prov. NTB Tahun 2015-2019.....	72
Tabel 2-43 Proporsi Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Provinsi NTB Tahun 2015-2019 .....	72
Tabel 2-44 Persentase Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Provinsi NTB Tahun 2018 .....	74
Tabel 2-45 Panjang Jalan Provinsi NTB menurut Jenis dan Kondisi Tahun 2019..	74
Tabel 2-46 Jumlah dan Kondisi Jembatan di Provinsi NTB Tahun 2019 .....	75
Tabel 2-47 Data Penanganan Rumah Tidak Layak Huni menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2015-2019 .....	77
Tabel 2-48 Jumlah Bencana yang Terjadi di Provinsi NTB Tahun 2015-2019.....	78
Tabel 2-49 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) menurut .....	80
Tabel 2-50 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di .....	80
Tabel 2-51 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Provinsi NTB.....	82
Tabel 2-52 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi NTB .....	82
Tabel 2-53 perkembangan kasus kekerasan terhadap anak menurut kabupaten/kota Tahun 2017-2019.....	84
Tabel 2-54 Luas Lahan Sawah dan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan..	84
Tabel 2-55 Kualitas Konsumsi Pangan Penduduk NTB Tahun 2015-2019 .....	86
Tabel 2-56 Ketersediaan Energi dan Protein Provinsi NTB Tahun 2015-2019.....	87
Tabel 2-57 Cadangan Pangan Provinsi NTB 2015-2019 .....	88
Tabel 2-58 Perkembangan Harga Pangan ditingkat Pengumpul di Provinsi NTB Tahun 2015-2019.....	88
Tabel 2-59 Data Arus Keluar Masuk Komoditas di Provinsi NTB Tahun 2015-2019 .....	89
Tabel 2-60 Sertifikasi Prima 3 dan Registrasi Produk Dalam Tahun 2015-2019...	91
Tabel 2-61 Jasa Ekosistem Pangan Provinsi NTB .....	91
Tabel 2-62 Status Penyediaan Pangan Provinsi NTB.....	91
Tabel 2-63 Status Penyediaan Air Provinsi NTB .....	92
Tabel 2-64 Jumlah Pendaftaran Tanah Menurut Jenis di provinsi NTB .....	93





Tabel 2-65 Rekapitulasi Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Barat S/D Bulan Desember 2019 .....	93
Tabel 2-66 Angka Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2015-2019 .....	94
Tabel 2-67 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk NTB Tahun 2015-2019 .....	96
Tabel 2-68 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Provinsi NTB Tahun 2015-2019.....	96
Tabel 2-69 Jumlah Armada Antar Kota dalam Provinsi Tahun 2019 .....	98
Tabel 2-70 Rute Angkutan Laut Provinsi Nusa Tenggara Barat .....	99
Tabel 2-71 Rute Angkutan Darat Provinsi Nusa Tenggara Barat .....	100
Tabel 2-72 Rute Angkutan Udara Provinsi Nusa Tenggara Barat .....	102
Tabel 2-73 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Korban Meninggal Dunia Di NTB Tahun 2015 - 2019 .....	103
Tabel 2-74 Rasio Fatalitas Provinsi NTB Tahun 2015 – 2019 .....	103
Tabel 2-75 Kondisi Koperasi di Provinsi NTB Tahun 2015-2019 .....	106
Tabel 2-76 Jumlah Izin dan Non Izin yang Diterbitkan Tahun 2015 – 2019.....	107
Tabel 2-77 Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor di Provinsi NTB Tahun 2015 – 2019 .....	109
Tabel 2-78 Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor di Provinsi NTB Tahun 2015- 2019 .....	110
Tabel 2-79 Realisasi Investasi PMDN Menurut Kab/Kota Tahun 2015 – 2019 ...	110
Tabel 2-80 Realisasi Investasi PMA Menurut Kab./Kota Tahun 2015 – 2019.....	111
Tabel 2-81 Perkembangan Jenis Perizinan dan Waktu Penyelesaian Perizinan Tahun 2015 – 2019 .....	111
Tabel 2-82 Prestasi Olahraga Atlet Provinsi NTB Tahun 2015 - 2019 .....	113
Tabel 2-83 Jumlah Prasarana Olahraga di Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 ....	114
Tabel 2-84 Perkembangan Pranata Adat Yang Terbentuk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 – 2019.....	116
Tabel 2-85 Pengunjung Museum Negeri Provinsi NTB Tahun 2015-2019.....	116
Tabel 2-86 Jumlah Pengunjung ke Perpustakaan dan Anggota Perpustakaan Tahun 2016 – 2019 .....	117
Tabel 2-87 Jumlah Perpustakaan Komunitas Di NTB Tahun 2014-2019.....	117
Tabel 2-88 Upaya Pengelolaan Arsip Tahun 2016 – 2019 .....	118
Tabel 2-89 Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Per Komoditas Tahun 2016 – 2019 .....	119
Tabel 2-90 Nilai Tukar Nelayan, Angka Konsumsi Ikan, Proporsi Tangkapan Ikan Dalam Batasan Biologis Yang Aman dan Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Provinsi NTB Tahun 2015 – 2019 .....	120
Tabel 2-91 Angka Kunjungan Wisatawan dan Rata-rata Lama Menginap Pada Hotel Bintang Tahun 2015-2019.....	121
Tabel 2-92 Produksi Tanaman Pangan Tahun 2015-2019 .....	122
Tabel 2-93 Produksi Tanaman Hortikultura Tahun 2015-2019.....	122
Tabel 2-94 Produksi Komoditi Tanaman Perkebunan Tahun 2015 -2019 .....	122



Tabel 2-95 Kelembagaan Pelaku Utama Pertanian Per Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2018 .....	123
Tabel 2-96 Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Menurut Jenis Hasilnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019 .....	124
Tabel 2-97 Luas Rehabilitasi Hutan & Lahan, Kerusakan Kawasan Hutan dan Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Keanekaragaman Hayati.....	125
Tabel 2-98 Perkembangan Ekspor Tahun 2015 - 2019 .....	125
Tabel 2-99 Volume dan Nilai Ekspor Menurut Jenis Komoditi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019 .....	126
Tabel 2-100 Negara Tujuan dan Nilai Ekspor Nusa Tenggara Barat .....	126
Tabel 2-101 Operasi Pasar 2015-2019 .....	127
Tabel 2-102 Perkembangan Industri NTB Tahun 2015-2019.....	127
Tabel 2-103 Perkembangan Transmigran Keluar Provinsi NTB dan Tujuan Daerah Tahun 2015 – 2019 .....	128
Tabel 2-104 Tingkat Penyelesaian Aduan Pelayanan Publik Tahun 2015-2019	129
Tabel 2-105 Jumlah Perda/Perbup/Perwal yang Dikaji Tahun 2015 - 2019 .....	130
Tabel 2-106 Capaian Indikator Kinerja Bidang Perencanaan Pembangunan Tahun 2015-2019.....	134
Tabel 2-107 Penetapan APBD Provinsi NTB Tahun 2015-2019 .....	137
Tabel 2-108 Proporsi Realisasi Komponen PAD Terhadap Total PAD Tahun 2015-2019 .....	138
Tabel 2-109 Persentase capaian pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB) Tahun 2017-2019.....	143
Tabel 2-110 Perkembangan Kondisi Jalan Provinsi NTB Tahun 2015-2019.....	145
Tabel 2-111 Data Jumlah Penumpang Angkutan Udara dan Laut Tahun 2015-2019 .....	145
Tabel 2-112 Kawasan Rawan Banjir di Provinsi NTB.....	147
Tabel 2-113 Kawasan Rawan Kekeringan di Provinsi NTB .....	147
Tabel 2-114 Banyak Bank Menurut Jenis Bank di Provinsi NTB Tahun 2015-2019 .....	148
Tabel 2-115 Jumlah Restoran di Provinsi NTB Tahun 2014-2018 .....	149
Tabel 2-116 Jumlah Hotel Bintang Tahun 2015 -2019.....	150
Tabel 2-117 Jumlah Hotel Non Bintang Tahun 2015 -2019 .....	151
Tabel 2-118 Cakupan Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan.....	151
Tabel 2-119 Rasio Ketersediaan Daya Listrik .....	152
Tabel 2-120 Jumlah Pelanggan Listrik Dari PLN Cabang Mataram, Sumbawa dan Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015-2019 .....	152
Tabel 2-121 Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2019 .....	153
Tabel 2-122 Rekapitulasi Kriminalitas di Provinsi NTB Tahun 2015-2019 .....	155
Tabel 2-123 Konflik Sosial yang Terjadi di Provinsi NTB Tahun 2019 .....	155
Tabel 2-124 Evaluasi 31 Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD NTB Tahun 2013-2018 .....	157





Tabel 2-125 Evaluasi terhadap 90 Indikator Kinerja Daerah RPJMD NTB Tahun 2019-2023 .....	162
Tabel 2-126 Capaian Indikator SDGs di Provinsi NTB Tahun 2017-2019 .....	167
Tabel 2-127 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2017 .....	194
Tabel 3-1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi APBD Provinsi NTB Tahun 2015-2019 .....	201
Tabel 3-2 Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2015 – 2019 .....	204
Tabel 3-3 Proporsi Realisasi Komponen PAD Terhadap Total PAD Tahun 2015-2019 .....	206
Tabel 3-4 Proporsi Realisasi Komponen Dana Perimbangan Terhadap Total Dana Perimbangan Tahun 2015 – 2019 .....	207
Tabel 3-5 Proporsi Realisasi Komponen Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2015 – 2020 .....	209
Tabel 3-6 Analisis Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Nusa Tenggara Barat .....	210
Tabel 3-7 Proporsi Realisasi Komponen BTL Terhadap Total BTL .....	211
Tabel 3-8 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019 .....	212
Tabel 3-9 Proporsi Realisasi Komponen BL Terhadap Total BL Tahun. 2015–2019 .....	215
Tabel 3-10 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi NTB Tahun 2015-2019 .....	216
Tabel 3-11 Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode Tahun 2015-2019 .....	217
Tabel 3-12 Neraca dan Pertumbuhan Masing-Masing Pos Neraca Daerah Provinsi NTB Tahun 2015-2019 .....	218
Tabel 3-13 Proporsi Pos Asset terhadap Total Asset Provinsi NTB .....	222
Tabel 3-14 Tabel Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023 (Struktur Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005) .....	225
Tabel 3-15 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun 2021-2023 (Struktur Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019) .....	228
Tabel 3-16 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat .....	232
Tabel 3-17 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 .....	233
Tabel 5-1 Keterkaitan dan Keselarasan Misi Pembangunan Nasional dan Daerah .....	267
Tabel 5-2 Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 ....	269
Tabel 5-3 Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2020-2024 .....	271



Tabel 5-4 Keselarasan Tujuan Pembangunan Provinsi NTB dalam RPJMD Tahun 2019-2023 dengan Arah Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional .....	275
Tabel 5-5 Misi, Tujuan dan Sasaran, Indikator Tujuan dan Sasaran, serta Target Capaiannya Tahun 2019-2023 .....	277
Tabel 6-1 Daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project) RPJMN 2020-2024 yang berpotensi dilaksanakan di Provinsi NTB .....	288
Tabel 6-2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 .....	289
Tabel 6-3 Program Strategis dan Program Unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 .....	296
Tabel 6-4 Program pembangunan daerah provinsi NTB yang ditetapkan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 dan telah mempertimbangkan Permendagri 13 Tahun 2006 .....	303
Tabel 6-5 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi NTB Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 .....	312
Tabel 6-6 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi NTB Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 .....	336
Tabel 7-1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan PP 58 Tahun 2005 .....	368
Tabel 7-2 Indikasi Rencana Kebutuhan Pendanaan Program Menurut Urusan Pemerintahan di Provinsi NTB Tahun 2019-2020 Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 .....	369
Tabel 7-3 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2023 Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 .....	431
Tabel 7-4 Indikasi Rencana Kebutuhan Pendanaan Program Menurut Urusan Pemerintahan Provinsi NTB Tahun 2021-2023 Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 .....	432
Tabel 8-1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi NTB Tahun 2019-2023 .....	462
Tabel 8-2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi NTB .....	463





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya .....	8
Gambar 2-1 Peta Daya Jasa Ekosistem Air Provinsi NTB.....	15
Gambar 2-2 Peta 1 Multi Rawan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	21
Gambar 2-3 Peta 2 Multi Rawan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	22
Gambar 2-4 Peta Jumlah Penduduk Provinsi NTB Tahun 2019 .....	24
Gambar 2-5 Struktur Umur Penduduk NTB Tahun 2019 .....	26
Gambar 2-6 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB dengan Tambang Nonmigas dan Tanpa Tambang Nonmigas Tahun 2013-2019 .....	46
Gambar 2-7 Peta Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2019 .....	47
Gambar 2-8 Perkembangan Inflasi Provinsi NTB Tahun 2015-2019.....	48
Gambar 2-9 PDRB Per Kapita ADHK Tahun 2010 (Ribu Rupiah) Tahun 2015-2019 .....	48
Gambar 2-10 Indeks Gini Perkotaan, Perdesaan, Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi NTB 2015-2019.....	49
Gambar 2-11 Perkembangan Indeks Gini Provinsi NTB dan Indonesia Tahun 2013-2017 .....	49
Gambar 2-12 Peta Jumlah Penduduk Miskin Provinsi NTB menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019.....	51
Gambar 2-13 Peta Persentase Penduduk Miskin di Provinsi NTB Tahun 2019 ....	52
Gambar 2-14 Jumlah (000) dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTB Tahun 2015-2019 .....	52
Gambar 2-15 Peta Indeks Kearifan Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2019 .....	55
Gambar 2-16 Perkembangan IPM Provinsi NTB Tahun 2015-2019.....	56
Gambar 2-17 Posisi Relatif IPM NTB Tahun 2019 .....	57
Gambar 2-18 Peta Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi NTB Tahun 2019.....	60
Gambar 2-19 Peta UHH Provinsi NTB Tahun 2019 .....	61
Gambar 2-20 Peta Jumlah Gizi Buruk Provinsi NTB Tahun 2019 .....	63
Gambar 2-21 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Provinsi NTB Tahun 2015 -2019 .....	64
Gambar 2-22 Peta Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTB Tahun 2019.....	65
Gambar 2-23 Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi NTB Tahun 2019 .....	66
Gambar 2-24 Perkembangan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2015-2019.....	67
Gambar 2-25 Angka Putus Sekolah (Droup Out) Tahun 2014/2015 - 2018/2019	70
Gambar 2-26 Prevalensi Kurang Gizi NTB Tahun 2017-2019.....	73
Gambar 2-27 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak Dan Terjangkau Tahun 2018 .....	76



Gambar 2-28 Perkembangan Jumlah Rumah Layak Huni yang Ditangani Thn 2015-2019 .....	76
Gambar 2-29 Jumlah Konflik Sosial di Provinsi NTB Tahun 2015-2019 .....	77
Gambar 2-30 Indeks Demokrasi di Provinsi NTB dan Indonesia Thn 2014-2018 .	79
Gambar 2-31 Perkembangan Indeks Demokrasi Menurut Aspeknya di Provinsi NTB Tahun 2014-2018 .....	79
Gambar 2-32 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi NTB Tahun 2015-2019 .....	81
Gambar 2-33 Nilai Capaian Aspek Pembentuk IDG Provinsi NTB dan Indonesia Tahun 2018 .....	83
Gambar 2-34 Perkembangan Pola Pangan Harapan Provinsi NTB Tahun 2015 – 2019 .....	85
Gambar 2-35 Konsumsi Beras dan Umbi-umbian 2015-2019 .....	87
Gambar 2-36 Peta Daya Jasa Ekosistem Air Provinsi NTB .....	92
Gambar 2-37 Indeks Pembangunan Desa di Provinsi NTB Tahun 2018 .....	94
Gambar 2-38 Klasifikasi Desa di Provinsi NTB Tahun 2019.....	95
Gambar 2-39 Nilai Dimensi IPD di Provinsi NTB Tahun 2018 .....	95
Gambar 2-40 Unmet Need Pelayanan Kesehatan Provinsi NTB dan Indonesia Tahun 2015-2018 .....	97
Gambar 2-41 Proporsi Individu yang Menggunakan Internet menurut Provinsi Tahun 2018 .....	104
Gambar 2-42 Peta Jumlah Koperasi Aktif di Provinsi NTB Tahun 2019 .....	106
Gambar 2-43 Jumlah Izin dan Nonizin selama Periode Tahun 2015-2019 .....	107
Gambar 2-44 Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB Tahun 2015-2019 (Rp.Milyar) .....	108
Gambar 2-45 Produksi Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (ribuan ton), Tahun 2016-2019 .....	119
Gambar 2-46 Perkembangan Populasi Sapi di Provinsi NTB Tahun 2015-2019 .	123
Gambar 2-47 Perkembangan Realisasi PAD Provinsi NTB Tahun 2015-2019.....	138
Gambar 2-48 Nilai Tukar Petani NTB tahun 2015-2019.....	144
Gambar 2-49 Jumlah Penumpang Angkutan Laut di Provinsi NTB Tahun 2015- 2019 .....	146
Gambar 2-50 Perkembangan Rasio Elektrifikasi tahun 2015-2019 .....	153
Gambar 3-1 Realisasi APBD Provinsi NTB Tahun 2015-2019 .....	203
Gambar 3-2 Perkembangan Realisasi Kontribusi Pos Pendapatan terhadap Total Pendapatan Tahun 2015-2019.....	204
Gambar 3-3 Perkembangan Realisasi PAD Provinsi NTB Tahun 2015-2019.....	205
Gambar 3-4 Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Provinsi NTB .....	207
Gambar 3-5 Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Provinsi NTB Tahun 2015-2019.....	208
Gambar 3-6 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun 2015- 2019 .....	209





Gambar 3-7 Perkembangan Realisasi BTL Provinsi NTB Tahun 2015-2019.....	211
Gambar 3-8 Perkembangan Realisasi Belanja Langsung Provinsi NTB Tahun 2015-2019 .....	214
Gambar 3-9 Perkembangan Asset Daerah Provinsi NTB Tahun 2015-2019 .....	221
Gambar 3-10 Perkembangan Asset Daerah Provinsi NTB Tahun 2015-2019 .....	223
Gambar 3-11 Perkembangan Ekuitas Dana Daerah Provinsi NTB Tahun 2015-2019 .....	223
Gambar 3-12 Proyeksi Kontribusi Pendapatan Daerah Provinsi NTB Menurut Komponen Tahun 2019-2023 .....	229
Gambar 3-13 Proyeksi Belanja Daerah Provinsi NTB Menurut Komponen .....	231
Gambar 6-1 Pola Hubungan Pemerintah, Swasta/Dunia Usaha dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Provinsi NTB.....	362



BAB

1



*Pendahuluan*





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) perlu menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan, baik rencana pembangunan jangka panjang maupun rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023. RPJMD ini merupakan periode perencanaan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025. RPJMD ini juga berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB Tahun 2009-2029, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025, disebutkan bahwa visi pembangunan jangka panjang Provinsi NTB adalah *“Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman, Maju dan Sejahtera”*, yang dilengkapi dengan 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat beriman, bermoral, berbudaya dan berkesadaran hukum.
2. Mewujudkan masyarakat sejahtera.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
4. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah.
5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang, dalam RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025 telah ditetapkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah tahap keempat yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia yang



berkualitas dan berdaya saing. Berpedoman kepada arahan kebijakan pembangunan tersebut, disusun RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dengan visi pembangunannya adalah “*Membangun NTB yang Gemilang*”, dilengkapi dengan 6 (enam) misi pembangunan sebagai berikut: NTB Tangguh dan Mantap, NTB Bersih dan Melayanai, NTB Sehat dan Cerdas, NTB Asri dan Lestari, NTB Sejahtera dan Mandisi, serta NTB Aman dan Berkah.

Pelaksanaan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 telah berlangsung hampir dua tahun, terjadi tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan yang sangat dinamis, disertai munculnya wabah Pandemi COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*), sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi, sosial budaya dan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengharuskan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 264 ayat 5) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPDP (Pasal 342), mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap dokumen RPJMD sebagai upaya untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai perubahan situasi dan kondisi yang terjadi.

Berdasarkan ketentuan di atas, beberapa pertimbangan perlunya dilakukan penyesuaian atau perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan di Provinsi NTB, terjadi tuntutan masyarakat dan kondisi pembangunan yang sangat dinamis, sehingga diperlukan peninjauan kembali terhadap indikator kinerja, indikator program, strategi, kebijakan dan program prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan.
2. Terjadinya wabah Pandemi COVID-19 yang berdampak langsung kepada perubahan aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
3. Perubahan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
4. Perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Adanya catatan dari hasil review Kementerian PANRB yang dituangkan ke dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Program Strategis





dan Unggulan Daerah dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 21);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);





22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 459);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun



- 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor Noreg Peraturan Daerah Provinsi NTB: 12/297/2017);
  33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 145, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1-108/2019);
  34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 13, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13-376/2019).

### **1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya**

Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), rencana pembangunan kabupaten/kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan provinsi, serta rencana pembangunan provinsi merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Dengan demikian dokumen RPJP Nasional merupakan pedoman penyusunan RPJP Provinsi, dokumen RPJP Provinsi merupakan pedoman penyusunan RPJP Kabupaten/Kota. Apabila RPJM Nasional merupakan turunan dari RPJP Nasional, maka RPJMD merupakan turunan dari RPJPD. Demikian halnya RPJM Nasional dijabarkan dalam RKP dan RPJMD dijabarkan dalam RKPd sebagai perencanaan tahunan. RPJM Nasional juga dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga berdurasi 5 tahunan, sedang RPJMD dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Penyusunan dokumen RPJMD Provinsi berpedoman pada RPJPN, RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu, dokumen RPJMD juga mengacu dan mempedomani dokumen RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025. Selama ini telah pula disusun berbagai dokumen pendukung perencanaan seperti Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang RTRW Kepulauan Nusa Tenggara, RTRW Provinsi NTB, RAD GRK, MDGs, RAD Penurunan Angka Kemiskinan dan dokumen lainnya, juga sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPJMD. Penyusunan RPJMD Provinsi NTB mempertimbangkan pula keterhubungannya dengan RPJMD Provinsi

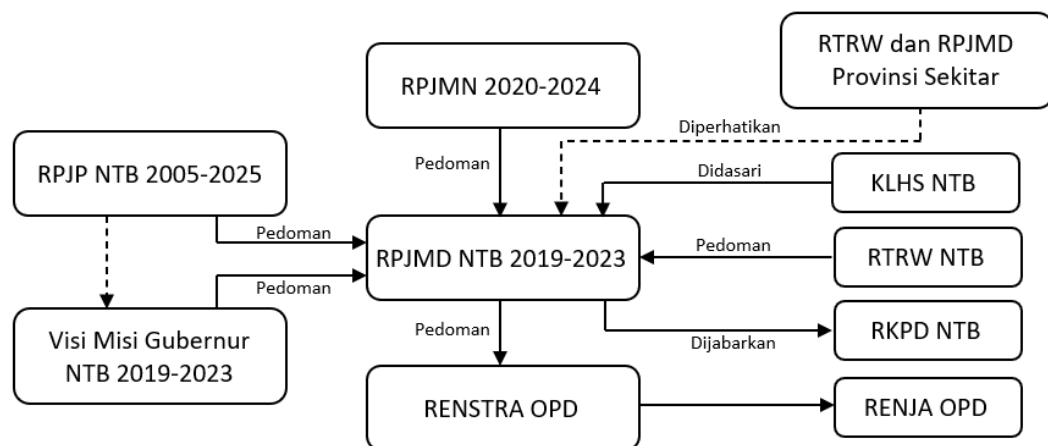




tetangga/berdekatan yaitu RPJMD Provinsi Bali dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hubungan antara RPJMD dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut (Gambar 1.1.):

1. Visi, misi, arah, tujuan, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah provinsi selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional.
2. Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi selaras dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam RTRW.
3. Arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi NTB memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dan pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lain sekitarnya.
4. Jangka waktu pembangunan jangka menengah daerah provinsi terhitung sejak Kepala Daerah dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
5. Dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD Provinsi.



Gambar 1-1 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Hubungan RPJMD dengan RPJMN:** Undang-Undang Nomor 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJPN dan RPJMN karena keberhasilan pembangunan di daerah akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana pembangunan nasional dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024) yang tertuang dalam RPJMN menjadi perhatian Pemerintah Provinsi NTB dalam merencanakan pembangunan daerah sesuai



situasi dan kondisi daerah, selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan melalui RKPD.

2. **Hubungan RPJMD dengan RPJPD:** RPJMD NTB Tahun 2019-2023 merupakan RPJMD keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD NTB Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah tahun 2019-2023, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang termuat dalam RPJPD Tahun 2005-2025.
3. **Hubungan RPJMD dengan RTRW:** Penyusunan RPJMD memperhatikan struktur dan pola ruang yang tertuang dalam RTRW Provinsi NTB Tahun 2009-2029 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program/kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang darat di Provinsi NTB.
4. **Hubungan RPJMD dengan RZWP3K:** Penyusunan RPJMD memperhatikan struktur dan pola ruang yang sesuai dengan RZWP3K Provinsi NTB Tahun 2017-2037 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program/pembangunan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang laut di Provinsi NTB.
5. **Hubungan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS):** Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Adanya KLHS akan memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan menjadi dasar perencanaan pembangunan yang memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan pembangunan.
6. **Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah:** RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dengan lingkup temporal 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD, yang disusun oleh setiap Kepala Perangkat Daerah di bawah koordinasi Kepala BAPPEDA Provinsi NTB, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
7. **Hubungan RPJMD dengan RKPD:** Pelaksanaan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari rencana kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan





musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten setiap tahunnya. Selanjutnya Kepala Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

- 8. Hubungan RPJMD Provinsi NTB dengan RPJMD Provinsi Tetangga**  
Penyusunan dan Pelaksanaan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan regional, diperlukan adanya koordinasi pembangunan dengan RPJMD dan RTRW Provinsi tetangga, yakni Provinsi Bali dan Provinsi NTT, baik menyangkut teritorial maupun isu strategis regional lainnya, terutama isu lingkungan, kemaritiman dan sosioekonomi.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah untuk menyediakan pedoman dalam mengarahkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sesuai situasi dan kondisi yang berubah, baik dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan wilayah sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang ditetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2019-2023, dan selanjutnya menjadi dasar untuk menyusun dokumen perencanaan lainnya.

Tujuan penyusunan perubahan RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan daerah jangka menengah, serta indikator kinerja pembangunan sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi daerah.
2. Menyediakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan perencanaan penganggaran.
3. Menyediakan pedoman atau arahan untuk penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB.
4. Menjamin terwujudnya keterpaduan antara perencanaan pembangunan provinsi dengan perencanaan pembangunan nasional, antara provinsi dengan kabupaten/kota, serta antar provinsi yang berbatasan.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:



1. BAB I PENDAHULUAN: Menyajikan latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH: Menyajikan kondisi geografis, administratif, sosial kependudukan serta pencapaian pembangunan 5 tahun terakhir di Provinsi NTB, yang dikelompokkan ke dalam tinjauan: aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.
3. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH: Menyajikan hasil pengolahan dan analisis data tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi: kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.
4. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH: Menyajikan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi NTB.
5. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN: Menyajikan visi dan misi pembangunan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah terpilih, tujuan pembangunan serta sasaran yang ingin dicapai di akhir tahun RPJMD.
6. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH: Menyajikan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi NTB dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah menuju tercapainya visi dan misi pembangunan.
7. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH: Menguraikan program prioritas Perangkat Daerah, mengacu kepada Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yang dikelompokkan pada masing-masing urusan serta target program dan kebutuhan pendanaan dalam rangka mencapai visi dan misi, indikator kinerja, pagu indikatif target, serta perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.
8. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH: Menyajikan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah serta target capaian indikator kinerja per tahun.
9. BAB IX PENUTUP: Menyajikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD, terutama untuk tahun akhir implementasi RPJMD (tahun 2023) dan peralihannya ke tahun awal RPJMD berikutnya (tahun 2024).



BAB

2



*Gambaran Umum  
Kondisi Daerah*





## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1. Aspek Geografi dan Demografi

#### 2.1.1. Aspek Geografi

##### A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19 km<sup>2</sup> terdiri dari daratan seluas 20.124,48 km<sup>2</sup> (40,81%) dan perairan laut seluas 29.187,71 km<sup>2</sup> (59,19%) dengan panjang garis pantai 2.333 km. Terdapat dua pulau besar yaitu Pulau Lombok seluas 4.699,83 km<sup>2</sup> (23,35%) dan Pulau Sumbawa seluas 15.424,65 km<sup>2</sup> (76,65%) yang dikelilingi oleh 378 pulau-pulau kecil (Gambar 2-1). Secara geografis, Provinsi NTB terletak antara 115°46' - 119°05' Bujur Timur dan 8°10'-9°5' Lintang Selatan dengan batas wilayah: sebelah utara Laut Jawa dan Laut Flores, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Selat Lombok & Provinsi Bali, dan sebelah timur Selat Sape & Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 2-1 Luas Wilayah Provinsi NTB Menurut Pulau Tahun 2019

Pulau	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase
Pulau Lombok	4.699,83	23,35
Pulau Sumbawa	15.424.65	76,65
<b>NTB</b>	<b>20.124,48</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020: NTB Dalam Angka 2020.

Secara Administratif Provinsi NTB terdiri atas 8 kabupaten dan 2 kota dengan 117 kecamatan dan 1.143 desa/kelurahan. Jumlah kecamatan, desa/kelurahan dan luas wilayah menurut kabupaten/kota di Provinsi NTB disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-2 Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Th 2019

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1	Kab. Lombok Barat	10	122	105.387,00
2	Kab. Lombok Tengah	12	139	116.958,00
3	Kab. Lombok Timur	21	254	160.555,00
4	Kab. Sumbawa	24	166	664.398,00
5	Kab. Dompu	8	81	232.000,00
6	Kab. Bima	18	192	438.940,00
7	Kab. Sumbawa Barat	8	65	184.902,00
8	Kab. Lombok Utara	5	33	80.953,00
9	Kota Mataram	6	50	6.130,00
10	Kota Bima	5	41	22.225,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>117</b>	<b>1.143</b>	<b>2.012.448,00</b>

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2020: NTB Dalam Angka 2020.





Topografi wilayah Provinsi NTB bervariasi dari 0 – 3.726 mdpl untuk Pulau Lombok dan 0 – 2.755 mdpl untuk Pulau Sumbawa, dengan klasifikasi ketinggian wilayah 0 - 100 mdpl sekitar 23,76% (seluas 478.911 Ha), ketinggian 100 - 500 mdpl sekitar 37,39% (seluas 753.612 Ha), ketinggian 500 - 1000 mdpl sekitar 15,25% (seluas 307.259 Ha) dan lebih dari 1000 mdpl 23,60% (seluas 475.533 Ha).

Geologi wilayah Provinsi NTB didominasi oleh batuan gunung api serta aluvium (resent). Batuan tertua berumur tersier sedangkan yang termuda berumur kuarter. Batuan tersier di Pulau Lombok terdiri dari perselingan batu pasir kuarsa, batu lempung, breksi, lava, tufa dengan lensa-lensa batu gamping, batu gamping, dan dasit. Batuan tersier di Pulau Sumbawa terdiri dari lava, breksi, tufa, andesit, batu pasir tufan, batu lempung, dasit, tonalit, tufa dasitan, batu gamping berlapis, batu gamping tufan, dan lempung tufan.

Sub satuan wilayah sungai/daerah aliran sungai (SSWS/ DAS) di satuan wilayah sungai Pulau Lombok dan satuan wilayah sungai Pulau Sumbawa, dibagi menjadi 18 SSWS/DAS berdasarkan SK Gubernur NTB Nomor 147 Tahun 1999. Pulau Lombok terdiri dari 4 (empat) SSWS meliputi: Dodokan, Menanga, Putih dan Jelateng. Sementara itu, Pulau Sumbawa terdiri dari 14 (empat belas) SSWS meliputi: Jereweh, Rea, Rhee, Moyo Hulu, P, Moyo, Empang, Hoddo, Banggo, Parado, Sari, Rimba, Baka, Bako, dan Beh. Inventarisasi cekungan air tanah di Provinsi NTB disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-3 Inventarisasi Cekungan Air Tanah di Provinsi NTB

No	Cekungan Air	Luas (Km <sup>2</sup> )	Air Tanah Bebas (Juta M <sup>3</sup> /Tahun)	Air Tanah Tertekan (Juta M <sup>3</sup> /Tahun)
1	Mataram – Selong	2.366	662	8
2	Tanjung – Sambelia	1.124	224	22
3	Sumbawa Besar	1.404	183	25
4	Empang	345	35	3
5	Pekat	977	220	10
6	Sanggar – Kilo	1.419	320	14
7	Dompu	375	63	6
8	Bima	1,102	165	16
9	Tawali – Sape	363	36	3

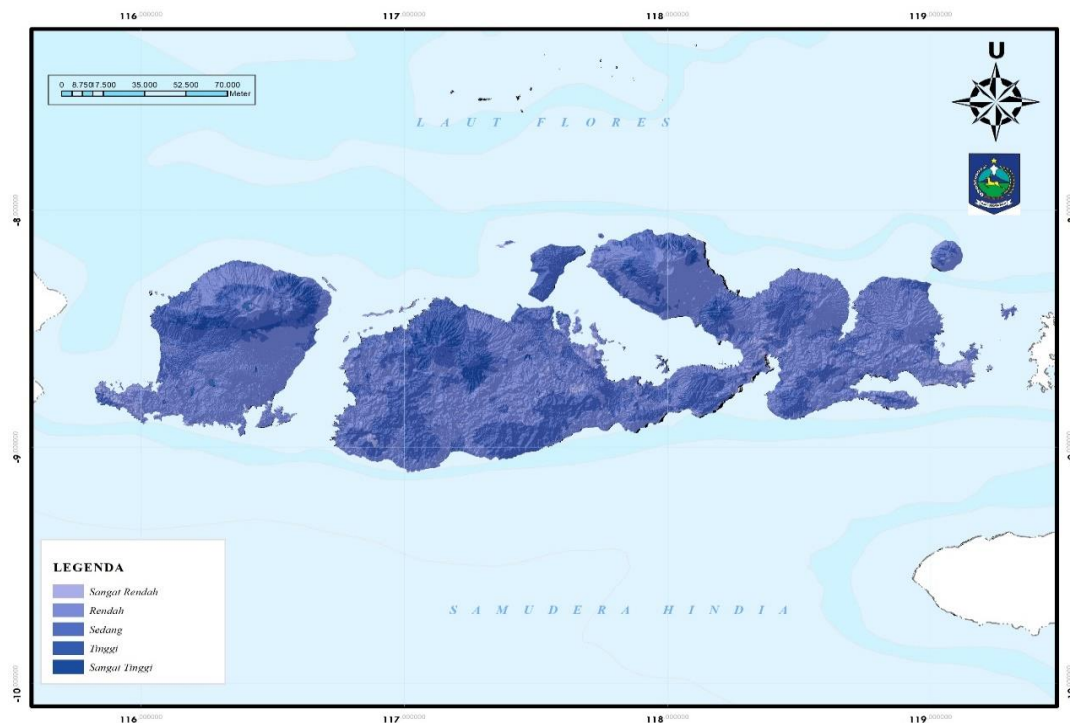
Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2010: PERDA RTRW Provinsi NTB Tahun 2009-2029.

Berdasarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada tahun 2017 temperatur udara maksimum di Provinsi NTB berkisar 33,2°C – 33,6°C, temperatur udara minimum 17°C – 21,4°C dan temperatur rata-rata 26,9°C – 27,6°C. Kelembaban udara rata-rata 78%-85%, kelembaban udara minimum 57% - 64% dan kelembaban udara maksimum 94% - 96%. Kecepatan angin rata-rata



3-5 knots, tekanan udara antara 1003,1 – 1009,8 mb, lamanya penyinaran matahari 69% - 79% dan curah hujan berkisar antara 1.775 mm – 2.874 mm.

Daya dukung air dihitung menggunakan metode jasa ekosistem, hasilnya berupa persentase lahan yang potensial dalam menghasilkan air. Kelas tinggi, sedang dan rendah menunjukkan penyediaan air di Provinsi NTB, disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2-1 Peta Daya Jasa Ekosistem Air Provinsi NTB

Untuk menggambarkan status kemampuan daya dukung air di Provinsi NTB, jumlah ketersediaan air selanjutnya dibandingkan dengan tingkat konsumsi, sehingga menghasilkan besaran selisih penyediaan (melampaui/ belum melampaui) daya tampung, seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-4 Status Penyediaan Air Provinsi NTB

Ketersediaan (m <sup>3</sup> )	Kebutuhan (m <sup>3</sup> )			Selisih (m <sup>3</sup> )	Status Ketersediaan
	Domestik	Lahan	Total		
4.735.817.287	190.426.032	8.204.726.871	8.395.152.903	3.659.335.615	Terlampai

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2019.

Kebutuhan total air di Provinsi NTB tahun 2019 sebanyak 8.395.152.903 m<sup>3</sup>, sedangkan ketersediaan air sebanyak 4.735.817.287 m<sup>3</sup>, sehingga berhasil melampaui kebutuhan dengan jumlah selisih 3.659.335.615 m<sup>3</sup>.





## B. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Rawan Bencana di Provinsi NTB disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2-5 Lokasi Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Longsor
<b>Rawan Tanah Longsor Tipe A:</b>	
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Kawasan sekitar Rinjani, Malimbu dan Sekotong
Kab. Lombok Tengah	Kawasan sekitar Rinjani bagian selatan
Kab. Lombok Timur	Kawasan sekitar Rinjani bagian timur dan sekitar Gunung Nangi
Kab. Sumbawa Barat	Kawasan sekitar Taliwang, Seteluk, Jereweh, Maluk dan Punik
Kab. Sumbawa	Kawasan sekitar Alas, Semongkat, Lenangguar dan Empang
Kab. Dompu	Kawasan Sekitar Tambora, Ranggo dan Paradowane
Kab dan Kota Bima	Kawasan sekitar Tambora Bagian timur, Bima dan Karumbu
<b>Rawan Tanah Longsor Tipe B:</b>	
Kab. Lombok Barat	Kawasan Sekitar Rinjani, Malimbu, Lembar dan Sekotong
Kab. Lombok Tengah	Kawasan sekitar Rinjani bagian selatan dan sekitar Kuta
Kab. Lombok Timur	Kawasan Sekitar Rinjani bagian timur dan sekitar Gunung Nangi
Kab. Dompu	Kawasan sekitar Tambora bagian barat
Kab. Bima	Kawasan sekitar Tambora bagian timur dan sekitar Gunung Kuta

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2020.

Tabel 2-6 Lokasi Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi

Lokasi	Kawasan Rawan Gunung Berapi
<b>Gunung Rinjani</b>	
Kab. Lombok Utara	Daerah Bahaya: Kecamatan Bayan dan Kampung Batusantek (sepanjang alur sungai Kokok Putih)
Kab. Lombok Timur	Daerah Bahaya: Kecamatan Aikmel, Sambelia, dan sepanjang alur Kokok Putih
<b>Gunung Tambora</b>	
Kab. Dompu	Daerah Bahaya: Daerah di sekitar kaldera dengan luas kurang lebih 58,7 km <sup>2</sup>
Kota Bima	Daerah Waspada: jalur sepanjang sungai Ngguwu kara, sungai Ngguwu Tula (ketiganya termasuk Desa Beringin Jaya) dan Sungai Hodo (Desa Kesi)



Lokasi	Kawasan Rawan Gunung Berapi
Kab. Bima	Daerah Waspada : jalur sepanjang sungai Oi Marai dan sungai Mango (Desa Kawinda Toi), sungai Panihi (Desa Kawinda Nae), dan sungai Sumba (Desa Labuhan Kenanga)
<b>Gunung Api Sangiang</b>	
Kab. Bima	Daerah terlarang : daerah yang termasuk dalam lingkaran dengan jari-jari kurang lebih 5,0 Km <sup>2</sup> yang berpusat di Puncak Doro Api yang diperluas sepanjang alur sungai kering Oi Sola, Oi sori Buntu, Sori Belanda, Sori Mbere, Sori Do Japa, Sori Panda, Sori Iso dan Sori Berano
	Daerah Bahaya I : hampir seluruh daratan pulau Sangiang termasuk dalam daerah ini, kecuali kampung Toro Panda yang berada di bagian selatan
	Daerah Bahaya II : daerah di sekeliling pantai pulau Sangiang

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2020.

Tabel 2-7 Lokasi Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Lokasi	Kawasan Rawan Tsunami
Kab. Lombok Barat	Kawasan Pesisir bagian selatan Kabupaten Lombok Barat
Kab. Lombok Tengah	Kawasan pesisir bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah yaitu Selong Belanak, Kuta, Tanjung Aan, Gerupuk dan Teluk Awang
Kab. Lombok Timur	Kawasan pesisir selatan Kabupaten Lombok Timur yaitu Ekas, Tanjung Ringgit, Tanjung Luar, Labuhan Haji
Kab. Sumbawa Barat	Kawasan pesisir bagian barat dan selatan yaitu Maluk, Benete, Tongo, Sejongong dan Sekongkong
Kab. Sumbawa	Kawasan pesisir bagian utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagian selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang
Kab. Dompu	Kawasan pesisir bagian barat dan selatan Kabupaten Dompu, yakni Calabai, Nangamiro dan Kilo, serta pantai Hu'u di pesisir bagian selatan
Kota Bima	Pantai bagian barat Kota Bima
Kab. Bima	Kawasan pesisir bagian timur dan selatan Kabupaten Bima, yakni Sape dan Lambu, Karumbu dan daerah sekitarnya

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2020.





Tabel 2-8 Lokasi Kawasan Rawan Bencana Angin Topan

Lokasi	Kawasan Rawan Angin Topan
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Kecamatan Gerung dsk, Sekotong Tengah, Darmada dsk, dan Bayan dsk
Kab. Lombok Timur	Kecamatan Gerung dsk, Sekotong Tengah, Darmada dsk, dan Bayan dsk
Kab. Sumbawa Barat	Kecamatan Brang Rea dsk
Kab. Sumbawa	Kecamatan Alas dsk, Unter Iwes dsk, Empang-Tarano dsk
Kab. Dompu	Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Dompu
Kab. Bima	Kecamatan Woha dsk, monta dsk, Woja dsk

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2020.

Tabel 2-9 Lokasi Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang

Lokasi	Kawasan Rawan Gelombang Pasang
Kota Mataram	Sepanjang pesisir bagaian barat yaitu Sekip dan Ampenan
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Sepanjang Pesisir Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara
Kab. Lombok Tengah	Pantai bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah yaitu Selong Belanak, Kuta Tanjung Aan, Gerupuk dan Pantai Awang
Kab. Lombok Timur	Pantai selatan dan timur Kabupaten Lombok Timur yaitu Ekas, Tanjung Ringgit, Tanjung Luar, Labuhan Haji, Labuhan Lombok
Kab. Sumbawa Barat	Pantai bagian barat dan selatan yaitu Maluk, Benete, Tongo, Sejong dan Sekongkang
Kab. Sumbawa	Pantai bagian utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagian selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang
Kab. Dompu	Pantai bagian barat Kabupaten Dompu, yakni Calabai, Nangamiro dan Kilo, serta Pantai Hu'u di pesisir bagian selatan
Kota Bima	Pantai bagian barat Kota Bima
Kab. Bima	Pantai bagian utara dan timur Kabupaten Bima, yakni Donggo dsk, Sape dan Lambu, Wera, Karumbu dan daerah sekitarnya

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2020.



Tabel 2-10 Lokasi Kawasan Rawan Bencana Kekeringan

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Kekeringan
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Kecamatan Lembar, Sekotong dan sekitarnya, Kedondong, Malimbu, Pemenang dan sekitarnya, Tanjung, Liuk- Kayangan-Selengen-Bayan, dan Medas
Kab. Lombok Tengah	Praya Barat, Praya Timur, Pujut, Praya Tengah, Janapria dan Praya Barat Daya
Kab. Lombok Timur	Keruak-Jerowaru-Sakra-Sakra Barat-Sakra Timur-Sikur, Labuhan Haji, Pringgabaya, Kecamatan Sambelia dan sekitarnya
Kab. Sumbawa Barat	Sejorong, Maluk, Jereweh-Endeh-Bertong Taliwang-Tepas-Seteluk-Labuhan Sepakeh
Kab. Sumbawa	Lunyuk Besar-Kopo-Batu Lanteh-Baturotok Punik, Alas-Penyengar-Utan-Potopedu-Rhee Loka, Lenangguar-Semongkat, Pototano-Labuhan-Serading-Batubulan-Lopok-Lape-Kalaning-Tanjungberu Pungkit, Plampang-Empang
Kab. Dompu	Kempo, Hu'u, Kilo dan Mbawi
Kab. dan Kota Bima	Sila, Paradowane, Bima dan Sekitarnya, Tawali, Sape, dan P.Sangiang

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2020.

Tabel 2-11 Lokasi Kawasan Rawan Bencana Akibat Kesalahan Manusia

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Bencana Akibat Kesalahan Manusia
Kota Mataram	Daerah Ampenan Utara, Kopajali, Sekitar Kekalik, Sungai Meninting, Sungai Midang, Sungai Ancar, Sungai Unus dan Sungai Jangkok
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Daerah Empol (Sekotong Tengah), Bayan, Gangga-Lempenge, sepanjang sungai Penggolong Rempek dan Anyar, Sungai Bentek, Menggala (Pemenang), Berora, Gerung dan Jembatan Kembar
Kab. Lombok Tengah	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah
Kab. Lombok Timur	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur
Kab. Sumbawa dan Sumbawa Barat	Sepanjang Brang Moyo di daerah Poto Tengke Moyo Hilir, Brang Beh di Lunyuk, Brang Rea di Taliwang, Brang Benete di Jereweh, Brang Labuhan Mapin di Alas, Brang Utan di Utan Rhee, Brang Muir di Plampang, Empang, Moyo Hulu, Ropang dan Lape Lopok
Kab. Dompu	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di Kabupaten Dompu
Kota Bima	Daerah di sepanjang pantai di Kota Raba, khususnya yang dekat dengan lembah sungai

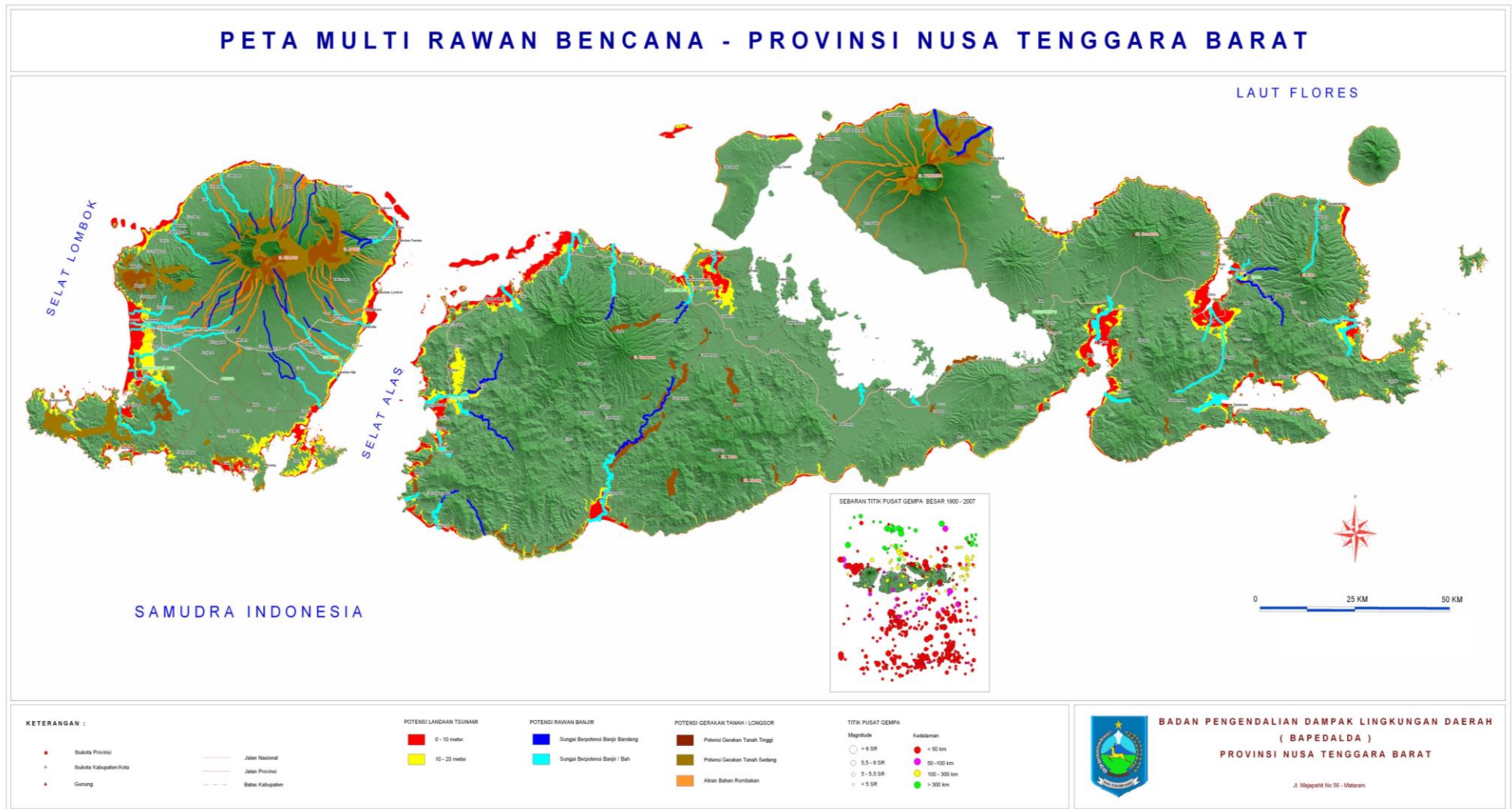


Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Bencana Akibat Kesalahan Manusia
Kab. Bima	Daerah di sepanjang aliran sungai di Sori Wawo Maria, daerah Sape dan sekitarnya, Karumbu, Lambu, Ntoke-Tawali, Wera, Jatiwangi, dan daerah sekitar aliran sungai lainnya di wilayah Kabupaten Bima

*Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2020.*

Secara spasial, kondisi kerawanan bencana di seluruh daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada gambar berikut.

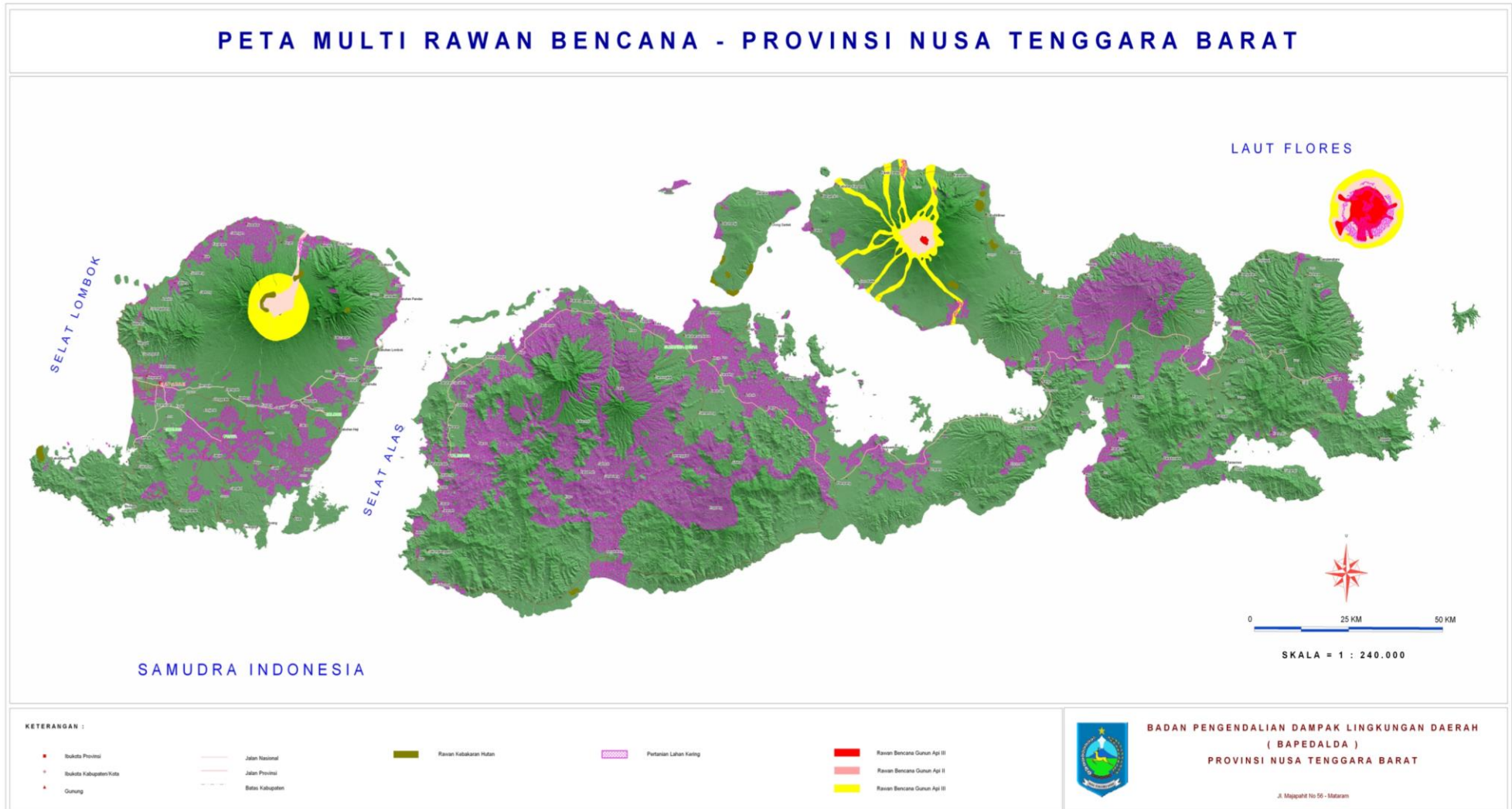




Gambar 2-2 Peta 1 Multi Rawan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat



## PETA MULTI RAWAN BENCANA - PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Gambar 2-3 Peta 2 Multi Rawan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat



### 2.1.2. Aspek Demografi

Perkembangan penduduk Provinsi NTB terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk NTB tahun 2015-2019 cenderung meningkat disebabkan oleh kelahiran alamiah dan migrasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi NTB tahun 2019 sebanyak 5.070.385 jiwa, terdiri atas laki-laki 2.461.652 jiwa (48,55 %) dan perempuan 2.608.733 jiwa (51,55 %). Sementara itu, persentase pertumbuhan penduduk tahun 2015 sampai 2019 cenderung menurun. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk NTB tahun 2015 – 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-12 Jumlah dan Laju Penduduk Provinsi NTB Tahun 2015-2019

Thn	Penduduk (Jiwa)			Pertumbuhan (%)			Sex Ratio
	L	P	Jumlah	L	P	Jlh	
2015	2.345.811	2.489.766	4.835.577	1,32	1,27	1,29	94,22
	48,51%	51,49%	100%				
2016	2.375.750	2.520.412	4.896.162	1,28	1,23	1,25	94,26
	48,52%	51,48%	100%				
2017	2.405.080	2.550.498	4.955.578	1,23	1,19	1,21	94,3
	48,53%	51,47%	100%				
2018	2.433.731	2.579.956	5.013.687	1,19	1,16	1,18	94,33
	48,54%	51,46%	100%				
2019	2.461.652	2.608.733	5.070.385	1,15	1,12	1,14	94,36
	48,55%	51,45%	100%				

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

Persebaran penduduk di Provinsi NTB belum merata, lebih dari 70% penduduk tinggal di Pulau Lombok yang luasnya hanya 23,51 %, sementara 30 % berada di Pulau Sumbawa yang luasnya 76,65 %. Ketimpangan distribusi penduduk berdampak pada munculnya masalah menurunnya kualitas lingkungan hidup seperti ketersediaan sumber air, kerusakan hutan dan lahan, alih fungsi lahan, pencemaran lingkungan, pendangkalan sungai, dan lain-lain. Persebaran penduduk tersebut disajikan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2-13 Distribusi Penduduk Provinsi NTB Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019 (Jiwa)

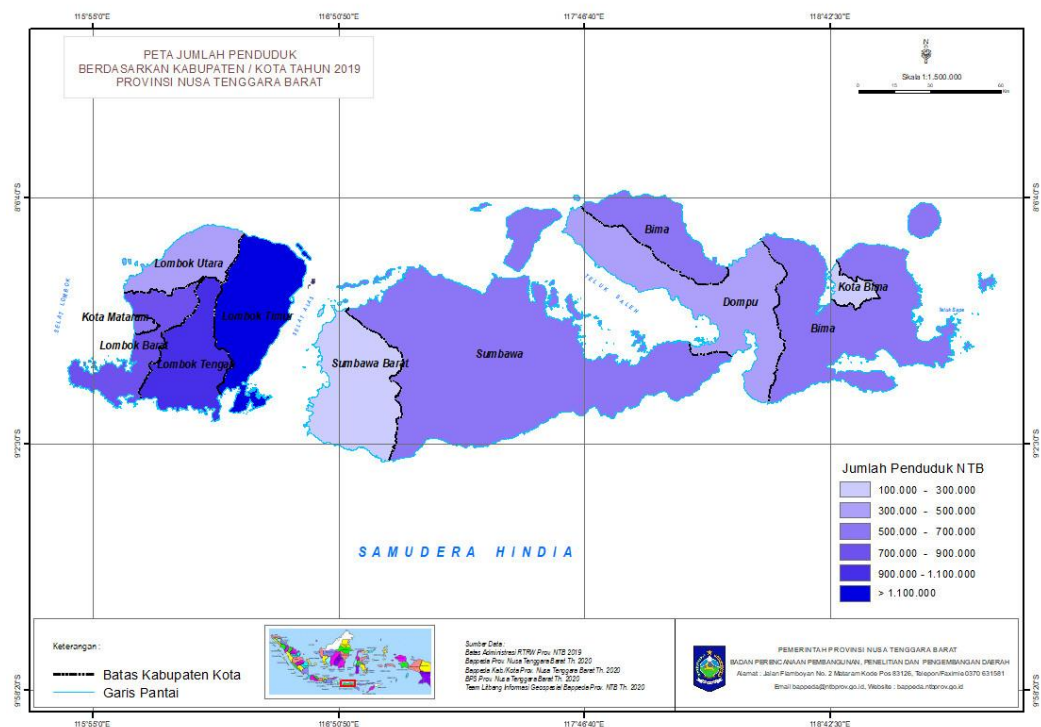
No	Kabupaten/ Kota	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Lombok Barat	654.892	665.132	675.222	685.161	694.985
2	Lombok Utara	212.265	214.393	216.515	218.533	220.412
3	Lombok Tengah	912.879	922.088	930.797	939.409	947.488
4	Lombok Timur	1.164.018	1.173.781	1.183.204	1.192.110	1.200.612





No	Kabupaten/ Kota	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
5	Kota Mataram	450.226	456.314	468.509	477.476	486.715
<b>Pulau Lombok</b>		<b>3.394.280</b>	<b>3.434.708</b>	<b>3.474.274</b>	<b>3.512.689</b>	<b>3.550.212</b>
6	Sumbawa Barat	133.391	137.072	140.890	144.707	148.606
7	Sumbawa	441.102	445.503	449.680	453.797	457.671
8	Dompu	238.386	241.888	245.387	248.879	252.288
9	Bima	468.682	473.890	478.967	483.901	488.577
10	Kota Bima	159.736	163.503	166.407	169.714	173.031
<b>Pulau Sumbawa</b>		<b>1.441.297</b>	<b>1.461.454</b>	<b>1.481.331</b>	<b>1.500.998</b>	<b>1.520.173</b>
<b>Provinsi NTB</b>		<b>4.835.577</b>	<b>4.896.162</b>	<b>4.955.578</b>	<b>5.013.687</b>	<b>5.070.385</b>

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2020.



Gambar 2-4 Peta Jumlah Penduduk Provinsi NTB Tahun 2019

Kepadatan penduduk tertinggi tahun 2019 terjadi di Kota Mataram, sementara kepadatan tertinggi terendah terjadi di Kabupaten Sumbawa, seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-14 Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019

No	Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Lombok Barat	621,42	631,13	640,71	650,14	659,46



No	Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )				
		2015	2016	2017	2018	2019
2	Lombok Utara	262,21	264,84	267,46	269,95	272,27
3	Lombok Tengah	780,52	788,39	795,84	803,20	810,11
4	Lombok Timur	725,00	731,08	736,95	742,49	747,79
5	Kota Mataram	7.344,63	7.443,95	7.642,89	7.789,17	7.939,89
<b>Pulau Lombok</b>		<b>722,21</b>	<b>730,82</b>	<b>739,23</b>	<b>747,41</b>	<b>755,39</b>
6	Sumbawa Barat	72,14	74,13	76,20	78,26	80,37
7	Sumbawa	66,39	67,05	67,68	68,30	68,89
8	Dompu	102,75	104,26	105,77	107,28	108,74
9	Bima	106,78	107,96	109,12	110,24	111,31
10	Kota Bima	718,72	735,67	748,74	763,62	778,54
<b>Pulau Sumbawa</b>		<b>93,44</b>	<b>94,75</b>	<b>96,04</b>	<b>97,31</b>	<b>98,55</b>
<b>Provinsi NTB</b>		<b>240,28</b>	<b>243,29</b>	<b>246,25</b>	<b>249,13</b>	<b>251,95</b>

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

Struktur umur penduduk NTB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terjadi perubahan, dimana kelompok umur produktif 15-64 tahun semakin banyak. Pertambahan jumlah kelompok umur produktif berpengaruh pada angka ketergantungan (*dependency ratio*), seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-15 Penduduk Usia Kerja serta Dependency Ratio Tahun 2015–2019

No	Penduduk Usia 15 -64 Tahun	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah	3.145.613	3.192.225	3.237.988	3.282.080	3.325.110
2	Laki-laki (orang)	1.494.165	1.517.829	1.540.900	1.563.026	1.584.729
	(%)	47,5	47,55	47,59	55,71	55,34
3	Perempuan (orang)	1.651.448	1.674.396	1.697.088	1.719.054	1.740.381
	(%)	52,5	52,45	52,41	50,08	49,89
<b>Dependency Ratio</b>		<b>53,72</b>	<b>53,38</b>	<b>53,04</b>	<b>52,76</b>	<b>52,49</b>

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

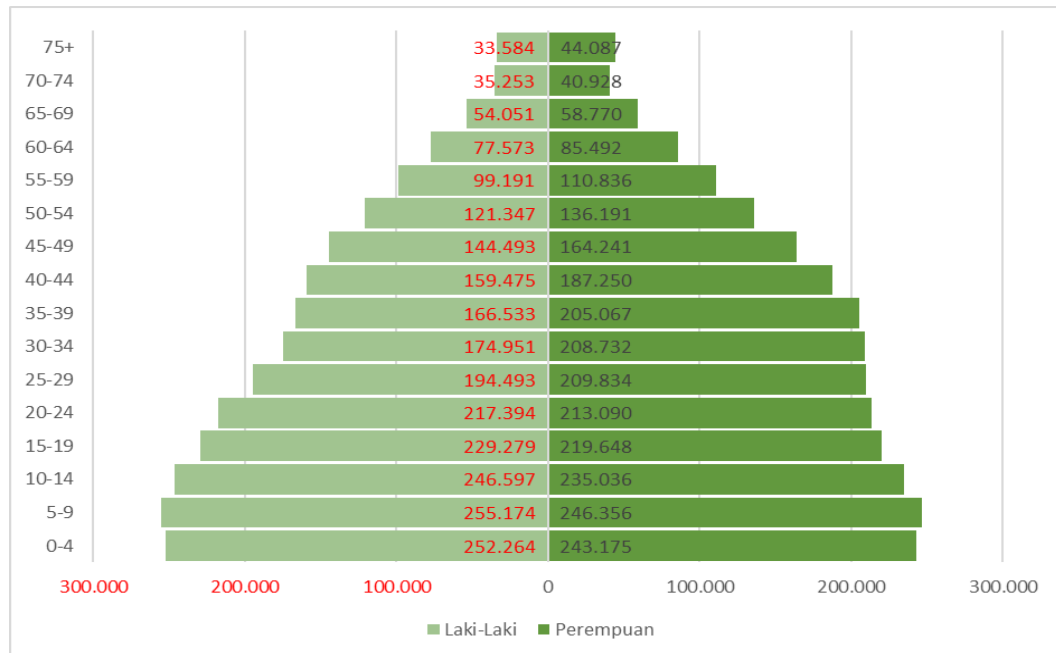
Berdasarkan data pada tabel diatas, diketahui *dependency ratio* dalam 5 tahun terakhir cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa beban yang harus ditanggung usia produktif (angkatan kerja) semakin berkurang. *Dependency ratio* tahun 2019 sebesar 52,49%, artinya setiap 100 orang usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 52 orang yang tidak/belum produktif.

Berdasarkan data BPS, sejak tahun 2015 sampai 2019, jumlah kelahiran menurun karena jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun yang semakin sedikit tiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan total fertility rate (TFR) NTB tahun 2017 (sesuai SDKI 2017) sebesar 2,5 (kategori sedang), yang berarti rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya 2-3 orang anak. Sebaliknya dengan penduduk kelompok umur 65+ yang semakin meningkat, menunjukkan



bahwa usaha pemerintah untuk meningkatkan Usia Harapan Hidup relative berhasil.

Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedangkan proporsi usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65+ tahun) semakin berkurang. Berdasarkan struktur umur penduduk NTB 2019, kelompok umur produktif (15-64) lebih mendominasi. Struktur umur penduduk tersebut disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

Gambar 2-5 Struktur Umur Penduduk NTB Tahun 2019

### 2.1.3. Pengembangan Wilayah

#### 2.1.3.1. Struktur Ruang Wilayah

Fungsi Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB 2020-2040 adalah sebagai kawasan unggulan pertanian/agribisnis, pariwisata dan industri, yang diwujudkan melalui:

1. Revitalisasi sektor-sektor unggulan, meliputi pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata, industri, dan pertambangan;
2. Akselerasi kawasan unggulan, pada kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, kawasan pariwisata dan budaya;
3. Akselerasi pengembangan infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi, sumberdaya air, sanitasi dan persampahan; dan
4. Pemulihan dan pelestarian kawasan lindung.

Struktur ruang yang tercantum dalam RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020-2040 sebagai berikut:





### A. Sistem Pusat-Pusat Perkotaan

Provinsi Nusa Tenggara Barat terbagi dalam 3 (tiga) wilayah pengembangan: *pertama*, Wilayah Pengembangan Pulau Lombok mencakup seluruh wilayah Kabupaten/Kota se Pulau Lombok dengan pusat pengembangan di Kota Mataram sekaligus sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di Kota Praya, *kedua* Wilayah Pengembangan Pulau Sumbawa Bagian Barat mencakup Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat dengan pusat pengembangan di Kota Sumbawa Besar sekaligus sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), *ketiga* Wilayah Pengembangan Pulau Sumbawa Bagian Timur mencakup Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kota Bima dengan pusat pengembangan di Kota Bima sekaligus sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sedangkan ibukota kabupaten lainnya dijadikan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Tabel 2-16 Rencana Sistem Pusat Perkotaan Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Hirarki	Rencana Sistem Pusat Perkotaan	Wilayah Pengembangan
<b>A. Sistem Nasional</b>			
1.	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	PKN Mataram	Wilayah Pengembangan Pulau Lombok
2.	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	PKW Praya (Kabupaten Lombok Tengah)	Wilayah Pengembangan Pulau Lombok
		PKW Sumbawa Besar (Kabupaten Sumbawa)	Wilayah Pengembangan Pulau Sumbawa Bagian Barat
		Raba (Kota Bima)	Wilayah Pengembangan Pulau Sumbawa Bagian Timur
<b>B. Sistem Provinsi</b>			
3.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	<b>Kabupaten Lombok Barat</b>	Wilayah Pengembangan Pulau Lombok
		a. Gerung	
		b. Lembar	
		c. Narmada	Wilayah Pengembangan Pulau Lombok
		<b>Kabupaten Lombok Utara</b>	
d. Tanjung			
e. Pemenang	Wilayah Pengembangan Pulau Lombok		
f. Kayangan			
<b>Kabupaten Lombok Tengah</b>			
g. Kopang	Wilayah Pengembangan Pulau Lombok		
h. Sengkol			
i. Mujur			
<b>Kabupaten Lombok Timur</b>			
j. Selong			
k. Masbagik	Wilayah Pengembangan Pulau Sumbawa Bagian Barat		
l. Keruak			
m. Labuhan Lombok			
<b>Kabupaten Sumbawa Barat</b>			
n. Taliwang			
o. Poto Tano			
p. Jereweh			
q. Maluk			



No	Hirarki	Rencana Sistem Pusat Perkotaan	Wilayah Pengembangan
		<b>Kabupaten Sumbawa</b> r. Alas s. Empang t. Lunyuk u. Lenangguar v. Labangka w. Maronge x. Plampang	Wilayah Pengembangan Pulau Sumbawa Bagian Barat
		<b>Kabupaten Dompu</b> y. Dompu z. Calabai aa. Kempo bb. Hu'u cc. Kilo dd. Kore	Wilayah Pengembangan Pulau Sumbawa Bagian Timur
		<b>Kabupaten Bima</b> ee. Woha ff. Kore gg. Sila hh. Wawo ii. Wera jj. Sape kk. Monta	Wilayah Pengembangan Pulau Sumbawa Bagian Timur

Sumber: Revisi RTRW Provinsi NTB Tahun 2020-2040

## B. Sistem Jaringan Transportasi Darat

Sistem transportasi darat terdiri dari sistem jaringan jalan, prasarana angkutan jalan, dan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) yang terdiri dari:

- 1. Jaringan Jalan:** Pada sistem nasional, jaringan jalan yang dikembangkan adalah jaringan Jalan Arteri Primer (AP) dan jaringan Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1). Sedangkan ada sistem provinsi, jaringan jalannya meliputi jaringan Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2) dan Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3).
- 2. Prasarana Angkutan Jalan:** Prasarana angkutan jalan berupa simpul terminal. Terminal Kelas A yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi Terminal Mandalika (Kota Mataram), Terminal Sumer Payung (Kabupaten Sumbawa), dan Terminal Dara (Kota Bima). Sedangkan Terminal Kelas B yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi Terminal Tanjung (Kabupaten Lombok Utara), Terminal Renteng (Kabupaten Lombok Tengah), Terminal Selong/Pancor (Kabupaten Lombok Timur), Terminal Tana Mira (Kabupaten Sumbawa Barat), Terminal Ginte (Kabupaten Dompu), dan Terminal Woha (Kabupaten Bima). Di samping terminal angkutan, prasarana angkutan jalan lainnya adalah jembatan



timbang yang dikembangkan di Kecamatan Narmada dan Kecamatan Poto Tano.

3. **Jaringan ASDP:** Untuk pengembangan jaringan ASDP pada lintas penyeberangan antar-provinsi yang merupakan wewenang nasional meliputi Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Badas, dan Pelabuhan Sape. Sedangkan lintas penyeberangan antar-kabupaten/kota meliputi Pelabuhan Kayangan, Telong-Elong, dan Ai Limung. Pelabuhan penyeberangan yang dikembangkan di Provinsi NTB terdiri dari Pelabuhan Penyeberangan Kelas I, Pelabuhan Penyeberangan Kelas II, dan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I direncanakan pada Pelabuhan Lembar (Kabupaten Lombok Barat), Pelabuhan Kayangan (Kabupaten Lombok Timur), Pelabuhan Poto Tano (Kabupaten Sumbawa Barat), dan Pelabuhan Sape (Kabupaten Bima). Pelabuhan Penyeberangan Kelas II direncanakan pada Pelabuhan Sekotong dan Pelabuhan Tawun (Kabupaten Lombok Barat), Pelabuhan Senggigi (Kabupaten Lombok Utara), Pelabuhan Telong Elong (Kabupaten Lombok Timur), Pelabuhan Benete (Kabupaten Sumbawa Barat), Pelabuhan Teluk Santong dan Pelabuhan Empang (Kabupaten Sumbawa), Pelabuhan Calabai dan Pelabuhan Cempi (Kabupaten Dompu), serta Pelabuhan Bima, Pelabuhan Labuan Kenanga, dan Pelabuhan Waworoda (Kabupaten Bima). Pelabuhan Penyeberangan Kelas III direncanakan pada Pelabuhan Pulau Moyo dan Pelabuhan Ai Limung (Kabupaten Sumbawa)

#### C. Sistem Jaringan Transportasi Laut

1. Pelabuhan Pengumpul dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Bima.
2. Pelabuhan Pengumpan, meliputi: (a) Pelabuhan pengumpan regional dikembangkan di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima; dan (b) Pelabuhan pengumpan lokal dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima.
3. Terminal khusus merupakan prasarana pelengkap di dalam pelabuhan yang diarahkan sebagai berikut: (a) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) dikembangkan di Kabupaten Lombok Tengah; (b) Terminal khusus dikembangkan seluruh Kabupaten/Kota untuk mendukung kegiatan pertambangan, pariwisata, dan perikanan selain yang disebutkan pada huruf a.





4. Alur pelayaran umum adalah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) yang melintasi Selat Lombok yang memiliki rute pelayaran sebagai berikut: (a) Dari Pelabuhan Pengumpul di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kota Bima; (b) Dari Pelabuhan Pengumpan Regional di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima; dan (c) Dari Pelabuhan Lokal di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Lombok Timur.

#### **D. Sistem Jaringan Transportasi Udara**

1. Bandara udara pengumpul: Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder dikembangkan di Kabupaten Lombok Tengah; dan Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier dikembangkan di Kabupaten Bima.
2. Bandara udara pengumpan dikembangkan di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa.
3. Ruang udara penerbangan meliputi seluruh wilayah yang ruang udaranya dilintasi oleh penerbangan, baik penerbangan sipil maupun penerbangan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
4. Di dalam ruang penerbangan memiliki rute penerbangan yang diarahkan dari seluruh bandara udara di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Bima.

#### **E. Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan**

1. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
  - a. Depo bahan bakar minyak dan gas terdiri atas depo dan/atau terminal BBM dikembangkan di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, dan Kota Bima; dan depo dan/atau terminal gas/LPG dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kota Bima.
  - b. Pengolahan migas (kilang) dan wilayah penunjang migas wilayah pengolahan migas (kilang) diarahkan di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima, wilayah penunjang migas diarahkan di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima.
2. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
  - a. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya mencakup pembangkit tenaga listrik dengan sumber energi tak terbarukan, energi terbarukan dan sumber energi lainnya, meliputi: PLTP dikembangkan di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Dompu; PLTA dikembangkan di Kabupaten Lombok



Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Sumbawa; PLTMH dikembangkan di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima; PLTM dikembangkan di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima; PLTS dikembangkan di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, termasuk desa-desa terpencil dan pulau-pulau kecil di seluruh Kabupaten/Kota berdasarkan potensi radiasi matahari; PLTGL dan PLTAL dikembangkan di Selat Lombok, Selat Alas, dan seluruh Kabupaten/ Kota berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah; dan PLTB dikembangkan di Kabupaten Lombok Timur; PLTBm dan/atau PLTBg dikembangkan di seluruh Kabupaten/ Kota termasuk pulau-pulau kecil berdasarkan potensinya; PLTSa dikembangkan di seluruh Kabupaten/ Kota termasuk pulau-pulau kecil berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah; PLTD dikembangkan di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kota Bima, dan Kabupaten Bima; PLTU dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kota Bima; PLTGU dikembangkan di Kota Mataram; PLTG dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat; dan PLTMG dikembangkan di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kota Bima.

- b. Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya mencakup pengembangan jaringan transmisi tegangan tinggi, distribusi, dan gardu induk, meliputi: SUTT dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota; SKTT dikembangkan di Kota Mataram; Gardu Induk (GI) dikembangkan di seluruh Kabupaten/ Kota; jaringan kabel laut dikembangkan dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa, dari Pulau Lombok ke Pulau-Pulau Kecil di sekitarnya, dan dari Pulau Sumbawa ke Pulau-Pulau Kecil di sekitarnya; jaringan distribusi dikembangkan di seluruh Kabupaten/ Kota.

#### **F. Sistem Jaringan Telekomunikasi**

1. Jaringan tetap dikembangkan sebagai jaringan terpasang, meliputi STO yang dikembangkan di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat,



Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima; jaringan serat optik dikembangkan dalam bentuk sistem telematika/internet di Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kota Bima, dan Kabupaten Bima termasuk di bawah laut; jaringan terestrial dikembangkan dalam bentuk gelombang radio yang dikembangkan berupa jaringan televisi lokal dengan jangkauan siaran ke seluruh Kabupaten/Kota dan jaringan radio lokal hingga ke seluruh pelosok pedesaan dan pulau-pulau kecil.

2. Jaringan bergerak meliputi jaringan mikro digital antar provinsi dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota; jaringan satelit dikembangkan dalam bentuk jaringan internet dan jaringan selular yang diarahkan di seluruh Kabupaten/ Kota; menara BTS untuk mendukung jaringan selular dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota termasuk pulau-pulau kecil; jaringan mikro digital dan jaringan satelit dikembangkan sebagai jaringan telekomunikasi khusus, terdiri dari jaringan multimedia terpusat di Kota Mataram dengan distribusi Tanjung - Gerung - Praya - Selong - Taliwang - Sumbawa Besar - Dompu - Woha - Kota Bima, jaringan telekomunikasi untuk sistem penanganan bencana; dan jaringan telekomunikasi untuk kepentingan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat yang dikembangkan di Ibukota Kecamatan.

#### **G. Sistem Jaringan Prasarana Sumberdaya Air**

1. Sumber air baku, meliputi:
  - a. WS Strategis Nasional - Lombok meliputi 416 DAS memiliki sumber air baku yang tersebar di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur.
  - b. WS Strategis Nasional - Sumbawa meliputi 804 DAS memiliki sumber air baku yang tersebar Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima.
  - c. Danau berada di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Dompu.
  - d. CAT terdiri atas CAT Mataram – Selong, CAT Tanjung – Sambelia, CAT Sumbawa Besar, CAT Empang, CAT Pekat, CAT Sanggar – Kilo, CAT Dompu, CAT Bima, dan CAT Tawali – Sape.
2. Sumber mata air berada di seluruh Kabupaten/Kota.
3. Prasarana sumber daya air, meliputi:
  - a. Prasarana sumber daya Nasional di wilayah Provinsi NTB, terdiri atas: DI Utuh Kabupaten/Kota dan DI Lintas Kabupaten/ Kota dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten





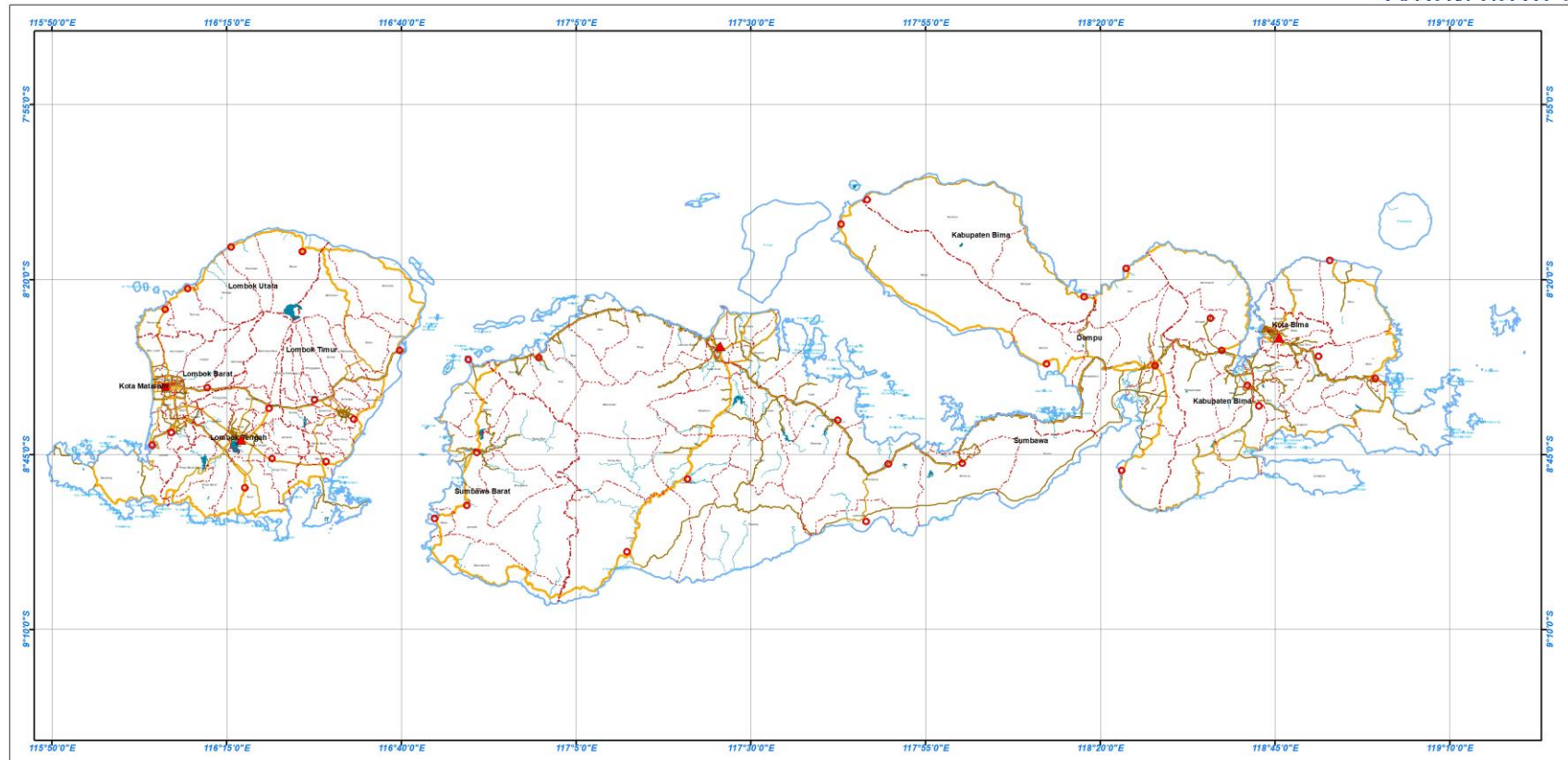
- Bima; jaringan irigasi Nasional dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota; bendung Nasional dikembangkan di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa; serta bendungan Nasional dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima; serta jaringan suplesi irigasi dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota.
- b. Sistem jaringan sumber daya Provinsi terdiri dari: DI Utuh Kabupaten/Kota dan DI Lintas Kabupaten/Kota dikembangkan di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima; jaringan irigasi Provinsi dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota; bendung Provinsi dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota; bendungan Provinsi dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima; embung dikembangkan di seluruh Kabupaten /Kota.
  - c. Prasarana pengendali daya rusak air meliputi pengendali banjir (tanggul banjir dan krib), pengendali sedimen (cekdam dan sabo), dan pengamanan pantai (jetty, revetment, dan tembok laut (*seawall*)) dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota.

#### H. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

1. **Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM):** SPAM meliputi sistem jaringan air baku, sistem jaringan air bersih dan sistem jaringan air minum yang meliputi:
  - a. Bangunan intake (pengambilan air) dan bangunan sadap di dekat sumber-sumber air permukaan yang dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota.
  - b. Bangunan penangkap air dikembangkan di sekitar mata air seluruh Kabupaten/Kota.
  - c. Sumur bor/sumur gali dikembangkan pada wilayah yang memiliki air tanah di seluruh Kabupaten/Kota.
  - d. Instalasi Pengolahan Air (IPA) dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota.
  - e. Reservoir utama dikembangkan di seluruh Kabupaten/ Kota.
  - f. teknologi instalasi reverse osmosis dikembangkan pada Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima hingga ke Pulau-Pulau Kecil.



- g. SPAM Regional Pulau Lombok dikembangkan di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan, SPAM Regional Bima dikembangkan di Kabupaten Bima dan Kota Bima.
2. **Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL): SPAL meliputi IPAL, Instalasi pengolahan limbah B3, dan IPLT** dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota.
3. **Sistem Jaringan Persampahan:** Sistem jaringan persampahan meliputi persampahan TPA Regional dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima; TPST Regional dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Bima; dan Bank Sampah Induk Regional dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota.



**PETA RENCANA PUSAT KEGIATAN PERKOTAAN**

- LEGENDA :**
- BATAS ADMINISTRASI**
- Garis Pantai
  - - - - Batas Kabupaten
  - - - - Batas Kecamatan
- PUSAT KEGIATAN DI WILAYAH PROVINSI**
- Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
  - ▲ Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
  - Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- SISTEM JARINGAN JALAN**
- Jaringan Jalan Nasional :
- Jalan Arteri Primer (JAP)
  - Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1)
- Jaringan Jalan Provinsi :
- Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2)
  - Jalan Kolektor Primer-3 (JKP-3)
  - Jalan Lokal
- Sistem Jaringan Sungai, dan Danau**
- Sungai
  - Bendungan, Situ, Danau



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGENDALIAN DAERAH  
(B.P.P.D.P.)  
Jln. Pahlawan No. 1 Telp. (0376) 411 411 Mataram

**REVISI**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (NTB)**  
**TAHUN 2009 - 2029**

**SKALA 1 : 700.000**

Proyeksi : Transverse Mercator  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Garis M

Sumber :  
- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Badan Informasi Geospasial (BIG), Rilis Data Bulan..... Tahun.....  
- Citra Satelit Spot 6, 7 Tahun 2018-2018  
- Hasil Analisis 2018

Disahkan Oleh:  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT      KETUA DPRD NUSA TENGGARA BARAT  
Dr. Zukiefmansyah, S.E., M.Sc.      Hj. Baiq Isvive Rupada, SH.MH.





### 2.1.3.2. Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pola ruang wilayah provinsi meliputi rencana pengelolaan kawasan lindung dan rencana pengembangan kawasan budidaya wilayah provinsi.

#### A. Pengelolaan Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan peruntukan lindung, meliputi:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, terdiri dari kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air yang dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota selain Kota Mataram.
2. Kawasan perlindungan setempat, terdiri dari: kawasan sempadan pantai yang dikembangkan di seluruh wilayah pesisir Kabupaten/Kota; kawasan sempadan sungai yang dikembangkan pada sungai-sungai besar dan kecil di seluruh DAS Kabupaten/ Kota; dan kawasan sekitar danau atau bendungan dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota.
3. Kawasan konservasi yang merupakan kawasan lindung Nasional, terdiri atas:
  - a. Kawasan Suaka Alam (KSA), meliputi: Cagar Alam yang dikembangkan di Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima; dan Suaka Margasatwa yang dikembangkan di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.
  - b. Kawasan Pelestarian Alam (KPA), meliputi: Taman Nasional yang dikembangkan di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima; Taman Hutan Raya (TAHURA) yang dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat; TWA dan TWAL yang dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima.
  - c. Taman Buru yang dikembangkan di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima.
4. Kawasan lindung geologi, terdiri atas: kawasan cagar alam geologi yang dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota yang memiliki keunikan batuan dan fosil, bentang alam, dan proses geologi; serta kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa sempadan mata air tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.
5. Kawasan cagar budaya yang diarahkan di seluruh Kabupaten/Kota.
6. Kawasan ekosistem hutan bakau diarahkan di sepanjang pesisir pantai di Kabupaten/Kota selain Kota Mataram.
7. Kawasan rawan bencana, meliputi:
  - a. Kawasan rawan bencana dengan tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi terdiri dari kawasan rawan bencana gerakan tanah dan kawasan rawan bencana letusan gunung api.
  - b. Kawasan rawan bencana lainnya terdiri dari kawasan rawan bencana gempa bumi, kawasan rawan banjir, kawasan rawan tsunami,



kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan abrasi pantai, dan kawasan rawan kekeringan.

## **B. Pengembangan Kawasan Peruntukan Budidaya**

Kawasan budidaya Nasional merupakan Kawasan Andalan Nasional di dalam wilayah Provinsi NTB, meliputi:

1. Kawasan Lombok dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan laut, pariwisata, industri, pertambangan dan panas bumi.
2. Kawasan Laut Selat Lombok dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan laut dan pariwisata.
3. Kawasan Andalan Lombok Utara - Bandar Kayangan dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan laut, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, serta panas bumi.
4. Kawasan Sumbawa dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan perikanan.
5. Kawasan Bima dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, perikanan, industri dan pertambangan.

Kawasan budidaya provinsi meliputi:

1. Kawasan Hutan Produksi, terdiri atas Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota selain di Kota Mataram.
2. Kawasan hutan rakyat dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara.
3. Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perkebunan dan hortikultura, dan/atau peternakan yang dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota.
4. Kawasan perikanan meliputi kawasan perikanan tangkap yang dikembangkan pada perairan laut Provinsi dan kawasan perikanan budidaya yang dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota meliputi kawasan budidaya air laut dan kawasan budidaya air payau.
5. Kawasan pertambangan dan energi berada di Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK), dan/atau Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), terdiri dari:
  - a. Kawasan pertambangan mineral logam dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima.
  - b. kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan potensinya.



6. Kawasan peruntukan industri yang dikelompokkan menjadi industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu:
  - a. Kawasan peruntukan industri besar dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima.
  - b. kawasan peruntukan industri kecil dan menengah dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota dengan potensi masing-masing.
7. Kawasan Pariwisata, terdiri dari:
  - a. KSPN sekaligus sebagai KPPN, meliputi Kawasan Geopark Rinjani dan Sekitarnya, Kawasan Pantai Selatan Lombok dan Sekitarnya, Kawasan Gili Matra (Trawangan-Meno-Air) dan Sekitarnya, Kawasan Moyo dan Sekitarnya, dan Kawasan Geopark Tambora dan Sekitarnya.
  - b. KPPN, meliputi Kawasan Mataram Kota dan Sekitarnya, Kawasan Praya-Sade dan Sekitarnya, Kawasan Sumbawa Barat dan Sekitarnya, dan Kawasan Bima dan Sekitarnya.
  - c. KSPD, meliputi Kawasan Strategis Provinsi (SKP) dengan sektor unggulan di bidang pariwisata, serta kumpulan destinasi pariwisata daerah yang memiliki potensi wisata alam, budaya dan/atau buatan.
8. Kawasan peruntukan permukiman dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota.
9. Kawasan pertahanan dan keamanan, terdiri dari:
  - a. kawasan pertahanan negara dikembangkan di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kota Bima.
  - b. kawasan keamanan dikembangkan di seluruh Kabupaten/ Kota.

#### **2.1.4. Pengembangan Kawasan Strategis**

Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak pada posisi geografis yang strategis, dilintasi oleh jalur "Sabuk Selatan Transnasional Banda Aceh-Kupang" merupakan jalur transportasi darat nasional yang terpadat. Selain itu, Provinsi NTB juga diapit dua Alur Pelayaran Internasional (API), alur pertama yang melintasi Selat Lombok dan alur kedua yang melintasi Selat Timor. Provinsi NTB juga masuk dalam wilayah "Segi tiga emas tujuan wisata dunia "Bali-Komodo-Tana Toraja". Dengan posisi geografis yang sangat strategis tersebut, pemerintah Provinsi NTB akan terus mendorong dan memfasilitasi pengembangan pembangunan kawasan-kawasan strategis yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berbagai potensi sumber daya alam Provinsi NTB haruslah bisa memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat NTB. Dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi wilayah dan masyarakat, Pemerintah





Provinsi NTB telah menetapkan 11 Kawasan Strategis Provinsi (KSP). KSP yang ditetapkan terdiri dari KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi serta KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang dirincikan sebagai berikut:

**1. KSP dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi:**

- a. Mataram Raya dan Tiga Gili meliputi: Kecamatan Mataram, Kecamatan Ampenan, Kecamatan Cakranegara, Kecamatan Selaparang, Kecamatan Sekarbela, Kecamatan Sandubaya, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Narmada, Kecamatan Labuapi, Kecamatan Kediri, dan Kecamatan Pemenang, dengan sektor unggulan perdagangan-jasa, industri, pariwisata, dan perikanan. Bentuk penanganannya adalah penataan kawasan.
- b. Kuta Mandalika dan sekitarnya meliputi: Kecamatan Sekotong, Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Barat Daya, Kecamatan Praya Timur, dan Kecamatan Jerowaru, dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan. Bentuk penanganannya adalah akselerasi sektor-sektor unggulan. Pada Kawasan strategis tersebut, terdapat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Kawasan ini merupakan satu diantara 10 Destinasi Wisata Prioritas Nasional. Ground Breaking telah dilakukan oleh Presiden RI, Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2017. Berlokasi di Pulau Lombok tepatnya di Kabupaten Lombok Tengah, dengan lahan seluas 1,250 ha. Kawasan ini merupakan daerah pantai berpasir putih sepanjang 7.5 km menghadap ke Samudera Hindia. Dalam kawasan ini juga sedang dibangun lintasan balap yang rencananya akan dipergunakan untuk gelaran internasional MotoGP pada tahun 2021.

Beberapa fasilitas yang telah dibangun di KEK Mandalika di antaranya: masjid, Kuta Beach Park, dan 538 lot dan kios untuk usaha mikro, kecil, dan menengah yang diberi nama kawasan Bazaar Mandalika. Sementara pembangunan fisik untuk infrastruktur besar seperti akses jalan dari Bandara Internasional Lombok menuju Mandalika hingga rencana pembuatan sirkuit jalanan (street circuit) dalam proses pelaksanaan.

- c. Industri Terpadu Maluk meliputi Kecamatan Maluk dan Kecamatan Jereweh, dengan sektor unggulan industri pertambangan, perikanan, dan pariwisata. Bentuk penanganannya adalah akselerasi pengembangan sektor-sektor unggulan. Pada Kawasan tersebut terdapat Kawasan Industri (KI) Sumbawa Barat seluas 1200 hektar, yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020). KI Sumbawa Barat direncanakan untuk pembangunan industri hasil tambang (smelter)



dan industri turunannya seperti: pupuk, semen, kabel, dan lain-lain. Smelter yang dibangun pada KI Sumbawa Barat berkapasitas 2 juta konsentrat tembaga per tahun. Konstruksi smelter ditargetkan selesai akhir tahun 2023 dan operasionalnya direncanakan awal tahun 2024.

- d. Pototano-Alas Utan meliputi: Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat, serta Kecamatan Alas Barat, Kecamatan Alas, Kecamatan Buer, dan Kecamatan Utan, dengan sektor unggulan perikanan, agroindustri, peternakan dan pariwisata. Bentuk penanganannya adalah pengembangan/peningkatan dan konservasi kawasan.
- e. Teluk Saleh – Moyo – Tambora (SAMOTA) dan Sekitarnya beserta wilayah perairannya meliputi: Kecamatan Manggelewa, Kecamatan Kempo, Kecamatan Pekat, Kecamatan Empang, Kecamatan Plampang, Kecamatan Lape, Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Tarano, Kecamatan Maronge, Kecamatan Moyo Utara, Kecamatan Lopok, dan Kecamatan Labuhan Badas, dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan, dan industri (mina-industri, agroindustri, dan infrastruktur energi). Bentuk penanganannya adalah akselerasi sektor-sektor unggulan beserta wilayah perairannya.

SAMOTA berada dalam Kawasan Andalan Nasional Sumbawa dan Kawasan Andalan Nasional Bima, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional. SAMOTA memiliki sumber daya alam potensial dan prospektif untuk dikelola secara berkelanjutan (seperti untuk: Taman Buru, Taman Wisata Alam Laut, Taman Nasional Gunung Tambora, Kelautan dan Perikanan, Agroindustri dan Agrowisata). Teluk Saleh merupakan “Aquarium Terbesar di Dunia”, diapit Pulau Moyo dan Gunung Tambora, dengan 49 pulau kecil yang mengitarinya, dengan luas 2.132 km<sup>2</sup>, sangat potensial dikembangkan menjadi kawasan ekonomi maritim unggulan. Pulau Moyo dengan luas 350 km<sup>2</sup>, mempunyai pantai indah, alam menawan dan hutan perawan. Gunung Tambora menyimpan keragaman hayati yang unik dan sangat cocok bagi pengembangan agroindustri pertanian, perkebunan dan pariwisata.

- f. Teluk Cempi dan Sekitarnya meliputi: Kecamatan Parado, Kecamatan Monta, Kecamatan Hu’u, Kecamatan Pajo, Kecamatan Dompou, Kecamatan Woja, dan Kecamatan Tarano, dengan sektor unggulan pariwisata, perikanan, dan industri. Bentuk penanganannya adalah pengembangan/peningkatan sektor-sektor unggulan dan konservasi kawasan.
- g. Teluk Bima dan sekitarnya meliputi: Kecamatan Mpunda, Kecamatan Rasanae Barat, Kecamatan Asakota, Kecamatan Soromandi, Kecamatan



Bolo, Kecamatan Palibelo, dan Kecamatan Woha, dengan sektor unggulan pariwisata, perikanan, dan industri. Bentuk penanganannya adalah pengembangan/peningkatan sektor-sektor unggulan dan konservasi kawasan.

- h. Waworada-Sape dan sekitarnya meliputi: Kecamatan Langgudu, Kecamatan Monta, Kecamatan Lambu, Kecamatan Sape, dan Kecamatan Wera, dengan sektor unggulan pariwisata, perikanan, dan industri. Bentuk penanganannya adalah pengembangan/peningkatan sektor-sektor unggulan. Pada Kawasan tersebut terdapat pula Kawasan Lambu Sape Komodo Sangiang (La SAKOSA).

La SAKOSA merupakan kawasan terintegrasi, yang mencakup: Sape, Lambu, Teluk Waworada, Pulau Sangiang, Wera, Ambalawi di Kabupaten Bima, Asakota di Kota Bima, serta Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur. Hubungan dari tiga wilayah besar (Kabupaten Bima, Kota Bima dan Pulau Komodo NTT), terkoneksi pada segala aspek transportasi/perhubungan, perdagangan, pariwisata, perikanan, pertanian, dan lain-lain.

Dalam skala nasional, Kawasan La SAKOSA merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Komodo. Sebagai wilayah yang menjadi core pertumbuhan dan kegiatan bagi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bima dan Kota Bima, Kawasan Sape-Sangiang dan sekitarnya menyimpan potensi ekonomi sangat besar. Sebagai salah satu simpul pergerakan utama laut, orientasi utama masyarakat dan keragaman potensi yang ada, kawasan ini diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan baru yang akan menyeimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB.

## **2. KSP dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup:**

- a. Kawasan ekosistem Puncak Ngengas Selalu Legini berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa dengan fungsi pelestarian ekosistem hutan.
- b. Kawasan ekosistem Gunung Tambora berada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, dengan fungsi utama mendukung cagar biosfer.
- c. Kawasan ekosistem Hutan Parado berada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, dengan fungsi pelestarian ekosistem Hutan.

Selain 11 kawasan strategis provinsi (KSP) di atas, terdapat 2 kawasan yang sangat potensial untuk pengembangan investasi dan pengelolaan lingkungan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

### **a. Global Hub Bandar Kayangan**

Bandar Kayangan terletak di salah satu dari sepuluh lokasi lintasan strategis dunia (UNCTAD, 2009). Terletak di Jalur Laut II Kepulauan





Nusantara, “Jalur Tol Laut” yang didedikasikan bagi dunia, sehingga kapal kapal dari Eropa, Afrika, Asia Tengah, Australia, Asia Tenggara dan Asia Timur Jauh bahkan dari negaranegara Pasifik dapat melalui jalur-jalur tersebut dengan aman. Berada di jalur ALKI II (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang menjadi “highway” bagi kapal kapal “extra large” dunia, rata-rata 40 kapal melewati selat Lombok per hari. Hasil kajian Bappenas 2009, Indonesia berpeluang mengembangkan global hub baru, untuk memenuhi kebutuhan kapal-kapal extra large dunia, dan Pulau Lombok merupakan lokasi paling potensial. Lombok Utara merupakan lokasi terbaik, karena memenuhi persyaratan pelabuhan laut dalam.

Progres pembangunan Bandar Kayangan hingga saat ini masih penguatan pada aspek regulasi diantaranya Bandar Kayangan sudah ditetapkan sebagai kawasan andalan nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); sudah tersedia ijin lokasi dari Kementerian Agraria dan Tataruang seluar 7.373 ha; serta telah ditetapkan sebagai prioritas pusat pertumbuhan baru berbasis investasi swasta sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2029-2024.

#### **b. Kawasan Geopark Rinjani**

Geopark Rinjani Lombok diinisiasi ke dalam program Geopark sejak 2008, dalam perkembangannya diakui sebagai Geopark Nasional pada 7 Oktober 2013, dan pada tahun 2016 diusulkan menjadi Unesco Global Geopark (UGG). Tahun 2017 diharapkan akan dapat mendapat pengakuan sebagai bagian dari UGG. Potensi Geopark Rinjani Lombok dari yang sudah diidentifikasi terdiri dari 22 situs Geologi (Geo heritage), 8 Situs Biologi (Bio heritage), dan 17 situs budaya (Culture Heritage). Persebarannya meliputi wilayah Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, dan Kota Mataram. Dukungan pengembangan Geopark Rinjani Lombok juga telah mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan di tindaklanjuti dengan kerjasama dan sinkronisasi program guna mendukung Geopark Rinjani sebagai Geopark Dunia. Salah satu pesona unggulan Geopark Rinjani adalah Danau Segara Anak yang berada pada ketinggian 2.010 meter dari permukaan laut, Kaldera Samalas memiliki ukuran sekitar 6 km x 8,5 km dan tinggi 800 meter yang dihasilkan dari letusan gunung berapi Samalas pada 1257.

Selain sebagai jaringan UGG, Geopark Rinjani juga merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sekaligus sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN). Dengan pembangunan KSPN



diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas serta dapat mendukung pertumbuhan kepariwisataan dan ekonomi, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya: Survey dan rakor dengan 3 koordinator APGN, Pengembangan Desa Geowisata, Internship, Penguatan Pokja, Pelatihan, Promosi dan publikasi Geopark, Gerakan pelajar menanam pohon, dan Penguatan data pusat informasi geologi.

Pemanfaatan ruang laut sesuai PERDA Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (RZWP3K) Tahun 2017-2037, diarahkan pada pengelolaan alur laut yang mencakup alur pelayaran, pemasangan kabel dan pipa bawah laut, dan alur migrasi biota laut, melalui sinkronisasi dan koordinasi pemanfaatan ruang laut untuk jalur pelayaran dengan kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, pemasangan pipa/kabel bawah laut, dan perlindungan alur migrasi biota laut.

Terkait pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi NTB, yang tertuang dalam Perda RZWP3K, dikelompokkan ke dalam 15 (lima belas) kawasan pengelolaan sebagai berikut:

1. Kawasan Gili Matra dan sekitarnya.
2. Kawasan Senggigi dan sekitarnya.
3. Kawasan Lembar-Sekotong dan sekitarnya.
4. Kawasan Kuta-Awang dan sekitarnya.
5. Kawasan Tanjung Luar-Jerowaru dan sekitarnya.
6. Kawasan Gili Sulat-Labuhan Lombok dan sekitarnya.
7. Kawasan Labuhan Lalar-Maluk dan sekitarnya.
8. Kawasan Gili Balu Poto Tano-Alas dan sekitarnya.
9. Kawasan Labuhan Badas-Pulau Moyo dan sekitarnya.
10. Kawasan Teluk Saleh dan sekitarnya.
11. Kawasan Teluk Sanggar dan sekitarnya.
12. Kawasan Teluk Bima dan sekitarnya.
13. Kawasan Sape dan sekitarnya.
14. Kawasan Teluk Waworada dan sekitarnya.
15. Kawasan Teluk Cempi dan sekitarnya.

## **2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

### **2.2.1. Fokus Perkembangan dan Pemerataan Ekonomi**

#### **1. Produk Domestik Regional Bruto**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai unit produksi yang ada di wilayah NTB. Perkembangan nilai PDRB Provinsi NTB dari tahun ke tahun



mengalami peningkatan. PDRB Provinsi NTB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-17 PDRB ADHK Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTB Tahun 2015-2019 (Rp. Milyar)

No	Sektor	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	18.964,88	19.564,75	20.843,23	21.248,28	21.569,97
2	Pertambangan dan Penggalian	23.174,73	24.500,91	19.635,14	13.016,91	13.121,22
3	Industri Pengolahan	3.772,63	3.976,97	4.213,75	4.276,28	4.441,24
4	Pengadaan Listrik, Gas	67,28	74,85	78,06	79,27	88,00
5	Pengadaan Air	66,03	69,26	72,45	69,82	72,32
6	Konstruksi	7.744,39	8.413,86	9.032,56	9.277,10	10.408,06
7	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.337,33	11.148,45	12.111,62	12.771,36	13.583,11
8	Transportasi dan Pergudangan	5.680,45	5.921,13	6.371,85	6.507,49	6.594,80
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.403,76	1.545,45	1.657,81	1.581,68	1.580,49
10	Informasi dan Komunikasi	1.825,49	1.985,88	2.157,77	2.274,53	2.368,19
11	Jasa Keuangan	2.480,27	2.789,28	3.065,62	3.273,29	3.319,08
12	Real Estate	2.356,41	2.502,00	2.678,34	2.803,02	2.936,50
13	Jasa Perusahaan	139,12	148,85	157,59	165,59	173,88
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.362,40	4.492,49	4.640,84	4.688,82	4.859,15
15	Jasa Pendidikan	3.595,36	3.812,65	4.062,12	4.274,00	4.574,90
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.612,98	1.712,73	1.827,61	1.975,37	2.096,05
17	Jasa Lainnya	1.754,48	1.864,81	2.001,86	2.108,65	2.227,81
<b>PDRB dengan Tambang Nonmigas</b>		<b>89.337,99</b>	<b>94.524,29</b>	<b>94.608,21</b>	<b>90.391,46</b>	<b>94.014,74</b>
<b>PDRB Tanpa Tambang Nonmigas</b>		<b>68.632,54</b>	<b>72.715,06</b>	<b>77.851,88</b>	<b>80.353,65</b>	<b>84.179,51</b>

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

Keterangan: \*Angka Sementara, \*\*Angka Sangat Sementara.

Dari tabel di atas, diketahui bahwa nilai tambah terbesar berasal dari sektor primer yaitu: pertanian dalam arti luas, dan pertambangan. Kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-18 Kontribusi Setiap Sektor terhadap PDRB Provinsi NTB Tahun 2015-2019

No	Sektor	Kontribusi Per Tahun (%)				
		2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	21,28	21,18	21,95	23,45	22,89





No	Sektor	Kontribusi Per Tahun (%)				
		2015	2016	2017	2018*	2019**
2	Pertambangan dan Penggalian	22,55	22,52	19,47	13,97	13,56
3	Industri Pengolahan	3,85	3,87	3,97	4,12	4,10
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08
5	Pengadaan Air	0,09	0,08	0,09	0,08	0,08
6	Konstruksi	8,37	8,49	8,85	9,53	10,54
7	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,27	12,46	13,24	14,48	14,92
8	Transportasi dan Pergudangan	7,24	7,05	7,27	7,51	7,27
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,09	2,15	2,22	2,15	2,03
10	Informasi dan Komunikasi	1,76	1,76	1,86	1,98	1,96
11	Jasa Keuangan	3,01	3,18	3,43	3,79	3,65
12	Real Estate	3,03	3,00	3,06	3,31	3,29
13	Jasa Perusahaan	0,16	0,17	0,17	0,18	0,19
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,27	6,00	6,01	6,31	6,16
15	Jasa Pendidikan	4,36	4,42	4,59	4,94	5,05
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,74	1,72	1,77	1,98	2,02
17	Jasa Lainnya	1,89	1,88	1,99	2,15	2,20
<b>PDRB</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

Keterangan: \*Angka Sementara, \*\*Angka Sangat Sementara.

Kinerja ekonomi Provinsi NTB dilihat dari pertumbuhan ekonomi selama periode tahun 2015 - 2019 mengalami fluktuasi, terutama pertumbuhan ekonomi dengan subsektor pertambangan logam sangat fluktuatif. Namun demikian, rata-rata pertumbuhan ekonomi NTB dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan termasuk tambang nonmigas sebesar 5,44 %, sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa tambang nonmigas sebesar 5,50 %. Pertumbuhan ekonomi tersebut disajikan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2-19 Pertumbuhan Ekonomi utk Setiap Sektor di Provinsi NTB Tahun 2015-2019

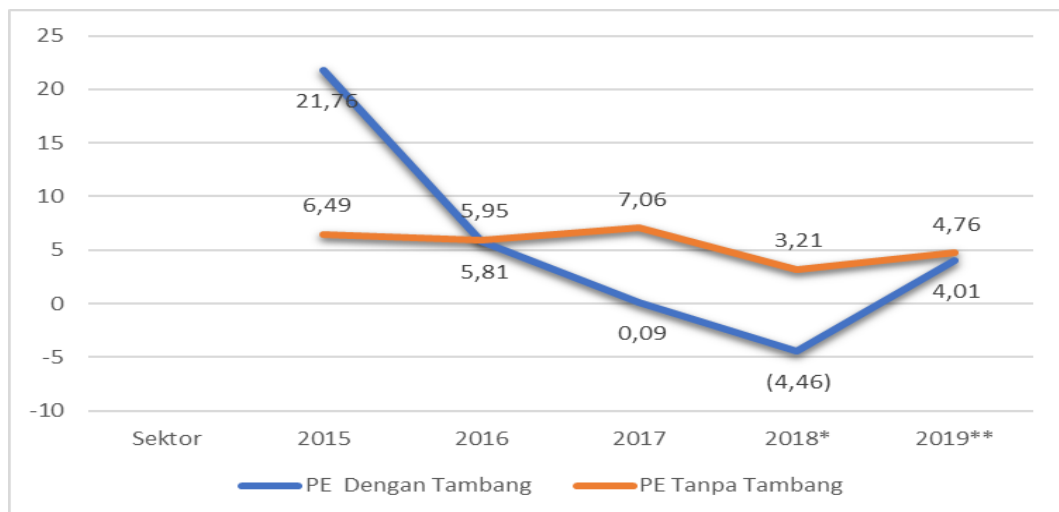
No	Sektor	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7,13	3,16	6,54	1,94	1,51
2	Pertambangan dan Penggalian	106,21	5,72	(19,86)	(33,71)	0,80
3	Industri Pengolahan	3,12	5,42	5,95	1,48	3,86



No	Sektor	2015	2016	2017	2018*	2019**
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,89	11,25	4,29	1,55	11,01
5	Pengadaan Air	3,79	4,90	4,61	(3,64)	3,58
6	Konstruksi	7,27	8,65	7,35	2,71	12,19
7	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,05	7,85	8,64	5,45	6,36
8	Transportasi dan Pergudangan	6,47	4,24	7,61	2,13	1,34
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,56	10,09	7,27	(4,59)	(0,08)
10	Informasi dan Komunikasi	8,34	8,79	8,66	5,41	4,12
11	Jasa Keuangan	9,32	12,46	9,91	6,77	1,40
12	Real Estate	6,84	6,18	7,05	4,66	4,76
13	Jasa Perusahaan	5,76	6,99	5,87	5,08	5,01
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,69	2,98	3,30	1,03	3,63
15	Jasa Pendidikan	7,27	6,04	6,54	5,22	7,04
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,77	6,18	6,71	8,09	6,11
17	Jasa Lainnya	6,21	6,29	7,35	5,34	5,65
<b>PE Dgn Tambang Nonmigas</b>		<b>21,76</b>	<b>5,81</b>	<b>0,09</b>	<b>(4,46)</b>	<b>4,01</b>
<b>PE Tanpa Tambang Nonmigas</b>		<b>6,49</b>	<b>5,95</b>	<b>7,06</b>	<b>3,21</b>	<b>4,76</b>

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

Keterangan: \*Angka Sementara, \*\*Angka Sangat Sementara.

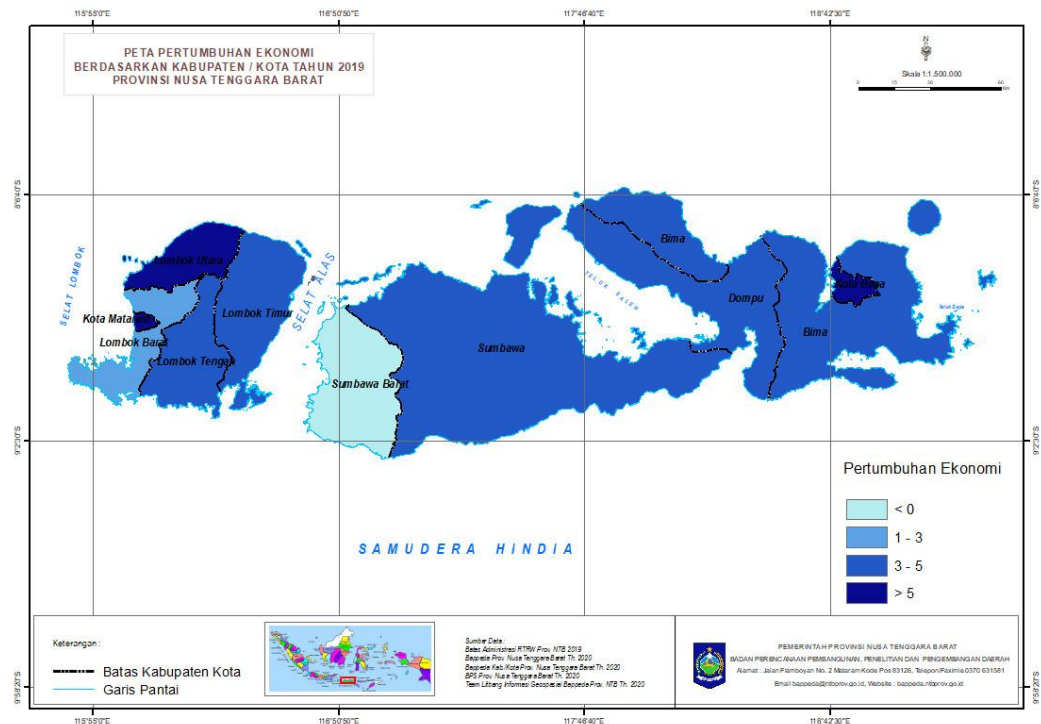


Gambar 2-6 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB dengan Tambang Nonmigas dan Tanpa Tambang Nonmigas Tahun 2013-2019

Dari gambar di atas, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB tanpa tambang cenderung lebih stabil meskipun ada kecenderungan menurun pada 2 (dua) tahun terakhir, sedangkan pertumbuhan ekonomi dengan tambang



menunjukkan kondisi sangat fluktuatif dan cenderung menurun pada 5 (lima) tahun terakhir, bahkan sempat menyentuh angka minus pada tahun 2018. Peta pertumbuhan ekonomi setiap kabupaten/kota disajikan pada gambar di bawah ini.

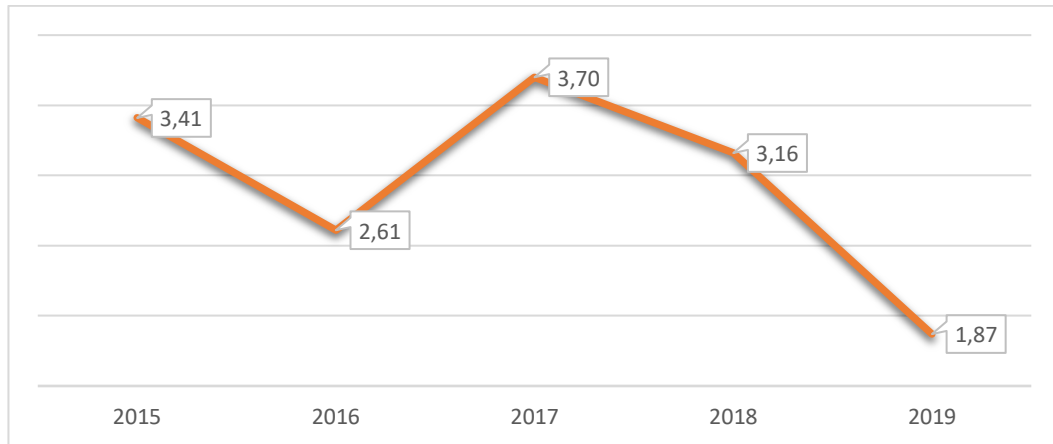


Gambar 2-7 Peta Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2019

## 2. Inflasi

Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Inflasi disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi yang semakin tinggi akan berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini berdampak pada meningkatnya standar kebutuhan minimum (garis kemiskinan), sehingga meningkatkan jumlah penduduk miskin dan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Perkembangan inflasi di Provinsi NTB tahun 2015-2019 disajikan pada gambar berikut.





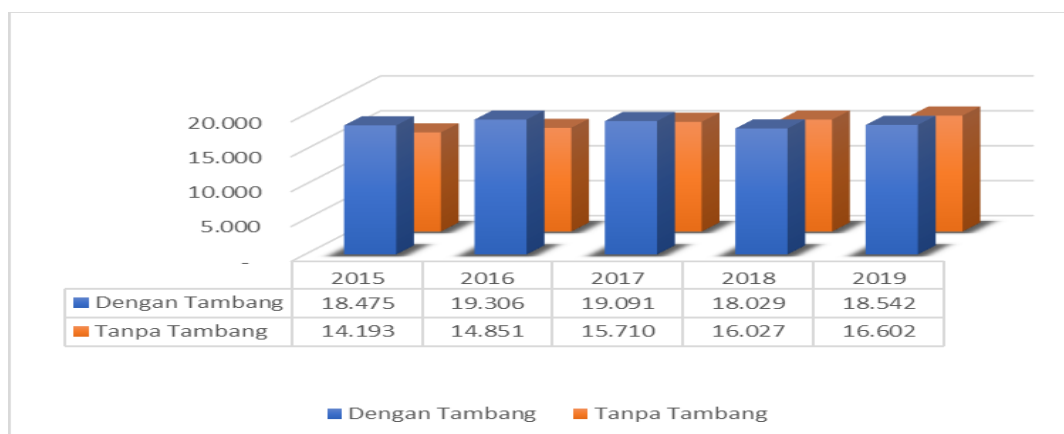
Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

Gambar 2-8 Perkembangan Inflasi Provinsi NTB Tahun 2015-2019

Dari gambar di atas, diketahui bahwa pada tahun 2017 inflasi berada pada titik tertinggi yakni 3,70 persen, lebih tinggi dari inflasi nasional 3,62 persen. Tingginya inflasi tahun 2017 disebabkan adanya kenaikan listrik untuk pelanggan 900 Volt Ampere (VA) sebanyak tiga kali dalam kurun waktu Januari - Mei 2017, disamping karena anomali cuaca yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan harga pada komoditi pertanian, serta erupsi Gunung Agung Bali yang mengganggu distribusi barang. Sementara itu, inflasi tahun 2018 dan 2019 cenderung terus menurun.

### 3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita Provinsi NTB tanpa subsektor tambang nonmigas cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi NTB. Pada tahun 2015, PDRB per kapita atas dasar harga konstan tanpa tambang nonmigas sebesar Rp 14.193 ribu, meningkat menjadi Rp 16.602 ribu tahun 2019. Keadaan tersebut disajikan pada gambar berikut.



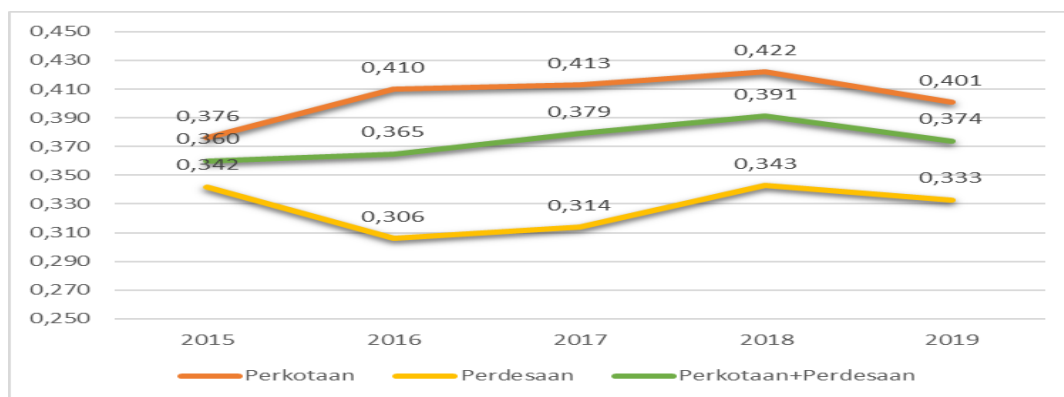
Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

Gambar 2-9 PDRB Per Kapita ADHK Tahun 2010 (Ribu Rupiah) Tahun 2015-2019



#### 4. Indeks Gini

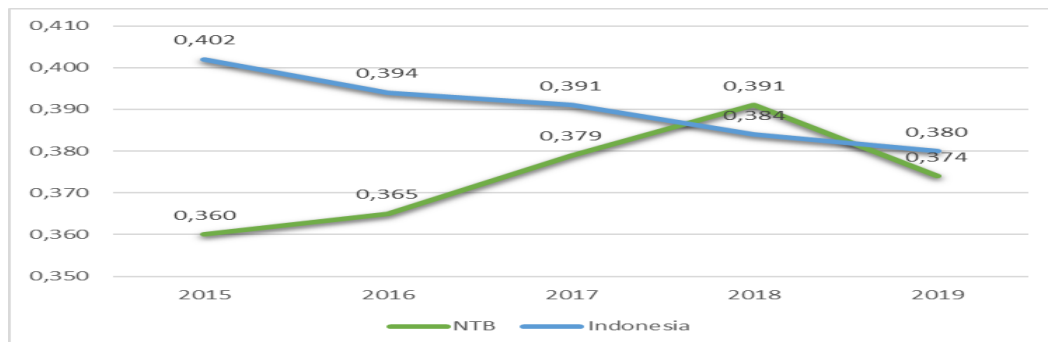
Indeks Gini merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan atau kekayaan, yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan secara menyeluruh dalam suatu daerah. Nilai Indeks Gini 0 (nol) menunjukkan distribusi pendapatan “merata sempurna”, Nilai Indeks Gini 1 (satu) menunjukkan distribusi pendapatan “ timpang sempurna”. Semakin besar nilai Indeks Gini, semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pendapatan/pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Keadaan Indeks Gini disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

Gambar 2-10 Indeks Gini Perkotaan, Perdesaan, Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi NTB 2015-2019

Indeks Gini di perdesaan dan perkotaan berfluktuasi selama tahun 2015-2019. Indeks gini NTB pada September 2018 sebesar 0,391 point, sementara pada September 2019 sebesar 0,374 poin, artinya ketimpangan distribusi pendapatan/pengeluaran di NTB semakin menurun. Berdasarkan tempat tinggal, Indeks Gini di perkotaan dan perdesaan tertinggi terjadi tahun 2018. Perbandingan nilai Indeks Gini Provinsi NTB dengan Indonesia disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

Gambar 2-11 Perkembangan Indeks Gini Provinsi NTB dan Indonesia Tahun 2013-2017



Pada tahun 2015-2019, Indeks Gini Provinsi NTB di bawah Indeks Gini nasional kecuali tahun 2018, namun tetap masih di bawah 0,50 point. Meskipun demikian, secara tren nilai Indeks Gini Provinsi NTB mengalami peningkatan, menunjukkan adanya peningkatan ketidakmerataan dalam pembangunan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

## 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

### 1. Jumlah dan Tingkat Kemiskinan Penduduk

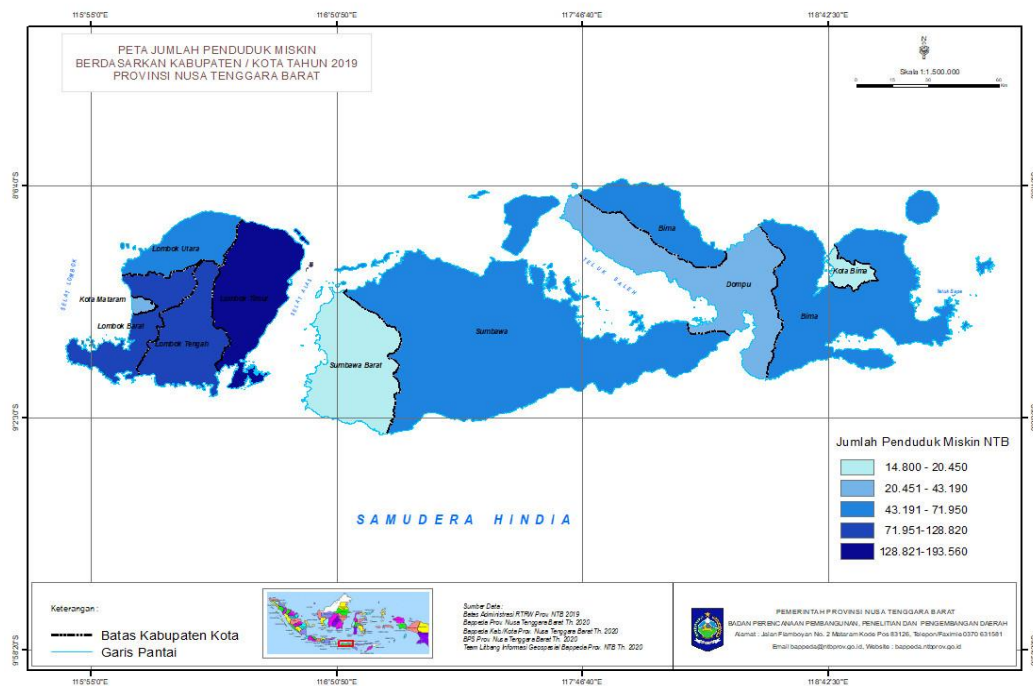
Dalam 5 tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Provinsi NTB menurun dari 17,10 persen pada Maret 2015 menjadi 13,88 persen pada September 2019, atau rata-rata turun 0,64 persen per tahun. Pada tahun 2017, Provinsi NTB menempati tertinggi kedua dalam penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,02 persen setelah Provinsi Papua Barat (1,98%), sehingga NTB dikukuhkan sebagai provinsi paling progresif kedua dalam mengurangi kemiskinan secara nasional. Perkembangan jumlah dan tingkat kemiskinan penduduk di Provinsi NTB, termasuk 10 kabupaten/kota, disajikan pada tabel-tabel dan gambar-gambar berikut.

Tabel 2-20 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019 (dalam ribuan orang)

No	Uraian	Tahun					Penurunan 2015-2019
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Lombok Barat	113,3	110,85	110,69	103,30	105,04	8,26
2	Lombok Tengah	147,94	145,37	142,14	130,00	128,82	19,12
3	Lombok Timur	222,19	216,18	215,81	196,87	193,56	28,63
4	Sumbawa	73,57	71,66	68,69	63,77	63,49	10,08
5	Dompu	35,94	34,31	32,85	30,74	30,81	5,13
6	Bima	73,71	72,36	72,14	71,65	71,95	1,76
7	Sumbawa Barat	22,5	22,47	22,33	20,36	20,45	2,05
8	Lombok Utara	72,28	71,02	69,24	62,86	63,84	8,44
9	Kota Mataram	46,76	44,81	44,53	42,60	43,19	3,57
10	Kota Bima	15,7	15,42	15,36	14,84	14,80	0,9
<b>Provinsi NTB</b>		<b>823,89</b>	<b>804,45</b>	<b>793,78</b>	<b>737,46</b>	<b>735,96</b>	<b>87,93</b>

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.



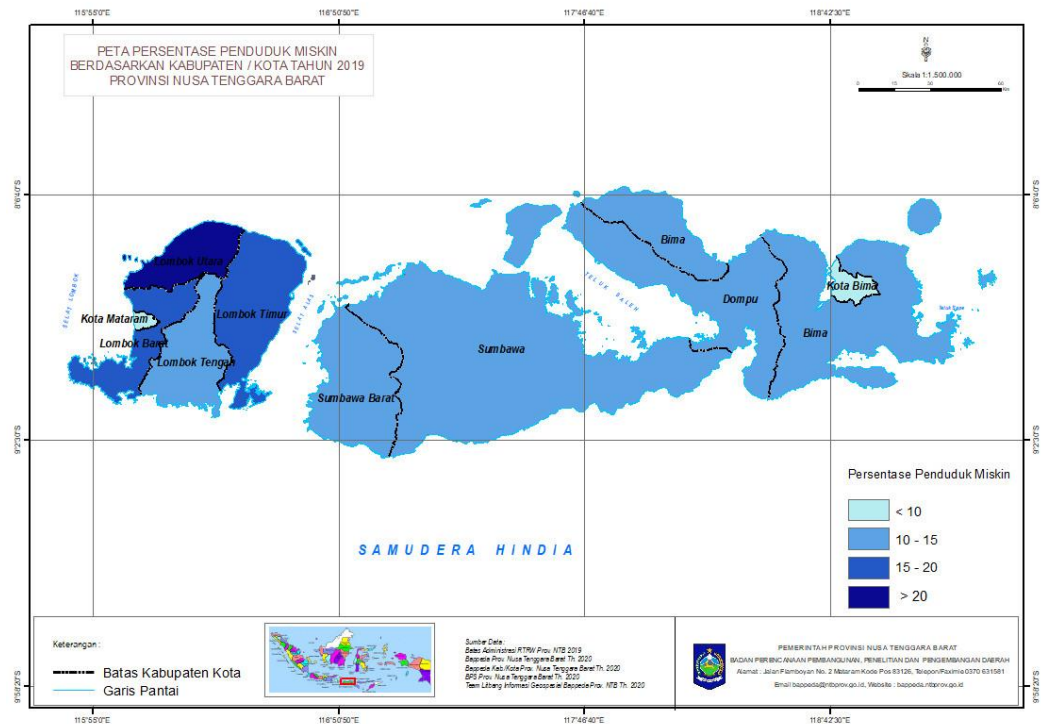


Gambar 2-12 Peta Jumlah Penduduk Miskin Provinsi NTB menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019

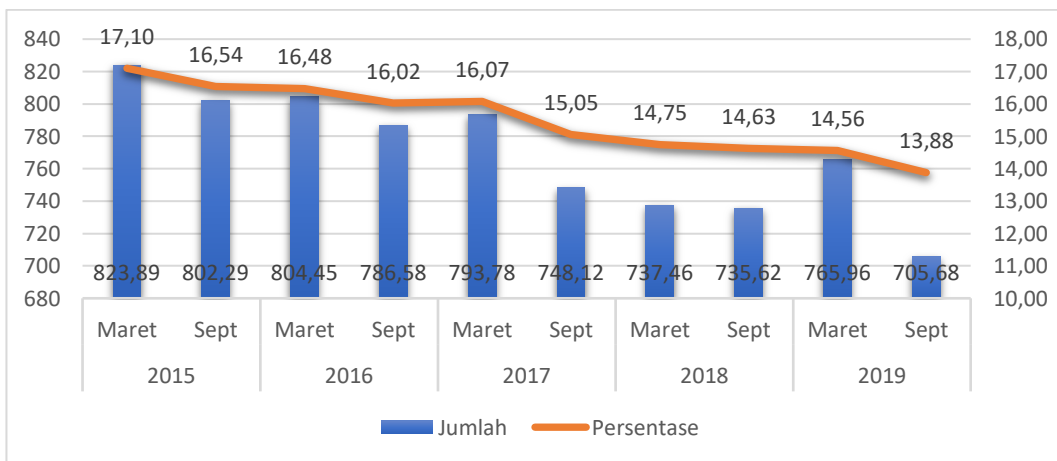
Tabel 2-21 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Penduduk (P0) Provinsi NTB menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019 (Persen)

No	Uraian	Tahun					Penurunan 2015-2019
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Lombok Barat	17,38	16,73	16,46	15,20	15,17	2,21
2	Lombok Tengah	16,26	15,80	15,31	13,87	13,63	2,63
3	Lombok Timur	19,14	18,46	18,28	16,55	16,15	2,99
4	Sumbawa	16,73	16,12	15,31	14,08	13,90	2,83
5	Dompu	15,11	14,23	13,43	12,40	12,25	2,86
6	Bima	15,78	15,31	15,10	14,84	14,76	1,02
7	Sumbawa Barat	16,97	16,50	15,96	14,17	13,85	3,12
8	Lombok Utara	34,13	33,21	32,06	28,83	29,03	5,10
9	Kota Mataram	10,45	9,80	9,55	8,96	8,92	1,53
10	Kota Bima	9,85	9,51	9,27	8,79	8,80	1,05
<b>Provinsi NTB</b>		<b>16,54</b>	<b>16,02</b>	<b>15,05</b>	<b>14,63</b>	<b>13,88</b>	<b>2,66</b>

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.



Gambar 2-13 Peta Persentase Penduduk Miskin di Provinsi NTB Tahun 2019



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

Gambar 2-14 Jumlah (000) dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTB Tahun 2015-2019

Dari tabel-tabel dan gambar-gambar di atas, diketahui bahwa hal sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk miskin paling banyak terdapat di Kabupaten Lombok Timur dan jumlah penduduk miskin paling sedikit terdapat di Kota Bima.
2. Tingkat kemiskinan penduduk paling tinggi terdapat di Kabupaten Lombok Utara dan tingkat kemiskinan penduduk paling rendah terdapat di Kota Bima.



3. Tingkat kemiskinan penduduk di Provinsi NTB selama lima tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 2,66 persen, seiring menurunnya tingkat kemiskinan di kabupaten/kota. Secara umum kondisi kemiskinan Kabupaten/Kota di Pulau Lombok lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi kemiskinan Kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa.

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah pengeluaran (rupiah) minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Pada tahun 2019, Garis Kemiskinan Provinsi NTB sebesar Rp 384.880 per kapita per bulan, meningkat dari tahun 2015 sebesar Rp 314.238 per kapita per bulan. Garis kemiskinan di Provinsi NTB menurut Kabupaten/Kota tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-22 Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019 (Rp per kapita per bulan)

No	Uraian	Tahun					Peningkatan
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Lombok Barat	353.667	375.684	390.979	412.487	431.862	78.195
2	Lombok Tengah	335.286	357.337	369.645	386.676	404.633	69.347
3	Lombok Timur	359.235	382.861	396.668	414.721	430.727	71.492
4	Sumbawa	272.274	296.914	300.643	320.617	340.254	67.980
5	Dompu	243.467	263.458	266.483	284.188	328.740	85.273
6	Bima	255.962	282.854	288.703	308.695	327.602	71.640
7	Sumbawa Barat	408.991	435.890	444.465	459.065	468.122	59.131
8	Lombok Utara	363.367	387.265	398.702	416.705	437.543	74.176
9	Kota Mataram	397.468	414.115	428.754	457.950	480.304	82.836
10	Kota Bima	274.394	293.048	299.346	323.187	352.593	78.199
	Provinsi NTB	314.238	333.996	345.341	365.901	384.880	70.642

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

Dari tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2019, rata-rata Garis Kemiskinan di Provinsi NTB Rp 384.880 per kapita per bulan, Garis kemiskinan paling tinggi terdapat di Kota Mataram (Rp 480.304 per kapita per bulan), sedangkan Garis Kemiskinan terendah di Kabupaten Bima (Rp 327.602 per kapita per bulan).

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan presentase penduduk miskin, tetapi perlu juga diperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan





kemiskinan. Perkembangan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Provinsi NTB, termasuk 10 kabupaten/kota disajikan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2-23 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun					Peningkatan/Penurunan
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Lombok Barat	2,91	3,11	3,24	3,07	3,42	0,51
2	Lombok Tengah	3,00	2,74	2,81	2,31	1,56	(1,44)
3	Lombok Timur	3,36	2,88	3,03	2,67	1,48	(1,88)
4	Sumbawa	2,70	3,12	2,60	3,05	2,56	(0,14)
5	Dompu	2,40	1,66	1,84	1,59	1,62	(0,78)
6	Bima	2,41	2,34	2,47	1,73	2,18	(0,23)
7	Sumbawa Barat	2,93	4,79	3,81	2,04	2,83	(0,10)
8	Lombok Utara	7,50	7,06	7,63	6,98	7,39	(0,11)
9	Kota Mataram	1,53	1,69	1,73	1,17	1,55	0,02
10	Kota Bima	1,68	2,08	1,30	1,55	1,58	(0,10)
<b>Provinsi NTB</b>		<b>2,72</b>	<b>2,63</b>	<b>2,63</b>	<b>2,82</b>	<b>2,33</b>	<b>(0,39)</b>

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

Dari tabel di atas, diketahui Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index/P1*) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. P1 tertinggi pada tahun 2019, ditempati oleh Kabupaten Lombok Utara sebesar 7,39 point, sedangkan P1 yang terendah di Kabupaten Lombok Timur sebesar 1,48 point.

Tabel 2-24 Perkembangan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019

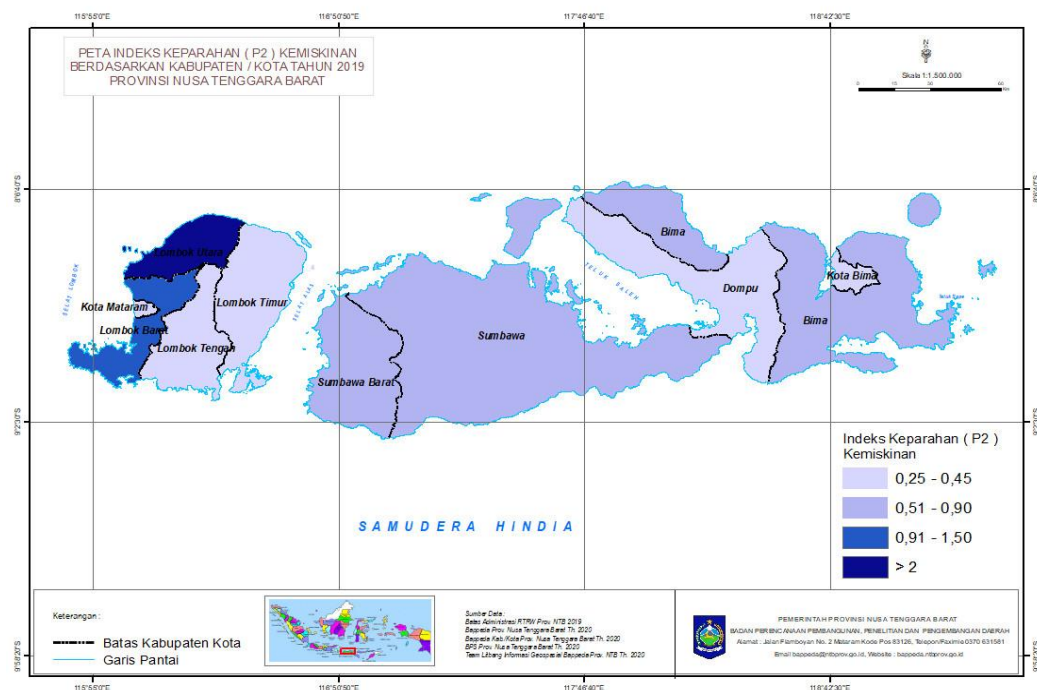
No	Uraian	Tahun					Peningkatan/Penurunan
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Lombok Barat	0,77	0,89	0,92	0,95	0,98	0,21
2	Lombok Tengah	0,87	0,64	0,75	0,54	0,25	(0,62)
3	Lombok Timur	0,87	0,68	0,79	0,64	0,25	(0,62)
4	Sumbawa	0,63	0,84	0,63	0,86	0,59	(0,04)
5	Dompu	0,61	0,3	0,39	0,34	0,35	(0,26)
6	Bima	0,57	0,52	0,58	0,35	0,51	(0,06)



No	Uraian	Tahun					Peningkatan/ Penu- runan
		2015	2016	2017	2018	2019	
7	Sumbawa Barat	0,81	1,7	1,22	0,50	0,93	0,12
8	Lombok Utara	2,61	2,22	2,57	2,56	2,42	(0,19)
9	Kota Mataram	0,38	0,43	0,47	0,22	0,45	0,07
10	Kota Bima	0,49	0,65	0,31	0,41	0,36	(0,13)
<b>Provinsi NTB</b>		<b>0,73</b>	<b>0,65</b>	<b>0,63</b>	<b>0,74</b>	<b>0,48</b>	<b>(0,25)</b>

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

Dari Posisi tabel di atas, diketahui bahwa Keperahan Kemiskinan (P2) di Provinsi NTB pada tahun 2015-2019 masih berada di atas nilai capaian nasional, namun secara tren menunjukkan kondisi yang relevan dan cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2019, nilai P2 tertinggi ditempati Kabupaten Lombok Utara dengan nilai 2,42 point, diikuti oleh Kabupaten Lombok Barat dengan 0,98 point.



Gambar 2-15 Peta Indeks Keperahan Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2019

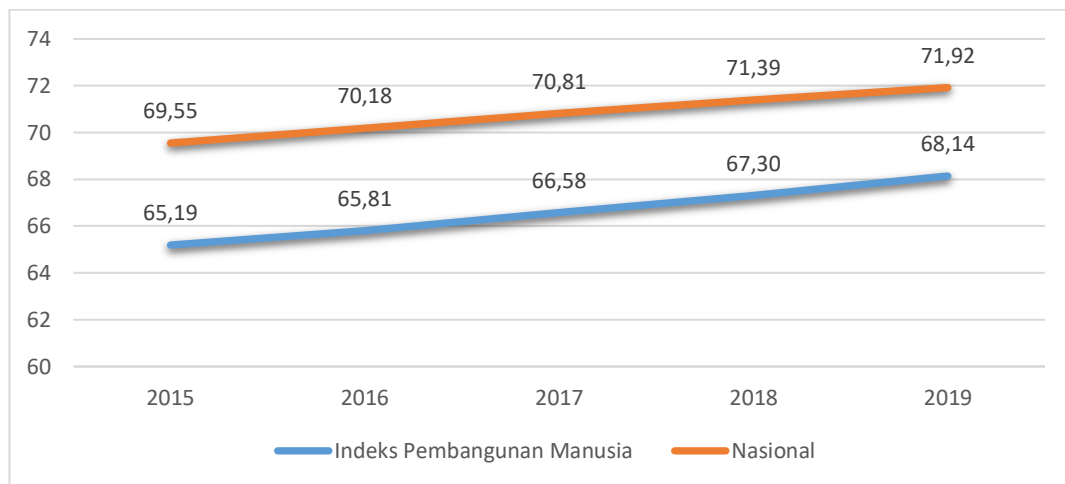
## 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian perkembangan pembangunan nonfisik suatu daerah dalam jangka panjang yang direpresentasikan oleh tiga dimensi meliputi: umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak. Pengukuran IPM memberikan manfaat diantaranya: (1) mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia; (2) menentukan peringkat pembangunan suatu



wilayah/Negara, dan (3) digunakan sebagai salah satu dasar penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

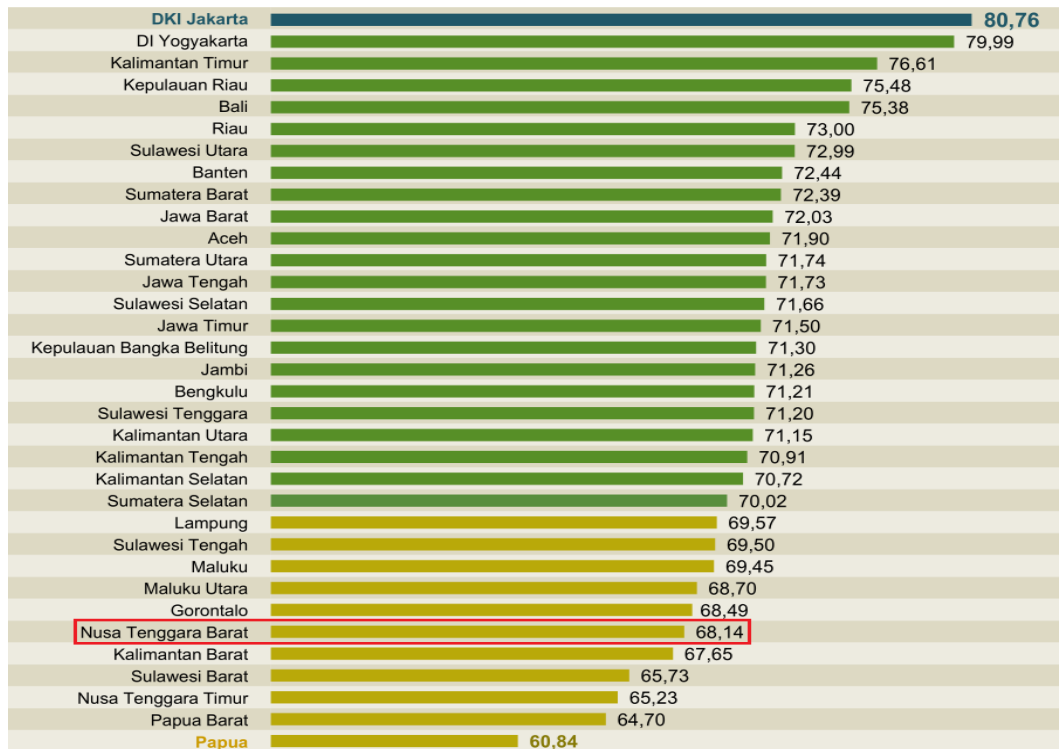
Tahun 2015 dan 2016, IPM NTB berada pada posisi 30 nasional dari 34 provinsi. Namun IPM Provinsi NTB terus meningkat, sehingga tahun 2017, NTB berhasil keluar dari posisi tersebut, naik ke posisi 29 nasional. Tahun 2019 IPM NTB sebesar 68,14 point, terjadi peningkatan sebesar 1,25 persen dibandingkan tahun 2018 pada angka 67,30 point. IPM NTB masih berada pada kategori “sedang” dan masih berada di bawah IPM Nasional. Perkembangan IPM Provinsi NTB dan perbandingan dengan IPM Nasional disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

Gambar 2-16 Perkembangan IPM Provinsi NTB Tahun 2015-2019





Sumber: BPS Indonesia, 2020.

Gambar 2-17 Posisi Relatif IPM NTB Tahun 2019

Dari gambar di atas, diketahui bahwa laju pertumbuhan IPM NTB selama periode 2015-2019 berada di atas laju pertumbuhan IPM Nasional, namun level capaian IPM NTB masih berada di bawah level Nasional. Pada tahun 2019, nilai IPM Provinsi NTB menempati peringkat ke-29 nasional. Seluruh komponen pembentuk IPM mengalami peningkatan selama tahun 2015-2019, seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-25 Perkembangan Komponen IPM Provinsi NTB Tahun 2015-2019

No	Komponen IPM	2015	2016	2017	2018	2019
1	Indeks Pendidikan :	58,59	59,19	60,39	60,85	61,68
	a. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,04	13,16	13,46	13,47	13,48
	b. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	6,71	6,79	6,90	7,03	7,27
2	Indeks Kesehatan:	69,82	69,97	70,08	71,57	71,20
	Umur Harapan Hidup (Tahun)	65,38	65,48	65,55	65,87	66,28
3	Indeks Daya Beli:	67,72	68,81	69,76	70,99	72,02
	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	9.241	9.575	9.877	10.284	10.640
	<b>IPM NTB</b>	<b>65,19</b>	<b>65,81</b>	<b>66,58</b>	<b>67,30</b>	<b>68,14</b>

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

Dari tabel di atas, diketahui bahwa seluruh komponen IPM mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2015-2019 sebagai berikut:



1. Indeks Pendidikan meliputi: (a) Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat menjadi 13,48 tahun pada tahun 2019, dengan peningkatan sebesar 0,01 tahun dibandingkan tahun 2018 yaitu 13,47 tahun, dan (b) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 15 tahun ke atas selama 7,27 tahun (setara kelas VIII SLTP) pada tahun 2019, meningkat 0,14 tahun dibandingkan tahun 2018 selama 7,03 tahun.
2. Indeks Kesehatan berupa Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 66,28 tahun pada tahun 2019 atau meningkat 0,41 tahun dibandingkan tahun 2018 sebesar 65,87 tahun.
3. Indeks Daya Beli berupa Pengeluaran per kapita masyarakat Rp 10.640.000 pada tahun 2019 atau meningkat Rp 356.000 dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 10.284.000.

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Melek huruf merupakan indikator penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah. Angka Buta Huruf (ABH) penduduk usia 15 tahun ke atas tahun 2015 sampai tahun 2019 relatif stabil pada angka sekitar 12 persen, sehingga AMH sekitar 88 persen. Sebaran Angka Buta Huruf menurut kabupaten/kota di Provinsi NTB disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-26 Perkembangan Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas di Kabupaten/Kota Se NTB Tahun 2015-2019

No	Kabupaten/Kota	Angka Buta Huruf 15 <sup>+</sup> (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Lombok Barat	15,55	18,62	15,04	16,28	15,96
2	Lombok Tengah	21,26	19,06	18,26	18,58	16,53
3	Lombok Timur	14,38	12,53	14,34	13,31	12,50
4	Sumbawa	5,92	7,46	6,95	6,04	7,31
5	Dompu	8,48	8,26	8,42	7,86	8,47
6	Bima	7,62	9,52	10,59	11,60	11,92
7	Sumbawa Barat	6,40	5,46	5,37	4,97	5,10
8	Lombok Utara	18,62	18,96	16,54	16,09	21,23
9	Kota Mataram	6,74	7,26	8,29	5,96	7,18
10	Kota Bima	4,28	4,21	6,78	7,17	5,38
<b>Provinsi</b>		<b>13,03</b>	<b>12,94</b>	<b>12,86</b>	<b>12,58</b>	<b>12,41</b>

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

Dari tabel di atas, diketahui bahwa selama tahun 2015-2019, ABH mengalami penurunan sebanyak 0,62 persen sebagai implikasi dari meningkatnya rata-rata lama sekolah, APS, APK dan APM. Rata-rata Lama Sekolah disajikan pada tabel berikut.



Tabel 2-27 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2015 – 2019

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Rata-Rata Lama Sekolah Usia 25 Tahun Keatas (Tahun)	6,71	6,79	6,90	7,03	7,27

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

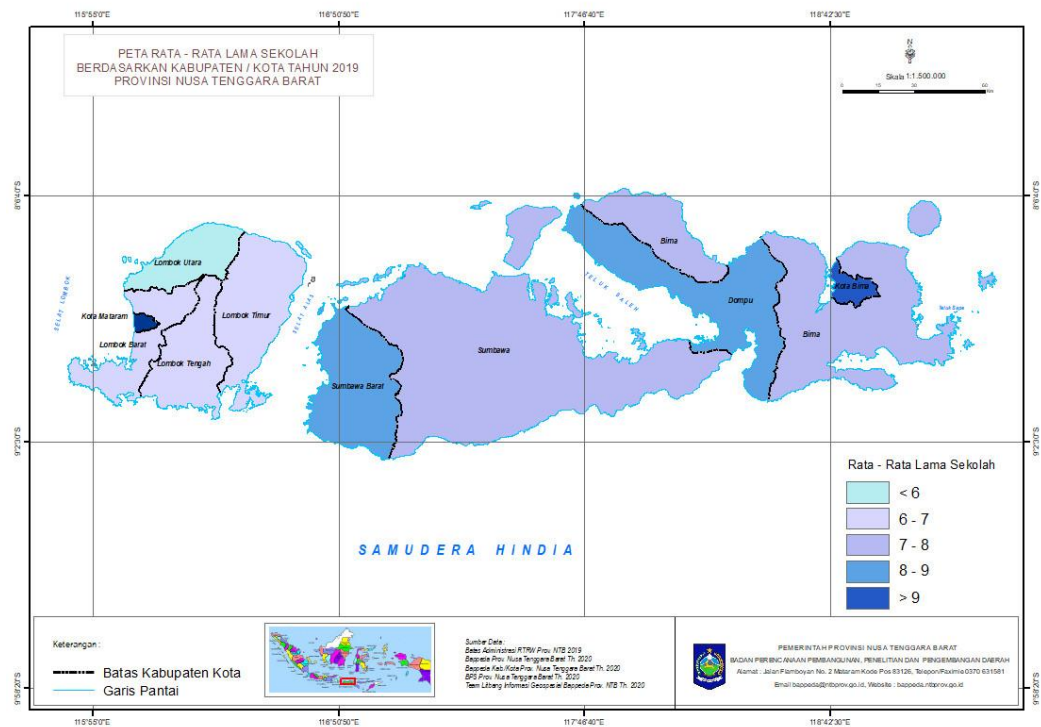
Pada tingkat kabupaten/kota, rata-rata lama sekolah di kabupaten/kota se-Pulau Lombok cenderung lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota di se-Pulau Sumbawa. Hal ini disajikan pada tabel dan peta spasial pada gambar berikut.

Tabel 2-28 Tabel Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Usia 25 tahun ke atas Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2015-2019

No	Keterangan	Tahun					Peningkatan (2015-2019)
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Lombok Barat	5,69	5,93	6,15	6,16	6,37	0,68
2	Lombok Tengah	5,54	5,60	5,59	5,96	6,27	0,73
3	Lombok Timur	6,15	6,26	6,32	6,45	6,69	0,54
4	Sumbawa	7,52	7,53	7,54	7,72	7,91	0,39
5	Dompu	7,83	8,10	8,11	8,12	8,40	0,57
6	Bima	7,36	7,45	7,58	7,59	7,77	0,41
7	Sumbawa Barat	7,68	8,05	8,18	8,24	8,53	0,85
8	Lombok Utara	5,22	5,47	5,54	5,81	5,84	0,62
9	Mataram	9,05	9,25	9,32	9,43	9,45	0,40
10	Kota Bima	9,96	10,13	10,14	10,30	10,38	0,42

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.





Gambar 2-18 Peta Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi NTB Tahun 2019

Dari tabel di atas, terlihat bahwa daerah dengan peningkatan lama sekolah tertinggi terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat meningkat 0,85 tahun, sedangkan peningkatan lama sekolah terendah terjadi di Kota Mataram 0,40 tahun. Sementara itu, capaian lama sekolah tertinggi ditempati Kota Bima 10,38 tahun, selama lama sekolah terendah di Kabupaten Lombok Utara. Ketersediaan sarana prasarana, kemudahan akses, kondisi ekonomi, serta kebijakan pendidikan merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi rata-rata lama sekolah.

**Umur Harapan Hidup (UHH)** merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. UHH di Provinsi NTB disajikan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2-29 Umur Harapan Hidup Provinsi NTB Tahun 2015 – 2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Umur Harapan Hidup (Tahun)	65,38	65,48	65,55	65,87	66,28

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa capaian UHH setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 sebesar 66,28 tahun, meningkat 0,41 tahun dibandingkan tahun 2018 sebesar 65,87 tahun. Peningkatan UHH

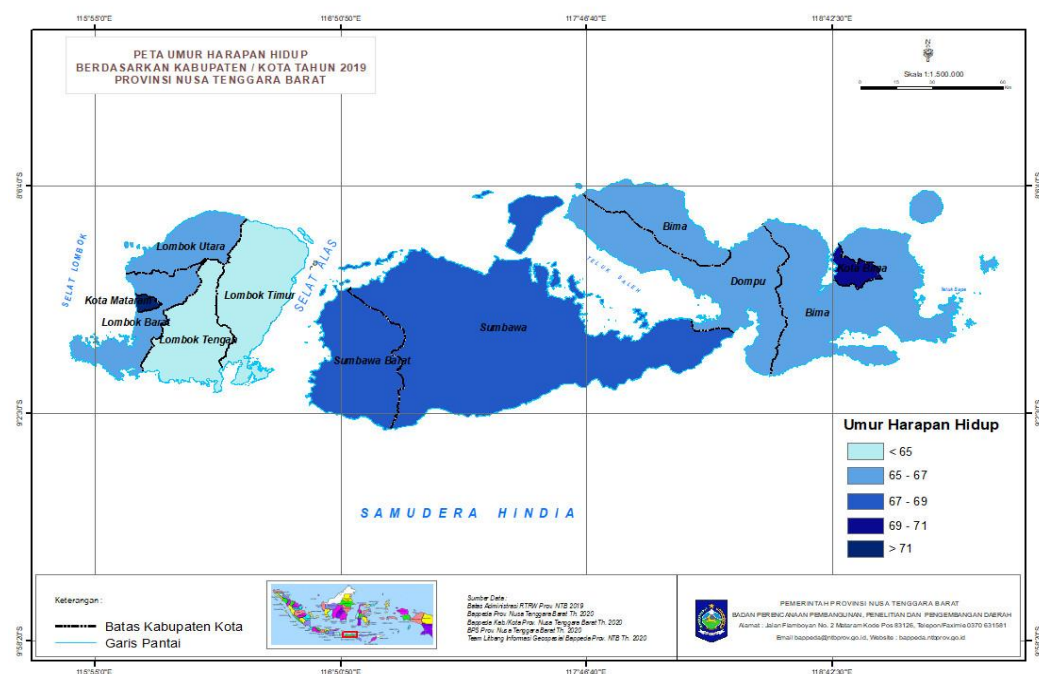


menunjukkan adanya perbaikan derajat kesehatan, sehingga penduduk memiliki peluang untuk hidup lebih panjang melalui tingkat kesehatan yang lebih baik.

Tabel 2-30 Tabel Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2015-2019

No	Keterangan	Tahun					Peningkatan
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Lombok Barat	65,10	65,44	65,78	66,16	66,64	1,54
2	Lombok Tengah	64,75	65,01	65,28	65,59	65,99	1,24
3	Lombok Timur	64,44	64,73	65,01	65,33	65,74	1,30
4	Sumbawa	66,02	66,30	66,58	66,90	67,31	1,29
5	Dompu	65,36	65,62	65,89	66,20	66,60	1,24
6	Bima	64,86	65,13	65,40	65,71	66,11	1,25
7	Sumbawa Barat	66,35	66,66	66,98	67,34	67,80	1,45
8	Lombok Utara	65,59	65,88	66,17	66,50	66,92	1,33
9	Mataram	70,43	70,70	70,98	71,24	71,59	1,16
10	Kota Bima	69,12	69,35	69,58	69,84	70,20	1,08

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.



Gambar 2-19 Peta UHH Provinsi NTB Tahun 2019

Dari tabel dan gambar di atas, diketahui bahwa UHH tertinggi ditempati Kota Mataram dengan 71,59 tahun, sedangkan UHH terendah di Kabupaten Lombok Timur dengan 65,74 tahun. Peningkatan UHH terbesar pada tahun 2015-



2019 ditempati Kabupaten Lombok Barat dengan peningkatan 1,54 tahun, sedangkan peningkatan terendah di Kota Bima dengan peningkatan 1,08 tahun.

Umur Harapan Hidup (UHH) umumnya dan kesehatan khususnya, dipengaruhi langsung oleh keberadaan penyakit yang sering muncul di suatu daerah dan status gizi masyarakat. Sebaran jenis penyakit dan status gizi masyarakat di Provinsi NTB disajikan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2-31 Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Provinsi NTB Tahun 2019

No	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus
1	Infeksi Akut pada saluran pernafasan bagian atas	174.213
2	Penyakit Tekanan Darah Tinggi / Hipertensi	108.127
3	Gastritis	55.956
4	Infeksi pada saluran pernafasan bagian atas (ISPA)	51.604
5	Diare (termasuk tersangka Kolera)	48.205
6	Diabetes Mellitus	41.841
7	common cold	40.790
8	Myalgia	30.178
9	Dispepsia	29.414
10	Penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat (Rematik)	26.380

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2020.

Dari tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kasus penyakit terbanyak yang ditemui di Provinsi NTB tahun 2019 adalah infeksi akut pada saluran pernafasan bagian atas dan Penyakit Tekanan Darah Tinggi/Hipertensi. Dari sepuluh kasus yang terbanyak, hampir seluruhnya merupakan penyakit tidak menular.

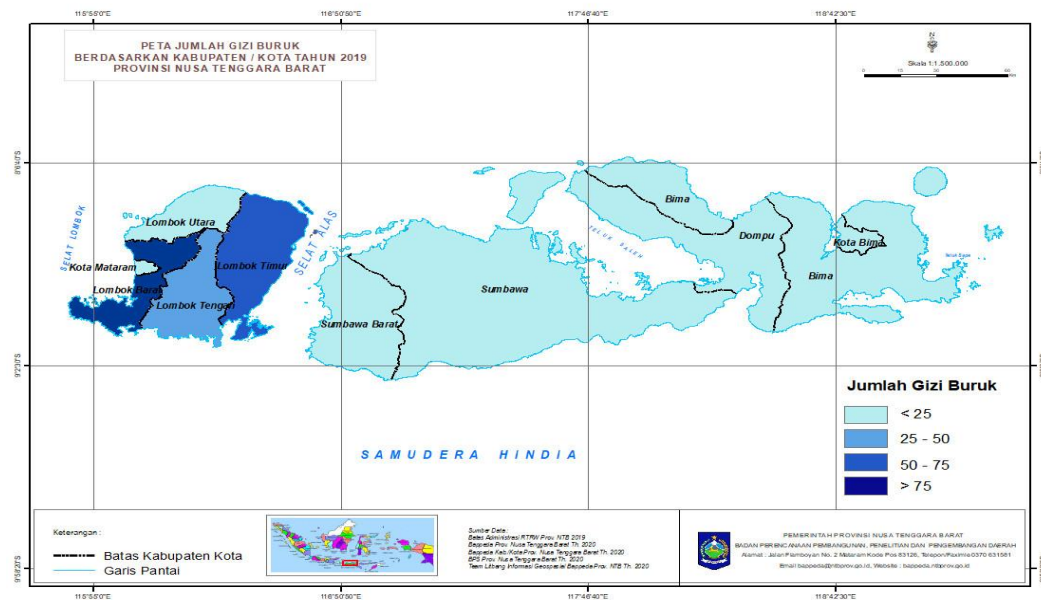
Tabel 2-32 Prevalensi Kurang Gizi Tahun di Provinsi NTB Thn 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Prevalensi Kurang Gizi (%)	17,01	20,20	22,60	26,40	15,87

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2020.

Dari tabel di atas, diketahui bahwa prevalensi kurang gizi di Provinsi NTB cenderung meningkat selama empat tahun terakhir, yakni dari 17,01 persen pada tahun 2015 menjadi 26,40 persen tahun 2018, tetapi pada tahun 2019 berhasil ditekan, sehingga turun drastis menjadi 15,87 persen. Menurunkan angka gizi buruk dan meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH) menjadi pekerjaan rumah yang sangat penting bagi Pemerintah Provinsi NTB.





Gambar 2-20 Peta Jumlah Gizi Buruk Provinsi NTB Tahun 2019

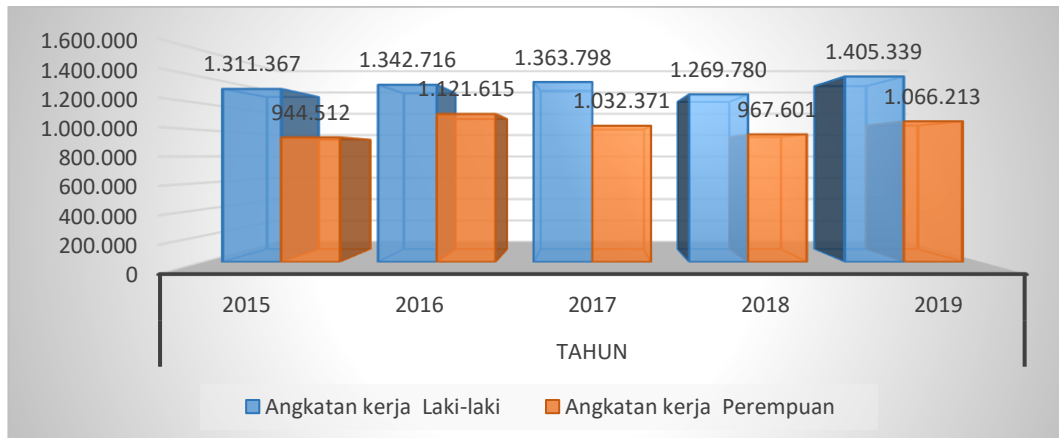
### 3. Tenaga Kerja, Angkatan Kerja dan Pengangguran

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan dua variable ketenagakerjaan yang sangat penting diperhatikan dalam pembangunan wilayah. Data BPS Provinsi NTB, diketahui bahwa selama tahun 2015 - 2019 jumlah tenaga kerja, angkatan kerja dan pengangguran mengalami fluktuasi, sehingga berdampak kepada TPAK dan TPT, seperti disajikan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2-33 TPAK dan TPT di Provinsi NTB Thn 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Tenaga Kerja (orang):	3.390.084	3.443.448	3.498.399	3.394.438	3.600.432
	Laki-laki (orang)	1.611.873	1.637.246	1.663.374	1.613.944	1.711.887
	Perempuan (org)	1.778.211	1.806.202	1.835.025	1.780.494	1.888.545
2	Angkatan Kerja (orang):	2.255.879	2.464.331	2.396.169	2.237.381	2.471.552
	Laki-laki (orang)	1.311.367	1.342.716	1.363.798	1.269.780	1.405.339
	Perempuan (org)	944.512	1.121.615	1.032.371	967.601	1.066.213
	<b>TPAK (%)</b>	<b>66,54</b>	<b>71,57</b>	<b>68,49</b>	<b>65,91</b>	<b>68,65</b>
3	Pengangguran (orang):	128.376	97.021	79.449	83.257	84.516
	Laki-laki (orang)	88.294	61.129	51.471	51.199	47.866
	Perempuan (org)	40.082	35.892	27.978	32.058	36.650
	<b>TPT (%)</b>	<b>5,69</b>	<b>3,94</b>	<b>3,32</b>	<b>3,72</b>	<b>3,42</b>

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

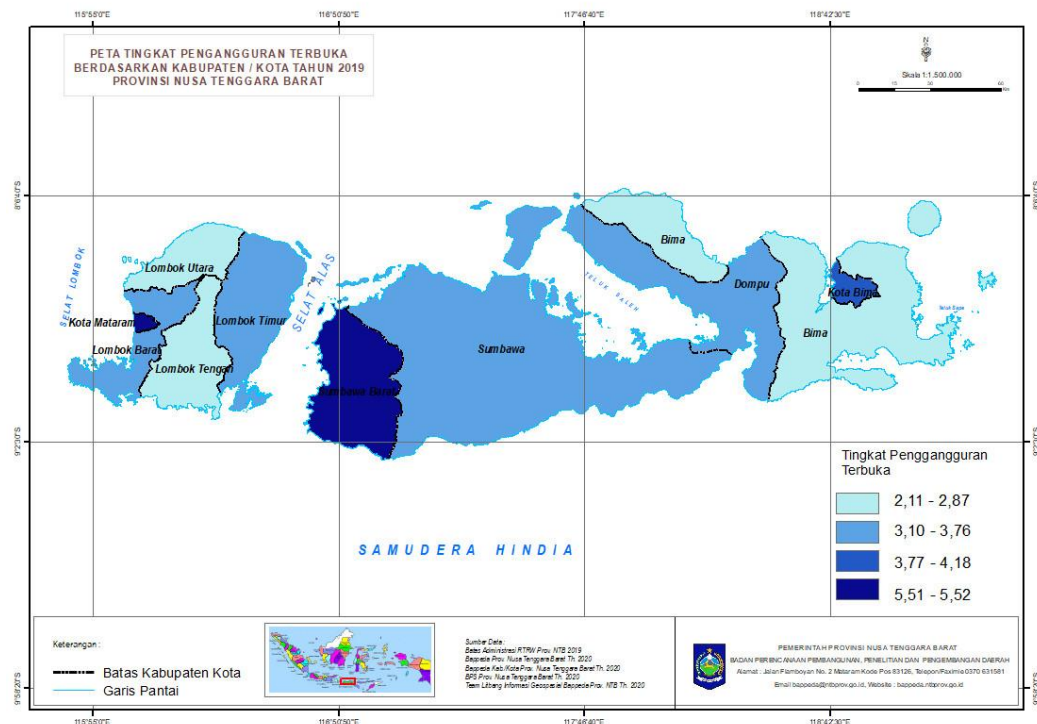


Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

Gambar 2-21 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Provinsi NTB Tahun 2015 -2019

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi NTB tahun 2015 – 2019 cenderung mengalami fluktuasi yang disebabkan adanya fluktuasi jumlah angkatan kerja dan jumlah tenaga kerja dari tahun ke tahun, yaitu dari 66,65 persen pada tahun 2015 naik menjadi 71,57 persen pada tahun 2016, kemudian turun menjadi 65,91 persen pada tahun 2018 dan kembali naik menjadi 68,65 persen pada tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan TPAK Indonesia selama tahun 2015- 2019 yang baru mencapai 67,49 persen, maka TPAK Provinsi NTB masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi NTB tahun 2015 – 2019 cenderung menurun, yaitu dari 5,69 persen pada tahun 2015 menjadi 3,42 persen pada tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan TPT Indonesia selama tahun 2015-2019, TPT Provinsi NTB selalu berada di bawah Indonesia. Capaian TPT NTB tahun 2019 lebih rendah 0,30 point jika dibandingkan tahun 2018. Peta sebaran TPT disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2-22 Peta Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTB Tahun 2019

Peningkatan TPAK dan penurunan TPT dilakukan melalui perluasan kesempatan kerja dan penciptaan peluang berusaha pada berbagai sektor ekonomi/lapangan usaha. Sebaran angkatan kerja (usia 15 tahun ke atas) yang bekerja pada berbagai sektor ekonomi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-34 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Sektor Ekonomi/Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2019 (Persen)

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	35.82	35.85	35,81	33,48	30,47
Pertambangan dan Penggalian	1.36	1.36	1,35	1,63	1,56
Industri Pengolahan	12.05	12.11	12,04	12,38	13,27
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.48	0.48	0,48	0,63	0,35
Konstruksi	7.41	7.38	7,41	6,91	8,52
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil & Sepeda Motor	18.36	18.39	18,35	20,33	19,98
Transportasi dan Pergudangan	3.37	3.39	3,35	3,39	3,70
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.73	4.76	4,71	4,24	4,26



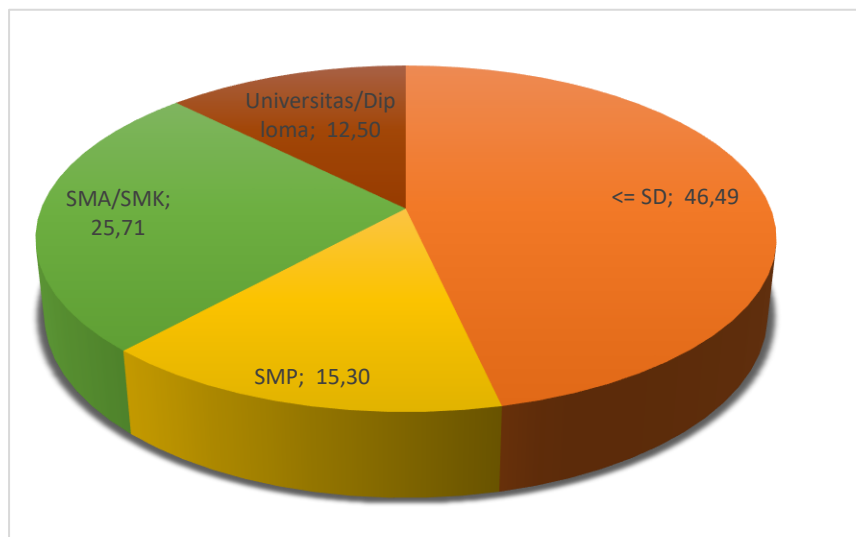


Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
Informasi dan Komunikasi	0.47	0.47	0,47	0,27	0,36
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.97	0.90	0,99	1,07	1,18
Jasa Perusahaan	0.71	0.72	0,71	0,61	0,65
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3.70	3.65	3,77	3,99	4,23
Jasa Pendidikan	5.27	5.30	5,26	5,49	6,00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.85	0.80	0,89	1,00	1,32
Pengadaan Listrik dan Gas, Real Estate, Jasa Lainnya	4.44	4.44	4,42	4,58	4,15
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

Dari tabel di atas, diketahui bahwa menurut sektor ekonomi/lapangan usaha, penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja pada lapangan usaha pertanian di provinsi NTB masih cukup tinggi yang mencapai lebih dari 30 persen. Sedangkan tenaga kerja yang bekerja pada sektor yang masih rendah yaitu Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang.

Penyerapan tenaga kerja hingga 2019 masih didominasi oleh penduduk berpendidikan SD sebanyak 46,49 persen, sedangkan penduduk berpendidikan menengah SMP sederajat 15,30 persen, SMA sederajat 25,71 persen, dan berpendidikan tinggi hanya sebanyak 12,50 persen. Kondisi ini disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi NTB 2020.

Gambar 2-23 Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi NTB Tahun 2019



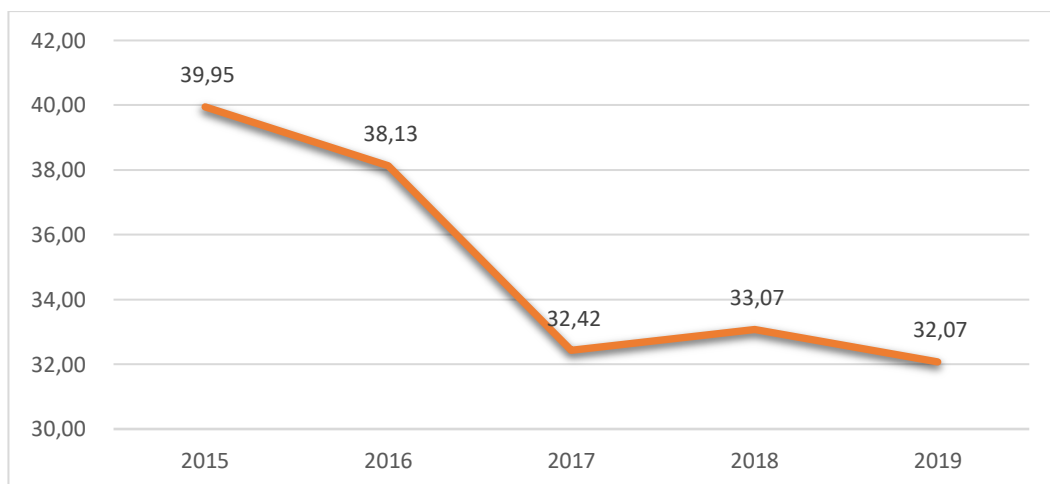
#### 4. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Besarnya persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah menggambarkan kapasitas kemandirian keuangan daerah. Sampai saat ini, PAD belum mampu menjadi sumber utama penerimaan daerah, mayoritas daerah masih sangat tergantung kepada dana dari transfer pemerintah pusat. Keadaan PAD atau kemandirian keuangan daerah Provinsi NTB disajikan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2-35 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2015-2019

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah (PD)	Persentase PAD terhadap PD
2015	1.420.471.239.378,00	3.555.737.341.478,00	39,95
2016	1.450.044.930.319,00	3.802.933.445.799,00	38,13
2017	1.641.688.654.497,00	5.063.036.807.258,00	32,42
2018	1.767.746.421.040,00	5.346.185.181.053,00	33,07
2019	1.682.135.490.200,00	5.244.782.852.000,00	32,07

Sumber: BAPPENDA Provinsi NTB, 2020.



Sumber: BAPPENDA Provinsi NTB, 2020.

Gambar 2-24 Perkembangan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2015-2019

Dari tabel dan gambar di atas, diketahui bahwa persentase PAD terhadap pendapatan daerah Provinsi NTB masih berkisar 30-40 %, artinya keuangan daerah masih sangat tergantung kepada sumber pendapatan lain, terutama yang bersumber dari dana transfer/perimbangan. Dalam tiga tahun terakhir (2017-2019), menunjukkan bahwa persentase PAD semakin menurun, meskipun secara angka realisasi PAD terus menunjukkan peningkatan.



## 5. Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan yang lebih baik. Opini yang paling tinggi yang dikeluarkan BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), artinya laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan satandar akuntansi pemerintahan dan bebas dari salah saji material. Pemerintah Provinsi NTB telah berhasil meraih opini WTP selama sembilan tahun berturut-turut yaitu tahun 2011-2019.

### 2.3. Aspek Pelayanan Umum

#### 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

##### 1. Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu, baik pada pendidikan formal (SD, SMP dan SMA/SMK) maupun pendidikan nonformal (Paket A, Paket B, dan Paket C). APK yang tinggi menunjukkan tingkat partisipasi sekolah tinggi. Perkembangan APK pada jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-36 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi NTB Tahun 2015-2019

No	Tahun	APK SD/MI/ Paket A (%)	APK SMP/MTS/ Paket B (%)	APK SMA/MA/SMK/ Paket C (%)
1	2015	111.54	91.94	89.51
2	2016	110.78	93.40	91.25
3	2017	109.63	94.97	93.89
4	2018	108,82	93,83	89,64
5	2019	108,50	92,07	90,86

Sumber: BPS Provinsi NTB, Tahun 2020.

Dari tabel di atas diketahui bahwa APK SD/ sederajat mencapai maksimal, sedangkan APK SMP/ sederajat dan APK SMA/ sederajat sudah cukup tinggi, walau belum mencapai maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin peduli akan pentingnya pendidikan seiring dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan pendidikan. Jumlah penduduk usia sekolah yang menjadi dasar perhitungan APK tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-37 Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Provinsi NTB Tahun 2015-2019

Tahun	Penduduk Usia 7-12 Thn (SD/Sederajat) (orang)	Penduduk Usia 13-15 Tahun (SMP/Sederajat) (orang)	Penduduk Usia 16-18 Tahun (SMA/Sederajat) (orang)
2015/2016	566.512	271.023	267.108
2016/2017	574.512	271.934	267.146
2017/2018	580.258	271.348	267.651





Tahun	Penduduk Usia 7-12 Thn (SD/Sederajat) (orang)	Penduduk Usia 13-15 Tahun (SMP/Sederajat) (orang)	Penduduk Usia 16-18 Tahun (SMA/Sederajat) (orang)
2018/2019	590.459	274.998	267.595

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2020.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan, baik pada pendidikan formal maupun nonformal. Perkembangan APM di Provinsi NTB tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2-38 Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi NTB Tahun 2015 -2019

No	Tahun	APM SD/MI/Paket A (%)	APM SMP/MTS/Paket B (%)	APM SMA/MA/SMK/Paket C (%)
1	2015	97.80	82.83	64.97
2	2016	97.90	83.17	65.19
3	2017	98.13	83.57	65.67
4	2018	98.86	83.88	65.77
5	2019	98.87	83.92	66.04

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari ketiga jenjang pendidikan, nilai APM cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai 2019. APM mendekati 100 persen menunjukkan bahwa hampir 100 persen penduduk bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan usianya, sementara APM yang semakin rendah menunjukkan masih banyak penduduk yang tidak bersekolah pada jenjang yang sesuai usianya.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai, baik pada pendidikan formal maupun nonformal. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Perkembangan APS disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-39 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi NTB Thn 2015-2019

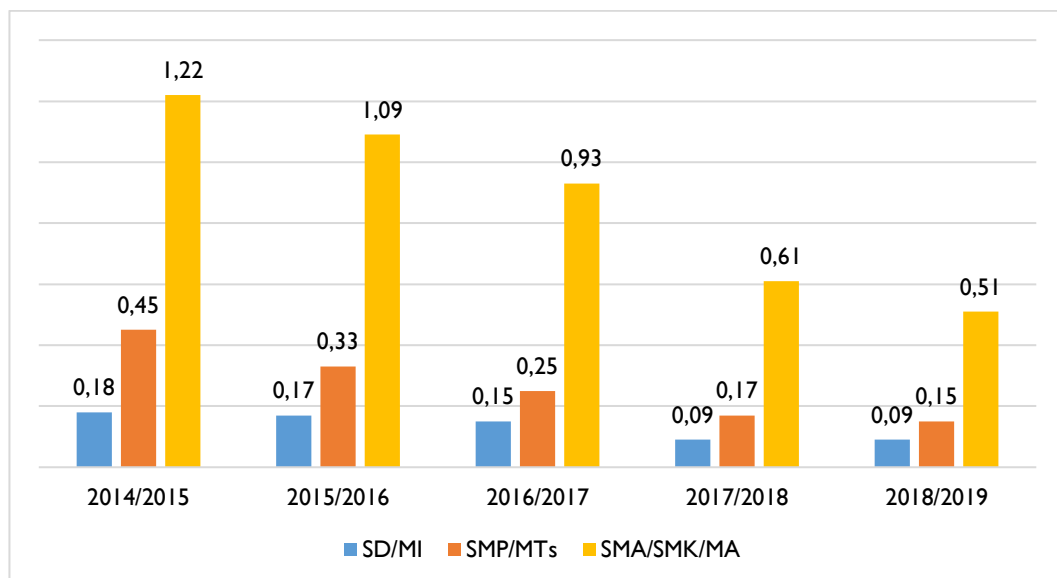
Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun
2015	99,48	97,44	75,86	26,84
2016	99,42	97,60	76,24	27,79
2017	99,43	97,69	76,61	28,52
2018	99,43	97,72	76,89	25,74
2019	99,46	97,92	77,51	25,59

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.



Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka APS semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa akses layanan pendidikan jenjang SD dan SMP cukup tinggi seiring adanya program wajib belajar 9 tahun, pembangunan rumah singgah dan penambahan ruang kelas baru serta dana BOS untuk membantu operasional sekolah. Sementara itu, APS usia 16-18 tahun (jenjang SMA) cenderung meningkat, sedangkan usia 19-24 tahun (jenjang perguruan tinggi) terlihat menurun. APS kedua kelompok ini masih tergolong rendah disebabkan terbatasnya akses pendidikan menengah dan tinggi di kabupaten, kecamatan dan daerah terpencil.

Adanya dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA yang bertujuan mengurangi beban biaya pendidikan yang dikeluarkan masyarakat, menunjukkan hasil yang positif, yaitu menurunnya angka putus sekolah (droup out) dan meningkatnya angka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kondisi tersebut disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2015-2019.

Gambar 2-25 Angka Putus Sekolah (Droup Out) Tahun 2014/2015 - 2018/2019

Dari gambar di atas, terlihat tren persentase jumlah siswa putus sekolah pada semua jenjang pendidikan menurun. Penurunan angka putus sekolah tersebut karena adanya dukungan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa kurang mampu, dana BOS dan penanganan dini terhadap siswa yang potensial putus sekolah.

Mutu dan daya saing pendidikan relatif masih rendah, hal ini dapat dilihat dari tingkat akreditasi sekolah pada jenjang SMK, 11% sekolah masih



terakreditasi C dan 64,8% belum terakreditasi. Sedangkan pada jenjang SMA, 12,30% terakreditasi C dan 19,50% belum terakreditasi. Adapun Pada pendidikan non formal, lembaga PAUD baru terakreditasi 8,24% sedangkan sisanya belum terakreditasi. LKP baru terakreditasi 10,97% dan PKBM sebanyak 11,30%. Rata-rata hasil ujian nasional pada Hasil UN 2017 masih relatif rendah yaitu 47,75 dan pada tahun 2019 menurun menjadi 45,17 dan di bawah rata-rata nasional sebesar 51,56. Sementara itu terkait dengan kompetensi guru, dari hasil Uji kompetensi guru (UKG) pada jenjang SMA dan SMK sebesar 56,30 (nasional 61,47) dan SMK sebesar 54,96 (nasional 58,30). Sedangkan dari sisi kualifikasi guru, guru dengan tingkat pendidikan dibawah D4/S1 pada jenjang SMA sebanyak 2,3% dan 5,7% pada jenjang SMK. Adapun luaran SMA/SMK juga memberikan kontribusi tertinggi pada Tingkat penganggurn terbuka yaitu pengangguran dari SMA sebesar 6,43% dan dari SMK sebesar 9,67%

## 2. Kesehatan

Penyelenggaran urusan pemerintah bidang kesehatan bisa dilihat dari capaian indikator angka usia harapan hidup (UHH), yang dihitung menggunakan variabel Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Perkembangan AKB dan AKI di Provinsi NTB tahun 2015-2019 disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2-40 Jumlah Kasus Kematian Bayi (AKB) di Prov. NTB Thn 2015-2019

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Mataram	34	25	44	58	36
2	Lombok Barat	42	38	31	28	46
3	Lombok Utara	82	59	86	87	76
4	Lombok Tengah	192	192	242	230	204
5	Lombok Timur	460	467	346	226	288
6	Sumbawa Barat	28	24	17	17	13
7	Sumbawa	75	66	30	74	59
8	Dompu	35	30	40	43	21
9	Bima	91	80	74	79	79
10	Kota Bima	17	25	19	24	28
<b>NTB</b>		1056	1006	929	866	850

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2015-2019.

Data pada tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kematian bayi dalam 5 tahun terakhir terus menurun. Capaian ini cukup akseleratif untuk mendukung pencapaian indikator usia harapan hidup (UHH). Pada tahun 2019, Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah dengan jumlah kematian bayi tertinggi sebanyak 288 kasus, sedangkan yang paling rendah di Kabupaten Sumbawa Barat dengan kasus sebanyak 13.





Tabel 2-41 Proporsi Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Provinsi NTB Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Proporsi (per 1.000 KH)	10,35	9,86	9,00	7,91	8,36

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2020.

Dari tabel di atas, diketahui bahwa proporsi kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup menunjukkan kondisi positif, yaitu dari 10,35 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 menjadi 8,36 kematian per 1.000 kelahiran hidup tahun 2019. Pelayanan ibu hamil hingga melahirkan telah berhasil menekan angka kematian bayi.

Tabel 2-42 Jumlah Kasus Kematian Ibu (AKI) di Prov. NTB Tahun 2015-2019

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Mataram	10	11	6	9	6
2	Lombok Barat	5	5	4	5	6
3	Lombok Utara	2	2	3	2	4
4	Lombok Tengah	16	26	24	24	30
5	Lombok Timur	28	20	22	34	29
6	Sumbawa Barat	1	1	4	1	2
7	Sumbawa	10	7	4	12	5
8	Dompu	12	6	4	0	4
9	Bima	8	9	8	8	5
10	Kota Bima	3	5	6	4	6
<b>NTB</b>		95	92	85	99	97

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2019.

Dari tabel di atas, diketahui bahwa AKI selama tahun 2015-2019 berfluktuasi sekitar 85 - 99 kasus. Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah dengan jumlah kematian ibu tertinggi tahun 2019.

Tabel 2-43 Proporsi Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Provinsi NTB Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Proporsi (per 100.000 KH)	93,19	90,25	82,40	90,49	93,92

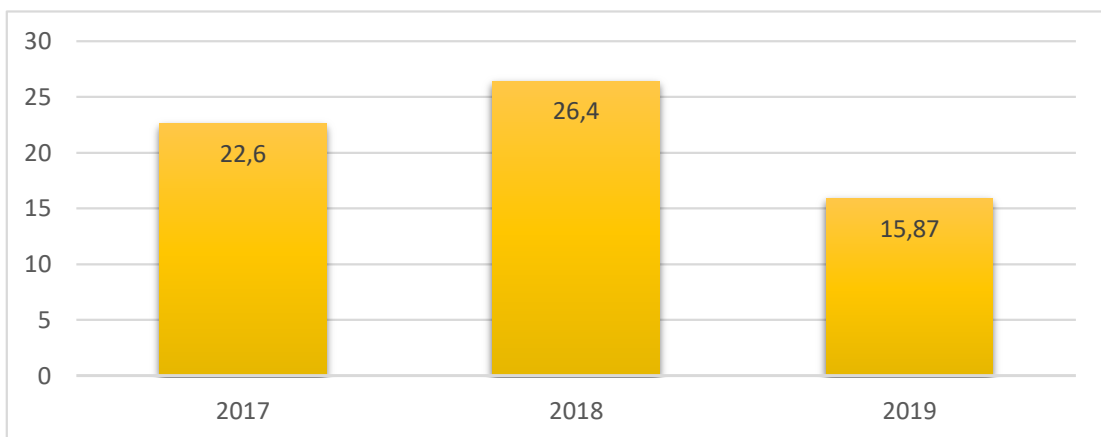
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2019.

Dari tabel di atas, diketahui bahwa proporsi angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup selama tahun 2015-2019 berfluktuasi sekitar 82,40 -93,92 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Kesiapsiagaan Desa Siaga di Desa/Kelurahan memiliki kontribusi yang positif terhadap penurunan AKB dan AKI



yang berpengaruh langsung terhadap capaian target Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi NTB. Pelaksanaan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga aktif di Provinsi NTB sampai tahun 2019 tercatat sebanyak 1.085 desa/kelurahan atau 95,43% dari total 1.137 Desa/kelurahan.

Prevalensi Kurang Gizi di Provinsi NTB masih cukup tinggi, meskipun menunjukkan trend yang cenderung menurun. Pada periode 2017-2019 menurun dari 26,40% menjadi 15,87%. Angka ini menunjukkan keberhasilan pemerintah Daerah dalam menangani gizi buruk dan gizi kurang. Beberapa faktor penyebab keberhasilan penurunan prevalensi gizi kurang adalah Asupan gizi yang terus membaik, terus meningkatnya partisipasi masyarakat di posyandu, Hygiene sanitasi lingkungan dan perorangan serta akses air bersih yang terus membaik, dan faktor-faktor lainnya.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2019

Gambar 2-26 Prevalensi Kurang Gizi NTB Tahun 2017-2019

Adapun terkait pengendalian penyakit menular dan tidak menular, ditandai dengan: (1) Success Rate/Angka Keberhasilan Pengobatan tuberkulosis semua tipe 61,48% nasional 77,57%; (2) pada penyakit DBD dengue incidence rate per 100.000 penduduk sebesar 26,86 di atas angka nasional 22,55% dan Case Fatality Rate 0,15%; (3) angka morbiditas 2016 sebesar 20,81% masih di atas nilai nasional (15,18%); (4) persentase merokok pada penduduk  $\geq 15$  tahun pada tahun 2017 sebesar 30,88% di atas nilai nasional 28,97%. Penyakit Kardiovaskular menjadi satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia, selain itu orang dengan komorbiditas Penyakit Tidak Menular (PTM) beresiko tinggi mengalami sakit yang lebih parah akibat terinfeksi COVID-19, sehingga orang dengan PTM harus tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan di tengah keterbatasan pelayanan kesehatan saat pandemi ini. Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan, terutama dilihat dari lamanya Usia Harapan Hidup (UHH) ditentukan pula oleh kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan seperti: Rumah Sakit,



Puskesmas, Posyandu, dan lain-lainya. Kualitas fasilitas kesehatan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-44 Persentase Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Provinsi NTB Tahun 2018

No	Fasilitas Kesehatan	Provinsi NTB	Indonesia
1	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi (%)	69,44	70,03
2	Persentase Puskesmas Terakreditasi (%)	80,72	75,23
3	Persentase Posyandu Aktif (%)	52,82	61,32

Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2018: *Profil Kesehatan Indonesia 2018*.

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa persentase Puskesmas terakreditasi di Provinsi NTB sudah melampaui capaian nasional, sedangkan persentase rumah sakit terakreditasi dan persentase posyandu aktif masih dibawah nasional. Peningkatan kualitas fasilitas kesehatan menentukan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Dari sisi ketersediaan tenaga kesehatan, persentase Puskesmas dengan kecukupan dokter dengan status kurang sebesar 35,44%; (2) persentase Puskesmas dengan kecukupan dokter gigi dengan status kurang sebesar 40,51%; (3) persentase Puskesmas memiliki 5 jenis tenaga kesehatan promotif preventif 50,63% pada tahun 2017 menjadi 63,9% tahun 2019; (4) Jumlah tenaga kesehatan belum optimal, terutama di daerah terpencil.

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan dan jembatan merupakan prasarana mutlak untuk memperlancar kegiatan ekonomi suatu daerah, serta meningkatkan mobilitas penduduk dan perdagangan barang antar wilayah. Untuk mendukung kelancaran transportasi darat, hingga tahun 2019 di Provinsi NTB telah dibangun Jalan Negara 934,55 km dan Jalan Provinsi 1.484,43 km. Jenis permukaan dan kondisi jalan, serta jembatan tersebut disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2-45 Panjang Jalan Provinsi NTB menurut Jenis dan Kondisi Tahun 2019

No	Uraian	Panjang (km)	%
1	Jenis Permukaan:		
	a. Diaspal	1.295,66	87,28
	b. Kerikil	27,83	1,87
	c. Tanah	35,10	2,37
	d. Tidak Dirinci	125,84	8,48
	<b>TOTAL</b>	<b>1.484,43</b>	<b>100,00</b>
2	Kondisi Jalan:		
	a. Baik	1.029,00	69,32
	b. Sedang	212,73	14,33
	c. Rusak Ringan	2,20	0,15
	d. Rusak Berat	115,48	7,78





No	Uraian	Panjang (km)	%
	e. Tidak Dirinci	125,03	8,42
	<b>TOTAL</b>	<b>1.484,43</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Dinas PUPR Provinsi NTB, 2019.

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar Jalan Provinsi sudah beraspal dan dalam kondisi baik, sementara sebagian kecilnya belum beraspal dan dalam kondisi sedang dan rusak.

Tabel 2-46 Jumlah dan Kondisi Jembatan di Provinsi NTB Tahun 2019

Jenis Jembatan	Keadaan Jembatan Provinsi			
	Bentang < 6 m		Bentang > 6 m	
	Jumlah	Meter	Jumlah	Meter
1. Beton	157	639,40	434	6.535,60
2. Komposit	6	21,50	26	611,50
4. Rangka Baja	1	2,70	30	1.634,00
4. Lintasan Basah	6	28,00	121	4.063,00
<b>Jumlah</b>	<b>170</b>	<b>691,60</b>	<b>611</b>	<b>12.844,10</b>

Sumber: Dinas PUPR Provinsi NTB, 2019.

Dari tabel di atas, diketahui bahwa jembatan kewenangan Provinsi NTB, baik untuk bentang < 6 meter maupun bentang > 6 m sebagian berupa jembatan beton, sedangkan sebagian kecilnya berupa jembatan komposit, rangka baja dan lintasan basah.

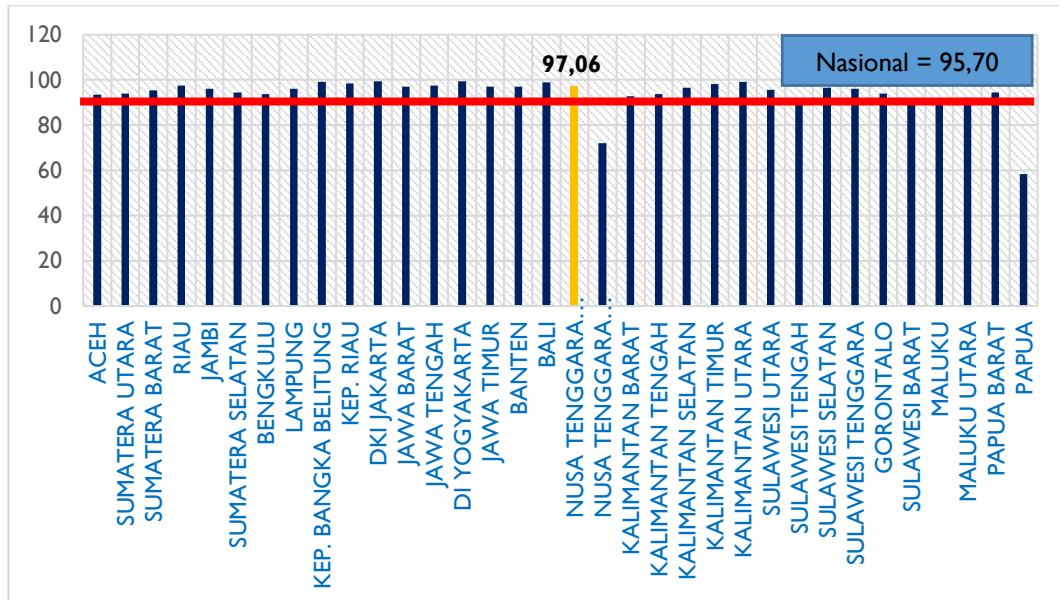
Untuk bidang penataan ruang, telah tersedia dokumen perencanaan utama sesuai Undang-Undang Penataan Ruang, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029. Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2010, disebutkan bahwa struktur ruang yang terkiat terkait sistem perkotaan meliputi: Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berada di Kota Mataram; Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di Praya, Sumbawa Besar dan Bima; Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKW-P) berada di Gerung, Tanjung, Selong, Taliwang, Dompu, Woha; dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di Lembar, Narmada, Kopang, Sengkol, Mujur, Bayan, Pemenang, Masbagik, Keruak, Labuhan Lombok, Poto Tano, Jereweh, Alas, Empang, Lunyuk, Lenangguar, Labangka, Calabai, Kempo, Hu'u, Kilo, Kore, O'o, Sila, Tangga, Wawo, Wera, Sape.

#### 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan



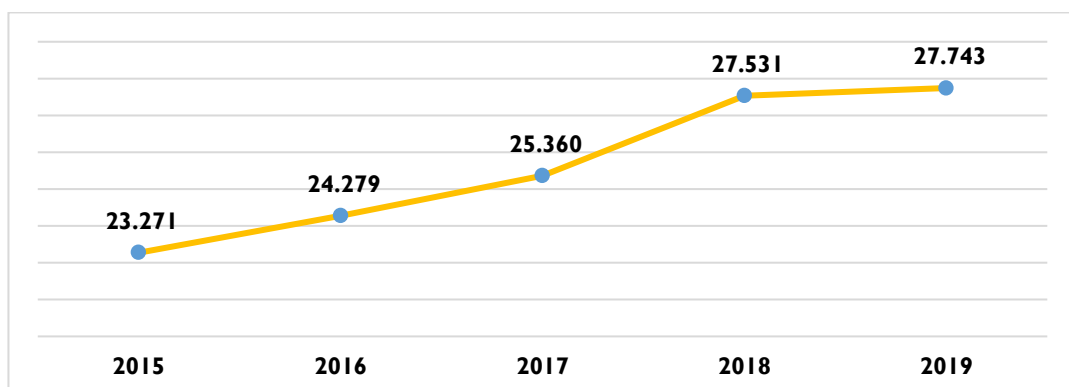
pelayanan urusan perumahan yang meliputi: (1) rumah layak huni dan terjangkau, dan (2) lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Jumlah rumahtangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni dan terjangkau di Provinsi NTB tahun 2018 mencapai 97,06 %, lebih tinggi dari capaian nasional sebesar 95,70 %, seperti disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Indonesia, 2019.

Gambar 2-27 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak Dan Terjangkau Tahun 2018

Perkembangan jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi NTB dan sebarannya di 10 kabupaten/kota yang ditangani secara selama tahun 2015-2019 mencapai 27.743 unit dengan perkembangannya disajikan pada gambar dan tabel berikut.



Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, 2019.

Gambar 2-28 Perkembangan Jumlah Rumah Layak Huni yang Ditangani Thn 2015-2019



Tabel 2-47 Data Penanganan Rumah Tidak Layak Huni menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2015-2019

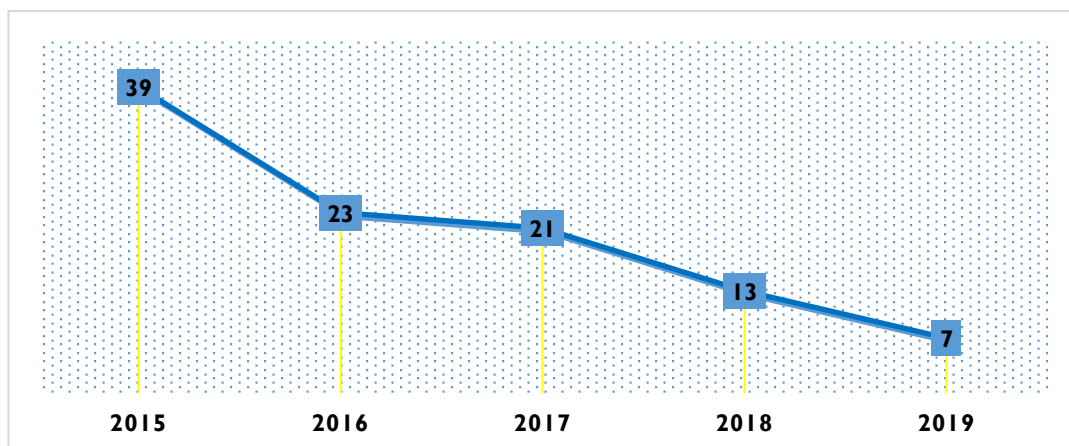
No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kota Mataram	580	26	32	110	-
2	Lombok Barat	3,545	158	160	291	25
3	Lombok Tengah	5,822	195	76	444	15
4	Lombok Utara	208	70	208	108	12
5	Lombok Timur	6,301	309	217	651	98
6	Sumbawa Barat	356	18	96	61	-
7	Sumbawa	2,226	76	52	156	52
8	Dompu	1,278	38	72	81	-
9	Bima	1,834	92	121	176	10
10	Kota Bima	185	26	47	93	-
<b>Jumlah</b>		<b>23,271</b>	<b>1,008</b>	<b>1,081</b>	<b>2,171</b>	<b>212</b>

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, 2019.

Menurut pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang standar Pelayanan Minimal, ada dua jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah provinsi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah provinsi.

##### 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan pembangunan adalah terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum. Selama tahun 2015- 2019, jumlah konflik di Provinsi NTB menunjukkan trend penurunan, seperti disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, 2019.

Gambar 2-29 Jumlah Konflik Sosial di Provinsi NTB Tahun 2015-2019





Upaya penurunan konflik di Provinsi NTB dilakukan melalui koordinasi dengan aparat keamanan dan organisasi (mitra kerja) yang dibentuk untuk keperluan tersebut seperti: Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem), dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Sekecil apapun isu yang berpotensi menimbulkan konflik yang berdasarkan hasil deteksi dini akan ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan atau aksi dalam pencegahan dini.

Terkait penanganan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, telah dilakukan secara preventif. Selama tahun 2015-2019, jumlah pelanggaran terhadap PERDA dan Peraturan Gubernur sebanyak 120 kasus dan telah tertangani seluruhnya.

Bencana yang terjadi di Provinsi NTB selama tahun 2015- 2019 sebagian besar berupa gejala alam antara lain: angin puting beliung, banjir, tanah longsor, gempa, kekeringan, dan letusan gunung berapi. Jenis dan jumlah bencana tersebut disajikan pada tabel berikut.

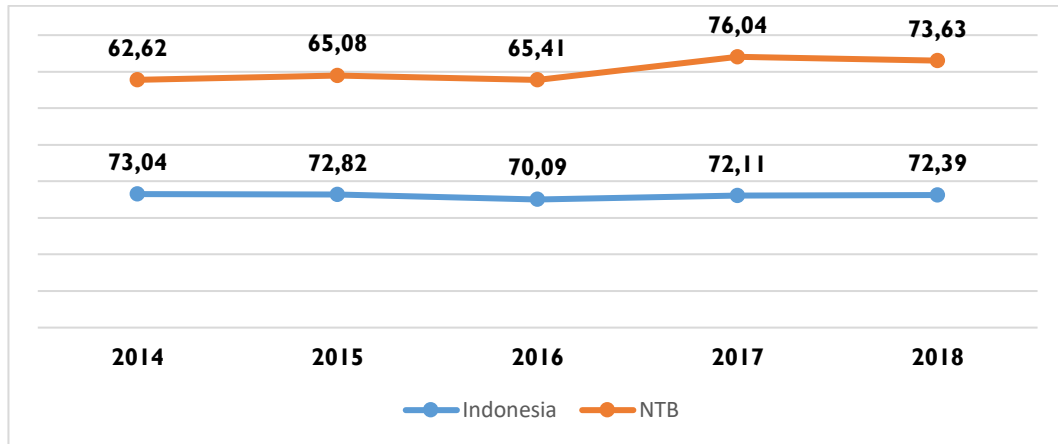
Tabel 2-48 Jumlah Bencana yang Terjadi di Provinsi NTB Tahun 2015-2019

No	Jenis Bencana	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kebakaran (Permukiman/Karhutla)	1	-	-	-	20
2	Angin Kencang/Puting Beliung	6	3	2	5	46
3	Banjir/Banjir Bandang	22	32	19	24	16
4	Tanah Longsor	4	9	2	3	3
5	Gempa	-	13	-	3	3
6	Gelombang Pasang / Banjir ROB	-	3	-	-	3
7	Kekeringan	1	1	1	-	-
8	Letusan Gunung Berapi	1	1	-	-	-

Sumber: BPBD Provinsi NTB, 2019.

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa wilayah Provinsi NTB cukup rentan terhadap bencana alam terutama banjir, gempa bumi, angin kencang/puting beliung, dan tanah longsor yang disebabkan oleh perubahan cuaca dan musim (faktor iklim). Berdasarkan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan Perubahan Iklim (SIDIK) yang dipublikasi oleh KLHK, pada suatu daerah dapat diketahui tingkat kerentanan terhadap bencana terkait dengan kondisi iklim di daerah tersebut.

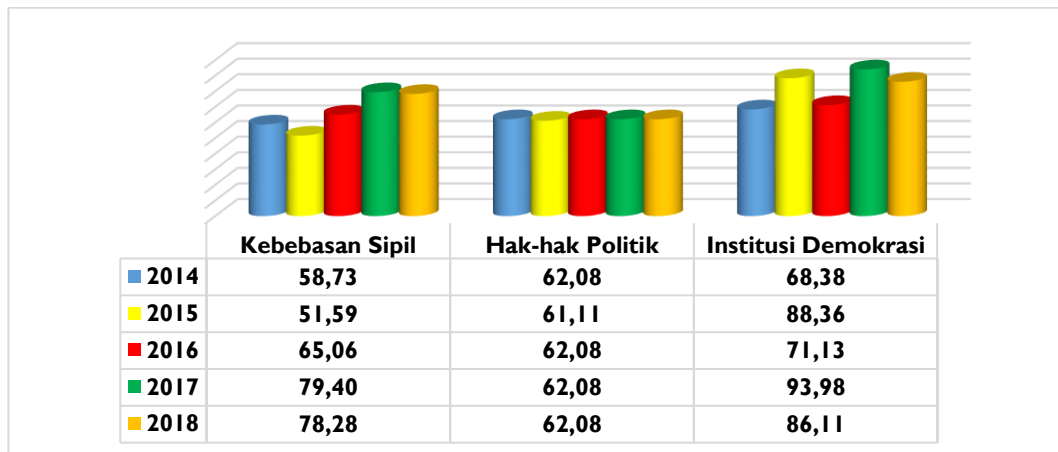
Indeks demokrasi Indonesia untuk Provinsi NTB tahun 2018 tercatat sebesar 73,63, menurun dari tahun 2017 sebesar 76,04, namun angka ini masih berada di atas indeks demokrasi nasional sebesar 72,39. Perkembangan indeks demokrasi NTB dan Indonesia tahun 2014-2018 disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2019.

Gambar 2-30 Indeks Demokrasi di Provinsi NTB dan Indonesia Thn 2014-2018

Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia meliputi tiga aspek yakni: Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Institusi Demokrasi, selama lima tahun terakhir terus mengalami tren positif, seperti disajikan pada Gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2019.

Gambar 2-31 Perkembangan Indeks Demokrasi Menurut Aspeknya di Provinsi NTB Tahun 2014-2018

Dari gambar di atas, diketahui bahwa aspek yang masih tertinggal dari nilai capaian nasional di Provinsi NTB tahun 2018 adalah aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik, sedangkan aspek institusi demokrasi sudah jauh melampaui.

## 6. Sosial

Pemerintah Provinsi NTB telah, sedang dan akan terus menangani permasalahan sosial diantaranya: pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), penanganan PMKS, dan penyedia sarana prasarana sosial (seperti panti sosial, panti jompo, dan panti rehabilitasi). Jumlah



lembaga kesejahteraan sosial di Provinsi NTB tahun 2019 sebanyak 948 LKS, seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-49 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah LKS		
		Swasta	Pemerintah	Jumlah
1	Lombok Barat	175	-	175
2	Lombok Tengah	58	-	58
3	Lombok Timur	158	-	158
4	Sumbawa	80	-	80
5	Dompu	174	-	174
6	Bima	71	-	71
7	Sumbawa Barat	17	-	17
8	Lombok Utara	43	-	43
9	Kota Mataram	140	-	140
10	Kota Bima	32	-	32
	Provinsi NTB	948	8	956

Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTB, 2019.

Pemerintah Provinsi NTB melakukan penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui berbagai cara, diantaranya pendampingan dan pemberian pekerjaan bagi orang-orang yang bekerja di jalan agar menjadi produktif. Jenis dan jumlah masalah kesejahteraan sosial di Provinsi NTB tahun 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-50 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi NTB Tahun 2019

NO	JENIS PMKS	JUMLAH		YANG SDH DIBERIKAN PELAYANAN			SISA PENANGANAN PMKS		%
1	Anak Terlantar	36.062	Jiwa	1.940	Jiwa	5.38	34.122	Jiwa	94.62
2	LanjutUsiaTerlantar	93.368	Jiwa	835	Jiwa	0.90	92.433	Jiwa	99.10
3	PenyandangDisabilitas	24.080	Jiwa	1.424	Jiwa	5.91	22.656	Jiwa	94.09
4	Tuna Susila	350	Jiwa	80	Jiwa	22.86	270	Jiwa	77.14
5	Gelandangan	588	Jiwa	75	Jiwa	12.76	513	Jiwa	87.24
6	Pengemis	227	Jiwa	75	Jiwa	33.04	152	Jiwa	66.96
7	Korban Traficking		Jiwa	200	Jiwa	100		Jiwa	
8	Korban TindakKekerasan	1.287	Jiwa	166	Jiwa	12.90	1.121	Jiwa	87.10
9	Korban BencanaAlam		KK	10.928	KK	100		KK	
10	Korban BencanaSosial		KK	93	KK	100		KK	
11	Keluarga Fakir Miskin	348.722	KK	6.500	KK	1.86	342.222	KK	98.14
	<b>JUMLAH</b>	<b>504.584</b>		<b>22.316</b>		<b>4.42</b>	<b>428.268</b>		<b>95.89</b>

Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTB, 2019.

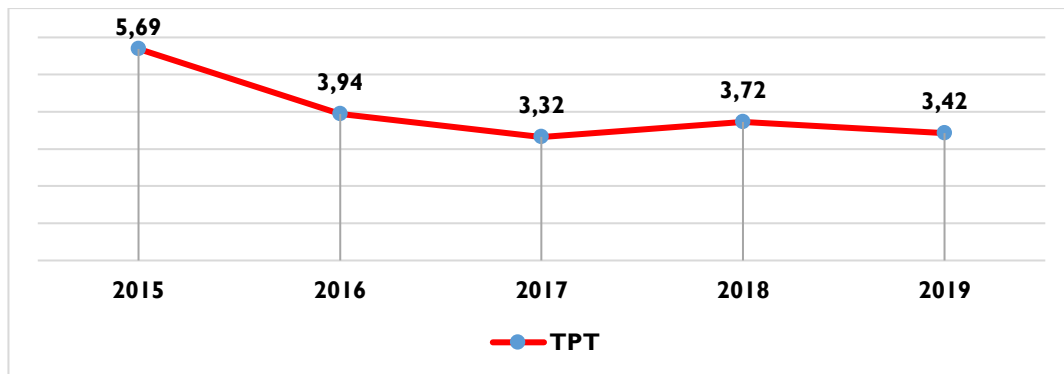




### 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

#### 1. Tenaga Kerja

Fokus utama dalam urusan tenaga kerja adalah tingkat pengangguran. Dalam setahun terakhir, secara absolut pengangguran bertambah sekitar 1,26 ribu orang, akan tetapi kenaikan pengangguran jauh lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan jumlah penduduk yang bekerja, sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun sebesar 0,3% dari 3,72 % pada Agustus 2018 menjadi 3,42 % pada Agustus 2019. Perkembangan TPT di Provinsi NTB tahun 2015-2019 disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2019.

Gambar 2-32 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi NTB Tahun 2015-2019

Pada Agustus 2019, penduduk yang bekerja sebanyak 2.387.040 orang, bertambah sekitar 232.920 orang atau sebesar 10,81 % dari tahun 2018. Penduduk yang bekerja pada kegiatan informal turun sebesar 0,77 % dibanding Agustus 2018. Adapun yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 23.843 orang pada tahun 2019, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 26.662 orang, yang tersebar pada 26 negara.

Berdasarkan tingkat pendidikan, TPT tertinggi terdapat pada penduduk dengan pendidikan tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 9,63%. Sementara itu, berdasarkan kelompok umur, pengangguran usia muda (15 - 24 tahun) jauh lebih tinggi dari usia dewasa. (25 tahun ke atas).

Strategi yang dilakukan dalam penyelenggaraan bidang ketenagakerjaan diantaranya: Pembentukan 6 Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di Provinsi NTB dalam rangka mendekatkan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di LTSP, Informasi Pasar Kerja (Job Fair), peningkatan kompetensi kepada calon tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan, dan menjaga kondusifitas hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja dengan meningkatkan peran Pengawas ketenagakerjaan dalam mengawasi/penegakan penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan di perusahaan.



## 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keberhasilan pemberdayaan perempuan melalui pengarusutamaan gender di Provinsi NTB dapat dilihat dari dua indikator makro yaitu: Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Perkembangan kedua indikator tersebut disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2-51 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2015-2019

Keterangan	Tahun					Pening- katan	Pertum- Buhan
	2015	2016	2017	2018	2019		
NTB	90,23	90,05	90,36	90,37	90,40	0,17	0,19
Indonesia	91,03	90,82	90,96	90,99	91,07	0,04	0,04

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

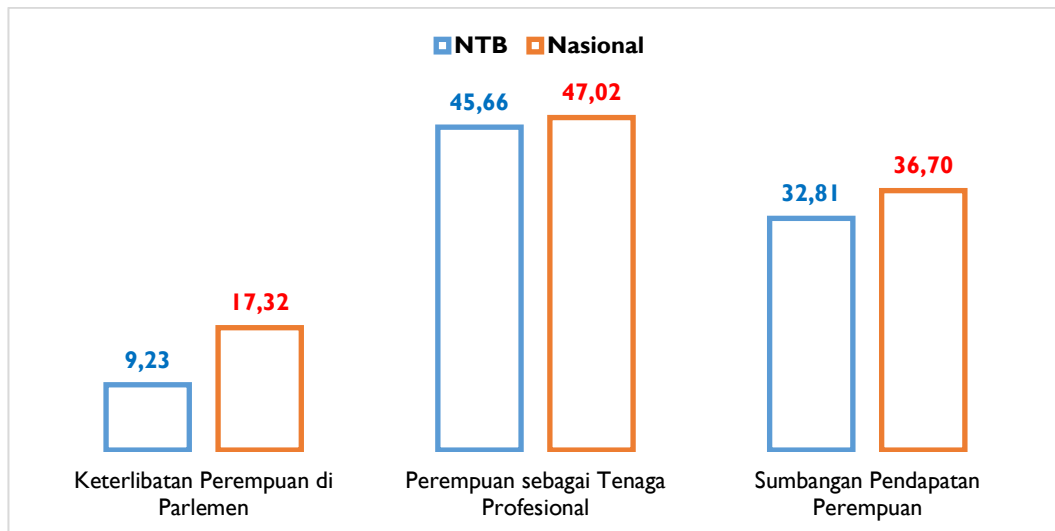
Dari tabel di atas, diketahui bahwa nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi NTB tahun 2015-2019 berada di bawah nasional. Namun demikian, nilai Indeks Pembangunan Gender NTB meingkat sebesar 0,17 poin atau tumbuh 0,19%, lebih besar dibandingkan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Gender nasional. yaitu 0,04 poin atau 0,04%. Hal ini menunjukkan adanya progres yang lebih cepat dari rata-rata nasional.

Tabel 2-52 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2014-2018

Keterangan	Tahun					Pening- katan	Pertum- Buhan
	2014	2015	2016	2017	2018		
NTB	57,49	58,69	60,06	59,95	60,56	3,07	5,34
Indonesia	70,68	70,83	71,39	71,74	72,10	1,42	2,01

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2019.

Dari tabel di atas, diketahui bahwa Indeks Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi NTB tahun 2014-2018 masih berada di bawah IDG nasional. Namun demikian, IDG Provinsi NTB meningkat dan tumbuh lebih tinggi dari IDG nasional, yaitu meningkat 3,07 poin dan tumbuh 5,34%. Masih rendahnya capaian IDG ini sangat dipengaruhi oleh nilai capaian masing-masing komponen pembentuknya, seperti disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020: Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019.

Gambar 2-33 Nilai Capaian Aspek Pembentuk IDG Provinsi NTB dan Indonesia Tahun 2018

Dari gambar di atas, diketahui bahwa seluruh capaian dari komponen pembentuk IDG Provinsi NTB masih lebih rendah dari capaian nasional, terutama untuk komponen keterlibatan perempuan di parlemen. Pada tahun 2018, persentase perempuan sebagai anggota parlemen hanya 9,23% lebih rendah dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 17,32%.

Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak anak merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi dan dilindungi agar masa pertumbuhan anak dapat berjalan dengan optimal. Pentingnya pemenuhan hak-hak anak dikarenakan anak yang akan melanjutkan perjuangan bangsa. Upaya perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap anak merupakan kewajiban bagi negara. Upaya pemenuhan hak anak sudah dimulai sejak anak belum dilahirkan melalui pemenuhan gizi bagi ibu hamil. Pemenuhan hak dasar juga menjadi sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak. Saat ini, pencegahan perkawinan anak, peningkatan peran orang tua dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak menjadi prioritas isudalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, kasus kekerasan terhadap anak masih relatif tinggi dan mengalami fluktuasi, pada tahun 2017 jumlah kasus kekerasan anak mencapai 670 kasus dengan jumlah kasus terbesar ada di Kabupaten Bima dan pada tahun 2016 cenderung turun menjadi 327 kasus. Namun pada tahun 2019 kembali melonjak menjadi 568 kasus. Adapun perkembangan kasus kekerasan terhadap anak menurut kabupaten/kota sebagaimana disajikan pada tabel berikut.





Tabel 2-53 perkembangan kasus kekerasan terhadap anak menurut kabupaten/kota Tahun 2017-2019

No	Kabupaten/Kota	Kasus Kekerasan terhadap anak		
		2017	2018	2019
1	Kota Mataram	50	58	33
2	Kabupaten Lombok Barat	16	40	57
3	Kabupaten Lombok Tengah	47	21	61
4	Kabupaten Lombok Tengah	70	19	86
5	Kabupaten Lombok Utara	55	8	15
6	Kabupaten Sumbawa Barat	47	13	58
7	Kabupaten Sumbawa	56	82	84
8	Kabupaten Dompu	63	13	21
9	Kabupaten Bima	245	49	134
10	Kota Bima	21	24	19
	<b>JUMLAH</b>	<b>670</b>	<b>327</b>	<b>568</b>

Sumber: Dinas P3AP2KB Provinsi NTB, 2020

Kasus kekerasan terhadap anak meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, *trafficking*, penelantaran dan kasus kekerasan lainnya. Dari berbagai bentuk kekerasan terhadap anak tersebut, paling tinggi bentuk kekerasan yang dialami anak-anak yaitu kekerasan seksual. Pada tahun 2017 mencapai 218 kasus atau 32,54 persen dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 38,91 persen atau sebanyak 107 kasus.

### 3. Pangan

Untuk menjamin perlindungan lahan pertanian dan pangan di Provinsi NTB, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebut seluas 828.401 ha, terdiri atas: lahan sawah seluas 227.606 Ha dan cadangan pertanian pangan seluas 600.795 Ha. Sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi NTB disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-54 Luas Lahan Sawah dan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi NTB Tahun 2013

No	Keterangan	Luas (Ha)	
		Lahan Sawah	Cadangan Pangan
1	Kabupaten Lombok Barat	25.153	59.624
2	Kabupaten Lombok Tengah	51.202	43.120
3	Kabupaten Lombok Timur	45.382	39.413
4	Kabupaten Lombok Utara	7.449	41.878
5	Kabupaten Sumbawa	43.179	174.736
6	Kabupaten Sumbawa Barat	8.952	22.174

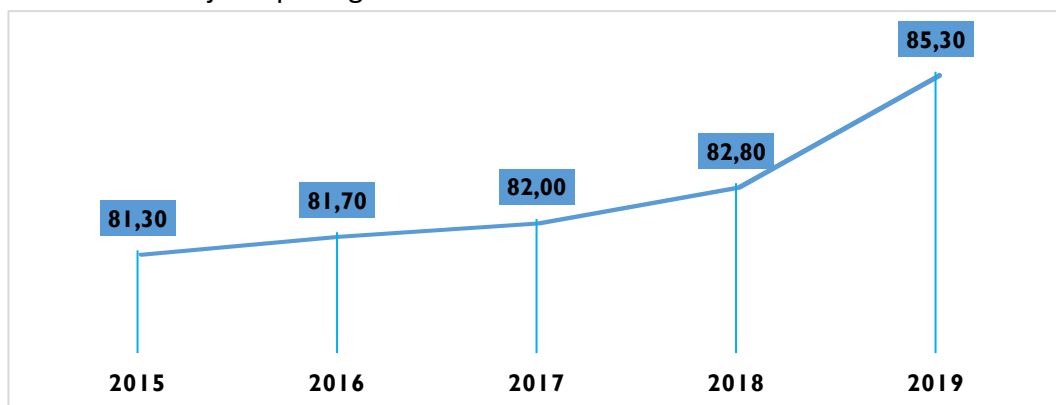


No	Keterangan	Luas (Ha)	
		Lahan Sawah	Cadangan Pangan
7	Kabupaten Dompu	19.194	58.693
8	Kabupaten Bima	30.784	153.038
9	Kota Bima	1.927	7.994
10	Kota Mataram	1.833	125

Sumber: BAPPEDA Provinsi NTB, 2013.

Keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang pangan diukur melalui indikator Pola Pangan Harapan (PPH). PPH adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energi terhadap total energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan penduduk secara kualitas, kuantitas maupun keragamannya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

PPH menggambarkan kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk hidup sehat dan dikatakan ideal bila mendekati skor 100 berdasarkan kesepakatan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 1998 yang menggunakan bobot (rating) FAO RAPA (1989) yang terus disempurnakan menjadi Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2020. Perkembangan capaian PPH di Provinsi NTB Tahun 2015-2018 disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2019.

Gambar 2-34 Perkembangan Pola Pangan Harapan Provinsi NTB Tahun 2015 – 2019

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa kualitas konsumsi pangan penduduk NTB sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 menunjukkan kualitas yang terus membaik atau mengarah ke konsumsi yang beragam dengan skor PPH mendekati 100. PPH dihitung dengan mengelompokkan pangan menjadi 9 kelompok pangan berdasarkan data susenas yang dipersentase kemudian dikalikan dengan kecukupan konsumsi energi pangan sebesar 2.000



(Kkal/kap/hari) dan kecukupan konsumsi protein (52 gram/kap/hari). Perkembangan kualitas konsumsi pangan penduduk NTB tahun 2015 sd 2019 disajikan pada tabel berikut.

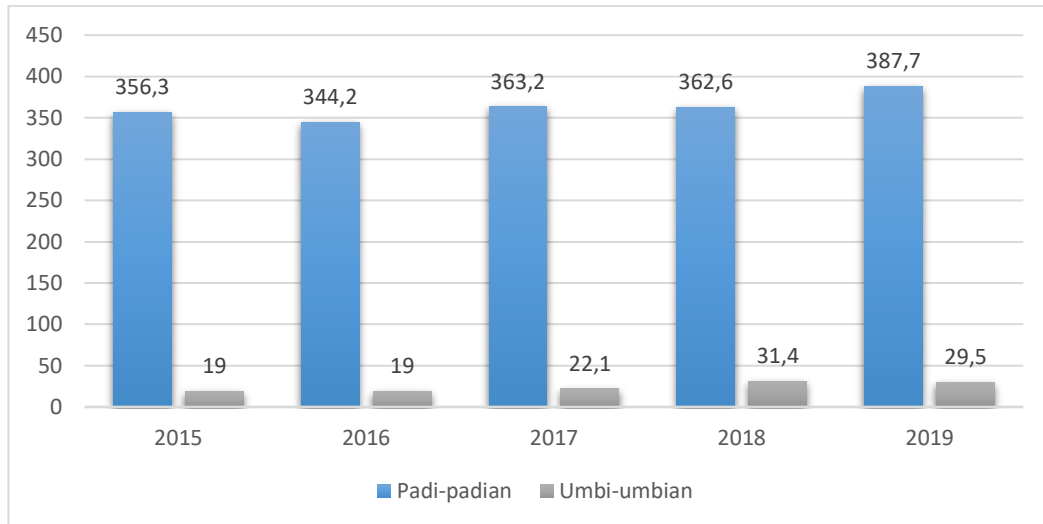
Tabel 2-55 Kualitas Konsumsi Pangan Penduduk NTB Tahun 2015-2019

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Ideal (gr/kap/hari)	Konsumsi Aktual Tahun (gr/kap/hari)				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Padi-padian	275	356,3	344,2	363,2	362.6	387.7
	Beras		321,4	320,9	320,6	-	-
2	Umbi-umbian	100	19	19	22,1	31.4	29.5
3	Pangan Hewani	150	118,4	115,4	87,9	95.7	110.4
4	Minyak dan Lemak	20	21,2	18,9	21,0	21.2	22.2
5	Buah/Biji Berminyak	10	4,7	3,3	3,4	3.6	3.2
6	Kacang-kacangan	35	23	20,4	21,6	20.1	26.5
7	Gula	30	17,2	11,9	16,7	16.2	16.8
8	Sayur dan Buah	250	269	251,9	197,2	186.8	275.5
9	Lain-lain	-	57,4	68,1	85,3	73.0	120.3

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2019.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa konsumsi aktual padi-padian masih diatas konsumsi ideal 275 gr/kapita/hari, terutama konsumsi beras yang masih cukup tinggi, hal ini salah satu penyebab belum beragamnya pola konsumsi pangan masyarakat. Tingginya konsumsi protein sumbangan kelompok pangan padi-padian (beras) mencapai 72,0 persen, padahal protein beras memiliki kandungan 98 persen indeks glikemik. Indeks Glikemik adalah zat yang mempercepat merubah karbohidrat menjadi gula, sehingga menyebabkan masyarakat banyak menderita penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, kolesterol tinggi, darah tinggi, obesitas (kegemukan). Alternatif lain sumber karbohidrat yang perlu ditingkatkan konsumsinya adalah umbi-umbian, berdasarkan data diatas konsumsi umbi-umbian masih jauh dibawah konsumsi ideal. Perkembangan konsumsi padi-padian dan umbi-umbian penduduk NTB Tahun 2015-2019 disajikan pada gambar berikut.





Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2019

Gambar 2-35 Konsumsi Beras dan Umbi-umbian 2015-2019

Subsistem ketahanan pangan yang sangat menentukan ketersediaan pangan adalah subsistem ketersediaan pangan. Hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 mensyaratkan penyediaan pangan setara energi minimal yang harus disediakan sebesar 2.200 kal/kapita/hari dan protein sebesar 57 gr/kapita/hari, sebagai penilaian jumlah zat gizi yang diperlukan setiap individu untuk hidup sehat dan beraktifitas. Ketersediaan energi dan protein di Provinsi NTB tahun 2013-2017 cukup berfluktuatif, namun selalu melampaui ketersediaan minimal yang dipersyaratkan. Secara keseluruhan ketersediaan energi mengalami peningkatan mencapai 3,74 persen/tahun dan 3,03 persen/tahun untuk protein. Perkembangan ketersediaan energi dan protein tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-56 Ketersediaan Energi dan Protein Provinsi NTB Tahun 2015-2019

No	Uraian	Ketersediaan Energi dan Protein					Peningkatan Pertahun (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Energi	3,991.00	5,011.83	5,310.97	7,116.96	7,281.05	16,96
	(kalori/kapita /hari)						
2	Protein	135.17	118.07	137.52	173.73	171.62	7,23
	(gr/kap /hari)						

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2019.

Selain menjamin ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi, penyediaan pangan melalui pengembangan cadangan pangan juga dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan dalam mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan terutama pada saat terjadi bencana, paceklik serta



menjaga stabilitas harga. Cadangan pangan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kuatnya ketahanan pangan suatu wilayah atau daerah. Perkembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat di Provinsi NTB tahun 2015 s.d 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-57 Cadangan Pangan Provinsi NTB 2015-2019

No	Uraian	Cadangan Pangan (Ton Beras)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi NTB	156.21	164.77	137.18	105.76	67.75
2	Cadangan Pemerintah Kabupaten	70.93	592.33	145.73	154.92	140.41
3	Cadangan Pangan Masyarakat	755.41	112.32	163.00	2169.37	2,760.70
<b>Jumlah</b>		<b>982.55</b>	<b>869.42</b>	<b>445.91</b>	<b>2,430.05</b>	<b>2,968.86</b>

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2019.

Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga pangan, dilakukan pemantauan harga pangan ditingkat pengumpul, sebagai upayaantisipasi jika terjadi gejolak harga untuk dilakukan operasi pasar pada saat harga pangan sudah melebihi batas toleransi yang ditentukan. Perkembangan harga pangan ditingkat pengumpul tahun 2015-2019 di Provinsi NTB, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-58 Perkembangan Harga Pangan ditingkat Pengumpul di Provinsi NTB Tahun 2015-2019

Tahun	Harga (Rp)						
	Beras Super/Premium	Beras Medium	Jagung Pipilan	Kedelai Lokal	Minyak Goreng Curah	Daging Sapi	Cabe Rawit
2015	9.000	8.969	4.052	8.854	11.167	106.979	32.146
2016	9.646	8.958	5.313	8.979	11.760	117.292	29.041
2017	9.309	9.173	5.200	9.551	12.500	115.000	26.250
2018	10.290	9.579	4.523	10.723	12.523	131.455	35.676
2019	10.888	9.898	5.849	11.448	11.540	117.326	35.062
<b>Rata-rata</b>	<b>9.765</b>	<b>9.181</b>	<b>5.047</b>	<b>9.801</b>	<b>11.798</b>	<b>118.610</b>	<b>33.135</b>
<b>Peningkatan Pertahun (%)</b>	<b>5,16</b>	<b>2,70</b>	<b>11,55</b>	<b>6,89</b>	<b>0,96</b>	<b>2,69</b>	<b>2,64</b>

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2019.

Pemantauan arus keluar masuk komoditas bahan pangan dari dan menuju Provinsi NTB dilakukan secara rutin setiap bulan menggunakan tenaga Enumerator yang ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan laut. Melalui Keputusan Gubernur



Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan 7 (tujuh) pelabuhan laut lokasi pemantauan yaitu Pelabuhan Lembar, Labuhan Haji, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Sape, Benete, Kempo dan Pelabuhan Bima.

Pemantauan arus keluar masuk komoditas strategis dilakukan terhadap 18 komoditas, yaitu: gabah, beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabe, kacang tanah, kacang hijau, tepung terigu, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, sapi potong, kerbau potong, tembakau, jambu mente, rumput laut dan pakan ternak, dengan hasil seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-59 Data Arus Keluar Masuk Komoditas di Provinsi NTB Tahun 2015-2019

No	Komoditas/ Tahun	Masuk (Ton atau ekor)	Keluar (Ton atau ekor)	Keterangan	
1	<b>Beras</b>	<b>145,24</b>	<b>597.484,26</b>		
	2015	24,34	553.830,00	Masuk :	Surabaya
	2016	-	9.286,37	Keluar :	Bali, Batam, NTT, Surabaya
	2017	-	1.125,00		
	2018	-	14.003,00		
2019	120,90	19.239,89			
2	<b>Jagung</b>	<b>401,53</b>	<b>1.953.045,36</b>		
	2015	7,03	348.136,79	Masuk :	Surabaya
	2016	54,07	317.750,00	Keluar :	Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Kalsel, Probolinggo, Bali, Makassar, NTT, Sumbang, Medan, Cirebon
	2017	-	13.726,00		
	2018	-	609.264,00		
2019	340,43	664.168,57			
3	<b>Kedelai</b>	<b>10.302,04</b>	<b>11.590,11</b>		
	2015	5.205,67	6.757,85	Masuk :	Surabaya
	2016	2.925,67	3.582,84	Keluar :	Sumba Barat, Jakarta, Kediri, Batam, Banjarmasin, Mimika, Balikpapan, Jakarta, Merauke, Makassar, Sumba Timur, Surabaya, Bali, Malang
	2017	-	157,00		
	2018	649,00	586,00		
2019	1.521,70	506,42			
4	<b>Bawang Merah</b>	<b>344,27</b>	<b>131.390,75</b>		
	2015	64,01	37.546,60	Masuk :	Brebes, Nganjuk, Tangerang, Surabaya
	2016	96,24	28.238,40	Keluar :	Lebak, Bandung, Jakarta, Manggarai, Ende, Makassar, Banjarmasin, Flores, Surabaya, Bali, Jenepono, Gorontalo, Merauke, Bengkulu
	2017	94,00	313,00		
	2018	8,00	36.662,00		
2019	82,02	28.630,75			
5	<b>Bawang Putih</b>	<b>816,51</b>	<b>3.675,52</b>		
	2015	490,00	34,71	Masuk :	Surabaya
	2016	221,61	2,51	Keluar :	





No	Komoditas/ Tahun	Masuk (Ton atau ekor)	Keluar (Ton atau ekor)	Keterangan	
	2017	22,00	-		Palangkaraya, Denpasar, Surabaya, Jakarta, Bekasi, Depok, Gorontalo, Makasar
	2018	56,00	166,00		
	2019	26,90	3.472,30		
6	<b>Cabai Rawit</b>	<b>300,67</b>	<b>16.789,60</b>		
	2015	75,85	2.959,89	Masuk :	Situbondo Pangkal Pinang, Pekan Baru, Batam, Belitung, Sidoarjo, Pontianak, Pekanbaru, Malang, Pekalongan, Surabaya, Denpasar, Tanjung Pinang
	2016	48,62	5.343,97	Keluar :	
	2017	1,00	683,00		
	2018	125,00	5.772,00		
	2019	50,20	2.030,74		
7	<b>Daging Ayam</b>	<b>1.124,12</b>	<b>205,99</b>		
	2015	23,33	0,99	Keluar :	Bali, Surabaya
	2016	204,22	-	Masuk :	Bali, Jatim, Jakarta
	2017	25,00	-		
	2018	-	205,00		
	2019	871,57	-		
8	<b>Telur Ayam</b>	<b>7.165,02</b>	<b>30,73</b>		
	2015	1.246,38	3,43	Masuk :	Bali, Jatim
	2016	3.349,03	2,00	Keluar :	NTT
	2017	319,00	-		
	2018	-	7,00		
	2019	2.250,61	18,30		
9	<b>Sapi Potong</b>	<b>4.291,00</b>	<b>59.830,00</b>		
	2015	4.289,00	18.655,00	Masuk :	-
	2016	-	15.197,00	Keluar :	Balikpapan, Palangkaraya, Banjarmasin, Barito, Jakarta, Bekasi, Tangerang, Makasar, Jeneponto
	2017	2,00	543,00		
	2018	-	12.869,00		
	2019	-	12.566,00		

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2019.

Selain ketersediaan, distribusi, dan harga pangan yang stabil, keamanan pangan segar juga perlu dijamin agar masyarakat dapat memperoleh dan mengkonsumsi pangan yang aman. Sertifikasi Prima 3 dimaksudkan untuk meningkatkan penanganan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang memberikan jaminan mutu dan aman dikonsumsi. Kegiatan Sertifikasi Prima dilaksanakan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi NTB yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 321 Tahun 2009 tanggal 23 Juni 2009.

Sertifikasi Prima 3 diberikan pada produk sayur dan buah segar yang telah lulus uji sertifikasi, sedangkan untuk Registrasi Produk Dalam untuk memastikan aman dikonsumsi dilakukan untuk komoditas beras dalam kemasan. Jumlah



Sertifikasi Prima 3 dan Registrasi Produk Dalam Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-60 Sertifikasi Prima 3 dan Registrasi Produk Dalam Tahun 2015-2019

Tahun	Sertifikasi Prima 3 (Sertifikat)	Registrasi Produk Dalam
2015	8	-
2016	17	5
2017	41	3
2018	20	7
2019	24	17
Jumlah	<b>110</b>	<b>32</b>

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2019.

#### 4. Lingkungan Hidup

Daya dukung pangan dapat dihitung menggunakan metode jasa ekosistem. Angka persentase yang ditampilkan dari hasil perhitungan jasa ekosistem adalah persentase lahan yang dapat menghasilkan pangan. Kelas tinggi sedang dan rendah menunjukkan penyediaan pangan di Provinsi NTB.

Tabel 2-61 Jasa Ekosistem Pangan Provinsi NTB

Daerah	Jasa Ekosistem Pangan		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Provinsi NTB	5%	29%	67%

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2020

Mayoritas daerah memiliki nilai ekosistem pangan tinggi yaitu sebesar 67%, diikuti oleh daerah dengan nilai sedang 29% dan rendah sebesar 5%. Untuk menggambarkan status kemampuan daya dukung pangan pada Provinsi NTB, jumlah ketersediaan pangan pada provinsi NTB dibandingkan dengan tingkat konsumsi. Sehingga akan menghasilkan besaran selisih penyediaan (melampaui/belum melampaui) daya tampung.

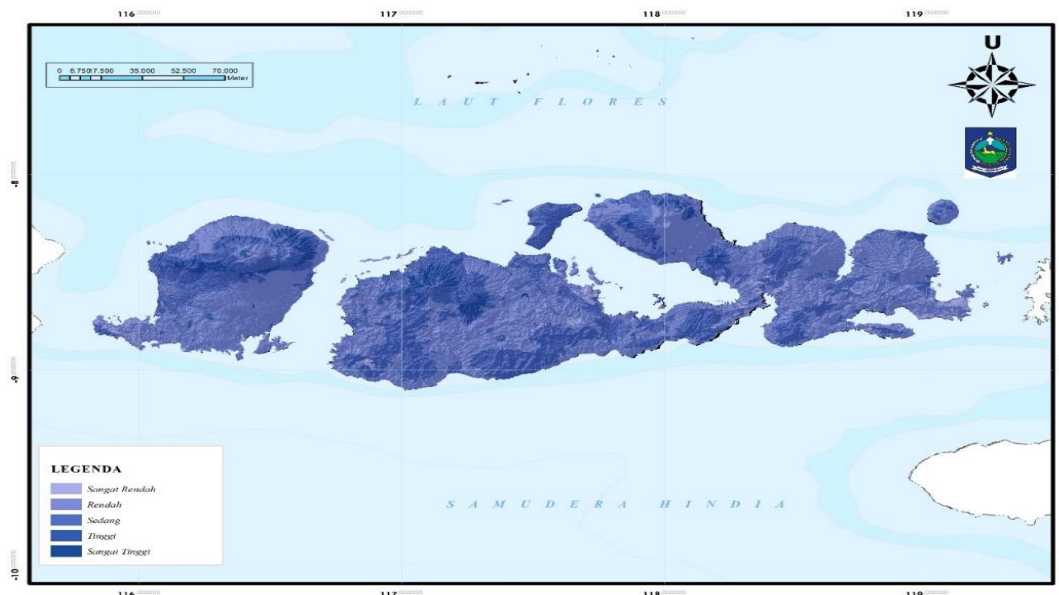
Tabel 2-62 Status Penyediaan Pangan Provinsi NTB

Ketersediaan (Kkal)	Kebutuhan (Kkal)	Selisih (Kkal)	Status Ketersediaan
1.729.592.923.750	7.685.171.289.323	5.955.578.365.573	Belum Terlampaui

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2020



Dari tabel di atas terlihat masih ada selisih yang cukup jauh antara kebutuhan pangan dan ketersediaan (dalam Kkal). Total Ketersediaan pangan di NTB sebesar 1.729.592.923.750 Kkal sedangkan kebutuhannya 7.865.171.289.323 Kkal sehingga masih berselisih 5.955.578.365.573 Kkal. Daya ekosistem air di Provinsi NTB mayoritas masuk dalam kategori rendah (59%), diikuti oleh kategori sedang dengan 37% dan tinggi sebesar 3%. Berikut ini pola sebarannya.



Gambar 2-36 Peta Daya Jasa Ekosistem Air Provinsi NTB

Untuk menggambarkan status kemampuan daya dukung air pada Provinsi NTB, jumlah ketersediaan air pada provinsi NTB selanjutnya dibandingkan dengan tingkat konsumsi. Sehingga akan menghasilkan besaran selisih penyediaan (melampaui/belum melampaui) daya tampung.

Tabel 2-63 Status Penyediaan Air Provinsi NTB

Ketersediaan (m <sup>3</sup> )	Kebutuhan (m <sup>3</sup> )			Selisih (m <sup>3</sup> )	Status Ketersediaan
	Domestik	Lahan	Total		
4.735.817.287	190.426.032	8.204.726.871	8.395.152.903	3.659.335.615	Terlampai

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2020

Sementara itu terkait dengan pengelolaan persampahan, volume sampah di 10 kabupaten/kota di NTB mencapai 3.388 ton dan sampah yang dibuang per hari mencapai 76 ton. Sedangkan, yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah 641,92 ton dan sudah di daur ulang hanya 51,21 ton perhari, sehingga terdapat 2.695,63 ton atau 83 persen dari total sampah di Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak terurus dengan baik.

## 5. Pertanian





Pendaftaran tanah di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018 mencapai 216.827 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 yang berada pada posisi sebesar 48.340 pendaftaran sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi hanya 249 pendaftaran. Berikut ini perkembangan pendaftaran tanah di Provinsi NTB tahun 2015-2019

Tabel 2-64 Jumlah Pendaftaran Tanah Menurut Jenis di provinsi NTB  
Tahun 2015-2019

No	Jenis	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Hak Milik	48.340	94.975	129.360	216.827	249
2	HGB	1.066	2.802	3.021	5.779	8.274
3	HGU	0	0	2	4	13
4	Hak Pakai	455	383	340	634	1.797
5	Pemisahan	1.576	552	66	66	140
6	Penggabungan	178	124	139	112	123

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

## 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penataan Administrasi Kependudukan yang dilakukan di Provinsi NTB sampai dengan Desember 2019, dari 3.704.007 penduduk wajib KTP telah dilakukan perekaman sebanyak 3.666.347 orang atau 98,98 persen, dengan KTP yang telah tercetak sebanyak 3.689.312 orang atau 99,60 persen. Rincian rekapitulasi administrasi kependudukan per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-65 Rekapitulasi Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Barat S/D Bulan Desember 2019

NO	KABUPATEN /KOTA	WAJIB KTP(*)	REKAM	%	CETAK	%
1	Kota Mataram	298.486	295.753	99,08	291.510	97,66
2	Lombok Barat	508.331	491.418	96,67	535.489	105,34
3	Lombok Utara	168.175	174.916	104,01	226.831	134,88
4	Lombok Tengah	742.378	747.356	100,67	748.585	100,84
5	Lombok Timur	885.098	849.759	96,01	789.654	89,22
6	Sumbawa Barat	93.785	94.630	100,90	93.507	99,70
7	Sumbawa	373.689	345.632	92,49	338.546	90,60
8	Dompu	158.494	170.265	107,43	177.856	112,22
9	Bima	371.705	387.543	104,26	382.742	102,97
10	Kota Bima	103.866	109.075	105,02	104.592	100,70
	<b>TOTAL</b>	<b>3.704.007</b>	<b>3.666.347</b>	<b>98,98</b>	<b>3.689.312</b>	<b>99,60</b>

Sumber: DPMPemdes Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, 2019.

## 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Penurunan angka kemiskinan di Provinsi NTB dari tahun ke tahun menunjukkan trend penurunan yang signifikan. Tahun 2015 jumlah Penduduk Miskin NTB sebanyak 802,29 ribu jiwa atau 16,54 persen, hingga pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin NTB menjadi 705,68 ribu jiwa atau 13,88 persen.

Tabel 2-66 Angka Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2015-2019

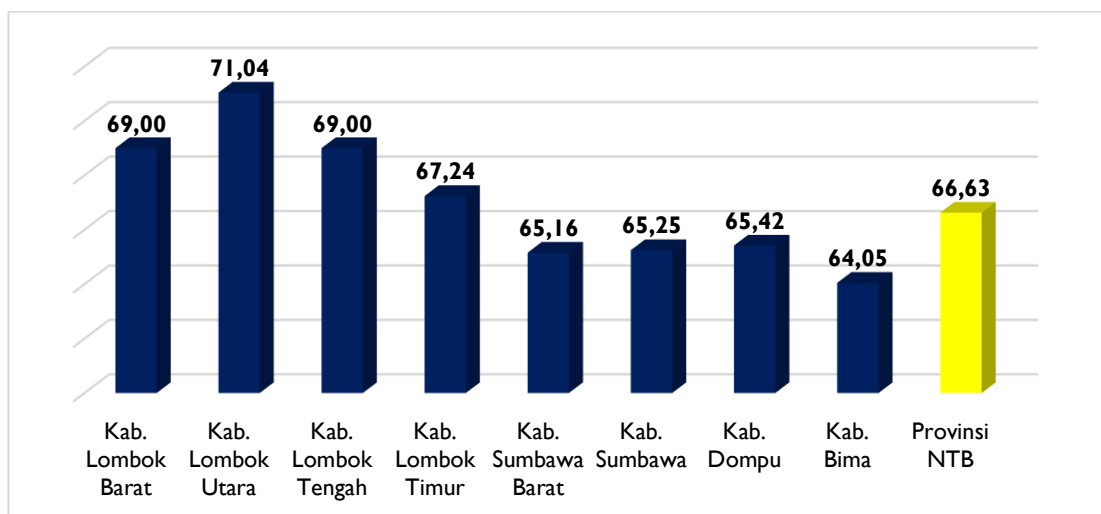
Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Kemiskinan (%)	16,54	16,02	15,05	14,63	13,88
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa)	802,29	786,58	748,12	735,62	705,68

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2019.

Capaian kinerja terkait urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan awal 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

- BUMDesa, sampai dengan akhir tahun 2019 telah terbentuk sebanyak 870 BUMDes aktif.
- Lembaga Adat, Jumlah Lembaga Adat yang terbentuk hingga Desember 2019 baru mencapai 768 Lembaga Adat, dengan intervensi Dana Desa diharapkan akan banyak terbentuk Lembaga Adat lainnya di masa yang akan datang.
- Status desa hingga akhir tahun 2019 adalah 5 desa tertinggal, 108 desa tertinggal, 659 desa berkembang, 218 desa maju, dan 5 desa mandiri.

Salah satu indikator untuk mengukur urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah dengan indikator indeks pembangunan desa (IPD). Berikut ini kondisi IPD di Provinsi NTB pada tahun 2018.

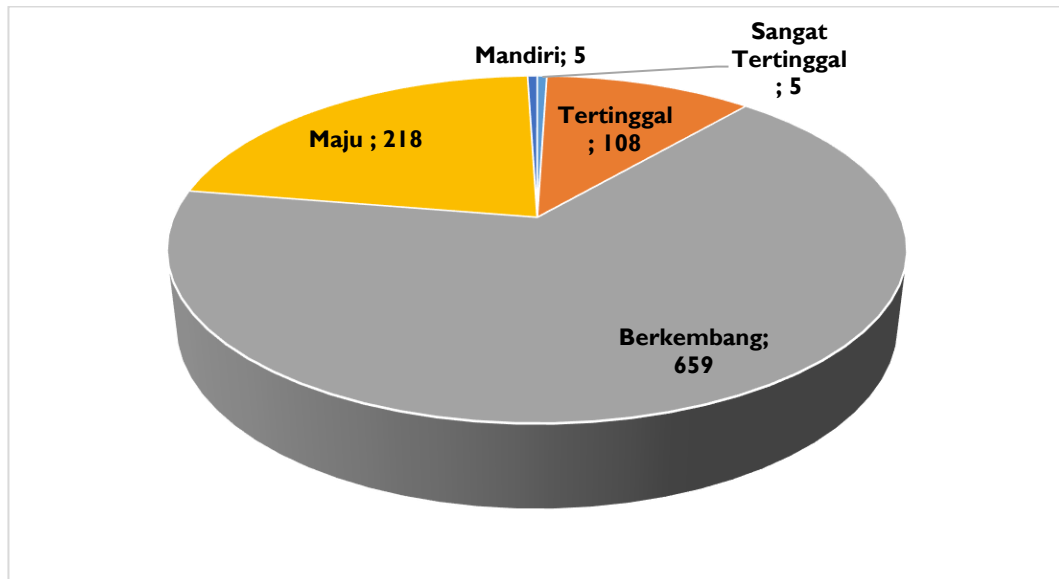


Sumber: BAPPENAS & BPS RI: Indeks Pembangunan Desa 2018.

Gambar 2-37 Indeks Pembangunan Desa di Provinsi NTB Tahun 2018



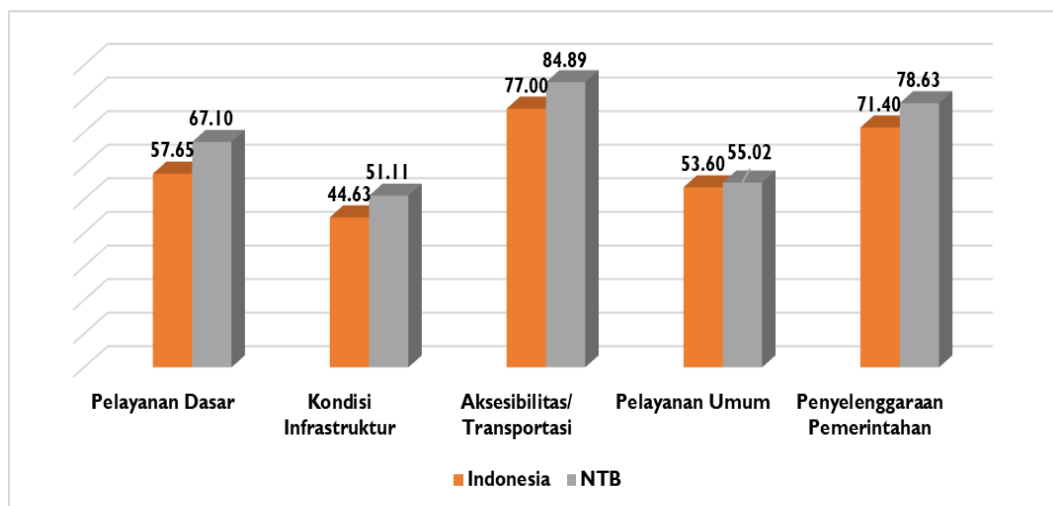
Pada tahun 2018, terdapat 4 kabupaten yang melebihi nilai IPD Provinsi sebesar 66,63 dan nilai tertinggi adalah Kabupaten Lombok Utara dengan nilai 71,04. Sedangkan sisanya 4 kabupaten masih berada di bawah nilai IPD tertinggi dengan nilai IPD terendah adalah Kabupaten Bima dengan nilai 64,05.



Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2019.

Gambar 2-38 Klasifikasi Desa di Provinsi NTB Tahun 2019

Pada tahun 2019 dari total 995 desa yang ada, desa dengan status mandiri sebesar 0,50%, maju 21,91%, berkembang 66,23%. Namun terdapat desa dengan status yang masih sangat tertinggal sebesar 0,5%, sedangkan desa tertinggal sebesar 10,85% dimana sebagian besar berada di Kabupaten Bima.



Sumber: Bappenas-BPS, 2018: Buku IPD 2018.

Gambar 2-39 Nilai Dimensi IPD di Provinsi NTB Tahun 2018





IPD diukur melalui lima dimensi yaitu aspek pelayanan dasar, aspek infrastruktur, aspek aksesibilitas, aspek pelayanan umum dan aspek penyelenggaraan pemerintahan. Dari lima dimensi tersebut, dimensi yang paling rendah di Provinsi NTB adalah dimensi infrastruktur dengan 51,11 meskipun sudah berada di atas capaian Indonesia. Seluruh dimensi IPD Provinsi NTB sudah melampaui nilai nasional.

## 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju Pertumbuhan penduduk alamiah dipengaruhi oleh dua komponen utama yaitu tingkat kelahiran (fertilitas) dan tingkat kematian (mortalitas). Fertilitas dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti jumlah penduduk perempuan, jumlah penduduk usia produktif, status perkawinan, dan usia pada perkawinan pertama.

Tabel 2-67 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk NTB Tahun 2015-2019

Keterangan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk	4.835.577	4.896.162	4.955.578	5.013.687	5.070.385
Laju Pertumbuhan Penduduk	1,29	1,25	1,21	1,17	1,13

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2019.

Secara jumlah, penduduk Provinsi NTB pada tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan namun secara laju terus menunjukkan pelambatan. Pada tahun 2015 jumlah penduduk NTB tercatat sebesar 4.836.577 jiwa kemudian terus meningkat secara persisten menjadi 5.070.385 jiwa pada tahun 2019. Sementara itu LPP terus menurun dari 1,29% pada tahun 2015 menjadi 1,13% pada tahun 2019.

Pengendalian penduduk dapat dilakukan dengan optimalisasi program keluarga berencana dan menekan rata-rata usia kawin pertama perempuan. Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total dan Prosentasi Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) menjadi salah satu indikator yang menjadi perhatian dalam upaya penanggulangan penduduk.

Tabel 2-68 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Provinsi NTB Tahun 2015-2019

No	Keterangan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Lombok Barat	19,98	20,24	20,10	19,80	19,89
2	Lombok Tengah	19,83	19,57	19,67	19,39	19,18
3	Lombok Timur	19,80	19,14	19,48	19,49	19,66
4	Sumbawa	21,06	21,21	21,16	21,54	21,38

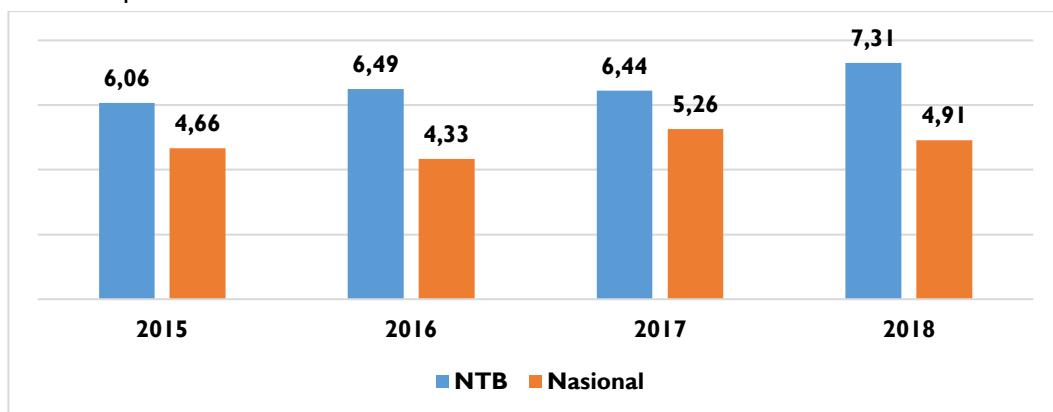


No	Keterangan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
5	Dompu	20,70	20,75	20,72	21,13	21,34
6	Bima	21,13	21,23	20,97	21,50	21,11
7	Sumbawa Barat	20,92	21,39	21,97	21,28	21,76
8	Lombok Utara	20,26	20,25	20,08	20,26	28,20
9	Mataram	20,97	21,09	21,17	20,97	21,18
10	Kota Bima	21,07	21,41	21,87	22,00	21,62
11	NTB	20,32	20,15	20,27	20,23	20,21

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2019.

Pada tahun 2015-2019 terjadi fluktuasi penurunan rata-rata usia perkawinan pertama di Provinsi NTB yaitu dari 20,32 tahun menjadi 20,21 tahun. Pada tahun 2019, ada tiga daerah dengan rata-rata perkawinan pertama di bawah 20 tahun yaitu Kabupaten Lombok Barat (19,89), Kabupaten Lombok Tengah (19,18 tahun) dan Kabupaten Lombok Timur (19,66 tahun).

Definisi unmet need menurut DHS (*Demographic Health Survey*) adalah proporsi wanita usia subur yang menikah atau hidup bersama (seksual aktif) yang tidak ingin punya anak lagi atau yang ingin menjarangkan kelahiran berikutnya dalam jangka waktu minimal 2 tahun tetapi tidak menggunakan alat atau cara kontrasepsi.



Sumber: BPS Indonesia, 2019.

Gambar 2-40 Unmet Need Pelayanan Kesehatan Provinsi NTB dan Indonesia Tahun 2015-2018

Pada tahun 2015 hingga 2018 nilai capaian NTB sudah lebih baik dibandingkan dengan nasional dan menunjukkan peningkatan sebesar 1,25 poin. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi unmet need yaitu: (1) akses ke layanan yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan transportasi; (2) Kualitas layanan terhadap pemilihan alat kontrasepsi, pemahaman efek samping yang ditimbulkan oleh masing-masing metode kontrasepsi dan hubungan antara wanita dan provider; (3) Biaya dan (4) Hambatan sosial, budaya dan norma agama.



Sedangkan untuk persentase pemakaian kontrasepsi cara modern/modern contraceptive prevalence rate (mCPR) adalah persentase pasangan usia subur (PUS) yaitu pasangan suami istri berstatus kawin, istrinya berusia 15-49 tahun, yang sedang menggunakan alat/cara KB modern berupa sterilisasi wanita (MOW), sterilisasi pria (MOP), Pil, IUD, Suntik, Susuk KB (Implant) dan kondom. Tahun 2019 pencapaiannya sebesar 56,26 persen, menurun jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 yang mencapai 57,8 persen. Hal ini menunjukkan penurunan penggunaan kontrasepsi dalam dua tahun terakhir.

## 9. Perhubungan

Meningkatnya jumlah penduduk provinsi NTB akan disertai dengan penambahan jumlah sarana angkutan darat, baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat, serta menuntut ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa baik dalam kota maupun ke luar kota. Tantangan yang dihadapi dalam sarana dan prasarana perhubungan darat adalah bagaimana memfasilitasi kebutuhan angkutan publik melalui penyebaran jalur-jalur angkutan dan peningkatan serta pembangunan prasarana jalan.

Tabel 2-69 Jumlah Armada Antar Kota dalam Provinsi Tahun 2019

No.	Jenis Pelayanan	Unit	Seat
1	AKDP Lombok	207	3.789
2	AKDP Sumbawa dan Sumbawa Barat	127	2.176
3	AKDP Dompu	51	1.869
4	AKDP Bima	72	2.063

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2019.

Untuk meningkatkan konektivitas selain dengan angkutan reguler Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perhubungan Provinsi NTB bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan RI membuka layanan angkutan perintis, baik angkutan darat maupun angkutan laut. Angkutan perintis digunakan untuk melayani kebutuhan transportasi daerah-daerah terpencil dan terisolir ataupun daerah yang belum dilayani transportasi secara memadai dengan tarif yang terjangkau. Pada tahun 2019, angkutan darat memiliki 9 rute perintis yang dilayani oleh BUS DAMRI serta dua rute multimoda yaitu rute Lombok International Airport - Mataram - Senggigi dan rute Lombok International Airport - Pancor.

Sistim angkutan pelayaran di NTB menggunakan angkutan penyeberangan dan angkutan laut. Angkutan penyeberangan saat ini didominasi dengan angkutan jarak pendek yang menghubungkan dan menjahit sabuk selatan Indonesia dari Jawa, Bali, NTB dan NTT kedepan diperlukan intervensi pemerintah dengan mendorong pengembangan lintas jarak jauh Long Distance Ferry dengan





menggunakan kapal roro agar bisa menghubungkan NTB (Sumbawa dan Lombok) secara langsung ke Jawa Timur (Surabaya, Probolinggo dan Banyuwangi) yang mayoritas menjadi tujuan akhir bagi angkutan barang di NTB. Penggunaan Long Distance Ferry diharapkan mengalihkan pergerakan barang dari moda darat menjadi mengguakan moda laut. Terkait dengan pengembangan angkutan laut, selain menggunakan kapal Pelni sebagai angkutan berjadwal untuk aksesibilitas antar wilayah di NTB dan menuju ke provinsi lain maka perlu juga dikembangkan angkutan perintis guna menghubungkan daerah-daerah terpencil di wilayah tengah Indonesia (Jawa, NTB, NTT dan Sulawesi Selatan) sehingga bisa mendorong meningkatnya mobilitas orang dan barang di wilayah-wilayah terpencil. Konektivitas antar wilayah di NTB terutama yang menuju kawasan wisata utama, pulau-pulau kecil dan kawasan strategis dan potensial lainnya perlu didorong dengan memanfaatkan kapal-kapal pelra dan kapal cepat yang dilakukan secara terjadwal dan terkoneksi dengan moda angkutan lainnya sehingga bisa memberikan kepastian bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanannya.

Tabel 2-70 Rute Angkutan Laut Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Rute	Keterangan
1	Bali (Padangbai)	Ferry
2	Surabaya	Legundi/Pelni
3	Lembar Bima/Makassar	Pelni
4	Banyuwangi/Probolinggo	*Ferry
5	Waingapu	Pelni
6	Pemenang/ Bangsal 3 Gili ( Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan )	Kapal Cepat/Pelra
7	Bali ( Padangbai, Benoa)	Kapal Cepat
8	Senggigi 3 Gili/Pemenang	Kapal Cepat/Pelra
9	Bali ( Padangbai, Benoa)	Kapal Cepat
10	Kayangan Pototano	Ferry
11	Benete	Kapal Cepat
12	Kenawa + Sekitarnya	*Roro/Kapal Cepat/ Pelra
13	Calabai	*Kapal Cepat
14	Badas/Ai Bari Calabai	*Roro
15	Surabaya	*Roro besar
16	Moyo - Medang - Sibotok	*Kapal Rede/ Pelra
17	Bima Labuhan Bajo/Makassar	Pelni
18	NTT-Bali-Surabaya	Perintis/ Pelni
19	Lombok-Bali-Surabaya	*Perintis/ Pelni
20	Dompu - Lombok - Makassar	*Perintis/ Pelni
21	Telong-Elong Pink + Sekitar	* Speed Boat/Pelra
22	Benete/ Lalar	* Kapal Cepat/Pelra



No	Rute		Keterangan
23	Sape	Waikelo	Ferry
24		Labuhan Bajo	Ferry
25		Pulau-Pulau Kecil di Kab. Bima	*Pelra
26	Labuhan Haji	Labuhan Lalar	*Kapal Rede

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2019.

Tabel 2-71 Rute Angkutan Darat Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	RUTE	KETERANGAN
1.	Mandalika – Praya	PP
2.	Mandalika – Pancor	PP
3.	Mandalika - Labuhan Lombok	PP
4.	Mandalika - Taliwang	PP
5.	Mandalika - Sumbawa Besar	PP
6.	Mandalika – Maluk	PP
7.	Mandalika - Sumbawa Besar - Lunyuk	PP
8.	Mandalika – Dompou	PP
9.	Mandalika – Bima	PP
10.	Mandalika - Sumbawa Besar – Dompou - Bima	PP
11.	Lembar-Mataram- Senggigi – Tanjung - Bayan	PP
12.	Lembar-Mandalika-Labuhan Lombok	PP
13.	Lembar - Praya	PP
14.	Lembar - Mandalika – Pancor	PP
15.	Sumbawa Besar – Dompou - Bima	PP
16.	Dompou – Praya – Mandalika	PP
17.	Bima - Dompou-Kore	PP
18.	Bima – Dompou	PP
19.	Bima – Dompou – Labuan Kenanga	PP
20.	Bima – Dompou – Kilo	PP
21.	Tente- Dompou-Kore-Bima	PP
22.	Bima- Dompou - Sumbawa Besar – Alas – Taliwang	PP
23.	Dompou – Sumbawa Besar - Taliwang	PP
24.	Tonggo – Jereweh – Taliwang – Praya – Mandalika	PP
25.	Taliwang – Alas – Sumbawa Besar	PP
26.	Taliwang – Sumbawa Besar – Plampang – Empang	PP
27.	Sumbawa Besar – Praya - Mandalika	PP
28.	Semalun – Mandalika	PP
29.	Mandalika – Labuhan Lombok - Semalun	PP
30.	Pelampang – Sumbawa - Mandalika	PP
31.	Mandalika – Tanjung – Bayan	PP



No	RUTE	KETERANGAN
32.	Pelampang – Sumbawa – Praya - Mandalika	PP
33.	Mandalika – Praya – Kopang - Sumbawa	PP
34.	Lunyuk – Sumbawa – Praya - Mandalika	PP
35.	Sekongkang – Taliwang - Mandalika	PP
36.	Tanjung – Mandalika	PP
37.	Dompu – Sumbawa – Mataram	PP
38.	Calabai – Manggalewa – Praya - Mandalika	PP
39.	Sumbawa – Utan – Mandalika	PP
40.	Taliwang – Maluk – Sengkongkang - Mandalika	PP
41.	Tanjung – Gunungsari - Mandalika	PP
42.	Tente – Dompu – Calabai	PP
43.	Mandalika – Taliwang – Jereweh – Maluk – Tonggo	PP
44.	Mandalika – Taliwang- maluk – Tanggo	PP
45.	Sumbawa – Alas – Pototano – Taliwang	PP
46.	Bima – Dompu	PP
47.	Bima – Sumbawa Besar	PP
48.	Bima – Tente – Dompu – Hu’u	PP
49.	Jereweh – Taliwang – Pototano – Labuhan Lombok – Mandalika	PP
50.	Labangka – Lampang – Sumbawa – Praya- Mandalika	PP
51.	Mataram – bangko Bangko PP	Perintis
52.	Mataram – Labangka PP	Perintis
53.	Mataram – Lunyuk PP	Perintis
54.	Mataram – Mata PP	Perintis
55.	Mataram - Moyo PP	Perintis
56.	Mataram - Orong Telu PP	Perintis
57.	Mataram – Ropang PP	Perintis
58.	Mataram – Santong PP	Perintis
59.	Mataram – Tolonang PP	Perintis
60.	Mataram – Sumbawa Besar – Plampang – Mata ( melalui Kwangko ) PP	Perintis
61.	Mataram – batu Uante	Perintis
62.	Mataram- Pesugulan PP	Perintis
63.	Mataram- Leweng PP	Perintis
64.	Bangsals – Mataram – KEK Mandalika PP	*Multimoda
65.	Kayangan – Labuan Haji – Keruak – KEK Mandalika PP	*Multimoda
66.	Lembar/ Gilimas – Mawun - KEK Mandalika PP	*Multimoda
67.	Bandara Sultan Salahudin - Dompu PP	*Multimoda
68.	Mandalika - Kayangan PP	*Multimoda
69.	Bangsals - Sembalum PP	*Multimoda





No	RUTE	KETERANGAN
70.	BIZAM – KEK Mandalika PP	*Multimoda
71.	Bus Rapid Transit ( BRT )	*1 rute BRT

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2019.

Tabel 2-72 Rute Angkutan Udara Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Rute	Ket.	
1	Bandara International Zainudin Abdul Majid ( BIZAM )	Benete	
2		Sumbawa	
3		Bima	
4		Denpasar	
5		Surabaya	
6		Semarang	
7		Solo	*
8		Yogyakarta	
9		Bandung	*
10		Jakarta	
11		Banjarmasin	*
12		Makassar	
13		Labuan Bajo	*
14		Kualalumpur	
15		Singapura	*
16		Australia ( Pert)	*
17		China	*
18		Vietnam	*
19		Jeddah/Arab Saudi	
20	Bandara Sultan Kaharuddin	BIZAM	
21		Denpasar	*
22		Surabaya	*
23	Bandara Sultan Salahuddin	BIZAM	
24		Denpasar	
25		Makassar	
26		Labuhan Bajo	
27		Surabaya	*

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2019.

Selain membuka konektivitas antar wilayah, pemerintah juga harus memperhatikan keselamatan pengguna transportasi agar kecelakaan lalu lintas dapat ditekan seminimal mungkin. Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas selama tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2-73 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Korban Meninggal Dunia Di NTB  
Tahun 2015 - 2019

No	Tahun	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Meninggal Dunia (Jiwa)
1	2015	2.601	519
2	2016	2.820	536
3	2017	1.463	473
4	2018	1.673	562
5	2019	1.813	526

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2019.

Dari data diatas terlihat bahwa jumlah kejadian kecelakaan menurun dari 2.601 kejadian pada tahun 2015 menjadi 1.813 kejadian pada tahun 2019. Korban yang meninggal dunia cenderung fluktuatif dimana pada tahun 2015 terdapat 519 korban meninggal dunia dan menurun pada 3 tahun dan pada tahun 2019 menjadi 526 orang. Salah satu eksek negatif dari konektivitas transportasi adalah terjadinya angka kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian jiwa dan materi, untuk itu dibuat sebuah Rasio Fatalitas untuk mengukur keberhasilan penanganan lalu lintas dengan menghitung jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas dibanding dengan 1/10.000 jumlah seluruh kendaraan yang ada.

Tabel 2-74 Rasio Fatalitas Provinsi NTB Tahun 2015 – 2019

No	Tahun	Jumlah Kendaraan	Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	Rasio Fatalitas
1	2015	1.266.198	519	4,10
2	2016	1.360.759	536	3,94
3	2017	1.448.996	473	3,26
4	2018	1.646.647	562	3,41
5	2019	1.561.454	526	3,37

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2019.

## 10. Komunikasi dan Informatika

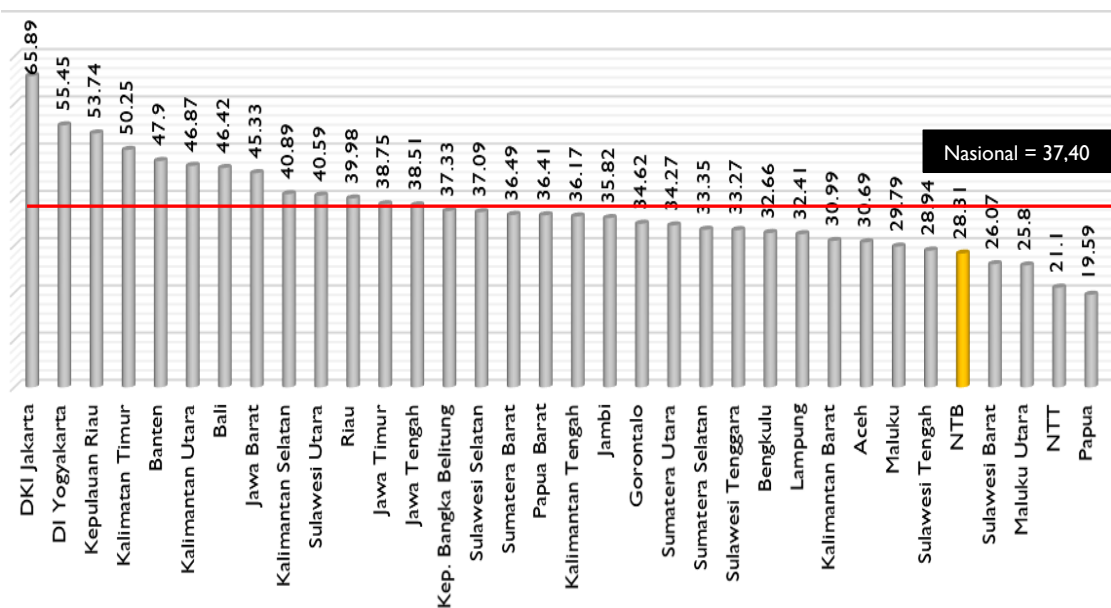
Penerapan teknologi informasi melalui media online dalam hal ini website telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat luas. Ketersediaan website milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah tersedia selama ini. Salah satunya melalui <http://ntbprov.go.id/>.

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi. Terbukanya akses informasi pelayanan kepada masyarakat baik mengenai data perencanaan, keuangan,



pengadaan barang dan jasa, capaian kinerja, statistik, regulasi, LHKPN dan data aset. Selain itu, informasi mengenai pelayanan publik meliputi maklumat pelayanan, daftar informasi pelayanan (DIP), jenis pelayanan, standar pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan laporan permohonan dan keberatan terpublikasikan dalam website Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adanya kemudahan akses yang diimbangi dengan integritas jajaran Pemprov diharapkan akan menghasilkan percepatan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan meningkatkan kepercayaan publik kepada birokrasi.

Proporsi Individu yang menggunakan internet Provinsi NTB pada tahun 2018 tercatat sebesar 28,31% angka ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai capaian nasional sebesar 37,40%.



Sumber: Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi BPS Indonesia 2019  
Gambar 2-41 Proporsi Individu yang Menggunakan Internet menurut Provinsi Tahun 2018

Pada tahun 2018, proporsi individu yang menggunakan internet di Provinsi NTB sebesar 28,31% menempati peringkat ke-5 terendah dari 34 provinsi lain di Indonesia dan masih berada di bawah nilai rata-rata nasional. Hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah dalam pengembangan masyarakat melek internet yang sehat.

Salah satu program yang dilaksanakan di Provinsi NTB dalam rangka mempercepat penyebaran informasi adalah melalui pengembangan kampung media. Kampung media merupakan program untuk penyebaran informasi yang berbasis komunitas yang seluruh kegiatannya menggunakan sebuah portal informasi, berita dan jurnalisme. Metode yang dimanfaatkan adalah dengan





menggunakan kemampuan jurnalisisme warga, yang diunggah oleh setiap orang yang sudah terdaftar sebagai Warga Kampung Media. Warga Kampung Media diberi kebebasan untuk mengemukakan, mengekspresikan, serta menyampaikan berbagai gagasan, pendapat, ulasan, ataupun tanggapan, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Melalui kampung media masyarakat dapat ikut secara langsung berpartisipasi dalam penyebaran informasi publik. Sampai tahun 2018 komunitas kampung media mencapai 2.105 komunitas yang tersebar di 10 kabupaten/kota se NTB dengan jumlah 5.735 anggota.

Komitmen jajaran Kominfo terhadap penyediaan jaringan telekomunikasi di daerah-daerah terpencil terus diwujudkan, dan awal tahun 2018 telah dibangun fasilitas komunikasi di salah satu kecamatan terpencil di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat melalui program Telkomsel Bakti. Program Telkomsel Bakti membangun fasilitas komunikasi di Desa Sebeok dan Dusun Harapan Jaya, Desa Senawang dengan menggunakan GSM 900, yang coverage atau jangkauannya meliputi empat desa di Kecamatan Orong Telu, yakni Desa Senawang, Desa Sebeok, Desa Kelawis dan Desa Mungkin.

#### **11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengukur kinerjanya melalui tiga indikator kinerja pokok, yakni:

- a. Persentase Koperasi yang Aktif dimana sampai dengan tahun 2019 jumlahnya sebanyak 59,61%.
- b. Penumbuhan 5.000 Wira Usaha Baru, hingga tahun 2017 telah tercipta sebanyak 4.427 Wira Usaha Baru
- c. Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syari'ah, sampai dengan tahun 2019 KSP Pola syari'ah yang telah terbentuk sebanyak 387 unit.

Selain itu, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM juga telah didirikan dan mulai beroperasi sejak tahun 2014 dengan tujuan untuk memberikan pelayanan konsultan pelatihan bisnis, pendampingan bisnis, fasilitasi akses pembiayaan, fasilitasi pemasaran dan promosi, networking dan layanan perpustakaan usaha, yang dibantu oleh 7 orang konsultan pendamping untuk mendampingi KUMKM. Dalam periode Januari sampai dengan Desember 2019, sesuai bidang masing-masing dilakukan telah dilakukan bantuan konsultasi kepada lebih dari 800 UMKM lama termasuk pengurus dari 33 koperasi lama dan 5 koperasi baru serta 8 kampung UKM Digital, sedangkan jumlah KUMKM yang berkunjung langsung ke Kantor PLUT KUMKM sebanyak 256 orang.

Pada Tahun 2017 telah diinisiasi pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pengelolaan Dana Bergulir KUMKM dan telah mendapat respon positif dari Bapak Gubernur dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian



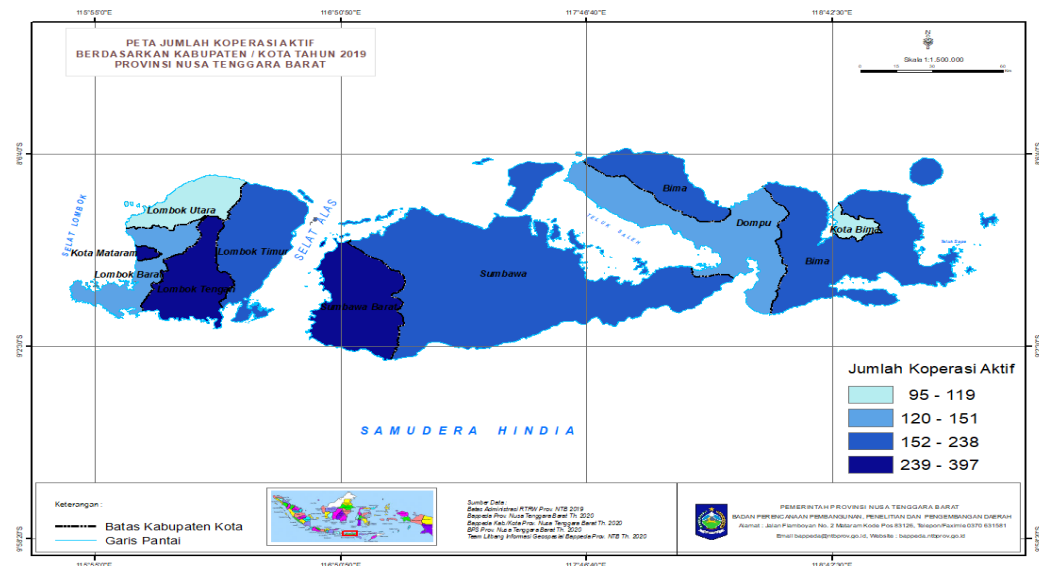
Dalam Negeri. BLUD KUMKM didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan permodalan Koperasi dan UKM.

Tabel 2-75 Kondisi Koperasi di Provinsi NTB Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Koperasi	4.077	4.187	4.203	4.110	4.093
2	Jumlah Koperasi Aktif	2.412	2.472	2.702	2.912	2.440
3	Persentase Koperasi Aktif	59,16	59,04	64,29	70,85	59,61

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

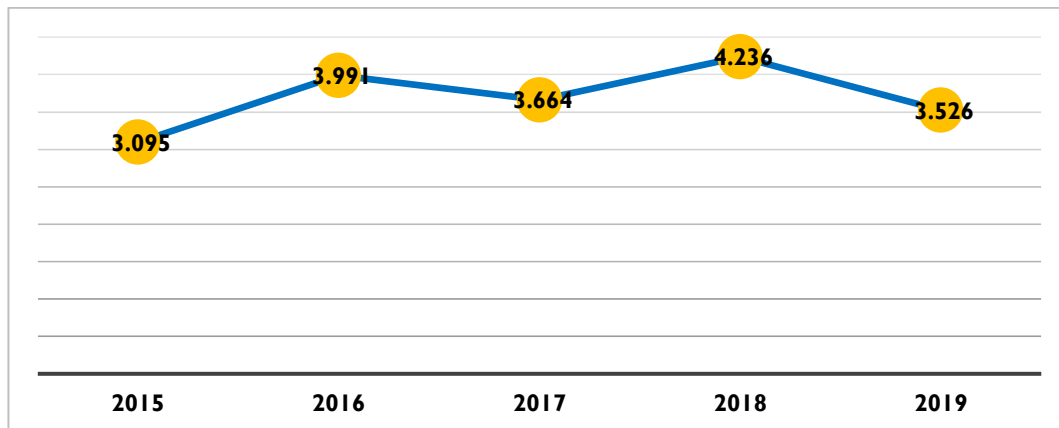
Meskipun secara jumlah meningkat dari tahun 2015 sampai dengan 2019, namun persentase koperasi aktif terus menunjukkan penurunan, artinya makin banyak koperasi yang tidak aktif. Pada tahun 2015, persentase koperasi aktif sebesar 59,16% kemudian meningkat di tahun 2018 (70,85%) namun turun kembali hingga mencapai 59,61% pada tahun 2019.



Gambar 2-42 Peta Jumlah Koperasi Aktif di Provinsi NTB Tahun 2019

## 12. Penanaman Modal

Investasi menjadi pendorong roda perekonomian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penciptaan iklim usaha yang kondusif merupakan elemen utama dalam peningkatan investasi. Minat investasi di Provinsi NTB dalam rentang waktu 2015-2019 terjadi peningkatan yang signifikan, hal ini terlihat dari jumlah izin dan non izin yang diterbitkan pemerintah sebanyak 18.512 izin yang didominasi perizinan di sektor pertanian dan peternakan sebesar 77% sebagaimana disajikan pada gambar berikut.



Sumber: DPM-PTSP Provinsi NTB, 2019.

Gambar 2-43 Jumlah Izin dan Nonizin selama Periode Tahun 2015-2019

Perkembangan jumlah izin dan non izin berdasarkan bidang perizinan selama periode tahun 2015-2019, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-76 Jumlah Izin dan Non Izin yang Diterbitkan Tahun 2015 – 2019

No	Bidang Perizinan	Izin dan Non Izin					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Penanaman Modal	7	6	10	-	-	23
2	Perikanan Dan Kelautan	27	208	400	705	640	1.980
3	Pertanian	2.815	3.449	2.836	-	3	9.103
4	Koperasi & Umkm	6	7	2	6	3	24
5	Pekerjaan Umum	-	2	1	27	20	50
6	Kehutanan	24	64	19	6	7	120
7	Lingkungan Hidup & Penelitian	10	13	25	18	37	103
8	Perindustrian	-	1	-	-	-	1
9	Perdagangan	-	1	2	-	1	4
10	Perkebunan	-	5	2	-	1	8
11	Hubkominfo	-	11	26	47	45	129
12	Pertambangan	197	209	313	421	539	1.679
13	Perencanaan Pembangunan Daerah	2	8	12	-	-	22
14	Kesehatan	7	7	14	51	14	93
15	Pariwisata	-	-	2	-	-	2
16	Pertanahan	-	-	-	-	-	0
17	Peternakan	-	-	-	2.953	2.212	5.165
18	Sosial	-	-	-	2	4	6
<b>TOTAL</b>		<b>3.095</b>	<b>3.991</b>	<b>3.664</b>	<b>4.236</b>	<b>3.526</b>	<b>18.512</b>

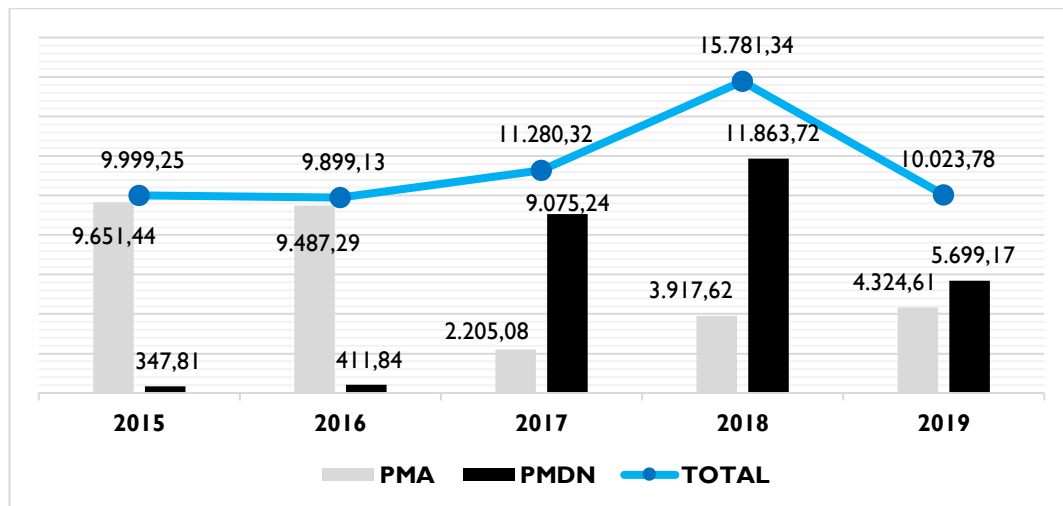
Sumber: DPM-PTSP Provinsi NTB, 2019.

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah tergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu





daerah tidak terjadi dengan serta merta, tapi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah pelayanan investasi yang tercermin pada kemudahan dalam memperoleh perijinan dan berapa lama proses perizinan investasi dilakukan. Pelayanan investasi yang diberikan oleh pemerintah daerah dari waktu ke waktu semakin baik, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya nilai investasi selama lima tahun terakhir sebagaimana disajikan pada gambar berikut.



Sumber : DPM-PTSP Provinsi NTB, 2019.

Gambar 2-44 Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB Tahun 2015-2019 (Rp.Milyar)

Realisasi investasi di Provinsi NTB tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun di tahun 2019 mengalami penurunan. Tahun 2015 realisasi investasi sebesar Rp.9.999,25 Trilyun turun menjadi Rp.9.899,13 Trilyun di tahun 2016, kemudian meningkat sampai tahun 2018 mencapai Rp.11.863,72 Trilyun dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp.10.023,37 Trilyun. Laju investasi dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 terjadi peningkatan yang cukup tinggi sebesar 39,90%, namun di tahun 2019 laju investasi menurun sebesar -36,48%. Perlambatan ini disebabkan oleh akibat dampak pasca gempa bumi yang terjadi pada bulan Agustus-September 2018.

Terdapat sepuluh sektor yang cukup banyak diminati oleh Investor untuk berinvestasi di Provinsi NTB. Realisasi investasi menurut sektor berdasarkan jenis penanaman modal disajikan pada tabel berikut.



Tabel 2-77 Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor di Provinsi NTB  
Tahun 2015 – 2019

No	Sektor	Realisasi Investasi PMDN (Juta Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pariwisata	149,700.55	-	284,646.06	1,451,048.75	1,088,214.86
2	Perhubungan/ Transportasi	35,000.00	36,000.00	-	773,953.96	1,908,976.17
3	Perdagangan	-	63,611.06	161,794.53	77,112.91	164,661.91
4	Pertanian	17,956.33	-	-	-	7,447.83
5	Perkebunan	103,852.91	177,181.61	-	-	-
6	Kehutanan	11,000.00	-	-	-	-
7	Perikanan	2,743.82	71,632.69	-	37,968.85	89,202.13
8	Peternakan	-	-	-	-	100,460.00
9	Ketenagalistrikan	-	-	-	-	297,411.50
10	PUPR	-	-	-	-	15,734.00
11	Kesehatan	-	-	-	-	199,575.54
12	Pertambangan dan Energi	3,017.69	50,590.01	8,258,850.02	8,965,043.69	1,542,019.01
13	Industri	6,356.41	11,213.65	125,292.50	164,373.70	267,430.29
14	Koperasi	-	-	-	-	2,897.01
15	Jasa Lainnya	18,177.29	1,606.58	244.659,34	394,224.22	15,148.68
	<b>Jumlah</b>	<b>347,805.00</b>	<b>411,835.60</b>	<b>9,075,242.46</b>	<b>11,863,726.08</b>	<b>5,699,178.93</b>

Sumber: DPM-PTSP Provinsi NTB, 2019.

Berdasarkan tabel diatas, realisasi investasi PMDN menurut sektor tahun 2015-2019 mencapai Rp.27,4 Trilyun dengan investasi tertinggi di sektor pertambangan dan energi sebesar Rp.18,8 Trilyun atau 68,69%, kemudian diikuti sektor pariwisata mencapai Rp.2,9 Trilyun atau 10,85%, disusul sektor perhubungan/pariwisata sebesar Rp.2,7 Trilyun atau 10,05%, diikuti sektor industri sebesar Rp.574 Milyar atau 2,10% dan investasi terendah berada pada sektor koperasi sebesar Rp.2,8 milyar atau 0,01%.

Realisasi investasi PMA menurut sektor di Provinsi NTB Tahun 2015-2019 mencapai Rp.29,58 Trilyun, dengan realisasi investasi terbesar di sektor pertambangan dan energy sebesar Rp.16,48 Trilyun atau 55,73%, diikuti sektor pariwisata mencapai Rp.8,33 Trilyun atau 28,19%, disusul sektor jasa lainnya mencapai Rp.3,61 Trilyun atau 12,22% dan terendah sektor kesehatan yang hanya sebesar Rp.6,38 Milyar sedangkan sektor kehutanan dan peternakan tidak mencatatkan investasi pada periode tahun 2015-2019. Satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah, Provinsi NTB sebagai salah satu daerah agraris, ditengah berbagai tantangan pembangunan di sektor pertanian, perlu meningkatkan investasi disektor pertanian terutama industri pengolahan hasil-hasil pertanian. Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor di Provinsi NTB Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 2-78 Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor di Provinsi NTB  
Tahun 2015-2019

No	Sektor	Realisasi Investasi PMA (Juta Rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Pariwisata	2,152,007.88	2,109,728.50	1,434,680.40	803,209.91	1,840,003.26	8,339,629.95
2	Perhubungan/ Transportasi	-	-	-	100.00	229.96	329.96
3	Perdagangan	20,481.46	9,049.86	37,916.89	17,288.17	9,325.21	94,061.59
4	Pertanian/ Perkebunan	27,600.00	3,188.00	-	170,938.50	148.25	201,874.75
5	Ketenagalis- trikan	-	-	-	-	144,451.52	144,451.52
6	PUPR	-	-	-	-	167,386.45	167,386.45
7	Kesehatan	-	-	-	-	6.38	6.38
8	Kehutanan	-	-	-	-	-	-
9	Perikanan	14,567.23	173,244.36	63,017.18	80,635.80	21,408.41	352,872.98
10	Peternakan	-	-	-	-	-	-
11	Pertambangan Energi	5,048,426.64	6,582,191.04	146,858.01	2,653,248.30	2,056,691.33	16,487,415.32
12	Industri	103,635.73	3,537.84	12,856.69	41,319.54	20,438.69	181,788.49
13	Jasa Lainnya	2,284,725.03	606,352.40	509,754.89	150,888.78	64,524.39	3,616,245.49
	<b>Jumlah</b>	<b>9,651,443.97</b>	<b>9,487,292.00</b>	<b>2,205,084.06</b>	<b>3,917,629.00</b>	<b>4,324,613.85</b>	<b>29,586,062.88</b>

Sumber: DPM-PTSP Provinsi NTB, 2019.

Berdasarkan lokasi, realisasi investasi PMDN di Provinsi NTB periode Tahun 2015-2019 tertinggi berada di Kabupaten Sumbawa Barat mencapai Rp.16,48 Trilyun atau 59,39%, hal ini karena perubahan status investasi perusahaan tambang dari PMA menjadi PMDN sejak tahun 2017. Lokasi investasi terbesar berikutnya adalah Kabupaten Lombok Barat mencapai Rp.4,64 Trilyun atau 16,73%, diikuti Kota Mataram sebesar Rp.2,85 Trilyun atau 10,29% dan terendah di Kabupaten Bima sebesar Rp.61,63 Milyar atau 0,22%. Realisasi Investasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-79 Realisasi Investasi PMDN Menurut Kab/Kota Tahun 2015 – 2019

No	Kabupaten/ Kota	Realisasi Investasi PMDN (Juta Rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Kota Mataram	927.08	39,348.82	725,030.70	1,376,997.77	714,089.75	2,856,394.11
2	Lombok Utara	9,097.44	436.06	5,600.00	119,483.91	161,489.71	296,107.11
3	Lombok Barat	59,285.38	97,201.94	1,839,250.71	971,950.87	1,677,895.44	4,645,584.34
4	Lombok Tengah	151,830.03	111.77	3,991.20	1,124,096.06	995,013.26	2,275,042.32
5	Lombok Timur	-	1,342.00	798.03	4,317.67	131,793.19	138,250.89
6	Sumbawa Barat	1,498.42	66,592.91	6,688,619.56	7,972,692.14	1,759,727.46	16,489,130.48
7	Sumbawa	17,956.33	24,580.71	177,729.96	133,258.40	86,836.65	440,362.04
8	Dompu	105,964.91	177,181.61	-	41,426.79	4,428.85	329,002.17
9	Bima	1,245.40	5,039.79	-	55,350.00	-	61,635.19
10	Kota Bima	-	-	-	64,152.52	167,904.69	232,057.21
	<b>Jumlah</b>	<b>347,804.99</b>	<b>411,835.60</b>	<b>9,441,020.16</b>	<b>11,863,726.12</b>	<b>5,699,179.00</b>	<b>27,763,565.87</b>

Sumber: DPM-PTSP Provinsi NTB, 2019.





Realisasi Investasi PMA periode Tahun 2015-2019 terbesar juga berada di Kabupaten Sumbawa Barat mencapai Rp.12,85 Trilyun atau mencapai 43,92% dari total investasi sebesar Rp.29,26 Trilyun, hal ini dikarenakan investasi sampai Tahun 2016 di Perusahaan Tambang Batu Hijau masih di lakukan oleh PT. Newmont. Realisasi PMA terbesar selanjutnya berada di Kabupaten Lombok Utara dengan nilai sebesar Rp.3,98 Trilyun atau 13,63%, disusul Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp.3,89 Trilyun atau 13,30%. Investasi PMA terendah pada periode tahun 2015-2019 berada di Kota Bima yang hanya sebesar Rp.22,95 Juta. Perkembangan realisasi Investasi PMA Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-80 Realisasi Investasi PMA Menurut Kab./Kota Tahun 2015 – 2019

No	Kabupaten/ Kota	Realisasi Investasi PMA (Rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Kota Mataram	106,207.15	495,188.14	18,103.78	57,265.42	136,132.50	812,896.98
2	Lombok Utara	1,583,893.76	813,970.82	622,281.09	570,780.34	396,632.18	3,987,558.20
3	Lombok Barat	1,602,899.67	555,104.73	723,950.69	483,452.50	527,269.39	3,892,676.98
4	Lombok Tengah	821,022.36	708,216.98	224,031.21	276,714.72	801,752.72	2,831,738.00
5	Lombok Timur	493,793.20	204,126.95	167,600.43	436,290.51	294,168.11	1,595,979.19
6	Sumbawa Barat	4,939,815.40	6,626,090.75	24,003.99	16,491.78	1,245,816.73	12,852,218.64
7	Sumbawa	3,878.39	9,748.21	49,386.98	2,031,775.39	517,498.85	2,612,287.82
8	Dompu	96,406.83	4,966.72	3,625.99	35,384.03	447,763.93	588,147.49
9	Bima	3,527.24	69,878.72	6,318.23	9,464.45	2,570.00	91,758.64
10	Kota Bima	-	-	3.99	9.45	9.51	22.95
	Jumlah	9,651,444.00	9,487,292.02	1,839,306.37	3,917,628.58	4,369,613.92	29,265,284.88

Sumber: DPM-PTSP Provinsi NTB, 2019.

Dalam rangka memberikan kepastian waktu proses penyelesaian setiap jenis perizinan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah melakukan pelayanan sesuai dengan standar perizinan. Perkembangan jenis perizinan dan waktu penyelesaiannya Tahun 2015-2019, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-81 Perkembangan Jenis Perizinan dan Waktu Penyelesaian Perizinan Tahun 2015 – 2019

NO	JENIS PERIZINAN	WAKTU (HARI)			
		2015	2016	2017	2018
1	Izin Prinsip Penanaman Modal	3	3	3	3
2	Izin Usaha Penanaman Modal	6	6	3	3
3	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	3	3	3	3
4	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	6	6	3	3
5	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	5	5	3	3
6	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	5	5	3	3
7	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal	7	7	3	3



NO	JENIS PERIZINAN	WAKTU (HARI)			
		2015	2016	2017	2018
8	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal	6	6	3	3

Sumber: DPM-PTSP Provinsi NTB, 2019.

Sejak diberlakukannya PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, maka sistem layanan perizinan penanaman modal yang sebelumnya menggunakan aplikasi SPIISE, selanjutnya perizinan penanaman modal (perizinan berusaha) dilaksanakan melalui aplikasi OSS (*online single submission*) dengan produk NIB (nomor induk berusaha yang sekaligus berfungsi sebagai TDP dan API. Tahun 2019 Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan mencapai 2.867, kemudian tahun 2020 mencapai 9.800 NIB.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan laju investasi sebagai berikut:

- a. Memperbaiki secara terus menerus sistem layanan perijinan serta mempermudah proses perijinan;
- b. Mengirim nota pengingat kepada perusahaan-perusahaan tentang kewajiban LKPM dan menjemput bola bagi perusahaan yang belum menyampaikan LKPM;
- c. Sosialisasi dan pembinaan terhadap perusahaan langsung di tempat/lokasi.

Guna meningkatkan investasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi para Investor antara lain melalui : Perijinan yang tidak dipungut biaya; mempermudah prosedur dan waktu pengurusan izin investasi; sinkronisasi dan harmonisasi mekanisme serta mempermudah prosedur yang sama dalam pemberian izin pelaksanaan investasi dimasing-masing kabupaten/kota melalui Forum PTSP; dan memfasilitasi perusahaan yang bermasalah di lokasi kegiatan melalui Satgas Penanaman Modal.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan penanaman modal yang diselenggarakan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diukur dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terus meningkat. Nilai IKM tahun 2015 sebesar 79,14, meningkat di tahun 2016 menjadi 79,64 dan mencapai 80,98 ditahun 2017 yang seluruhnya masuk dengan kriteria BAIK dengan rentang nilai 62,51-81,25.

### 13. Kepemudaan dan Olah Raga

Penyelenggaraan bidang Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi NTB tahun 2015-2019 melalui pelaksanaan Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda, Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, serta Program Peningkatan



Sarana dan Prasarana Olahraga. Kinerja program prioritas tersebut untuk diukur dengan indikator Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional, Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional, dan Proporsi wira usaha muda.

Tabel 2-82 Prestasi Olahraga Atlet Provinsi NTB Tahun 2015 - 2019

No	Tahun	Event	Jenis Lomba	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah Medali	Keterangan
1.	2015	Nas	Atletik	18	7	9	34	Kejurnas PPLP Cabor Atletik Di Aceh Tahun 2015; Kejurnas CaborAtletik di Bandung Tahun 2015; Kejurnas Atletik Cabang Olah Raga Atletik di Jakarta Tahun 2015;Kejurnas PPLP Cabor Atletik Di Provinsi AcehThn 2015
			Voli Pantai	1	-	-	1	Kejurnas CaborAtletik di Bandung Tahun 2015
			Pencak silat	5	-	2	7	Kejurnas CaborAtletik di Bandung Tahun 2015; Kejurnas Cabor Pencak SilatDi JakartaTahun 2015
Jumlah				<b>24</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>42</b>	
2.	2016	Nas	Atletik	1	1	2	4	Kejurnas PPLP Cabor Atletik Di Jakarta Tahun 2016
			Pencak silat	1	-	1	2	Kejurnas PPLP Cabor Pencak Silat Manado, Sulawesi Utara 2016
			Taekwondo	-	1	1	2	Kejurnas PPLP Cabor Taekwondo Di Palu, Sulteng Tahun 2016
Jumlah				<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	
3.	2017	Nas	Atletik	6	7	2	15	POPNAS XIV SEMARANG; PEPARPENAS VII SOLO; Kejurnas PPLP di Papua
			Pencak silat	1	1	0	2	
			Taekwondo	0	0	2	2	
			Senam	0	0	0	0	
			Tarung Derajat	1	0	3	4	
			Karate	0	1	0	1	
			Catur	0	1	0	1	
			Boccia	0	1	1	2	
			Bulu Tangkis	0	0	1	1	
			Pencak Silat	3	1	2	6	
			Taekwondo	0	0	2	2	Kejurnas PPLP di Manado
Voli Pasir	0	0	1	1	Kejurnas PPLP di Makasar			
Jumlah				<b>11</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>40</b>	
		Int'l	Atletik	0	3	0	3	ASEAN SCHOOL di Singapura
Jumlah				<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	
4.	2018	Nas	Pencak silat	2	7	10	19	POPWIL IV di NTB
			Volly Indoor	0	2	0	2	
			Bola Basket	0	2	0	2	
			Tenis Lapangan	0	0	2	2	
			Tenis Meja	0	0	2	2	
			Bulu Tangkis	0	1	1	2	



No	Tahun	Event	Jenis Lomba	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah Medali	Keterangan
			Sepak Bola	0	0	1	1	
			Atletik	0	1	3	4	Kejurnas PPLP di Gorontalo
			Pencak silat	2	1	1	4	Kejurnas PPLP di Makassar
			Taekwondo	0	2	2	4	Kejurnas PPLP di NTB
			Volly Pasir	0	1	0	1	Kejurnas PPLP di Semarang
			Volly Indoor	0	0	0	0	Kejurnas PPLP Peringkat IV di Musi Banyuasin
			Atletik	2	3	0	5	Pekan Olahraga Special Olympics Indonesia (SoINA) 2018 di Riau
			Boccia	1	2	0	3	
			Futsal	0	1	0	1	
			Tenis Meja	0	1	0	1	
		Int'l	Atletik	1	0	0	1	Asia Junior di Jepang
			Atletik	1	0	0	1	Kejuaraan Dunia di Finlandia
			Atletik	0	1	0	1	Tes Event Asian Games
			Atletik	0	0	1	1	Asian Games 2018 Jakarta
Jumlah				<b>9</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>57</b>	
<b>5.</b>	<b>2019</b>	Nas	Atletik	1	2	0	3	POPNAS XV di Jakarta
			Taekwondo	0	1	0	1	
			Volly Pasir	0	1	0	1	
			Atletik	1	2	1	2	Kejurnas PPLP di Bangka Belitung
			Pencak Silat	0	1	1	2	Kejurnas PPLP di Aceh
			Taekwondo	0	0	2	2	Kejurnas PPLP di Semarang
			Volly Pasir	0	1	0	1	Kejurnas PPLP di Bangka Belitung
			Boccia	0	0	3	3	Peran Paralympic Nasional di Jakarta
		Int'l	Atletik	0	2	0	2	Kejuaraan Asean School di Singapura
			Atletik	1	0	2	3	Sea Games Jakarta
			Volly Pasir	2	1	1	4	
Jumlah				<b>5</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, 2019.

Berbagai prestasi yang telah dicapai oleh atlet Provinsi NTB merupakan hasil dari pembinaan yang telah dilakukan melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Provinsi NTB. Pola pembinaan yang dilakukan melalui sistem promosi-degradasi artinya ketika atlet mengalami penurunan prestasi maka terdegradasi dan dikeluarkan dari pusat pelatihan, sedangkan atlet yang berpotensi akan masuk menggantikannya pada pusat pelatihan. Sampai dengan tahun 2019 jumlah yang dibina sebanyak 64 atlet dan 14 pelatih.

Untuk mendukung pengembangan potensi atlet muda berprestasi, telah tersedia sarana dan prasarana olahraga sebanyak 572 unit. Adapun distribusi sarana dan prasarana olahraga pada kabupaten/kota dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 2-83 Jumlah Prasarana Olahraga di Nusa Tenggara Barat Tahun 2019





No.	Prasarana Olahraga	Kab. Lombok Barat	Kab. Lombok Tengah	Kab. Lombok timur	Kab. Sumbawa	Kab. Dompu	Kab. Bima	Kab. Sumbawa Barat	Kab. Lombok Utara	Kota Mataram	Kota Bima	TOTAL
1	Lapangan Atletik	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
2	Sepak Takraw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
3	Lapangan Tenismeja	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15
4	Gedung Serbaguna	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4
5	Panjat Tebing	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5
6	Gedung Bulutangkis	3	-	-	-	5	-	-	-	10	-	18
7	Lap. Olahraga Terbuka	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	9
8	Kolam Renang	-	-	-	-	1	-	-	-	16	5	22
9	Lapangan Sepakbola	54	-	-	-	16	-	38	-	12	-	120
10	Rumah Billiard	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5
11	Gedung Olahraga	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
12	Lapangan Bulutangkis	39	-	-	-	-	-	-	-	10	20	69
13	Stadion Atletik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
14	Stadion Sepakbola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Lapangan Futsal	6	-	-	-	-	-	-	-	18	5	29
16	Lapangan Tennis	-	-	-	-	-	-	2	-	31	-	33
17	Lapangan Bolabasket	-	-	-	-	-	-	2	-	41	22	65
18	Lapangan Bola Voli	30	-	-	-	10	-	20	-	12	80	152
19	Lapangan Bola Mini	2	-	-	-	-	-	-	-	-	16	18
JUMLAH		148	0	0	0	32	0	67	0	167	158	572

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, 2019.

Pembangunan pemuda adalah proses yang dinamis dengan cakupan dimensi yang luas, yg meliputi dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, dan dimensi kesejahteraan. Provinsi NTB melakukan perubahan penting dalam pembangunan pemuda. Berdasarkan nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), ada lompatan yang cukup signifikan dalam perubahan pembangunan pemuda NTB. Dengan IPP berada di indeks 47,3, provinsi NTB berhasil keluar dari kelompok 'lima terbawah' -peringkat ke-32- di tahun 2015 dan menduduki peringkat ke-29 dengan hampir empat poin perubahan indeks pada tahun 2016.

Sumbangan penting datang dari indikator tingkat pengangguran dan perempuan bekerja di sektor formal. Tingkat pengangguran turun dari 14 persen ke 10 persen, bergerak harmonis bersama dengan kenaikan perempuan bekerja dari 15 ke 22 persen. Keadaan ini membuat domain lapangan dan kesempatan kerja serta domain gender dan diskriminasi bertambah, masing-masing, dari 35 dan 33 poin ke nilai indeks yang sama, yakni 40 poin.

Sementara itu, terkait dengan Pemuda wirausaha (*white collar*) praktis hilang. Data memperlihatkan, tahun 2015 masih terdapat 0,17 persen pemuda wirausaha, tapi setahun berikutnya pemuda wirausaha tidak lagi tercatat. Dalam keadaan ini, sub-indeks pemuda wirausaha hanya terhitung satu poin—nilai terendah dalam penghitungan sub-indeks, hal ini menyebabkan berkurangnya nilai indeks IPP NTB. Padahal Sudah ada 200 pemuda yang mengikuti pelatihan dalam dua tahun terakhir, dan dirgetkan 50 pemuda dari sepuluh kabupaten/ kota akan terus dilatih untuk meningkatkan kemandirian, kapasitas dan profesionalisme pemuda supaya bisa menjadi entrepreneur yang baik.



#### 14. Kebudayaan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2015-2019 telah oleh Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka memperkenalkan nilai-nilai budaya daerah, membentuk karakter masyarakat seturut nilai-nilai budaya lokal yang pada akhirnya bermuara pada pelestarian nilai-nilai budaya dan pembentukan pranata adat di masyarakat. Pranata adat adalah nilai-nilai luhur nenek moyang yang telah ada, terpatri dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat NTB sehingga menjadi sebuah karakter budaya. Perkembangan pembentukan pranata adat di NTB tahun 2015-2019 menurut kabupaten dan kota sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-84 Perkembangan Pranata Adat Yang Terbentuk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 – 2019

No	Kabupaten/Kota	Pranata Adat (Lembaga)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Mataram	5	10	5	-	-
2	Lombok Tengah	5	10	5	-	-
3	Lombok Timur	5	10	5	26	26
4	Lombok Barat	5	10	5	7	7
5	Lombok Utara	5	10	5	4	4
6	Sumbawa	5	10	5		
7	Sumbawa Barat	10	10	5		
8	Dompu	4	3	5	7	7
9	Bima	4	10	5		
10	Kota Bima	5	10	5	17	17
	<b>Jumlah</b>	<b>53</b>	<b>93</b>	<b>50</b>	<b>61</b>	<b>61</b>

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2019.

Minat masyarakat dan wisatawan untuk mengenal kesenian dan kebudayaan NTB tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2018 sedikit mengalami penurunan. Jumlah pengunjung Museum Negeri NTB sampai dengan tahun 2019 mencapai 428.348 orang, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-85 Pengunjung Museum Negeri Provinsi NTB Tahun 2015-2019

NO	JENIS PENGUNJUNG	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	TK	5,251	3,927	11,438	15,196	19,398
2	SD	20,162	18,263	22,772	19,885	19,983
3	SLTP	7,583	7,767	16,398	11,675	11,022
4	SLTA	6,219	4,891	10,041	8,449	5,360
5	Mahasiswa	1,100	117	3,666	1,107	1,071
6	Peneliti	8	21	6	12	2
7	WTA (Wisatawan Asing)	3,229	2,669	1,667	1,323	1,562
8	RTD (Rombongan Tamu Daerah)	79	163	92	25	-



NO	JENIS PENGUNJUNG	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
9	RTN (Rombongan Tamu Negara)	-	2,259	15	4	-
10	Pengunjung Umum	36,045	46,158	2,196	2,512	32,135
<b>JUMLAH</b>		<b>79,676</b>	<b>87,288</b>	<b>88,055</b>	<b>82,796</b>	<b>90,533</b>

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2019.

## 15. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai tempat untuk mengakses informasi saat ini terus berbenah untuk dapat memberikan pelayanan dengan baik, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pengumpulan, penyimpanan, serta pelestarian terbitan Indonesia sebagai khazanah kebudayaan serta menjamin pemeliharaan terbitan Indonesia.

Tabel 2-86 Jumlah Pengunjung ke Perpustakaan dan Anggota Perpustakaan Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Pengunjung Perpustakaan (orang)	980,112	1,000,000	1,016,000	1,064,186
2	Anggota Perpustakaan (orang)	10,119	8,640	10,807	6,896
	- Umum	921	532	445	361
	- Pelajar	8,511	749	612	450
	- Mahasiswa	687	7,135	9,478	6,085
	- Unverified	-	224	272	-

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, 2019.

Jumlah pengunjung perpustakaan tiap tahunnya mengalami peningkatan dengan rata-rata 2,79%. Sedangkan untuk jumlah anggota perpustakaan tiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 jumlah anggota yang terdaftar sebanyak 8.640 orang, meningkat sebanyak 10.807 orang atau 25,08% di tahun 2018, selanjutnya pada tahun 2019 menurun sebesar 36,19%.

Untuk mendukung minat baca dan peningkatan jumlah pengunjung pada perpustakaan di NTB, telah berkembang secara signifikan komunitas perpustakaan pada tahun 2015 sebanyak 101 Komunitas meningkat menjadi 182 Komunitas pada tahun 2019. Komunitas ini akan terus berkembang dengan adanya pembinaan yang dilakukan oleh baik Perpustakaan Provinsi maupun Perpustakaan Kabupaten/Kota. Ada perkembangan komunitas perpustakaan di NTB sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-87 Jumlah Perpustakaan Komunitas Di NTB Tahun 2014-2019

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kota Mataram	30	25	25	30	-



No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
2	Lombok Barat	2	2	3	3	3
3	Lombok Tengah	27	27	27	44	59
4	Lombok Timur	23	23	23	23	23
5	Lombok Utara	5	5	10	12	15
6	Sumbawa Barat	-	-	-	-	-
7	Sumbawa	-	-	28	42	44
8	Dompu	-	7	9	9	9
9	Bima	5	5	15	20	20
10	Kota Bima	9	9	9	9	9
Jumlah		<b>101</b>	<b>103</b>	<b>149</b>	<b>192</b>	<b>182</b>

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, 2019

## 16. Kearsipan

Kearsipan merupakan suatu proses yang diawali dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan menurut sistem tertentu. Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi.

Penyelamatan arsip Pemerintah Provinsi NTB yang tercipta di seluruh Perangkat Daerah dilakukan melalui proses akuisisi. Akuisisi arsip adalah pengumpulan arsip yang dilaksanakan melalui kegiatan penilaian, penataan dan pembuatan daftar arsip statis yang bertujuan untuk penyelamatan dan pelestarian serta pencari jejak informasi bersejarah dalam bentuk memori kolektif kehidupan berbangsa dan bernegara kepada generasi mendatang. Upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan arsip di Provinsi NTB selama kurun tahun 2016 – 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-88 Upaya Pengelolaan Arsip Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Peningkatan Khasanah arsip statis (berkas)	24,200	14,400	26,100	-
2	Jumlah Arsip Perangkat Daerah/Lembaga (berkas)	6,420	6,250	5,500	14,400
3	Pengembangan Arsip Desa / Kelurahan (Desa)	43	22	12	-
4	Record centre (Perangkat Daerah)	5	5	-	15

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, 2019.

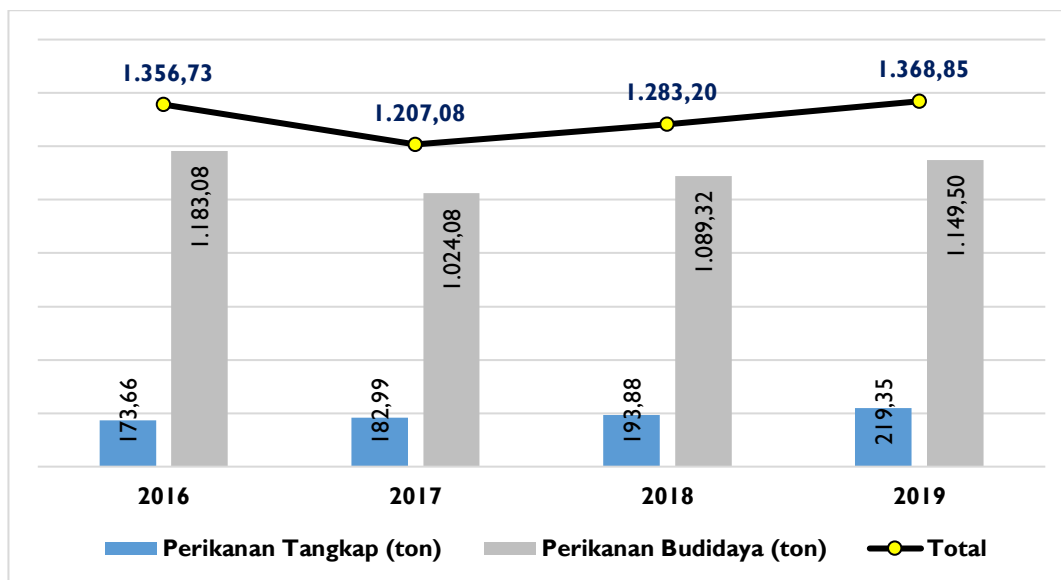




### 2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### 1. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan NTB terus mengalami peningkatan baik perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Produksi perikanan pada tahun 2019 mencapai 1.368,85 ton, meningkat hanya 0,89% dibanding tahun 2016 yang sebesar 1.356,73 ton. Dari total produksi, kontribusi produksi budidaya perikanan jauh mendominasi dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2019.

Gambar 2-45 Produksi Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (ribuan ton), Tahun 2016-2019

Perkembangan total produksi perikanan budidaya cenderung fluktuatif, disebabkan oleh fluktuasi produksi rumput laut, dimana komoditas rumput laut mendominasi produksi perikanan budidaya sebesar 80% dari total produksi. Fenomena ini sangat dipengaruhi oleh kondisi alam yang dalam beberapa tahun terakhir yang mengalami anomali cuaca. Sedangkan untuk jenis komoditas penting lainnya seperti Udang, Nila, Lele dan Karper cenderung mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun ketahun. Hal ini menunjukkan besarnya animo masyarakat untuk mengembangkan usaha budidaya ikan air tawar dan payau, dan juga tentunya pertumbuhan produksi ini mengacu pada permintaan pasar yang terus meningkat. Berikut disajikan perkembangan produksi perikanan budidaya menurut komoditas.

Tabel 2-89 Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Per Komoditas Tahun 2016 – 2019

No	Komoditas	Produksi (Ton)			
		2016	2017	2018	2019
1	Rumput Laut	1.026.580,42	822.749,19	875.894,51	920.879,15



No	Komoditas	Produksi (Ton)			
		2016	2017	2018	2019
2	Udang Vaname	115.578,88	120.157,49	129.911,24	131.175,75
3	Bandeng	16.813,86	18.623,02	15.283,47	26.732,16
4	Nila	18.114,43	50.370,70	51.255,96	54.484,43
5	Lele	2.602,48	4.520,08	6.469,76	6.143,43
6	Karper	1.700,35	2.611,85	8.223,68	4.190,91
7	Ikan Lainnya	1.685,89	5.052,45	2.245,64	5.794,0
	<b>Jumlah</b>	<b>1.183.076,31</b>	<b>1.024.084,78</b>	<b>1.089.284,26</b>	<b>1.149.500</b>

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2019.

Pada tahun 2016-2019, Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih banyak memproduksi perikanan budidaya jenis rumput laut. Perkembangan produksi rumput laut berfluktuatif tiap tahunnya. Sedangkan produksi perikanan budidaya terendah adalah komoditas ikan lainnya, namun hingga akhir tahun 2019 terlihat meningkat tajam.

Tabel 2-90 Nilai Tukar Nelayan, Angka Konsumsi Ikan, Proporsi Tangkapan Ikan Dalam Batasan Biologis Yang Aman dan Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Provinsi NTB Tahun 2015 – 2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Nilai Tukar Petani Perikanan	Indeks	100,94	101,98	104,06	108,72	108,89
Konsumsi Ikan	Kg/Kap/tahun	31,53	32,35	35,49	38,20	38,2
Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman	%	86,27	83,12	84,97	85,58	86,19
Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	%	7,87	7,87	8,26	8,46	8,67

Sumber : BPS dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Tahun 2019

Dari tabel data diatas terlihat bahwa Nilai Tukar Nelayan dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, hal ini berarti kesejahteraan nelayan makin membaik sebagai dampak dari pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Demikian juga dengan tingkat konsumsi ikan, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan masyarakat semakin sadar tentang nilai gizi dari produk perikanan. Rasio kawasan lindung perairan juga menunjukkan nilai peningkatan dari tahun ke tahunnya, pada tahun 2015 sebesar 7,87 persen meningkat jadi 8,67 persen pada tahun 2019.

## 2. Pariwisata

Sektor pariwisata NTB memiliki potensi yang besar banyaknya destinasi dan keragaman potensi wisata kelas dunia, mulai dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kawasan Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora (Samota),



Geopark Gunung Rinjani, Pantai Senggigi, pesona gili-gili kekayaan tradisi, seni budaya, sejarah, dan industri kerajinan rakyat yang unik dan potensial.

Pembangunan pariwisata memiliki kontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Keberhasilan Kinerja pembangunan pariwisata ini ditunjukkan dengan Peningkatan Kunjungan Wisatawan baik mancanegara dan nusantara seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2-91 Angka Kunjungan Wisatawan dan Rata-rata Lama Menginap Pada Hotel Bintang Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kunjungan wisatawan	2,210,527	3,094,437	3,508,903	2,812,379	3,706,352
- Mancanegara	1,149,235	1,404,328	1,430,249	1,204,556	2,155,561
- Nusantara	1,061,292	1,690,109	2,078,654	1,607,823	1,550,791
Rata-rata Lama Menginap (Malam)	2.82	2.02	2.64	1.50	2.05

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2019.

Meningkatnya kunjungan wisatawan tidak terlepas dari program unggulan yang mengiringi capaian angka kunjungan tersebut. Program Visit Lombok Sumbawa yang mengantarkan NTB pada jumlah kunjungan satu juta wisatawan, dilanjutkan dengan program Pesona Lombok Sumbawa yang telah mengantarkan pada angka kunjungan sebesar dua juta wisatawan dan diperkuat lagi dengan penguatan branding Friendly Lombok dan Passionate Sumbawa telah mengantarkan pada jumlah kunjungan mencapai 3.706.352 wisatawan pada akhir tahun 2019.

### 3. Pertanian

Melihat geografis Nusa Tenggara Barat serta sebagian besar mata pencaharian utama masyarakat NTB sebagai petani, sudah barang tentu hal tersebut menjadikan sektor pertanian sebagai sektor yang sangat strategis dalam struktur perekonomian NTB. Seiring dengan berkembangnya perekonomian yang mencanangkan masa depan NTB menuju era industrialisasi dan daerah pariwisata dunia tentunya sector pertanian tetap dipertimbangkan.

Sektor pertanian NTB terdiri atas tiga sub sektor yaitu sub sektor tanaman pangan tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan. Komoditi strategis tanaman pangan yaitu padi, jagung dan kedelai. Produksi Komoditas Tanaman Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019 mengalami perkembangan seperti yang terlihat pada tabel berikut.



Tabel 2-92 Produksi Tanaman Pangan Tahun 2015-2019

NO	JENIS TANAMAN	PRODUKSI (TON)				
		2015	2016	2017	2018	2019*
1	Padi (Gabah Kering Giling)	2,417,392	2,095,118	2,323,700	2,491,949	2,436,349
2	Jagung (Pipilan Kering)	959,973	1,278,271	2,020,244	2,061,857	2,003,267
3	Kedelai (Biji Kering)	125,036	10,948	51,365	71,908	80,925

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2019. Keterangan: \*) Angka Sementara 2019

Sedangkan komoditas pertanian lainnya adalah tanaman hortikultura yang terdiri dari Cabai dan Bawang merah sebagai mana tabel berikut:

Tabel 2-93 Produksi Tanaman Hortikultura Tahun 2015-2019

No	Jenis Tanaman	Produksi (Ton)				
		2015	2016	2017	2018	2019*
1	Cabe (buah segar)	84,752	109,037	207,531	234,528	181,926
2	Bawang merah (umbi kering)	169,981	222,805	208,156	212,885	161,411

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2019. Keterangan: \*) Angka Sementara 2019.

Komoditi tanaman perkebunan NTB adalah kopi, kakao, kelapa, jambu mete dan tembakau dengan produksi tahun 2015 -2019 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-94 Produksi Komoditi Tanaman Perkebunan Tahun 2015 -2019

No	Komoditi	Produksi (Ton)				
		2015	2016	2017	2018	2019*
1	Kopi (Biji Berasan)	4.981,91	4.641,41	4.865,15	5,005.90	6,566.36
2	Kelapa (Kopra)	47.763,35	45.998,17	48.346,30	45,555.62	48,766.08
3	Kakao (Biji Kering)	1.860,65	2.110,66	2.083,37	1,818.90	2,219.35
4	Jambu Mete (Biji Gelondong)	10.827,81	12.765,32	12.734,03	11,554.94	10,410.72
5	Tembakau (Daun Kering)	34.448,51	39.589,90	50.680,13	44,570.56	43,068.47

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2019.

Keterangan: \*) Angka Sementara.

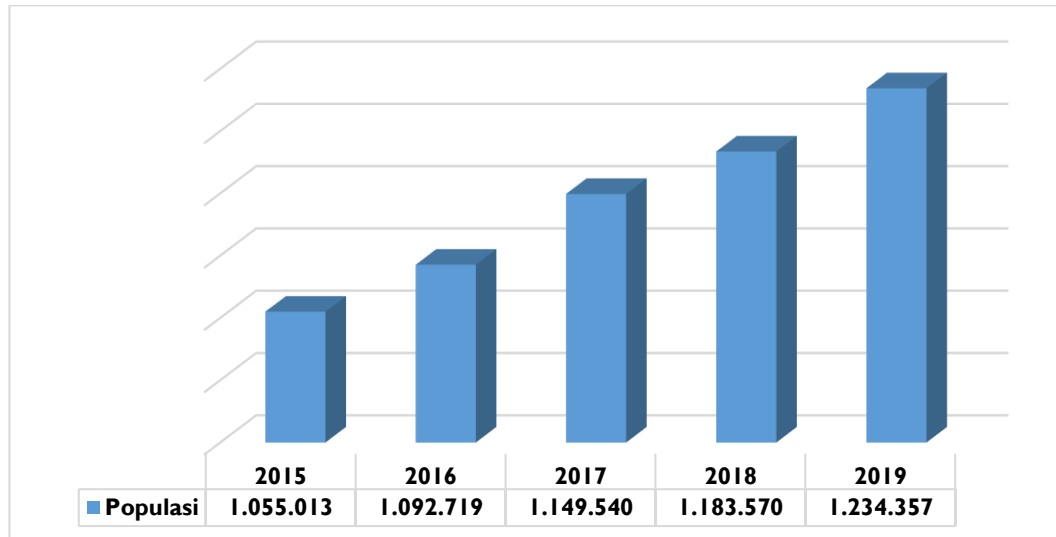
Pembangunan sub sektor peternakan merupakan bagian penting dari kebijakan pembangunan pertanian yang memiliki nilai strategis dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan kualitas sumberdaya manusia. Dalam konteks pembangunan ekonomi, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mendukung Program ketahanan pangan nasional di NTB. Sub sektor peternakan





merupakan salah satu program unggulan daerah dan diharapkan sebagai motor penggerak ekonomi pedesaan serta memiliki daya ungkit sektor ekonomi lainnya.

Keberhasilan sub sektor peternakan ditunjukkan oleh indikator peningkatan populasi ternak sapi dalam kurun waktu 2015 - 2019 telah berhasil meningkatkan rata-rata pertumbuhan populasi sebesar 4% yang tersebar di Kabupaten/Kota sebagaimana pada tabel dibawah ini:



Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB 2019.

Gambar 2-46 Perkembangan Populasi Sapi di Provinsi NTB Tahun 2015-2019

Sebagai salah satu daerah sentra produksi sapi potong dan sapi bibit populasi sapi di NTB dalam kurun waktu 2015 – 2019 terus mengalami peningkatan. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan populasi yaitu jumlah ketersediaan sapi potong dan sapi bibit dalam daerah untuk memenuhi kebutuhan lokal dan kebutuhan nasional. Provinsi NTB, memiliki peran yang lebih besar dalam mensuplai kebutuhan bibit dan sapi potong bagi lebih dari 12 provinsi lainnya di Indonesia. Transaksi perdagangan ternak dalam setahun rata-rata mencapai 374 Milyar dan sekaligus turut meningkatkan Produk domestic Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian di NTB.

Jumlah kelompok tani di Provinsi NTB pada tahun 2018 sebanyak 17.813 kelompok yang tersebar di 10 kabupaten/kota, Kabupaten Sumbawa menjadi daerah dengan jumlah kelompok tani terbanyak dengan 3.678 kelompok.

Tabel 2-95 Kelembagaan Pelaku Utama Pertanian Per Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2018

No	Kabupaten	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah GAPOKTAN	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani
1	Lombok Barat	1.404	122	59
2	Lombok Tengah	2.473	223	64



No	Kabupaten	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah GAPOKTAN	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani
3	Lombok Timur	3.092	253	90
4	Sumbawa	3.678	164	70
5	Dompu	1.439	88	85
6	Bima	2.941	186	126
7	Sumbawa Barat	1.165	68	137
8	Lombok Utara	889	37	26
9	Kota Mataram	300	43	8
10	Kota Bima	432	38	12
<b>JUMLAH</b>		<b>17.813</b>	<b>1.222</b>	<b>677</b>

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2018.

Jumlah kelompok tani tahun 2018 sebanyak 17.813 kelompok dan baru 1.222 kelompok saja yang sudah membentuk gabungan kelompok tani. Kelembagaan para pelaku pertanian menjadi penting, sehingga lebih baik bila kelompok-kelompok tani tersebut membentuk gabungan kelompok tani sehingga dapat mengembangkan komoditas baik kualitas maupun kuantitas. Selain itu gapoktan akan lebih mudah untuk mendapatkan berbagai bantuan atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

#### 4. Kehutanan

Adapun kehutanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat menghasilkan kayu hutan yang terdiri dari 3 jenis yakni Jati, Meranti dan Rimba campuran. Jenis yang paling banyak diproduksi adalah jenis Rimba campuran.

Tabel 2-96 Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Menurut Jenis Hasilnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019

No.	Jenis Hasil Hutan Ikutan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kayu Bulat/ Log	m3	0	0	14,897.64	7,674.34	12,838.37
2.	Rotan / Rattan	ton	0	120	25.37	267.5	98.17
3.	Kemiri/ Candle Nut	ton	317	0	3.11	14.32	9.41
4.	Madu/ Honey	LT	4,775	0	0	802	152
5.	Bambu/ Bamboo	Batang	454,4	0	3	51,894	8,55
6.	Akar Lontoh	Ton	0	0	0	0	5.5
7.	Kopi	Ton	0	0	3,656	2,061.61	25.34
8.	Kayu Putih	Ton	0	0	250	0	
9.	Metete	Ton	0	0	10	24	
10.	Kayu Manis	Ton	0	0	0	70	20.5
11.	Biji Srikaya	Ton	0	0	0	66.66	
12.	Jagung	Ton					576.66

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2019.



Hutan dan lahan yg direhabilitasi pada tahun 2013 seluas 1.353 ha, pada tahun 2017 meningkat jadi 3.800 ha. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan ini tidak sebanding dengan luas kerusakan kawasan hutan yang terjadi, dimana pada tahun 2017 terjadi kerusakan kawasan hutan seluas 96.238,24 ha. Hal ini tentunya akan mengancam keanekaragaman hayati yang ada di kawasan hutan. Dalam rilis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB pada tahun 2019, terdapat 896 ribu hektare hutan dalam kondisi kritis. Dari 896 ribu hektare hutan itu, 580 ribu hektare hutan virgin dan 316 ribu hektare rusak karena pertanian lahan kering. Kritisnya kondisi hutan akibat dari aksi pembalakan liar.

Tabel 2-97 Luas Rehabilitasi Hutan & Lahan, Kerusakan Kawasan Hutan dan Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Tahun 2015 – 2019

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ha	3.196	2.491	3.800	6522.75	2430.34
2	Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	NA	NA	96.238,24	96.238,24	96.238,24
3	Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan	%	41,44	41,44	41,44	41,44	41,44

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2019.

## 5. Perdagangan

Total ekspor Provinsi NTB secara kumulatif dari tahun 2015 827.651,70 ton, terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2019 mencapai hanya sebesar 168.147,41 ton, sebagai akibat dari penurunan ekspor barang tambang/galian non migas sebesar 53,93 persen, perhiasan /permata 12,42 persen serta komoditi lainnya sebesar 98,32 persen sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-98 Perkembangan Ekspor Tahun 2015 - 2019

Tahun	Volume (Ton)	Nilai (Us\$)
2015	827,651.70	1,560,043,159.81
2016	819,323.58	1,585,666.36
2017	614,486.50	1,112,941.20
2018	336,294.82	471.134,65
2019	168,147.41	221.911,08

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2019.

Komoditi ekspor yang mendominasi perolehan devisa pada tahun 2015–2019, terdapat tiga komoditi yakni Konsentrat Tembaga, Mutiara, dan Kerajinan



Buah Kering selalu menempati 5 besar komoditi ekspor NTB. Lima komoditi ekspor teratas setiap tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-99 Volume dan Nilai Ekspor Menurut Jenis Komoditi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019

Komoditas	Nilai Ekspor (US \$ Ribu)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Konsentrat tembaga	1,445,343.00	1,573,601.70	1,098,394.30	428,671.43	193,199.58
Perhiasan/Permata	4,709.00	8,098.30	6,934.50	7,715.52	6,757.26
Ikan dan Udang	1,061.00	1,148.70	2,900.10	2,790.29	13,012.44
Buah-Buahan	523.00	868.70	866.90	231.28	826.90
Perangkat Optik	-	623.70	0.90	65.30	-
Garam, Belerang, Kapur	291.00	411.30	1,552.00	1,815.44	3,025.78
Perkakas, Perang ptg	-	206.30	-	132.90	-
Barang Kiriman	55.00	177.80	135.80	211.65	535.27
Perabot, Penerangan Rumah	156.00	127.40	286.20	158.60	-
Sayuran	-	88.50	1,075.30	1,196.80	-
Biji-Bijian Berminyak	-	74.10	29.60	284.36	623.72
Jerami/Banhan Anyaman	44.00	60.90	20.90	74.30	-
Produk Keramik	64.00	50.90	9.30	140.80	-
Serat Stafel Buatan	-	43.90	3.30	40.30	-
Barang Lainnya	490.00	84.10	732.10	27,605.68	3,930.13
<b>Total Ekspor</b>	<b>1,452,737.00</b>	<b>1,585,666.36</b>	<b>1,112,941.20</b>	<b>471,134.65</b>	<b>221,911.09</b>

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

Negara Tujuan ekspor Daerah NTB selama periode 2015-2018 tercatat Jepang, Filipina, Korea Selatan, China dan India secara konsisten selalu berada pada lima besar nilai ekspor terbesar. Berikut negara dengan nilai ekspor terbesar selama periode 2015-2018 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2-100 Negara Tujuan dan Nilai Ekspor Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2018

Negara Tujuan Ekspor	Nilai Ekspor (US \$ Ribu)			
	2015	2016	2017	2018
Jepang	665,715.20	808,013.90	373,311.00	218,312.17
Korea Selatan	390,267.70	246,381.00	199,807.00	70,891.27
China	58,226.70	74,334.00	1,377.40	62,839.86
Philipina	264,770.70	398,525.00	489,735.30	80,245.45
India	23,553.90	47,142.90	36,383.80	4,278.46
Australia	1,174.90	3,996.90	1,571.10	2,752.29
Negara Lainnya	49,027.90	7,272.66	10,755.60	4,319.41
<b>Total Ekspor</b>	<b>1,452,737.00</b>	<b>1,585,666.36</b>	<b>1,112,941.20</b>	<b>471,134.65</b>

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2019.

Kegiatan operasi pasar rakyat sempat mengalami fluktuasi seiring dengan naik turunnya alokasi anggaran yang diterima. Program ini merupakan upaya





pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga. Hasil dari pelaksanaan kegiatan operasi pasar selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-101 Operasi Pasar 2015-2019

Tahun	Realisasi Penyaluran Bantuan Paket Sembako Untuk Masyarakat Miskin (Paket)
2015	3.489
2016	11.697
2017	8.152
2018	3.676
2019	5.250

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2019.

## 6. Perindustrian

Sektor industri masih memiliki peran strategis dalam perekonomian NTB. Hal ini terlihat dari kemajuan ekonomi kerakyatan yang mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku-pelaku ekonomi lokal berbasis komoditi unggulan lokal dan mampu menyerap tenaga kerja. Oleh karena Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus berupaya meningkatkan daya saing produk industri dengan menumbuhkan Industry Kecil Mengah (IKM), memfasilitasi sertifikasi halal dari MUI, bimbingan teknis desain produksi, fasilitasi pendaftaran HKI Karya Seni Budaya Daerah (Desain industry, merek, hak cipta), dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Perkembangan sentra industri formal NTB dari Tahun 2015-2019 sebesar 4,27%, sedangkan untuk industri non-formal mengalami penurunan sebesar 1,40%. Pada tahun 2019, jumlah perusahaan yang masuk ke dalam industri formal sebanyak 8,234 unit dan untuk industri non-formal sebanyak 73.756 unit. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-102 Perkembangan Industri NTB Tahun 2015-2019

JENIS	2015	2016	2017	2018	2019
<b>FORMAL</b>					
Perusahaan (Unit)	7,897	8,425	8,730	9,185	8,234
Tenaga Kerja (Orang)	47,399	49,994	51,541	53,686	58,762
Nilai Investasi (Rp 000,-)	1,946,143,169	2,004,619,612	2,056,454,883	2,225,707,765	792,490,559
Nilai Produksi (Rp 000,-)	3,221,767,413	3,391,464,311	3,476,961,215	3,687,832,837	1,248,943,612
<b>NON FORMAL</b>					
Perusahaan (Unit)	74,800	74,894	72,113	73,952	73,756
Tenaga Kerja (Orang)	174,014	173,974	167,579	170,047	162,749



JENIS	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai Investasi (Rp 000,-)	187,718,222	195,143,809	192,257,762	246,066,264	719,305,266
Nilai Produksi (Rp 000,-)	1,698,997,552	1,713,579,404	1,648,544,665	1,719,775,502	2,319,922,470

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2019.

## 7. Transmigrasi

Transmigrasi bertujuan untuk memfasilitasi perpindahan penduduk/transmigran untuk dapat hidup secara berkualitas dan sejahtera dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkesinambungan di wilayah potensial melalui penyediaan areal permukiman yang layak untuk dihuni, layak untuk diusahakan, dan layak untuk dikembangkan secara lestari.

Jumlah alokasi transmigran yang ditempatkan di dalam Provinsi NTB maupun yang diarahkan ke luar provinsi relatif berkurang. Transmigran yang masih dibina berada di UPT Sori Panihi SP.6 di Kabupaten Bima sejak tahun 2013 dengan jumlah 300 KK (1.218 jiwa), UPT Branglamar Kabupaten Sumbawa 100 KK (422 jiwa), dan UPT Tongo II SP 2 Kabupaten Sumbawa Barat 225 KK (1.096 jiwa). Sedangkan jumlah transmigran asal Provinsi NTB yang mengikuti program transmigrasi ke luar provinsi dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-103 Perkembangan Transmigran Keluar Provinsi NTB dan Tujuan Daerah Tahun 2015 – 2019

No	Jumlah	2015	2016	2017	2018	2019
1.	KK	25	71	10	10	10
2.	Jiwa	92	262	37	36	39
3.	Daerah Tujuan	Kalimantan Barat 15 KK (51 Jiwa)	Kalimantan Barat 19 KK (75 Jiwa)	Sulawesi Barat 5 KK (18 Jiwa)	Gorontalo 5 KK (18 Jiwa)	Sulawesi Tenggara 10 KK (39 Jiwa)
		Sumatera Selatan 10 KK (41 Jiwa)	Gorontalo 10 KK (35 Jiwa)	Sulawesi Tenggara 5 KK (19 Jiwa)	Sulawesi Barat 5 KK (18 Jiwa)	
			Sulawesi Tengah 25 KK (95 Jiwa)			
			Sulawesi Tenggara 17 KK (57 Jiwa)			

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2019.

### 2.3.4. Fokus Layanan Urusan Penunjang

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintah fungsi penunjang merupakan urusan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi: unsur pendukung pemerintahan, perencanaan, pengawasan, keuangan, kepegawaian, dan pendidikan pelatihan, serta Pemerintahan Umum.



Pada tahun 2015-2019, urusan pemerintah fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB diuraikan sebagai berikut.

### 1. Unsur Pendukung Pemerintahan

Unsur pendukung merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya yang dilaksanakan oleh sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dan Pengubung Daerah. Selama kurun waktu 2015– 2019, beberapa capaian kinerja dari unsur pendukung pemerintahan antara lain pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam penanganan tingkat penyelesaian aduan pelayanan publik, dengan capaian tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-104 Tingkat Penyelesaian Aduan Pelayanan Publik Tahun 2015-2019

Indikator	Capaian RPJMD					
	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat Penyelesaian Aduan Pelayanan Publik	Target	100	100	100	100	100
	Realisasi	100	100	100	100	100

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi NTB tahun 2019

Seluruh aduan pelayanan publik telah ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui kantor maupun instansi terkait. Pelayanan publik yang diadakan oleh masyarakat pada umumnya ditujukan ke instansi yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat, melalui SMS, Kotak Pengaduan, surat dan pengaduan langsung.

Adapun terkait akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Provinsi NTB telah berhasil meningkatkan akuntabilitas kinerja dari kategori nilai CC pada tahun 2014 dengan nilai skor 58,13 meningkat menjadi BB tahun 2019 dengan nilai skor 70,05 berdasarkan hasil penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

Selama kurun waktu 2013-2017, Biro Hukum Setda Provinsi NTB telah menghasilkan produk hukum sebagai indikator kinerja yang dapat diukur, yakni pada tahun 2013 jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur sebanyak 832, semakin meningkat dibandingkan tahun 2014 sebanyak 924, sampai dengan tahun 2017 menunjukkan jumlah 1.128 peraturan, sedangkan tahun 2019 mencapai 1.071 produk hukum. Adapun produk hukum yang telah difasilitasi dan dievaluasi produk hukum dari kabupaten/kota se-NTB sebanyak 91 produk hukum tahun 2015 meningkat menjadi 233 produk hukum pada tahun 2019. Data Perda/Perbup/Perwal yang Dikaji selama tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut ini



Tabel 2-105 Jumlah Perda/Perbup/Perwal yang Dikaji Tahun 2015 - 2019

Tahun	Raperda	Raperbup	Raperwal
2015	54	25	12
2016	102	33	4
2017	85	15	-
2018	81	51	
2019	105	101	27

Sumber: Biro Hukum Setda NTB, 2019

Adapun hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tahun 2015-2019 antara lain:

1. Tahun 2015 sebanyak 12 Perda, sebagai berikut:
  - a. Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemetongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif.
  - b. Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan
  - c. Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal.
  - d. Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - e. Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
  - f. Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
  - g. Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerataan Akses Air Bersih.
  - h. Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
  - i. Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.
  - j. Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
  - k. Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
  - l. Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Tahun 2016 sebanyak 12 Perda, sebagai berikut:
  - a. Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan TKI.
  - b. Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.
  - c. Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.





- d. Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pramuwisata.
  - e. Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.
  - f. Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
  - g. Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
  - h. Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang fasilitas dan Kemudahan Pajak Daerah di Kawasan Khusus Ekonomi Mandalika.
  - i. Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Tahun Jamak.
  - j. Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan status Perusahaan Daerah (PD) BPR NTB menjadi PT Bank BPR.
  - k. Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
  - l. Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang APBD Tahun Anggaran 2017
3. Tahun 2017 sebanyak 13 Perda, sebagai berikut:
- a. Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2013-2018.
  - b. Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan. Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.
  - c. Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
  - d. Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mutu Pelayanan Kesehatan.
  - e. Perda No. 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
  - f. Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.
  - g. Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB.
  - h. Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang APBD Tahun Anggaran 2017.
  - i. Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
  - j. Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
  - k. Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.



- l. Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi NTB Tahun 2017-2037.
  - m. Perda Nomor 13 Tahun 2017 tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2018.
4. Tahun 2018 sebanyak 16 Perda, sebagai berikut:
- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
  - b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
  - c. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik
  - d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga
  - e. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
  - f. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan
  - g. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
  - h. Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Konversi PT. Bank NTB menjadi PT. Bank Syariah
  - i. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi
  - j. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat
  - k. Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang IRIGASI
  - l. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara Barat
  - m. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
5. Tahun 2019 sebanyak 14 Perda, sebagai berikut:
- a. Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023
  - b. Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang KEPEMUDAAN
  - c. Perda Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi
  - d. Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
  - e. Perda No. 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah



- f. Perda No. 6 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019
- g. Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019
- h. Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Fasilitas Keselamatan Transportasi
- i. Perda Nomor 9 Tahun 2019 Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
- j. Perda nomor 11 Tahun 2019 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- k. Perda Nomor 12 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak
- l. Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- m. Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan

Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi NTB telah berhasil mendapatkan peringkat 7 pada tahun 2019 melalui penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2015 dokumen LPPD Provinsi NTB mencapai peringkat 9 (sembilan) dan pada tahun 2019 naik peringkat menjadi peringkat 7 (tujuh).

## **2. Urusan Perencanaan**

Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan Pembangunan diselenggarakan oleh BAPPEDA Provinsi NTB. Hal ini sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sejak tahun 2017. BAPPEDA Provinsi NTB menyelenggarakan Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan dan Urusan Penelitian Daerah. Capaian kinerja BAPPEDA Provinsi NTB dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 diukur dengan Dokumen Perencanaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan yang Berprestasi di Tingkat Nasional.



Tabel 2-106 Capaian Indikator Kinerja Bidang Perencanaan Pembangunan  
Tahun 2015-2019

Indikator	Capaian RPJMD						
	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat Keselarasan RKP terhadap RPJMD (Revisi)	Target	67,50	78,90	88,00	95,00	100	100
	Realisasi	82,35	84,67	94,72	99,03	100	95,09

Sumber: BAPPEDA Provinsi NTB. 2015-2019

Capaian Tingkat Keselarasan program RKP terhadap RPJMD, didukung oleh kegiatan strategis BAPPEDA Provinsi NTB selama kurun waktu 2015-2019 yang terdiri dari:

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan RKP Online. yaitu aplikasi yang digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) dalam mewujudkan perencanaan yang cepat. informatif. akurat dan akuntabel. RKP Online dapat diakses semua pihak guna menyampaikan aspirasi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dalam mendukung pelaksanaan perencanaan partisipatif berbasis masyarakat.
- b. Penerapan NTB Satu Data merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi NTB untuk mewujudkan good governance melalui penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan akuntabel dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
- c. Melakukan revisi RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 sesuai regulasi Pemerintah Pusat dan hasil evaluasi selama 3 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2/2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2013-2018.
- d. Menetapkan e-planning dengan nama entebePLAN sebagai upaya dalam penerapan sistem informasi perencanaan untuk konsolidasi perencanaan dan menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan. Sistem entebePLAN meliputi 7 aplikasi yaitu e-RPJMD. e-RENJA. e-RKP. e-Musrenbang. e-KUA PPAS. e-Pokir. dan e-ASB.
- e. Keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh BAPPEDA Provinsi NTB telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. BAPPEDA telah berhasil memperoleh penghargaan Peringkat Pertama Kategori Badan Publik OPD Provinsi NTB tahun 2015 dan tahun 2017 dari Komisi Informasi Provinsi NTB.
- f. BAPPEDA telah mengembangkan inovasi NTB Satu Peta berbasis informasi geospasial tematik dan dapat diakses melalui website: <http://geospasial.bappeda.ntbprov.go.id> dan memperoleh penghargaan





sebagai Provinsi yang dinilai mampu melaksanakan perencanaan tata guna lahan partisipatif.

### 3. Urusan Pengawasan

Inspektorat sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengawasan merupakan pilar utama selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki posisi sangat strategis baik dari aspek pelaksanaan fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian Visi dan Misi serta program Pemerintah Daerah sesuai RPJMD. Inspektorat dalam kaitannya dengan pencapaian indikator RPJMD yang merupakan penegak supremasi hukum, pemerintahan yang bebas Kolusi korupsi Nepotisme (KKN) dan memantapkan otonomi daerah sekaligus mengawal pelaksanaan program yang ditetapkan dalam APBD sehingga target RPJMD dapat tercapai.

Dalam rangka meminimalkan timbulnya kerugian negara/daerah baik yang bersumber dari dana pusat maupun dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Inspektorat Provinsi NTB telah membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) bekerjasama dengan Kejaksaan dan Kepolisian untuk mengawal program/kegiatan (proyek) yang ada di perangkat daerah.

Capaian pelaksanaan urusan pengawasan selama tahun 2015-2019 sebagai berikut:

- a. Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah Daerah (Pemda): Maturitas Sistem Pengendalian Pemda dapat naik dari yang sebelumnya Level II menjadi level III. yang artinya praktik pengendalian dilingkungan APIP dan Pemerintah Daerah telah terdokumentasi dengan baik dengan sistem evaluasi yang perlu didokumentasikan secara memadai. Kondisi inilah yang berkontribusi dalam pencapaian Opini WTP 6 kali berturut-turut di Provinsi NTB.
- b. Peningkatan Kapabilitas APIP: Kapabilitas Internal Auditor Capability Model/IACM-APIP Inspektorat yang sebelumnya Level II menjadi Level III. yang artinya Inspektorat dipandang telah mampu menilai Efektifitas, Efisiensi dan Ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada Sistem tata Kelola (*Governance*). Manajemen Resiko dan Pengendalian Internal pada entitas.
- c. Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan: Temuan hasil pemeriksaan mengalami banyak penurunan yang sangat signifikan. akan tetapi ada 2 jenis temuan yang mengalami kenaikan yaitu



perjalanan dinas dan kekurangan volume pekerjaan fisik/konstruksi tetapi hanya pada beberapa Perangkat Daerah saja.

- d. Program Pencegahan Korupsi: Dari 4 Perangkat Daerah yang menjadi Pilot Project Pembangunan Zona Integritas. terdapat 2 Perangkat Daerah yang memperoleh penghargaan sebagai unit pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yaitu RSUD Provinsi NTB dan RSJ Mutiara Sukma. Disamping itu juga ada Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (ADPPK). Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Capaian Rencana Aksi Terpadu antara KPK dengan Pemerintah Provinsi NTB.
- e. Pelaksanaa Satgas Saber Pungli: Pelaporan dugaan pungutan liar pada Satgas Saber Pungli sejumlah 96 Kasus dan yang sudah dilakukan penanganan sebanyak 21 kasus. yaitu 4 kasus di Provinsi dan 17 kasus di Kabupaten/Kota.
- f. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB): PMPRB merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara online dan mandiri. Capaian PMPRB Provinsi NTB pada saat ini dikategorikan baik (60,52 persen pada tahun 2017).
- g. Pelaksanaan Evaluasi SAKIP dan EPPD: Pada tahun 2017 ada 2 (dua) Perangkat Daerah Provinsi NTB yang mendapatkan nilai BB dan 10 (sepuluh) Perangkat Daerah mendapat nilai B. hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk pelaksanaan EPPD pada Kabupaten/Kota pada tahun 2017 terdapat 6 (enam) Kabupaten/Kota mendapatkan skor Sangat Tinggi dan 4 (empat) Kabupaten/Kota mendapatkan skor Tinggi.

Hasil audit terhadap penyelenggaraan keuangan negara/daerah yang telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2013 sampai dengan 2017 sebesar Rp. 147.332.788.020.26 dan yang sudah dikembalikan ke kas negara/daerah sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp. 109.977.877.681.78. Adapun sisa total kerugian negara/daerah yang belum dikembalikan dan perlu ditindaklanjuti sebesar Rp.37.334.910.338.48, sehingga pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp.178.791.282.847,35.

Inspektorat melalui kegiatan operasi tindaklanjut akan menindaklanjuti total sisa kerugian negara/daerah yang belum dikembalikan tersebut. namun apabila inspektorat tidak dapat menindaklanjuti pengembalian kerugian dimaksud. maka akan dilimpahkan ke majelis Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Provinsi NTB. Hasil sidang majelis akan menerbitkan surat kuasa khusus (SKK) bagi entitas yang sudah ditetapkan oleh majelis TP-TGR untuk diserahkan ke Jaksa Pengacara Negara (JPN).



#### 4. Urusan Keuangan

Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Keuangan diselenggarakan oleh 2 Perangkat Daerah, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA). Adapun capaian dari penyelenggaraan urusan dari kedua Perangkat Daerah tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

a. Capaian indikator kinerja yang telah dilakukan oleh BPKAD Provinsi NTB Tahun 2015 - 2019, sebagai berikut :

- 1) Jumlah APBD (Belanja) Provinsi NTB pada tahun 2015 berjumlah Rp.3.448.585.631.903,26 meningkat menjadi Rp.5.499.754.766.128,49 pada tahun 2019 atau sebesar 59,48 persen.
- 2) Kinerja laporan keuangan daerah kurun waktu tahun 2015 - 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut.

Waktu penetapan APBD Provinsi NTB kurun waktu tahun 2015-2019 dilaksanakan sesuai dengan tepat waktu sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2-107 Penetapan APBD Provinsi NTB Tahun 2015-2019

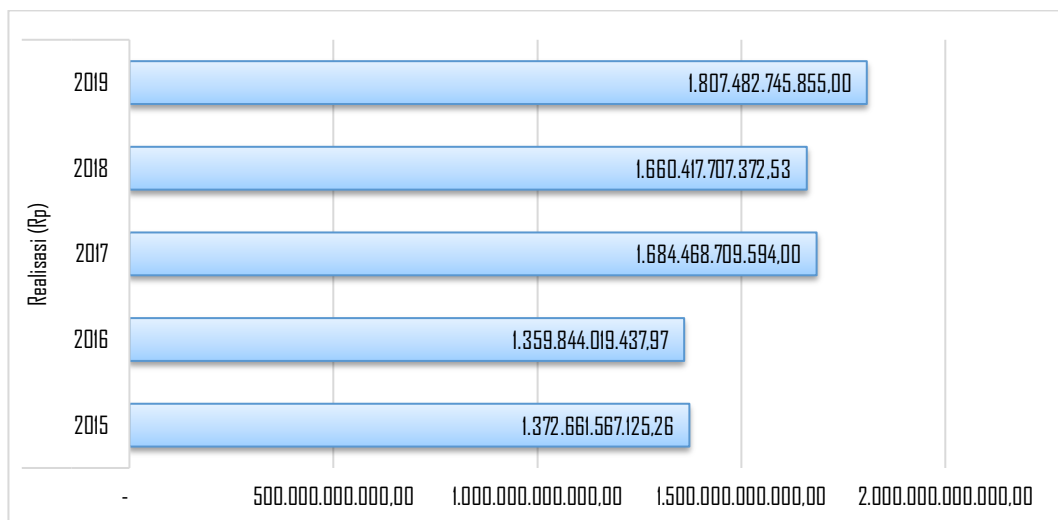
Tahun Anggaran	Kesepakatan KUA	Persetujuan Bersama Gubernur dengan DPRD	Evaluasi Mendagri	Penetapan		Ket.
				Peraturan Daerah dan Lembaran Daerah	Peraturan Gubernur dan Berita Daerah	
<b>Murni</b>						
2015	6/8/2014	22/08/2014	No. 903-3636 Tahun 2014	Nomor 8 Tahun 2014	Nomor 21 Tahun 2014	Tepat waktu
			15-09-2014	22-09-2014	22-09-2014	
2016	4/11/2015	30/11/2015	No. 903-6194 Tahun 2015	Nomor 11 Tahun 2015	Nomor 50 Tahun 2015	Tepat waktu
			18-12-2015	28-12-2015	29-12-2015	
2017	11/11/2016	30/11/2016	No.903-10295 Tahun 2016	Nomor 12 Tahun 2016	Nomor 47 Tahun 2016	Tepat waktu
			16-12-2016	21-12-2016	22-12-2016	
2018	21/11/2017	30/11/2017	No. 903-9031 Tahun 2017	Nomor 13 Tahun 2017	Nomor 67 Tahun 2017	Tepat waktu
			22-12-2017	29-12-2017	29-12-2017	
2019	5/11/2018	27/11/2018	No. 903-8688 Tahun 2018	Nomor 13 Tahun 2018	Nomor 47 Tahun 2018	Tepat waktu
			10-12-2018	17-12-2018	17-12-2018	
<b>Perubahan</b>						
2014	4/6/2014	28/07/2014	No. 903-3322 Tahun 2014	Nomor 7 Tahun 2014	Nomor 17 Tahun 2014	Tepat waktu
			12-8-2014	15-08-2014	15-08-2014	
2015	15/7/2015	11/8/2015	No. 903-5023 Tahun 2015	Nomor 6 Tahun 2015	Nomor 33 Tahun 2015	Tepat waktu
			31-08-2015	4/9/2015		
2016	9/9/2016	30/09/2016	No. 903-9936 Tahun 2016	Nomor 7 Tahun 2016	Nomor 32 Tahun 2016	Terlambat
			18-10-2016	19-10-2016	20-10-2016	
2017	20/7/2017	11/8/2017	No. 903-7656 Tahun 2017	Nomor 8 Tahun 2017	Nomor 29 Tahun 2017	Tepat waktu
			31-08-2017	7/9/2017	7/9/2017	
2018	3/9/2018	14/08/2018	No. 903-7421 Tahun 2018	Nomor 11 Tahun 2018	Nomor 33 Tahun 2018	Tepat waktu
			25-09-2018	28-09-2018	28-09-2018	

Sumber: BPKAD Provinsi NTB, 2015-2019



- b. Capaian indikator kinerja yang telah dilakukan oleh Bappenda Provinsi NTB Tahun 2015 – 2019 dideskripsikan berikut ini.

Keberhasilan penyelenggaraan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Keuangan yang ditangani oleh BAPPENDA Provinsi NTB diukur melalui 1 indikator kinerja, yaitu: Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam menetapkan target PAD, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat senantiasa memperhatikan estimasi dasar, peningkatan cakupan, pertumbuhan penduduk, kenaikan pendapatan riil per kapita, inflasi, perubahan tarif, pembangunan baru dan perubahan peraturan. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: 1) Pendapatan Pajak Daerah, 2) Hasil Retribusi Daerah, 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.



Sumber: Bappenda Provinsi NTB, 2015-2019

Gambar 2-47 Perkembangan Realisasi PAD Provinsi NTB Tahun 2015-2019

Gambar di atas menunjukkan adanya peningkatan realisasi penerimaan PAD Provinsi NTB pada lima tahun terakhir, meskipun secara kontribusi menunjukkan tren yang meningkat secara jumlah, nilai realisasi PAD terus menunjukkan peningkatan dan peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2017. Rata-rata pertumbuhan pos PAD pada tahun 2015-2019 sebesar 7,59 persen. Pada tahun 2015, realisasi PAD sebesar Rp 1.372,66 Milyar dan pada tahun 2017 berhasil mencapai angka Rp 1.807,48 Milyar.

Tabel 2-108 Proporsi Realisasi Komponen PAD Terhadap Total PAD Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pajak Daerah	73,63	73,78	70,10	76,47	77,73





Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Retribusi Daerah	1,77	2,19	1,37	1,28	1,19
Hasil Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	4,61	5,36	9,73	3,62	3,00
Lian-Lain PAD yang sah	19,99	18,68	18,80	18,63	18,08
<b>TOTAL</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Bappenda Provinsi NTB, 2015-2019.

Pajak daerah masih menjadi pos dengan kontribusi unggulan dalam penerimaan PAD Provinsi NTB tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 kontribusi pajak daerah mencapai 73,63 persen, pada tahun 2019 menjadi 77,73 persen. Perlu adanya analisis potensi PAD yang bisa digali untuk meningkatkan penerimaan PAD tanpa membebani perekonomian secara berat.

Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan pos PAD paling tinggi pada tahun 2015-2019 ditempati oleh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan rata-rata pertumbuhan 16,75 persen diikuti oleh pajak daerah sebesar 8,79 persen, dan lain-lain PAD yang sah sebesar 5,15 persen. Retribusi daerah menunjukkan rata-rata pertumbuhan terendah dengan -1,77 persen.

## 5. Urusan Kepegawaian

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB. Sebelumnya urusan bidang kepegawaian ini dilaksanakan oleh BKD dan DIKLAT Provinsi NTB. namun sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Urusan bidang kepegawaian daerah diselenggarakan oleh BKD selama kurun waktu 2015-2019 dilaksanakan melalui Program:

- a. Peningkatan Kualitas Kelembagaan;
- b. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;

Salah satu kewajiban bagi ASN yang termasuk dalam kelompok Wajib LHKPN adalah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran. Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Selama kurun waktu tahun 2015 – 2019, perkembangan penyampaian LHKPN oleh ASN Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi menunjukkan progres yang menggembirakan. Hal ini diapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi



dalam KPK Award melalui kegiatan “Lembaga Dengan Tingkat Kepatuhan LHKPN Terbaik Tahun 2017” pada tanggal 12 Desember 2017.

Konsistensi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB dalam melakukan pemetaan kompetensi dan pemetaan komposisi ASN berdasarkan kualifikasi jabatan yang diembannya mendapat apresiasi dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Hal ini ditandai dengan diperolehnya penghargaan sebagai “Terbaik V Implementasi Assesment Center Pemerintah Provinsi Tahun 2016”. Dengan adanya penghargaan ini, maka BKD semakin terdorong untuk terus meningkatkan / pengembangan manajemen kepegawaian yang lebih baik dan profesional.

BKD Provinsi NTB selaku Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan khususnya di bidang kepegawaian terus mengembangkan inovasi-inovasi seperti penyampaian informasi melalui website <http://bkd.ntbprov.go.id> yang dapat diakses oleh siapa pun, kapan pun, dimana pun; pemutakhiran data melalui aplikasi SIMPEG, dan yang terbaru adalah aplikasi SIMADU (Sistem Management ASN Terpadu), dimana sistem ini merupakan sistem aplikasi yang memudahkan user, operator bahkan ASN itu sendiri, untuk secara mandiri memanfaatkan, mengolah, dan *up date* data kepegawaian sehingga mampu terdokumentasi dengan baik dalam rangka pembinaan, penempatan dan pengembangan karier ASN. Lebih lanjut secara bersamaan juga dikembangkan sistem aplikasi SIMATA (Sistem Manajemen Penataan ASN) yang merupakan sistem aplikasi yang memudahkan *user* (Pejabat Pembina Kepegawaian) dalam rangka melihat/mengamati secara lebih detail data, talenta dan rekam jejak seorang ASN untuk pengembangan karier sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

Adapun terkait dengan profesionalisme ASN Provinsi NTB yang mencakup kualifikasi pendidikan, tingkat kompetensi, kinerja dan disiplin hingga tahun 2019 baru mencapai 0.54 point, masuk dalam kategori **Sangat Rendah**. Capaian Indeks Profesionalisme ASN berdasarkan dimensi dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dimensi Kompetensi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% dengan bobot penilaian masing-masing: 1) pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan struktural/fungsional sesuai jabatan berbobot 15%; pernah mengikuti diklat teknis untuk jabatan struktural/fungsional dengan bobot 15%; pernah mengikuti workshop untuk jabatan struktural/fungsional dengan bobot 10%; 2) pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis bagi jabatan pelaksana berbobot 22,5% dan untuk workshop 17,5%.



- b. Dimensi Kinerja, digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% dengan bobot penilaian kinerja masing-masing 1) 30% untuk penilaian kinerja 91-100; 2) 25% untuk penilaian kinerja 76-90; 3) 20% untuk penilaian kinerja 61-75; 4) 5% untuk penilaian kinerja 61-60 dan 5) 1% untuk penilaian kinerja 50% ke bawah. Nilai IPA untuk dimensi kinerja tahun 2019 berada pada 25,0%. Nilai ini menggambarkan kinerja ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTB berada pada rentang capaian kinerja dengan nilai 76-90 atau dengan kategori Baik.
- c. Dimensi Kualifikasi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% dengan bobot masing-masing jenjang: 1) 25% untuk S-3; 2) 20% untuk S-2; 3) 15% untuk S-1, 4) 10% untuk D-III, 5) 5% untuk D-II/DI/SLTA dan 6) 1 % untuk SLTA ke bawah. Nilai IPA untuk dimensi kualifikasi tahun 2019 berada pada 12,18%. Atau bila dijabarkan berdasarkan instrument pengukuran dimensi kualifikasi sebgaiian besar ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTB berada dibawah nilai kualifikasi untuk Strata I (S-I) dengan nilai 15% dan diatas nilai kualifikasi Diploma III (D-III) yakni 10%. Kondisi ini disebabkan jumlah ASN yang berpendidikan minimal S-I masih sangat rendah bila dibandingkan dengan jumlah pegawai. Adapun penyebab masih rendahnya kualifikasi pendidikan ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTB lebih diakibatkan masih kurangnya minat ASN untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan yang dimilikinya.
- d. Dimensi Disiplin, digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% dengan bobot masing-masing tingkatan: 1) 5% bagi PNS dengan riwayat Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin; 2) 3% bagi PNS dengan riwayat pernah dijatuhi hukuman disiplin ringan dan 3) 2% bagi PNS dengan riwayat pernah dijatuhi hukuman disiplin Sedang; 4) 1% bagi PNS dengan riwayat pernah dijatuhi hukuman disiplin Berat. Nilai IPA untuk dimensi disiplin berada pada 4,98% menunjukkan bahwa tingkat disiplin PNS lingkup Provinsi NTB sangat baik dengan deviasi hanya 0,02%.

## 6. Urusan Pendidikan dan Pelatihan



Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTB. Secara kelembagaan, sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BPSDMD Provinsi NTB selaku unit kerja yang menyelenggarakan kegiatan Bidang Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 69 yang mengamanatkan bahwa pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Kompetensi ASN meliputi Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural yang ditingkatkan melalui salah satunya dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang merupakan hak dan kesempatan untuk mengembangkan karir.

Selama kurun waktu tahun 2015-2019, penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi ASN baik untuk kelompok Diklat Dasar/Manajerial dan kelompok Diklat Teknis/Fungsional dengan capaian peserta sebanyak 5.376 orang atau 92.88 persen dari target sebanyak 5.788 orang. Peserta pendidikan dan pelatihan yang mengikuti tidak hanya berasal dari Pemerintah Provinsi, namun juga dari Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB dan Pemerintah Daerah lainnya yang ada di Indonesia.

BPSDMD Provinsi NTB terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kediklatan dengan mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana serta pola pelaksanaan kegiatan diklat. Hal ini ditandai dengan pembaharuan gedung asrama yaitu Gedung Asrama Tambora dan pembangunan ruang kelas pembelajaran baru sebanyak 6 lokal. Di samping itu, BPSDMD Provinsi NTB bekerjasama dengan MCA-Indonesia berupaya untuk menjadikan BPSDMD Provinsi NTB sebagai pusat kegiatan Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terstandar mengingat kegiatan diklat ini selalu dilaksanakan tiap tahunnya. Upaya lain yang saat ini juga dikembangkan adalah pelaksanaan kegiatan Diklat Berbasis Masyarakat. Hal ini bermakna bahwa kegiatan diklat tidak hanya dilakukan di dalam kelas (*in class*) tetapi juga dilakukan di luar kelas (*out class*) di tempat-tempat atau lokasi obyek wisata atau lokasi praktek (kehutanan, pertambangan dan lain-lain). Tujuannya adalah selain memberikan penyegaran kepada peserta dan tenaga pengajar juga sebagai pengenalan pariwisata di NTB kepada peserta diklat yang berasal dari daerah lain.

## 7. Urusan Penelitian dan Pengembangan





Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Capaian kinerja pembangunan daerah urusan penunjang penelitian dan pengembangan dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 diukur dengan indikator kinerja persentase pemanfaatan hasil penelitian (lokus NTB), sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-109 Persentase capaian pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB)  
Tahun 2017-2019

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB)	%	12	12	15	15	18	18

Sumber: Bappeda Provinsi NTB 2017-2019

Tercapainya target tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan Bappeda Provinsi NTB untuk menerapkan *Research Base Policy*, dimana hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan daerah. Adapun untuk menyusun daftar penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan maka Bappeda Provinsi NTB melakukan beberapa cara, yaitu: (1) melalui penjangkaran isu-isu dan permasalahan pembangunan dari hasil koordinasi dengan kepala daerah, perangkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota, pemangku kepentingan lainnya; (2) memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi sebagai umpan balik untuk melaksanakan penelitian; serta (3) hasil pertemuan dengan Dewan Riset Daerah Provinsi NTB.

## 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

### 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

#### 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

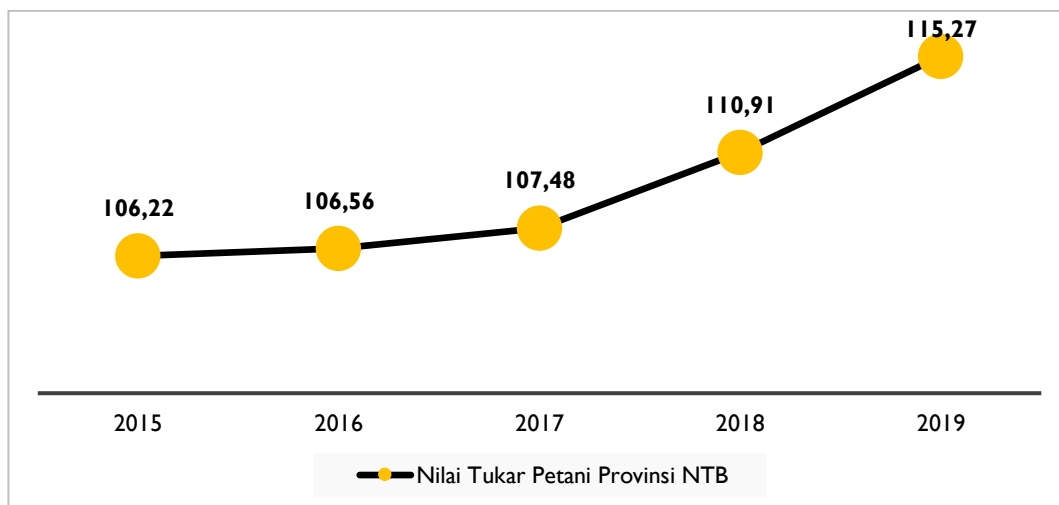
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, Konsumsi Rumah Tangga 2019 senilai Rp.83.656.387,14 atau 63,05% dari total PDRB, masih merupakan porsi terbesar dalam komposisi PDRB atas dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran di Provinsi NTB yang mencapai Rp.132.674.150,90. Sebagian besar produk domestik digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, terjadi pula peningkatan pengeluaran masyarakat. Selama periode lima tahun terakhir (2015-2019) telah terjadi kenaikan Pengeluaran Per Kapita sebesar Rp.1.394.000.



Terakhir pada tahun 2019 Pengeluaran Perkapita masyarakat NTB mencapai Rp.10.640.000.

## 2. Nilai Tukar Petani

Ditinjau dari aspek daya beli petani yang dicerminkan oleh Nilai Tukar Petani atau kemampuan dalam tukar produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Nilai tukar petani (NTP) di Provinsi NTB menunjukkan tren positif sejak tahun 2015 yang berada pada posisi 106,22 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 115,27 pada tahun 2019. Angka NTP di atas 100 ini menunjukkan bahwa daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian relatif kuat terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2019.

Gambar 2-48 Nilai Tukar Petani NTB tahun 2015-2019

Nilai tukar petani di Provinsi NTB pada tahun 2015-2019 menunjukkan tren yang sangat positif, meningkat dari sebesar 9,05 dari 106,22 menjadi 115,27 pada tahun 2019.

### 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator berikut ini.

#### 1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Jalan dan jembatan merupakan prasarana mutlak untuk memperlancar kegiatan ekonomi suatu daerah. Jalan dan jembatan dibutuhkan untuk meningkatkan mobilitas penduduk maupun perdagangan barang antar wilayah.



Pada tahun 2019 sesuai dengan perubahan status dan fungsi jalan, Panjang Jalan di Provinsi NTB adalah 8.040,79 Km yang dibedakan berdasarkan status Jalan Nasional 934,55 km, jalan Provinsi 1.484,43 km dan Jalan Kabupaten/Kota 5,621.81 km.

Kemantapan jalan provinsi sampai dengan Desember tahun 2019 mencapai 1.191,63 Km atau 80,28%, sementara kemantapan jalan nasional tahun 2019 telah mencapai 97,67%. Jalan provinsi dengan total panjang 1.484,43 Km, panjang jalan yang sudah Hotmix sebesar 1.277,66 Km.

Jumlah jembatan provinsi pada tahun 2019 mencapai 781 Km unit dengan panjang mencapai 13.535,70 meter. Jumlah kendaraan bermotor tahun 2019 sebanyak 1.561.454 unit dengan komposisi jumlah kendaraan bermotor terdiri dari : 15.840 unit mobil penumpang, 76.789 unit bus, 65.665 unit mobil barang, dan 1.403.160 unit sepeda motor. Jumlah kendaraan ini meningkat sebanyak 143.131 unit atau 10,09% dari tahun 2018 dengan jumlah total kendaraan sebanyak 1.418.323 unit.

Tabel 2-110 Perkembangan Kondisi Jalan Provinsi NTB Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kendaraan (unit)	1,347,545.00	927,428.00	1,295,619	1,418,323	1,561,454
Panjang Jalan (km)	8,040.79	8,040.79	8,040.79	8,040.79	8,040.79
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0.0060	0.0087	0.0062	0.0057	0.0051

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2019.

## 2. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun

Data penumpang angkutan udara diambil dari 3 bandara yang ada yaitu Lombok Internasional Airport (LIA), Bandara Sultan M. Kaharuddin Kabupaten Sumbawa dan Bandara Sultan M. Salahuddin Kabupaten Bima. Adapun untuk Pelabuhan Laut, data dikompilasi dari 5 pelabuhan yaitu. Pelabuhan Laut Lembar, Badas, Bima, Senggigi, dan Pemenang.

Tabel 2-111 Data Jumlah Penumpang Angkutan Udara dan Laut Tahun 2015-2019

Jumlah Penumpang	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Angkutan Udara	2,747,664	3,778,787	4,080,124	4,205,496	3,309,041
Angkutan Laut	801,433	1,071,173	1,327,229	950,088	1,155,973

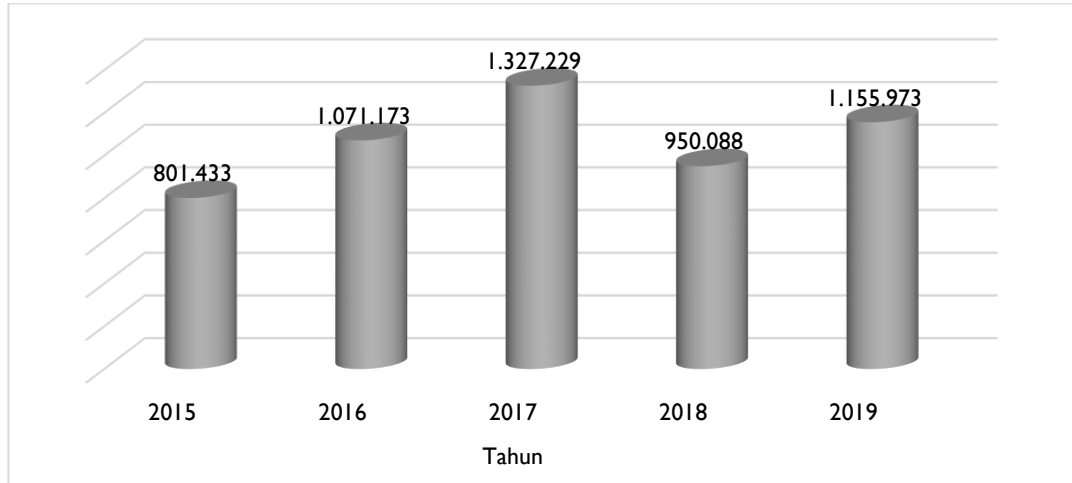
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2019.

Rata-rata kenaikan jumlah penumpang angkutan udara adalah sebesar 6,81%. Namun, kenaikan terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar -21,32% yang diakibatkan dari dampak adanya bencana alam berupa gempa bumi sepanjang triwulan akhir tahun 2018 menyebabkan aktivitas pariwisata terganggu. Kenaikan



tertinggi jumlah penumpang angkutan udara terjadi pada tahun 2016 sebesar 37,53%. Hal ini disebabkan oleh makin terbentuknya branding Lombok sebagai destinasi wisata halal dunia. Lombok juga menjadi lokasi kegiatan MICE utama (*Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition*) di Indonesia. Banyak kegiatan nasional yang telah dilaksanakan di NTB, seperti tuan rumah MTQ Nasional ke-26 yang diikuti oleh ribuan peserta dan penggembara dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2016.

Data penumpang angkutan laut sejak tahun 2015 diperoleh dari 5 pelabuhan yaitu Pelabuhan Laut Lembar, Badas, Bima, Senggigi, dan Pemenang. Sedangkan perhitungan jumlah penumpang angkutan laut sebelum tahun 2015 menggunakan data penumpang dari 3 pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Laut Lembar, Badas, dan Bima. Hal ini dilakukan karena terdapat fenomena penggunaan kapal cepat dari Pulau Bali menuju Pulau Lombok dan 3 Gili. Kenaikan jumlah penumpang angkutan laut tertinggi terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 33,66%. Sejak tahun 2016, Dinas Perhubungan membentuk Tim Terpadu yang melibatkan stakeholder perhubungan untuk memastikan keamanan dan keselamatan pelayaran kapal cepat. Dalam periode 5 tahun, peningkatan jumlah penumpang yang menggunakan angkutan laut dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2015-2019.

Gambar 2-49 Jumlah Penumpang Angkutan Laut di Provinsi NTB Tahun 2015-2019

### 3. Luas Wilayah Kebanjiran

Wilayah rawan bencana banjir tersebar di wilayah kabupaten/kota Provinsi NTB, berdasarkan lampiran II.9 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang





RTRW Provinsi NTB 2009-2029, lokasi rawan bencana banjir di jabarkan pada tabel berikut.

Tabel 2-112 Kawasan Rawan Banjir di Provinsi NTB

No	Kab/Kota	Lokasi Kawasan Rawan Banjir
1	Kota Mataram	Daerah Ampenan Utara, Kopajali, Sekitar Kekalik, Sungai Meninting, Sungai Midang, Sungai Ancar, Sungai Unus dan Sungai Jangkok
2	Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Daerah Empol (Sekotong Tengah), Bayan, Gangga-Lempenge, sepanjang Sungai Penggolong Rempek dan Anyar, Sungai Bentek, Menggala (Pemenang), Berora, Gerung, dan Jembatan Kembar
3	Kab. Lombok Tengah	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah
4	Kab. Lombok Timur	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur
5	Kab. Sumbawa dan Sumbawa Barat	Sepanjang Brang Moyo di daerah Poto Tengke Moyo Hilir, Brang Beh di Lunyuk, Brang Rea di Taliwang, Brang Benete di Jereweh, Brang Labuhan Mapin di Alas, Brang Utan di Utan Rhee, Brang Muir di Plampang, Empang, Moyo Hulu, Ropang dan Lape Lopok
6	Kab. Dompu	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di Kabupaten Dompu
7	Kota Bima	Daerah di sepanjang pantai di Kota Raba, khususnya yang dekat dengan lembah sungai
8	Kab. Bima	Daerah di sepanjang aliran sungai di Sori Wawo Maria, daerah Sape dan sekitarnya, Karumbu, Lambu, Ntoke – Tawali, Wera, Jatiwangi, dan daerah sekitar aliran sungai lainnya di wilayah Kabupaten Bima

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2020

#### 4. Luas Wilayah Kekeringan

Bencana kekeringan yang terjadi di Provinsi NTB dominan berada di Pulau Lombok dengan luasan sebesar 96.644,12 Ha, sedangkan di pulau Sumbawa sebesar 1.775,57 Ha. Berdasarkan lampiran II.9 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi NTB 2009-2029, lokasi rawan bencana banjir di jabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2-113 Kawasan Rawan Kekeringan di Provinsi NTB

No	Kab/Kota	Lokasi Kawasan Rawan Kekeringan
1	Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Kecamatan Lembar; Sekotong dan sekitarnya; Kedondong; Malimbu; Pemenang dan sekitarnya;



No	Kab/Kota	Lokasi Kawasan Rawan Kekeringan
		Tanjung; Liuk-Kayangan-Selengen-Bayan; dan Medas
2	Kab.Lombok Tengah	Praya Barat, Praya Timur, Pujut, Praya Tengah, Janapria dan Praya Barat Daya.
3	Kab.Lombok Timur	Keruak-Jerowaru-Sakra-Sakra Barat-Sakra Timur-Sikur; Labuhan Haji; Pringgabaya; Kecamatan Sambelia dan sekitarnya
4	Kab. Sumbawa Barat	Sejorong, Maluk, Jereweh-Endeh-Bertong-Taliwang-TepasSeteluk-Labuhan Sepakeh
5	Kab. Sumbawa	Lunyuk Besar-Kopo-Batulanteh-Baturotok-Punik; AlasPenyengar-Utan-Potopedu-Rhee Loka, Lenangguar-Semongkat; Pototano-Labuhan-Serading-Batubulan-Lopok-Lape-KalaningTanjungberu-Pungkit; Plampang-Empang
6	Kab. Dompu	Kempo, Hu'u, Kilo; dan Mbawi
7	Kab. dan Kota Bima	Sila; Paradowane; Bima dan sekitarnya; Tawali; Sape; dan P. Sangiang

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2020

## 5. Luas Wilayah Perkotaan

Dalam UU Penataan ruang No.26 tahun 2007, kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Luasan wilayah perkotaan di Provinsi NTB seluas 57.448,05 Ha.

## 6. Jenis dan Jumlah Bank

Tahun 2012 Jumlah Bank yang beroperasi di NTB sebanyak 58 bank, yang terdiri dari 26 Bank Umum dan 32 Bank Perkreditan Rakyat dengan jumlah kantor sebanyak 380 buah. Pada tahun 2016 jumlah bank umum menjadi 56 bank terdiri dari 24 bank umum dan 32 bank perkreditan rakyat dengan total jumlah kantor cabang sebanyak 508.

Tabel 2-114 Banyak Bank Menurut Jenis Bank di Provinsi NTB Tahun 2015-2019

Jumlah Bank Menurut Jenis Bank		Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	
I	Bank Umum	29	24	24	24	24	
	a.	Bank Umum	21	18	15	18	15
		1. Bank Pemerintah	4	4	4	4	4
		2. Bank Swasta Nasional	16	13	10	13	10
		3. Bank Asing Campuran	1	1	1	1	1



Jumlah Bank Menurut Jenis Bank			Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
b.	Bank Umum Bukan Devisa		8	6	9	6	9
	1.	Bank Pemerintah	0	0	0	0	0
	2.	Bank Pemerintah Daerah	2	1	1	1	1
	3.	Bank Swasta Nasional	6	5	8	5	8
II	Bank Perkreditan Rakyat		29	32	32	32	32
	a.	Bank Perkreditan Rakyat	29	32	32	32	32
<b>Jumlah / Total</b>			<b>58</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

## 7. Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran

Industri Pariwisata dapat diartikan sebagai sehimpunan bidang usaha yang menghasilkan berbagai jasa dan barang yang dibutuhkan oleh mereka yang melakukan perjalanan wisata. Sejalan dengan dipilihnya sector pariwisata sebagai salah satu sector unggulan selain pertanian di provinsi NTB, mendorong perkembangan industri pariwisata seperti penginapan dan restoran. Berdasarkan data yang dihimpun dari BPS dapat dilihat perkembangan jumlah restoran di provinsi NTB selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2-115 Jumlah Restoran di Provinsi NTB Tahun 2014-2018

No	Kabupaten	2014	2015	2016	2017	2018
1	Lombok Barat	150	150	150	115	271
2	Lombok Tengah	97	97	97	99	126
3	Lombok Timur	188	188	188	139	265
4	Sumbawa	177	177	177	180	200
5	Dompu	38	38	38	38	38
6	Bima	32	32	32	35	45
7	Sumbawa Barat	120	120	120	125	292
8	Lombok Utara	308	308	308	281	375
9	Mataram	196	196	196	272	338
10	Kota Bima	73	73	73	66	66
<b>JUMLAH</b>		<b>1.379</b>	<b>1.379</b>	<b>1.379</b>	<b>1.350</b>	<b>2.016</b>

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2019.

Jumlah restoran di Provinsi NTB sampai dengan tahun 2016 berjumlah 1.379 restoran yang tersebar di 10 kabupaten kota. Perkembangan restoran selama kurun waktu 2014-2017 cenderung stabil, terjadi lonjakan pada tahun 2018, menandakan mulai menggeliatnya usaha kuliner di NTB. Dalam bidang



restoran, perhatian antara lain dapat diarahkan pada kualitas pelayanan, baik dari jenis makanan maupun teknik pelayanannya. Disamping itu, dari segi kandungan gizi, kesehatan makanan dan lingkungan restoran serta penemuan makanan-makanan baru dan tradisional baik resep, bahan maupun penyajiannya yang bisa dikembangkan secara nasional, regional, bahkan internasional

#### 8. Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel

Pembangunan pariwisata di NTB selama ini telah memberikan hasil yang terus meningkat. Hal tersebut terlihat dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang. Sejalan dengan meningkatnya wisatawan yang berkunjung, NTB dituntut untuk memperbanyak akomodasi, termasuk pula kamar dan tempat tidur hotel.

Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya. Hotel terdiri dari hotel berbintang dan hotel nonbintang

Perkembangan jumlah hotel baik bintang maupun nonbintang di provinsi NTB menunjukkan perkembangan signifikan. Pertumbuhan jumlah hotel meningkat seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Beberapa daerah/lokasi yang menjadi pusat pengembangan perhotelan antara lain kota mataram, kawasan Senggigi, kawasan 3 Gili (Trawangan, Meno, Air), dan Kuta Mandalika.

Tabel 2-116 Jumlah Hotel Bintang Tahun 2015 -2019

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Lombok Barat	26	22	33	37	24
2	Lombok Tengah	1	5	3	4	10
3	Lombok Timur	0	1	0	2	1
4	Sumbawa	3	3	7	7	1
5	Dompu	0	0	0	0	0
6	Bima	0	0	0	0	0
7	Sumbawa Barat	1	2	1	1	1
8	Lombok Utara	6	10	8	9	11
9	Mataram	13	22	27	28	24
10	Kota Bima	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>50</b>	<b>65</b>	<b>79</b>	<b>88</b>	<b>72</b>

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

Pada tahun 2019 tercatat penurunan jumlah hotel berbintang, hal ini merupakan dampak bencana gempa bumi pada akhir tahun 2018, ini juga membuat sektor pariwisata secara umum mengalami penurunan.





Tabel 2-117 Jumlah Hotel Non Bintang Tahun 2015 -2019

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Lombok Barat	84	84	126	149	91
2	Lombok Tengah	46	81	94	105	134
3	Lombok Timur	49	41	55	143	75
4	Sumbawa	33	33	39	53	39
5	Dompu	24	17	24	35	34
6	Bima	12	7	12	14	8
7	Sumbawa Barat	34	19	30	39	24
8	Lombok Utara	515	484	371	566	449
9	Mataram	76	100	126	122	112
10	Kota Bima	12	16	18	18	17
<b>TOTAL</b>		<b>885</b>	<b>882</b>	<b>895</b>	<b>1244</b>	<b>983</b>

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

Pertumbuhan jumlah hotel diimbangi juga dengan pertumbuhan jumlah kamar hotel yang tersedia. Pada tahun 2012 jumlah kamar hotel bintang sejumlah 2.453 kamar meningkat hampir dua kali lipatnya menjadi 4.118 kamar tahun 2016. Sedangkan jumlah kamar hotel non bintang pada tahun 2012 tercatat 7.939 meningkat menjadi 9.147 kamar hotel pada tahun 2016. Pertumbuhan jumlah hotel ini akan terus berlanjut seiring dengan pembangunan hotel-hotel baik bintang maupun non bintang di kawasan KEK Mandalika dan sekitarnya. Seiring dengan perkembangan kawasan Mandalika tersebut, pada tahun 2019 diperkirakan akan ada penambahan jumlah kamar hotel sekitar 10.000 kamar.

#### 9. Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

Cakupan pelayanan air bersih di Provinsi NTB pada tahun 2018 sudah mencapai ratio rata-rata 87,58 persen yang terdiri atas perkotaan mencapai 92,66 persen, sedangkan cakupan pelayanan air bersih perdesaan telah mencapai 82,49 persen.

Tabel 2-118 Cakupan Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan

Cakupan Air Bersih	2015	2016	2017	2018
Perkotaan (%)	83.25	89.95	90.65	92.66
Perdesaan (%)	75.57	78.47	80.45	82.49

Sumber: Dinas PUPR Provinsi NTB, 2019.



Cakupan air bersih di kawasan perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Cakupan air bersih di perkotaan tahun 2018 sebesar 92,66%, sedangkan di pedesaan 82,49%. Tahun 2019 cakupan Air Bersih sudah tidak dihitung lagi, indikatornya diganti dengan Cakupan Air Minum, dengan capaian tahun sebesar 72,59%.

#### 10. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Listrik menjadi kebutuhan pokok masyarakat selain air bersih, berikut ini rasio ketersediaan daya listrik tahun 2015-2019.

Tabel 2-119 Rasio Ketersediaan Daya Listrik

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Daya Terpasang	393,589	446,592	443,28	458,71	603,81
2	Kebutuhan Daya	272,637	306,237	328,11	334,5	379,84
3	Rasio (1/2)	1,44	1,46	1,35	1,37	1,59

Sumber Data : PT. PLN (Persero) UIW NTB Tahun 2020

Selama 5 tahun terakhir kebutuhan daya listrik terus meningkat, hal ini disebabkan pertumbuhan jumlah pelanggan setiap tahunnya meningkat signifikan. Meskipun demikian jumlah pasokan listrik masih melebihi kebutuhan daya yang tersedia. Kecukupan daya listrik di NTB di dukung oleh terbangunnya beberapa pembangkit tenaga listrik baru di beberapa lokasi di NTB.

#### 11. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Kebutuhan listrik di NTB terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan berkembangnya penduduk dan perkembangan sector-sektor yang membutuhkan tenaga listrik. Produksi listrik pada tahun 2015 mencapai 1.558,05 juta Kwh meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 1.491,78 juta Kwh. Listrik yang terjual juga mengalami peningkatan, dengan besaran mencapai 1.402,29 juta Kwh dengan jumlah pelanggan pada tahun 2016 mencapai 1.032.862 pelanggan.

Tabel 2-120 Jumlah Pelanggan Listrik Dari PLN Cabang Mataram, Sumbawa dan Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Pelanggan PLN	1.023.233	1.032.862	1.023.233	1.354.055	1.500.164

Sumber Data : PT. PLN (Persero) UIW NTB Tahun 2020

Cakupan Listrik (Rasio Elektrifikasi) merupakan prosentase penduduk (KK) NTB yang dapat menikmati listrik, angkanya diperoleh dari perbandingan jumlah KK yang berlistrik dibanding dengan jumlah seluruh KK, dikali 100%. Angka capaian kinerjanya adalah jumlah kumulatif yang bisa dicapai sampai dengan Tahun 2019.

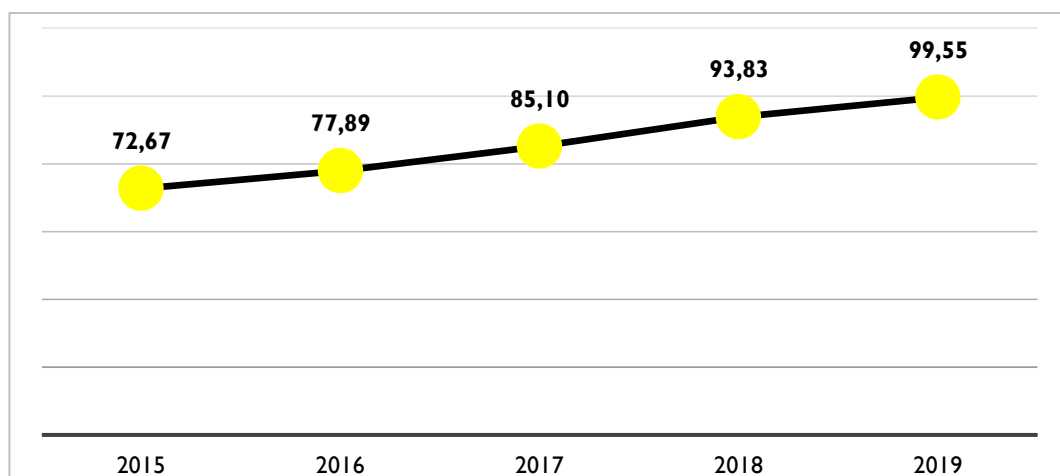


Tabel 2-121 Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2019

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	RT PROVINSI/ KAB/KOTA	RT BERLISTRIK				JUMLAH TOTAL	RE Non PLN (%)	RE PLN (%)	RE (%)
			PLN	NON PLN / EBT	LTSHE (2017 dan 2019)	JUMLAH NON PLN				
	<b>PROV. NTB</b>	<b>1.437.027</b>	<b>1.411.998</b>	<b>15.871</b>	<b>2.709</b>	<b>18.580</b>	<b>1.430.578</b>	<b>1,29</b>	<b>98,26</b>	<b>99,55</b>
1.	Kota Mataram	136.215	141.245	-	-	-	141.245	0,00	103,69	103,69
2.	Kab. Lombok Barat	199.109	193.065	2.134	321	2.455	195.520	1,23	96,96	98,20
3.	Kab. Lombok Tengah	288.373	283.138	2.311	50	2.361	285.499	0,82	98,18	99,00
4.	Kab. Lombok Timur	359.167	344.762	1.161	536	1.697	346.459	0,47	95,99	96,46
5.	Kab. Lombok Utara	62.435	65.276	2.681	537	3.218	68.494	5,15	104,55	109,70
6.	Kab. Sumbawa	121.535	127.330	823	657	1.480	128.810	1,22	104,77	105,99
7.	Kab. Sumbawa Barat	38.934	35.146	3.136	-	3.136	38.282	8,05	90,27	98,33
8.	Kota Bima	44.154	39.734	1.241	-	1.241	40.975	2,81	89,99	92,80
9.	Kab. Bima	124.505	114.399	76	340	416	114.815	0,33	91,88	92,22
10.	Kab. Dompu	62.600	67.903	2.308	268	2.576	70.479	4,12	108,47	112,59

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, 2019.

Dari tabel di atas diketahui sampai akhir tahun 2019 jumlah penduduk yang telah menikmati listrik sebanyak 1.430.578 KK atau 99,55% dari Penduduk 1.437.027 KK. Dengan kata lain masih ada sekitar 0,45% atau 6.449 KK penduduk NTB belum menikmati layanan listrik.



Sumber: Dinas ESDM Provinsi NTB, 2019

Gambar 2-50 Perkembangan Rasio Elektrifikasi tahun 2015-2019

Selama 5 tahun terakhir dilakukan terobosan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dengan menyediakan kebutuhan listrik bagi masyarakat yang belum menikmati layanan listrik baik melalui jaringan PLN maupun Non PLN antara lain:



- a. Program “Listrik Murah dan Hemat” yaitu memberikan sambungan listrik gratis pada masyarakat yang sudah dilalui oleh jaringan listrik PLN namun belum dapat menikmati listrik.
- b. Pembangunan Penerangan Jalan Umum Lighting Emitting Diode (PJU-LED) jaringan listrik PLN di sepanjang jalan Negara mulai Pelabuhan Lembar hingga Pelabuhan Kayangan. Pembangunan penerangan jalan umum juga dilaksanakan mulai dari pelabuhan Poto Tano hingga pelabuhan Sape di ujung timur Pulau Sumbawa yang akan menjadi pelita di sepanjang ruas jalan negara.
- c. Program “Desa Mandiri Energi” dengan membangun fasilitas kebutuhan energi masyarakat secara mandiri bagi wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik PLN, dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan sesuai potensi setempat seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) baik secara tersebar maupun terpusat (komunal) dan hybrid PLT Bayu, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

Investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan ketenagalistrikan cukup tinggi karena merupakan usaha padat modal dan padat teknologi, sehingga dibutuhkan biaya tinggi. Target ini akan mencakup layanan listrik konvensional PT. PLN dan layanan Energi Baru Terbarukan untuk wilayah yang tidak terjangkau jaringan listrik PLN, karena minimnya akses menuju wilayah tersebut. Peningkatan rasio elektrifikasi tersebut diperoleh melalui pembangunan sarana dan prasarana bidang ketenagalistrikan baik yang bersumber dari Pembangkit PLN on grid maupun dari sumber energi baru terbarukan *off grid*.

### 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

#### 1. Angka Kriminalitas

Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, faktor keamanan dan ketertiban adalah hal yang penting. Untuk menjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat, Provinsi NTB telah diperkuat oleh aparat keamanan yang terdiri dari aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI), aparat Kepolisian (POLRI), dan dibantu oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP). Kerjasama yang berkesinambungan oleh instansi yang berwenang tersebut terus dilakukan, tetapi Tingkat kriminalitas masih fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 total kejahatan yang tercatat adalah sebanyak 8.907 kasus, mengalami penurunan yang signifikan kalau dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 sebanyak 6.427 kasus. Kasus kejahatan yang dapat diselesaikan mengalami penurunan di akhir tahun 2019 menjadi 3.896 kasus dari kondisi 2015 sebanyak 5.339 kasus, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.





Tabel 2-122 Rekapitulasi Kriminalitas di Provinsi NTB Tahun 2015-2019

Aparat	Tahun (Kasus)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Crime Total	8,907	9,523	9,400	8,737	6,427
Crime Cleardel	5,339	5,812	5,068	5,394	3,896
Clearence Rate	59.94	58.68	57.00	61.74	60.62
Crime Rate	184	309	183	-	-
Crime Lock	0°58'48"	0°90.'20"	1°01.'12"	-	-

Sumber : Kepolisian Daerah NTB, 2019.

## 2. Konflik Sosial

Secara umum konflik sosial di Provinsi NTB dapat di tekan setiap tahunnya. Seperti yang tersaji pada tabel di atas menunjukkan bahwa tahun 2017 terdapat 21 kasus, menurun menjadi 13 kasus pada tahun 2018 dan pada 2019 menjadi 7 kasus, berarti konflik yang terjadi di Provinsi NTB menurun secara signifikan dengan semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya menghadirkan rasa aman dan nyaman dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Karena pernyataan indikator ini merupakan indikator negatif, dimana semakin kecil capaian kinerja (realisasi) dibandingkan dengan target, berarti itu menunjukkan tingkat capaian kinerja yang lebih baik. Tahun 2019 potensi konflik yang terjadi di Provinsi NTB dipicu oleh konflik sosial budaya dan terkait dengan batas wilayah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-123 Konflik Sosial yang Terjadi di Provinsi NTB Tahun 2019

NO	KAB/KOTA	LATAR BELAKANG KONFLIK						JMLH KASUS	KET.
		POLITIK	EKONOMI	SOSIAL BUDAYA	SARA	BATAS WILAYAH	HANKAM		
1.	Kota Mataram	-	-	2	-	-	-	2	Vertikal = 0 Horizontal = 7  Sumber: Kominitas Jejaring Kab/Kota se- NTB POLDA NTB
2.	Lombok Barat	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Lombok Tengah	-	-	-	-	1	-	1	
4.	Lombok Timur	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Lombok Utara	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Sumbawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Sumbawa	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Dompu	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Bima	-	-	2	-	-	-	2	
10.	Kota Bima	-	-	2	-	-	-	2	
	<b>Jumlah</b>	-	-	<b>6</b>	-	<b>1</b>	-	<b>7</b>	

Sumber: Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, 2019

## 3. Ketaatan Terhadap RTRW

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas penataan ruang kawasan strategis provinsi diperlukan tertib penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang telah dilakukan pembinaan



kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga konsistensi antara rencana Tata Ruang dan implementasi.

Pada tahun 2019 terdapat 2 kasus indikasi pelanggaran. Tim TKPRD yang dibentuk sudah melakukan kajian dan pembahasan terhadap 57 ijin yang masuk dari kabupaten/ kota terkait dengan pemanfaatan tata ruang, dari hasil pembahsan ini mengeluarkan 30 surat rekomendasi, 23 masih dalam proses, dan 4 tidak dapat diproses.



## 2.5 Pencapaian RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat

### 2.5.1. Pencapaian RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018

Hasil evaluasi terhadap RPJMD NTB menunjukkan kinerja yang “cukup baik”. Hal ini terlihat dari jumlah indikator yang telah melampaui target, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-124 Evaluasi 31 Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD NTB Tahun 2013-2018

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Akhir 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
<b>A</b>	<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>														
1	Penurunan Jumlah Konflik Sosial	Kasus	54	48	43	43	39	37	23	32	21	27	13	27	13
2	Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	%	45	55	100	65	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Politik	%	70,47	71,00	78,5	71,5	73,43	72,00	73,43	72,5	73,43	73	75,12	73	75,12
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,38	4,83	5,75	4,62	5,69	5,03	3,94	4,82	3,32	4,55	3,72	4,55	3,72
5	Pertumbuhan Ekonomi (non tambang)	%	5,61	5,60 – 5,75	6,15	5,75-5,85	5,62	5,85 – 6,00	5,71	6,0-6,25	7,1	6,25 – 6,50	3,80	6,25 – 6,50	3,80



No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Akhir 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
6	Pola Pangan Harapan	Point	78,7	79,40	79,9	80,2	81,3	80,90	81,7	81,7	82	82,5	82,80	82,5	82,80
7	Pengeluaran Per Kapita	Rp. 000	8.950		8.987		9.241	9.352	9.575	9.464	9.877	9.578	10.034,71*	9.578	10.034,71*
8	Angka kemiskinan	%	17,25	16,25	17,05	15,25	16,54	14,25	16,02	13,25	15,05	12,25	14,75	12,25	14,75
9	Laju Investasi	%	8,28	8,30	26,81	8,4	60,53	8,50	-1,0	11,5	13,95	13,5	39,90	13,5	39,90
10	Pertumbuhan PAD	%	13,66	38,94	29,94	16,79	23,08	2,09	-0,93	5,19	24,27	7,64	-1,37	7,64	-1,37
11	Kunjungan Wisatawan	Org	1.357.602	1.469.597	1.629.122	1.705.400	2.210.527	1.979.178	3.094.437	3.500.000	3.508.903	4.000.000	2.812.379	4.000.000	2.812.379
	- Mancanegara	Org	565.944	595.020	752.306	697.363	1.149.235	817.310	1.404.328	1.750.000	1.430.249	2.000.000	1.204.556	2.000.000	1.204.556
	- Nusantara	Org	791.658	874.577	876.816	1.008.037	1.061.292	1.161.864	1.690.109	1.750.000	2.078.654	2.000.000	1.607.823	2.000.000	1.607.823
12	Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	1,58	1,58	2,2	1,82	3,69	2,00	4,99	2,2	5,07	2,42	22,42	2,42	22,42
<b>B</b>	<b>Aspek Pelayanan Umum</b>														
13	Tingkat Penyelesaian Aduan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Jumlah kunjungan yang mengakses	Kali	4.653	10	25.347	20.000	736.363	40.000	81.404	80.000	881.774	160.000	549.047	160.000	549.047





No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Akhir 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	layanan NTB Online														
15	Jaringan Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	67,56	68,92	68,99	72,67	72,37	72,9	72,1	75,39	77,16	83,65	83,65	83,65	83,65
16	Ratio Elektrifikasi	%	64,43	65,68	66,91	68,01	72,24	70,34	77,89	72,67	85,1	75	89,57	75	89,57
17	Cakupan Air Bersih														
	- Perkotaan	%	80,23	82,18	82,09	83,53	83,25	84,87	89,95	86,22	90,65	87,56	92,66	87,56	92,66
	- Perdesaan	%	72,15	75,12	74,8	76,81	75,57	78,50	78,47	80,18	80,45	81,87	82,49	81,87	82,49
18	Penanganan Rumah Tidak layak huni	Unit	21.471	1.000	1.000	1.000	800	800	1.007	1.073	1.081	1.119	2.171	26.471	27.530
19	Cakupan Jamban Keluarga	%	72,15	73	74,02	74	75,06	76	79,38	78	82,67	80	85,94	80	85,94
<b>C</b>	<b>Aspek Daya Saing</b>														
20	Rata-Rata Lama Sekolah Usia 25 Tahun keatas	Tahun	6,54		6,67		6,71	6,79	7,59 (Usia Diatas 15 Tahun)	6,87	6,90	6,95	7,06*	6,95	7,06*
21	Buta Huruf Penduduk Usia 15 tahun keatas	%	15,04	13,86	13,04	13,86	13,04	11,77	12,94	10,85	12,86	10	12,42*	10	12,42*
22	Usia Harapan Hidup	Tahun	62,73	64,50	64,9	65,25	65,38	65,90	65,48	66,6	65,55	67,7	65,77*	67,7	65,77*
23	Prevalensi Kurang Gizi	%	18,27	17,0	20,6	16,5	17,01	16,0	20,2	15,5	22,6	15	26,4	15	26,4



No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Akhir 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
24	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Tahun	20,52	21,32	19,94	21,73	20,32	20,5	20,15	20,75	20,27	21	20,23	21	20,23
25	Penerapan Pendidikan Karakter dan Nilai Budaya Lokal pada Sekolah dan Madrasah	%	10	20	20	40	40	50	100	65	100	75	100	75	100
26	Pranata Adat yang Terbentuk	Lembaga	10	50	54	50	53	50	93	50	50	50	61	260	321
27	Pendaftaran HaKI Karya Seni Budaya Daerah														
	- Desain Industri	Produk	37	15	2	15	2	15	5	15	61	15	20	112	127
	- Merek	Produk	42	20	8	20	8	20	135	20	45	20	0	142	238
	- Hak Cipta	Produk	18	15	1	15	0	15	29	15	30	15	20	93	98
28	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	78,58	65,78	78,35	78,00	84,67	85,00	94,72	95	99,03	100	100	100	100
29	Jumlah penumpang angkutan udara dan laut														
	- Angkutan udara	Org	2.145.290	2.451.000	2.495.695	2.843.000	2.747.664	3.298.000	3.778.787	3.476.000	4.080.124	3.626.000	4.205.496	3.626.000	4.205.496
	- Angkutan laut	Org	125.794	138.373	162.828	153.594	801.433	172.025	1.071.173	197.827	1.327.229	227.502	950.088	227.502	950.088



No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Akhir 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
30	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		67,77	67,78	69,39	67,8	69,9	67,84	56,53	67,89	56,99	67,95	59,49	67,95	59,49
31	Mata Air Terlindungi	Titik	334	354	354	375	384	396	414	417	485	438	527	438	527



### 2.5.2. Pencapaian RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 Pada Tahun 2019

Hasil evaluasi terhadap RPJMD NTB menunjukkan kinerja yang “cukup baik”. Hal ini terlihat dari jumlah indikator yang telah melampaui target. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-125 Evaluasi terhadap 90 Indikator Kinerja Daerah RPJMD NTB Tahun 2019-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019			
<b>A</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>							
1	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam	%	7,1	3,08	4,5 - 5,0	4,76	100,00	6,5 - 7,0
2	Inflasi		3,7	3,16	3,0 - 4,0	1,87	137,67	3,0 - 4,0
3	Tingkat Kemiskinan	%	15,05	14,63	13,75	13,88	99,05	10,73
4	Gini Ratio		0,378	0,372	0,374	0,379	98,09	0,297
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		66,58	67,3	68,07	68,14	100,10	70,11
6	Indeks Kebahagiaan		70,7	-	-	-	-	71,3
<b>B</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>							
1	Indeks Kriminalitas		18,05	17,25	16,45	12,71	122,74	13,25
2	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur		71,44	74,60	75,76	74,92	98,89	
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		56,99	57,03	57,09	75,16	131,65	80,45
4	Ketaatan Terhadap RTRW	%	87,52	87,51	87,79	88,08	100,33	90,31
5	Indeks Risiko Bencana		149,57	139,92	172,18	129,02	125,06	115,83
6	Indeks Reformasi Birokrasi		CC	CC	B	B	100	BB
7	Indeks Pelayanan Publik		97,58	97,68	97,78	97,88	100,10	4,55
<b>C</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>							
<b>1</b>	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>							
<b>1.01</b>	<b>Pendidikan</b>							
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,46	13,47	13,57	13,48	99,34	13,52
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,90	7,03	6,96	7,27	104,45	7,66
<b>1.02</b>	<b>Kesehatan</b>							
1	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	66,74	70,35	73,00	86,47	118,45	83,00
2	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	69,25	73,7	72,62	75,02	103,30	82,46
3	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,55	65,87	66,07	66,28	100,32	67,48
4	Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	37,20	33,49	32,49	25,5	121,51	28,49
<b>1.03</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>							
1	Persentase sarana dan prasarana infrastruktur	%	0	10,00	50,00	50,00	100,00	100,00





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018				
	yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi							
2	Persentase Kemantapan jalan	%	77,16	83,65	84,65	80,28	94,84	90,65
3	Cakupan Air Minum	%	70,48	72,56	74,08	74,69	100,82	81,66
4	Kemantapan Sistem Irigasi	%	55,31	55,35	56,18	54,41	96,85	60,06
<b>1.04</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>							
1	Cakupan pemulihan sektor perumahan dan permukiman	%	0	20,00	75,00	84,88	113,17	100,00
2	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	89,50	92,01	92,37	92,02	99,62	93,82
<b>1.05</b>	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>							
1	Cakupan pemulihan sektor sosial	%	0,00	10,00	50,00	33,21	66,42	100,00
2	Cakupan pemulihan sektor ekonomi produktif	%	0,00	10,00	50,00	11,48	22,96	100,00
3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Tramtibmas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Cakupan Desa Tangguh Bencana (434 Desa Rawan Bencana)	%	5,07	7,14	11,75	11,75	99,99	30,18
6	Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter	%	0	0,41	10,00	10,00	100,00	50,00
<b>1.06</b>	<b>Sosial</b>							
1	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial	%	54,50	54,50	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase PMKS yang tertangani	%	5,07	22,42	5,50	5,29	96,18	5,37
<b>2</b>	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>							
<b>2.01</b>	<b>Tenaga Kerja</b>							
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,32	3,72	3,39	3,42	99,12	3,17
<b>2.02</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>							
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		59,95	60,56	55,81	57,81	103,58	61,4



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018				
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		90,36	90,37	90,40	90,4	100,00	90,52
3	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan	Tahun	20,27	20,23	20,42	20,21	98,97	21,00
<b>2.03</b>	<b>Pangan</b>							
1	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		82,00	82,80	78,80	85,30	108,25	87,20
<b>2.05</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>							
1	Indeks Kualitas Air		20,25	35,42	22,75	74,63	328,04	80,00
2	Indeks Kualitas Udara		88,02	87,17	88,45	87,17	98,55	92,00
3	Neraca Pengelolaan Sampah (%)	%	50,00	51,00	60,00	34,91	58,18	100,00
<b>2.04</b>	<b>Pertanahan</b>							
1	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2.06</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>							
1	Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk	rasio	0,84	0,94	0,80	0,99	123,75	0,88
<b>2.07</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>							
1	Cakupan desa pesisir, dan lingkaran hutan yang diberdayakan	%	14,17	20,86	24,47	33,29	136,07	33,69
<b>2.08</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>							
1	Pertumbuhan Penduduk	%	1,21	1,17	1,13	1,13	100,00	0,95
<b>2.09</b>	<b>Perhubungan</b>							
1	Persentase konektivitas transportasi publik		73,72	74,76	76,7	78,64	102,53	84,47
<b>2.10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>							
1	Level Kematangan Layanan TIK Pemerintah dan Publik	Level	1	1	2	2,2	110,00	4
<b>2.11</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>							
1	Persentase Koperasi Aktif	%	61,91	60,00	62,00	61,77	99,63	70,00
<b>2.12</b>	<b>Penanaman Modal</b>							
1	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	11.280	15.781	16.000	10.024	62,65	68.202
<b>2.13</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>							
1	Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional	Medali	40	30	25	35	140,00	200
2	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	orang	15	15	15	23	153,33	
3	Proporsi wirausaha muda	%	67,78	67,86	67,97	68	100,04	68,39
<b>2.14</b>	<b>Statistik</b>							



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018				
1	Cakupan ketersediaan data yang terintegrasi	%	60,00	60,00	70,00	95,49	136,41	100,00
<b>2.15</b>	<b>Persandian</b>							
1	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (Level 1-5)	Level	I	I	II	II	100,00	IV
<b>2.16</b>	<b>Kebudayaan</b>							
1	Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih	%	0,00	0,00	3,52	1,98	56,18	17,62
2	Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi	%	8,70	17,39	20,00	26,00	130,00	37,39
<b>2.17</b>	<b>Perpustakaan</b>							
1	Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas)	%	47,46	47,46	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul)	%	17,27	19,93	23,91	26,57	111,11	39,86
<b>2.18</b>	<b>Kearsipan</b>							
1	Persentase Arsip yang Terselamatkan	%	16,55	16,67	33,33	33,33	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>							
<b>3.01</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>							
1	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	%	4,77	4,76	4,76	4,57	96,01	4,74
<b>3.02</b>	<b>Pariwisata</b>							
1	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan	%	0,00	0,00	20,00	20,00	100,00	100,00
2	Rata-rata Lama Menginap	hari	2,64	1,50	2,75	2,05	74,55	3,35
3	Angka kunjungan wisatawan	orang	3.508.903	2.812.379	4.000.000	3.706.352	92,66	23.100.000
4	Persentase Geosites yang Tertata	%	0,00	0,00	10,00	6,25	62,50	50,00
<b>4</b>	<b>Pertanian</b>							
1	Pertambahan Nilai PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan & kehutanan		1.292.781,85	308.343,18	820.307,23	321.690,00	39,22	
64	Nilai Tukar Petani		107,63	111,21	>105	115,27	105,88	>105
<b>3.04</b>	<b>Kehutanan</b>							
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		61,27	61,27	60,03	66,56	110,88	72,00
2	Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK Lainnya	%	0,08	0,08	0,08	0,08	100,00	20,08
<b>3.05</b>	<b>Energi dan Sumberdaya Mineral</b>							
1	Rasio Elektrifikasi	%	85,10	93,83	94,46	99,55	105,39	99,99
<b>3.06</b>	<b>Perdagangan</b>							



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018				
1	Pengeluaran per kapita	Rp.000	9.877	10.284	9.956	10.640	106,87	11.944
<b>3.07</b>	<b>Perindustrian</b>							
1	Pertambahan Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Rp. Milyar	235.421,31	67.344,90	164.565, 72	164.960	100,24	179,91
2	Persentase Industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah	%	0,57	1,13	1,68	1,90	113,10	3,55
3	Pertumbuhan Industri			2,68	4,5	4,57	101,56	
<b>3.08</b>	<b>Transmigrasi</b>							
1	Cakupan Penempatan Transmigran	%	75	75	80	80,00	100,00	100
<b>4</b>	<b>URUSAN FUNGSI PENUNJANG</b>							
<b>4.01</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>							
1	Skor EKPPD		2,9752	3,2048	3,0329	3,2048	105,67	3,0747
2	Persentase Produk Hukum Daerah yang terbentuk	%	100,00	100,00	100,00	144,05	144,05	100,00
3	Tingkat pemanfaatan tempat ibadah dan kegiatan keagamaan	%	35,1	35,45	35,81	36,00	100,53	37,26
4	Inovasi Pelayanan Publik yang tereplikasi	Jumlah Inovasi	2	2	2	2	100,00	12
5	Persentase Kerjasama Daerah	%	100	100	100	150	150,00	100
<b>4.02</b>	<b>Pengawasan</b>							
1	Nilai SAKIP		B	B	B	BB	115,38	A (80,01 - 90,00)
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>							
1	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	%	100,00	100,00	100,00	95,09	95,09	100,00
<b>4.04.</b>	<b>Keuangan</b>							
1	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP
2	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah		0,46	0,45	0,47	0,5	106,38	0,54
<b>4.05</b>	<b>Kepegawaian dan Diklat</b>							
1	Indeks Profesionalisme ASN		0,00	0,60	0,65	0,54	83,08	0,72
<b>4.06</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>							
1	Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN	%	32,55	34,76	10,43	11,85	113,61	56,25
<b>4.07</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>							
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB)	%	12,00	15,00	18,00	21,00	116,67	30,00





## 2.6 Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 menjadi gambaran awal pencapaian target indikator dari SDGs. Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyusunan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023, guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Adapun capaian indikator SDGs Nusa Tenggara Barat tahun 2017-2019 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2-126 Capaian Indikator SDGs di Provinsi NTB Tahun 2017-2019

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
<b>Tujuan 1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun</b>									
<b>Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional</b>									
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	BPS	% (Maret)	14,75 (2018)	14,75a	14,75	13,75	13,88	Semua OPD
1.2.2*	Penduduk Miskin	BPS	Orang	737460 (2018)	737460a	737,46	640.118	705,68 (september 2019)	Semua OPD
<b>Target 1.3 : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan</b>									
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan (BPJS) / P BPJS	BPS	%	PM	PM		PM		Dinas Kesehatan
1.3.1.(b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan / PSJSN-K	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	%	68,83	72,15	14,55	77,67	7,86	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas / P DMMR	Dinas Sosial Provinsi NTB	%	5,7	6,0		6,8		Dinas Sosial Provinsi NTB
1.3.1.(d)	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat bantuan tunai bersyarat	Dinas Sosial Provinsi NTB	Orang	165.362	327.455	382.571	360.201	481.265	Dinas Sosial Provinsi NTB
<b>Target 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat,</b>									
1.4.1.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15 - 49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan/P Salifaskes (Kelompok Penduduk 40% Terbawah)	BPS/Susenas	%	85,72 (2016)	86,66	89,63	87,13		Dinas Kesehatan
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12 - 23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap / PIDL	BPS (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia)	%	PM	PM	75,2	PM		BKKBN



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.4.1.(c)	Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin /CPR-SC	BPS (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia	%	PM	PM	61,73	PM		BKKBN
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan / P AML	BPS/Susenas	%	69,59 (2016)	74,10	69,13	75,61		Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur, Dinas Kesehatan
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan/P LSL	BPS/Susenas	%	58,31 (2016)	63,89	63,09	65,79		Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur, Dinas Kesehatan
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan / P RTKP	BPS/Susenas	%	PM	PM	10,9	PM		Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki di SD/MI/ sederajat / APM SD	BPS/Susenas	%	100,57 (2017)	100,00	100,30	100,22		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki di SMP/MTs/ sederajat / APM SMP	BPS/Susenas	%	94,84 (2017)	101,81	97,83	102,81		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki di SMA/MA/ sederajat / APM SMA	BPS/Susenas	%	106,99 (2017)	94,5	90,20	95,02		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0 - 17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran / PKAL	BPS/Susenas	%	PM	PM	79,65	PM		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN / PSPU	BPS/Susenas	%	PM	PM	99,4	PM		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Target 1.5 : Pada Tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan dan bencana									
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan resiko bencana daerah	BPBD Provinsi NTB	lokasi	PM	PM		PM		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.(e)	Indeks Risiko Bencana (IRB)	BPBD	resiko	PM	PM		PM	72,18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	DIBI/ JIUPASNA	Rupiah	PM	PM		PM		Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB)	BPBD	dokumen	2	-		1	2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Bappeda Provinsi NTB	Rupiah (Juta)	1045554 (2018)	1045554a		1.791.528		Bappeda
<b>Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan</b>									
<b>Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.</b>									
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita /PKG AB (5)	Dinas Kesehatan	%	22,26	20,00	18,85	19,00	(Data capaian 2019 masih menunggu hasil survey tahunan)	Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan,
2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	BPS	%	PM	PM		PM		Badan Ketahanan Pangan
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita /PKG AB (5)	Dinas Kesehatan	%	22,26	20,00	18,85	19,00	(Data capaian 2019 masih menunggu hasil survey tahunan)	Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan,
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan skala pengalaman kerawanan pangan	BPS(Susenas)/ Badan Ketahanan Pusat	%	7,54	6,72	3,60	6,09		Dinas Ketahanan Pangan
2.1.2(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	BPS/susenas, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan	%	7,54	6,72	3,60	6,09		Dinas Ketahanan Pangan
<b>Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.</b>									
2.2.1*	Prevalensi anak balita yang menderita pendek (stunting)	Balitbangkes melalui riset kesehatan dasar (Riskesdas), Direktorat Bina Gizi Melalui PSG	%	37,2	36	33,49	35	(Data capaian 2019 masih menunggu hasil survey tahunan)	Dinas Kesehatan, Data capaian 2019 masih menunggu hasil survey tahunan
2.2.1(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun/baduta	Balitbangkes melalui riset kesehatan dasar (Riskesdas), Direktorat Bina Gizi Melalui PSG	%	23,5	21	25,15	20	(Data capaian 2019 masih menunggu hasil survey tahunan)	Dinas Kesehatan, Data capaian 2019 masih menunggu hasil survey tahunan
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia balita	Balitbangkes melalui riset kesehatan dasar (Riskesdas), Direktorat Bina Gizi Melalui PSG	%	8,6	8	14,41	7,5	(Data capaian 2019 masih menunggu hasil survey tahunan)	Dinas Kesehatan, Data capaian 2019 masih menunggu hasil survey tahunan
2.2.2(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Balitbangkes melalui riset kesehatan dasar	%	56,5	55	-	53	(Data capaian 2019 masih menunggu)	Dinas Kesehatan, Data capaian 2019 masih menunggu



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		(Riskasdas, survei indikator kesehatan nasional (sirkesnas)						hasil survey tahunan)	hasil survey tahunan
2.2.2(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Balitbangkes melalui riset kesehatan dasar (Riskasdas), BPS/Susenas	%	41,2	50	64,25	60		Dinas Kesehatan
2.2.2 c	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan Harapan (PPH Point) mencapai	DKP	%	78,3 (2018)	82,5	82,8	78,8	85,3	Dinas Ketahanan Pangan
	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan tingkat konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun)	DKP	%	38,18			30,18		Dinas Ketahanan Pangan
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Data nilai tambah pertanian, BPS/Sakernas	%	32.821,820	27,100	33.568.311***	27,150		Dinas Pertanian dan Perkebunan
<b>Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia</b>									
<b>Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.</b>									
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	SDKI (2012), AKI se-Nusa Tenggara, Maluku, Papua Tahun 2015	orang	251 (2012)					Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (%)	BPS/Susenas	%	99,47	100	94,77	100		Dinas Kesehatan
3.1.2(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	BPS/Susenas	%	90,42	90	89,63	92		Dinas Kesehatan
<b>Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.</b>									
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	BPS (Sensus Penduduk dan SUPAS), BKKBN/SDKI	Orang	75 (2012)			-		Dinas Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	BPS (Sensus Penduduk dan SUPAS), BKKBN/SDKI	Orang	33 (2012)					Dinas Kesehatan
3.2.2(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	BPS (Sensus Penduduk dan SUPAS), BKKBN/SDKI	Orang	57 (2012)					Dinas Kesehatan





Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
3.2.2(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan	%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.									
3.3.1	Angka infeksi Baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV	Kemenkes	Kasus	98	62	255	61	95	Dinas Kesehatan
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Kemenkes	Kasus	170	139	128	130	39.8	Dinas Kesehatan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan	%	0	0,25	0.17	0.20	0.18	Dinas Kesehatan
3.3.3(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Dinas Kesehatan	Kab/Kota	3	3	3	3	3	Dinas Kesehatan
3.3.4(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Kemenkes	%	90	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (kusta)	Kemenkes	orang	221	200	253	190	97	Dinas Kesehatan
3.3.5(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Kusta.	Dinas Kesehatan	Kab/Kota	0	0	7	0	7	Dinas Kesehatan
3.3.5(b)	Angka pencapaian pengobatan Penyakit Filariasis.	Dinas Kesehatan (Survei Mikro Filaria Rate/MFR), BPS	%	PM	PM	0	PM	0	Dinas Kesehatan
3.3.5(c)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I).	Dinas Kesehatan	Kab/Kota	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Kesehatan
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.									
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun	Riskesdas	%	5,9	5,6	PM	5,4	PM	Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)	Prevalansi tekanan darah tinggi	Riskesdas	%	42	24,78	39,30	23.38	34,00	Dinas Kesehatan
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun	Riskesdas	%	2,00	PM	14,90	0,98	14,90	Dinas Kesehatan (Data survey per 5 tahun)
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Dinas Kesehatan	Kab/Kota	10	10	10	10	10	Dinas Kesehatan
3.4.2*	Angka Kematian (Insidens rate) akibat bunuh diri	Kepolisian	orang	13	3	Nihil	3	Nihil	Kepolisian
Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.									



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkoba dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Dinas Kesehatan, BNN	orang	PM	294	692	395	511	BNN
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi	Dinas Sosial	orang	20 (2018)	20a		20		Dinas Sosial
3.5.1(c)	Jumlah Korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Dinas sosial, BNN	orang	PM	75	181	80	75	BNN
3.5.1(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	Dinas Sosial	Lembaga	8 (2018)	8	8	9	7	Dinas Sosial
3.5.1(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	BNN	%	PM	PM		PM		BNN
<b>Target 3.6 Pada Tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas</b>									
3.6.1	Angka Kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas	Kepolisian	Orang	PM	PM	4795	PM	231	Kepolisian
<b>Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.</b>									
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	BKKBN	%	50,9	53,9		55,8		BKKBN
		BKKBN	%		56,14	57,8	55,8	56,79	BKKBN
3.7.1(a)	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin	BKKBN	%	50,9	51,1		51,6	57,73	BKKBN
3.7.1(b)	Jumlah PUS pesrta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (pesrta KB yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang) dibagi jumlah PUS pada periode yang samadan dinyatakan dalam persentase	BKKBN	%	74,77	75,43		75,77		BKKBN
		BKKBN (Target BKKBN Prov. NTB)	%	74,77	28,46	34,77	27,54	30,51	BKKBN
3.7.2*		BKKBN	%	23,7	23,01	45	19,80	60	BKKBN



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun	BKKBN (Target BKKBN Prov. NTB)	%	23,7	43,00	45		60	BKKBN
3.7.2(a)	Total Fertility Rate (TFR)	BKKBN	%	2,5	2,3		2,1		BKKBN
		BKKBN (Target BKKBN Prov. NTB)	%	2,5	2,3	2,65	2,1	2,84	BKKBN
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua orang									
3.8.1(a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	BPS/Susenas	%	6,49 (2016)	5,75	7,31	5,50		Dinas Kesehatan
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	BPS/Susenas	%	PM	PM		PM		Dinas Kesehatan
3.8.2(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan, BPJS	%	56	67	73,00	70,00	82.68 (data per september 2019)	Dinas Kesehatan
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun	BPS/ Susenas	%	6	5,60	33,92	5,40		Dinas Kesehatan
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan	%	74	89	98,78	91	99.41 (data per Oktober)	Dinas Kesehatan
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	%	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan per jenis tenaga kesehatan					Dinas Kesehatan
3.c.1.(a)	Kepadatan dan distribusi tenaga medis	Dinas Kesehatan	%	0,184	0,57	0,332	0,57	0,333	Dinas Kesehatan
3.c.1.(b)	Kepadatan dan distribusi tenaga psikologis klinis	Dinas Kesehatan	%	0,002	PM	0,003	PM	0,0028	Dinas Kesehatan
3.c.1.(c)	Kepadatan dan distribusi tenaga keperawatan	Dinas Kesehatan	%	0,733	1,169	1,425	1,169	1,406	Dinas Kesehatan
3.c.1.(d)	Kepadatan dan distribusi tenaga kebidanan	Dinas Kesehatan	%	0,300	1	0,829	1	0,831	Dinas Kesehatan
3.c.1.(e)	Kepadatan dan distribusi tenaga kefarmasian	Dinas Kesehatan	%	0,070	0,399	0,142	0,399	0,157	Dinas Kesehatan
3.c.1.(f)	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	%	0,038	0,399	0,085	0,399	0,086	Dinas Kesehatan
3.c.1.(g)	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan lingkungan	Dinas Kesehatan	%	0,070	0,399	0,089	0,399	0,089	Dinas Kesehatan
3.c.1.(h)	Kepadatan dan distribusi tenaga Gizi	Dinas Kesehatan	%	0,087	0,219	0,117	0,219	0,120	Dinas Kesehatan
3.c.1.(i)	Kepadatan dan distribusi tenaga Keterampilan Fisik	Dinas Kesehatan	%	0,010	PM	0,020	PM	0,029	Dinas Kesehatan
3.c.1.(j)	Kepadatan dan distribusi tenaga Keteknisan Medis	Dinas Kesehatan	%	0,064	PM	0,108	PM	0,123	Dinas Kesehatan



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
3.c.1.(k)	Kepadatan dan distribusi tenaga Teknik Biomedika	Dinas Kesehatan	%	0,080	0,149	0,150	0,149	0,163	Dinas Kesehatan
3.c.1.(l)	Kepadatan dan distribusi tenaga Keterampilan Fisik Tenaga Kesehatan Tradisional	Dinas Kesehatan	%	0,000	PM	0,000	PM	0,0002	Dinas Kesehatan
3.c.1.(m)	Kepadatan dan distribusi tenaga Asisten tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	%	0,083	PM	0,193	PM	0,241	Dinas Kesehatan
<b>Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua</b>									
<b>Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif</b>									
4.1.1*	Proporsi anak-anak/anak muda yang mencapai standar kemampuan minimum dalam : (i) membaca dan (ii) matematika	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	PM	PM		PM		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Badan Akreditasi Nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	68,32 (2018)	68.32a	68,07	68,57	70,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs Berakreditasi minimal B	Badan Akreditasi Nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	63,53 (2018)	63.53a	63,08	64,27	69,87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA Berakreditasi minimal B	Badan Akreditasi Nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	74,71 (2018)	74.71a	74,21	75,21	76,54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	BPS/Susenas	%	109,63	111,54	108,82	112,21		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	107,83	108,66	107,83	112,21	106,23	
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	BPS/Susenas	%	94,97	94,86	93,83	95,33		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	110,16	110,26	110,51	110,31	109,17	
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	BPS/Susenas	%	93,98	94,46	89,64	95,56		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	97,93	98,13	97,93	98,63	98,55	
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun	BPS/Susenas	%	7,66	7,69	7,69	7,75		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1.(i)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	BPS/Dinas Pendidikan	%	67,22	68,22	78,53	68,24	80,41	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.</b>									
4.2.2 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	BPS/Susenas	%	37,57 (2016)	39,33	40,29	39,90		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	75,72	76,97	75,72	78,22	81,53	
<b>Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.</b>									





Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	BPS/Susenas	%	93,89	94,46	89,64	95,56		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	97,93	98,13	97,93	98,63	98,55	
4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	BPS/Susenas, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi)	%	21,57 (2016)	22,80	29,75	23,5		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.									
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa umur 15-24 Tahun dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (%)	BPS	%	46,63 (2016)	56,43		59,58		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Proporsi remaja dan dewasa umur 15-59 Tahun dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (%)	BPS	%	23,71 (2016)	30,79		33,49		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.									
4.5.1*	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/Sederajat	BPS/Susenas	%	100,57	100,00	100,30	100,22		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	100,02	100	100	100	100	
	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/Sederajat	BPS/Susenas	%	99,75 (2016)	101,81	97,83	99,9		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	100,02	100	100	100	100	
	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA/Sederajat	BPS/Susenas	%	86,18 (2016)	94,5	90,20	88		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	90	94,5	98,83	96,02	100	
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan/Laki-laki di PT (%)	BPS/Susenas	%	118,84 (2016)	138,41	104,80	144,71		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.									
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun	BPS/Susenas	%	87,14	91,60	87,42	92,52		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun	BPS	%	100,00	100,00	99,75	100,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59 tahun	BPS	%	87,14	91,60	92,49	92,52		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.									
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Dikbud : Data Pokok Pendidikan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan	%	98 (2016)	94,5	98,83	96,02	100	Dikbud : Data Pokok Pendidikan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik	Dapodik	%SD	97,09	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
		Dapodik	%SMP	96,74	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
		Dapodik	%SMA	100	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
		Dapodik	%SMK	100	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (b) Internet untuk tujuan pengajaran	Dapodik	%SD	45,59	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
		Dapodik	%SMP	54,7	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
		Dapodik	%SMA	1,8	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
		Dapodik	%SMK	33,99	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (c)Komputer tujuan pengajaran	Dapodik	%SD	58,51	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
		Dapodik	%SMP	47,9	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
		Dapodik	%SMA	100	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
		Dapodik	%SMK	100	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (d) Infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas	Dapodik	%SD	72,07	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
		Dapodik	%	100.00	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
		Dapodik	%SD	PM	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
		Dapodik	%SMP	PM	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (e) air minum layak	Dapodik	%SMA	PM	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
		Dapodik	%SMK	PM	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
		Dapodik	%SLB	PM	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
		Dapodik	%SD	100.00	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (f)fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	Dapodik	%SMP	100.00	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
		Dapodik	%SMA	100.00	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
		Dapodik	%SMK	100.00	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
		Dapodik	%SLB	100.00	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (g)fasilitas cuci tangan (terdiri dari,sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Dapodik	%SD	100.00	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
		Dapodik	%SMP	100.00	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
		Dapodik	%SMA	100.00	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
		Dapodik	%SMK	100.00	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (g)fasilitas cuci tangan (terdiri dari,sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Dapodik	%SLB	100.00	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
		Dapodik	%SD	100.00	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
		Dapodik	%SMP	100.00	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
		Dapodik	%SMA	100.00	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (g)fasilitas cuci tangan (terdiri dari,sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Dapodik	%SMK	100.00	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
		Dapodik	%SLB	100.00	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
		Dapodik	%SD	100.00	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
		Dapodik	%SMP	100.00	94,5	98,83	96,02	100	Dapodik
Target 4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.									
4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemri kepada	Dikbud	%	PM	PM		PM		



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang.								
Target 4.c Pada tahun 2030, Secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.									
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik	Dikbud	%	51,42	54,82		58,22		Dikbud
	Jumlah guru TK/TKLB yang bersertifikat pendidik	Dikbud	%	PM	PM		PM		Dikbud
	Jumlah guru SD/SDLB yang bersertifikat pendidik	Dikbud	%	PM	PM		PM		Dikbud
	Jumlah guru SMP/SMPLB yang bersertifikat pendidik	Dikbud	%	PM	PM		PM		Dikbud
	Jumlah guru SMA/SMALB yang bersertifikat pendidik	Dikbud	orang	3289	3594	3650	3899	8451	Dikbud
	Jumlah Kepala SMK yang bersertifikat pendidik	Dikbud	orang	1741	1883	2090	2025	6353	Dikbud
	Persentase guru TK/TKLB dengan kualifikasi minima S1/D4	Dikbud	%	76,88	77,28	72,88	79,28	79,28	Dikbud
	Persentase guru Dikdas dengan kualifikasi minima S1/D4	Dikbud	%	83,26	89,015	85,11	90,915	89,26	Dikbud
	Persentase guru SD/SDLB dengan kualifikasi minima S1/D4	Dikbud	%	77,51	81,76	79,92	84,76	85,77	Dikbud
	Persentase guru SMP/SMPLB dengan kualifikasi minima S1/D4	Dikbud	%	95,77	96,27	96,48	97,07	96,64	Dikbud
	Persentase guru Dikmen dengan kualifikasi minima S1/D4	Dikbud	%	99,22	99,72	99,00	99,74	99,64	Dikbud
	Persentase guru SMA/SMALB dengan kualifikasi minima S1/D4	Dikbud	%	99,48	99,98	99,09	99,99	99,86	Dikbud
	Persentase guru SMK dengan kualifikasi minimal S1/D4	Dikbud	%	98,96	99,46	98,89	99,49	99,47	Dikbud
	Persentase Guru Negeri yang bersertifikat	Dikbud	%	80,03	90,05	83,74	92	92	Dikbud
	Persentase Guru Swasta yang bersertifikat	Dikbud	%	13,89	14,2	16,39	16	16	Dikbud
Tujuan 5. Kesetaraan Gender									
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.									



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	BPS/Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN)	%	0,069	PM		0,067		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana
5.2.1 (a)	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan.	Dinas Sosial	Anak	301	270		238		Dinas Sosial
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	BPS melalui SPHPN	%	0,014	PM		0,017		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial
5.2.2(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	BPS melalui SPHPN	%	0,035	PM		0,046		Dinas Sosial
<b>Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.</b>									
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun	BPS melalui Susenas	%	0,62 (2016)	0,42		0,39		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana
	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun.	BPS melalui Susenas	%	18,86 (2016)	12,24		11		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana
5.3.1(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	BKKBN	%	20 (2016)	19,2		19,4		
5.3.1(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i> ).	BPS melalui SDKI atau BPS melalui SP dan SUPAS	%	75 (2012)					BKKBN, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana
5.3.1(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	BPS melalui Susenas	%	91,25 (2016)	94,46	89,64	95,56		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>Target 5.4 Mengenal dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.</b>									
5.4.1	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis	BPS	%	PM	PM		PM		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana





Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	kelamin, kelompok umur, dan lokasi.								
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat (DPD dan DPR)	KPU Provinsi NTB	%	21.43 (2014)	-				KPU Provinsi NTB
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat Parlemen daerah (DPRD Provinsi NTB)	KPU Provinsi NTB	%	9.23 (2014)	-				KPU Provinsi NTB
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	BPS	%	10%	13.04%	29.55%	14.50%	30.06%	Badan Kepegawaian Daerah
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.									
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	BPS melalui SDKI	%	77.90 (2012)					BKKBN
5.6.1(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	BKKBN	%	15,6	13,47		11,34		BKKBN
		BKKBN	%	15,6	9,1	12,1	11,34	17,4	NKKBN
5.6.1(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	BKKBN	%	99,6	100		100		BKKBN
		BKKBN	%	99,6	49,8	35,76	100		BKKBN
5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Biro Hukum, BKKBN, Dinas Kesehatan, DPPAPPKB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	UU/PP	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BKKBN
Target 5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.									
5.a.1	Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan	BPS	%	PM	PM		PM		Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana, BPN
5.a.2	Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk		%	PM	PM		PM		



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol								
<b>Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.</b>									
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	BPS melalui Sensus	%	48,96	51,8	53,88	54,1		Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
<b>Target 5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.</b>									
5.c.1	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Dinas pemberdayaan perempuan Anak dan KB	OPD	2	2	2	2		Dinas pemberdayaan perempuan Anak dan KB
<b>Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua</b>									
<b>Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.</b>									
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	BPS : Susenas	%	69,58 (2016)	74,1	73,61	75,61	73,61	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Dinas PU	Liter/detik	299.196	299.196		299.196		
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Dinas PU	%	74,2	76,35		78,50	73,61	
<b>Target 6.2 Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.</b>									
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	BPS : Susenas (Modul Kesehatan dan Perumahan)	%	43,07 (2016)	47,7	83,92	50	52,3	Dinas Kesehatan
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	BPS : Susenas	%	58,31 (2016)	63,89	73,7	65,79	73,82	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB	Desa/ Kelurahan	1100 (2016)	1100	1137	1100	1137	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur
6.2.1.(d)	Jumlah kota/kab yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas PU	Kab/Kota	10	10	8	10	10	
<b>Target 6.3 : Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.</b>									



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
6.3.1.(a)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat	Kab/Kota	1	1		1		
<b>Target 6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.</b>									
6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Dinas ESDM	PM	PM	PM		PM		
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Dinas ESDM	PM	PM	PM		PM		
<b>Target 6.5 : Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.</b>									
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Dinas LHK	Jumlah RPDAST	1	1	1 Das (Das Sari)	1	1 Das (Das Sari)	
6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan <i>updating</i> dan revitalisasi.	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	Stasiun	62	62		62		
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	kegiatan	1	1		1		
6.5.1.(d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> lintas Negara.	Dinas LHK	DAS	1	1	-	-	-	
6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Dinas LHK	Ha	200	200	1933,75	200	3772,5	
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	Wilayah sungai	PM	PM		PM		Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	Lembaga	25	30		35		Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur
6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya	Dinas LHK	DAS	2	1	1 (Das Moyo)	1	1 (Das Moyo)	Dinas LHK



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.								
6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	Dinas LHK	DAS	1	2	7 Das (Kambu, Moyo, Kempo, Labebela, Kelep, Labangka, Nangagali)	2	6 Das (Moyo, Kambu, Kempo, Labela, Pelaparado, Rababaka)	Dinas LHK
<b>Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.</b>									
6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.	Dinas LHK	Danau	1	1	-	1	-	Dinas LHK
6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.	Dinas LHK	Danau	PM	PM	-	1	0	Dinas LHK
6.6.1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.	Dinas LHK	Danau	PM	PM	-	1	0	Dinas LHK
6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Dinas LHK	Hektar	4090	875	3291,93	6000	3100	Dinas LHK
6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Dinas LHK	DAS	2	5	1 Das (Das Moyo)	5	-	Dinas LHK
<b>Tujuan 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua</b>									
<b>7.1 Pada tahun 2030 menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau andal dan modern</b>									
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Dinas ESDM	%	87,78 (2018)	87,78a	87,78	88,16	97,37	
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	Dinas ESDM	kwh/kapita	579,05	579,05a	579,05	607,47		
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	BPS melalui Susenas	%	54,76	51,3	59,42	52,27		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
<b>Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua</b>									
<b>8.1 : Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang</b>									
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita	BPS	%	-1,09	0,80	-0,91	0,84		Semua OPD
8.1.1. (a)	PDRB per kapita	BPS	ribu Rupiah (ADH Berlaku)	25.008	26.773	24.707	28.675		Semua OPD
<b>8.2 : Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya</b>									
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BPS melalui Sakernas	%	PM	PM		PM		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
<b>8.3 : Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan</b>									
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	BPS melalui Sakernas	%	58,42	58,52	59,43	58,67		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian dan Perkebunan





Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	BPS melalui Sakernas	%	35,93	36,75	28,22	37,6		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS melalui Sakernas	%	96,81	96,18	96,32	96,14		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian dan Perkebunan
<b>8.5 : Pada Tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya</b>									
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS melalui Sakernas	Rupiah	10628 (2016)	10.700	11.218	10.900		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS melalui Sensus dan Sensus Penduduk	%	3,32	3,37	3,72	3,28		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran	BPS melalui Sakernas dan Sensus Penduduk	%	17,27	17,23	16,95	17,19		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
<b>Target 8.6 Pada Tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan</b>									
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	BPS melalui Sakernas	%	19,53 (2016)	18	24,68	18		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
<b>8.9 : Pada Tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.</b>									
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	BPS	orang	1.858.241	2.458.872		3.253.640		Dinas Pariwisata
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	BPS melalui Susenas	orang	2.215.211	2.903.457	3.192.581	3.805.536		Dinas Pariwisata
<b>8.10 : Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua</b>									
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa	BI/LKPBU, OJK, BPS	Bank/ ATM	31/896	PM		PM		BI/LKPBU, OJK, BPS
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	BPS/Statistik Potensi Desa (Podes)	Km	PM	PM		PM		BPS/Statistik Potensi Desa (Podes)
8.10.2*	Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (18 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak	BI/OJK	orang	PM	PM		PM		BI/OJK
<b>Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi</b>									
<b>9.1 : Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua</b>									
9.1.1	Jalan Mantap Provinsi	Dinas PU	%	83,55 (2018)	83,65a	83,65	84,55		Dinas PU
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Dinas Perhubungan	Pelabuhan Penyeberangan	7	7	8	7	8	Dinas Perhubungan
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis	Dinas Perhubungan	Pelabuhan	7	7	14	7	14	Dinas Perhubungan
<b>9.2 : Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang</b>									
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri	BPS : Survei Industri Besar dan Sedang dan	%	4,2 (2016)	4,3	4,12	4,4		Dinas Perindustrian



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Survei Makro dan Kecil							
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur	BPS	%	PM	PM	1,33	PM		Dinas Perindustrian
Target 9.3 : Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar									
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	BPS, Dinas Perindustrian	%	PM	PM		PM		Dinas Perindustrian
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	BPS	Rp (Juta)	PM	PM		PM		Dinas Perindustrian
Target 9.4 : Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.									
9.4.1*	Rasio emisi CO2/emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	Dinas LHK	%	1,27	1,33		1,23		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9.5 : Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan									
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	Bappeda	%	PM	PM		PM		
9.5.2	Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk	Bappeda	orang	PM	PM		PM		
9.C. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020									
9.C.1.(a)	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	BPS melalui Susenas	%	48	50	71,67	54		Dinas Komunikasi dan Informatika
9.C.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet	BPS melalui Susenas	%	21	25	28,31	29		Dinas Komunikasi dan Informatika
Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra - dan antarnegara									
10.1 Pada Tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional									
10.1.1*	Koefisien Gini	BPS melalui Susenas	%	0,371	0,368	0,372	0,367	0,379	Semua OPD
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS melalui Susenas	%	14,75 (2018)	14,75a	14,75	13,75	14,56	Semua OPD
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	BPS : Potensi Desa (PODES)	Kabupaten	8	8		8		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Catatan Sipil
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	BPS	%	3.62 (2014)			PM		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Catatan Sipil



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	BPS	%	4.22 (2014)			PM		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Catatan Sipil
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	BPS melalui Susenas	%	PM	PM		PM		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Catatan Sipil
<b>10.2 : Pada Tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya</b>									
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50% dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyanggandifabilitas	BPS melalui Susenas	%	PM	PM		PM		Dinas Sosial
<b>10.3 : Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakann dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut</b>									
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil	BPS : IDI	%	79,4	78,53	78,28	82,87		Bakesbangpoldagri
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	Kebijakan	PM	PM		PM		Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
<b>10.4 : Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar</b>									
10.4.1.(b)	Jumlah peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	BPS	%	68832	78832		85120		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
<b>10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik.</b>									
10.7.2. (a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dokumen	8	10		12		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
<b>Tujuan 11. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan</b>									
<b>Target 11.1 : Pada Tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan</b>									
11.1.1.(a)	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	BPS melalui Susenas	%	96,52 (2016)	99,41	97,06	100	100	Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	PUPR	Kawasan perkotaan metropolit an	PM	PM		PM		Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat
11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	PUPR	Kota sedang & Kota Baru	PM	PM		PM		Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
<b>Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.</b>									
11.2.1.(a)	Persentase pengguna modal transportasi umum di perkotaan.	Dinas Perhubungan	%	PM	PM		PM		Dinas Perhubungan
<b>Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.</b>									
11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali ( <i>buffer</i> ) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Dinas PU dan Perumahan Rakyat.	Kota	PM	PM		PM		Dinas PU dan Perumahan Rakyat
11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Dinas PU dan Perumahan Rakyat.	Metropolitan	PM	PM		PM		Dinas PU dan Infrastruktur, Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat
11.3.2.(a)	Jumlah institusi (swasta, ormas, organisasi profesi) yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Bappeda	institusi	PM	PM		PM		BAPPEDA
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur perkotaan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	Lembaga	11	11		11		Dinas PU dan Infrastruktur, Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat
<b>Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.</b>									
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Dinas PUPR	Kota	1	1		1		Dinas PU dan Infrastruktur, Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat
<b>Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.</b>									
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Orang	8	2	11,2	2		Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana di Provinsi NTB (IRBI).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	%	PM	PM		72,18		Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Desa/ Kelurahan	5	4	9	4	8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas PU	EWS	1	2		2	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)





Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		dan Perumahan Rakyat, Dinas ESDM.							
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Rupiah	PM	PM	-	PM	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
<b>Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.</b>									
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas LHK	%	39,72	45	28,79	50	20,06	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan <i>green waste</i> di kawasan perkotaan metropolitan.	Dinas LHK, PU	Kota Hijau	PM	PM	-	PM	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur, Dinas Perkim dan LHK
<b>Target 11.7 : Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.</b>									
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Dinas PU dan Perumahan Rakyat, LHK	kota	10	12	2	-	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur, Dinas Perkim dan LHK
11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	BPS melalui Susenas	%	12,87	13,03		13,08		Kepolisian
<b>Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</b>									
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	BPBD	%	90	90		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	%	2 (2015)	-		1	2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
<b>Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan</b>									
<b>Target 12.1 : Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.</b>									
12.1.1*	Jumlah kolaborasi tematik <i>quickwins</i> program.	Dinas LHK : Laporan Tahunan PROPER	Kolaborasi tematik	PM	PM		PM		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<b>Target 12.2 : Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.</b>									
12.2.1	Jejak material ( <i>material footprint</i> ).	Dinas LHK : Laporan Tahunan PROPER		PM	PM		PM		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<b>Target 12.3 : Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.</b>									
12.3.1	Indeks kehilangan makanan global.	Dinas Pertanian dan Perkebunan,		PM	PM		PM		Dinas Ketahanan Pangan, Dinas



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		Dinas Ketahanan Pangan							Pertanian dan Perkebunan
<b>Target 12.4 : Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.</b>									
12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.	Dinas LHK : Laporan Tahunan PROPER	Peserta Proper	14	13	14	14	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Dinas LHK	Ton	1.226	1.349	1.225,70	1.484	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<b>Target 12.5 : Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali (3R)</b>									
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas LHK	%	6,75	10	0,016	14	0,025	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<b>Target 12.6 : Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.</b>									
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Dinas LHK	Perusahaan	PM	PM	-	PM	7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<b>12.8 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di manapun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan</b>									
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Dinas LHK	Fasilitas Publik	PM	PM	-	PM	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tujuan 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya									
<b>Target 13.1 : Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.</b>									
13.1.1*	Dokumen strategipengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	dokumen	2 (2015)	-	-	1	2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	orang	8	2	11,2	2		Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Tujuan 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.									
<b>Target 14.5 : Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.</b>									
14.5.1	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	DKP (data RZWP3K)	Ha	225965,32	360028		585994		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Data DKP	Ha	225965,32	214.411,32	241.051,13	240.000,00	#####	
<b>Target 14.6 : Pada thn 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan &amp; tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dgn mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif utk negara berkembang &amp; negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.</b>									
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Dinas Kelautan dan Perikanan	%	98	100		100		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Data DKP	%	98	35,29	52,94	41,18	64,86	
<b>Target 14.b : Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.</b>									
14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Dinas Kelautan dan Perikanan	orang	17794	22862				Dinas Kelautan dan Perikanan



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		Data DKP	orang	17794	47.435	51.250	51.835	on proses	
Tujuan 15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.									
<b>Target 15.1 : Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.</b>									
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas LHK	%	4,87 (2018)	4,87	49,91	5,01	49,91	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<b>Target 15.2 : Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.</b>									
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Dinas LHK	Ha	0					BKSDA
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Dinas LHK	Ha	PM	PM	-	PM	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Dinas LHK	KPH	11	11	12	15	16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<b>Target 15.3 : Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.</b>									
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas LHK	%	0,142 (2018)	0,537	0,537	0,147	0,34	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tujuan 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan									
<b>TARGET 16.1 : Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.</b>									
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Kepolisian	kasus	20	17	21	16	8	Kepolisian
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Kepolisian	Orang	14	14	Nihil	14	Nihil	Kepolisian
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	BPS : Susenas (Modul Ketahanan Sosial)	%	1,5 (2016)	1,2	2,14	1,1		Kepolisian
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Kepolisian	Orang	5466688	362	Nihil	5951615	Nihil	Kepolisian
<b>TARGET 16.2 : Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak</b>									
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	BPS : Susenas (Modul Ketahanan Sosial)	%	PM	PM	0,08	PM		Kepolisian
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Dinas Sosial Prov. NTB	Anak	707	487		387		Kepolisian, Dinas Sosial
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Kepolisian	Anak	391	362		330		Kepolisian



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
<b>Target 16.3 : Menggalakan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan Internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua</b>									
16.3.1.(a)	Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Kepolisian	Orang	13	10	Nihil	12	Nihil	Kepolisian
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	orang	19	PM		12		Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Kementerian Hukum dan HAM, Perwakilan NTB
16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	MA	Perkara	PM	PM		PM		Pengadilan Tinggi Provinsi NTB
16.3.2. (a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	%	PM	PM		PM		Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan NTB
<b>TARGET 16.5 : secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya</b>									
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	BPS	Indeks	PM	PM		PM		KPK NTB
<b>TARGET 16.6 : Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.</b>									
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BPKAD	%	PM	PM		PM		BPKAD
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BPK	%	PM	PM		PM		BPKAD
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Biro Organisasi	%	PM	PM		PM		BKD
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan.	BPKAD, LPSE	%	PM	PM		PM		BPKAD, LPSE
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Inspektorat	%	PM	97,78	53,38	65,74	30,63	BKD





Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Ombudsman RI	%	PM	PM		PM		Ombudsman NTB
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	KPU	%	10 (2014)	PM		PM		KPU
	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi NTB).	KPU	%	9.23 (2014)	PM		PM		KPU
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKD	%	13,04	13.04	14.58%	14.5	14.89	BKD
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	BPS : IDI	%	93,98	73	86,11	74		Bakesbangpoldagri
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	BPS : IDI	%	79,4	78,53	78,28	82,87		Bakesbangpoldagri
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	BPS : IDI	%	62,08	63,05	62,08	63,36		Bakesbangpoldagri
<b>TARGET 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.</b>									
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang lahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	BPS : Susenas	%	58,39	61,78	59,87	64		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
16.9.1.(b)	Persentase anak usia 0-17 Tahun menurut kepemilikan akta kelahiran dan kabupaten/kota di Provinsi NTB	BPS : Susenas	%	74,66	78,16	79,65	79,74		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
<b>TARGET 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.</b>									
16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Komisi Nasional HAM	Berkas Pengaduan	PM	PM	PM	PM		Komisi Nasional HAM Perwakilan NTB
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Komnas Perempuan	%	PM	PM		PM		Komisi Nasional Perempuan Perwakilan NTB
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Komisi Informasi Pusat (KIP)	%	PM	PM		PM		Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	Komisi Informasi Pusat (KIP)	%	PM	PM		PM		Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Komisi Informasi Pusat (KIP)	PPID	PM	PM		PM		Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
<b>TARGET 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.</b>									
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Komnas Perempuan	Kebijakan /Dokumen	PM	PM		PM		Komisi Nasional Perempuan Perwakilan NTB
<b>Tujuan 17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan</b>									
<b>TARGET 17.1 : Memperkuat mobilitas sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.</b>									
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.	BPS	%	1,21	1,23		1,23		Bappenda
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB/PDRB	Bappenda	%	0,95 (2018)	0,95a	1,02	0,92	1,01	Bappenda
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Bappenda	%	24,4	24.40a	24,69	26,45	30,78	Bappenda
<b>TARGET 17.3 : Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.</b>									
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	BPS	US \$	12.556,94	11.071,79	10.609,12	9.762,29		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BI
<b>TARGET 17.6 : Meningkatkan kerjasama Utara-selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.</b>									
17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).	BPS	%	PM	PM		PM		Dinas Perhubungan
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar ( <i>fixed broadband</i> ) di Perkotaan dan di Perdesaan.	BPS, Dinas Kominfotik	%	PM	PM		PM		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>	BPS, Dinas Kominfotik	%	PM	PM		PM		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
<b>TARGET 17.8 : Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi</b>									



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	BPS : Susenas	%	22,64	25	28,31	29		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	PM	PM		PM		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
TARGET 17.9: Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, selatan-selatan dan Triangular.									
17.9.1.(a)	Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.	Bappeda	Rupiah	PM	PM		PM		Bappeda
TARGET 17.11 : Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.									
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Dinas Perdagangan	%	-96.33 (2016)	11	95.34	11	-13,44	Dinas Perdagangan
TARGET 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.									
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Biro Ekonomi, BPKAD, Bappeda, Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, DPMPTSP	Dokumen	PM	PM		PM		Biro Ekonomi, BPKAD, Bappeda, Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, DPMPTSP
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Biro Ekonomi, BPKAD, Bappeda, Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, DPMPTSP	Alokasi	PM	PM		PM		Biro Ekonomi, BPKAD, Bappeda, Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, DPMPTSP
TARGET 17.18: pada tahun 2020 meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan tepat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.									
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	BPS	%	34	36		36		BPS, OPD sumber data
17.18.3.(a)	Tersusunnya <i>National Strategy for Development of Statistics</i> (NSDS).	BPS	Strategi Daerah	PM	PM		PM		BAPPEDA
TARGET 17.19: Pada Tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.									
17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	BPS	Sensus Penduduk	PM	PM		PM		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perumahan



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2018		Tahun 2019		Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian ( <i>Vital Statistics Register</i> )	BPS	Data registrasi	PM	PM		PM		dan Pemukiman Rakyat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil, BKKBN
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	Pengunjung	507.744	59.421		69.582		Dinas Komunikasi dan Informatika, BPS, Biro Umum
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	%	98	99		99		BPS
17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik(BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	BPS	%	6,03 (2016)	21,5		22,5		BPS

Sumber: Bappeda Provinsi NTB Tahun 2019

## 2.7 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM dalam pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2013 sampai dengan 2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-127 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR SPM	TARGET					REALISASI				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
<b>I</b>	<b>Pendidikan</b>										
1	APM Pendidikan Menengah	70,12%	71,87%	71,87%	75,15%	81,72%	72,57%	74,73%	76,02%	78,80%	83,35%
2	APM Pendidikan Khusus	34,00%	41,50%	49,00%	56,50%	64,00%	34,78%	36,57%	66,36%	64,72%	67,17%
<b>II</b>	<b>Kesehatan</b>										
1	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%	100%	100%	100%	100%	(728 penduduk terdampak KLB dan seluruhnya terlayani)	(629 penduduk terdampak KLB dan seluruhnya terlayani)	(807 penduduk terdampak KLB dan seluruhnya terlayani)	(730 penduduk terdampak KLB dan seluruhnya terlayani)	(455 penduduk terdampak KLB dan seluruhnya terlayani)
<b>III</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>										
1	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian	22,27	30,98	39,58	48,19	55,07	17,21	25,85	34,42	43,03	51,63





No	INDIKATOR SPM	TARGET					REALISASI				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
	rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya										
2	Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang.	65,78	68,92	72,67	72,9	75,39	67,56	68,99	72,37	72,1	77,16
3	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi	77,63	80,77	84,52	84,75	87,24	74	77,14	80,89	81,12	83,61
4	Persentase tersedianya 3 (tiga) jenis informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Provinsi beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.		17%	17%	17%	17%		0%	0%	0%	0%
<b>IV Perumahan Rakyat</b>											
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	0	1000 Unit	1000 Unit	1000 Unit	1000 Unit	0	1000 Unit	800 Unit	1007 Unit	1081 Unit
<b>V Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>											
1	Pelayanan Ketenteraman dan Pelayanan Ketertiban Umum Provinsi										
	- Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Inti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Persentase Penanganan Pelanggaran Perundang-undangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Persentase Penanganan Penyakit Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Target ini baru muncul tahun 2018, sehingga tidak tersedia data histori									
<b>VI Sosial</b>											
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	100 Jiwa	100 Jiwa	100 Jiwa	100 Jiwa	100 Jiwa	100 Jiwa	100 Jiwa	100 Jiwa	100 Jiwa	100 Jiwa
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant	690 Jiwa	690 Jiwa	690 Jiwa	690 Jiwa	690 Jiwa	690 Jiwa	690 Jiwa	690 Jiwa	690 Jiwa	690 Jiwa
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di dalam Pant	130 Jiwa	130 Jiwa	130 Jiwa	130 Jiwa	130 Jiwa	130 Jiwa	130 Jiwa	130 Jiwa	130 Jiwa	130 Jiwa
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant	100 Jiwa	100 Jiwa	100 Jiwa	100 Jiwa	150 Jiwa	100 Jiwa	100 Jiwa	100 Jiwa	100 Jiwa	150 Jiwa
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	15.257 KK	15.917 KK	16.272 KK	16.821 KK	23.410 KK

BAB

3



*Gambaran  
Keuangan Daerah*





## BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

### 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

#### 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan, serta penerapan pelayanan prima pada unit pengelola melalui upaya penggalian dan pengembangan sumber penerimaan daerah, serta penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah.

Untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan berbagai upaya dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
  - a. Melakukan pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah secara kontinu.
  - b. Meningkatkan kerjasama dengan mitra samsat yaitu kepolisian dan jasa raharja.
  - c. Melaksanakan Operasi Gabungan (OPGAB) untuk menjaring kendaraan luar daerah dan kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) bekerjasama dengan Pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan.
  - d. Melakukan sosialisasi dan penagihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak/Masyarakat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota.
  - e. Mengusulkan kepada pemerintah pusat tentang kebijakan NJKB didasarkan pada kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
  - f. Melakukan inovasi berupa penerapan aplikasi e-Samsat, pendataan kendaraan luar daerah secara online, penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, Samsat Nonstop Service 24/7 dengan menambah sentra layanan dan jam layanan wajib pajak, pemutakhiran data melalui aplikasi Agent Samsat, pembuatan aplikasi retribusi online dan inovasi dalam integrasi data sistem/database kendaraan dengan kepolisian, e-STS, serta penerapan aplikasi si Paper.
  - g. Menyediakan sarana informasi dan pengaduan pelayanan pajak daerah melalui call center 1500-186.
  - h. Menambah sentra layanan samsat keliling guna lebih mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak daerah.



- i. Menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
  - j. Memberikan insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah.
  - k. Melakukan pendataan dan pemutakhiran terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
  - l. Melakukan inventarisasi terhadap aset-aset daerah yang potensial untuk dijadikan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi pelaksanaan perda yang berkaitan dengan retribusi dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang penerimaannya dikelola oleh masing-masing OPD penghasil retribusi dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
  - m. Melaksanakan rapat koordinasi/evaluasi realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan OPD pemungut Pendapatan Daerah setiap triwulan dan semester.
  - n. Sosialisasi Regulasi yang terkait dengan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah.
  - o. Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan melalui penetapan Peraturan daerah tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
2. Upaya Meningkatkan Pendapatan Dana Perimbangan sebagai berikut:
- a. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, dengan terus memperhatikan penegasan variable/komponen yang berpengaruh terhadap perhitungan jumlah DAU dan DAK.
  - b. Meningkatkan penggalian sumber pendapatan potensial seperti Cukai Tembakau.
  - c. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka pemenuhan pertanggungjawaban sebagai persyaratan pengajuan/pencairan DAU/DAK.
  - d. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat, perangkat daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap pelaksanaan (KSWP) Konfirmasi Status Wajib Pajak, NPWP yang tercatat pada KPP Pratama dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pertukaran data dan informasi perpajakan, serta kerja sama perpajakan.
3. Upaya meningkatkan penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal penanggulangan bencana yang terjadi di wilayah NTB.





- b. Meningkatkan kinerja pemerintahan agar dapat memenuhi kriteria penilaian pemberian Dana Insentif Daerah.
- c. Melakukan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait pemberian hibah, baik dari kalangan pemerintah, dunia usaha/swasta maupun kelompok masyarakat/perorangan.

Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan sosial dasar, pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis produk unggulan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup, serta pembangunan infrastruktur wilayah guna mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Oleh karena itu kebijakan umum Belanja Daerah diarahkan untuk:

1. Belanja pegawai yang terdiri atas belanja tidak langsung yaitu untuk kebutuhan pembayaran gaji pokok dan tunjangan PNSD dengan memperhitungkan kenaikan gaji dan kebutuhan pengangkatan CPNSD sesuai formasi pegawai serta biaya kegiatan aparatur dibidang pelayanan yang diarahkan secara lebih efektif dan efisien;
2. Mengalokasikan belanja hibah dan bantuan sosial pada komponen belanja tidak langsung sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam menutupi kesenjangan fiskal anggaran dan aspek keadilan serta pemerataan;
3. Pengalokasian anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD;
4. Berupaya mengalokasikan anggaran dalam rangka peningkatan bidang kesehatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Meningkatkan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan upaya pengentasan kemiskinan;
6. Melanjutkan program percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan program unggulan lainnya.
7. Memberdayakan masyarakat di daerah penghasil tembakau. Pemberdayaan menyangkut penyediaan sarana prasarana pendukung bagi pengembangan



ekonomi lokal, peningkatan keterampilan, dukungan usaha ekonomi produktif, maupun penyediaan infrastruktur strategis.



**Tabel 3-1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi APBD Provinsi NTB Tahun 2015-2019**

No	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>3.448.585.631.903,26</b>	<b>3.949.996.798.342,97</b>	<b>5.083.156.004.900,00</b>	<b>4.941.246.974.628,53</b>	<b>5.197.727.488.242,00</b>	<b>11,41</b>
1.1	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	1.372.661.567.125,26	1.359.844.019.437,97	1.684.468.709.594,00	1.660.417.707.372,53	1.807.482.745.855,00	7,59
1.1.1	Pajak Daerah	1.010.655.242.476,00	1.003.260.953.668,00	1.180.802.224.047,00	1.269.688.670.076,00	1.404.964.803.251,00	8,79
1.1.2	Retribusi Daerah	24.357.011.304,86	29.792.038.549,00	23.086.112.714,00	21.271.223.932,00	21.480.849.525,00	(1,77)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	63.229.181.808,00	72.827.611.744,00	163.852.468.137,34	60.080.960.355,96	54.173.704.673,00	16,75
1.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	274.420.131.536,40	253.963.415.476,97	316.727.904.695,66	309.376.853.008,57	326.863.388.406,00	5,15
1.2	<i>Dana Perimbangan</i>	1.450.695.264.778,00	2.583.032.589.905,00	3.268.927.294.306,00	3.212.386.689.010,00	3.342.865.637.337,00	26,74
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	147.804.397.778,00	375.036.424.549,00	346.522.444.956,00	261.642.853.635,00	185.324.795.600,00	23,12
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.088.633.717.000,00	1.117.691.709.000,00	1.537.777.886.000,00	1.537.777.886.000,00	1.583.746.053.000,00	10,81
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	214.257.150.000,00	1.090.304.456.356,00	1.384.626.963.350,00	1.412.965.949.375,00	1.573.794.788.737,00	112,33
1.3	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>	625.228.800.000,00	7.120.189.000,00	129.760.001.000,00	68.442.578.246,00	47.379.105.050,00	386,38
1.3.1	Hibah	1.732.499.000,00	2.120.189.000,00	76.365.690.000,00	9.904.037.246,00	6.425.218.712,00	850,51
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	623.496.301.000,00	5.000.000.000,00	53.394.311.000,00	27.250.000.000,00	36.346.428.000,00	213,28
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	31.288.541.000,00	4.607.458.338,00	(21,32)
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>3.364.903.671.428,20</b>	<b>3.764.301.951.074,96</b>	<b>5.255.320.273.857,03</b>	<b>5.239.531.399.449,77</b>	<b>5.148.158.519.514,76</b>	<b>12,36</b>
2.1	<i>Belanja Tidak Langsung</i>	1.731.408.033.202,92	2.045.647.935.181,70	2.663.297.585.722,04	2.861.893.961.566,31	2.992.635.105.936,33	15,09
2.1.1	Belanja Pegawai	564.302.754.376,00	584.640.988.439,00	1.283.112.911.988,00	1.340.751.878.830,00	1.388.742.692.618,00	32,79
2.1.4	Belanja Hibah	686.038.527.474,50	948.694.822.830,50	807.739.298.656,00	930.954.905.302,44	812.560.485.514,00	6,49



No	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	30.622.895.000,00	32.734.210.000,00	11.313.280.000,00	14.970.080.000,00	15.362.173.000,00	(5,90)
2.1.6	Balanza Bagi Hasil	435.441.045.994,50	462.284.296.488,60	556.232.887.480,00	566.734.579.248,00	757.335.712.518,00	15,50
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	12.762.277.857,92	13.234.649.649,60	4.871.050.919,04	4.042.939.120,00	15.276.124.100,00	50,34
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.240.532.500,00	4.058.967.774,00	28.156.679,00	4.439.579.065,87	3.357.918.186,33	3.906,23
2.2	<i>Belanja Langsung</i>	<i>1.633.495.638.225,28</i>	<i>1.718.654.015.893,26</i>	<i>2.592.022.688.134,99</i>	<i>2.377.637.437.883,46</i>	<i>2.155.523.413.578,43</i>	<i>9,60</i>
2.2.1	Belanja Pegawai	121.707.586.560,37	133.270.478.032,00	164.386.775.010,00	171.673.819.767,00	184.231.670.522,00	11,15
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	677.203.972.515,91	888.701.892.603,15	1.274.154.640.409,82	1.314.076.571.776,77	1.301.586.589.461,43	19,20
2.2.3	Belanja Modal	834.584.079.149,00	696.681.645.258,11	1.153.481.272.715,17	891.887.046.339,69	669.705.153.595,00	0,36
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>						
3.1	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	<i>198.747.834.968,69</i>	<i>198.662.806.056,75</i>	<i>445.343.917.680,76</i>	<i>393.404.057.274,73</i>	<i>95.360.252.975,39</i>	<i>9,18</i>
3.2	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	<i>85.675.203.000,00</i>	<i>46.004.045.967,00</i>	<i>20.000.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(50,71)</i>

Sumber: TAPD, 2015 – 2019.



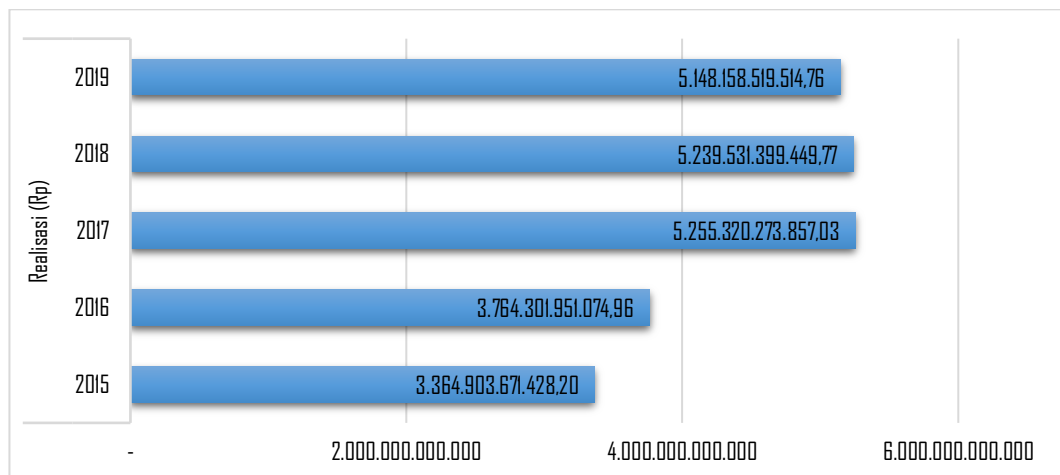


### 3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan cara menerapkan pelayanan prima pada unit perangkat daerah pengelola sumber pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah serta berupaya untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber penerimaan daerah.

Dengan meningkatnya penerimaan daerah maka ketergantungan pada pemerintah pusat akan lebih kecil, kualitas potensi ekonomi wilayah menjadi lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu peningkatan penerimaan daerah dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta meningkatkan sumber daya manusia yang mempertimbangkan sensitivitas gender dan pranata sosial.

Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan, serta penerapan pelayanan prima pada unit pengelola melalui upaya penggalian dan pengembangan sumber penerimaan daerah, serta penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah.



Sumber: Bappenda Provinsi NTB.

Gambar 3-1 Realisasi APBD Provinsi NTB Tahun 2015-2019

Realisasi penerimaan pendapatan daerah Provinsi NTB pada kurun waktu 2015-2019 menunjukkan pertumbuhan yang positif, rata-rata pertumbuhan dalam rentang waktu 2015-2019 sebesar 11,41 persen. Pada tahun 2015 realisasi



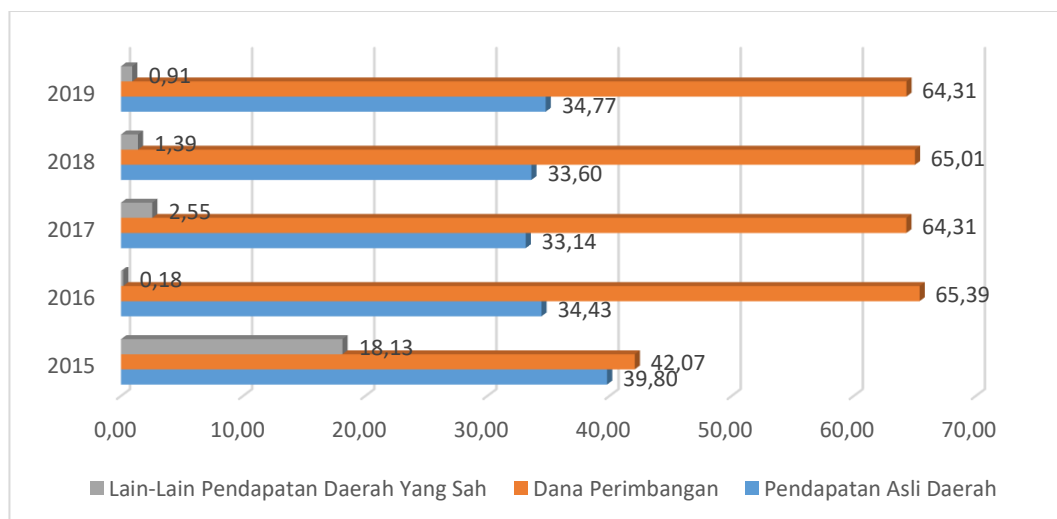
pendapatan daerah sebesar Rp 3,45 Trilyun kemudian terus meningkat hingga mencapai angka Rp 5,19 Trilyun pada tahun 2019.

Tabel 3-2 Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2015 – 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
PAD	39,80	34,43	33,14	33,60	34,77
Dana Perimbangan	42,07	65,39	64,31	65,01	64,31
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	18,13	0,18	2,55	1,39	0,91
<b>TOTAL</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Bappenda Provinsi NTB, 2015-2019.

Pada tahun 2015-2019 komponen pendapatan daerah yang memberikan porsi paling tinggi adalah pos dana perimbangan mencapai 64,31 persen.



Sumber: Bappenda Provinsi NTB, 2015-2019.

Gambar 3-2 Perkembangan Realisasi Kontribusi Pos Pendapatan terhadap Total Pendapatan Tahun 2015-2019

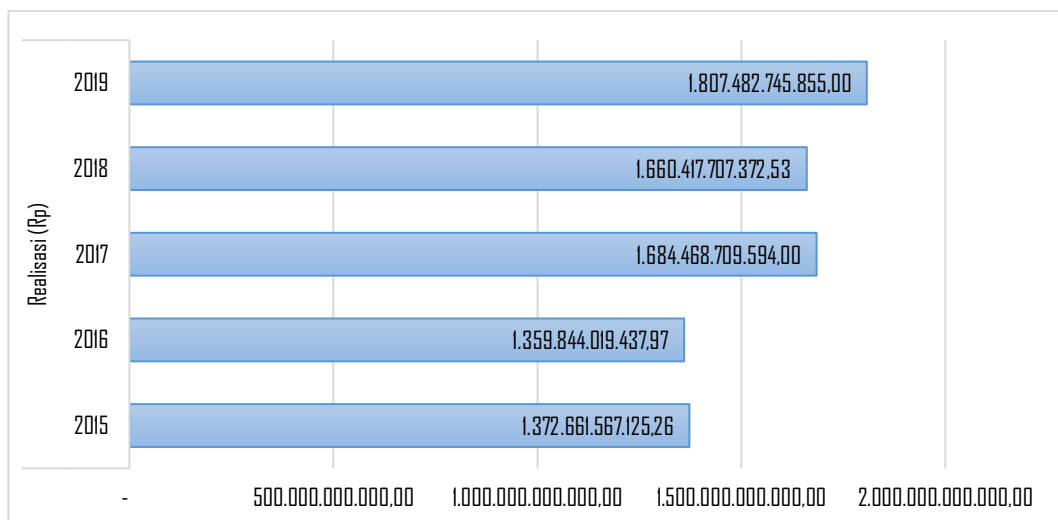
Gambar di atas dapat menggambarkan struktur pendapatan daerah Provinsi NTB masih sangat tergantung kepada dana yang bersumber dari dana perimbangan. Kontribusi pos PAD masih cukup minim yaitu berkisar pada angka 35-40 persen dari total pendapatan daerah. Permasalahan yang terjadi adalah kontribusi PAD yang cenderung menurun pada lima tahun terakhir yaitu dari 39,80 persen pada tahun 2015 hingga menjadi 34,77 persen pada tahun 2019.

Berikut ini gambaran kondisi pos-pos pendapatan daerah Provinsi NTB tahun 2015-2019



## A. Pendapatan Asli Daerah

Salah satu komponen pendapatan daerah yang digunakan untuk mengukur kemampuan fiskal daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dipungut oleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dalam menetapkan target PAD, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat senantiasa memperhatikan estimasi dasar, peningkatan cakupan, pertumbuhan penduduk, kenaikan pendapatan riil per kapita, inflasi, perubahan tarif, pembangunan baru dan perubahan peraturan. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: 1) Pendapatan Pajak Daerah, 2) Hasil Retribusi Daerah, 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.



Sumber: Bappenda Provinsi NTB, 2015-2019..

Gambar 3-3 Perkembangan Realisasi PAD Provinsi NTB Tahun 2015-2019

Gambar di atas menunjukkan adanya peningkatan realisasi penerimaan PAD Provinsi NTB pada lima tahun terakhir, meskipun secara kontribusi menunjukkan tren yang meningkat secara jumlah, nilai realisasi PAD terus menunjukkan peningkatan dan peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2017. Rata-rata pertumbuhan pos PAD pada tahun 2015-2019 sebesar 7,59 persen. Pada tahun 2015, realisasi PAD sebesar Rp 1.372,66 Milyar dan pada tahun 2017 berhasil mencapai angka Rp 1.807,48 Milyar.



Tabel 3-3 Proporsi Realisasi Komponen PAD Terhadap Total PAD Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pajak Daerah	73,63	73,78	70,10	76,47	77,73
Retribusi Daerah	1,77	2,19	1,37	1,28	1,19
Hasil Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	4,61	5,36	9,73	3,62	3,00
Lian-Lain PAD yang sah	19,99	18,68	18,80	18,63	18,08
<b>TOTAL</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Bappenda Provinsi NTB, 2015-2019.

Pajak daerah masih menjadi pos dengan kontribusi unggulan dalam penerimaan PAD Provinsi NTB tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 kontribusi pajak daerah mencapai 73,63 persen, pada tahun 2019 menjadi 77,73 persen. Perlu adanya analisis potensi PAD yang bisa digali untuk meningkatkan penerimaan PAD tanpa membebani perekonomian secara berat.

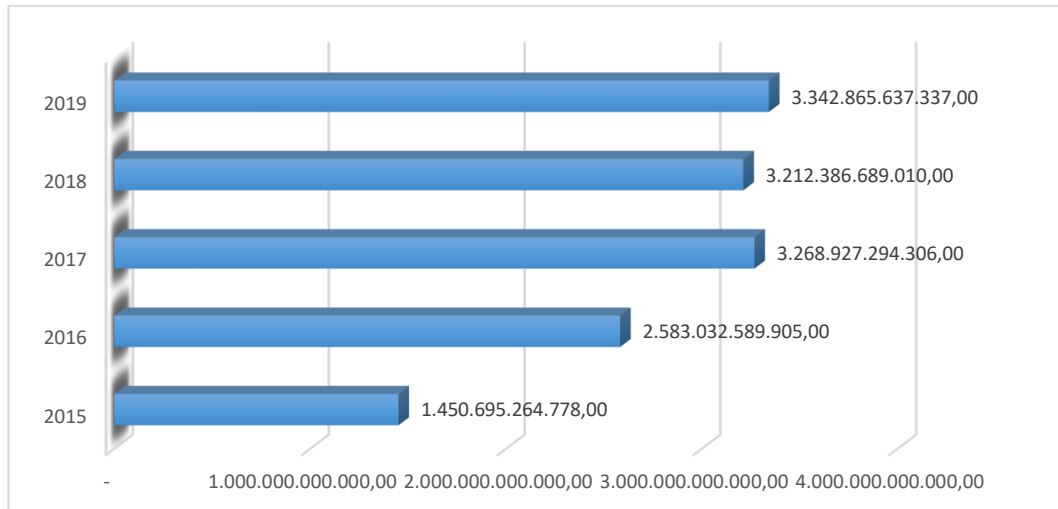
Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan pos PAD paling tinggi pada tahun 2015-2019 ditempati oleh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan rata-rata pertumbuhan 16,75 persen diikuti oleh pajak daerah sebesar 8,79 persen, dan lain-lain PAD yang sah sebesar 5,15 persen. Retribusi daerah menunjukkan rata-rata pertumbuhan terendah dengan -1,77 persen.

## B. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan Pendapatan Pemerintah Daerah yang dialokasikan dari dana APBN ke APBD untuk menunjang program Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari: 1) Bagi Hasil Pajak, 2) Bagi Hasil Bukan Pajak, 3) Dana Alokasi Umum (DAU) dan 4) Dana Alokasi Khusus (DAK).

Rata-rata pertumbuhan penerimaan pos dana perimbangan pada kurun waktu 2015-2019 sebesar 26,74 persen masih diatas rata-rata pertumbuhan penerimaan PAD. Jadi selain secara porsi penerimaan adalah yang terbesar, secara pertumbuhan pun menunjukkan progres yang paling baik. Berikut ini pertumbuhan penerimaan dana perimbangan tahun 2015-2019.





Sumber: Bappenda Provinsi NTB, 2015-2019.

Gambar 3-4 Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Provinsi NTB Tahun 2015-2019

Dari gambar di atas terlihat bahwa ada pertumbuhan yang sangat tinggi pada tahun 2016 dan 2017, hal ini tidak bisa dikaitkan dengan wilayah nusa tenggara sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2015-2019, sehingga dana dari pemerintah pusat baik dalam bentuk DAK maupun DAU semakin besar.

Tabel 3-4 Proporsi Realisasi Komponen Dana Perimbangan Terhadap Total Dana Perimbangan Tahun 2015 – 2019

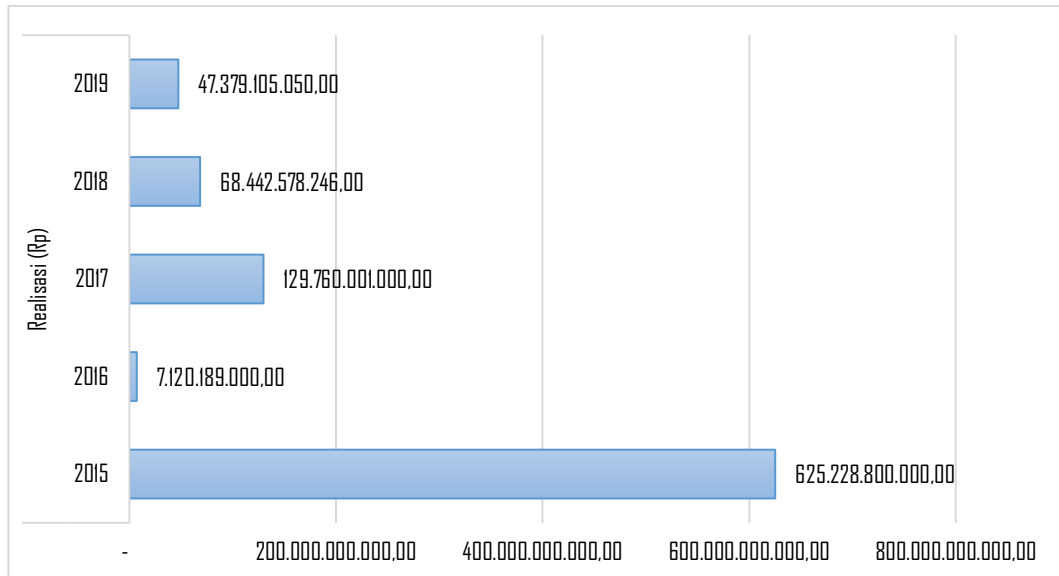
Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	10,19	14,52	10,60	8,14	5,54
Dana Alokasi Umum	75,04	43,27	47,04	47,87	47,38
Dana Alokasi Khusus	14,77	42,21	42,36	43,98	47,08
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Bappenda Provinsi NTB, 2015-2019.

Pada kurun waktu tahun 2015-2019 pos dengan kontribusi paling besar adalah pos DAU.

### C. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari: (1) Pendapatan Hibah dan (2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Berikut ini perkembangan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2015 – 2019.



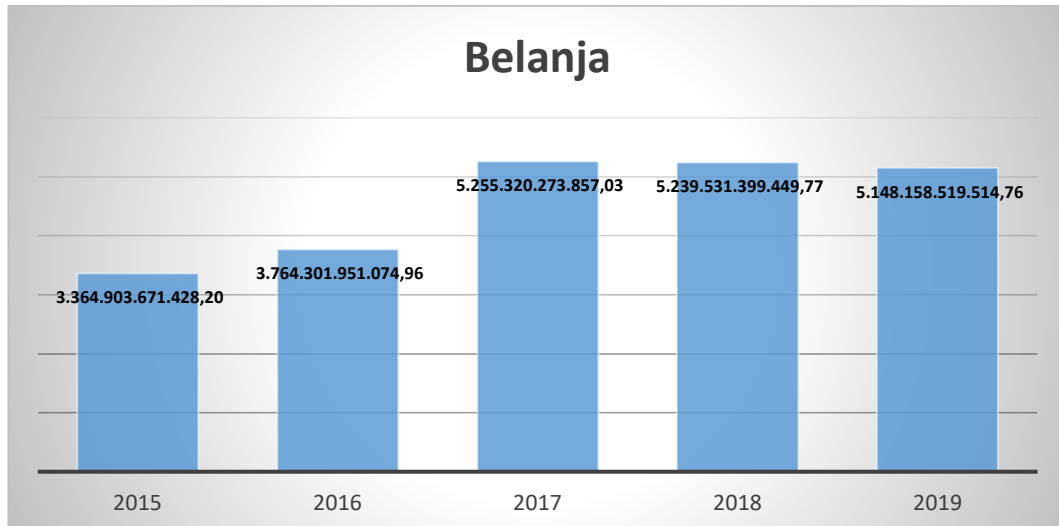
Sumber: Bappenda Provinsi NTB, 2015-2019.

Gambar 3-5 Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Provinsi NTB Tahun 2015-2019

Penerimaan daerah dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah secara tren menunjukkan tren yang menurun, hal ini terlihat dari gambar di atas. Pada tahun 2015 realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 625,23 milyar sedangkan pada tahun 2019 hanya Rp 47,38 milyar.

### 3.1.1.2. Belanja Daerah

Pada struktur APBD, anggaran belanja diklasifikasi dalam dua kelompok belanja yaitu Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Kelompok BTL terdiri dari beberapa obyek belanja yaitu: Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupate/Kota dan Pemerintah Desa dan Parpol dan Belanja Tak Terduga. Untuk BL terdiri dari beberapa obyek belanja yaitu : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.



Sumber: BPKAD Provinsi NTB, 2015-2019.

Gambar 3-6 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun 2015-2019

Rata-rata pertumbuhan belanja daerah Provinsi NTB pada tahun 2015-2019 sebesar 12,36 persen angka ini berada di atas nilai rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah yang berada pada angka 11,41 persen. Hal ini terlihat dari gambar di atas yang menunjukkan adanya peningkatan belanja daerah sampai tahun 2017, pada tahun 2018 dan 2019 sedikit mengalami penurunan.

Tabel 3-5 Proporsi Realisasi Komponen Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2015 – 2020

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Belanja Tidak Langsung	51,45	54,34	50,68	54,62	58,13
Belanja Langsung	48,55	45,66	49,32	45,38	41,87
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPKAD Provinsi NTB, 2015-2019.

Pada kurun waktu 2015-2019, belanja daerah lebih banyak dihabiskan untuk belanja tidak langsung dengan kecenderungan meningkat sampai tahun 2019. Pada tahun 2015, porsi BTL terhadap total belanja mencapai 51,45 persen, kemudian meningkat menjadi 58,13 persen pada tahun 2019.

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Provinsi Nusa Tenggara Barat ditampilkan pada tabel sebagai berikut.



Tabel 3-6 Analisis Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(Rp)	(Rp)	
		(a)	(b)	(a)/(b)x100 %
1	Tahun 2015	736.568.252.961,80	3.450.578.874.428,20	21,35
2	Tahun 2016	758.548.099.997,98	3.810.305.997.041,96	19,91
3	Tahun 2017	1.532.002.939.871,34	5.275.320.273.857,03	29,04
4	Tahun 2018	1.579.311.626.950,00	5.239.531.399.449,77	30,14
5	Tahun 2019	1.674.387.001.608,81	5.148.158.519.514,76	32,52

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2015-2019.

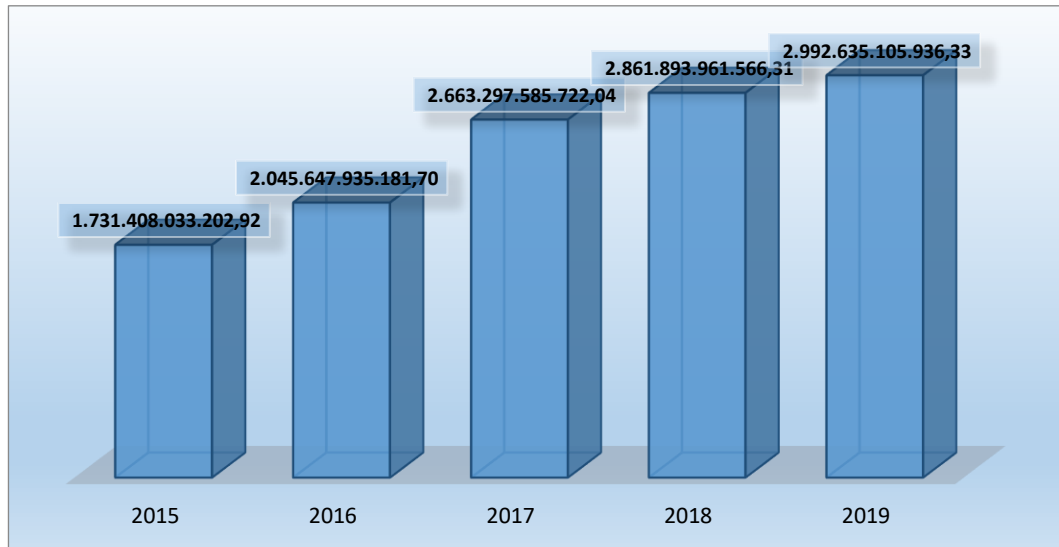
Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, tahun 2015 persentasenya sebesar 21,35 persen dan tahun 2016 sebesar 19,91 persen. Pada tahun 2019 persentasenya meningkat menjadi sebesar 32,52 persen, namun dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih besar dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dapat dilihat pada tabel berikut:

#### A. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Belanja Tidak Langsung (BTL) adalah belanja yang tidak berkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan pemerintah. Belanja Tidak Langsung Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015 - 2019 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti yang digambarkan pada gambar berikut:





Sumber: BPKAD Provinsi NTB, 2015-2019.

Gambar 3-7 Perkembangan Realisasi BTL Provinsi NTB Tahun 2015-2019

Gambar di atas menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran daerah untuk BTL, pada tahun 2015 jumlah BTL yang dibelanjakan sebesar Rp 1,73 Trilyun kemudian terus meningkat hingga mencapai Rp 2,99 Trilyun pada tahun 2019. Berikut ini porsi BTL untuk setiap pos.

Tabel 3-7 Proporsi Realisasi Komponen BTL Terhadap Total BTL  
Tahun 2015 – 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Belanja Pegawai	32,59	28,58	48,18	46,85	46,41
Belanja Hibah	39,62	46,38	30,33	32,53	27,15
Belanja Bantuan Sosial	1,77	1,60	0,42	0,52	0,51
Belanja Bagi Hasil	25,15	22,60	20,89	19,80	25,31
Belanja Bantuan Keuangan	0,74	0,65	0,18	0,14	0,51
Belanja Tidak Terduga	0,13	0,20	0,00	0,16	0,11
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPKAD Provinsi NTB, 2015-2019.



Tabel 3-8 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.012.506.078.228,42</b>	<b>1.060.159.934.577,20</b>	<b>1.844.216.850.387,04</b>	<b>1.911.529.397.198,00</b>	<b>2.161.354.529.236,00</b>	<b>23,85</b>
1	Belanja Pegawai	564.302.754.376,00	584.640.988.439,00	1.283.112.911.988,00	1.340.751.878.830,00	1.388.742.692.618,00	32,79
2	Belanja Bagi Hasil	435.441.045.994,50	462.284.296.488,60	556.232.887.480,00	566.734.579.248,00	757.335.712.518,00	15,50
3	Belanja Bantuan Keuangan	12.762.277.857,92	13.234.649.649,60	4.871.050.919,04	4.042.939.120,00	15.276.124.100,00	50,34
<b>B</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>85.675.203.000,00</b>	<b>46.004.045.967,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(50,71)</b>
	<b>Total A + B</b>	<b>1.098.181.281.228,42</b>	<b>1.106.163.980.544,20</b>	<b>1.864.216.850.387,04</b>	<b>1.911.529.397.198,00</b>	<b>2.161.354.529.236,00</b>	<b>21,22</b>



Rincian Belanja Tidak Langsung Provinsi NTB terdiri dari: (1) Belanja Pegawai dan Tunjangan; (2) Belanja Hibah; (3) Belanja Bantuan sosial; (4) Belanja Bagi Hasil; (5) Belanja Bantuan Keuangan; dan (6) Belanja Tak Terduga. Realisasi rincian BTL Tahun 2015 - 2019 dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2015 sampai 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan Belanja Pegawai disebabkan adanya penambahan kuantitas pegawai dan kenaikan gaji berkala serta kenaikan pangkat pegawai. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2016 mencapai 119,47 persen disebabkan oleh peralihan urusan dari pemerintah kab/kota ke pemerintah provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut realisasi dari tahun 2015-2019 proporsi belanja pegawai terhadap belanja tidak langsung sebesar 46,41 persen.

2. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2015 sampai Tahun 2019 mengalami fluktuasi yang beragam. Belanja hibah ini merupakan belanja dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat/kelompok/lembaga/pemerintah lainnya berdasarkan usulan proposal dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah sehingga baik anggaran maupun realisasinya sangat berfluktuasi. Khusus untuk tahun 2017 penurunan realisasi belanja hibah juga dipengaruhi oleh adanya perpindahan Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota dari Belanja Tidak Langsung menjadi Belanja Langsung. Perpindahan tersebut seiring dengan perpindahan urusan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut realisasi dari tahun 2015-2019 proporsi belanja hibah terhadap belanja tidak langsung sebesar 27,15 persen.

3. Belanja Bantuan Sosial.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2015-2019 cenderung menurun. Belanja Bantuan sosial merupakan belanja yang dianggarkan untuk masyarakat yang memiliki resiko sosial. Penurunan Belanja Bantuan Sosial dipengaruhi oleh kelengkapan administrasi sebagai dasar pencairan proposal masih belum lengkap. Menurut realisasi dari tahun 2015-2019 proporsi belanja bantuan sosial terhadap belanja tidak langsung sebesar 0,51 persen.

4. Belanja Bagi Hasil

Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa pada tahun 2015-2019 cenderung. Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa ini sangat dipengaruhi oleh



besarnya pendapatan daerah yang secara regulasi ada bagian yang menjadi hak Kabupaten/Kota.

5. Belanja Bantuan Keuangan.

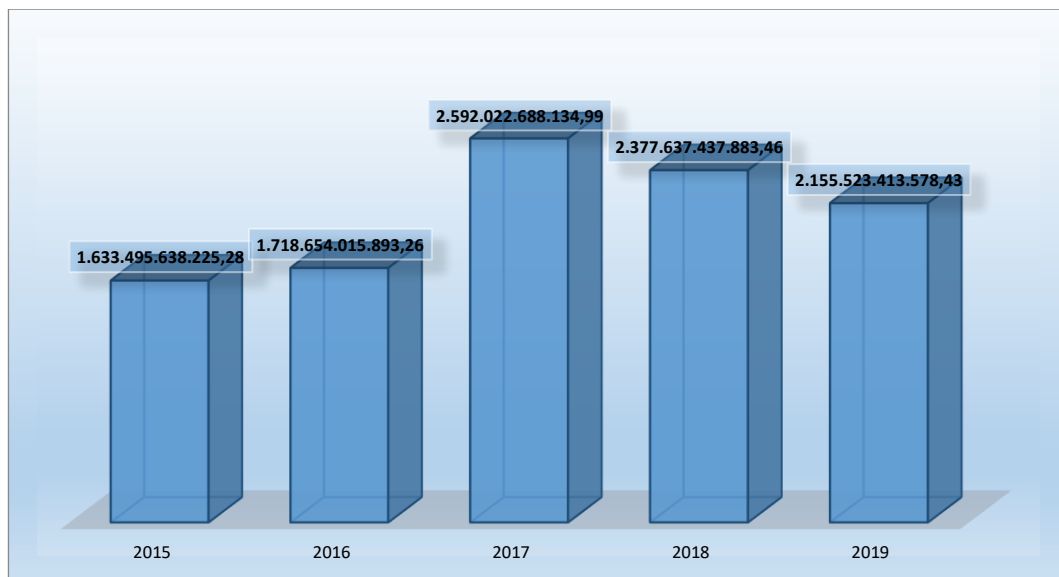
Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintah Desa dan Partai Politik setiap tahunnya sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah dan juga sering disebabkan belum lengkapnya dokumen administrasi yang diajukan oleh pemohon sebagai syarat pencairan anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik.

6. Belanja Tidak Terduga.

Belanja Tak Terduga dianggarkan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun tahun sebelumnya sehingga realisasi sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi.

**B. Belanja Langsung (BL)**

Belanja Langsung (BL) adalah belanja yang berkaitan langsung dengan program dan kegiatan pemerintah artinya belanja tersebut langsung berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi yang telah ditetapkan. Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015 - 2019 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti yang digambarkan pada tabel berikut:



Sumber: BPKAD Provinsi NTB, 2015-2019.

Gambar 3-8 Perkembangan Realisasi Belanja Langsung Provinsi NTB Tahun 2015-2019





Pada kurun waktu 2015-2019 rata-rata pertumbuhan realisasi BL Provinsi NTB sebesar 9,60 persen, angka ini lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata BTL yaitu sebesar 15,09 persen. Pertumbuhan BL menunjukkan tren positif dimana terus meningkat setiap tahunnya selama tahun 2015-2017. Pada tahun 2017-2019 cenderung menurun, tetapi nilai realisasi BL pada tahun 2019 sebesar 2,15 Trilyun masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 1,63 Trilyun.

Tabel 3-9 Proporsi Realisasi Komponen BL Terhadap Total BL Tahun. 2015–2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Belanja Pegawai	7,45	7,75	6,34	7,22	8,55
Belanja Barang dan Jasa	41,46	51,71	49,16	55,27	60,38
Belanja Modal	51,09	40,54	44,50	37,51	31,07
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPKAD Provinsi NTB, 2015-2019.

Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal. Realisasi rincian BTL Tahun 2015 - 2019 dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada kelompok belanja langsung ini merupakan belanja honorarium/jasa yang berkaitan langsung dengan program/kegiatan pemerintah daerah. Menurut realisasi dari tahun 2015-2019 secara rata-rata komposisi belanja pegawai terhadap belanja langsung sebesar 7,46 persen.

2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada kelompok belanja langsung merupakan belanja pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan atau tidak memenuhi standar kapitalisasi sebagai aset tetap, serta belanja pemakaian jasa dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Dari tahun 2015-2019 realisasi belanja barang dan jasa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini dilakukan untuk memenuhi kebijakan pengelolaan belanja yang sudah ditetapkan antara lain, memenuhi belanja minimal bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan.

3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada kelompok Belanja Langsung ini merupakan belanja pengadaan dan/atau pembangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan atau memenuhi kriteria aset tetap guna mendukung operasional pemerintah daerah. Dari tahun 2015-2019 realisasi belanja barang dan jasa mengalami peningkatan setiap tahunnya dan



peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2017, hal ini disebabkan untuk melanjutkan program percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan program unggulan lainnya.

### 3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya Belanja Daerah dibandingkan dengan Pendapatan yang diperoleh, atau sebaliknya untuk memanfaatkan adanya surplus anggaran.

Jika APBD diperkirakan dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk giro/deposito, pembentukan dana cadangan maupun penyertaan modal, namun bila APBD diperkirakan dalam keadaan defisit maka kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu untuk menutupi defisit tersebut.

Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Realisasi pembiayaan daerah Provinsi NTB Tahun 2015-2019 di rinci sebagai berikut.

Tabel 3-10 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi NTB Tahun 2015-2019

No	Tahun	Penerimaan Pembiayaan Daerah	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Pembiayaan Netto
1	Tahun 2015	198.747.834.968,69	85.675.203.000,00	113.072.631.968,69
2	Tahun 2016	198.662.806.056,75	46.004.045.967,00	152.658.760.089,75
3	Tahun 2017	445.343.917.680,76	20.000.000.000,00	425.343.917.680,76
4	Tahun 2018	393.404.057.274,73	0,00	393.404.057.274,73
5	Tahun 2019	95.360.252.975,39	0,00	95.360.252.975,39

Sumber: BPKAD Provinsi NTB, 2015-2019.

Pembiayaan netto Provinsi NTB terus mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 jumlah pembiayaan netto tercatat sebesar Rp 95,36 Milyar. Berikut ini disajikan penghitungan penutup defisit riil anggaran pada periode 2015 sampai 2019.



Tabel 3-11 Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode Tahun 2015-2019

No	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Realisasi Pendapatan Daerah	3.448.585.631.903,26	3.949.996.798.342,97	5.083.156.004.900,00	4.941.246.974.628,53	5.197.727.488.242,00
	<i>Dikurangi Realisasi :</i>					
2	Belanja Daerah	3.364.903.671.428,20	3.764.301.951.074,96	5.255.320.273.857,03	5.239.531.399.449,77	5.148.158.519.514,76
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	85.675.203.000,00	46.004.045.967,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00
	Defisit Riil	(1.993.242.524,94)	139.690.801.301,01	(192.164.268.957,03)	(298.284.424.821,24)	49.568.968.727,24

Sumber: BPKAD Provinsi NTB, 2015-2019.

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

### 3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan tiga pos dalam pengelolaan keuangan di daerah yaitu kondisi aset, kewajiban dan ekuitas dana. Berikut ini kondisi pertumbuhan pos-pos neraca di Provinsi NTB tahun 2015-2019.



Tabel 3-12 Neraca dan Pertumbuhan Masing-Masing Pos Neraca Daerah Provinsi NTB Tahun 2015-2019

No	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	<b>A S E T</b>						
2	<b>ASET LANCAR</b>						
3	Kas di Kas Daerah	169.989.751.976,72	313.261.970.651,74	229.022.221.456,22	36.953.333.927,00	63.286.428.523,25	11,20
4	Kas di Bendahara Penerimaan	49.129.236,00	132.193.612,00	400,00	117.278.741,00	17.124.138,00	7.329.892,23
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	78.976.933,33	10.226.134,00	317.045.221,00	5.821.938,00	234.146.683,00	1.684,23
6	Kas di BLUD	26.769.190.086,93	25.127.571.796,92	23.712.460.267,41	56.338.174.947,49	54.932.564.440,13	30,83
7	Kas Dibendahara Dana BOS	0,00	0,00	257.356.533,00	2.013.423.400,85	26.458.805.517,00	474,12
8	Kas Lainnya	0,00	1.243.607,00	0,00	31.988.927,90	2.941.477.900,68	2.248,83
9	Investasi Jangka Pendek						
10	Piutang Pajak	135.345.723,00	122.852.294,00	94.979.451,00	109.214.564,00	108.753.997,00	(4,34)
11	Penyisihan Piutang Pajak	(56.494.570,35)	(67.810.968,15)	(71.061.315,80)	(66.389.389,47)	(61.820.326,32)	2,84
12	Piutang Pajak Netto	78.851.152,65	55.041.325,85	23.918.135,20	42.825.174,53	46.933.670,68	0,48
13	Piutang Retribusi	3.933.656.423,79	5.162.514.875,00	3.831.925.418,00	4.429.981.280,00	6.873.011.570,00	19,06
14	Penyisihan Piutang Retribusi	(289.994.175,58)	(774.193.601,33)	(467.436.710,68)	(692.648.487,43)	(925.984.453,90)	52,30
15	Piutang Retribusi Netto	3.643.662.248,21	4.388.321.273,67	3.364.488.707,32	3.737.332.792,57	5.947.027.116,10	16,83
16	Beban Dibayar Dimuka	30.496.245,16	66.157.849,00	81.964.082,42	79.916.156,58	79.123.043,67	34,33
17	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	77.234.295,00	77.234.295,00	77.234.295,00	77.234.295,00	77.234.295,00	0,00
18	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(77.174.295,00)	(77.234.295,00)	(77.234.295,00)	(77.234.295,00)	(77.234.295,00)	0,02
19	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25,00)
20	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	955.711.436,77	904.507.867,54	1.619.239.249,64	1.559.256.354,05	4.388.992.984,80	62,86
21	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(448.886.647,17)	(432.606.398,49)	(394.024.861,52)	(720.051.013,98)	(764.226.272,68)	19,08
22	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	506.824.789,60	471.901.469,05	1.225.214.388,12	839.205.340,07	3.624.766.712,12	113,29
23	Piutang Lainnya	58.512.947.740,50	138.987.480.550,33	77.106.921.429,33	28.175.290.952,33	57.403.196.793,33	33,32
26	Penyisihan Piutang Lainnya	(15.967.045.307,24)	(31.161.533.959,96)	(2.651.786.515,39)	(2.955.278.201,35)	(3.125.621.119,07)	5,22





No	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
27	Piutang Lainnya Netto	42.545.902.433,26	107.825.946.590,37	74.455.134.913,94	25.220.012.750,99	54.277.575.674,26	42,89
28	Persediaan	58.409.272.050,91	68.389.154.060,93	40.057.475.112,34	62.570.213.770,18	59.523.564.168,90	6,75
<b>29</b>	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>302.102.117.152,77</b>	<b>519.729.728.370,53</b>	<b>372.517.279.216,97</b>	<b>187.949.527.867,15</b>	<b>271.369.537.587,79</b>	<b>9,64</b>
<b>30</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>						
<b>31</b>	<b>Investasi Non Permanen</b>						
32	Investasi Dalam Proyek Pembangunan	109.490.813.500,00	109.490.813.500,00	0,00	0,00	0,00	(25,00)
33	Investasi Non Permanen Lainnya	25.573.765.715,27	20.901.349.462,32	14.819.880.930,80	12.422.506.136,50	6.498.560.114,57	(27,81)
<b>34</b>	<b>Jumlah Investasi Non Permanen</b>	<b>135.064.579.215,27</b>	<b>130.392.162.962,32</b>	<b>14.819.880.930,80</b>	<b>12.422.506.136,50</b>	<b>6.498.560.114,57</b>	<b>(38,99)</b>
<b>35</b>	<b>Investasi Permanen</b>						
36	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	875.425.292.639,28	924.796.908.697,79	946.608.062.759,92	830.644.812.061,27	855.891.203.402,01	(0,30)
40	Investasi Permanen Lainnya	2.164.000.000,00	980.000.000,00	980.000.000,00	980.000.000,00	980.000.000,00	(13,68)
<b>41</b>	<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>877.589.292.639,28</b>	<b>925.776.908.697,79</b>	<b>947.588.062.759,92</b>	<b>831.624.812.061,27</b>	<b>856.871.203.402,01</b>	<b>(0,34)</b>
<b>42</b>	<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>1.012.653.871.854,55</b>	<b>1.056.169.071.660,11</b>	<b>962.407.943.690,72</b>	<b>844.047.318.197,77</b>	<b>863.369.763.516,58</b>	<b>(3,65)</b>
<b>43</b>	<b>ASET TETAP</b>						
44	Tanah	6.503.420.596.720,31	6.668.735.175.180,31	6.684.720.127.529,40	5.853.773.562.106,54	5.856.430.575.092,54	(2,40)
45	Peralatan dan Mesin	487.957.933.756,56	648.387.669.377,63	1.054.914.301.431,29	1.252.115.399.569,48	1.623.571.859.431,35	35,98
46	Gedung dan Bangunan	858.183.997.174,13	1.071.042.515.386,14	1.815.385.324.379,30	1.925.831.565.234,46	2.484.059.078.429,06	32,34
47	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.067.717.786.033,65	3.383.516.320.813,65	3.483.662.307.891,40	3.269.256.931.947,39	4.637.128.525.433,01	12,23
48	Aset Tetap Lainnya	24.009.770.400,06	29.137.383.769,06	74.994.176.252,46	97.006.298.208,63	120.165.463.800,27	57,99
49	Konstruksi Dalam Pengerjaan	577.087.542.021,00	733.388.115.521,63	1.285.904.875.548,63	1.672.456.647.711,22	73.426.767.393,00	9,22
50	Akumulasi Penyusutan	(1.983.950.002.689,81)	(2.270.561.873.629,95)	(2.695.164.755.159,12)	(2.742.061.449.081,93)	(3.422.748.238.691,56)	14,93
<b>51</b>	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>9.534.427.623.415,90</b>	<b>10.263.645.306.418,50</b>	<b>11.704.416.357.873,40</b>	<b>11.328.378.955.695,80</b>	<b>11.372.034.030.887,70</b>	<b>4,71</b>
<b>52</b>	<b>ASET LAINNYA</b>						
59	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	17.282.509.860,00	17.282.509.860,00	118.169.459.860,00	118.169.459.860,00	121.077.954.720,00	146,55
60	Aset Tak Berwujud	767.303.941,67	4.001.303.771,66	6.064.514.570,00	6.946.107.029,00	7.693.506.229,00	124,58
61	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(37.072.750,00)	(2.879.569.142,91)	(3.620.202.661,00)	(4.522.258.724,00)	(5.550.936.876,00)	1.935,18
62	Aset Tak Berwujud Netto	730.231.191,67	1.121.734.628,75	2.444.311.909,00	2.423.848.305,00	2.142.569.353,00	39,77
63	Aset Lain-Lain	51.122.050.797,98	32.894.119.391,20	32.759.476.478,58	36.193.524.836,74	36.844.825.233,90	(5,95)



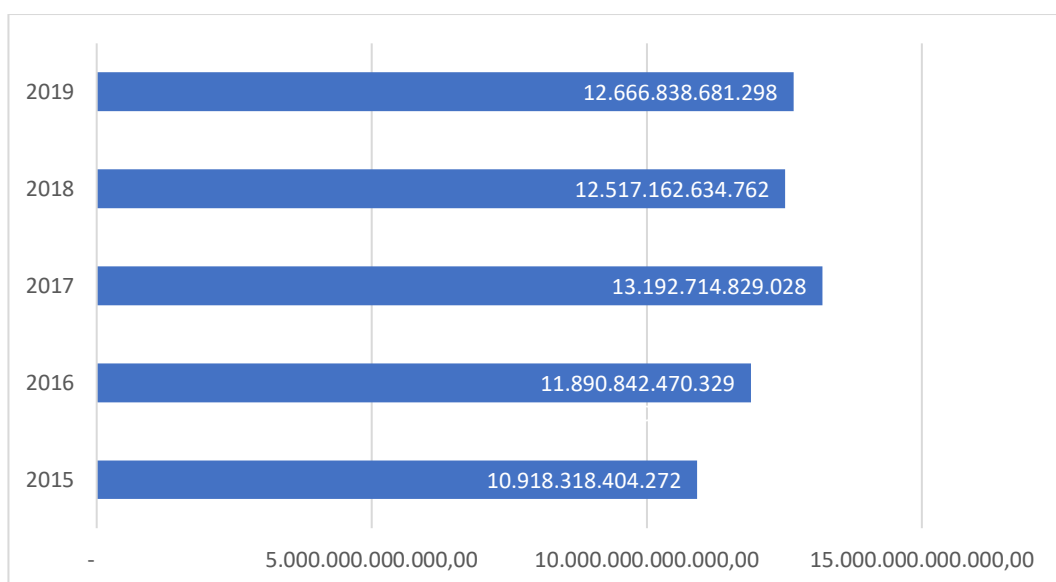
No	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
64	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>69.134.791.849,65</b>	<b>51.298.363.879,95</b>	<b>153.373.248.247,58</b>	<b>156.786.833.001,74</b>	<b>160.065.349.306,90</b>	<b>44,37</b>
65	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>10.918.318.404.272,90</b>	<b>11.890.842.470.329,10</b>	<b>13.192.714.829.028,60</b>	<b>12.517.162.634.762,50</b>	<b>12.666.838.681.298,90</b>	<b>3,98</b>
66	<b>KEWAJIBAN</b>						
67	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>						
68	Utang PFK	53.478.855,90	165.507.443,90	115.344.153,90	5.821.938,00	2.941.325.499,43	12.626,41
69	Pendapatan diterima dimuka	724.346.123,33	204.596.041,67	184.015.601,67	791.205.108,50	785.211.918,00	61,85
70	Utang Jangka Pendek Lainnya	131.293.648.491,60	123.665.316.256,98	139.530.338.846,30	193.478.699.507,83	50.638.386.185,99	(7,04)
71	Utang Beban	1.736.188.876,00	1.646.821.902,00	2.729.069.390,00	286.557.490,00	1.158.044.940,00	68,80
72	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>133.807.662.346,83</b>	<b>125.682.241.644,55</b>	<b>142.558.767.991,87</b>	<b>194.562.284.044,33</b>	<b>55.522.968.543,42</b>	<b>(6,91)</b>
73	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>133.807.662.346,83</b>	<b>125.682.241.644,55</b>	<b>142.558.767.991,87</b>	<b>194.562.284.044,33</b>	<b>55.522.968.543,42</b>	<b>(6,91)</b>
74	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>10.784.510.741.926,00</b>	<b>11.765.160.228.684,50</b>	<b>13.050.156.061.036,80</b>	<b>12.322.600.350.718,10</b>	<b>12.611.315.712.755,50</b>	<b>4,20</b>
75	<b>JUMLAH KEWAJIBAN &amp; EKUITAS</b>	<b>10.918.318.404.272,90</b>	<b>11.890.842.470.329,10</b>	<b>13.192.714.829.028,60</b>	<b>12.517.162.634.762,50</b>	<b>12.666.838.681.298,90</b>	<b>3,98</b>



Neraca atau laporan posisi keuangan menggambarkan tiga pos utama yaitu aset, kewajiban dan ekuitas daerah. Berikut ini gambaran umum Neraca Daerah Provinsi NTB yang disajikan menurut pos pembentuknya.

### 3.1.2.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi NTB sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diterima oleh pemerintah, dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Nilai aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi NTB pada kurun waktu 2015-2019 mengalami fluktuasi dan cenderung kearah yang positif, dengan rata-rata pertumbuhan dalam jangka waktu lima tahun terakhir sebesar 3,98 persen. Berikut ini gambar pertumbuhan aset yang dimiliki.



Sumber: BPKAD Provinsi NTB, 2015-2019.

Gambar 3-9 Perkembangan Aset Daerah Provinsi NTB Tahun 2015-2019

Dari gambar di atas secara umum terlihat bahwa aset daerah dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, nilai aset daerah pada tahun 2015 sebesar Rp10,91 Milyar kemudian berfluktuasi hingga mencapai angka Rp 13,19 Milyar pada tahun 2017, hal ini terjadi karena pelimpahan aset tetap dari Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi NTB akibat adanya pengalihan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi sebagai implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disamping fluktuasi nilai aset terjadi karena perlakuan akuntansi berbasis akrual



pada perhitungan nilai realisasi bersih piutang (*Net Realizable Value*), penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset lainnya serta fluktuasi saldo kas.

Tabel 3-13 Proporsi Pos Asset terhadap Total Asset Provinsi NTB  
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aset Lancar	2,77	4,37	2,82	1,50	2,14
Investasi Jangka Panjang	9,27	8,88	7,29	6,74	6,82
Aset Tetap	87,33	86,32	88,72	90,50	89,78
Aset Lainnya	0,63	0,43	1,16	1,25	1,26
<b>TOTAL</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPKAD Provinsi NTB, 2015-2019.

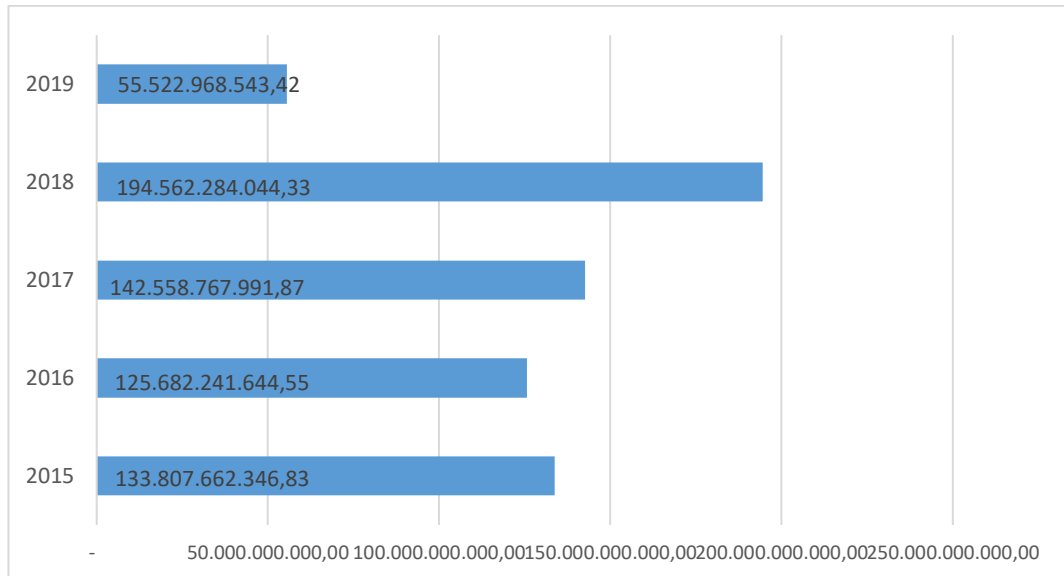
Asset daerah paling tinggi berbentuk aset tetap dengan persentase antara 86-91 persen dari total aset, diikuti oleh pos investasi jangka panjang dengan porsi antara 6-10 persen. Rata-rata pertumbuhan aset tetap selama lima tahun terakhir sebesar 4,71 persen.

Jenis aset tetap yang dimiliki oleh provinsi antara lain dalam bentuk: (1) Tanah; (2) Peralatan dan Mesin; (3) Gedung dan Bangunan; (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan; (5) Aset Tetap Lainnya; dan (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan, dengan proporsi yang paling besar pada Aset Tetap Tanah.

### 3.1.2.2. Kewajiban

Kewajiban yang dimiliki oleh Provinsi NTB pada tahun 2015-2019 adalah kewajiban jangka pendek, artinya adalah kewajiban yang jangka waktu penyelesaiannya maksimal satu periode atau satu tahun. Jenis kewajiban jangka pendek tersebut yaitu: (1) Utang PFK; (2) Pendapatan diterima dimuka; (3) Utang Jangka Pendek Lainnya; dan (4) Utang Beban.





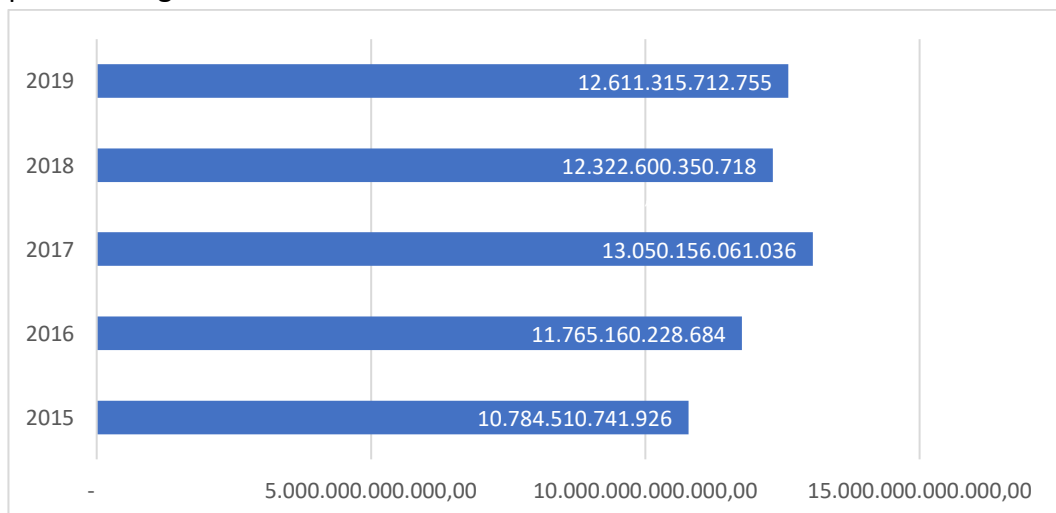
Sumber: BPKAD Provinsi NTB, 2015-2019.

Gambar 3-10 Perkembangan Asset Daerah Provinsi NTB Tahun 2015-2019

Melihat tren jumlah kewajiban Provinsi NTB mengalami fluktuasi dari tahun 2015 - 2019, pada tahun 2015 jumlah kewajiban sebesar Rp 133,81 Milyar, tertinggi pada tahun 2018 dengan nilai 194,56 Milyar, kemudian menurun mencapai 55,52 Milyar pada tahun 2019.

### 3.1.2.3. Ekuitas Dana

Jumlah Ekuitas Dana Provinsi NTB pada tahun 2015-2019 menunjukkan hal yang positif dan terus bertumbuh. Rata-rata pertumbuhan ekuitas daerah selama lima tahun terakhir tercatat sebesar 4,20% angka ini melebihi rata-rata pertumbuhan pos lain dalam neraca yaitu asset dan kewajiban. Berikut ini perkembangan ekuitas daerah tahun 2015-2019.



Sumber: BPKAD Provinsi NTB, 2015-2019.

Gambar 3-11 Perkembangan Ekuitas Dana Daerah Provinsi NTB Tahun 2015-2019



Dari gambar di atas terlihat bahwa ekuitas daerah Provinsi NTB pada lima tahun terakhir berfluktuasi namun cenderung menunjukkan tren yang meningkat. Ekuitas daerah pada tahun 2015 sebesar Rp 10,78 Milyar kemudian berfluktuasi hingga mencapai angka Rp 13,05 Milyar pada tahun 2017, hal ini terjadi karena pelimpahan aset tetap dari Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi NTB akibat adanya pengalihan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi sebagai implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang pada akhirnya berdampak kepada nilai ekuitas. Pos terbesar dalam ekuitas daerah berasal dari ekuitas dana investasi, pos ini terdiri dari ekuitas yang diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan).

### **3.2. Kebijakan Pengelolaan Masa Lalu**

Belanja daerah terutama untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan gaji berkala dan penyesuaian terhadap kenaikan pangkat dan golongan aparatur namun secara proporsi terhadap total pengeluaran daerah, proporsi belanja aparatur terus mengalami penurunan dari tahun 2013 mencapai 22,93 persen menjadi 18,84 persen pada tahun 2016. Seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur adanya sebagian yang selama ini merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota, mulai tahun 2017 beralih menjadi kewenangan pemerintah Provinsi antara lain: pendidikan menengah, bidang ESDM, bidang rehabilitasi penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, serta bidang ketenagakerjaan. Dengan beralihnya kewenangan tersebut membawa konsekuensi bagi pemerintah provinsi terutama bertambahnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencapai dua kali lipat dari jumlah ASN awal. Akibatnya, bertambahnya belanja aparatur pada tahun 2017 yang mengalami hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2016, dari Rp. 717,91 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp. 1,447 triliun pada tahun 2017. Begitu juga secara proporsi dari 18,84 persen tahun 2016 menjadi 27,44 persen pada tahun 2017.

### **3.3. Proyeksi Keuangan Tahun 2019-2023**

Berdasarkan tren yang terjadi pada lima tahun terakhir maka dapat disusun proyeksi APBD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Berikut ini hasil perhitungan proyeksi.



**Tabel 3-14 Tabel Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023  
(Struktur Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005)**

Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Realisasi (Rp)	Proyeksi (Rp)			
		2019	2020	2021	2022	2023
2	3	4	5	6	7	8
<b>PENDAPATAN</b>	<b>3,98</b>	<b>5.197.727.488.242,00</b>	<b>5.332.904.002.480,02</b>	<b>5.473.931.855.427,00</b>	<b>5.796.562.592.202,37</b>	<b>6.073.974.442.021,12</b>
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	6,82	1.807.482.745.855,00	1.816.566.221.254,02	1.954.341.221.233,00	2.142.803.205.187,63	2.347.637.227.782,60
Pajak Daerah	7,10	1.404.964.803.251,00	1.374.719.991.582,00	1.487.726.538.148,00	1.650.243.964.720,06	1.838.441.660.456,40
Retribusi Daerah	33,79	21.480.849.525,00	19.639.217.407,00	47.219.957.500,00	47.693.900.000,00	48.782.900.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,24	54.173.704.673,00	60.787.984.223,00	64.104.210.166,00	62.379.067.638,91	63.626.648.991,69
Lain-Lain PAD Yang Sah	5,07	326.863.388.406,00	361.419.028.042,02	355.290.515.419,00	382.486.272.828,66	396.786.018.334,52
<i>Dana Perimbangan</i>	1,93	3.342.865.637.337,00	3.432.811.113.817,00	3.394.625.397.000,00	3.536.977.032.620,21	3.606.156.042.959,20
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	19,06	185.324.795.600,00	344.269.555.817,00	211.656.697.000,00	268.897.463.170,28	274.156.105.210,39
Dana Alokasi Umum	0,08	1.583.746.053.000,00	1.484.527.774.000,00	1.524.501.604.000,00	1.554.002.234.539,00	1.584.396.964.244,35
Dana Alokasi Khusus	2,66	1.573.794.788.737,00	1.604.013.784.000,00	1.658.467.096.000,00	1.714.077.334.910,93	1.747.602.973.504,46
<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>	30,57	47.379.105.050,00	83.526.667.409,00	124.965.237.194,00	116.782.354.394,54	120.181.171.279,31
Pendapatan Hibah	346,79	6.425.218.712,00	3.545.736.259,00	54.780.903.944,00	45.239.884.111,82	47.239.401.820,33
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	26,72	36.346.428.000,00	78.318.844.900,00	68.522.247.000,00	69.848.221.001,70	71.214.382.356,27
Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Pemda Lainnya	-15,01	4.607.458.338,00	1.662.086.250,00	1.662.086.250,00	1.694.249.281,02	1.727.387.102,71
<b>BELANJA</b>	<b>4,27</b>	<b>5.148.158.519.514,76</b>	<b>5.396.490.431.003,27</b>	<b>5.528.931.855.427,00</b>	<b>5.806.562.592.202,37</b>	<b>6.083.974.442.021,11</b>
<i>Belanja Tidak Langsung</i>	3,99	2.992.635.105.936,33	3.319.614.285.793,32	3.621.168.535.227,00	3.283.596.373.908,57	3.457.309.057.427,65
Belanja Pegawai	4,61	1.388.742.692.618,00	1.441.832.453.562,46	1.507.993.945.344,00	1.595.120.166.191,16	1.662.679.672.556,20
Belanja Subsidi	124,25	0,00	318.000.000,00	1.631.860.720,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00



Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Realisasi (Rp)	Proyeksi (Rp)			
		2019	2020	2021	2022	2023
2	3	4	5	6	7	8
Belanja Hibah	8,25	812.560.485.514,00	897.383.831.511,00	1.396.221.410.359,00	867.984.388.830,36	909.596.166.303,17
Belanja Bantuan Sosial	21,79	15.362.173.000,00	19.661.040.000,00	8.921.876.600,00	19.073.550.000,00	19.073.550.000,00
Belanja Bagi Hasil	2,88	757.335.712.518,00	655.968.915.075,00	696.041.354.704,00	754.418.268.887,06	832.959.668.568,29
Belanja Bantuan Keuangan	1.963,16	15.276.124.100,00	358.087.500,00	358.087.500,00	29.000.000.000,00	15.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	2.227,31	3.357.918.186,33	304.091.958.144,86	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
<i>Belanja Langsung</i>	6,20	2.155.523.413.578,43	2.076.876.145.209,95	1.907.763.320.200,00	2.522.966.218.293,80	2.626.665.384.593,46
<b>PEMBIAYAAN</b>						
<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	-15,74	95.360.252.975,39	63.586.428.523,25	65.000.000.000,00	35.000.000.000,00	40.000.000.000,00
<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	42,50	0,00	0,00	10.000.000.000,00	25.000.000.000,00	30.000.000.000,00

Sumber : TAPD Provinsi NTB (diolah), 2020





Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Selanjutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan. Adapun dalam Tabel dibawah kami sajikan rata-rata pertumbuhan dan proyeksi pendapatan dan belanja Daerah Provinsi NTB berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019.



**Tabel 3-15 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun 2021-2023  
(Struktur Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019)**

Kode	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi		
			2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>5,34</b>	<b>5.473.931.855.427,00</b>	<b>5.796.562.592.202,38</b>	<b>6.073.974.442.021,11</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>9,60</b>	<b>1.954.341.221.233,00</b>	<b>2.142.803.205.187,63</b>	<b>2.347.637.227.782,60</b>
4.1.1	Pajak Daerah	11,16	1.487.726.538.148,00	1.650.243.964.720,06	1.838.441.660.456,40
4.1.2	Retribusi Daerah	1,64	47.219.957.500,00	47.693.900.000,00	48.782.900.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-0,35	64.104.210.166,00	62.379.067.638,91	63.626.648.991,69
4.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	5,70	355.290.515.419,00	382.486.272.828,66	396.786.018.334,52
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>3,05</b>	<b>3.464.809.730.250,00</b>	<b>3.608.519.502.902,93</b>	<b>3.679.097.812.418,17</b>
<b>4.2.1</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>3,05</b>	<b>3.463.147.644.000,00</b>	<b>3.606.825.253.621,91</b>	<b>3.677.370.425.315,46</b>
4.2.1.1	Dana Perimbangan	3,07	3.394.625.397.000,00	3.536.977.032.620,21	3.606.156.042.959,19
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	14,50	211.656.697.000,00	268.897.463.170,28	274.156.105.210,39
4.2.1.1.2	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)	1,95	1.524.501.604.000,00	1.554.002.234.539,00	1.584.396.964.244,35
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	1,95	417.655.234.000,00	425.737.280.433,13	434.064.275.901,13
4.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	2,89	1.240.811.862.000,00	1.288.340.054.477,80	1.313.538.697.603,33
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	1,95	68.522.247.000,00	69.848.221.001,70	71.214.382.356,27
<b>4.2.2</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.086.250,00</b>	<b>1.694.249.281,02</b>	<b>1.727.387.102,71</b>
4.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	1,95	1.662.086.250,00	1.694.249.281,02	1.727.387.102,71
<b>4.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>-6,50</b>	<b>54.780.903.944,00</b>	<b>45.239.884.111,82</b>	<b>47.239.401.820,33</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	-6,50	54.780.903.944,00	45.239.884.111,82	47.239.401.820,33
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>4,90</b>	<b>5.528.931.855.427,00</b>	<b>5.806.562.592.202,38</b>	<b>6.083.974.442.021,11</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>2,94</b>	<b>4.048.470.998.641,00</b>	<b>4.237.254.457.827,18</b>	<b>4.288.681.888.845,12</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	4,49	1.522.993.945.344,00	1.595.120.166.191,16	1.662.679.672.556,20
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	26,66	1.118.701.905.618,00	1.752.076.352.805,66	1.694.332.499.985,75
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Subsidi	41,92	1.631.860.720,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
5.1.5	Belanja Hibah	-16,52	1.396.221.410.359,00	867.984.388.830,36	909.596.166.303,17
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	56,89	8.921.876.600,00	19.073.550.000,00	19.073.550.000,00
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>10,27</b>	<b>774.061.414.582,00</b>	<b>770.889.865.488,14</b>	<b>932.332.884.607,71</b>

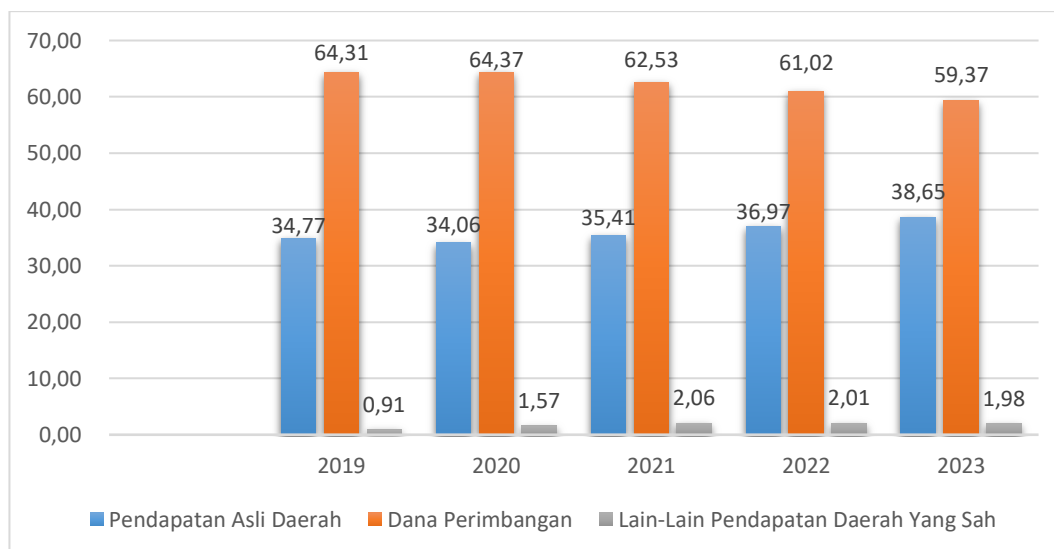


Kode	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi		
			2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
5.3	Belanja Tidak Terduga	25,00	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	25,00	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	10,37	696.399.442.204,00	783.418.268.887,06	847.959.668.568,29
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	9,40	696.041.354.704,00	754.418.268.887,06	832.959.668.568,29
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	3.975,15	358.087.500,00	29.000.000.000,00	15.000.000.000,00
	Surplus / (Defisit)	-40,91	-55.000.000.000,00	-10.000.000.000,00	-10.000.000.000,00
6	Pembiayaan	0,00			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	-15,93	65.000.000.000,00	35.000.000.000,00	40.000.000.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	85,00	10.000.000.000,00	25.000.000.000,00	30.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	-40,91	55.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	-0,00

Sumber : TAPD Provinsi NTB (diolah), 2020

### 3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Pada tahun 2019-2023, berdasarkan hasil proyeksi jumlah Pendapatan Daerah Provinsi NTB terus meningkat hingga mencapai angka Rp. 6,07 Trilyun. Dari jumlah tersebut, diperkirakan masih didominasi oleh penerimaan dari pos dana perimbangan yaitu di atas nilai 50 persen meskipun diperkirakan terus akan menunjukkan kecenderungan menurun.



Sumber: BPKAD Provinsi NTB (diolah)

Keterangan: Tahun 2019 adalah data realisasi APBD NTB 2019

Tahun 2020 adalah data Target Perubahan APBD 2020

Gambar 3-12 Proyeksi Kontribusi Pendapatan Daerah Provinsi NTB Menurut Komponen Tahun 2019-2023



Penerimaan PAD diproyeksikan meningkat yakni dari Rp 1,80 Triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 2,34 triliun pada tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan **6,82%** dimana pertumbuhan tertinggi pada tahun 2023 sebesar 9,56%. Penerimaan PAD kurang lebih sebesar 77% bersumber dari Pajak Daerah, 2% bersumber dari Retribusi Daerah, 3% bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan 18% bersumber dari penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah. Penerimaan Pajak Daerah tahun 2019 s.d 2023 diperkirakan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar **7,10%** meskipun sempat menurun pada tahun 2020 dimana Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang ditandai dengan penurunan pembelian kendaraan bermotor dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), penurunan volume penjualan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penerimaan Retribusi Daerah dari tahun 2019 s.d 2023 diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 33,79%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan juga diproyeksikan mengalami peningkatan penerimaan dengan rata-rata pertumbuhan dari tahun 2019 s.d 2023 sebesar 4,24%. Demikian pula dengan komponen PAD yang keempat yakni Lain-Lain PAD yang sah pada tahun 2019 s.d 2023 diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,07%.

Penerimaan Dana Perimbangan tahun 2019 s.d 2023 diproyeksikan meningkat dari Rp.3,34 Triliun pada tahun 2019 menjadi Rp.3,60 Triliun pada tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan 1,93%. Adapun bagian Dana Perimbangan yakni Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 19,06%, Dana Alokasi Khusus diproyeksikan meningkat pula dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,66%, Dana Alokasi Umum diproyeksikan meningkat dari tahun 2021 s.d 2023 meskipun sempat menurun pada tahun 2020 sebesar 6,26% akibat pandemi covid-19 sehingga rata-rata pertumbuhan DAU sebesar 2,19%.

Pada bagian Pendapatan Daerah yang terakhir yakni Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, penerimaan bagian ini pada tahun 2019 s.d 2023 diproyeksikan meningkat dari Rp.72,80 Milyar pada tahun 2019 menjadi Rp.120,18 Milyar pada tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 30,57%. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah terdiri dari pendapatan Hibah, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan yang ketiganya diproyeksikan meningkat meskipun pada komponen Bantuan Keuangan pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat penerimaan bantuan gempa dari pemerintah daerah lainnya pada tahun sebelumnya (tahun 2019).



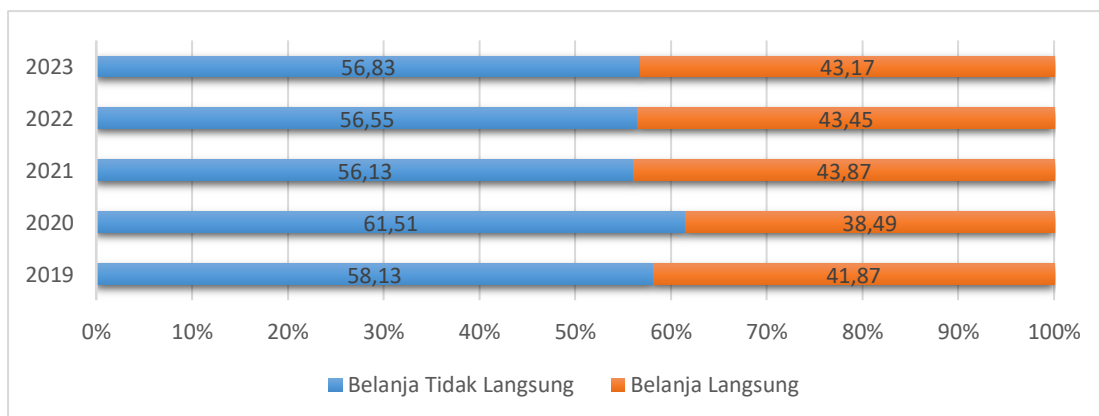


Dalam upaya pencapaian rencana Pendapatan Daerah diatas, beberapa langkah yang dilakukan antara lain:

1. Optimalisasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Daerah melalui Program unggulan E-Pendapatan yakni Digitalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah yang meliputi E-Samsat NTB, E-Ret, E-Perimbangan, E-BLUD dan E-BUMD;
2. Program strategis peningkatan penerimaan PAD yang melibatkan semua OPD/SKPD, seperti KIHT (Kawasan Industri Hasil Tembakau), KAIWS (Kawasan Agro Industri Wisata STIP), Samsat Perikanan, Pengembangan PAD melalui sektor lingkungan hidup dan kehutanan, pengembangan destinasi wisata olahraga, pengembangan terminal sehat, pengembangan pabrik es kapasitas 15 ton dan lain-lain;
3. Peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait.
4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pajak dan retribusi daerah, serta memberikan apresiasi (insentif) kepada perangkat daerah/institusi yang menjadi sumber penghasil/pengelola pendapatan daerah.
5. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi penerimaan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat dengan terus memperhatikan penegasan komponen yang berpengaruh terhadap perhitungan jumlah dana transfer.

### 3.3.2. Proyeksi Belanja Daerah

Untuk Belanja Daerah, selama tahun 2019-2023 diproyeksikan akan terus meningkat hingga mencapai angka Rp. 6,06 Trilyun. Dari hasil proyeksi diperkirakan bahwa belanja tidak langsung masih akan lebih tinggi daripada belanja langsung.



Sumber: BPKAD Provinsi NTB (diolah).

Gambar 3-13 Proyeksi Belanja Daerah Provinsi NTB Menurut Komponen Tahun 2019-2023



Dari gambar di atas terlihat bahwa proporsi belanja tidak langsung terhadap belanja daerah diproyeksikan terus menurun, sampai pada realisasi tahun 2019 sebesar 58,13 persen, diproyeksikan turun menjadi 56,83 persen pada tahun 2023. Sementara pada satu sisi untuk belanja langsung diproyeksikan cenderung meningkat mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Kecenderungan peningkatan belanja langsung ini akan diupayakan terus naik sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat.

### 3.3.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Untuk periode tahun 2019-2023, pada sektor pembiayaan baik itu pada komponen Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan berdasarkan hasil proyeksi akan terus meningkat dengan rata-rata sebesar Rp 5 Milyar lebih.

### 3.3.4. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah perlu dilakukan sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan pembiayaan program program yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi misi Kepala Daerah dan pelaksanaan urusan pemerintah daerah. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3-16 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat**

No	Uraian	Realisasi (Rp)	Proyeksi (Rp)			
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan	5.197.727.488.242,00	5.332.904.002.480,02	5.473.931.855.427,00	5.796.562.592.202,37	6.073.974.442.021,12
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Pembiayaan	95.360.252.975,39	63.586.428.523,25	65.000.000.000,00	35.000.000.000,00	40.000.000.000,00
	Total Penerimaan	5.293.087.741.217,39	5.396.490.431.003,27	5.538.931.855.427,00	5.831.562.592.202,37	6.113.974.442.021,12
	<i>Dikurangi</i>					
4	Belanja Tidak Langsung	2.992.635.105.936,33	3.319.614.285.793,32	3.621.168.535.227,00	3.283.596.373.908,57	3.457.309.057.427,65
5	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	10.000.000.000,00	25.000.000.000,00	30.000.000.000,00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	2.300.452.635.281,06	2.076.876.145.209,95	1.907.763.320.200,00	2.522.966.218.293,80	2.626.665.384.593,46

Sumber : TAPD Provinsi NTB (diolah), 2020



Berdasarkan ketersediaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023, direncanakan penggunaannya untuk membiayai pembangunan daerah, yang dikelompokkan ke dalam tiga prioritas pembangunan, seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3-17 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	<b>Prioritas I</b> , dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat meliputi: Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap; BLUD; Belanja Jasa Kantor (Listrik, Air, Telepon/Internet); Belanja Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; dan Belanja Program dan Kegiatan yang sudah diarahkan (Earmark).	1.471.693.048.566,91	1.542.683.160.174,71	1.583.402.585.063,77	1.758.406.398.326,34	1.996.764.254.764,39
2.	<b>Prioritas II</b> , dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi KDH serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa prioritas gubernur dan wakil gubernur juga termasuk hal tersebut. Alokasi belanja pada prioritas II diarahkan untuk: a. Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 melalui pelaksanaan 10 (sepuluh) program strategis dan 80 program unggulan.	3.648.442.562.666,12	3.824.432.620.491,36	3.925.379.270.363,23	4.022.188.231.639,34	4.009.142.225.019,93



No.	Uraian	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
	<p>b. Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) kewenangan provinsi, meliputi 19 jenis pelayanan dasar yaitu: pendidikan menengah; pendidikan khusus; pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi; pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota; penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi; pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi; rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.</p> <p>c. Penerapan Sustainable Development Goals (SDGs).</p> <p>d. Pemenuhan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Belanja Daerah.</p> <p>e. Pemenuhan anggaran fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari total belanja APBD diluar gaji.</p>					





No.	Uraian	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
	<p>f. Pemenuhan anggaran fungsi infrastruktur sekurang-kurangnya 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>g. Pemenuhan anggaran Percepatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan daerah nomor 12 tahun 2019.</p>					
3.	<p><b>Prioritas III</b>, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Alokasi anggaran prioritas III diperuntukkan untuk mendanai program-program perangkat daerah yang tidak termasuk dalam kategori Prioritas I dan Prioritas II. Program-program tersebut dilaksanakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, bersifat darurat dan pembiayaan lainnya yang juga menjadi prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2019-2023, serta program pendukung penyelenggaraan perkantoran.</p>	28.022.908.281,73	29.374.650.337,20	30.150.000.000,00	50.967.962.236,80	108.067.962.236,80



### **3.4. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya**

Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur antara lain SPAM Regional, Percepatan Jalan Tahap Ketiga di Provinsi Nusa Tenggara Barat membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak memungkinkan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Provinsi akan memperkuat integrasi sumber pendanaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kolaborasi APBD Kabupaten/Kota, Obligasi, Pinjaman Daerah, dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

#### **3.4.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**

Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat selain bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah Provinsi.

#### **3.4.2. Kolaborasi APBD Kabupaten/Kota**

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD kabupaten/kota. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

#### **3.4.3. Obligasi**

Obligasi daerah merupakan alternatif kanal pembiayaan yang layak dipertimbangkan sebagai sumber pendanaan daerah, instrumen ini adalah efek berupa surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan tidak dijamin oleh pemerintah pusat, hanya untuk membiayai kegiatan investasi sarana prasarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD. Namun pada dasarnya penerbitan obligasi daerah sangat bergantung pada kapasitas daerah tersebut. Pembangunan sarana dan prasarana yang diajukan harus mempunyai nilai keuntungan secara ekonomis, keuntungan



dari sarana prasarna tersebut digunakan untuk membayar pokok hutang beserta bunganya.

Kelebihan obligasi daerah sebagai alternatif pendanaan pembangunan antara lain mampu menarik minat pemilik dana atau masyarakat untuk berinvestasi dan mampu menyediakan dana dalam jumlah besar. Mekanisme penerbitan obligasi daerah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Obligasi Daerah.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum pernah menerbitkan obligasi daerah, namun Pemerintah Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang serius menjajaki kemungkinan penerbitan obligasi daerah.

#### **3.4.4. Pinjaman Daerah**

Dalam pelaksanaan pembangunan, pinjaman daerah dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai resiko seperti resiko kesinambungan fiskal, resiko tingkat bunga, resiko pembiayaan kembali, resiko kurs, dan resiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dari pinjaman daerah di antaranya:

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
2. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas.
4. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
5. Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain.



6. Pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
7. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.
8. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.
9. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah, diantaranya bersumber dari:

1. Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri, dan/atau penerusan pinjaman luar negeri;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Pemerintah Daerah dapat menggunakan hasil dari Pinjaman Daerah sebagaimana jenis pinjamannya, yaitu:

1. Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
2. Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
3. Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang (i) menghasilkan penerimaan langsung, (ii) menghasilkan penerimaan tidak langsung, (iii) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
4. Khusus pinjaman jangka panjang dalam bentuk obligasi daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

#### **3.4.5. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)**

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan





Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha.

Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dilakukan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kerjasama tersebut mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

Skema pendanaan KPBU dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.

Karakteristik proyek KPBU meliputi:

1. Proyek KPBU merupakan proyek infrastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha.
2. Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha.
3. Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU.
4. Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha.
5. Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha.

Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri:

1. Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
2. Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
3. Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
4. Memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
5. Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.

Pendanaan Pembangunan melalui KPBU memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:



1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas proyek dengan pelibatan badan usaha yang memungkinkan adanya pembagian risiko dan menjamin ketepatan waktu dan anggaran (on schedule-on budget).
2. Menjamin kualitas pelayanan karena performance diperjanjikan dalam kontrak.
3. KPBU memiliki perlindungan hukum yang baik karena regulasinya jelas dan governance terjaga melalui mekanisme KPBU yang melibatkan pemangku kepentingan (Bappenas dalam pemilihan proyek, Kementerian Keuangan dalam pemberian fasilitas fiskal, LKPP dalam proses pengadaan, BKPM dalam menjajaki minat dan nilai pasar, Kementerian Dalam Negeri dalam pemberian rekomendasi Availability Payment/AP Daerah, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dalam debottlenecking, dan PT. PII dalam pemberian penjaminan Pemerintah), serta best practice KPBU sudah ada di berbagai negara dan berbagai sektor.

KPBU di Indonesia sudah dibuka untuk 19 sektor baik KPBU ekonomi maupun sosial yang mempunyai kelayakan finansial tinggi (full cost recovery) atau kelayakan marjinal, 19 jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha yaitu: 1) infrastruktur transportasi; 2) infrastruktur jalan; 3) infrastruktur sumber daya air dan irigasi; 4) infrastruktur air minum; 5) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat; 6) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; 7) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; 8) infrastruktur telekomunikasi dan informatika; 9) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan; 10) infrastruktur konservasi energi; 11) infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan; 12) infrastruktur kawasan; 13) infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata (tourism information center); 14) infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan; 15) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya; 16) infrastruktur kesehatan; 17) infrastruktur pemasyarakatan; 18) infrastruktur perumahan rakyat; 19) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya.

Pengelompokan 19 (sembilan belas) jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha melalui skema pendanaan KPBU dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok terdiri kelompok pertama 7 (tujuh) jenis infrastruktur konektivitas (transportasi, jalan, ketenagalistrikan, migas dan energi baru dan terbarukan (EBT), konservasi energi, telekomunikasi dan informatika), kelompok kedua 7 (tujuh) jenis infrastruktur fasilitas perkotaan (air minum, pengelolaan limbah setempat, pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah, SDA dan irigasi, pasar tradisional, perumahan rakyat, dan kelompok ketiga 6 jenis infrastruktur fasilitas sosial (pariwisata, fasilitas pendidikan, lembaga pemasyarakatan, sarana olah raga dan budaya, kawasan/technopark, kesehatan).



BAB

4



*Permasalahan dan Isu-isu  
Strategis Daerah*



## BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

### 4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan merupakan *“gap expectation”* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan pembangunan dapat diperoleh dari hasil evaluasi terhadap pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan baik jangka pendek, menengah dan panjang. Permasalahan ini dapat diperoleh dari hasil evaluasi RPJMD periode yang lalu, evaluasi RPJMD periode berjalan dan laporan tahunan yang dibuat seperti LKPJ Gubernur, baik tahunan maupun akhir masa jabatan.

Dalam pelaksanaan RPJMD periode 2019-2023, di tahun pertama penjabaran RPJMD Provinsi NTB periode 2019-2023, disamping melaksanakan rekonstruksi dan pemulihan pasca gempa bumi sesuai target, beberapa target pembangunan dapat dicapai sesuai dengan rencana dan terdapat beberapa target yang tidak tercapai sesuai dengan harapan. Disamping itu, terdapat ancaman yang tidak diantisipasi dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, yaitu dampak yang ditimbulkan dengan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berimbas langsung pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang tidak hanya di Provinsi NTB, nasional bahkan global. Selain pencapaian target pembangunan, permasalahan dapat diperoleh melalui penelaahan kondisi lingkungan strategis, baik regional, nasional maupun internasional yang mungkin akan mempengaruhi rencana pembangunan Provinsi NTB pada sisa tiga tahun penjabaran RPJMD yang akan datang.

Berikut ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi NTB yang diurutkan menurut urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan, sesuai dengan hasil identifikasi dari hasil evaluasi dan perkembangan kondisi terkini di Provinsi NTB.

#### 4.1.1. Urusan Wajib

##### 4.1.1.1. Urusan Wajib Bidang Pelayanan Dasar

###### A. Urusan Wajib Bidang Pendidikan

Rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi NTB mengalami peningkatan pada kurun waktu 2013-2017 sebesar 0,23 tahun yaitu dari angka 6,67 tahun menjadi 6,90 tahun pada tahun 2017. Sementara itu pada





tahun 2019 telah mencapai 7,27 tahun dan jauh melampaui target jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 sebesar 7,07 tahun. Meskipun Provinsi NTB telah berhasil meningkatkan lama sekolah selama 0,37 tahun, angka rata-rata lama sekolah 7,27 tahun masih menunjukkan angka yang relatif rendah bilang dibandingkan dengan angka rata-rata nasional yang sudah mencapai 8,34 tahun. Angka tersebut menunjukkan rata-rata lama sekolah penduduk masih berada pada jenjang pendidikan dasar yaitu kelas 1 SMP, artinya program wajib belajar 9 tahun masih belum tuntas dilaksanakan.

Pendidikan diarahkan untuk menyasar tiga sasaran utama yaitu partisipasi pendidikan, mutu, serta daya saing dan tata kelola. Nilai partisipasi pendidikan yang diukur oleh indikator APK dan APM pada jenjang sekolah menengah menunjukkan tren yang meningkat, meskipun demikian masih tersisa sekitar 40 ribu anak usia 15-17 tahun yang tidak menempuh pendidikan menengah. Selain itu Khusus untuk Sekolah Luar Biasa APK-nya baru mencapai 67,72%, artinya pendidikan luar biasa masih menjadi permasalahan dalam sektor pendidikan.

Berikut ini beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi NTB pada dimensi partisipasi pendidikan (APK, APM dan APS) antara lain:

1. Angka *drop out* jenjang pendidikan menengah masih tinggi, pada tahun 2016/2017 angka *drop out* SD Sederajat 0,15%, SMP Sederajat 0,24%, dan SMA 0,66%, SMK 1,36%. Sedangkan pada tahun 2018/2019, angka *drop out* dapat terus ditekan sehingga menjadi untuk SD Sederajat 0,09%, SMP Sederajat 0,15%, dan SMA 0,37%, SMK 0,65%.
2. Partisipasi Pendidikan jenjang menengah atas masih rendah (Data BPS Tahun 2016/2017 APM 83,35% (masih tersisa sekitar 40 ribu anak usia 15-17 tahun yang tidak menempuh pendidikan menengah) dan APK 93,89%). Khusus untuk Sekolah Luar Biasa APK-nya baru mencapai 67,72%. Adapun pada tahun 2018/2019 telah berhasil ditingkat menjadi 88,22% dan APK sebesar 98,55%.
3. Permasalahan lainnya adalah tidak meratanya penempatan guru antar daerah. Meskipun secara keseluruhan angka rasio murid-guru sudah memenuhi standar nasional, namun pada beberapa kabupaten masih menunjukkan kondisi yang di bawah standar. Misalnya di Kabupaten Lombok Utara, rasio murid-guru SMP 1:36 dan pada jenjang SMA 1:29.
4. Persentase buta huruf pada penduduk usia 45+ masih cukup tinggi (di atas 30%), pendidikan masyarakat belum berjalan dengan optimal.

Pada dimensi mutu dan daya saing, beberapa indikator menunjukkan pendidikan belum berfokus kepada mutu dan daya saing. Berikut ini



permasalahan yang dihadapi terkait dengan mutu dan daya saing pendidikan antara lain:

1. Masih ada sekolah yang mendapat akreditasi C dan bahkan masih ada yang belum terakreditasi. Pada jenjang SMK, 11% sekolah masih terakreditasi C dan 64,8% belum terakreditasi. Pada jenjang SMA, 12,30% terakreditasi C dan 19,50% belum terakreditasi. Pada pendidikan non formal, lembaga PAUD baru terakreditasi 8,24% sedangkan sisanya belum terakreditasi. LKP baru terakreditasi 10,97% dan PKBM sebanyak 11,30%.
2. Hasil UN 2017 masih relatif rendah yaitu 47,75 dan di bawah rata-rata nasional sebesar 53,75.
3. Uji kompetensi guru (UKG) pada jenjang SMA dan SMK masih rendah dan di bawah nilai nasional SMA sebesar 56,30 (nasional 61,47) dan SMK sebesar 54,96 (nasional 58,30).
4. Masih ada guru dengan kualifikasi <D4/S1 yaitu 2,3% pada SMA dan 5,7% pada jenjang SMK.
5. Pendidikan belum berhasil menghasilkan SDM siap kerja (pendidikan vokasi), hal ini terlihat dari banyaknya pengangguran yang berpendidikan SMA/SMK. Pengangguran dari SMA sebesar 6,43% dan dari SMK sebesar 9,67%.
6. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada terganggunya proses pembelajaran dari sekolah/madrasah menjadi dirumah melalui media pembelajaran daring, namun tidak efektifitas pelaksanaan akibat: (a) penguasaan teknologi yang masih rendah; (b) kepemilikan perangkat teknologi yang terbatas; (c) Tidak semua sekolah sudah terkoneksi jaringan internet; (d) Biaya menjadi mahal untuk menyediakan kuota untuk kebutuhan internet.

## **B. Urusan Wajib Bidang Kesehatan**

Keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib bidang kesehatan dapat dilihat dari berbagai indikator, salah satunya adalah angka harapan hidup yang dapat menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2013-2017, Provinsi NTB berhasil meningkatkan 0,65 tahun harapan hidup penduduk dari 64,90 tahun menjadi 65,55 tahun, sedangkan tahun 2019 menjadi 66,28 dan hampir mencapai target akhir RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 sebesar 66,82 tahun. Meskipun demikian, bila dibandingkan dengan kondisi nasional, angka harapan hidup NTB masih berada di bawah nilai capaian nasional yang sudah berada pada angka 73,34 tahun. Oleh karena itu meskipun sudah menunjukkan progres yang cukup baik, namun masih perlu adanya perbaikan dalam sektor kesehatan.



Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam sektor kesehatan sebagai berikut:

1. Kesehatan ibu dan anak belum optimal, hal ini ditandai dengan: (1) masih adanya kematian bayi dan ibu melahirkan, Kasus kematian bayi pada tahun 2017 terjadi sebanyak 929 kasus dengan proporsi 9,0 per 1.000 kelahiran hidup, jumlah tersebut menurun menjadi 866 kasus pada tahun 2018 dengan proporsi 7,91 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian pada tahun 2019 kasus kematian bayi terus mengalami penurunan menjadi 863 kasus, dengan proporsi 7,7 per 1.000 kelahiran hidup dan AKI sebesar 82 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 dan cenderung meningkat menjadi 93,92 pada tahun 2019; (2) masih adanya kelahiran ditolong non tenaga kesehatan, pada tahun 2019 masih sekitar 4,60%. Terganggunya pelaksanaan pelayanan kesehatan rutin ibu dan anak serta menurunnya ketersediaan pangan akibat pandemi akan berdampak pada peningkatan kematian ibu dan anak yang signifikan.
2. Prevalensi Kurang Gizi di Provinsi NTB masih cukup tinggi, meskipun menunjukkan trend yang cenderung menurun, terutama pada tahun 2019 menurun dari 33,49% tahun 2018 menjadi 26,41%. Pandemi COVID-19 ini juga berdampak pada meningkatnya masalah gizi kurang pada anak (*wasting*), akibat dari dampak ekonomi yang meluas, dimana angka kemiskinan meningkat sehingga ketersediaan pangan dan akses terhadap makanan yang bergizi berkurang.
3. Belum optimalnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, ditandai dengan: (1) Success Rate/Angka Keberhasilan Pengobatan tuberkulosis semua tipe 61,48% nasional 77,57%; (2) pada penyakit DBD dengue incidence rate per 100.000 penduduk sebesar 26,86 di atas angka nasional 22,55% dan Case Fatality Rate 0,15%; (3) angka morbiditas 2016 sebesar 20,81% masih di atas nilai nasional (15,18%); (4) persentase merokok pada penduduk  $\geq 15$  tahun pada tahun 2017 sebesar 30,88% di atas nilai nasional 28,97%. Penyakit Kardiovaskular menjadi satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia, selain itu orang dengan komorbiditas Penyakit Tidak Menular (PTM) beresiko tinggi mengalami sakit yang lebih parah akibat terinfeksi COVID-19, sehingga orang dengan PTM harus tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan di tengah keterbatasan pelayanan kesehatan saat pandemi ini.
4. Akses dan mutu pelayanan kesehatan belum optimal yang ditandai dengan beberapa permasalahan: (1) Persentase puskesmas yang terakreditasi masih 55%; (2) Persentase rumah sakit terakreditasi baru 65,63%; (3) Masih cukup rendahnya Posyandu yang aktif yaitu 51,11% pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 61,4% tahun 2019;



5. Sistem Jaminan Sosial belum seluruhnya dinikmati oleh seluruh penduduk Provinsi NTB (71,42% pada tahun 2017 dan tahun 2019 menjadi 86,47%).
6. Mutu dan penyebaran tenaga kesehatan belum merata, permasalahan diantaranya: (1) persentase Puskesmas dengan kecukupan dokter dengan status kurang sebesar 35,44%; (2) persentase Puskesmas dengan kecukupan dokter gigi dengan status kurang sebesar 40,51%; (3) persentase Puskesmas memiliki 5 jenis tenaga kesehatan promotif preventif 50,63% pada tahun 2017 menjadi 63,9% tahun 2019; (4) Jumlah tenaga kesehatan belum optimal, terutama di daerah terpencil.
7. Penduduk dengan akses terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat) hingga tahun 2019 baru mencapai 88,6%, Sarana air minum memenuhi syarat baru mencapai 39,3%.

#### **C. Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Beberapa permasalahan pada urusan ini antara lain: 1). Belum optimalnya layanan infrastruktur jaringan jalan, ketimpangan layanan infrastruktur dan utilitas antar wilayah pulau, 2). Meningkatnya permintaan fungsi ruang seiring meningkatnya permintaan investasi di daerah yg mengakibatkan perlunya penyesuaian fungsi ruang dalam RTRW Provinsi; 3). Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang di daerah; 4). Belum optimalnya pengembangan kawasan pesisir dan pulau2 kecil; 5). Belum optimalnya sinergitas rencana tata ruang dan rencana pembangunan sektoral; 6). Penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang belum optimal.

#### **D. Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan aman di Provinsi NTB pada tahun 2016 sebesar 96,52% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 93,73% bahkan di tahun 2019 telah meningkat menjadi. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam urusan ini antara lain:

1. rendahnya kualitas keselamatan bangunan.
2. kurangnya luas lantai per kapita.
3. kurangnya penyediaan sanitasi dan pengolahan limbah rumah tangga dikawasan perumahan.
4. Rendahnya keterjangkauan perumahan untuk MBR.

#### **E. Urusan Wajib Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**





Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi NTB menunjukkan peningkatan yang baik. Pada 4 tahun terakhir IDI Provinsi NTB naik sebesar 8,19 poin atau tumbuh 14,31% dari 62,62 tahun 2014 menjadi 76,04 tahun 2017, pertumbuhan ini di atas nilai pertumbuhan tingkat nasional yaitu bertambah 6,37 poin dan tumbuh 9,99%. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 76,64, bahkan nilai capaian ini sudah berada di atas nilai nasional 74,92. Beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya:

1. Aspek kebebasan sipil masih di bawah nasional yaitu sebesar 65,06 (nasional sebesar 76,45).
2. Aspek hak-hak politik masih di bawah nasional, 62,08 (nasional 70,11).
3. Adanya angka kejahatan atau kriminalitas yang masih tinggi meskipun sudah berhasil diturunkan dari 17.25 (2018) menjadi 12,71 sampai dengan tahun 2019.
4. Beberapa daerah rawan konflik sosial (2017 terjadi 21 kasus konflik sosial) dan kondisi terakhir berhasil diturunkan menjadi 7 kasus pada tahun 2019.
5. Meningkatnya gangguan tibumtranmas dan pelanggaran peraturan daerah (2017 terjadi 32 kasus pelanggaran, terhadap 14 Perda dan pada tahun 2019 menjadi 18 kasus pelanggaran terhadap 5 Perda dan 2 Pergub).
6. Peranan Bale Mediasi sebagai mediator sengketa hukum belum optimal.
7. NTB masuk dalam kawasan rawan bencana.

#### **F. Urusan Wajib Bidang Sosial**

Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada September 2017 mencapai 748,12 ribu orang (15,05%), angka ini jauh berkurang dari kondisi tahun 2013 sebesar 815,50 ribu orang (17,25%). Pemerintah Provinsi NTB berhasil menurunkan 67,38 ribu penduduk miskin pada lima tahun terakhir, namun Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada Maret 2020 tercatat sebesar 713,89 ribu orang (13,97 persen). Pada September 2019, jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat sebesar 705,68 ribu orang (13,88 persen). Terlihat adanya kenaikan persentase penduduk miskin (P0) selama periode September 2019 – Maret 2020 yaitu sebesar 0,09 persen poin. Meskipun demikian kemiskinan masih menjadi permasalahan utama pembangunan, posisi tingkat kemiskinan masih berada di angka dua digit dan jauh di atas angka kemiskinan nasional. Selain kemiskinan, ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam urusan ini antara lain:

1. Program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan belum terpadu.



2. Penanganan PMKS (kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, korban bencana, konflik sosial, komunitas adat terpencil) masih belum optimal (Cakupan penanganan PMKS pada 2017 sebesar 5,07%, dari 658.398 jiwa, yang diberikan penanganan 33.412 jiwa), sedangkan tahun 2019 mencapai 1,90%).
3. Belum terpenuhinya hak dasar penyandang disabilitas.
4. Beberapa prasarana dasar belum optimal diberikan (akses air minum layak 73,98%, sanitasi layak 69,76%, masih ada rumah tangga yang tidak memiliki jamban, rumah tidak layak huni masih ditemui).

#### **4.1.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

##### **A. Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pada tahun 2013-2017 terjadi peningkatan pemerataan pembangunan antara laki-laki dan perempuan serta peningkatan peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik yang ditandai dengan adanya peningkatan nilai capaian indikator IPG dan IDG. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. IDG Provinsi NTB tahun 2017 baru mencapai angka 59,95 tertinggal dari IDG Nasional sebesar 71,74 dan tahun 2018 meningkat menjadi 60,19, sedangkan IPG meningkat dari 90,36 tahun 2017 menjadi 90,40 tahun 2019;
2. Keterlibatan perempuan di parlemen masih terbatas yaitu 9,38%;
3. Perempuan sebagai tenaga profesional relatif rendah yaitu 44,10%;
4. Relatif rendahnya sumbangan pendapatan perempuan yaitu 32,69%;
5. Rendahnya TPAK perempuan (BPS, Agustus 2017 TPAK Laki-laki 82,11%, TPAK Perempuan 56,18% dan pada tahun 2019 menjadi TPAK Laki-laki 82,10%, TPAK Perempuan 56,46%);
6. Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak, dimana 50% perempuan mendapatkan kekerasan secara fisik dan dilihat dari tempat mayoritas dilakukan di lingkungan rumah tangga.

##### **B. Urusan Wajib Bidang Pangan**

Hasil evaluasi pola pangan harapan - PPH target tercapai, tetapi belum optimal 100%. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi pada urusan ini antara lain:

1. Masih adanya desa dengan kategori rentan dan rawan pangan;
2. Tingginya tuntutan pasar global dan internasional dalam penerapan standar mutu dan keamanan pangan segar;
3. Belum terpetakannya ketersediaan pangan, bahkan ada kecenderungan menurunnya ketersediaan pangan dan konsumsi pangan yg berimbang



dan bergizi akibat pandemi Covid-19 menyebabkan kesulitan ekonomi masyarakat;

4. Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Minimum Di Bawah 1400 Kkal/Kapita/Hari pada tahun 2017 sebesar 5,60% masih di bawah nilai nasional sebesar 7,90%.

#### **C. Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi NTB pada tahun 2016 adalah 56,53 poin dan tahun 2019 meningkat menjadi 57,09 atau masuk dalam kategori kurang baik, angka ini di bawah nilai IKLH nasional yaitu 65,73 poin (cukup baik). Permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Adanya peningkatan lahan kritis;
2. Rendahnya kualitas air yang tercermin dari indeks kualitas air sebesar 22,75 poin jauh di bawah nasional 60,38 poin;
3. Pengelolaan persampahan belum optimal.

#### **D. Urusan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan ini adalah masih ada penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan atau dokumen catatan sipil, permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Belum semua wajib KTP ber-KTP. Dari total wajib KTP 3.704.007 orang, yang telah melakukan perekaman e-KTP sebanyak 3.666.347 (98,98%);
2. Persentase yang tidak memiliki akte kelahiran sebesar 41,11% (0-4 tahun) dan 24,72% (0-17 tahun).

#### **E. Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan ini sebagai berikut:

1. Mayoritas desa masih menjadi desa berkembang sebanyak 659 desa (65,57%) dan masih ada yang sangat tertinggal sebanyak 5 desa dan tertinggal 108 desa;
2. Aspek pelayanan umum pedesaan masih dibawah capaian nasional (NTB 51,31% dan Nasional 51,72%);
3. Kondisi infrastruktur masih terbatas dengan nilai dimensi IPD 44,65%.

#### **F. Urusan Wajib Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Laju Pertumbuhan Penduduk/LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2015-2020 adalah 1,17% pertahun, ada beberapa permasalahan terkait dengan urusan ini antara lain:

1. Total Fertility Rate (TFR) masih di atas 2 persen (2,56%);



2. Persentase peserta KB aktif baru mencapai 88%;
3. Angka pernikahan usia anak masih tinggi (Rata-rata usia kawin pertama perempuan 20,27 tahun).

#### **G. Urusan Wajib Bidang Perhubungan**

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi pada urusan perhubungan sebagai berikut:

1. Jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan raya pada periode 2015-2017 mengalami penurunan sebesar 43,75 persen, namun pada periode 2017-2019 cenderung naik sebesar 23,92 persen dari 1.463 kasus menjadi 1.813 kasus;
2. Meningkatnya jumlah korban baik meninggal maupun luka berat dan ringan;
3. Konektivitas antar moda transportasi masal yang menghubungkan destinasi wisata darat dan pulau-pulau kecil belum terbangun;
4. Frekuensi penerbangan dan maskapai penerbangan dari negara potensial asal wisatawan masih kurang dan bahkan ditutup akibat lamanya pandemic covid-19.

#### **H. Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan**

Meskipun tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi NTB sudah cukup rendah 3,32% pada tahun 2017 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 3,42%, namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja dan calon tenaga kerja dilihat dari pendidikan (menengah 22% dan pendidikan rendah 67%);
2. Mayoritas tenaga kerja bekerja di sektor informal (73,61%) dan paling banyak di sektor pertanian;
3. Tingginya setengah penganggur 16,70%;
4. Kemampuan pekerja migran untuk berusaha sendiri (mandiri) masih rendah;
5. Masih rendahnya minat untuk berwirausaha;
6. Pengawasan ketenagakerjaan dan penanganan pengaduan hubungan industrial belum optimal;
7. Dampak dari covid-19 menyebabkan banyak PHK dan tidak berjalan dengan baik roda perekonomian yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yg mengalami kontraksi sehingga memicu bertambahnya pengangguran baru.





#### **I. Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika**

Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK) masih rendah (tahun 2015 sebesar 3,67 dan nasional sebesar 4,83). Ada beberapa permasalahan pada urusan ini antara lain:

1. Rendahnya proporsi individu yang menggunakan internet yaitu 17,69% sedangkan nasional sudah mencapai angka 25,37%;
2. Akses dan infrastruktur TIK belum merata;
3. Konektivitas telekomunikasi belum merata;
4. Pengelolaan *E-Gov* dilingkungan NTB belum optimal;
5. Belum terintegrasinya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

#### **J. Urusan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan ini antara lain:

1. Masih tingginya persentase koperasi tidak aktif (59,61% tahun 2019);
2. Pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil menengah berjalan lambat (90% usaha masih tergolong usaha mikro), bahkan banyak diantaranya yang perlu dilakukan pemulihan akibat dampak covid-19;
3. Terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi pada Koperasi Syariah.

#### **K. Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal**

Permasalahan pada urusan ini adalah rendahnya realisasi investasi diluar sektor pertambangan dan pariwisata (selama periode 2013-2017 PMDN diluar sektor pertambangan dan pariwisata 26,71%. Beberapa penyebabnya adalah: kesiapan data dan informasi investasi yang belum sesuai dengan trend permintaan investor nasional maupun internasional dan lemahnya pengendalian dan pengawasan perizinan.

#### **L. Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

Permasalahan pada urusan ini adalah rendahnya keterlibatan dalam berwirausaha, sedangkan terkait dengan olahraga adalah minimnya prestasi olah raga pada tingkat nasional/internasional. Hal ini dipengaruhi oleh: tidak tersedianya sarana olah raga yang mumpuni, pembinaan olah raga prestasi kurang optimal dan SDM olah raga relatif terbatas.

#### **M. Urusan Wajib Bidang Kebudayaan**

Permasalahan pada urusan ini adalah mulai lunturnya nilai nilai budaya di masyarakat Provinsi NTB, yang ditandai dengan: (1) makin berkurangnya peran dan jumlah lembaga adat; (2) kurangnya perlindungan



kebudayaan, (3) kurangnya pemanfaatan kebudayaan, dan (4) kurangnya pengembangan kebudayaan.

**N. Urusan Perpustakaan**

Permasalahan pada urusan ini adalah rendahnya literasi masyarakat Nusa Tenggara Barat.

**O. Urusan Kearsipan**

Permasalahan pada urusan ini adalah masih banyaknya koleksi Deposit Perpustakaan yang belum terdigitalisasi.

**4.1.2. Urusan Pilihan**

**A. Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan**

Ada beberapa permasalahan terkait dengan penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan antara lain:

1. Penanganan kawasan konservasi laut dan pesisir belum optimal;
2. Terbatasnya jangkauan penangkapan ikan;
3. Makin mahalnya harga pakan ikan budidaya;
4. Potensi tambak yang belum optimal pengembangannya (potensi tambak yang belum optimal yakni 73,26% atau ekuivalen dengan produksi 95.148 ton);
5. Kurangnya industri pengolah hasil perikanan.

**B. Urusan Pilihan Bidang Pariwisata**

Sektor pariwisata sampai dengan saat ini belum memberikan kontribusi yang optimal dalam perekonomian NTB, beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Akses dan infrastruktur penunjang pada destinasi pariwisata masih terbatas;
2. Rata-rata Lama Menginap (RLM) wisatawan cenderung masih rendah (Rata-rata Lama Tamu Menginap (RLTM) di hotel bintang pada tahun 2019 mencapai 2,13 hari, sedangkan untuk hotel non bintang hanya selama 1,72 hari);
3. Belum tersertifikasinya destinasi wisata dan sektor pendukung, terutama pada sektor wisata halal (sertifikasi halal produk, layanan dan lain-lain);
4. Belum berkembangnya desa-desa yang memiliki potensi pariwisata untuk menjadi desa wisata.

**C. Urusan Pilihan Bidang Pertanian**

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami fluktuasi selama tahun 2015-2019. Dimana pada tahun 2019 angkanya 22,94%



mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 23,51%. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi pada sektor ini antara lain:

1. Diversifikasi Budidaya tanaman eksotik belum dilakukan secara optimal;
2. Penggunaan teknologi (permesinan maupun budidaya) masih relatif rendah;
3. Ketersediaan pakan ternak yang masih tergantung dari luar NTB;
4. Peternakan masih berskala kecil dengan kepemilikan hewan ternak yang relatif kecil;
5. Nilai tambah produk pertanian dan peternakan masih terbatas.

**D. Urusan Pilihan Bidang Kehutanan**

Permasalahan pada urusan bidang kehutanan adalah berkurangnya luas tutupan hutan, tingginya degradasi kawasan hutan dan masih luasnya lahan kritis yang belum ditangani.

**E. Urusan Pilihan Bidang ESDM**

Permasalahan pada urusan energi, sumber daya mineral adalah masih rendahnya peningkatan nilai tambah ekspor bahan tambang, akses masyarakat terhadap listrik belum optimal dan masih terbatasnya ketersediaan energi terbarukan.

**F. Urusan Pilihan Bidang Perdagangan**

Dalam 5 (lima) tahun terakhir periode 2015-2019 terjadi defisit perdagangan, dimana nilai impor lebih tinggi dari nilai ekspor, dengan nilai defisit Rp.5.341,19 Miliar. Ada beberapa permasalahan terkait dengan urusan perdagangan antara lain:

1. Nilai ekspor masih tergantung pada komoditas pertambangan (persentase nilai ekspor pertambangan sampai tahun 2019 masih tinggi sebesar 99%) dan lebih banyak dalam bentuk bahan mentah.
2. Akses pasar komoditas dan produk unggulan daerah belum optimal.
3. Banyaknya peredaran produk usaha mikro kecil yang belum memenuhi standar (SNI, Halal, kadaluarsa).
4. Pasar tradisional masih belum terkelola dengan baik.

**G. Urusan Pilihan Bidang Perindustrian**

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB berfluktuasi, tahun 2013 ke 2014 menurun dari 5,07% menjadi 4,20% dan di tahun 2017 naik menjadi 4,44%. Sedangkan tahun 2019 meningkat menjadi 4,72%. Ada beberapa permasalahan dalam urusan perindustrian antara lain:

1. Penciptaan nilai tambah ekonomi komoditas unggulan belum optimal.
2. Research and development industri komoditas unggulan masih kurang.
3. Kawasan industri terintegrasi belum ada.
4. Industri yang berkembang di masyarakat dan berorientasi ekspor tidak didukung ketersediaan bahan baku dalam jangka panjang.



5. Standarisasi mutu bagi beberapa produk industri yang berorientasi ekspor belum terpenuhi.
6. Pengembangan dan pemberdayaan pelaku industri kreatif belum optimal.

#### **4.1.3. Urusan Penunjang**

##### **A. Bidang Administrasi Pemerintahan**

Permasalahan pada urusan ini adalah Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik belum sepenuhnya menggambarkan pengelolaan kinerja yang berkualitas dan efektif.

##### **B. Bidang Perencanaan**

Permasalahan pada urusan ini antara lain: (1) Belum optimalnya perencanaan kinerja birokrasi; (2) Dokumen perencanaan masih perlu ditingkatkan kualitasnya dengan meningkatkan kualitas perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat, meningkatkan kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan, dan mekanisme cascade kinerja.

##### **C. Bidang Keuangan**

Pengelolaan keuangan daerah Provinsi NTB sudah sangat baik, dimana opini BPK atas laporan keuangan sudah mendapatkan WTP sejak tahun 2011. Meskipun demikian, ada permasalahan terkait dengan kemandirian keuangan daerah. NTB masih cenderung bergantung kepada dana yang bersumber dari dana perimbangan, dan PAD masih cenderung minim.

Permasalahan pada urusan ini antara lain: (1) Potensi penerimaan pendapatan daerah dari berbagai sumber belum tergalai (retribusi, IGU dari OPD dll); (2) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Rendah; (3) Pola belanja daerah belum seragam.

##### **D. Bidang Pengawasan**

Pencapaian Level Maturitas SPIP Pemda belum optimal. Hal ini disebabkan masih adanya beberapa permasalahan seperti: (1) Pencapaian level kapabilitas APIP belum optimal; (2) Formasi APIP yang bersertifikat auditor dan P2UPD masih rendah; dan (3) Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan belum optimal.

#### **4.2. Isu Strategis Daerah**

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak,





berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis akan sangat unik dan mungkin akan berbeda dengan daerah lain, tidak semua permasalahan masuk dalam isu strategis. Oleh karena itu dalam proses penyusunan isu strategis provinsi, perlu ada tahap selanjutnya yaitu proses pembobotan permasalahan menjadi isu strategis. Setelah diidentifikasi isu strategis yang ada kemudian masing-masing isu dibobot. Dalam menentukan pembobotan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi.

Ada lima kriteria pembobotan dalam penyusunan isu strategis pada dokumen RPJMD ini sebagai berikut: (1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; (2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; (3) Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; (4) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah, dan (5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani.

Sebelum dilakukan pembobotan isu strategis provinsi, perlu dilakukan analisis isu strategis pada tingkat global, nasional, dan regional. Berikut ini analisis isu strategis pada tingkat global, nasional, regional dan Provinsi NTB.

#### **4.2.1. Analisis Isu Strategis Global**

Diawali dari perjanjian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada tahun 1997 di Kuala Lumpur Malaysia, dimana pada konferensi ini menghasilkan sebuah visi yang sama antar negara-negara ASEAN, yakni ASEAN vision 2021. Tujuan dari visi ini menjadikan kawasan ekonomi Asia Tenggara menjadi lebih makmur dengan pengembangan dan pemerataan ekonomi di setiap negara anggota ASEAN.

MEA memiliki empat karakteristik utama yang termuat dalam Cetak Biru MEA yang ditetapkan pada Pertemuan ke-38 ASEAN *Economic Ministers* (AEM) di Kuala Lumpur Malaysia pada bulan Agustus 2006 yaitu: (1) pasar tunggal dan basis produksi; (2) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; (3) kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta; (4) kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Selain keempat isu tersebut terdapat dua isu global yaitu: (1) Pandemi Covid-19 dan Kesehatan global, serta (2) *Sustainable Development Goals* (SDGs).

#### **A. Pasar Tunggal dan Basis Produksi**

ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi memiliki lima elemen utama, yaitu (i) aliran bebas barang, (ii) aliran bebas jasa, (iii) aliran bebas investasi, (iv) aliran modal yang lebih bebas, serta (v) aliran bebas tenaga kerja



terampil. Disamping itu, pasar tunggal dan basis produksi juga mencakup dua komponen penting lainnya, yaitu *Priority Integration Services (PIS)* dan kerja sama bidang pangan, pertanian, dan kehutanan.

**B. Kawasan Ekonomi yang Kompetitif**

Dalam upaya menciptakan sebuah kawasan yang kompetitif, ASEAN telah menetapkan beberapa sektor kerja sama yang perlu ditingkatkan, antara lain: perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerce.

**C. Pembangunan Ekonomi yang merata/setara**

MEA menguraikan rencana kerja strategis untuk pemerataan pembangunan ekonomi melalui: Pengembangan UKM dan Inisiatif Integrasi ASEAN.

**D. Integrasi ke dalam Ekonomi Global**

ASEAN beroperasi dalam lingkungan global yang terus berubah, dengan pasar yang saling tergantung dan industri yang menglobal. Agar para pelaku usaha ASEAN dapat bersaing secara internasional, dan menjadikan ASEAN sebagai bagian yang lebih dinamis dan kuat dalam mata rantai pasokan global (*global supply chain*), serta agar pasar ASEAN tetap menarik bagi para investor asing, maka sangat penting bagi ASEAN untuk melihat kawasan lain di luar MEA.

Adanya MEA bisa menjadi peluang sekaligus tantangan dan ancaman bagi Indonesia termasuk Provinsi NTB, hal ini terkait dengan terbukanya pasar bagi pasar bebas dalam satu basis produksi. Tantangan utama dari MEA adalah bagaimana menciptakan manusia yang bisa bersaing, produk yang bermutu dan berdaya saing serta mengembangkan industri yang berorientasi nilai tambah.

Oleh karena itu hilirasi produk dalam industri menjadi sangat penting, bagaimana hilirisasi produk menjadi kunci dalam perekonomian. Bagaimana bahan baku tidak selalu dijadikan bahan ekspor namun dapat diolah sedemikian rupa sehingga dapat menjadi produk yang memiliki nilai yang jauh lebih tinggi. Selain itu industri harus dapat menciptakan produk unggulan, selain untuk tujuan ekspor juga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri di hilir, dengan demikian diharapkan impor barang jadi bisa berkurang.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan agar dapat bersaing dalam MEA antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk unggulan daerah;
2. Mendorong peningkatan investasi di sektor-sektor unggulan daerah yang dapat menciptakan nilai tambah;
3. Meningkatkan mutu dan daya saing manusia baik dari sisi pendidikan maupun keterampilan;



4. Menyediakan infrastruktur dan sarana dan prasarana pendukung;
5. Meningkatkan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

**E. Pandemi Covid-19 dan Isu Kesehatan Global**

Isu kesehatan global bukan merupakan hal yang baru, semenjak di deklarasikannya *Foreign Policy & Global Health* (FPGH) pada tahun 2007 di Oslo, Norwegia dengan tujuan untuk mensinergikan antara kebijakan politik luar negeri suatu negara dengan kebijakan isu kesehatan tingkat global atau pun nasional, yang disebabkan karena rentannya pada kondisi kesehatan manusia dalam suatu negara dengan negara lain. Deklarasi Oslo sudah menemui kesepakatan untuk memasukan aspek kesehatan dalam pembahasan dan juga keputusan politik luar negeri, membangun kerjasama dalam penanganan *global health security*. Apa yang sedang terjadi dan dialami oleh dunia saat ini yaitu covid-19 merupakan penyakit sebab dari coronavirus dalam penularannya, virus tersebut menjadi ancaman global, melihat pandemi tidak melihat batas-batas negara yang dikarenakan dari pergerakan manusia. Dampak dari pandemi ini menyebabkan aktivitas manusia terhambat. Ekonomi pun melambat, bahkan terjerembap ke jurang penyusutan. Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan pandemi virus corona merusak ekonomi dunia lebih buruk dari angka perkiraan yang dikeluarkan sebelumnya dan diperkirakan output ekonomi dunia tahun ini akan menyusut hampir 5%

**F. Sustainable Development Goals (SDGs)**

*Millenium Development Goals* (MDGs) merupakan deklarasi milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara pada tahun 2015. Sejak disepakatinya pada bulan September 2000, MDGs telah menjadi suatu paradigma pembangunan hampir seluruh negara-negara di dunia. MDGs sendiri memiliki 8 goal, 18 target dan 67 indikator dan telah berakhir pada tahun 2015. Selanjutnya sebagai tindak lanjut pelaksanaan MDGs muncul istilah baru yang disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau dikenal juga dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).



**THE GLOBAL GOALS**  
For Sustainable Development



Pada bulan September 2015, Sidang Umum PBB yang diikuti oleh 159 Kepala Negara, termasuk Indonesia, telah menyepakati Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* menjadi agenda global 2030. TPB/SDGs tersebut berisikan 17 Goals dan 169 Target



untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030.

Sejalan dengan perumusan TPB/SDGs di tingkat global, Indonesia juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPMN) tahun 2015-2019, sehingga substansi yang terkandung dalam TPB/SDGs telah selaras dengan

RPJMN yang merupakan penjabaran Nawacita sebagai Visi dan Misi Presiden. Hal ini diperkuat dengan ditetapkannya Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Berikut ini 17 goals yang diusung dalam SDGs yang harus dijadikan perhatian dalam perencanaan pembangunan di daerah termasuk indikator yang digunakan sebagai berikut:

1. Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan (*No Poverty-End poverty in all its forms everywhere*).
2. Tujuan 2. Tanpa Kelaparan (*zero hunger- End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture*).
3. Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and well-being- Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages*).
4. Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas (*Quality Education- Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning*).
5. Tujuan 5. Kesetaraan Gender (*Gender Equality- Achieve gender equality and empower all women and girls*).
6. Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak (*Clean Water and Sanitation- Ensure access to water and sanitation for all*).
7. Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy- Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all*).
8. Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth- Promote inclusive and sustainable economic growth, employment and decent work for all*).
9. Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure- Build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and foster innovation*).





10. Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan (*Reduced Inequalities- Reduce inequality within and among countries*).
11. Tujuan 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities- Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable*).
12. Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan (*Responsible Consumption and Production- Ensure sustainable consumption and production patterns*).
13. Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action- Take urgent action to combat climate change and its impacts*).
14. Tujuan 14. Ekosistem Lautan (*Life Below Water- Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources*).
15. Tujuan 15. Ekosistem Daratan (*Life on Land- Sustainably manage forests, combat desertification, halt and reverse land degradation, halt biodiversity loss*).
16. Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (*Peace, Justice and Strong Institution- Promote just, peaceful and inclusive societies*).
17. Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships for the Goals- Revitalize the global partnership for sustainable development*).

#### **4.2.2. Analisis Isu Strategis Nasional**

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepulauan Nusa Tenggara bertumpu pada hilirisasi sumber daya alam, perdagangan, dan pariwisata. Pulau Nusa Tenggara diarahkan untuk melakukan diversifikasi industri pengolahan yang berbasis pada sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dengan mengurangi ketergantungan perekonomian pulau tersebut pada sektor pertambangan.

Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara masih menghadapi permasalahan antara lain: (1) belum optimalnya pelayanan dasar, (2) belum optimalnya pengembangan potensi unggulan berbasis sumberdaya alam; (3) belum terwujudnya konektivitas yang memadai khususnya intrapulau dan antarpulau di Kepulauan Nusa Tenggara; (4) belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan; (5) masih lemahnya tata kelola pemerintahan daerah; dan (6) masih rentannya ketahanan fisik dan sosial atas perubahan iklim, bencana, polusi, dan abrasi pantai, serta rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan di perdesaan dan perkotaan.

#### **4.2.3. Analisis Isu Strategis Regional**

Berikut ini isu strategis pada tingkat regional dengan Provinsi NTB yaitu Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada dokumen perencanaan tahun 2018-2023.



#### A. Isu Strategis RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023

Terdapat empat isu strategis di tataran program Pemerintah Provinsi Bali yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Empat isu strategis yang dimaksud yaitu kesenjangan, daya saing, nilai tambah, dan keberlangsungan (*sustainability*). Keempat isu strategis tersebut akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nantinya program-program yang dilakukan untuk menyelesaikan keempat isu strategis tersebut tidak dapat dilakukan terpisah harus saling terintegrasi melalui pendekatan THIS (*Targetted, Holistic, Integrated, dan Spatial*). Dalam hal ini, *targetted* berarti harus ada target yang dapat diukur, dapat dicapai, dan waktu pencapaiannya jelas. *Holistic* dan *integrated* berarti program yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi baik dari hulu sampai hilir maupun melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, *spatial* berarti adanya detail lokasi dan pemanfaatan tata ruangnya. Untuk melaksanakan program-program yang terkait dengan keempat isu strategis tersebut, sangat tergantung dari kapasitas dan kualitas dari birokrasi. Sehingga perlu adanya reformasi birokrasi dan layanan umum untuk menunjang pelaksanaannya agar keempat isu strategis tersebut dapat ditangani dengan baik. Selain itu, perlu juga memperhatikan faktor eksternal yaitu kondisi geografis Provinsi Bali dan perubahan iklim yang menyebabkan besarnya risiko bencana yang dapat terjadi. Faktor eksternal tersebut dapat mempengaruhi keempat isu strategis tersebut.

#### B. Isu Strategis RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023

Visi NTT adalah mewujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan (*inclusive and sustainable development*). Visi ini merupakan kerangka acuan untuk melakukan kegiatan pembangunan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip “inklusif”, yakni melibatkan semua stakeholders dan berkelanjutan dengan merujuk pada empat pilar pembangunan ekonomi, aspek sosial, lingkungan, dan kelembagaan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Yang Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan.
2. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak dan Nelayan Yang Berkelanjutan.
3. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Masalah Sosial.
4. Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim.
5. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat NTT.
6. Reformasi Birokrasi.



#### 4.2.4. Isu Strategis Provinsi NTB

Berdasarkan hasil analisis isu strategis global, nasional dan regional, serta mempertimbangkan potensi dan permasalahan pembangunan kekinian di Provinsi NTB, maka isu strategis pembangunan Provinsi NTB tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. Daerah Rawan Bencana, yang ditandai dengan:
  - a. Upaya mitigasi bencana belum maksimal.
  - b. Sumber daya untuk Keadaan Darurat Bencana serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana masih terbatas.
2. Penataan Ruang, Konektivitas, dan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah belum optimal, yang ditandai dengan:
  - a. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal.
  - b. Tingkat kemantapan jalan yang tinggi belum diimbangi dengan tingkat kenyamanan dan standar pelayanan memadai.
  - c. Aksesibilitas, kualitas, dan kelancaran transportasi masal antar pusat pertumbuhan dan pulau-pulau kecil belum merata.
  - d. Sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi belum merata
  - e. Potensi energi baru dan terbarukan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri belum dikelola secara optimal.
  - f. Ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya air yang mendukung ketahanan pangan belum merata.
  - g. Ketersediaan dan sistem pengelolaan air minum regional belum terintegrasi.
3. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Belum Berjalan Optimal, yang ditandai dengan:
  - a. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil belum optimal.
  - b. Kemandirian keuangan daerah masih rendah.
  - c. Penataan dan pengembangan SDM aparatur belum optimal.
  - d. Indeks kepuasan masyarakat masih relatif rendah.
  - e. Level maturitas pengendalian internal pemerintah belum baik.
  - f. Penerapan *Good Governance* yang didukung teknologi informasi belum optimal.
  - g. Pemutakhiran data dan informasi dalam pembangunan belum optimal.
  - h. Proses fasilitasi pengurusan perizinan belum optimal.
4. Derajat Kesehatan Masyarakat Relatif Rendah, yang ditandai dengan:
  - a. Angka harapan hidup saat lahir masih relatif rendah.
  - b. Angka kematian ibu, bayi dan balita relatif masih tinggi.
  - c. Prevalensi kurang gizi dan *stunting* masih tinggi.
  - d. Fasilitas kesehatan yang terakreditasi dan terstandar belum merata.



- e. SDM kesehatan antar daerah belum merata.
  - f. Akses terhadap layanan kesehatan belum optimal.
  - g. Upaya promotif dan preventif masalah kesehatan belum optimal.
  - h. Usia kawin pertama perempuan kurang dari 21 tahun masih relatif banyak.
5. Mutu dan Daya Saing Proses dan Hasil Pendidikan Belum Optimal, yang ditandai dengan:
- a. Rata-rata lama sekolah masih rendah.
  - b. Sekolah dan lembaga pendidikan yang terakreditasi C atau belum terakreditasi masih cukup banyak.
  - c. Pendidikan Kejuruan dengan kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri belum sesuai.
  - d. Nilai evaluasi atas mutu guru yang ditunjukkan nilai UKG, dan mutu lulusan melalui nilai UN relatif rendah.
  - e. Penyebaran tenaga pendidikan belum merata, sehingga rasio guru murid tidak merata antar daerah.
  - f. Angka buta huruf dewasa cukup tinggi.
  - g. Akses Pendidikan yang belum merata.
  - h. Fasilitasi aksesibilitas ke pendidikan tinggi dalam dan luar negeri masih rendah.
6. Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan belum optimal, yang ditandai dengan:
- a. Indeks kualitas lingkungan hidup semakin menurun.
  - b. Penanganan sampah dan limbah (partisipasi publik, cakupan, dan penegakan hukum) belum optimal.
  - c. Terjadinya degradasi ekosistem hutan, danau, dataran rendah, serta pesisir dan laut.
  - d. Penegakan hukum terhadap eksploitasi ilegal sumberdaya alam (*illegal logging, illegal fishing, illegal mining*) masih lemah.
7. Pertumbuhan Pertanian/Agribisnis dan Investasi relatif lambat, yang ditandai dengan:
- a. Pertumbuhan ekonomi masih tergantung kepada sektor pertambangan.
  - b. Rendahnya realisasi investasi diluar sektor pertambangan dan pariwisata.
  - c. Nilai perdagangan, impor masih lebih tinggi dari nilai ekspor masih defisit.
  - d. Peranan koperasi, koperasi syariah, BUMDes dalam perekonomian relatif rendah.
  - e. Wirausaha yang produktif dan inovatif masih kurang.
  - f. Akses terhadap sumber daya ekonomi yang murah dan berkelanjutan masih terbatas.
  - g. Penanganan sektor pertanian secara komprehensif belum optimal.
  - h. Lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal.





- i. Potensi pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil belum dikelola secara optimal.
8. Pembangunan Pariwisata melambat karena dampak Pandemi Covid-19, yang ditandai dengan:
  - a. Pengaruh sektor pariwisata belum signifikan terhadap perekonomian masyarakat.
  - b. Potensi pariwisata belum dikelola secara optimal terutama pada kawasan strategis dan desa.
  - c. Adanya penurunan secara signifikan kontribusi sektor-sektor yang terkait kepariwisataan akibat gempa bumi dan pandemi Covid-19.
9. Industrialisasi Produk Unggulan Daerah belum optimal, yang ditandai dengan:
  - a. Penciptaan nilai tambah ekonomi komoditas belum optimal.
  - b. Konektivitas sektor hulu (produksi) dan sektor hilir (pengolahan dan perdagangan) belum optimal.
  - c. Pengembangan dan pemberdayaan pelaku industri kreatif belum optimal.
  - d. Industri pengolahan dan industri pendukung komoditas masih kurang.
  - e. Fasilitasi dan pemanfaatan hasil karya industri lokal belum optimal.
  - f. Infrastruktur, perizinan dan investasi industri belum difasilitasi secara khusus dan optimal.
10. Belum Terciptanya Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Damai secara optimal, yang ditandai dengan:
  - a. Indeks Demokrasi masih rendah.
  - b. Beberapa daerah masih masuk dalam kawasan rawan konflik sosial.
  - c. Nilai agama, budaya dan kearifan lokal belum diimplementasikan secara optimal dalam kehidupan.
  - d. Angka kriminalitas dan penyalahgunaan NAPZA masih tinggi.



BAB  
5



*Visi Misi  
Tujuan dan Sasaran*





## BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah tahap keempat dalam dokumen RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025. Dengan mempertimbangkan visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah nasional, serta visi, misi, sasaran pokok dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan, isu strategis, peluang dan tantangan pembangunan, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi NTB tahun 2019-2023 sebagaimana diuraikan berikut ini.

### 5.1. Visi

Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 – 2025 yang tertuang dalam RPJPD adalah: **TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT YANG BERIMAN, MAJU DAN SEJAHTERA**. Visi Pembangunan tersebut mengarah pada pencapaian tujuan nasional, yaitu “masyarakat adil dan makmur” seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan tujuan otonomi daerah, yaitu “terwujudnya kesejahteraan masyarakat”. Sementara itu, visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah “*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*”.

RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran Tahap ke-4 dari RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025, diarahkan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Berpedoman pada Visi dan arahan RPJPD Provinsi NTB tahun 2005-2025 tahap ke-4, serta Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024, maka Visi pembangunan yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah “**Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang**”. Dalam visi tersebut terdapat kata kunci “NTB GEMILANG” yang bermakna:

1. Suatu kondisi masyarakat NTB yang siap dan tanggap menghadapi berbagai bencana yang didukung oleh kelembagaan dan infrastruktur yang memadai.
2. Suatu kondisi masyarakat NTB yang mampu memenuhi hak-hak dasarnya di bidang sosial, budaya dan ekonomi, yang dipenuhi dari hasil kreativitas dan inovasi SDM masyarakat NTB melalui pengelolaan SDA yang berkelanjutan.



3. Suatu kondisi masyarakat NTB yang aman, damai dan harmonis, yang didukung oleh Pemerintahan yang professional melayani, bebas dari KKN, transparan dan akuntabel, bersendikan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan universal dalam mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang *baldatun toyyibatun warobbun ghofur*.

## 5.2. Misi

Misi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. **Mewujudkan masyarakat beriman, bermoral, berbudaya, dan berkesadaran hukum**, yaitu terwujudnya masyarakat yang tangguh menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya dan hukum dalam keseharian hidup dan kehidupannya serta bertanggungjawab secara arif bijaksana dan taat azas.
2. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu pemenuhan hajat hidup masyarakat mencakup kebutuhan sandang, pangan dan papan, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja, keamanan dan keselamatan diri dan lingkungannya, serta pemenuhan aktualisasi ekstensi diri dan kepribadian.
3. **Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan**, yaitu terwujudnya peningkatan hasil dan manfaat pembangunan yang ditujukan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat dalam tatanan hubungan kemitraan pemerintah dan masyarakat yang berkeadilan, dalam kerangka supremasi hukum, penghormatan dan penegakan hak-hak azasi manusia.
4. **Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah**, yaitu terwujudnya kemampuan dinamis mengembangkan diri dan profesionalisme masyarakat membangun kesejahteraan fisik dan mental dalam tatanan hubungan harmonis yang didukung kelestarian dan keberlanjutan pengelolaan Sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta berkembangnya kearifan lokal, sebagai daya mampu keunggulan relatif terhadap wilayah lain.
5. **Mewujudkan pembangunan berkelanjutan**, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan Sumberdaya alam, lingkungan hidup dan Sumberdaya buatan bagi keberhasilan pembangunan kesejahteraan generasi masa kini dengan memperhitungkan secara cermat dan bertanggungjawab bagi kelangsungan hidup dan kehidupan generasi mendatang.

Misi pembangunan jangka menengah nasional sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.





4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Perumusan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan hasil dari elaborasi permasalahan dan isu strategis, mempertimbangkan misi dan arahan RPJPD Provinsi NTB tahun 2005-2025 tahap ke-4, serta misi pembangunan jangka menengah nasional sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur, serta konektivitas antarwilayah.
2. NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi.
3. NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah.
4. NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
5. NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian/agribisnis, pariwisata dan industrialisasi.
6. NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Keterkaitan dan keselarasan antara misi pembangunan nasional dengan misi pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5-1 Keterkaitan dan Keselarasan Misi Pembangunan Nasional dan Daerah

RPJMD NTB 2019-2023		RPJMN 2020-2024	
MISI			
1	NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	-	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga (Misi 7)



RPJMD NTB 2019-2023		RPJMN 2020-2024
2	NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya (Misi 6)</li> <li>- Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya (Misi 8)</li> </ul>
3	NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia (Misi 1)</li> </ul>
4	NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan (Misi 4)</li> </ul>
5	NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing (Misi 2)</li> <li>- Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan (Misi 3)</li> </ul>
6	NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa (Misi 6)</li> <li>- Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga (Misi 7)</li> <li>- Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan (Misi 9)</li> </ul>

### 5.3. Tujuan dan Sasaran

#### 5.3.1. Arahan, Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2020-2024. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi, yang dideskripsikan sebagai berikut:

1. **Pembangunan SDM:** Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.



2. **Pembangunan Infrastruktur:** Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. **Penyederhanaan Regulasi:** Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. **Penyederhanaan Birokrasi:** Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. **Transformasi Ekonomi:** Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan 5 (lima) arahan Utama, ditetapkan sasaran pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5-2 Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024

No.	Arahan Presiden Dan Sasaran Pembangunan Dalam RPJMN 2020-2024	Target 2024
<b>A</b>	<b>PEMBANGUNAN SDM</b>	
1	Penduduk memiliki NIK, akta kelahiran, buku nikah, pencatatan perceraian, kematian serta penyebab kematian	100%
2	Penduduk mendapatkan perlindungan sosial	98%
3	Kelahiran hidup angka kematian ibu	183 per 100.000
4	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas	9,18 tahun
5	Rumah tangga miskin dan rentan memiliki aset produktif	40%
6	Indeks Perlindungan Anak	73,49
7	Indeks Pembangunan Pemuda	57,67
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,39
9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,18
10	Angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	49,8%
11	Lulusan Perguruan Tinggi langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	66,7%
12	Hasil inovasi Prioritas Riset Nasional	40%
13	Medali Emas baik Olympic Games maupun Paralympic Games tahun 2024	3
14	Pekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi	50%
15	Indeks Capaian Revolusi Mental	74,3
16	Indeks Pembangunan Kebudayaan	62,7
17	Indeks Pembangunan Masyarakat	0,65
18	Indeks Kerukunan Umat Beragama	75,8



No.	Arahan Presiden Dan Sasaran Pembangunan Dalam RPJMN 2020-2024	Target 2024
19	Nilai Budaya Literasi	71,0
20	Indeks Pembangunan Keluarga	61,0
21	Median usia kawin pertama perempuan	22,1
<b>B</b>	<b>PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR</b>	
<b>1</b>	<b>Infrastruktur Pelayanan Dasar</b>	
-	Rumah Tangga Menempati Hunian Layak	70%
-	Hunian dengan Akses Air Minum Layak » Termasuk Akses Aman 15%	100%
-	Hunian dengan Akses Sanitasi Layak » Termasuk Akses Aman 15%	90%
-	Hunian dengan Akses Air Minum Perpipaan	30%
-	Jaringan Irigasi Baru	500 Ribu ha
-	Tambahan Air Baku Industri & Domestik	50 m3/detik
-	Bendungan Multiguna	63
-	Produktivitas Air untuk Padi	3 m3/kg
-	Provinsi berisiko bencana tinggi mengalami peningkatan ketahanan bencana	20
<b>2</b>	<b>Infrastruktur Ekonomi</b>	
-	KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa	Jakarta-Semarang & Jakarta-Bandung
-	Kereta Api	Makassar - Parepare
-	Meningkatkan Standarisasi Kinerja dan Pengelolaan Pelabuhan Terpadu	Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
-	Jembatan Udara	43 Rute
-	Jalan Tol Baru dan/atau Beroperasi	2.500 km
-	Jalan Nasional Baru	3.000 km
-	Kondisi Mantap Jalan Nasional	97%
-	Waktu Tempuh pada Jalan Lintas Utama Pulau	1,9 jam/100 km
-	Rute Pelayaran yang Saling Terhubung (loop)	27%
<b>3</b>	<b>Infrastruktur Perkotaan</b>	
-	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan	6
-	Hunian Dengan Akses Sampah Terkelola Baik	80% Penanganan dan 20% Pengurangan
	<b>Energi Dan Ketenagalistrikan</b>	
-	Konsumsi Listrik Per Kapita Nasional	1.400 kWh
-	Rasio Elektrifikasi	100%
-	Sambungan Rumah Baru Jaringan Gas Kota	4 Juta
-	Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak (2 Grass Root Refinery/GRR dan 4 Refinery Development Master Plan/RDMP)	6 Unit





No.	Arahan Presiden Dan Sasaran Pembangunan Dalam RPJMN 2020-2024	Target 2024
-	<b>Transformasi Digital</b>	
-	Desa Terjangkau Infrastruktur Jaringan Bergerak Pita Lebar	95%
-	Cakupan Jaringan Tetap Pita Lebar	60% Kecamatan
-	Populasi Terjangkau Siaran Digital	80%
-	Unicorn Baru Start Up	3
<b>C</b>	<b>PENYEDERHANAAN REGULASI</b>	
-	177 UU terkait Cipta Lapangan Kerja (termasuk regulasi terkait kemudahan dan perlindungan UMKM)	RUU Cipta Lapangan Kerja
-	73 Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (peringkat EoDB)	40 menuju
<b>D</b>	<b>PENYEDERHANAAN BIROKRASI</b>	
-	waktu memulai usaha (EoDB)	4 hari
-	Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	≥ 2,6 (predikat baik)
-	Waktu rata-rata pengeluaran barang (dwelling time)	2,9-3,2 hari
<b>E</b>	<b>TRANSFORMASI EKONOMI</b>	
	<b>Industrialisasi</b>	
-	Kontribusi PDB industri pengolahan	21,0 persen
-	Kontribusi PDB industri pengolahan non migas	18,9 persen
-	Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	15,7 persen
	<b>Pengembangan Destinasi Unggulan</b>	
-	Devisa pariwisata	USD 30 miliar
	<b>Penguatan Ekonomi Kreatif Dan Ekonomi Digital</b>	
-	Nilai tambah ekonomi kreatif	Rp 1.846 triliun
-	Nilai transaksi e-commerce	Rp 600 triliun

Tabel 5-3 Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2020-2024

No.	SASARAN MAKRO PEMBANGUNAN	Satuan	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi:	%	5.7 - 6.0
	<b>PDB SISI PODUKSI</b>		
	a. Pertanian	%	3.8 - 3.9
	b. Industri Pengolahan	%	6.2 - 6.5
	c. Perdagangan	%	6.0 - 6.3
	d. Jasa Keuangan	%	6.8 - 7.2
	e. Informasi dan Komunikasi	%	8.3 - 8.9
	f. Konstruksi	%	6.1 - 6.4
	g. Pertambangan	%	1.9 - 2.0
	<b>PDB SISI PENGELUARAN</b>		
	a. Konsumsi RT dan LNPRT	%	5.4 - 5.6
	b. Konsumsi Pemerintah	%	4.7 - 4.9
	c. Investasi	%	6.6 - 7.0



No.	SASARAN MAKRO PEMBANGUNAN	Satuan	Target
	d. Ekspor	%	4.7 - 4.9
	e. Impor	%	4.7 - 4.8
2	Pertumbuhan Investasi	%	6.6 - 7.0
3	Share Industri Pengolahan	%	21.0
4	Defisit Transaksi Berjalan	% PDB	1.7
5	Tingkat Inflasi	%	2.7
6	Pertumbuhan Ekspor Non Migas		7.4
7	Pertumbuhan Industri Non Migas	%	6.6 - 7.0
8	Rasio Pajak	% PDB	10.7 - 12.3
9	Tingkat Kemiskinan	%	6.0 - 7.0
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.6 - 4.3
11	Rasio Gini	%	0.360 - 0.374
12	Indeks Pembangunan Manusia		75.54
13	Penurunan Emisi GRK	%	27.3

Agenda Pembangunan Nasional sebagaimana dalam RPJMN Tahun 2020-2024 ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, melalui:
    - 1) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT).
    - 2) Peningkatan kuantitas/ ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
    - 3) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
    - 4) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan.
  - b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian, melalui:
    - 1) Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi.
    - 2) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.
    - 3) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
    - 4) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan, dengan sasaran: Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu



Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing, dengan sasaran:
  - a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan.
  - b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk.
  - c. Terpenuhinya layanan dasar.
  - d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda.
  - e. Terwujudnya pengentasan kemiskinan.
  - f. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing.
4. Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan, dengan sasaran:
  - a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya.
  - b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan.
  - c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat social.
  - d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat.
  - e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa.
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar.
  - b. Meningkatnya konektivitas wilayah.
  - c. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan.
  - d. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien.
  - e. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim, dengan sasaran:
  - a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, yang mencakup: a. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; b. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; c. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; d. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
  - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, yang mencakup: a. Penanggulangan Bencana; b. Peningkatan Ketahanan Iklim.



- c. Pembangunan Rendah Karbon, yang mencakup: a. Pembangunan Energi Berkelanjutan; b. Pemulihan Lahan Berkelanjutan; c. Pengelolaan Limbah; d. Pengembangan Industri Hijau; e. Rendah Karbon Pesisir dan Laut.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik, dengan sasaran: Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik melalui: 1). Konsolidasi Demokrasi; 2). Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri; 3). Penegakan Hukum Nasional yang Mantap; 4). Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Terkait dengan kewilayahan, Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk dalam wilayah pembangunan nusa tenggara dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Dalam lima tahun mendatang (2020-2024), sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu “Menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera”. Dengan memperhatikan sasaran pembangunan kewilayahan tersebut maka target pertumbuhan ekonomi, perkiraan kebutuhan nilai investasi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran wilayah pulau pada tahun 2024 pada wilayah Nusa Tenggara sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi tahun 2020-2024 ditargetkan sebesar 6,0%.
2. Kontribusi (*Share*) Ekonomi Regional) tahun 2024 ditargetkan sebesar 1,5 % per PDRB.
3. Kebutuhan Investasi sampai tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.19,9 Triliun.
4. Tingkat Kemiskinan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 12,1%.
5. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024 ditargetkan sebesar 2,1%.

Sasaran pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024 akan dicapai melalui lima (5) prioritas, yaitu: pengembangan kawasan strategis; pengembangan sektor unggulan; pengembangan kawasan perkotaan; pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; serta pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah.

### **5.3.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Tujuan pembangunan NTB Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketangguhan menghadapi resiko bencana.
2. Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk pengembangan sektor unggulan.
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel.





4. Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing.
5. Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing.
6. Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan.
7. Terwujudnya pertumbuhan pertanian/agribisnis dan investasi yang berkualitas.
8. Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan.
9. Terwujudnya perindustrian yang unggul.
10. Terwujudnya kehidupan masyarakat NTB yang madani (Bahagia).

Berdasarkan tujuan pembangunan, maka sasaran pembangunan NTB Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana.
2. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
3. Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah.
5. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
6. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Meningkatnya Profesionalisme ASN.
8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
10. Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan.
11. Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
12. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan.
13. Meningkatnya Investasi (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).
14. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas.
15. Meningkatnya Jaminan Kesehatan dan Sosial bagi Penduduk Miskin .
16. Meningkatnya Ketahanan dan Keragaman Konsumsi Pangan.
17. Terpenuhinya Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin.
18. Terjaganya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok.
19. Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup.
20. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata.
21. Meningkatnya Daya Saing Industri.
22. Menurunnya Pengangguran Terbuka.
23. Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat.
24. Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah.
25. Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat.
26. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Keselarasan Tujuan Pembangunan Provinsi NTB dalam RPJMD Tahun 2019-2023 dengan Arahannya Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dapat dijabarkan dalam matrik berikut ini.

Tabel 5-4 Keselarasan Tujuan Pembangunan Provinsi NTB dalam RPJMD Tahun 2019-2023 dengan Arahannya Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional



NO	NTB Tahun 2019-2023	Nasional Tahun 2020-2024	
	TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH	ARAHAN PRESIDEN	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL
1	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Pembangunan Infrastruktur	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
2	Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
3	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Penyederhanaan Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Pembangunan SDM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
5	Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing		
6	Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7	Terwujudnya pertumbuhan pertanian/agribisnis dan investasi yang berkualitas	Transformasi Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
8	Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan		
9	Terwujudnya perindustrian yang unggul		
10	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	Penyederhanaan Regulasi	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023 serta indikator dan targetnya setiap tahun disajikan pada tabel berikut.



**Tabel 5-5 Misi, Tujuan dan Sasaran, Indikator Tujuan dan Sasaran, serta Target Capaiannya Tahun 2019-2023**  
**Visi: Membangun NTB yang GEMILANG**

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal			Target Capaian				Kondisi Akhir (2023)
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (Point)			Point	142,90	139,4	129,02	126,91	123,11	119,41	115,83	115,83
				Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65	0,65
		Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas			Point	73,69	74,6	76,02	77,14	78,56	79,84	81,17	81,17
				Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Kemantapan jalan	%	77,16	83,65	80,28	80,76	83,95	85,36	86,60	86,60
					Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50,54	50,63	50,76	48,11	50,04	52,17	54,50	54,50
Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	73,72	74,76	78,64	79,43	81,71	86,86	89,14	89,14				
2	Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			Point	CC	CC	B	B	B	BB	BB	BB
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	32,15	33,77	34,77	34,06	35,41	36,97	38,65	38,65
				Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	B (>60 - 70)	B (62,53)	BB	BB (70,05-73,00)	BB (73,01 - 76,00)	BB (76,01 - 80,00)	A (80,01 - 90,00)	A (80,01 - 90,00)
				Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,57	0,60	0,54	0,66	0,68	0,70	0,72	0,72



No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal			Target Capaian				Kondisi Akhir (2023)
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	3,42	4,56	3,63	3,93	4,23	4,53	4,55	4,55
3	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan			Point	70,08	70,57	71,20	71,51	71,97	72,43	73,05	73,05
				Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,55	65,75	66,28	66,48	66,78	67,08	67,48	67,48
					Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	37,20	33,49	25,50	31,99	31,49	30,99	30,49	30,49
		Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan			Point	60,39	60,85	61,68	62,03	62,39	62,74	63,10	63,10
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,46	13,51	13,57	13,62	13,68	13,73	13,79	13,79
					Rata rata Lama Sekolah	Tahun	6,90	6,93	7,27	6,98	7,01	7,04	7,07	7,07
4	Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Point	56,99	75,16	64,56	67,74	67,98	68,22	68,46	68,46
				Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Point	20,25	74,63	40,23	42,73	42,83	42,93	43,03	43,03
					Indeks Kualitas Udara	Point	88,02	87,17	87,40	87,50	87,53	87,56	87,59	87,59
					Indeks Kualitas Air Laut	Point	-	-	-	69,69	70,29	70,89	71,48	71,48
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	61,27	66,56	65,67	66,70	67,70	68,70	69,70	69,70
		Neraca pengelolaan sampah			%	-	-	41,71	55,00	70,00	85,00	100,00	100,00	
			Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	-	-	34,91	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00	
				Persentase Pengurangan Sampah	%	-	-	6,80	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00	
5						Point	69,76	70,99	72,03	72,91	73,80	74,68	75,56	75,56





No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal			Target Capaian				Kondisi Akhir (2023)
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli	Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	11.280	14.000	10.024	11.574	13.362	15.428	17.814	68.202
Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas				Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	22,03	23,51	23,06	23,29	23,52	23,71	23,88	23,88	
Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin				Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan				Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	77,80	78,30	85,30	85,80	86,20	86,70	87,20	87,20	
Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin				Cakupan Air Minum	%	-	70,48	72,59	75,74	76,48	78,45	80,59	80,59	
				Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	69,25	69,53	78,8	79,36	80,1	80,91	82,46	82,46	
				Rasio Elektrifikasi	%	85,10	93,83	99,55	99,66	99,77	99,88	99,99	99,99	
				Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	53,04	56,75	56,35	59,50	62,65	65,80	68,95	68,95	
Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok				Inflasi	%	3,70	3,16	1,87	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	
Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup				Pengeluaran per kapita	Rp.000	9.877	9.917	10.640	10.952	11.273	11.604	11.944	11.944	



No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal			Target Capaian				Kondisi Akhir (2023)
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)			%	7,27	-4,59	-0,08	-0,10	1,50	3,00	4,50	4,50
				Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Miliar	112,36	76,13	117,21	116,04	122,71	129,78	137,24	137,24
		Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri			%	2,00	2,00	4,57	5,50	6,50	7,50	9,00	9,00
				Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	240,99	56,28	164,96	160,02	166,39	173,02	179,91	179,91
				Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,32	3,72	3,42	3,35	3,30	3,19	3,17	3,17
		6	Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkeadilan dan penegakan hukum yang berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	Indeks Kriminalitas			Point	18,05	17,25	12,71	15,65	14,85	14,05
Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial					%	8,70	38,10	46,15	14,29	16,67	20,00	0,00	0,00
Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah					%	4,45	4,65	4,88	5,13	5,41	5,72	6,07	6,07
Partisipasi politik masyarakat					%	78,44	77,50	82,80	82,8	83,74	84,57	85,2	85,2	
	Meningkatnya kesadaran politik masyarakat			Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik masyarakat	%	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,00	
						Point	59,95	60,06	55,81	57,81	59,81	61,16	61,40	61,40



No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal			Target Capaian			Kondisi Akhir (2023)	
							2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	17,79	17,93	18,60	17,93	18,60	19,27	20,47	20,47
					Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	0	10	40	40	60	80	100	100



BAB

6



*Strategi, Arah Kebijakan,  
dan Program Pembangunan  
Daerah*



## **BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

### **6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional**

Untuk mempercepat implementasi dan konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran dalam proses pembangunan daerah, perlu dikembangkan strategi dan arah kebijakan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Strategi adalah pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun dan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya, diperlukan pedoman berupa arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki focus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu mengacu kepada strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian visi dan misi Presiden sebagaimana digariskan dalam RPJMN 2020-2024. Hal ini dilakukan agar adanya keselarasan pembangunan antara pusat dan daerah

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Strategi untuk mewujudkan arahan tersebut sebagai berikut:

#### **A. Pembangunan Sumber Daya Manusia, dengan strategi:**

1. Layanan dasar dan perlindungan sosial, yang meliputi: (a) Tata Kelola Kependudukan; (b) Perlindungan Sosial; (c) Kesehatan; (d) Pendidikan; (e) Pengentasan Kemiskinan; (f) Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda.
2. Produktivitas, yang meliputi: (a) Pendidikan dan Pelatihan; (b) Vokasi; (c) Pendidikan Tinggi; (d) Iptek dan Inovasi; (e) Prestasi Olahraga.

3. Pembangunan karakter, yang meliputi: (a) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila; (b) Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan; (c) Moderasi Beragama; (d) Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas.

## **B. Pembangunan Infrastruktur**

1. Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan strategi: a). Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau; b). Air Tanah dan Air Baku Aman Berkelanjutan; c). Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman; d). Keselamatan dan Keamanan Transportasi; e). Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur; f). Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi.
2. Infrastruktur Ekonomi yang mencakup:
  - a. Konektivitas: Darat, terdiri dari Jalan Tol, Jalan Baru, Jalan Trans Pulau 3T, dan pelabuhan penyeberangan baru; Laut, terdiri dari Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu; Udara terdiri dari Bandara Baru, Jembatan, dan Udara; Kereta Api, terdiri dari KA kecepatan, tinggi dan KA angkutan barang.
  - b. Sektor Ekonomi, terdiri dari Industri Pengolahan, Jasa dan Pariwisata, Pertanian, Perkebunan, Kawasan/Klaster, Kelautan-Perikanan.
3. Infrastruktur Perkotaan, dengan strategi: a). Transportasi Perkotaan; b). Energi Berkelanjutan Perkotaan; c). Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan; d). Akses Air Minum Perpipaan dan Sanitasi Perkotaan yang Layak dan Aman; e). Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan.
4. Energi Dan Ketenagalistrikan, dengan strategi: a). Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan; b). Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan; c). Kecukupan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan.
5. Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Untuk Transformasi Digital, dengan strategi: a). Penuntasan Infrastruktur TIK, Pemanfaatan Infrastruktur TIK, dan Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.

## **C. Penyederhanaan Regulasi**

1. Penerapan pendekatan *Omnibus Law* (Penggabungan Beberapa Ketentuan Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang dengan Membatalkan Undang-Undang Sebelumnya).
2. Pendekatan terhadap regulasi yang akan disusun, dengan strategi: a). Mengurangi tumpang tindih regulasi (*membentuk 1 regulasi baru dengan mencabut 2 aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama*); b). Regulasi yang berorientasi Tujuan; c). Regulasi yang mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas.

## **D. Penyederhanaan Birokrasi**

1. Penyederhanaan Prosedur.

2. Penyelenggaraan *E-Government*.
3. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Untuk Kegiatan Ekspor/Impor, Kepabeanaan, Dan Kepelabuhan.

**E. Transformasi Ekonomi**

1. Industrialisasi berbasis SDA dan rantai produksi Global.
2. Pengembangan Destinasi Unggulan, melalui: perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenities di Destinasi Pariwisata Prioritas.
3. Penguatan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, pada sektor: kuliner, *fashion*, kriya, aplikasi dan konten digital, *games*, film, dan musik.

Arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

**A. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:**

1. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
2. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

**B. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:**

1. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
2. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
3. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
4. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
5. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

**C. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:**

1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
3. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6. Pengentasan kemiskinan; dan
7. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

**D. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:**

1. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;

2. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
  3. Moderasi beragama; dan
  4. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
- E. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui:**
1. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
  2. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
  3. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
  4. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
  5. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
- F. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:**
1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
  2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
  3. Pembangunan Rendah Karbon.
- G. Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, melalui:**
1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas.
  2. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan.
  3. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber.
  4. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
  5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.
  6. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri.
  7. Pertahanan.

Terkait dengan kewilayahan, Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk dalam wilayah pembangunan Nusa Tenggara dalam RPJMN 2020-2024. Strategi pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dasar antara lain: (a) meningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, pertambangan dan pariwisata; dan



revitalisasi Balai Latihan Kerja; (b) percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, dan pengembangan infrastruktur; (c) pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilaksanakan terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020-2022); (d) pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan; (e) percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; dan (f) pelaksanaan pembangunan afirmatif.

2. Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan komoditas unggulan Wilayah Nusa Tenggara yaitu lada, pala, cengkeh, kopi, kelapa, tebu, garam, tembaga, emas, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap; (b) pengembangan sentra perikanan dan industri pengolahan hasil perikanan di SKPT/WPP; (c) pengembangan sentra produksi peternakan dan perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN, (d) revitalisasi kawasan transmigrasi; (e) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan; (f) pengembangan kawasan strategis, dan pengolahan sumber daya alam berupa perkebunan dan pertambangan; (g) destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); (h) pengembangan kawasan perkotaan; (i) pengembangan kawasan pusat pertumbuhan baru dengan bertumpu pada skema investasi swasta; (j) peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota besar, menengah, dan kecil untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan perdesaan; dan (k) penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.
3. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah); (b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; dan (c) percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama antardaerah.
4. Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi; (b) penyediaan pusat perdagangan komoditas mentah dan

barang hasil olahan di Nusa Tenggara; dan (c) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi.

5. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapaitas masyarakat dan aparat; (b) peningkatan ketahanan kawasan utara dan selatan Kepulauan Nusa Tenggara dan pemantapan pemulihan pascabencana di Pulau Lombok dan sekitarnya; (c) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; (d) peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; dan (e) peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, sertakonservasi hutan.

Kebijakan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara dalam tahun 2020-2024 diarahkan pada optimalisasi keunggulan wilayah dalam pertanian pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan dan pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau. Kebijakan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mendorong transformasi perekonomian dengan memperkuat peran sebagai pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri *Meeting, Incentive, Convetion, Exhibition* (MICE); industri kreatif berbasis budaya, percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung; serta pengembangan industri mangan dan tembaga.

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Pada RPJMN 2020-2024 direncanakan 41 *Major Project* yang dirinci hingga proyek dengan target, lokasi dan instansi pelaksana yang jelas, namun terdapat 20 *Major Project* yang berpotensi dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, seperti disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 6-1 Daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project) RPJMN 2020-2024 yang berpotensi dilaksanakan di Provinsi NTB**

No	Major Project
1	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi
2	10 Destinasi Pariwisata Prioritas, salah satunya Lombok-Mandalika
3	9 Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 <i>smelter</i>
4	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan
5	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng
6	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan <i>Fish Market</i> Bertaraf Internasional
7	Pemulihan Pascabencana, salah satunya Pulau Lombok dan Sekitarnya

No	Major Project
8	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan <i>Stunting</i>
9	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
10	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh
11	Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
12	Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA
13	Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital
14	18 Waduk Multiguna
15	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan
16	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)
17	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)
18	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis
19	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3
20	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

## 6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Dengan mempertimbangkan strategi pembangunan nasional tahun 2020-2024 dan visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu tahun 2019-2023. Perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 6-2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023**  
**Visi: Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang**

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah</b>				
1	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	1.1 Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana	1 Peningkatan Upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	Melakukan pengurangan risiko bencana melalui pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan bencana
2	Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	2.1 Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah	1 Peningkatan kemantapan jalan	Meningkatkan ketersediaan dan layanan infrastruktur jalan dan jembatan dalam kawasan strategis
			2 Peningkatan ketersediaan dan keberfungsian jaringan irigasi pertanian	Meningkatkan, memelihara dan membangun jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian modern
			3 Peningkatan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur air baku	Meningkatkan, memelihara dan membangun infrastruktur air baku

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
		2.2	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1	Peningkatan perhubungan antar wilayah yang berkualitas	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan Mendorong integrasi Konektivitas dalam wilayah dan koneksi antar wilayah		
<b>Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi</b>								
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan Tata kelola keuangan daerah, Asistensi Laporang Keuangan Daerah, koordinasi unsur pendukung pengelolaan keuangan dan Menjamin penyusunan LKPD tepat waktu		
		1.2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1	Peningkatan Kemandirian Daerah	Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui optimalisasi potensi sumber-sumber Pendapatan		
		1.3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Meningkatkan konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan dengan menerapkan perencanaan berbasis elektronik		
						Mendorong perencanaan yang berorientasi kepada hasil (outcome) yang terukur dan relevan		
						2	Penguatan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintah	Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
						3	Peningkatan dan Penguatan profesionalisme Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Meningkatkan kualitas dan profesionalisme APIP
		1.3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata laksana Pemerintahan		
						Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja		
						Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pembangunan		
		1.4	Meningkatnya Profesionalisme ASN	1	Penataan Sistem Manajemen SDM	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur		
						Meningkatkan kinerja dan disiplin ASN		
						2	Penataan Sistem Manajemen SDM ASN berbasis Sistem Merit	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi serta Manajemen Kinerja dan Disiplin dengan Menggunakan Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegrasi
				3	Peningkatan Kapasitas ASN melalui Pengembangan Kompetensi Manajerial,	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur		



Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
					Teknis, Fungsional, dan Sertifikasi		
		1.5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	1	Peningkatan standarisasi Pelayanan Pada Unit Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan
						Mengoptimalkan pemanfaatan pengelolaan pengaduan masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan publik	
				2	Peningkatan kualitas layanan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Memanfaatkan sistem informasi untuk transparansi dan penyediaan pelayanan publik berbasis elektronik	
<b>Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah</b>							
1	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	1.1	Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	1	Peningkatan Kualitas Kesehatan Keluarga	Meningkatkan kualitas pelayanan bagi ibu hamil dan melahirkan, bayi, balita, anak sekolah, remaja, dan lansia	
				2	Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan Tidak Menular	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan tenaga kesehatan dalam pencegahan, dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan	
				3	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan korban bencana dan penanggulangan masalah kesehatan	Meningkatkan kapasitas Tim Kesehatan dan sarana prasarana penanggulangan bencana dan masalah kesehatan	
				4	Peningkatan Akses dan Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang bermutu dan terstandar	Meningkatkan luasan fasilitas kesehatan yang terstandar	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan
				5	Peningkatan kualitas asupan gizi masyarakat	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan gizi masyarakat	
				6	Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan layanan Posyandu yang unggul dan berkualitas	Mengembangkan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, upaya kesehatan sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat
2	Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	2.1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	1	Peningkatan Pemerataan Pendidikan	Meningkatkan Akses pendidikan yang berkeadilan dan terjangkau	
				2	Peningkatan akses, mutu, dan daya saing pendidikan	Mewujudkan pemerataan penyebaran, kecukupan dan peningkatan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga kebudayaan	

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
						Mendorong penggunaan Teknologi Informasi dalam pendidikan	
						Mengirim seribu putra/putri NTB sekolah ke luar negeri	
						Memfasilitasi keminatan siswa melalui Program "Ayo Bercita-cita"	
						Memfasilitasi pelatihan TOEFL/IELT bagi putra/putri NTB yang akan melanjutkan sekolah ke Luar negeri	
						Melakukan Reengineering SMK	
				3	Peningkatan kualitas data dan tingkat literasi masyarakat	Meningkatkan layanan perpustakaan yang lebih luas dan berkualitas	
				4	Peningkatan pembinaan Pemuda dan olah raga Berprestasi	Meningkatkan kapasitas atlet dan pelatih	
						Meningkatkan ketersediaan sarana olahraga	
<b>Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan</b>							
1	Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	1.1	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	1	Peningkatan upaya konservasi dan rehabilitasi lahan, sungai, danau, laut, dan sumber air	Menurunkan beban polusi udara dan pencemaran air pada sektor industri, transportasi, masyarakat dan pemerintahan	
				2	Peningkatan upaya perlindungan hutan melalui penjagaan batas kawasan berbasis pemberdayaan masyarakat	Penguatan peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan	
				3	Peningkatan upaya perlindungan dan pengawasan sumberdaya pesisir, laut dan Pulau-pulau kecil melalui penegakan aturan dan partisipasi kelompok masyarakat pengawas	Menguatkan regulasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil	
				4	Peningkatan pengawasan dan pengendalian RTRW dan RZWP3K	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian RTRW dan RZWP3K	
		1.2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	1	Peningkatan kinerja pengelolaan sampah	Meningkatkan kinerja pengurangan dan penanganan sampah	
				2	Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	
<b>Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi</b>							
1	Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan	1.1	Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha	1	Optimalisasi manfaat destinasi unggulan dan kawasan strategis (Mandalika dan SAMOTA, dll.) untuk	Meningkatkan Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
1	investasi yang berkualitas			peningkatan kesejahteraan masyarakat		
		1.2	Meningkatnya produksi Sektor Primer	1	Peningkatan produksi pertanian dengan mengembangkan kawasan berbasis pertanian	Adopsi teknologi budidaya untuk meningkatkan produksi pertanian dan Pengembangan produk pertanian
						Meningkatkan kapasitas SDM pertanian
				2	Peningkatkan produksi dan pengelolaan hasil peternakan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditas peternakan
				3	Pengembangan pengelolaan dan budidaya perikanan	Mengembangkan budidaya perikanan potensial yang memberikan nilai tambah
				4	Peningkatan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Mengembangkan potensi sumber daya hutan berbasis industrialisasi
		1.3	Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	1	Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial dan kesehatan	Meningkatkan perlindungan, jaminan sosial dan kesehatan bagi masyarakat miskin
		1.4	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	1	Peningkatan Ketersediaan, Distribusi dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (Usulan Ketahanan Pangan)	Mendorong Peningkatan Keragaman Ketersediaan Dan Konsumsi Pangan Serta Kualitas Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
		1.5	Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	1	Pembangunan sistem pengelolaan air minum yang terintegrasi untuk pemenuhan air minum layak	Meningkatkan kapasitas prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
						Meningkatkan kualitas air minum perkotaan dan perdesaan
				2	Penyambungan listrik murah dan hemat	Meningkatkan jumlah rumah tangga yang tersambung listrik
				3	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan layak huni	Diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan
				4	Mendorong penyediaan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman	Diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman
		1.6	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	1	Pengawasan terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok	Meningkatkan pengawasan terhadap distribusi barang-barang kebutuhan pokok
1.7	Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	1	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan perdagangan daerah		
				Meningkatkan keamanan dan kenyamanan perdagangan daerah		
2	Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	2.1	Meningkatnya daya saing pariwisata	1	Pengembangan desa wisata dan wisata halal	Mendorong pembentukan desa wisata sesuai potensi wilayah
					Mengembangkan daerah wisata dengan memenuhi standar wisata halal	
					Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Obyek Daya Tarik	

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan			
						Wisata serta promosi dan pemasaran pariwisata	Meningkatkan kualitas atraksi pariwisata		
3	Terwujudnya perindustrian yang unggul	3.1	Meningkatnya daya saing industri	1	Pengkajian dan penerapan teknologi permesinan, teknologi pengolahan pangan, teknologi digital dan industri kreatif, serta teknologi pertanian, perikanan, dan peternakan (Pengembangan Science Technology Industrial Park (STIP))	Pengujian dan sertifikasi alat produksi	Mengelola taman edukasi dan inkubator bisnis		
						2	Peningkatan daya saing produk industri	Mendorong pengembangan industri olahan, industri kreatif dan industri permesinan	Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan UKM
				3.2	Menurunnya pengangguran terbuka			1	Peningkatan pelatihan produktivitas dan pengembangan penempatan tenaga kerja
		2	Peningkatan perlindungan hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja dan pengembangan pengawasan ketenagakerjaan			Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan pengembangan kesejahteraan tenaga kerja	Meningkatkan Pengawasan Ketenagakerjaan		
						<b>Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan</b>			
		1	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	1.1	Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	1	Pembinaan lembaga-lembaga sosial, agama, adat, dan kemasyarakatan	Meningkatkan peran lembaga-lembaga sosial, agama, adat, dan kemasyarakatan dalam pembentukan karakter masyarakat	Melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya dan cagar budaya dengan menjadikan Islamic Center, Istana Dalam Loka, Asi Mbojo, dan cagar budaya lainnya sebagai pusat peradaban
1.2	Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah							1	Penanganan pelanggaran PERDA melalui tindakan preventif dan represif
				2		Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak			



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Penguatan kemitraan bersama aparat penegak hukum dan masyarakat	Hukum, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian masalah dengan pendekatan Restoratif Justice
		3 Penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum	Meningkatkan Peran Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat
	1.3 Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	1 Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam politik	Meningkatkan keterlibatan Masyarakat dalam politik
	1.4 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan peran serta perempuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan ketahanan keluarga
		2 Peningkatan Kabupaten/Kota yang mampu memenuhi hak-hak anak	Meningkatkan pemenuhan Hak anak melalui 5 Klaster KLA

### 6.3. Program Pembangunan Daerah

#### 6.3.1. Program Strategis dan Program Unggulan Daerah

Program Strategis dan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan program yang disampaikan sejak saat kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilaksanakan pada tahun 2019-2023. Program strategis dan unggulan ini merupakan wujud dari visi dan pencapaian misi yang telah disusun oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk mengatasi permasalahan ditengah masyarakat.

Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis serta visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, maka ditetapkan 10 (sepuluh) program strategis dalam pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana.
2. Pembangunan Konektivitas & Aksesibilitas Wilayah.
3. Reformasi Birokrasi.
4. Pengelolaan Kesehatan untuk Daya Saing SDM.
5. Pengelolaan Pendidikan untuk Daya Saing SDM.
6. Pengelolaan Lingkungan Bersih & Berkelanjutan.
7. Pertanian/Agribisnis dan Investasi Progresif.
8. Pariwisata Andalan.
9. Industrialisasi Unggul.

10. Meraih Masyarakat Madani (Bahagia).

Pada semua Program Strategis terdapat sebanyak 75 Program Unggulan, seperti disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 6-3 Program Strategis dan Program Unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023**

No.	Misi/Program Strategis/ Program Unggulan	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	
			Utama	Pendukung
<b>I</b>	<b>Misi 1 NTB Tangguh dan Mantap</b>			
1	<i>Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana</i>			
1	<b>Desa Tangguh Bencana (DESTANA)</b>	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Pelaksana BPBD NTB	DPMPDes
2	Sekolah Aman Bencana	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Pelaksana BPBD NTB	Disdikbud
3	Sistem Informasi Aman Gangguan Bencana (SI-AGA)	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Pelaksana BPBD NTB	Diskominfotik
2	<i>Pembangunan Konektivitas &amp; Aksesibilitas Wilayah</i>			
1	<b>NTB Terkoneksi</b>	Perhubungan	Dishub	Diskominfotik
2	<b>Percepatan Jalan Mantap</b>	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR	Dishub
3	Air Bersih/Air Minum untuk Semua	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR	Dikes
4	Irigasi Cukup	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR	Dinas Pertanian
5	Nusa Terang Benderang	Energi Dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM	
6	SPAM Regional	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DPUPR	Dikes
<b>II</b>	<b>Misi 2 NTB Bersih dan Melayani</b>			
1	<i>Reformasi Birokrasi</i>			
1	<b>SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)</b>	Komunikasi dan Informatika	Diskominfotik	
2	eNTeBe Plan/SIPD	Perencanaan	Bappeda	Diskominfotik, Biro AP
3	NTB SDG's Center	Perencanaan	Bappeda	
4	Research Based Policy	Penelitian dan Pengembangan	Bappeda	
5	NTB Satu Peta	Penelitian dan Pengembangan	Bappeda	DPUPR, DLHK
6	NTB Satu Data	Statistik	Diskominfotik	Bappeda
7	NTB Care	Komunikasi dan Informatika	Diskominfotik	
8	e-Pendapatan	Kuangan	Bappeda	
9	NTB WTP	Pengawasan, Keuangan, Perencanaan	Inspektorat, BPKAD, Bappeda	

No.	Misi/Program Strategis/ Program Unggulan	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	
			Utama	Pendukung
10	SAKIP Level A	Pengawasan, Perencanaan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Inspektorat, Bappeda, Biro Organisasi	BKD
11	Agen Perubahan	Kepegawaian	BKD	BPSDM
12	Manajemen Talenta	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	BKD, BPSDM	
<b>III</b>	<b>Misi 3 NTB Sehat dan Cerdas</b>			
1	<i>Pengelolaan Kesehatan Untuk Daya Saing SDM</i>			
1	<b>Revitalisasi Posyandu</b>	Kesehatan	Dikes	DPMPDes, Biro Kesra
2	<b>NTB Berolahraga</b>	Pemuda dan Olahraga	Dispora	Dikes
3	Generasi Emas NTB	Kesehatan, Pendidikan	Dinas Kesehatan, Disdikbud	Bappeda
4	Jamban Keluarga/Stop BABS	Kesehatan	Dikes	DPUPR
5	Rumah Layak Huni	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Disperkim	
2	<i>Pengelolaan Pendidikan Untuk Daya Saing SDM</i>			
1	<b>1000 Cendikia/Beasiswa</b>	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Biro Kesra	Disdikbud
2	<b>Re-Engineering SMK</b>	Pendidikan	Disdikbud	Disperin
3	<b>PAUD Holistic Integratif</b>	Pendidikan	Disdikbud	DP3AP2KB
4	Literasi Digital	Perpustakaan	Disperpusda	
5	Rumah Bahasa	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Biro Kesra	Disdikbud
6	NTB Juara	Pemuda dan Olahraga	Dispora	Disdikbud
7	Ayo Bercita - Cita	Pendidikan	Disdikbud	Disperpusda
<b>IV</b>	<b>Misi 4 NTB Asri dan Lestari</b>			
1	<i>Pengelolaan Lingkungan Bersih &amp; Berkelanjutan</i>			
1	<b>NTB Hijau</b>	Lingkungan Hidup	DLHK	Distanbun
2	<b>NTB Zero Waste/Pengolahan Sampah/Bank Sampah</b>	Lingkungan Hidup	DLHK	SatPol PP, Dinas Perkim, DPUPR, Biro Adpim, Disdikbud, DPMPDes, Dispar
3	Taman Asri/Indah	Lingkungan Hidup	DLHK	DPUPR
4	Tata Ruang Berkelanjutan	Penataan Ruang	DPUPR	Bappeda, Biro Pemerintahan
<b>V</b>	<b>Misi 5 NTB Sejahtera dan Mandiri</b>			
1	<i>Pertanian/Agribisnis dan Investasi Progresif</i>			
1	<b>Pertanian Lestari/Modern</b>	Pertanian	Distanbun	DLHK, Disnakeswan, DKP
2	<b>Bumdes Maju/Mahadesa</b>	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	DPMPDes	Biro Pemerintahan

No.	Misi/Program Strategis/ Program Unggulan	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	
			Utama	Pendukung
3	Melawan Kemiskinan dari Desa/Penangulangan Kemiskinan	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	DPMPDes	Bappeda, Dinsos
4	Kampung Unggas	Pertanian	Disnakeswan	
5	Budidaya Lobster	Kelautan dan Perikanan	Dislutkan	
6	Kawasan Rumah Pangan Lestari/Pekarangan Pangan Lestari (KRPL/P2L)	Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Distanbun, Dislutkan, Disnakeswan
7	Mall Investasi dan Pelayanan Publik	Penanaman Modal	DPMPTSP	Biro Perekonomian, Biro Pemerintahan
8	Ramah Investasi/ <i>Online Services</i>	Penanaman Modal	DPMPTSP	Biro Pemerintahan, Badan Penghubung Daerah
9	Revitalisasi BLK	Tenaga Kerja	Disnakertrans	
<b>2</b>	<b><i>Pariwisata Andalan</i></b>			
1	KEK Mandalika	Pariwisata	Dispar	Bappeda, DPUPR, DPMPTSP
2	Penataan 3 Gili KLU dan Pulau-pulau kecil	Pariwisata	Dispar	Dislutkan
3	Wisata Halal dan Sehat	Pariwisata	Dispar	Dikes
4	Penataan 99 Desa Wisata	Pariwisata	Dispar	DPMPDes
5	Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora	Pariwisata	Dispar, DLHK, ESDM	Bappeda
6	Kawasan Samota	Penanaman Modal	DPMPTSP	Bappeda, DPUPR, Dispar
<b>3</b>	<b><i>Industrialisasi Unggul</i></b>			
1	<b>Industri Peralatan dan Permesinan</b>	Perindustrian	Disperin	
2	<b>Industri Peternakan/ Pakan Ternak</b>	Pertanian	Disnakeswan	Distanbun, Disperin
3	Industri Motor Listrik	Perindustrian	Disperin	
4	Industri Pangan dan Holtikultura	Pertanian	Distanbun	Disperin
5	Industri Perkebunan	Pertanian	Distanbun	Disperin
6	Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul	Kehutanan	DLHK	Disperin
7	Industri Perikanan: Garam, Tepung Ikan	Kelautan dan Perikanan	Dislutkan	Disperin
8	Industri Pertambangan (Smelter) dan Industri Turunannya	Perindustrian	Disperin	Dinas ESDM, Bappeda
9	Rumah Kemasan	Perindustrian	Disperin	Disdag, Diskop UKM



No.	Misi/Program Strategis/ Program Unggulan	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	
			Utama	Pendukung
10	Industri Pakaian: Busana Muslim, Tenun Ikat	Perindustrian	Disperin	
11	Science Technology and Industrial Park (STIPark)	Perindustrian	Disperin	Disdikbud
12	Koperasi Berprestasi	Koperasi dan UKM	Diskop UKM	
13	UMKM Bersaing	Koperasi dan UKM	Diskop UKM	Disperin
14	Bela Beli Produk Lokal/NTB Mall	Perdagangan	Disdag	Diskop UKM, Disperin
<b>VI</b>	<b>Misi 6 NTB Aman dan Berkah</b>			
1	<i>Meraih Masyarakat Madani (Bahagia)</i>			
1	<b>Kampung Madani dan Sehat</b>	Pemerintahan Umum	Bakesbangpol	DPMPDes
2	<b>Mawar Emas (Melawan Rentenir Berbasis Masjid)</b>	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Biro Ekonomi SETDA	
3	Bale Mediasi	Pemerintahan Umum	Bakesbangpol	Satpol PP, Biro Hukum SETDA
4	Desa Bersinar	Pemerintahan Umum	Bakesbangpol	Dikes, Satpol PP
5	Kampung Digital	Komunikasi dan Informatika	Diskominfotik	DPMPDes
6	Kota Layak Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3AP2KB	
7	Ramah Difabel	Sosial	Dinas Sosial	Dishub
8	Revitalisasi Islamic Center	Pariwisata	Dispar	Biro Kesra
9	Sekolah Perjumpaan	Pemerintahan Umum	Bakesbangpol	

### 6.3.2. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah disusun sesuai dengan nomenklatur program yang tertuang dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, maka program pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan Kurikulum
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
5. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
6. Program Pengembangan Kebudayaan
7. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
8. Program Pembinaan Sejarah
9. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
10. Program Pengelolaan Permuseuman
11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
12. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
13. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

14. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
15. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
16. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
17. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
18. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
19. Program Penyelenggaraan Jalan
20. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
21. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
22. Program Pengembangan Perumahan
23. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
24. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
25. Program Penanggulangan Bencana
26. Program Pemberdayaan Sosial
27. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
28. Program Rehabilitasi Sosial
29. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
30. Program Penanganan Bencana
31. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
32. Program Perencanaan Tenaga Kerja
33. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
34. Program Penempatan Tenaga Kerja
35. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
36. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
37. Program Perlindungan Perempuan
38. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
39. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
40. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
41. Program Perlindungan Khusus Anak
42. Program Pengendalian Penduduk
43. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
44. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
45. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
46. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
47. Program Penanganan Kerawanan Pangan
48. Program Pengawasan Keamanan Pangan
49. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
50. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
51. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
52. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
53. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
54. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

55. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
56. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
57. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
58. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
59. Program Pengelolaan Persampahan
60. Program Pengelolaan Hutan
61. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
62. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
63. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
64. Program Pendaftaran Penduduk
65. Program Pencatatan Sipil
66. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
67. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
68. Program Peningkatan Kerjasama Desa
69. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
70. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
71. Program Pengelolaan Pelayaran
72. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
73. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
74. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
75. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
76. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
77. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
78. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
79. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
80. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
81. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
82. Program Pengembangan UMKM
83. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
84. Program Promosi Penanaman Modal
85. Program Pelayanan Penanaman Modal
86. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
87. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
88. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
89. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
90. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
91. Program Pembinaan Perpustakaan
92. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
93. Program Pengelolaan Arsip
94. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

95. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
96. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
97. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
98. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
99. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
100. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
101. Program Pemasaran Pariwisata
102. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
103. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
104. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
105. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
106. Program Penyuluhan Pertanian
107. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
108. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
109. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
110. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara
111. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
112. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
113. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
114. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
115. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
116. Program Pengembangan Ekspor
117. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
118. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
119. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
120. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
121. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
122. Program Administrasi Umum
123. Program Penataan Organisasi
124. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
125. Program Kesejahteraan Rakyat
126. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
127. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
128. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
129. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
130. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
131. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
132. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
133. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
134. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
135. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
136. Program Kepegawaian Daerah
137. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia



138. Program Pelayanan Penghubung
139. Program Penyelenggaraan Pengawasan
140. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
141. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
142. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
143. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
144. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
145. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

### 6.3.3. Integrasi Program Unggulan ke dalam Program Pembangunan Daerah

Program unggulan daerah Provinsi NTB merupakan program teknis yang akan dilaksanakan sebagai pengejawantahan dari visi, misi, tujuan, dan sasaran. Untuk melaksanakan program unggulan dapat diintegrasikan dengan program pembangunan daerah. Adapun integrasi program tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 6-4 Program pembangunan daerah provinsi NTB yang ditetapkan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 dan telah mempertimbangkan Permendagri 13 Tahun 2006**

No.	BIDANG URUSAN	No.	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1	Program Pengelolaan Pendidikan ( <b>Termasuk : 1000 Cendikia/Beasiswa, Re-Engineering SMK, Sekolah Aman Bencana, Generasi Emas NTB, Ayo Bercita-Cita, PAUD HI</b> )	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		2	Program Pengembangan Kurikulum ( <b>Termasuk : STIP Inovatif, Revitalisasi BLK, NTB Juara</b> )	
		3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
		4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	
		5	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra ( <b>Termasuk : Rumah Bahasa</b> )	
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	6	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		7	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
		8	Program Pembinaan Sejarah	
		9	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	
		10	Program Pengelolaan Permuseuman	
3	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat ( <b>Termasuk : Generasi Emas NTB, Jamban Keluarga/Stop BABS, Wisata Halal dan Sehat, Desa Bersinar</b> )	Dinas Kesehatan
		12	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		13	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	

No.	BIDANG URUSAN	No.	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		14	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan ( <b>Termasuk : Revitalisasi Posyandu, Rumah Layak Huni, SPAM Regional</b> )	
		15	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat ( <b>Termasuk : Wisata Halal dan Sehat</b> )	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
		16	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat ( <b>Termasuk : Wisata Halal dan Sehat</b> )	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
		17	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir
4	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	18	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) ( <b>Termasuk : Irigasi Cukup</b> )	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		19	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ( <b>Termasuk : Air Bersih/Air Minum Untuk Semua, SPAM Regional</b> )	
		20	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional ( <b>Termasuk : NTB Zero Waste/Pengolahan Sampah/Bank Sampah, Taman Asri/Indah</b> )	
		21	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah ( <b>Termasuk : Jamban Keluarga/Stop BABS, Rumah Layak Huni</b> )	
		22	Program Penyelenggaraan Jalan ( <b>Termasuk : Percepatan Jalan Mantap, Nusa Terang Banderang, Penataan 3 Gili KLU dan Pulau-pulau Kecil, KEK Mandalika, Kawasan Samota</b> )	
		23	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
		24	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang ( <b>Termasuk : Tata Ruang Berkelanjutan, NTB Satu Peta</b> )	
5	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	25	Program Pengembangan Perumahan ( <b>Termasuk : Rumah Layak Huni</b> )	
		26	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) ( <b>Termasuk : NTB Zero Waste, Penataan 99 Desa Wisata, Jamban Keluarga/Stop BABS</b> )	
6	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	27	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum ( <b>Termasuk : Desa Bersinar, Bale Mediasi, Kampung Madani dan Sehat, Kota layak Anak</b> )	Satuan Polisi Pamong Praja
		28	Program Penanggulangan Bencana ( <b>Termasuk : Desa Tangguh Bencana, Sekolah Aman Bencana, Si-AGA, NTB Zero Waste/Pengolahan Sampah/Bank Sampah</b> )	Pelaksana BPBD Provinsi NTB
7	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	29	Program Pemberdayaan Sosial ( <b>Termasuk : Ramah Difabel, Melawan Kemiskinan dari Desa/Penanggulangan Kemiskinan</b> )	Dinas Sosial

No.	BIDANG URUSAN	No.	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		30	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	
		31	Program Rehabilitasi Sosial ( <b>Termasuk : Desa Bersinar</b> )	
		32	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
		33	Program Penanganan Bencana	
		34	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
8	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	35	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		36	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja ( <b>Termasuk : Revitalisasi BLK, STIP Inovatif</b> )	
		37	Program Penempatan Tenaga Kerja	
9	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	38	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	39	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		40	Program Perlindungan Perempuan	
		41	Program Peningkatan Kualitas Keluarga ( <b>Termasuk : Ayo Bercita-cita</b> )	
		42	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	
		43	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) ( <b>Termasuk : Kota Layak Anak, PAUD HI</b> )	
		44	Program Perlindungan Khusus Anak	
11	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	45	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		46	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
		47	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
12	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	48	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan ( <b>Termasuk : Pertanian Lestari/Modern</b> )	Dinas Ketahanan Pangan
		49	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat ( <b>Termasuk : KRPL/P2L</b> )	
		50	Program Penanganan Kerawanan Pangan	
		51	Program Pengawasan Keamanan Pangan	
13	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	52	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum ( <b>Termasuk : Tata Ruang Berkelanjutan</b> )	Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah
		53	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	
14	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	54	Program Perencanaan Lingkungan Hidup ( <b>Termasuk : NTB Satu Peta</b> )	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		55	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup ( <b>Termasuk : NTB Hijau, Pertanian Lestari/Modern</b> )	
		56	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati) ( <b>Termasuk : Taman Asri/Indah</b> )	

No.	BIDANG URUSAN	No.	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		57	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	
		58	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) <b>(Termasuk : SPAM Regional)</b>	
		59	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
		60	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
		61	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
		62	Program Pengelolaan Persampahan <b>(Termasuk : NTB Zero Waste/Pengolahan Sampah/Bank Sampah, Penataan 99 Desa Wisata, Penataan 3 Gili KLU &amp; Pulau-pulau Kecil)</b>	
15	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	63	Program Pengelolaan Hutan <b>(Termasuk : Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani &amp; Tambora)</b>	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		64	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	
		65	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	
		66	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	
16	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	67	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		68	Program Pencatatan Sipil	
		69	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		70	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	
17	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	71	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		72	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat <b>(Termasuk :Melawan Kemiskinan dari Desa/Penanggulangan Kemiskinan, BUMDes Maju/Mahadesa, DESTANA, Revitalisasi Posyandu, Kampung Digital, Penataan 99 Desa Wisata, Kampung Madani dan Sehat)</b>	
18	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	73	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) <b>(Termasuk : NTB Terkoneksi, Ramah Difabel, Percepatan Jalan Mantap)</b>	Dinas Perhubungan
		74	Program Pengelolaan Pelayaran <b>(Termasuk : Penataan 3 Gili KLU dan Pulau-pulau Kecil)</b>	
19	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	75	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik <b>(Termasuk : NTB Terkoneksi, Penataan 3 Gili KLU dan Pulau-pulau Kecil)</b>	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik



No.	BIDANG URUSAN	No.	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		76	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika <b>(Termasuk : NTB Care, SPBE, Kampung Digital, Si-AGA, e-Pendapatan, eNTeBe Plan/SIPD, Literasi Digital, Ramah Investasi/Online Service)</b>	
20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	77	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor <b>(Termasuk : NTB Satu Data)</b>	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	78	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
22	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	79	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		80	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	
		81	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi <b>(Termasuk : Koperasi Berprestasi)</b>	
		82	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
		83	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	
		84	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) <b>(Termasuk : Industri Perikanan: Garam, Tepung Ikan, Industri Motor Listrik, Industri Pangan &amp; Holtikultura, Industri Perkebunan, Industri Peralatan&amp;Permesinan,Rumah Kemasan, Industri Pakaian: Busana Muslim, Tenun Ikat)</b>	
		85	Program Pengembangan UMKM <b>(Termasuk: Bela Beli Produk Lokal/NTB Mall, UMKM Bersaing)</b>	
23	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	86	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal <b>(Termasuk: Ramah Investasi/Online Service)</b>	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		87	Program Promosi Penanaman Modal <b>(Termasuk: Mall Investasi &amp; Pelayanan Publik, KEK Mandalika, Kawasan Samota)</b>	
		88	Program Pelayanan Penanaman Modal <b>(Termasuk: Ramah Investasi/Online Service)</b>	
		89	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
		90	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal <b>(Termasuk: Ramah Investasi/Online Service)</b>	
24	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	91	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan <b>(Termasuk : STIP Inovatif)</b>	Dinas Pemuda dan Olahraga
		92	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan <b>(Termasuk : NTB Juara)</b>	
		93	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	
25	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	94	Program Pembinaan Perpustakaan <b>(Termasuk : Literasi Digital, Rumah Bahasa, Ayo Bercita-Cita)</b>	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		95	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	
26	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	96	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		97	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	

No.	BIDANG URUSAN	No.	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	
27	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	98	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil ( <b>Termasuk : Penataan 3 Gili KLU &amp; Pulau-pulau Kecil</b> )	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		99	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		
		100	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya ( <b>Termasuk : Budidaya Lobster, KRPL/P2L</b> )		
		101	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan		
		102	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan ( <b>Termasuk : Industri Perikanan: Garam, Tepung Ikan, Bela Beli Produk Lokal/NTB Mall</b> )		
28	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	103	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata ( <b>Termasuk :Penataan 3 Gili KLU &amp; Pulau-pulau Kecil, Penataan 99 Desa Wisata, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani &amp; Tambora, KEK Mandalika, Kawasan Samota, Wisata Halal dan Sehat, Revitalisasi Islamic Center, NTB Zero Waste/Pengolahan Sampah/Bank Sampah</b> )	Dinas Pariwisata	
		104	Program Pemasaran Pariwisata		
		105	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		
		106	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		
29	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	107	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian ( <b>Termasuk: Bela Beli Produk Lokal/NTB Mall</b> )	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		108	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian ( <b>Termasuk : Pertanian Lestari/Modern, Irigasi Cukup, NTB Hijau, Industri Pangan &amp; Holtikultura, Industri Perkebunan, Industri Peternakan/Pakan Ternak</b> )		
		109	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		
		110	Program Penyuluhan Pertanian ( <b>Termasuk : KRPL/P2L</b> )		
			111	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian ( <b>Termasuk: Bela Beli Produk Lokal/NTB Mall</b> )	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			112	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian ( <b>Termasuk : Kampung Unggas, Industri Peternakan/Pakan Ternak, Pertanian Lestari/Modern</b> )	
			113	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			114	Program Penyuluhan Pertanian ( <b>Termasuk : KRPL/P2L</b> )	
30	Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	115	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian ( <b>Termasuk : Geopark-Cagar Biosfer Rinjani &amp; Tambora</b> )	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	

No.	BIDANG URUSAN	No.	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		116	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara <b>(Termasuk : Industri Pertambangan (Smelter) dan Turunannya)</b>	
		117	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	
		118	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan <b>(Termasuk : Nusa Terang Benderang)</b>	
31	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	119	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perdagangan
		120	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
		121	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
		122	Program Pengembangan Ekspor	
		123	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	
		124	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri <b>(Termasuk : Bela Beli Produk Lokal/NTB Mall, Industri Pakaian: Busana Muslim, Tenun Ikat, Rumah Kemasan, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Industri Pangan &amp; Holtikultura, Industri Perkebunan, UMKM Bersaing, Kampung Unggas, Budidaya Lobster)</b>	
32	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	125	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri <b>(Termasuk : Industri Pakaian: Busana Muslim, Tenun Ikat, Industri Peralatan&amp;Permesinan, Industri Motor Listrik, Rumah Kemasan, STIP Inovatif, Industri Pertambangan (Smelter) dan Industri Turunannya, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, NTB Zero Waste/Pengolahan Sampah/Bank Sampah, Industri Perikanan: Garam, Tepung Ikan, Industri Peternakan/Pakan Ternak, Re-Engineering SMK, Industri Pangan &amp; Holtikultura, Industri Perkebunan, UMKM, Bela Beli Produk Lokal/NTB Mall)</b>	Dinas Perindustrian
		126	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	
		127	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
33	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	128	Program Administrasi Umum <b>(Termasuk : NTB WTP, NTB Terkoneksi, NTB Care)</b>	Biro Umum
		129	Program Penataan Organisasi <b>(Termasuk : SAKIP Level A, Manajemen Talenta, SPBE)</b>	Biro Organisasi
		130	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah <b>(Termasuk : Si-AGA, Tata Ruang Berkelanjutan, BUMDes Maju/Mahadesa, Mall Investasi&amp;Pelayanan Publik, Ramah Investasi)</b>	Biro Pemerintahan
		131	Program Kesejahteraan Rakyat <b>(Termasuk : Generasi Emas NTB, Revitalisasi Posyandu, Desa Bersinar, Revitalisasi Islamic Center)</b>	Biro Kesejahteraan Rakyat
		132	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum <b>(Termasuk : Bale Mediasi)</b>	Biro Hukum

No.	BIDANG URUSAN	No.	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		133	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa <b>(Termasuk : SPBE)</b>	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		134	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan <b>(Termasuk : eNTeBe Plan/SIPD, SAKIP Level A)</b>	Biro Administrasi Pembangunan
34	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	135	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
35	Unsur Penunjang Urusan Perencanaan	136	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah <b>(Termasuk : eNTeBe Plan/SIPD, NTB WTP, SAKIP Level A, SPBE)</b>	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		137	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah <b>(Termasuk : Generasi Emas NTB, Melawan Kemiskinan dari Desa/Penanggulangan Kemiskinan , SDG's Centre, KEK Mandalika, Kawasan Samota, Industri Pertambangan (Smelter) dan Industri Turunannya, Tata Ruang Berkelanjutan, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani &amp; Tambora, SPBE)</b>	
36	Penelitian Dan Pengembangan	138	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah <b>(Termasuk : Research Based Policy, NTB Satu Peta, NTB Satu Data)</b>	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
37	Keuangan	139	Program Pengelolaan Keuangan Daerah <b>(Termasuk : NTB WTP, NTB Satu Data, SAKIP Level A, SPBE)</b>	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku SKPD,
		140	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		141	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah <b>(Termasuk : e - Pendapatan)</b>	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		142	Program Pengelolaan Keuangan Daerah <b>(Termasuk : NTB WTP)</b>	
38	Kepegawaian	143	Program Kepegawaian Daerah <b>(Termasuk : Manajemen Talenta, Agen Perubahan, SAKIP Level A, 1000 Cendikia/Beasiswa)</b>	Badan Kepegawaian Daerah
39	Pendidikan Dan Pelatihan	144	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia <b>(Termasuk : Manajemen Talenta, Agen Perubahan, STIP Inovatif)</b>	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
40	Penghubung	145	Program Pelayanan Penghubung <b>(Termasuk : Ramah Investasi/Online Service)</b>	Badan Penghubung Daerah
41	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	146	Program Penyelenggaraan Pengawasan <b>(Termasuk : NTB WTP)</b>	Inspektorat Daerah
		147	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi <b>(Termasuk : SAKIP Level A)</b>	
42	Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa Dan Politik	148	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
		149	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
		150	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	



No.	BIDANG URUSAN	No.	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		151	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya <b>(Termasuk : Desa Bersinar)</b>	
		152	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial <b>(Termasuk : Bale Mediasi, Kampung Madani&amp;Sehat, Sekolah Perjumpaan)</b>	

#### 6.4. Pagu Indikatif Pendanaan Program Pembangunan Daerah

Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dilakukan melalui program pembangunan daerah (telah diintegrasikan program unggulan) yang akan mendukung setiap sasaran pembangunan dan indikatornya. Program pembangunan ini merupakan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019, terjadi perubahan nomenklatur program, dimana pada tahun 2019-2020 masih berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sementara pada tahun 2021-2023 sudah berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah ditetapkan.

Program Pembangunan Daerah menurut visi, misi, tujuan dan sasaran yang disertai pagu indikatif pendanaan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, disajikan pada Tabel 6-5 dan Tabel 6-6 berikut.

**Tabel 6-5 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi NTB Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006**

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Realisasi 2019		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
							Kinerja	Rp (Juta)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah</b>																	
<b>Tujuan 1: Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana</b>	Indeks Risiko Bencana		177,50	177,50	129,02	17.351	167,01	4.363									
<b>Sasaran 1: Meningkatnya kapasitas dan pengurangan kerentanan terhadap bencana</b>	Indeks Risiko Bencana		177,50	177,50	129,02	15.779	167,01	3.291									
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Masyarakat dan Dunia Usaha Aktif dalam Penanggulangan Bencana	%	5	10	15	15.779	20	3.291								Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
<b>Sasaran 2: Pulihnya Infrastruktur yang rusak akibat bencana gempa bumi</b>	Persentase sarana dan prasarana infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi	%	0	10	50	1.572	100.00	1.072									
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Persentase rumah korban gempa yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	%	-	20	59	863	100	339								Dinas Perumahan dan Permukiman	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	81,37	709	100	733								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
<b>Tujuan 2: Terwujudnya pembangunan Infrastruktur untuk Pengembangan Sektor Unggulan</b>	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur			74,6	74,92	229.361	77,14	247.341									
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar</b>	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur		-	74,6	74,92	223.923	77,14	244.983									

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Realisasi 2019		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
							Kinerja	Rp (Juta)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program pembangunan jalan dan jembatan	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	77,16	83,65	80,28	64.688	86,65	143.699									Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	77,16	83,65	83,65	50.706	86,65	19.949									Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Daya tumbuh wilayah strategis	%	19,86	20,26	20,26	18.136	24,03	303									Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	%	55,31	55,35	55,41	45.574	57,07	34.254									Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Kapasitas tampung	juta m3	-	3,76	3,86	44.821	4,914	46.779									Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>Sasaran 2 : Meningkatnya konektivitas antar wilayah</b>	<b>Indeks konektivitas transportasi publik</b>			-	<b>78,64</b>	<b>5.437</b>	<b>78,64</b>	<b>2.358</b>									
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan prasarana dan fasilitas perhubungan yang terpelihara	%	0	0	100	170	100	449									Dinas Perhubungan
Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Cakupan Angkutan yang Layak	%	70,23	71,95	70,24	1.627	79,76	965									Dinas Perhubungan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Cakupan sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia	%	50	50	-	-	50,00	264									Dinas Perhubungan
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Rasio Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas	%	-	-	3,13	287	3,08	521									Dinas Perhubungan
Program Pengembangan Transportasi Laut	Rasio Pertumbuhan Angkutan Penumpang	%	23,9	-15	5,00	3.353	5,00	159									Dinas Perhubungan
<b>Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi</b>																	
<b>Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>		<b>CC</b>	<b>CC</b>	<b>B</b>	<b>77.638</b>	<b>B</b>	<b>81.601</b>									

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Realisasi 2019		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
							Kinerja	Rp (Juta)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
yang bersih, bebas KKN dan akuntabel																	
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah</b>	<b>Opini BPK</b>		<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	<b>6.610</b>	<b>WTP</b>	<b>27.832</b>									
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penetapan APBD Prov. NTB	Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	284	Tepat waktu	23.946									Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Opini laporan keuangan Prov. NTB	Jenis	WTP	WTP	WTP		WTP	-									
Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	- Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	%	67.00	80.00	33,94	3.674	84.00	3.377									Inspektorat
	- Persentase Penurunan Angka Kerugian Negara/Daerah (-)		29.00	39.17			25.17	-									
Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Provinsi NTB	Persentase Peningkatan Level Maturitas OPD terdefinisi-terkelola dan terukur	%	22,22	22,22	60,87	2.557	53,33	188									Inspektorat
Program Peningkatan Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	Integrad (Level III)	Integrad (Level III)	82,49	95	Integrad (Level III)	321									Inspektorat
	Persentase Auditor dan P2UPD bersertifikasi	%	54	52			57,00	-									
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah</b>	<b>Nilai SAKIP</b>		<b>B</b>	<b>B</b>	<b>BB</b>	<b>1.391</b>	<b>BB</b>	<b>1.520</b>									
Program Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Persentase laporan kinerja pemerintah yang bernilai A / BB	%		30	50,00	212	75,00	444									Biro Organisasi
Program Evaluasi Kinerja SKPD	Persentase Perangkat Daerah yang akuntabel	%		50	75,00	55	100	-									Biro Organisasi



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Realisasi 2019		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
							Kinerja	Rp (Juta)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP PD Predikat BB-AA	%	4,44	11,11	93,48	566	40,00	795									Inspektorat
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Rangking LPPD	%	100	100	97,76	559	100	282									Biro Pemerintahan
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah</b>	<b>Indeks Profesionalisme ASN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	0,54	<b>4.315</b>	<b>0,67</b>	3.829									
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Indeks Dimensi Kualifikasi Pendidikan ASN	Nilai Indeks	2.42	2.43	100	3.810	2.45	3.528									Badan Kepegawaian Daerah
	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	%	0.53	0.0054			0.0053	-									
	Kriteria Penilaian Kinerja ASN	Kriteria	BAIK	BAIK			BAIK	-									
Program Peningkatan Transparansi Penyelenggara Negara	Persentase ASN yang Patuh LHKPN	%		97	100	213	100	207									Badan Kepegawaian Daerah
Program pengembangan sistem analisis formasi jabatan dan pendayagunaan aparatur	persentase dokumen pendayagunaan aparatur yang tersusun	%		80	90,00	293	100	95									Biro Organisasi
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah</b>	<b>Persentase Kerjasama Daerah</b>		-	-	<b>150</b>	<b>394</b>	<b>100,00</b>	1.523									
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Kerjasama Pemerintahan dan Non Pemerintahan yang terjaln	%	0,00	0,00	150	394	0,00	805									Biro Administrasi Kerjasama
Program Peningkatan Kerjasama Pemerintahan	Persentase Kerjasama Pemerintahan yang terjaln	%	0,00	0,00			100	172									Biro Administrasi Kerjasama
Program Peningkatan Kerjasama Non Pemerintahan	Persentase Kerjasama Non Pemerintahan yang terjaln	%	0,00	0,00			100	160									Biro Administrasi Kerjasama
Program Pengendalian Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang terevaluasi	%	0	0			100	387									Biro Administrasi Kerjasama

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Realisasi 2019		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
							Kinerja	Rp (Juta)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Sasaran 2: Melakukan Penataan Sistem Manajemen SDM</b>	<b>Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN</b>		32,55	34,76	<b>11,85</b>	<b>12.725</b>	11,35	<b>2.440</b>									
Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN	%	32,55	34,76	11,85	12.725	11,35	2.440									Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
<b>Sasaran 3: Penguatan Fiskal Daerah</b>	<b>Indeks Kapasitas Fiskal Daerah</b>		<b>0,46</b>	<b>0,45</b>	<b>0,5</b>	<b>21.824</b>	<b>0,49</b>	<b>18.432</b>									
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Diluar DAK)	%	45,54	45,42	49,88	21.824	49,33	18.432									Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
<b>Sasaran 4: Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran</b>	<b>Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>95,09</b>	<b>14.643</b>	<b>100</b>	<b>9.683</b>									
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan Program pada RPJMD dengan RKPD	%	100	100	95,09	5.131	100	1.481									Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja OPD bidang ekonomi	%	100	100	97,26	1.474	100	1.464									Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja OPD bidang sosial budaya	%	100	100	96,05	1.854	100	1.279									Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja OPD bidang prasarana	%	100	100	92,00	5.933	100	4.906									Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Realisasi 2019		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
							Kinerja	Rp (Juta)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	wilayah dan sumber daya alam																
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat kepatuhan OPD terhadap standar harga		70	73	98,00	251	82,00	553									Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP
<b>Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat</b>	<b>Indeks Pelayanan Publik</b>		<b>97.58</b>	<b>97.68</b>	<b>97,88</b>	<b>15.735</b>	<b>97.87</b>	<b>16.342</b>									
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio Penduduk BerkTP Persatuan Penduduk *	rasio		0,78	0,99	1.795	0,82	543									Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Cakupan ketersediaan data yang terintegrasi	%	-	-	95,49	1.349	70,00	470									Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase informasi yang terpublikasi	%	-	-	100	1.794	75,00	1.346									Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik
Program Pengembangan e- Government	Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	-	2,67	3,30	2.123	3,30	1.583									Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik
Program Pencegahan Korupsi	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu	%	93,61	82,75	70,96	376	94,00	2.884									Inspektorat
	Persentase PD Zona Integritas berpredikat WBK		4,44	0				13,33	-								
	Persentase PD Zona Integritas berpredikat WBBM		0	0				8,88	-								

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Realisasi 2019		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
							Kinerja	Rp (Juta)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Unit Kerja Pelayanan publik yang berprestasi	Unit		3	-	196	15	51									Biro Organisasi
	Persentase Unit Kerja Pelayanan publik yang survey kepuasan masyarakat meningkat	%		40			80	-									
Program Kerjasama Informasi dan Media massa	Persentase Kerjasama Informasi dan Media Massa	%	90	90	99,62	5.740	90	5.508									Biro Humas dan Protokol
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Kematangan UKPB		3	3	3,00	2.255	3	3.377									Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP
Program Optimalisasi Pelayanan e-Procurement	Prosentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan sesuai Standar (17 Standar)	%	29.4	70.6	29,41	108	100	581									Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP
<b>Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah</b>																	
Tujuan 1: Terwujudnya Masyarakat NTB yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		66,58	67,3	68,14	444.035	68,84	668.557									
	Indeks Kebahagiaan		70,7	-	-		71,9	-									
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	- Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.46	13.51	13,48	418.867	13.62	466.010									
	- Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6.90	6.93	7,27		6.98	-									
Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)					100	61.262		48.782									Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%	92,22	97,93			98,63	-									



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Realisasi 2019		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
							Kinerja	Rp (Juta)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	86,66	88,56			92,42	-									
	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS)	%	89,05	93,35			95,79	-									
	Persen Penurunan Angka Drop Out (DO),	%	0,4	0,37			0,32	-									
	Persentase Akreditasi SMA minimal B,	%	74,21	74,71			75,7	-									
	Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	1,07	1,06			1,02	-									
Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)					100	76.150		91.256									Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%	92,22	97,93			98,63	-									
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	86,66	88,56			92,42	-									
	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS)	%	89,05	93,35			95,79	-									
	Persen Penurunan Angka Drop Out (DO),	%	0,81	0,77			0,69	-									
	Persentase Akreditasi SMK minimal B,	%	57,92	58,12			66,9	-									
	Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	1,07	1,06			1,02	-									
	Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi,	%		1,05			3,05	-									

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Realisasi 2019		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
							Kinerja	Rp (Juta)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Rasio Siswa SMK terhadap SMA	%	37,00	39,00			42	-									
Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)					100	8.268		4.829									Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	67,72	68,22			69,00	-									
	Jumlah Siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi	%	0	0			45	-									
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/SLB	Angka Drop Out SMA/SMK/SLB	%			100	199.112		207.409									Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					100	60.285		107.517									Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Melanjutkan dr SD/MI ke SMP/MTs	%	100,04	100			100,00	-									
	Angka Melanjutkan dr SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	99,97	99,98			99,98	-									
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	107,83	108,66			107,00	-									
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	110,16	110,14			110,00	-									
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	75,72	76,97			79,47	-									
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	99,68	99,7			99,74	-									
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	98,34	98,44			98,64	-									
	Angka DO SD/MI	%	0,09	0,085			0,07	-									
	Angka DO SMP / MTs	%	0,17	0,16			0,14	-									

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Realisasi 2019		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
							Kinerja	Rp (Juta)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Putra/putri NTB yang mendapatkan beasiswa di luar negeri	Orang	-	-			1000	-									
Program Pembinaan Ketenagaan					97	3.658		1.915									Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,		18	18			18	-									
	Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata- rata untuk SLB,	%	18	17			15	-									
	Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV,	%	99,48	99,98			100	-									
	Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV,	%	98,96	99,46			99,52	-									
	Kepala Sekolah bersertifikat	%		35			60	-									
	Pengawas Sekolah bersertifikat	%		31			40	-									
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	orang		200			250	-									
Program Peningkatan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan	%	80.00	85.00		1.090	90.00	821									Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	kunjungan	990	1,016,000	1.064.186	747	1,089,000	911									Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Cakupan pembinaan atlet berprestasi	%	100	100	100	3.471	100	859									Dinas Pemuda dan Olahraga

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Realisasi 2019		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
							Kinerja	Rp (Juta)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga	Persentase sarana prasarana pemuda dan olahraga yang terstandar	%	30	30	35	4.823	40	1.711									Dinas Pemuda dan Olahraga
<b>Sasaran 2: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan</b>	<b>Angka Harapan Hidup</b>	Tahun	<b>65,55</b>	<b>65,75</b>	<b>66,28</b>	<b>25.168</b>	<b>66,16</b>	<b>202.548</b>									
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	92,37	94,25	95	588	97	3.047									Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	Persentase penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular	%	100	100	100	1.024	100	2.012									Dinas Kesehatan
Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase puskesmas yang mempunyai minimal 5 tenaga kesehatan	%	31,9	43	64	722	55	178									Dinas Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan	%	92	96	100	1.940	96.50	4.517									Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase penanganan masalah kesehatan, bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	100	100	100	3.201	100	725									Dinas Kesehatan
	Cakupan Upaya Layanan Kesehatan Masyarakat	%	-	-			100	-									Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir
	Persentase Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat	%	100	-			40.00	409									Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
	Persentase cakupan layanan kesehatan masyarakat	%	12,20	13,07			33	6.818									Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Realisasi 2019		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
							Kinerja	Rp (Juta)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	59.00	60.50	70	4.307	80.00	1.829									Dinas Kesehatan
	Nilai Akreditasi	Status Akredit asi	100	100			100	-									Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir
	Nilai akreditasi	Perdan a/ Dasar/ madya /utama /paripu rna	Paripur na				Paripur na	478									Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
	Nilai Akreditasi	status akredit asi	paripur na	paripur na			paripur na	85									Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru- paru/ rumah sakit mata	Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	%	48	50	-	13.349	55	75.254									Dinas Kesehatan
	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar	%	75.00	80.00			83.00	36.439									Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir
	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar	%	70.00	75.00			78.00	61.441									Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar	%	100	100			87	5.084									Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	%	100	100	-	38	100	-									Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Realisasi 2019		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
							Kinerja	Rp (Juta)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata																	
	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	%	100	100			100	-									Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir
	Persentase sarana prasarana Rumah Sakit yang terpelihara	%	50	60			70.00	-									Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	%	100	100			84.00	4.232									Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
<b>Tujuan 1: Terwujudnya Masyarakat NTB yang berdaya saing</b>	<b>Persentase balita stunting</b>	%	<b>37,20</b>	<b>33,49</b>	<b>25,5</b>	<b>7.806</b>	<b>31,49</b>	<b>15.191</b>									
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas asupan gizi masyarakat</b>	<b>Persentase balita stunting</b>	%	<b>37,20</b>	<b>33,49</b>	<b>25,5</b>	<b>7.806</b>	<b>31,49</b>	<b>15.191</b>									
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita stunting	%	37,2	33,49	26	6.959	31,49	13.037									Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Tempat- tempat Umum yang Memenuhi Syarat	%	74,77	74,79	76	155	78,00	585									Dinas Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Posyandu Aktif	%	52.94	52.94	61	691	60.00	1.569									Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Model Operasional BKB- Posyandu-PAUD	Jml Keluarga Yg Menjadi Anggota Kelompok BKB yang menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA)	%	18,49	0,00			19,24	-									DP3AP2KB
<b>Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan</b>																	
<b>Tujuan 1: Meningkatnya Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>		<b>56,99</b>	<b>57.03</b>		<b>48.359</b>	<b>57,19</b>	<b>37.210</b>									

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Realisasi 2019		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
							Kinerja	Rp (Juta)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup</b>	<b>Indeks Kualitas Air</b>		<b>20,25</b>	<b>20,25</b>	<b>75,63</b>	<b>34.476</b>	<b>25,25</b>	<b>24.413</b>									
	<b>Indeks Kualitas Udara</b>		<b>88,02</b>	<b>88,37</b>	<b>88,17</b>		<b>88,53</b>	-									
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan lokasi yang dikendalikan kualitas air dan udaranya	Lokasi	-	-	2	1.561	4.00	1.189									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pengelolaan Sumberdaya Laut, pesisir dan Pulau - pulau Kecil	Rasio Kawasan Konservasi perairan terhadap total luas perairan territorial	Rasio	0.083	0.085	0	2.825	0.087	2.212									Dinas Kelautan dan Perikanan
	<b>Indeks Kualitas Tutupan Lahan</b>		<b>61,27</b>	<b>NA</b>	<b>67,56</b>		<b>60,13</b>	-									
Program Perlindungan Hutan, Konservasi sumber daya alam dan ekosistem	Rasio Kemampuan perlindungan hutan	%	0.0003	0.0006	0	16.798	0.0012	17.618									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Program Rehabilitasi Kerjasama dan Perhutanan Sosial	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan berbasis perhutanan sosial	%	15.64	26.13	44	6.269	32.30	2.353									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase penurunan luas lahan kritis	%	0.93	0.50			0.53	-									
Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase RTR yang disusun	%	0	0	92	5.933	18,18	391									Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pemanfaatan Ruang	Persentase deviasi pelaksanaan RTRW terhadap rencana pemanfaatan	%	0	87,51	88	247	88,45	80									Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	penurunan Penyimpangan tata ruang	%	0	0	10	844	20	571									Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas, Daya</b>	<b>Neraca Pengelolaan Sampah (%)</b>	<b>%</b>	<b>50.00</b>	<b>51.00</b>	<b>34,91</b>	<b>13.883</b>	<b>75.00</b>	<b>12.771</b>									

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Realisasi 2019		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
							Kinerja	Rp (Juta)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup</b>																	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	%	-	-	-	13.883	15	12.771									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase penanganan sampah	%	42,31	42,31			60	-									
<b>Sasaran 3: Mengoptimalkan Pengelolaan Geopark</b>	<b>Persentase Geosite yang tertata</b>	%	-	-			<b>12,5</b>	<b>25</b>									
Program Penataan Geopark	Persentase Geosite yang tertata	%	-	-			12,5	25									Dinas Pariwisata
<b>Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penganggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi</b>																	
<b>Tujuan 1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam</b>	%	<b>7,1</b>	<b>3,08</b>	<b>4,76</b>	<b>3.769</b>	<b>5,0 - 5,5</b>	<b>2.564</b>									
<b>Sasaran 1 :Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan</b>	<b>Nilai Realisasi Investasi</b>	<b>Rp. Milyar</b>	<b>11.280</b>	<b>14.000</b>	<b>10.024</b>	<b>649</b>	<b>16.800</b>	<b>745</b>									
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	11.280	14.000	10	649	16.800	745									DPMPTSP
<b>Sasaran 2 : Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	%	<b>3,32</b>	<b>3,72</b>	<b>3,42</b>	<b>3.120</b>	<b>3,26</b>	<b>1.820</b>									
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	85	85	85	930	86	122									Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	90	90	89	1.204	91	762									Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran sengketa pengusaha-pekerja	%	70	70	70	190	71	191									Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	95	95	95	337	100	205									Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Realisasi 2019		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
							Kinerja	Rp (Juta)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan pada Anjungan Daerah NTB di Jakarta	Orang			67.488	458	37.000	540									Badan Penghubung Daerah
<b>Tujuan 1: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas</b>	<b>Pertumbuhan Industri</b>	%		2,68	4,57	<b>12.145</b>	4,04	16.477									
<b>Sasaran 3 : Mengembangkan Industri Olahan dan Permesinan</b>	<b>Pertumbuhan Industri</b>	%		2,68	4,57	<b>12.145</b>	4,04	16.477									
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Cakupan Ikm Yang Terbina Dalam Kapasitas Iptek Sistem Produksi	%	2,82	4,58	10	2.335	13,46	1.959									Dinas Perindustrian
Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Cakupan Ikm Yang Terbina	%	1,40	1,50	5	1.559	3,83	7.897									Dinas Perindustrian
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan Ikm Yang Menerapkan Teknologi Dalam Proses Produksi	%	2,96	3,40	2	3.169	5,02	2.791									Dinas Perindustrian
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Presentase wirausahawan muda	%	67,78	67,86	68	420	68,07	458									Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM	%	14,40	16,40	15	4.510	18,37	2.872									Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Persentase Legalitas Usaha	%	35	35,7	30	151	45	501									Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
<b>Tujuan 1: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas</b>	<b>Inflasi</b>	%	<b>3,7</b>	<b>3,16</b>	<b>1,87</b>	<b>7.161</b>	<b>3,0 - 4,0</b>	<b>16.074</b>									
<b>Sasaran 4: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat</b>	<b>Pengeluaran per kapita</b>	<b>Rp.000</b>	<b>9,877</b>	<b>9,917</b>	<b>10.640</b>	<b>7.161</b>	<b>9,996</b>	16.074									

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Realisasi 2019		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
							Kinerja	Rp (Juta)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan asongan	Persentase Peningkatan Pedagang Kakilima dan usaha informal yang memperoleh peralatan perdagangan	%		16,42	12	5.925	11,11	13.816									Dinas Perdagangan
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan Harga Bahan Pokok Yang Stabil Antar Waktu Antar Wilayah	%	5	6	4	1.236	6	2.258									Dinas Perdagangan
<b>Tujuan 1: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas</b>	<b>Gini Ratio</b>		<b>0,378</b>	<b>0,372</b>	<b>0,379</b>	<b>5.485</b>	<b>0,366</b>	<b>4.563</b>									
<b>Sasaran 5: Menurunnya Tingkat Kesenjangan ekonomi Masyarakat</b>	<b>Gini Ratio</b>		<b>0,378</b>	<b>0,372</b>	<b>0,379</b>	<b>5.485</b>	<b>0,366</b>	<b>4.563</b>									
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	61.91	60.39	60	1.300	63.00	187									Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Pogram Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan usaha kecil ke menengah	%	0,26	0,27	2	163	0,3	367									Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani		107,95	> 105	116	509	100	1.262									Dinas Pertanian dan Perkebunan
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Persentase Kelompok Masyarakat Pesisir yang diberdayakan	%	0.64	0.73	1	1.493	0.91	436									Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase PKK Aktif	%		0	20	196	40	871									Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Prosentase Posyantek yang terbentuk dan aktif	%		25	38	357	55	135									Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Realisasi 2019		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
							Kinerja	Rp (Juta)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
																	Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	Prosentase BUMDes yang terbentuk dan aktif	%		80	87	1.467	88	1.306									Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>Tujuan 1: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas</b>	<b>Angka Kemiskinan</b>	%	<b>15.05</b>	<b>14,63</b>	<b>13,88</b>	<b>386.868</b>	<b>12,75</b>	<b>381.389</b>									
<b>Sasaran 6: Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin</b>	<b>Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan (%)</b>	%	<b>66,74</b>	<b>70,35</b>	<b>100</b>	<b>26.873</b>	<b>75,00</b>	<b>65.322</b>									
	<b>Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial</b>		<b>54,5</b>	<b>54,5</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>-</b>									
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	66,74	70,35	64	252	75	39.951									Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	2,75	2,75	2	10.708	2,04	10.348									Dinas Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	%	5,07	22,42	2	12.404	2,9	9.160									Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	2.773	100	5.147									Dinas Sosial
Program Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan	%	54,5	54,5	56	737	56,5	715									Dinas Sosial

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Realisasi 2019		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
							Kinerja	Rp (Juta)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	perlindungan dan jaminan sosial																
<b>Sasaran 7: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin</b>	<b>Cakupan Air Minum</b>	%	70,48	72,56	74,69	223.999	75,74	163.314									
	<b>Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak</b>	%	69,25	69,53	78,8		75,72	-									
	<b>Rasio Elektrifikasi</b>	%	85,10	93,83	99,55		95,09	-									
	<b>Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani</b>	%	-	92,01	92,02		92,74	-									
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Cakupan masyarakat yang terlayani air bersih	KK	765	255	2.125	5.481	425	2.713									Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	%	85,1	93,83	100	2.292	95,09	1.418									Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan Air Minum	%	70,48	72,56	72	19.209	75,74	10.145									Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Cakupan sanitasi	%	69,25	67,825			69,315	-									
Program Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar	Persentase rumah tangga yang menggunakan jamban	%	82,67	79,24	89	1.812	66,20	3.205									Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani	%	-	92,01	92	15.176	92,74	18.001									Dinas Perumahan dan Permukiman
Program Pengembangan Permukiman	Persentase Permukiman yang tertata	%	10,7	0	3	180.029	5,18	127.831									Dinas Perumahan dan Permukiman
<b>Sasaran 8: Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan</b>	<b>Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi</b>	POINT	77,8	78,3	85,30	6.430	79,6	9.033									
Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	POINT	84,48	86,2	88	4.973	89,65	7.238									Dinas Ketahanan Pangan



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Realisasi 2019		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
							Kinerja	Rp (Juta)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Angka Konsumsi Ikan	Kg/ Kapita/ Thn	35,49	33	38	1.457	36,92	1.794									Dinas Kelautan dan Perikanan
<b>Sasaran 9: Meningkatnya produksi Sektor Primer</b>	<b>Pertambahan Nilai PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan &amp; kehutanan</b>	<b>Rp. Juta</b>	<b>1.292.781,85</b>	<b>308.343,18</b>	<b>321.690,00</b>	<b>108.984,93</b>	<b>825.043,71</b>	<b>140.019</b>									
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/ Perkebunan	%			-	83.835	2	96.778									Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Produksi Padi	Ton GKG	2.323.700	2.335.318	2.436.349			-									
	produksi Jagung	Ton PK	2.127.324	2.137.960	2.003.267			-									
	Produksi Kedelai	Ton Biji Kering	56.097	56.377	80.925			-									
	Produksi Cabe	Ton Buah Segar	18.874	18.968	181.926			-									
	Produksi Bawang Merah	Ton Umbi Basah	195.458	196.435	161.411			-									
	Produksi Manggis	Ton Buah Segar	7.312	7.348	11.556			-									
	Produksi Tembakau		50.680	50.933	43.068			-									
	Produksi Kopi	Ton Berasan	4.865	4.889	6.566			-									
	Produksi Kakao	Ton	2.083	2.093	2.219			-									
	Produksi Kelapa	Ton Eq. Kopra	48.365	48.606	48.766			-									

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Realisasi 2019		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
							Kinerja	Rp (Juta)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Produksi Mete	Ton Biji Kering	12.734	12.797	10.411			-									
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase Penyuluh Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	20,85	20,85	27	554	31,75	311									Dinas Pertanian dan Perkebunan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertumbuhan Populasi Ternak	%			5	11.409	5.00	22.174									Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	%			1	704	< 1	102									Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Cakupan Kelompok Ternak Yang Memanfaatkan Teknologi Peternakan	Kelom- pok			100	191	100	115									Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Cakupan Produksi Peternakan Yang Dipasarkan	%			75	91	75	227									Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan Budidaya	Ton	1,024,0 84	1,126,1 73	1.149.5 00	3.081	1,171,6 70	4.237									Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan Tangkap	Ton	182,98 2	221,32 1	219.34 9	3.749	234,79 9	4.068									Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan Hutan	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling	%	16,26	25,51	36	5.370	31,69	12.006									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK lainnya	%	0,08	0,08	-		5,08	-									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<b>Sasaran 10: Meningkatnya Pengembangan</b>	<b>Angka kunjungan wisatawan</b>	<b>orang</b>	<b>3.508.9 03,00</b>	<b>2.552.6 34,00</b>	<b>3.706.3 52</b>	<b>20.582</b>	<b>4.400.0 00,00</b>	<b>3.703</b>									

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Realisasi 2019		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
							Kinerja	Rp (Juta)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Community Based Tourism dan Friendly Moslem Tourism</b>																	
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Angka kunjungan wisatawan	orang	350890 3	255263 4	3.706.3 52	2.375	440000 0	833									Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan (target 99 desa)	%	-	16,67	20	14.896	28,57	1.271									Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	%	-	-	16	159	34,38	368									Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata	Rata-rata Lama Menginap	hari	2	1.5	2	3.152	2,95	1.230									Dinas Pariwisata
<b>Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan</b>																	
<b>Tujuan: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani</b>	<b>Indeks Kriminalitas</b>		<b>18,05</b>	<b>17,25</b>	<b>12,71</b>	<b>23.202</b>	<b>15,65</b>	<b>21.650</b>									
	<b>Indeks Demokrasi</b>		<b>76,04</b>	<b>-</b>	<b>76,64</b>		<b>76,70</b>	<b>-</b>									
<b>Sasaran 1 : Menanamkan Nilai Sosial Budaya, Toleransi Masyarakat, dan Iklim Demorasi</b>	<b>Indeks Kriminalitas</b>		<b>18,05</b>	<b>17,25</b>	<b>12,71</b>	<b>14.104</b>	<b>15,65</b>	<b>13.480</b>									
Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan					99	6.650		8.888									Biro Kesejahteraan Rakyat
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Prosentase Lembaga Adat terbentuk dan aktif	%		45	74	104	55	35									Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase kelompok adat budaya yang dikembangkan	%	100	100	100	2.790	100	2.239									Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Realisasi 2019		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
							Kinerja	Rp (Juta)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	%	100	100	100	2.127	100	1.877									Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase penyelenggaraan Festival seni	%	100	100	100	2.433	100	442									Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>Sasaran 2: Meningkatnya Penegakan Produk Hukum Daerah</b>	<b>Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.098</b>	<b>100,00</b>	<b>8.170</b>									
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Petugas Pelindungan Masyarakat (LINMAS)	%	100,00	100,00	100	396	100	1									Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pemeliharaan Kantantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (Perda dan Pergub)	%	100	100	100	1.026	100	1.490									Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	%	100	100	100	226	100	84									Satuan Polisi Pamong Praja
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Penurunan Konflik Sosial	Kasus	26	13	7	5.860	21	5.074									Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang terbentuk	Dokum en	100	100	144	1.077	100	1.035									Biro Hukum
Program Bantuan Hukum dan HAM	Persentase penanganan kasus-kasus hukum	%	100	100	311	513	100	486									Biro Hukum
<b>Tujuan: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani</b>	<b>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</b>		<b>90.36</b>	<b>90.72</b>	<b>90,4</b>	<b>2.517</b>	<b>91.45</b>	<b>2.314</b>									
<b>Sasaran: Meningkatnya Partisipasi</b>	<b>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</b>		<b>59,95</b>	<b>60,19</b>	<b>55,81</b>	<b>2.517</b>	<b>60,67</b>	<b>2.314</b>									



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Realisasi 2019		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
							Kinerja	Rp (Juta)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Perempuan dalam Pembangunan</b>																	
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan.	Persentase OPD yang mengintegrasikan PPRG	%	100,00	100,00	100	96	100,00	33									DP3AP2KB
Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Cakupan perempuan kelompok sasaran yang bekerja	%	0,063	0,075	0	423	0,110	142									DP3AP2KB
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan anak	Presentase Kab/Kota yang memiliki peraturan perundang-undangan yang mendukung PUG dan PUHA	%	10	30	40	1.375	60	2.139									DP3AP2KB
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	47,40	51,58	57	623	62,41	-									DP3AP2KB

**Tabel 6-6 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi NTB Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019**

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
<b>Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah</b>														
Tujuan 1: Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Point	129,02	126,91		123,11		119,41		115,83		115,83		
Sasaran: Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,57	0,59		0,61		0,63		0,65		0,65		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase terbentuknya DESTANA dan SMAB	%				25,48	4.159	32,78	4.750	40,09	5.537	40,09	14.445	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
	Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna	%				44,69		67,34		92,50		92,50		
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	%				100	2.446	100	2.525	100	2.572	100	7.543	Dinas Sosial
Tujuan 2: Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas	Point	76,02	77,14		78,56		79,84		81,17		81,17		
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Persentase Kemantapan jalan	%	80,28	80,76		83,95		85,36		86,60		86,60		
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%	80,28	80,65		83,95	255.582	85,36	424.969	86,60	251.253	86,60	931.804	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
<b>Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar</b>	<b>Persentase Kemantapan Sistem Irigasi</b>	<b>%</b>	<b>50,76</b>	<b>48,11</b>		<b>50,04</b>		<b>52,17</b>		<b>54,50</b>		<b>54,50</b>		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kenaikan Areal Layanan Irigasi	%	74,15			74,55	172.161	75,37	78.749	76,28	91.491	76,28	342.401	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>Sasaran 2: Meningkatnya konektivitas antar wilayah</b>	<b>Persentase konektivitas transportasi publik</b>	<b>%</b>	<b>78,64</b>	<b>79,43</b>		<b>81,71</b>		<b>86,86</b>		<b>89,14</b>		<b>89,14</b>		
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	70,24	50,83		50,83	4.436	80,40	4.695	81,63	5.535	81,63	14.665	Dinas Perhubungan
	Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	92,31	91,67		94,37		98,59		100		100		
	Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik	%	0	55		30		35		40		40		
	Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	%	0	42,99		46,20		49,39		52,58		52,58		
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik	%	0	59,39		59,39	564	61,61	764	66,06	932	66,06	2.261	Dinas Perhubungan
<b>Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi</b>														
<b>Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Point</b>	<b>B</b>	<b>B</b>		<b>B</b>		<b>BB</b>		<b>BB</b>		<b>BB</b>		
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah</b>	<b>Opini BPK</b>	<b>Status</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>		<b>WTP</b>		<b>WTP</b>		<b>WTP</b>		<b>WTP</b>		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	%				100	711.669	100	739.589	100	824.559	100	2.275.817	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	%				100	1.050	100	1.093	100	1.202	100		
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	%				60	1.777	70	1.849	75	2.062	75	5.689	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	%				80	1.079	85	1.282	90	1.447	90	3.807	INSPEKTORAT
	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	%				40	2.119	44,44	2.517	48,89	2.841	48,89		
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk SPIP	%				5,55	397	6,55	472	7,55	533	7,55	1.402	INSPEKTORAT
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu	%				95	1.571	96	1.866	97	2.106	97		
<b>Sasaran 2: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD</b>	<b>%</b>	<b>34,77</b>	<b>34,06</b>	<b>35,41</b>	<b>36,97</b>		<b>38,65</b>		<b>38,65</b>		<b>38,65</b>		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Derajat Desentralisasi Fiskal	%				35,20	528	36,76	555	38,44	585	38,44	1.668	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	%				50,12	14.608	52,03	15.363	54,03	16.212	54,03	46.184	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
<b>Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>Kategori</b>	<b>BB</b>			<b>BB (73,01 - 76,00)</b>		<b>BB (76,01 - 80,00)</b>		<b>A (80,01 - 90,00)</b>		<b>A (80,01 - 90,00)</b>		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan	%				100	4.234	100	4.780	100	5.431	100	14.444	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	%				100	11.089	100	12.520	100	14.225	100	37.833	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase PD yang Meningkat Nilai Implementasi SAKIP- nya	%				84,44	827	91,11	982	100	1.108	100	2.917	INSPEKTORAT
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	%				17,77	717	22,22	851	26,66	961	26,66	2.529	INSPEKTORAT
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkat	%				80	1.148		1.282		1.412		3.842	Biro Organisasi
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	%				100	2.834	100	3.165	100	3.486	100	9.485	Biro Pemerintahan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
<b>Sasaran 4: Meningkatnya Profesionalisme ASN</b>	<b>Indeks Profesionalisme ASN</b>	<b>Point</b>	<b>0,54</b>	<b>0,66</b>		<b>0,68</b>		<b>0,70</b>		<b>0,72</b>		<b>0,72</b>		
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Aspek Sistem Informasi	Nilai				16	6.500	16	7.150	19	7.865	19	21.515	Badan Kepegawaian Daerah
	Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan					80		80		80		80		
	Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi					88		88		115		135		
	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan					132		132		134		136		
	Nilai Aspek Sistem Informasi					16		16		19		19		
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	%				0,09	16.446	0,09	16.961	0,10	18.248	0,10	51.655	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	%				0,03		0,04		0,04		0,04	-	
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis	%				0,13		0,14		0,15		0,15	-	
	Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi	%				0,55		0,59		0,62		0,62		
<b>Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas</b>	<b>Indeks Pelayanan Publik</b>	<b>Point</b>	<b>3,63</b>	<b>3,93</b>		<b>4,23</b>		<b>4,53</b>		<b>4,55</b>		<b>4,55</b>		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
<b>Pelayanan kepada masyarakat</b>														
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per-satuan penduduk	%				98,70	243	98,80	291	98,90	346	98,90	880	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	%				100	181	100	216	100	257	100	654	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	%				100	871	100	1.042	100	1.242	100	3.155	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan kawasan lingkaran hutan dan pesisir	%				15	48	20	100	25	119	25	267	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	%	40	50		60	4.644	70	5.600	80	6.703	80	16.947	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Berbasis TIK (%)	%	25	35		45	1.707	55	2.058	65	2.464	65	6.229	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (%)	%	NA	15		20	420	25	506	30	605	30	1.531	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah (%)	%	NA	20		30	409	40	493	50	590	50	1.492	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%				75	85	85	100	90	115	90	300	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%				100	977	100	1.135	100	1.294	100	3.406	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian Kckr Dan Naskah Kuno Milik Daerah	%				100	179	100	208	100	237	100	624	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Angka kunjungan wisatawan pada Anjungan NTB TMII (orang)	Orang						41.000		43.000		43.000		Badan Penghubung Daerah
<b>Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah</b>														
<b>Tujuan 1: Terwujudnya pengelolaan kehatan untuk SDM yang berdaya saing</b>	<b>Indeks Kesehatan</b>	<b>Point</b>	<b>71,20</b>	<b>71,51</b>		<b>71,97</b>		<b>72,43</b>		<b>73,05</b>		<b>73,05</b>		
<b>Sasaran 1: Meningkatnya derajat kehatan dan gizi masyarakat</b>	<b>Angka Harapan Hidup</b>	<b>Tahun</b>	<b>66,28</b>	<b>66,48</b>		<b>66,78</b>		<b>67,08</b>		<b>67,48</b>		<b>67,48</b>		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Persentase fasilitas kehatan yang terakreditasi	%				85	150.430	85	163.526	85	176.236	85	490.193	Dinas Kesehatan



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%				97		97		97		97		
	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yzng sesuai standar	%				65		75		80		80		
	Pesentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	%				100		100		100		100		
	Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80%	%				80		90		100		100		
	Persentase Kualitas Lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%				94		97		100		100		
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	%				100		100		100		100		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%				2	761	2,5	1.391	3	1.499	3	3.651	Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat (Persen)	%				30	32	90	100	95	108	95	240	Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%				83	52.458	85	54.519	90	56.163	90	163.140	Rumah Sakit Umum Daerah
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	71,43			73,81	7.479	75	10.339	76,19	11.992	76,19	29.810	Rumah Sakit Jiwa Mutiarasukma
	Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar	%	80			80		80		80		80	-	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	70,00	72,00		75,00	36.664	78,00	48.765	80,00	59.051	80,00	144.479	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir
<b>Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat</b>	<b>Persentase Balita Stunting</b>	<b>%</b>	<b>25,50</b>	<b>31,99</b>		<b>31,49</b>		<b>30,99</b>		<b>30,49</b>		<b>30,49</b>		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita Wasting	%	14,41 (2018)			12,41		11,41		10,41		10,41	-	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (Persen)	%				50	1.228	70	1.844	100	1.987	80	5.060	Dinas Kesehatan
<b>Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing</b>	<b>Indeks Pendidikan</b>	<b>Point</b>	<b>61,68</b>	<b>62,03</b>		<b>62,39</b>		<b>62,74</b>		<b>63,10</b>		<b>63,10</b>		
<b>Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan</b>	<b>Harapan Lama Sekolah</b>	<b>Tahun</b>	<b>13,57</b>	<b>13,62</b>		<b>13,68</b>		<b>13,73</b>		<b>13,79</b>		<b>13,79</b>		
	<b>Rata-rata Lama Sekolah</b>	<b>Tahun</b>	<b>7,27</b>	<b>6,98</b>		<b>7,01</b>		<b>7,04</b>		<b>7,07</b>		<b>7,07</b>		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%				99,15	473.403	99,95	496.806	100	516.005	100	1.486.214	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%				93,40		94,38		95,28		95,28		
	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	%				96,68		97,57		98,02		98,02		
	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%				69,4		70		70,6		70,6		
	Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%				1,01		1		1		1		
	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	%				1:18		1:18		18		18		
	Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata- rata untuk SLB,	%				1:14		1:12		1:10		1:10		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum	%				100	568	100	696	100	723	100	1.987	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%				100	66.961	100	69.288	100	71.966	100	208.215	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%				99,55		99,58		100		100		
	Persentase Kepala Sekolah bersertifikat	%				70		100		100		100		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
	Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat	%				50		60		70		100		
	Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)					5,5		6		6,5		80		
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	%				100	61	100	66	100	68	6,5	195	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan	%				35	200	35	310	30	322	100	832	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%				100	3.245	100	3.712	100	4.339	100	11.297	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%				100		100		100		100		
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Pembinaan Altlet Berprestasi	%				100	8.846	100	10.439	100	12.204	100	31.488	Dinas Pemuda dan Olahraga
<b>Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan</b>														
Tujuan 1: Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	64,56	67,74		67,98		68,22		68,46		68,46		
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Point	40,23	42,73		42,83		42,93		43,03		43,03		
	Indeks Kualitas Udara	Point	87,40	87,50		87,53		87,56		87,59		87,59		
	Indeks Kualitas Air Laut	Point		69,69		70,29		70,89		71,48		71,48		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%				51,52	319	24,24	337	24,24	369	24,2424242	1.025	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi			10	882	10	933	10	1.020	30	2.835	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan taman kehati Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	lokasi			1	24	1	100	1	109	3	233	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	unit			210	23	210	100	210	109	210	232	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	usaha/ kegiatan			20	188	25	199	30	218	30	605	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas sekolah peduli lingkungan	%			10	197	10	208	10	228	10	632	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat	kelompo k			0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengadu an			20	200	20	211	20	231	60	641	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
<b>Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup</b>	<b>Indeks Kualitas Tutupan Lahan</b>	<b>Point</b>	<b>65,67</b>	<b>66,70</b>	<b>67,70</b>	<b>68,70</b>	<b>69,70</b>	<b>69,70</b>	<b>69,70</b>	<b>69,70</b>				

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%				67	19.206	83	20.304	100	22.201	100	61.711	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%				10,00		10,00		10		30	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha				30.503	885	30.503	935	30.503	1.023	30.503	2.843	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%				13,27	661	17,70	699	17,70	765	48,67	2.125	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS				4,00	4.449	4,00	4.704	4,00	5.143	4,00	14.296	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	88			89,07	681	89,69	892	90,31	1.444	90,31	3.018	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>Tujuan 1 : Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan</b>	<b>Neraca pengelolaan sampah (%)</b>	<b>%</b>	<b>41,71</b>	<b>55,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Persentase Penanganan Sampah</b>	<b>%</b>	<b>34,91</b>	<b>40,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	
	<b>Persentase Pengurangan Sampah</b>	<b>%</b>	<b>6,80</b>	<b>15,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	%				70	4.823	85	5.299	100	5.794	100	15.916	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
<b>Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi</b>														
Tujuan 1: Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli (Point)	%	72,03	72,91		73,80		74,68		75,56		75,56		
Sasaran 1: Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	10.024	11.574		13.362		15.428		17.814		17.814		
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Perentase Peningkatan Minat Investasi	Persen				3	493	5	596	60	10	60	1.099	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	Persen				100	715	100,00	864	100,00	1.050	100	2.629	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Persen				87	531	90	642	93	780	93	1.954	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah	Persen				50	735	55	888	60	1.080	60	2.703	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	Persen				100	116	100	141	100	171	100	428	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sasaran 2: Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23,06	23,29		23,52		23,71		23,88		23,88		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertumbuhan Populasi Ternak	%			9	44.458	9,5	44.798	10	46.161	10	135.417	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan	%			100	561	100	565	100	582	100	1.708	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN TERNAK YANG TERINFEKSI PHMS	%			< 1	2.779	< 1	2.800	< 1	2.885	< 1	8.464	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	%			100	420	100	423	100	436	100	1.279	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Sarana Pertanian	%			1,93	20.209	1,99	19.956	2,05	24.040	2,05	64.205	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Prasarana Pertanian	%	100	100	35,41	104.379	65,56	79.975	96,79	83.007	96,79	267.361	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
	Pengembangan industrialisasi pertanian	Unit/ paket	1	3	2		2		2		10	-		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI	%	95	95,5	95,5	361	96	434	96,5	434	96,5	1.229	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok	%			50	5.432	70	6.731	100	6.731	100	18.895	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%			10		10		10		30	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan	%	2,06	5,49	8,53	4.868	8,74	4.910	9,5	5.553	9,5	15.330	Dinas Kelautan dan Perikanan	



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
	peraturan perundangan yang berlaku													
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	229.794	234.799		241.843	6.336	249.099	8.708	256.572	9.895	256.572	11.895	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.140.552	1.170.67 0		1.195.10 4	3.023	1.219.005	3.796	1.243.385	6.021	1.243.38 5	32.729	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%	70,00	70,00		99,91	4.852	99,92	1.963	99,93	2.129	99,93	8.943	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	0,55	0,51		213130	616	214373	1.353	215700	929	215700	2.897	Dinas Kelautan dan Perikanan
<b>Sasaran 3: Meningkatnya jaminan kehatan dan sosial bagi penduduk miskin</b>	<b>Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan (%)</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kehatan yang terakreditasi	%				85		85		85		85	-	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan Korban Tindak Kekerasan tertangani	%				100	764	100	789	100	803	100	2.356	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%				2,5	17.317	3,5	17.873	4,5	18.207	4,5	53.398	Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan	%				100	12.091	100	12.480	100	12.713	100	37.284	Dinas Sosial

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
	perlindungan dan jaminan sosial													
<b>Sasaran 4: Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan</b>	<b>Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi</b>	<b>Skor</b>	<b>85,30</b>	<b>85,80</b>	<b>86,20</b>	<b>86,70</b>	<b>87,20</b>	<b>87,20</b>	<b>87,20</b>	<b>87,20</b>	<b>87,20</b>	<b>87,20</b>		
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Lumbung Pangan yang termanfaatkan	%		9,38	71,97	215	79,62	301	86,62	255	86,62	771	Dinas Ketahanan Pangan	
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis	%	2331,4	2409,30	100	3.517	100	3.779	100	4.170	100	11.466	Dinas Ketahanan Pangan	
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/Po U)	%			5,77	358	5,77	358	4,77	425	3,77	1.142	Dinas Ketahanan Pangan	
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	%			80,00	539	85,00	679	90,00	639	90,00	1.857	Dinas Ketahanan Pangan	
<b>Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin</b>	<b>Cakupan Air Minum</b>	<b>%</b>	<b>72,59</b>	<b>75,74</b>	<b>76,48</b>	<b>78,45</b>	<b>80,59</b>	<b>80,59</b>	<b>80,59</b>	<b>80,59</b>	<b>80,59</b>	<b>80,59</b>		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan air minum	%	74,69	74,67	76,48	2.936	78,45	3.338	80,59	3.950	80,59	10.224	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
<b>Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin</b>	<b>Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak</b>	<b>%</b>	<b>78,80</b>	<b>79,36</b>	<b>80,10</b>	<b>80,91</b>	<b>82,46</b>	<b>82,46</b>	<b>82,46</b>	<b>82,46</b>	<b>82,46</b>	<b>82,46</b>		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%				94,00		97,00		100		100	-	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Luas kawasan permukiman yang berkualitas	Ha				84.393	256.813	84.488	163.033	84.511	167.445	253391,4	587.291	Dinas Perumahan dan Permukiman
<b>Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin</b>	<b>Rasio Elektrifikasi</b>	<b>%</b>	<b>99,55</b>	<b>99,66</b>	<b>99,77</b>			<b>99,88</b>		<b>99,99</b>		<b>99,99</b>		
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	%				5,96	557	5,64	643	5,57	791	5,57	1.992	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	99,55	99,66	99,77	1.552		99,88	1.791	99,99	2.203	99,99	5.546	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
<b>Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin</b>	<b>Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)</b>	<b>%</b>	<b>56,35</b>	<b>59,50</b>	<b>62,65</b>			<b>65,80</b>		<b>68,95</b>		<b>68,95</b>		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	%				100	1.943	100	2.526	100	2.595	100	7.064	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Rumah tangga menempati hunian layak	%				98,81		98,86		98,91		98,91		
<b>Sasaran 6: Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok</b>	<b>Inflasi</b>	<b>%</b>	<b>1,9</b>	<b>3,0 - 4,0</b>	<b>3,0 - 4,0</b>			<b>3,0 - 4,0</b>		<b>3,0 - 4,0</b>		<b>3,0 - 4,0</b>		
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Pengawasan Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol	%				60	280	70	290	80	305	80	874	Dinas Perdagangan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
	dan Barang Pokok Penting													
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	%			4	1.658	4	1.717	4	1.804	4	5.179	Dinas Perdagangan	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	%			3	1.303	5	1.349	7	1.418	7	4.071	Dinas Perdagangan	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Penyelesaian Sengketa	%			80	1.253	85	1.298	90	1.364	90	3.915	Dinas Perdagangan	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	%			100	12.024	100	12.446	100	13.080	100	37.550	Dinas Perdagangan	
<b>Sasaran 7: Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup</b>	<b>Pengeluaran per kapita (Rp.000)</b>	<b>Rp.000</b>	<b>10.640</b>	<b>10.952</b>	<b>11.273</b>	<b>11.604</b>	<b>11.944</b>	<b>11.944</b>	<b>11.944</b>	<b>11.944</b>	<b>11.944</b>			
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan Fasilitasi Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%			100	3.704	100	490	100	640	100	4.834	Dinas Perdagangan	
<b>Tujuan 2: Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan</b>	<b>Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dalam PDRB (%)</b>	<b>%</b>	<b>-0,08</b>	<b>-0,10</b>	<b>1,50</b>	<b>3,00</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>			
<b>Sasaran 1: Meningkatnya daya saing pariwisata</b>	<b>Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar)</b>	<b>Rp. Milyar</b>	<b>117,21</b>	<b>116,04</b>	<b>122,71</b>	<b>129,78</b>	<b>137,24</b>	<b>137,24</b>	<b>137,24</b>	<b>137,24</b>	<b>137,24</b>			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase desa wisata yang dikembangkan	%				65,66	4.993	85,85	5.503	100	6.084	100	16.580	Dinas Pariwisata
	Persentase Geosite yang tertata	%				37,5		50		50		50	-	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	orang				4.650.00 0	2.240		2.447		2.705		7.392	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	%				30,21	165		210		232		607	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	%				60	1.063		1.161		1.283		3.506	Dinas Pariwisata
<b>Tujuan 3: Terwujudnya perindustrian yang unggul</b>	<b>Pertumbuhan Industri (%)</b>	<b>%</b>	<b>4,57</b>	<b>5,50</b>	<b>6,50</b>	<b>7,50</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	
<b>Sasaran 1: Meningkatnya daya saing industri</b>	<b>Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (Rp. Miliar)</b>	<b>Rp. Milyar</b>	<b>164,96</b>	<b>160,02</b>	<b>166,39</b>	<b>173,02</b>	<b>179,91</b>	<b>179,91</b>	<b>179,91</b>	<b>179,91</b>	<b>179,91</b>	<b>179,91</b>	<b>179,91</b>	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi	%				100	27.070	100	35.280	100	39.972	100	102.322	Dinas Perindustrian
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang Meningkat dari Kecil ke Menengah	%				2,69	799	3,14	1.041	3,55	1.179	3,55	3.018	Dinas Perindustrian



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%				1	540	1	704	1	798	1	2.043	Dinas Perindustrian
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Proporsi usaha kecil yang diperkuat menjadi wirausaha	%		5,63		5,99	1.280	6,35	1.597	6,71	1.929	6,71	4.807	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi usaha kecil yang Ditingkatkan manajemen dan kapasitas usahanya	%		47,11		50,32	2.122	53,53	2.647	56,75	3.198	56,75	7.967	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%				100	3.245	100	3.712	100	4.339	100	11.297	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%				100		100		100		100		
<b>Sasaran 2: Menurunnya pengangguran terbuka</b>	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	<b>%</b>	<b>3,42</b>	<b>3,35</b>		<b>3,30</b>		<b>3,19</b>		<b>3,17</b>		<b>3,17</b>		
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%				16	830	17	1.233	18	1.420	18	3.482	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%				44,71	992	51,09	1.115	57,48	1.284	57,48	3.391	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial	%				21	300	22	337	23	388	23	1.026	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yg	%				21	1.014	22	1.140	23	1.313	23	3.466	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
	menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3													
<b>Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan</b>														
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Kriminalitas	Point	12,71	15,65		14,85		14,05		13,25		13,25		
Sasaran 1: Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	46,15	14,29		16,67		20,00		0,00		0,00		
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik	%	20	10		10	458	10	507	10	562	10	1.527	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	%	5,83	7,14		10	3.328	10,53	3.686	11,43	4.092	11,43	11.105	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kesejahteraan Rakyat dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	%				100	87.427	100	97.656	100	107.560	100	292.643	Biro Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Adat Aktif	%		55		60	6.798	80	8.086	100	9.635	100	24.519	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Bumdes Berprestasi	%		88		14,43		27		37		37	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
	Persentase Pokja Posyandu aktif	%		14		60		80		100		100	-	
	Persentase Posyantek yang aktif	%		55		47,86		56,41		64,96		64,96	-	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	%				63,64	1.975	72,73	2.173	81,82	2.257	81,82	6.405	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	%				100	390	100	509	100	529	100	1.427	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah	%				100	164	100	272	100	283	100	720	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas &amp; Penegakan Produk Hukum Daerah</b>	<b>Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah</b>	<b>%</b>	<b>4,88</b>	<b>5,13</b>	<b>5,41</b>	<b>5,72</b>		<b>6,07</b>		<b>6,07</b>		<b>6,07</b>		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	100,00	100,00		100,00	2.864	100,00	3.933	100,00	4.648	100,00	11.445	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	%	17,24	34,48		51,72	730	68,96	809	86,21	898	86,21	2.437	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	%				100	1.711	100	1.911	100	2.105	100	5.728	Biro Hukum
	Persentase Produk Hukum Daerah	%				100		100		100		100		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
	Kab./Kota yang Terfasilitasi													
	Persentase Produk Hukum Daerah yang terevaluasi	%			100			100			100			
	Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada masyarakat	%			100			100			100			
	Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	%			100			100			100			
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Litigasi	%			100			100			100			
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	%			100			100			100			
<b>Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani</b>	<b>Partisipasi Politik Masyarakat (%)</b>	<b>%</b>	<b>82,80</b>	<b>82,80</b>	<b>83,74</b>			<b>84,57</b>			<b>85,20</b>			
<b>Sasaran 3: Meningkatnya kesadaran politik masyarakat</b>	<b>Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik</b>	<b>%</b>	<b>0,60</b>	<b>0,70</b>	<b>0,80</b>			<b>0,90</b>			<b>1,00</b>			
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	50	75	80	4.654		90	5.153	100	33.721	100	43.528	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

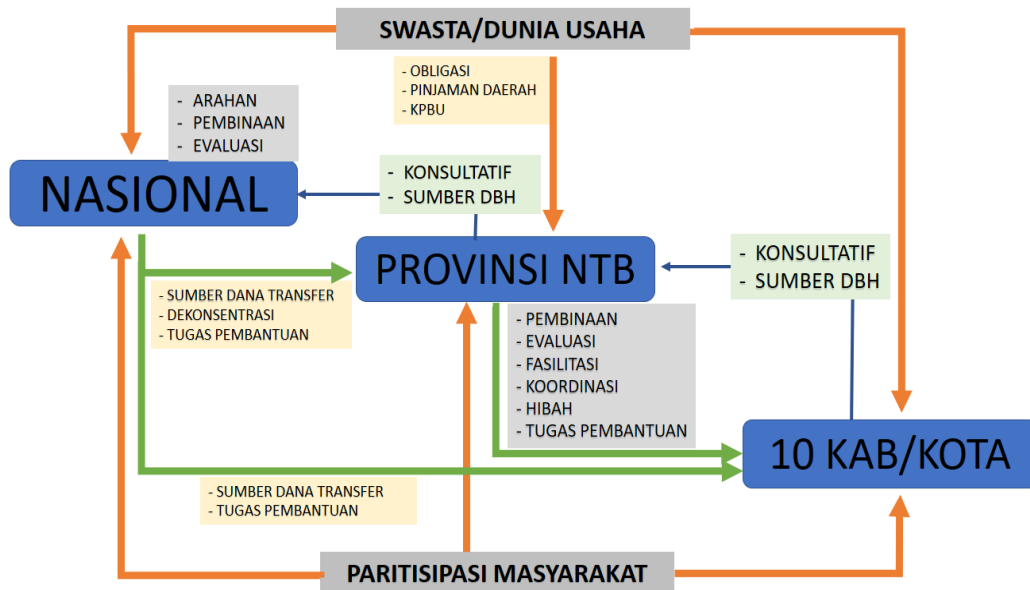
Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang aktif	%	83,33	77,91		79,66	489	81,35	541	83,01	601	83,01	1.631	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
<b>Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani</b>	<b>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</b>	<b>Point</b>	<b>55,81</b>	<b>57,81</b>		<b>59,81</b>		<b>61,16</b>		<b>61,4</b>		<b>61,4</b>		
<b>Sasaran 4: Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan</b>	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	18,6	17,93		18,6		19,27		20,47		20,47		
	Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak	%	40	40		60		80		100		100		
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase PD yang menerapkan PPRG	%	13,04	26,09		52,17	1.769	52,17	2.022	65,28	2.440	65,28	6.231	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif	%		2,00		75,52	806	75,52	921	83,07	1.111	83,07	2.837	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Ketahanan Keluarga	%	4	4		5	381	5	435	5,5	525	15	1.341	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Eksisting 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (Juta)	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen Gender					1	35	1	75	1	91	1	201	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	%	15,00	20,00		80,00	361	80,00	512	100,00	618	42,00	1.491	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA	%												
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%	1,00	1,00			518		728		878		2.124	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif	%												

## 6.5. Pola Hubungan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Provinsi NTB

Pelaksanaan pembangunan di Provinsi NTB merupakan tanggung jawab bersama dari tiga komponen utama pelaku pembangunan yaitu: Pemerintah, Swasta/Dunia Usaha, dan Masyarakat. Pola hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara umum UU tersebut mengamanatkan bahwa dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pembangunan kabupaten/kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan provinsi, serta pembangunan provinsi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Dengan demikian rencana pembangunan Nasional merupakan pedoman bagi rencana pembangunan Provinsi, serta rencana pembangunan Provinsi merupakan pedoman bagi rencana pembangunan Kabupaten/Kota. Pola hubungan antar Pemerintah dan antara Pemerintah dengan Swasta/Dunia Usaha dan Masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan di Provinsi NTB disajikan pada gambar berikut.



Gambar 6-1 Pola Hubungan Pemerintah, Swasta/Dunia Usaha dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Provinsi NTB

Dari gambar di atas, dapat dijelaskan pola hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB, serta polanya hubungannya dengan Swasta/Dunia Usaha dan Masyarakat dalam memaksimalkan pelaksanaan program pembangunan di Provinsi NTB sebagai berikut:

1. **Pemerintah Pusat (Nasional)** memiliki kewenangan, tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - a. Mengarahkan, membina dan mengevaluasi program pembangunan di Provinsi NTB.

- b. Kementerian/Lembaga sebagai tempat berkonsultasi dan berkoordinasi terhadap pelaksanaan program pembangunan di Provinsi NTB.
  - c. Sumber anggaran untuk mendukung program pembangunan di Provinsi NTB dan kabupaten/kota se-Provinsi NTB berupa: dana transfer (perimbangan dan dana desa), serta dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah Provinsi NTB.
2. **Pemerintah Provinsi NTB** memiliki kewenangan, tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, bertugas mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan mengevaluasi program pembangunan di kabupaten/kota se-Provinsi NTB.
  - b. Lembaga tempat berkonsultasi dan berkoordinasi terhadap pelaksanaan program pembangunan kabupaten/kota se-Provinsi NTB.
  - c. Sumber anggaran untuk mendukung program pembangunan di kabupaten/kota se-Provinsi NTB berupa dana bagi hasil pajak, hibah dan Tugas Pembantuan.
3. **Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB** memiliki kewenangan, tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Sebagai daerah otonom, berwenang melaksanakan program pembangunan dengan sumber pembiayaannya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, serta sekaligus berkontribusi untuk pemenuhan kebutuhan regional Provinsi NTB dan kebutuhan nasional.
  - b. Melaksanakan program pembangunan di daerah atas arahan, koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTB, sehingga program pembangunan di Kabupaten/Kota menjadi pendukung atau pelengkap program pembangunan nasional dan provinsi.
  - c. Kolaborasi sumber anggaran program pembangunan melalui APBD Kabupaten/Kota dengan APBD Provinsi NTB dalam rangka menuntaskan pelaksanaan program unggulan/prioritas yang dikerjasamakan, sehingga pembangunan daerah lebih terarah, efektif, produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.
4. **Swasta/Dunia Usaha dan Masyarakat** berperan mendukung pelaksanaan program pembangunan di Provinsi NTB melalui berbagai sumber pembiayaan antara lain berupa Obligasi, Pinjaman Daerah, dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta partisipasi langsung anggaran masyarakat sebagai berikut:
- a. Obligasi daerah merupakan alternatif sumber anggaran, terutama untuk membiayai kegiatan investasi sarana prasarana pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD, sehingga pada gilirannya dapat membayar pokok hutang beserta bunganya.

- b. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber anggaran, terutama untuk menutup defisit anggaran dan pengeluaran pembiayaan, diarahkan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPBU), merupakan alternatif sumber anggaran, terutama untuk membiayai program pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kriteria infrastruktur yang dibiayai melalui pendanaan ini antara lain: memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur, serta memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional.

Masyarakat sebagai alternatif sumber anggaran, terwujud melalui partisipasi langsung masyarakat, baik berupa pendanaan maupun ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan arahan pemerintah daerah. Artinya semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan, maka permasalahan terbatasnya anggaran pembangunan bisa teratasi.



BAB

7



*Kerangka Pendanaan Pembangunan  
dan Program Perangkat Daerah*



## **BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

### **7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006**

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah 5 (lima) tahun ke depan (2019-2023), sebagai berikut:

1. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi: Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap BLUD; Belanja Jasa Kantor (Listrik, Air, Telepon/Internet); Belanja Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; dan Belanja Program dan Kegiatan yang sudah diarahkan (Earmark).
2. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa prioritas gubernur dan wakil gubernur juga termasuk hal tersebut. Alokasi belanja pada prioritas II diarahkan untuk:
  - a. Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 melalui pelaksanaan 10 (sepuluh) program strategis dan 78 program unggulan.
  - b. Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) kewenangan provinsi, meliputi 19 jenis pelayanan dasar yaitu: pendidikan menengah; pendidikan khusus; pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi; pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota; penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi; pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi; rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan perlindungan dan jaminan

sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

- c. Penerapan Sustainable Development Goals (SDGs).
  - d. Pemenuhan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Belanja Daerah.
  - e. Pemenuhan anggaran fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari total belanja APBD diluar gaji.
  - f. Pemenuhan anggaran fungsi infrastruktur sekurang-kurangnya 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
  - g. Pemenuhan anggaran Percepatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan daerah nomor 12 tahun 2019.
3. Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Alokasi anggaran prioritas III diperuntukkan untuk mendanai program-program perangkat daerah yang tidak termasuk dalam kategori Prioritas I dan Prioritas II. Program-program tersebut dilaksanakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi namun tidak menjadi prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2019-2023, serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah berdasarkan PP 58 Tahun 2005 dan selanjutnya diimplementasikan melalui permendagri nomor 13 tahun 2006, disusun untuk pelaksanaan dua tahun (2019-2020) dari lima tahun tahapan rencana pembangunan (2019-2023), disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 7-1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan PP 58 Tahun 2005**

No	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Realisasi (Rp)		Proyeksi (Rp)		
			2019	2020	2021	2022	2023
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>4,27</b>	<b>5.148.158.519.514,76</b>	<b>5.396.490.431.003,27</b>	<b>5.528.931.855.427,00</b>	<b>5.806.562.592.202,37</b>	<b>6.083.974.442.021,11</b>
02.01	<i>Belanja Tidak Langsung</i>	3,86	2.992.635.105.936,33	3.319.614.285.793,32	3.621.168.535.227,00	3.283.596.373.908,57	3.457.309.057.427,65
02.01.01	Belanja Pegawai	4,61	1.388.742.692.618,00	1.441.832.453.562,46	1.507.993.945.344,00	1.595.120.166.191,16	1.662.679.672.556,20
02.01.03	Belanja Subsidi	210,85	0	318.000.000,00	1.631.860.720,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
02.01.04	Belanja Hibah	3,07	812.560.485.514,00	897.383.831.511,00	1.396.221.410.359,00	867.984.388.830,36	909.596.166.303,17
02.01.05	Belanja Bantuan Sosial	6,25	15.362.173.000,00	19.661.040.000,00	8.921.876.600,00	19.073.550.000,00	19.073.550.000,00
02.01.06	Belanja Bagi Hasil	2,88	757.335.712.518,00	655.968.915.075,00	696.041.354.704,00	754.418.268.887,06	832.959.668.568,29
02.01.07	Belanja Bantuan Keuangan	1.619,29	15.276.124.100,00	358.087.500,00	358.087.500,00	29.000.000.000,00	15.000.000.000,00
02.01.08	Belanja Tidak Terduga	2.215,22	3.357.918.186,33	304.091.958.144,86	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
02.02	<i>Belanja Langsung</i>	5,33	2.155.523.413.578,43	2.076.876.145.209,95	1.907.763.320.200,00	2.522.966.218.293,80	2.626.665.384.593,46

Sumber: TAPD diolah

**Tabel 7-2 Indikasi Rencana Kebutuhan Pendanaan Program Menurut Urusan Pemerintahan di Provinsi NTB Tahun 2019-2020  
Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006**

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
<b>URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR</b>						1.514.286		1.485.525								2.998.866
<b>PENDIDIKAN</b>						428.267		483.242								911.509
<b>Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan</b>						428.267		483.242								911.509
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	9.073	100	10.060							100	19.133
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	1.871	100	3.702							100	5.574
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	%	100	100		6	100								100	6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	1.163	100	1.020							100	2.183
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya dok. Perencanaan	Dokumen	7	7	7	615	7	609							7	1.224
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen	1	1	1	377	1	1.023							1	1.400
Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)					100	61.262		48.782								110.044
	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%	92,22	97,93			98,63	-							100	-

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendaanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendaanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	86,66	88,56			92,42	-							0	-
	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS)	%	89,05	93,35			95,79	-							0	-
	Persen Penurunan Angka Drop Out (DO),	%	0,4	0,37			0,32	-							0	-
	Persentase Akreditasi SMA minimal B,	%	74,21	74,71			75,7	-							0	-
	Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	1,07	1,06			1,02	-							0	-
Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)					100	76.150		91.256								167.406
	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%	92,22	97,93			98,63	-							100	-
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	86,66	88,56			92,42	-							0	-
	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS)	%	89,05	93,35			95,79	-							0	-
	Persen Penurunan Angka Drop Out (DO),	%	0,81	0,77			0,69	-							0	-
	Persentase Akreditasi SMK minimal B,	%	57,92	58,12			66,9	-							0	-
	Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	1,07	1,06			1,02	-							0	-
	Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi,	%		1,05			3,05	-							0	-



Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
	Rasio Siswa SMK terhadap SMA	%	37,00	39,00			42	-							46.50	-
Program Pembinaan Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)					100	8.268		4.829								13.098
	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	67,72	68,22			69	-							72	-
	Jumlah Siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/ Vokasi	Orang	0	0			45	-							180	-
Program Pembinaan Ketenagaan					97	3.658		1.915								5.573
	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,		18	18			18	-							18	-
	Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB,	%	18	17			15	-							9	-
	Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV,	%	99,48	99,98			100	-							100	-
	Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV,	%	98,96	99,46			99,52	-							100	-
	Kepala Sekolah bersertifikat	%		35			60	-							100	-
	Pengawas Sekolah bersertifikat	%		31			40	-							80	-
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	orang		200			250	-							1500	-
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					100	60.285		107.517								167.802

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendaanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendaanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
	Angka Melanjutkan dr SD/MI ke SMP/MTs	%	100,04	100			100	-							100	-
	Angka Melanjutkan dr SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	99,97	99,98			99,98	-							100	-
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	107,83	108,66			107	-							103	-
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	110,16	110,14			110	-							102	-
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	75,72	76,97			79,47	-							84,00	-
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	99,68	99,70			99,74	-							99,90	-
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	98,34	98,44			98,64	-							99	-
	Angka DO SD/MI	%	0,09	0,085			0,07	-							0,03	-
	Angka DO SMP / MTs	%	0,17	0,16			0,14	-							0,1	-
Program Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional	Data pokok pendidikan dan kebudayaan	Dokumen	1	1	100	500	1	1.245							5	1.745
Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan					100	4.835		3.054								7.889
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/SLB	Angka Drop Out SMA/SMK/SLB	%			100	199.112		207.409								406.521
Program Peningkatan Balai Teknologi dan Komunikasi Pendidikan	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan	%	80	85	87	1.090	90	821							97	1.911
<b>KESEHATAN</b>						<b>526.543</b>		<b>515.489</b>								<b>1.041.087</b>
<b>Dinas Kesehatan</b>						<b>49.462</b>		<b>162.237</b>								<b>210.754</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	5.207	100	5.138							100	10.344

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	6.033	100	1.051							100	7.083
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	336	100	18							100	354
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD	Nilai	B	B	B	196	B	107							A	303
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen	1	1	1	72	1	60							5	132
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	66,74	70,35	64	252	75	39.951							83	40.203
Program Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	69,52	69,53	89	1.812	75,72	3.205							85	5.016
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	92,37	94,25	95	588	97	3.047							99	3.634
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita stunting	%	37,2	33,49	25,5	6.959	31,49	13.037							28,49	19.997
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB provinsi	%	100	100	100	1.024	100	2.012							100	3.036
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Tempat-tempat Umum yang Memenuhi Syarat	%	74,77	74,79	75,64	155	78	585							84	740
Program Promosi Kesehatan dan	Persentase Posyandu Aktif	%	52,94	52,94	61	691	60	1.569							72	2.260

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Pemberdayaan Masyarakat																
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan	%	91,95	95,51	100	1.940	96,5	4.517							98	6.457
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100	100	3.201	100	725							100	3.926
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	59	60,5	70	4.307	80	1.829							95	6.137
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	%	48	50	-	13.349	55	75.254							70	88.603
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	%	100	100	-	38	100	-							100	38
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Persentase keselarasan program kesehatan pusat dan daerah	%	100	100	100	897	100	748							100	1.645
Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase puskesmas yang mempunyai minimal 5 tenaga kesehatan	%	31,9	43	63,90	722	55	178							85	900

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase target pendapatan				-	740		9.207							9.946	
<b>Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi</b>						<b>337.999</b>		<b>241.248</b>							<b>579.247</b>	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	75,00	3.886	100	4.479						100	8.365	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	-		100	199						100	199	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	20,00	743	100	178						100	921	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan Capaian Kinerja	Nilai LKJIP OPD	B	CC	B (-)			B	-						B	-	
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen	1	1	0,75	44	1	49						5	93	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan penyakit menular	%	100	100	20,00	189	40	124						100	314	
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat	%	100	0	100	3.259	40	409						100	3.669	
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai akreditasi	Perdana/Dasar/madya/utama/paripurna	Paripurna		paripurna	595	Paripurna	478						Paripurna	1.073	
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Penduduk Miskin Yang	%	100	0	-		21,74	-						100,00	-	



Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendaanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendaanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan															
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar	%	70	75	90,32	123.637	78	61.441							85	185.078
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana prasarana Rumah Sakit yang terpelihara	%	50	60			70	-							100	-
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase realisasi target pendapatan	%	105,21	89,56	22,09	205.644	38,42	173.892							100,00	379.536
<b>Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi</b>						<b>30.678</b>		<b>32.023</b>								<b>62.701</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	348	100	647							100	995
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	90	8.724	100	275							100	8.999
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	51	29,61	37,70	593	39,86	163							62,05	756
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase cakupan layanan kesehatan masyarakat	%	12,20	13,07	13,34	265	33	6.818							100	7.084
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai Akreditasi	status akreditasi	paripurna	paripurna	80	40	paripurna	85							paripurna	125

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar	%	100	100	78	3.732	87	5.084							93	8.816
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	%	100	100	82	121	84	4.232							90	4.353
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase realisasi target pendapatan BLUD	%	100	81,25	17,05	16.854	36,33	14.718							100	31.572
<b>Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir</b>						<b>108.403</b>		<b>79.981</b>								<b>188.384</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	11.498	100	14.741							100	26.239
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	1.151	100	-							100	1.151
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	-		100	-							100	-
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD	dokumen	5	5	-		5	-							25	-
Program Peningkatan Kapasitas	Manajemen Aset	Dokumen	1 dokumen	1	-		1	-							5	-

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Pengelolaan Keuangan Daerah																
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Upaya Layanan Kesehatan Masyarakat	%	0	0	-		100	-							100	-
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai Akreditasi	Status Akreditasi	100	100	-		100	-							100	-
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar	%	75	80	82	70.756	83	36.439							86	107.195
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	%	100	100	100	900	100	-							100	900
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Realisasi Target Pendapatan BLUD	%	100	100	80,93	24.099	100	28.801							100	52.900
<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						<b>282.136</b>		<b>279.577</b>								<b>561.713</b>
<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>						<b>282.136</b>		<b>279.577</b>								<b>561.713</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	91,20	3.753	100	5.650							100	9.402
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100	100	81,37	709	100	733							100	1.442

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	100	100	68,50	41	100	24							100	65
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program	Dokumen	39	39	33,78	327	39,00	462							195	789
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen	7	7	6,83	335	7,00	235							30	570
Program pembangunan jalan dan jembatan	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	77,16	83,65	80,28	64.688	86,65	143.699							90,65	208.386
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	77,16	83,65	83,65	50.706	86,65	19.949							90,65	70.655
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Rencana program	Dokumen	2	2	2,00	215	2,00	426							10	641
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Umur teknis alat berat	%	50	60	0,00		77,00	120							100	120
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	%	55,31	55,35	55,41	45.574	57,07	34.254							60,06	79.828
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai,	Kapasitas tampung	juta m3		3,76	3,86	44.821	4,91	46.779							7,23	91.600

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendaanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendaanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Danau dan Sumber Daya Air Lainnya																
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan Air Minum	%	70,48	72,56	71,81	19.209	75,74	10.145							81,66	29.355
	Cakupan sanitasi	%	69,25	67,83	70,81		69,32	-							72,32	-
Program Pengendalian Banjir	Penurunan jumlah titik banjir	Titik	326	546	19,97	8.755	466	12.479							328	21.234
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Daya tumbuh wilayah strategis	%	19,86	20,26	20,26	18.136	24,03	303							31,98	18.439
Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Daya serap jasa konstruksi bersertifikat	%	30	35	7,35	301	10,00	132							50	433
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah Gedung Pemerintah yang Berfungsi kembali	%	92,67	0	49,04	22.425	100	2.395							100	24.820
Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase RTR yang disusun	%	0	0	5,10	211	18,18	391							72,73	602
Program Pemanfaatan Ruang	Persentase deviasi pelaksanaan RTRW terhadap rencana pemanfaatan	%	0	87,51	87,52	247	88,45	80							90,31	327
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	penurunan Penyimpangan tata ruang	%	0	0	10,00	844	20,00	571							100	1.415
Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Kawasan	%	10	2	2,10	101	5,00	33							25	134
Program Pengembangan Keterpaduan	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Sektor	%	10	2	2,00	83	5,00	17							25	100



Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendaanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendaanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Infrastruktur Antar Sektor																
Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Wilayah	%	10	2	2,30	199	5,00	195							25	394
Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian	Sertifikasi hasil uji	Jenis	110	110	45,10	457	110	506							110	963
<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>						<b>198.366</b>		<b>147.951</b>								<b>346.317</b>
<b>Dinas Perumahan dan Permukiman</b>						<b>198.366</b>		<b>147.951</b>								<b>346.317</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	1.279	100	1.296							100	2.574
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	635	100	201							100	836
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	52	100	9							100	61
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja OPD	Dokumen	7	6	100	299	6	254							31	553
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1	100	33	1	21							5	53

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendaanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendaanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani	%	-	92,01	92,02	15.176	92,74	18.001							93,82	33.177
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Persentase rumah korban gempa yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	%	-	20	59,00	863	100	339							100	1.202
Program Pengembangan Permukiman	Persentase Permukiman yang tertata	%	10,7	0	2,70	180.029	5,18	127.831							25,9	307.860
<b>KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>						<b>42.995</b>		<b>25.602</b>								<b>68.597</b>
<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>						<b>11.198</b>		<b>8.639</b>								<b>19.837</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas dan kapasitas layanan administrasi perkantoran	Tahun	1	1	1	1.047	1	1.336							1	2.383
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan kapasitas dan efektifitas layanan	Tahun	1	1	1	400	1	399							1	798
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya pegawai yang terampil dan sehat	Orang	58	53	65	13	65	4							65	17
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen Perenc & Pelaporan	Dokumen	11	11	11	243	11	201							55	444
Program Peningkatan Kapasitas	Tersedianya Laporan Aset	Dokumen	2	2	2	20	2	19							10	39

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Pengelolaan Keuangan Daerah																
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase ormas yang meningkat kapasitas wawasan kebangsaannya	%	7,5	7,5	20	375	20	340							100	715
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Penurunan Konflik Sosial	Kasus	26	13	7	5.860	21	5.074							15	10.934
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Terwujudnya Desa Bersinar (Bersih Narkoba)	Desa	0	0	10	2.010	10,00	477							50	2.487
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapat pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah	%	18,5	18,5	20	1.232	20,00	789							100	2.021
<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>						<b>3.733</b>		<b>2.997</b>								<b>6.730</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	100	671	100	719							100	1.389
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran Tugas Aparatur	%	100	100	100	1.039	100	389							100	1.428
Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	%	100	100	100	109	100	104							100	213
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Rencana Program	%	100	100	7	249	100	191							100	440

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
capaian kinerja dan keuangan																
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Asset	%	100	100	100	17	100	19							100	36
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Petugas Pelindungan Masyarakat (LINMAS)	%	100	100	100	396	100	1							100	397
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (Perda dan Pergub)	%	100	100	100	1.026	100	1.490							100	2.517
Program Peningkatan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	%	100	100	100	226	100	84							100	309
																-
<b>Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB</b>						<b>28.064</b>		<b>13.967</b>								<b>42.031</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mneingkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	1.584	100	1.237							100	2.820
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	1.224	100	651							100	1.875
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	18	100	19							100	37

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	141	100	139							100	281
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	100	100	20	100	24							100	43
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Masyarakat dan Dunia Usaha Aktif dalam Penanggulangan Bencana	%	5	10	15,00	15.779	20	3.291							50	19.070
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan Penanggulangan Bencana	Pesentase realisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (struktural dan non struktural)	%	10	10	84,87	9.298	100	8.605							100	17.904
	Persentase penurunan jumlah korban bencana setelah Rehabilitasi/Rekonstruksi	%	20	20			40	-							100	-
<b>SOSIAL</b>						<b>35.978</b>		<b>33.665</b>								<b>69.643</b>
<b>Dinas Sosial</b>						<b>35.978</b>		<b>33.665</b>								<b>69.643</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan adminitrasi perkantoran	%	100	100	100	3.953	100	4.006							100	7.959
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan & kelayakan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	100	4.689	100	3.678							100	8.367
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya Aparatur	%	100	100	100	172	100	13							100	185



Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas OPD	%	100	100	100	359	100	502							100	862
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas penatausahaan BMD	%	100	100	100	119	100	95							100	214
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	2,75	2,75	1,90	10.708	2,04	10.348							11,62	21.056
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	%	5,07	22,42	2,18	12.404	2,90	9.160							17,59	21.564
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Korban Trauma yang dibina	%	3,47	4,83	0,58	64	0	-							2,5	64
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	2.773	100	5.147							100	7.920
Program Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	54,5	54,5	55,5	737	56,5	715							59,5	1.452
<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>						<b>113.358</b>		<b>79.274</b>								<b>192.632</b>
<b>TENAGA KERJA</b>						<b>7.446</b>		<b>5.216</b>								<b>12.662</b>
<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>						<b>7.446</b>		<b>5.216</b>								<b>12.662</b>

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	2.564	100	2.457							100	5.021
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	1.566	100	814							100	2.381
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	76	100	96							100	172
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	366	100	261							100	627
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	100	100	65	100	59							100	124
Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan	Meningkatnya Perencanaan dan Pelaporan	%	100	100	100	147	100	250							100	396
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	85,00	85,00	85,00	930	86,00	122							89	1.052
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	90,00	90,00	89,00	1.204	91,00	762							94	1.967
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran sengketa pengusaha-pekerja	%	70,00	70,00	70,00	190	71,00	191							74	381
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	95,00	95,00	95,00	337	100	205							100	542

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendaanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendaanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						<b>3.786</b>		<b>3.277</b>								<b>7.063</b>
<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>						<b>3.786</b>		<b>3.277</b>								<b>7.063</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	tahun	100	100	100	826	100	612							100	1.438
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	340	100	197							100	537
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	21	100	17							100	38
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen Pelaporan	Dokumen	6	6	6	116	6	126							6	242
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen	1	1	1	14	1	12							5	26
Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Cakupan perempuan kelompok sasaran yang bekerja	%	0,063	0,075	0,081	423	0,110	142							0,183	565
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan	Presentase Kab/Kota yang memiliki peraturan perundang-undangan yang	%	10	30	40	1.375	60	2.139							100	3.514

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Gender (PUG) dan anak	mendukung PUG dan PUHA															
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	47,4	51,58	56,74	623	62,41	-							83,07	623
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase OPD yang mengintegrasikan PPRG	%	26,67	42,22	30,43	48	62,22	33							100	81
<b>PANGAN</b>						<b>6.926</b>		<b>8.709</b>								<b>15.635</b>
<b>Dinas Ketahanan Pangan</b>						<b>6.926</b>		<b>8.709</b>								<b>15.635</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran	%	100	100	99,52	789	100	702							100	1.491
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	691	100	224							100	915
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	78,95	17	100	7							100	24
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD		CC	CC	62,15	285	B	498							B	782
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	DOKUMEN	1	1	1	46	1	28							5	74
Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	POINT	84,48	86,20	87,93	4.973	89,65	7.238							94,83	12.211

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Cakupan Pemasaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Produk Olahan	%	89,13	97,83	73,91	126	86,96	12							100	138
<b>PERTANAHAN</b>						<b>209</b>		<b>75</b>								<b>284</b>
<b>Sekretariat Daerah</b>						<b>209</b>		<b>75</b>								<b>284</b>
<b>Biro Pemerintahan</b>						<b>209</b>		<b>75</b>								<b>284</b>
Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	100	100	99,10	209	100	75							100	284
<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>						<b>26.839</b>		<b>23.581</b>								<b>50.420</b>
<b>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>						<b>26.839</b>		<b>23.581</b>								<b>50.420</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	5.519	100	5.712							100	11.231
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	4.455	100	2.413							100	6.868
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	225	100	123							100	348
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD		CC	B	B	878	BB	1.113							A	1.991
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen	6	14	14	317	19	260							19	577
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	%	-	-	-	13.883	15	12.771							30	26.654



Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
	Persentase penanganan sampah	%	42,31	42,31	-		60	-							70	-
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan lokasi yang dikendalikan kualitas air dan udaranya	Lokasi	0	0	2	1.561	4	1.189							10	2.750
<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>						<b>1.795</b>		<b>543</b>								<b>2.338</b>
<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>						<b>1.795</b>		<b>543</b>								<b>2.338</b>
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk *	rasio		0,78	0,99	1.795	0,82	543							0,88	2.338
<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>						<b>7.147</b>		<b>4.188</b>								<b>11.335</b>
<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>						<b>7.147</b>		<b>4.188</b>								<b>11.335</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi perkantoran	%		100	91,70	1.173	100	997							100	2.170
Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur	%		100	84,96	2.600	100	143							100	2.743
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya aparatur	%		100	90,28	16	100	18							100	34

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen		6	6	153	6	88							6	241
Program Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen		1	1	20	1	22							1	42
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Prosentase Posyantek yang terbentuk dan aktif	%		25,00	37,93	357	55	135							100	492
Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	Prosentase BUMDes yang terbentuk dan aktif	%		80,00	87,44	1.467	88	1.306							100	2.772
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Prosentase Lembaga Adat terbentuk dan aktif	%		45,00	73,96	104	55	35							70	139
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentase Aparatur Desa terlatih	%		20,00	41,88	1.061	52	575,26							100	1.637
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase PKK Aktif	%		0,00	20,00	196	40	871							100	1.066
<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>						<b>876</b>		<b>303</b>								<b>1.179</b>
<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>						<b>876</b>		<b>303</b>								<b>1.179</b>

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rata-rata usia kawin pertama	tahun	20,27	20,23	20,42	456	20,57	170							21,00	625
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Cakupan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif	%	1,89	1,89	1,89	166	1,89	-							1,89	166
Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Cakupan Anggota kelompok BKB, BKR dan BKL yang ber KB	%	66,42	0	66,92	158	67,67	-							71,42	158
Program KB	Rasio Akseptor KB	%	74,77	0	-		82,38	-							87,42	-
Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri	Persentase Peserta KB Mandiri	%	21,18	0	-		21,93	-							24,83	-
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase tenaga PLKB/PKB yg berwawasan TRI BINA	%	14,2	0,0	2,8	96	2,8	-							2,84	96
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD	Jml Keluarga Yg Menjadi Anggota Kelompok BKB yang menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA)	%	18,5	0,0	-		19,2	133							21,5	133
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/ AIDS	Persentase siswa yang tidak menggunakan narkoba, HIV/AIDS dan PMS	%	1,15	1,43	100,00		100,00	-							100,00	-
<b>PERHUBUNGAN</b>						<b>8.931</b>		<b>4.176</b>								<b>13.107</b>
<b>Dinas Perhubungan</b>						<b>8.931</b>		<b>4.176</b>								<b>13.107</b>

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendaanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendaanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	2.103	100	1.392							100	3.496
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	76,32	204	100	222							100	426
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Sumber Daya Aparatur Yang Mengikuti Diklat	%	15,79	17,05	49,38	21	40	2							74	24
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	155	100	147							100	302
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Aset Yang Dimanfaatkan	%	100	100	94,23	34	100	23							100	57
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase dokumen perencanaan perhubungan yang selaras dengan RTRW	%	3	14	75,00	925	55,17	264							97	1.189
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan prasarana dan fasilitas perhubungan yang terpelihara	%	0	0	100	170	100	449							100	619
Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Cakupan Angkutan yang Layak	%	70,23	71,95	70,24	1.627	79,76	965							81,63	2.592
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Cakupan sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia	%	50	50	-		50	-							100	-
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Rasio Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas	%	-	-	3,13	287	3,08	521							2,68	808

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Program peningkatan Manajemen Transportasi	Cakupan Kota Tertib Lalu Lintas	%	20,00	20,00	20,00	50	20	32							50	82
Program Pengembangan Transportasi Laut	Rasio Pertumbuhan Angkutan Penumpang	%	23,90	-15	5,00	3.353	5	159							25	3.512
<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						<b>9.517</b>		<b>6.210</b>								<b>15.728</b>
<b>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</b>						<b>9.517</b>		<b>6.210</b>								<b>15.728</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	-	-	100	1.392	100	1.477							100	2.869
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	-	-	100	919	100	160							100	1.079
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	-	-	100	47	100	6							100	52
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD		-	-	70,00	216	100	140							100	356
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen	1	1	1	15	1	29							5	44
Program Pengembangan e-Government	Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	-	2,67	3,30	2.123	3,3	1.583							4,0	3.706
Program Pengembangan Komunikasi,	Persentase informasi yang terpublikasi	%	-	-	100	1.794	75	1.346							90	3.139



Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendaanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendaanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Informasi dan Media Massa																
Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Informatika dan Statistik	Persentase Peningkatan Pemahaman SDM di Bidang Komunikasi Informatika	%	-	42	64,35	300	55	75							70	375
Program Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	Cakupan Badan Publik yang Informatif	%	-	2	7,00	2.615	5	1.395							8	4.010
Program Pengelolaan Pelayanan Telekomunikasi	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	-	88,25	92,56	98	0	-							89,04	98
<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>						<b>8.211</b>		<b>6.066</b>								<b>14.276</b>
<b>Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>						<b>8.211</b>		<b>6.066</b>								<b>14.276</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	115,38	1.289	100	1.300							100	2.589
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	130,45	465	100	299							100	763
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	58,11	8	100	9							100	17
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD	%	B	B	123,74	301	A	504							A	805
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	%	100	100	1,00	23	100	27							100	50

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Persentase Legalitas Usaha	%	35	35,7	30,20	151	45	501							60	652
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM	%	14,40	16,4	14,92	4.510	18,37	2.872							100	7.383
Pogram Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan usaha kecil ke menengah	%	0,26	0,27	1,67	163	0,3	367							0,33	530
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	61,91	60,39	59,61	1.300	68,65	187							81,33	1.487
<b>PENANAMAN MODAL</b>						<b>2.558</b>		<b>2.741</b>								<b>5.299</b>
<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>						<b>2.558</b>		<b>2.741</b>								<b>5.299</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%			100	725	100	776							100	1.501
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%			100	93	100	100							100	193
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%			100	3	100	164							100	167
Program peningkatan pengembangan	Nilai LKJIP OPD	%			100	173	100	140							100	314

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendaanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendaanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		%			100	19	100	12							100	31
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Tindak Lanjut Hasil Promosi	Perusahaan	10	15	5	896	19	805							25	1.700
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	11,28	14	10,023	649	16.800	745							88.410	1.394
<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>						<b>12.993</b>		<b>5.534</b>								<b>18.527</b>
<b>Dinas Pemuda dan Olahraga</b>						<b>12.993</b>		<b>5.534</b>								<b>18.527</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	1.641	100	1.522							100	3.163
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	345	100	249							100	594
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	132	100	22							100	154
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD	Nilai	C	C	66,67	328	B	246							A	573
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen			2	27	1	31							5	59

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendaanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendaanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Kelompok pemuda yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan	%	0	0	60,00	1.135	70	92							100	1.226
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah pemuda berprestasi	Orang	5	5	23	670	8	346							43	1.015
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Presentase wirausahawan muda	%	67,78	67,86	68,07	420	68,07	458							68,39	879
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan pembinaan atlet berprestasi	%	100	100	100	3.471	100	859							100	4.330
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga	Persentase sarana prasarana pemuda dan olahraga yang terstandar	%	30,00	30,00	35,00	4.823	40	1.711							55	6.534
<b>STATISTIK</b>						<b>1.349</b>		<b>470</b>								<b>1.818</b>
<b>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</b>						<b>1.349</b>		<b>470</b>								<b>1.818</b>
Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Cakupan ketersediaan data yang terintegrasi	%	-	-	95,49	1.349	70	470							100	1.818
<b>PERSANDIAN</b>						<b>272</b>		<b>344</b>								<b>615</b>
<b>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</b>						<b>272</b>		<b>344</b>								<b>615</b>
Program Optimalisasi Keamanan Informasi dan Tata Kelola Persandian	Cakupan Produk Hukum OPD yang diotentifikasi	%	-	-	2,20	272	33	344							100	615
<b>KEBUDAYAAN</b>						<b>7.718</b>		<b>4.725</b>								<b>12.443</b>

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendaanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendaanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
<b>Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan</b>						<b>7.718</b>		<b>4.725</b>								<b>12.443</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100		100	-							100	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100		100	-							100	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100		100	-							100	-
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD	Nilai	C	C	B		B	-							A	-
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen			1		1	-							4	-
Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase kelompok adat budaya yang dikembangkan	%	100	100	100	2.789,72	100	2.239							100	5.029
Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	%	100	100	100	2.126,73	100	1.877							100	4.003
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase penyelenggaraan Festival seni	%	100	100	100	2.432,70	100	442							100	2.874
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Budaya Daerah	Persentase penyelenggaraan Festival seni	%	100	100	100	368,65	100	168							100	537
<b>PERPUSTAKAAN</b>						<b>6.192</b>		<b>2.708</b>								<b>8.900</b>



Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya		
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)	
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>						<b>6.192</b>		<b>2.708</b>								<b>8.900</b>	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	95,38	96,17	100	1.459	100	1.265								100	2.724
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	98,12	99,20	100	3.713	100	323								100	4.036
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	35	100	22								100	57
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Pelaporan Kinerja	dokumen	6	6	6	215	6	169								6	384
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	dokumen	1	1	1	23	1	19								1	42
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	kunjungan	990.000	1.016.000	1.064.186	747	1.089.000	911								1.206.000	1.658
<b>KEARSIPAN</b>						<b>593</b>		<b>407</b>									<b>1.001</b>
<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>						<b>593</b>		<b>407</b>									<b>1.001</b>
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase Peningkatan Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	%	63,29	-	0,00		100	-								100	-
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Arsip yang diselamatkan dibagi total arsip yang tersimpan di depo	%	16,55	16,67	33,33	347	50	211								100	558

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan	%	100	95,60	100,00	76	100	131							100	207
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Peningkatan Kualitas SDM Layanan Informasi	Orang	45	-	135,00	133	145	35							295	168
Program Peningkatan dan Pengendalian Kearsipan	Peningkatan Record Center OPD	OPD	5	10	10	37	21	31							45	68
<b>URUSAN PILIHAN</b>						<b>220.708</b>		<b>243.741</b>								<b>464.449</b>
<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						<b>20.565</b>		<b>19.386</b>								<b>39.951</b>
<b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b>						<b>20.565</b>		<b>19.386</b>								<b>39.951</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	3.722	100	4.284							100	8.006
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	3.836	100	1.683							100	5.518
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	35	100	61							100	96
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD	Nilai	B	BB	0	275	A	524							A	799
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen	1	1	1	84	1	88							5	172

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Pengelolaan Sumberdaya Laut, pesisir dan Pulau - pulau Kecil	Rasio Kawasan Konservasi perairan terhadap total luas perairan territorial	Rasio	0,083	0,085	0,094	2.825	0,087	2.212							0,101	5.037
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Persentase Kelompok Masyarakat Pesisir yang diberdayakan	%	0,64	0,73	0,59	1.493	0,91	436							5,47	1.929
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan Budidaya	ton	1.024.084	1.126.173	1.149.500	3.081	1.171.670	4.237							1.243.386	7.318
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan Tangkap	Ton	182.982	221.321	219.349	3.749	234.799	4.068							256.572	7.817
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Angka Konsumsi Ikan	Kg/ Kapita/ Thn	35,49	33	38,2	1.457		1.794							40,59	3.252
<b>PARIWISATA</b>						<b>23.158</b>		<b>14.939</b>								<b>38.097</b>
<b>Dinas Pariwisata</b>						<b>23.158</b>		<b>14.939</b>								<b>38.097</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	1.934	100	2.975							100	4.909
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarpras yang berkondisi baik	%	100	100	100	264	100	742							100	1.006
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan ASN yang berkompeten	%	100	100	100	45	100	15							100	60
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD	%	100	100	100	292	100	382							100	674

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	%	100	100	100	42	100	22							100	64
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Angka kunjungan wisatawan	orang	3.508.903	2.552.634	3.706.352	2.375	4.400.000	833							23.100.000	3.209
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan (target 99 desa)	%	0,00	16,67	20	14.896	28,57	8.346							15,38	23.242
Program Pengembangan Kemitraan	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	%	-	-	15,63	159	34,38	368							100	527
Program Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata	Rata-rata Lama Menginap	hari	2,00	1.5	2,05	3.152	2,95	1.230							3,35	4.382
Program Penataan Geopark	Persentase Geosite yang tertata	%	-	-	-	-	12,50	25							50	25
<b>PERTANIAN</b>						<b>116.209</b>		<b>131.974</b>								<b>248.183</b>
<b>Dinas Pertanian dan Perkebunan</b>						<b>99.763</b>		<b>105.988</b>								<b>205.751</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	7.569	100	5.451							100	13.020
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	6.475	100	1.529							100	8.005
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	170	100	187							100	357
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Nilai LKJIP OPD				0	423		361								784

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Capaian Kinerja dan Keuangan																
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen			29	227	1	108							5	336
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani		108	> 105	115,81	509	100	1.262							100	1.771
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/ Perkebunan	%			0	83.835	2	96.778							5	180.613
	Produksi Padi	Ton GKG	2.323.700	2.335.318	2.436.349			-								-
	produksi Jagung	Ton PK	2.127.324	2.137.960	2.003.267			-								-
	Produksi Kedelai	Ton Biji Kering	56.097	56.377	80.925			-								-
	Produksi Cabe	Ton Buah Segar	18.874	18.968	181.926			-								-
	Produksi Bawang Merah	Ton Umbi Basah	195.458	196.435	161.411			-								-
	Produksi Manggis	Ton Buah Segar	7.312	7.348	11.556			-								-
	Produksi Tembakau		50.680	50.933	43.068			-								-
	Produksi Kopi	Ton Berasan	4.865	4.889	6.566			-								-
	Produksi Kakao	Ton	2.083	2.093	2.219			-								-
	Produksi Kelapa	Ton Eq. Kopra	48.365	48.606	48.766			-								-
	Produksi Mete	Ton Biji Kering	12.734	12.797	10.411			-								-
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase Penyuluh Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	20,85	20,85	26,75	554	31,75	311							46,75	866



Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendaannya		
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)	
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
<b>Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</b>						<b>16.447</b>		<b>25.986</b>								<b>42.433</b>	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	96,34	2.040	100	1.749								100	3.790
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	97,33	381	100	562								100	943
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	%	100	100	99,68	144	100	63								100	206
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD				70,65	1.006	85	932								85	1.938
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	%			98,02	93	100	61								100	154
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertumbuhan Populasi Ternak	%			4,58	11.409	5	22.174								5	33.583
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	%			1,00	704	< 1	102								< 1	806
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Cakupan Produksi Peternakan Yang Dipasarkan	%			74,72	91	75%	227								75%	318
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Cakupan Kelompok Ternak Yang Memanfaatkan Teknologi Peternakan	Kelompok			100	191	100	115								100	306
<b>KEHUTANAN</b>						<b>30.009</b>		<b>31.977</b>									<b>61.986</b>

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya		
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)	
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
<b>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>						<b>30.009</b>		<b>31.977</b>								<b>61.986</b>	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100				-								100	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100				-								100	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	%	100	100				-								100	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD							-								85	-
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	%						-								100	-
Program Perlindungan Hutan, Konservasi sumber daya alam dan ekosistem	Rasio Kemampuan perlindungan hutan	%	0,0003	0,0006	0,001	16.798	0,0012	17.618								0,0020	34.416
Program Pengelolaan Hutan	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling	%	16,26	25,51	35,60	5.370	31,69	12.006								40,95	17.376
	Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK Lainnya	%	0,08	0,08	-		5,08	-								20,08	-

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Program Rehabilitasi Kerjasama dan Perhutanan Sosial	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan berbasis perhutanan sosial	%	15,64	26,13	43,62	6.269	32,30	2.353							41,56	8.621
	Persentase penurunan luas lahan kritis	%	0,93	0,50	0,53		0,53	-							0,54	-
<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>						<b>10.214</b>		<b>6.226</b>								<b>16.440</b>
<b>Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral</b>						<b>10.214</b>		<b>6.226</b>								<b>16.440</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	844	100	744							100	1.588
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	334	100	194							100	528
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	%	100	100	18	6	100	-							100	6
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP	Nilai	CC	B	0	136	B	200							BB	336
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai LAKIP	Nilai	CC	B	1	21	B	22							BB	43
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan Good Mining Practices	%	-	-	2	496	4	73							8	569
Program Pembinaan dan Pengembangan	Rasio Elektrifikasi	%	85,1	93,83	100	2.292	95	1.418							97	3.710

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Bidang Ketenagalistrikan																
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Cakupan masyarakat yang terlayani air bersih	KK	765	255	2125	5.481	425	2.713							3.400	8.194
Program Pengembangan dan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Keselarasan pengembangan dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral	%	0	0	100	342	90	171							100	512
Program Pencegahan Kerusakan Lingkungan	Jumlah situs geologi yang dilindungi	Situs	0	0	4	74	3	-							15	74
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	Kontribusi pembangkit listrik EBT	%	-	5,11	7	189	6,62	690							5,57	879
<b>PERDAGANGAN</b>						<b>10.839</b>		<b>20.026</b>								<b>30.866</b>
<b>Dinas Perdagangan</b>						<b>10.839</b>		<b>20.026</b>								<b>30.866</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	1.045	100	1.084							100	2.129
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	873	100	154							100	1.027
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	%	100	100	100	12	100	6							100	18
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Rencana Program	Dokumen	9	9	9	462	9	315							9	777
Program Peningkatan Kapasitas	Manajemen Asset	Dokumen	1	1	1	10	1	28							1	38

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendaanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendaanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Pengelolaan Keuangan Daerah																
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Tingkat Penyelesaian Pengaduan Konsumen	%	60	50	97	508	73	282							82	790
Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Pertumbuhan Jumlah Negara Tujuan Ekspor	%	17	19	23	112	24	64							33	177
Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Kerjasama Jejaring Usaha dan Mitra	%	6,17	16,36	66	199	49,50	1.874							66,79	2.073
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan Harga Bahan Pokok Yang Stabil Antar Waktu Antar Wilayah Negeri	%	5	6	3,75	1.236	6	2.258							4	3.494
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan asongan	Persentase Peningkatan Pedagang Kakilima dan usaha informal yang memperoleh peralatan perdagangan	%		16,42	12,27	5.925	11,11	13.816							26,67	19.741
Program Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Daerah	Persentase Kerjasama, Jejaring Usaha Dan Mitra	%	50	50	66	457	55	145							70	602
<b>PERINDUSTRIAN</b>						<b>9.570</b>		<b>19.171</b>								<b>28.740</b>
<b>Dinas Perindustrian</b>						<b>9.570</b>		<b>19.171</b>								<b>28.740</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	85,09859	1.016	100	2.077							100,00	3.093
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	503	100	1.276							100,00	1.780



Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendaanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendaanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rencana Program , Pelaporan Kinerja Dan Keuangan	Dokumen	14	14	100	282	17	473							85,00	755
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan	Manajemen Aset	Dokumen	2	2	2	11	2	26							10,00	38
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Cakupan Ikm Yang Terbina Dalam Kapasitas Iptek Sistem Produksi	%	2,82	4,58	10,043	2.335	13,46	1.959							20,80	4.293
Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Cakupan Ikm Yang Terbina	%	1,4	1,50	4,55	1.559	3,83	7.897							7,47	9.456
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan Ikm Yang Menerapkan Teknologi Dalam Proses Produksi	%	2,96	3,40	2,02	3.169	5,02	2.791							8,24	5.960
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Cakupan Sentra Industri Potensial Yang Dikembangkan	%	1,7	3,48	0,73	324	6,96	450							12,18	774
Program Kerjasama Pembangunan Sektor Perindustrian	Jumlah Kerjasama Ikm Dengan Mitra	IKM	50	50	24	275	70	2.175							90,00	2.450
Program Peningkatan Mutu Dan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah	Cakupan Ikm Dalam Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah	%	0,21	0,86	0,97	94	1,23	47							2,20	141
<b>TRANSMIGRASI</b>						<b>143</b>		<b>43</b>								<b>186</b>
<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>						<b>143</b>		<b>43</b>								<b>186</b>

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendaanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendaanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Cakupan Penempatan Transmigrasi	%	75	75	80	143	85	43							100	186
<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>						<b>307.171</b>		<b>267.284</b>								<b>574.456</b>
<b>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>						<b>150.087</b>		<b>142.651</b>								<b>292.737</b>
<b>Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>																
<b>Sekretariat Daerah</b>						<b>70.212</b>		<b>67.508</b>								<b>137.720</b>
<b>Biro Umum</b>						<b>27.412</b>		<b>40.227</b>								<b>67.639</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	90	90	99,39	16.072	90	19.658							90	35.730
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	90	90	99,66	7.815	90	10.935							90	18.750
Program Peningkatan Disiplin Aparatur (usulan hanya 2020 dan 2023)	Tingkat Disiplin Aparatur	%	90	0	0		90	-							90	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	90	90	99,92	518	90	100							90	618
Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD				99,99	419		1.312								1.731
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	dokumen	2	2	99,34	367	2	220							10	587
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	Cakupan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	%	100	100	99,89	2.221	100	8.003							100	10.223

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah																
<b>Biro Organisasi</b>						<b>1.914</b>		<b>1.123</b>								<b>3.037</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase administrasi perkantoran yang terlaksana	%	100	100	100,00	340	100	-							100	340
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana prasarana aparatur yang terpelihara	%	100	100	100,00	219	100	-							100	219
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	Cakupa Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	0,00	20	100	-							100	20
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	0,00	81	100	-							100	81
Program Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	persentase laporan asset yang tersusun	%	100	100	0,00	12	100	-							100	12
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Unit Kerja Pelayanan publik yang berprestasi	Unit		3	0,00	196	15	51							34	247
	Persentase Unit Kerja Pelayanan publik yang survey kepuasan masyarakat meningkat	%		40			80	-							100	-
Program Evaluasi Kinerja SKPD	Persentase Perangkat Daerah yang akuntabel	%		50	75,00	55	100	-							100	55
Program pengembangan sistem analisis formasi jabatan dan pendayagunaan aparatur	persentase dokumen pendayagunaan aparatur yang tersusun	%		80	90,00	293	100	95							100	388

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Program Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	persentase laporan kinerja pemerintah yang bernilai A / BB	%		30	50,00	212	75	444							100	656
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase perangkat daerah / UPTD/UPTB yang ditata	%		75	85,00	377	90	534							100	910
Program Reformasi Ketatalaksanaan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SOP secara baik	%		75	80,00	61	90	-							100	61
Program Peningkatan Budaya Kerja	Persentase perangkat daerah yang menerapkan budaya kerja baik	%		60	70,00	47	80	-							100	47
Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	persentase dokumen pengembangan SDA yang tersusun	%	100	100			100	-							100	-
Program Pengelolaan Kelembagaan IT Pelayanan Publik	Persentase Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%		100			100	-							100	-
Program Pemenuhan Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik			60			80	-							80	-
Program Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik yang tereplikasi	Inovasi	2	2			2	-							12	-
<b>Biro Hukum</b>						<b>2.358,82</b>		<b>1.521</b>								<b>3.880</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	521	100	-							100	521
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	161	100	-							100	161

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendaanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendaanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja OPD	%	100	100	154	75	100	-							100	75
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah	%	12	12	100	11	100	-							100	11
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang terbentuk	Dokumen	100	100	144	1.077	100	1.035							100	2.112
Program Bantuan Hukum dan HAM	Persentase penanganan kasus-kasus hukum	%	100	100	311	513	100	486							100	999
<b>Biro Pemerintahan</b>						<b>2.470</b>		<b>370</b>								<b>2.840</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	580	100	-							100	580
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana prasarana aparatur	%	100	100	100	32	100	-							100	32
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100	115	100	-							100	115
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen aset	dok	3	3	3	11	3	-							15	11
Program Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Tingkat kualitas kinerja kecamatan dan kelurahan	%	100	100	100	26	100	88							100	114



Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	cakupan fasilitasi kerjasama antar pemerintah daerah	%	100	100	98,43	1.077	100	-							100	1.077
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Daerah Otonomi yang ditata	Kab/ Kota	10	10	10	71	10	-							10	71
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Rangking LPPD	%	100	100	97,76	559	100	282							500	841
<b>Biro Perekonomian</b>						<b>1.687</b>		<b>1.652</b>								<b>3.338</b>
Program Pelayanan Adinistrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adinistrasi Perkantoran	%	100	100	100	200	100	-							100	200
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	79	100	-							100	79
Program Peningkatan Pengembangan Sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan		%	100	100	100	69	100	-							100	69
Program Peningkatan Sumberdaya Manusia					0			-								-
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah					100	10		220								230
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kontribusi hasil BUMD terhadap PAD	%	100	100	99,09	284	100	553							100	837
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur dan Pengawasan	Cakupan Perda/Pergub pengelola BUMD	%	100	100	100	136	100	80							100	216

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi Daerah	Persentase peningkatan produksi daerah	%			100	639		292							931	
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	11.280	14.000	100	100	16.800	118						88.410	219	
Program Pengembangan Data dan Informasi Perekonomian	Cakupan rekomendasi kebijakan ekonomi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	170	100	389						100	559	
<b>Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP</b>						<b>3.300</b>		<b>3.318</b>							<b>6.618</b>	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	467	100	-						100	467	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	118	100	-						100	118	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupa Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	65	69			85	-						100	-	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP OPD	Nilai	CC	CC	B	90	B	-						B	90	
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupa Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	11	100	-						100	11	
Program Peningkatan dan Pengembangan	Tingkat kepatuhan OPD terhadap standar harga	%	70	73	98	251	82	-						98	251	

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendaanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendaanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Pengelolaan Keuangan Daerah																
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level	3	3	3	2.255	3	2.737							4	4.992
Program Optimalisasi Pelayanan e-Procurement	Prosentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan sesuai Standar (17 Standar)	%	29.4	70.6	29	108	100	581							100	688
<b>Biro Kesejahteraan Rakyat</b>						<b>8.626</b>		<b>9.493</b>								<b>18.120</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	97,50	483	100	-							100	483
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	96	100	-							100	96
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	%	100	100			100	-							100	-
Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan IPTEK Aparatur	%	100	100			100	-							100	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen	4	4	4	105	4	-							4	105
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen	1	1	1	14	1	-							1	14

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendaanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendaanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Persentase Pelaksanaan kegiatan Keagamaan	%	100	100	99,38	6.650	100	8.888							100	15.539
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular	%	100	100	100	171	100	383							100	553
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Sekolah yang bisa mengikuti LSS	%	100	100	100		100	37							100	37
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan.	Persentase OPD yang mengintegrasikan PPRG	%	100	100	100	96	100	8							100	104
Program Pengendalian Penduduk dan KB.	Rasio Akseptor KB dan Penduduk	%	75	75	-		75	-							75	-
Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan	Persentase keikutsertaan Pemuda berprestasi.	%	100	100	217	272	100	53							100	325
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Cakupan Koordinasi TKI informal yang mendapat penanganan	%	100	100	80	14	100	1							100	15
Program Peningkatan Iman dan Taqwa (IMTAQ)	Presentase ASN yang mengikuti IMTAQ	%	100	100	-		100	-							100	-
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Manular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS.	Persentase Siswa yang tidak menggunakan Narkoba, HIV/AIDS dan PMS	%	100	100	95	377	100	122							100	499
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Cakupan Koordinasi Rumpun Kesra	Kali	1	1	1	343	1	-							5	343

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan PMKS	%	100	100	45	5	100	1							100	6
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Persentase PKK Desa Aktif	%	100	100	-		100	-							100	-
<b>Biro Humas dan Protokol</b>						<b>21.011</b>		<b>9.086</b>								<b>30.097</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	98	98	99	2.552	100	-							100	2.552
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	96	96	95	1.482	100	-							100	1.482
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber daya Aparatur	%	98	97	99	44	100	-							100	44
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dok	100	100	100	132	100	-							100	132
Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Manajemen Aset	Dok	1	1	99	19	1	-							5	19
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Cakupan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	%	98	98	100	6.992	100	-							100	6.992
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase Kerjasama Informasi dan Media Massa	%	90	90	100	5.740	90	5.508							97	11.248
Program Pengembangan	Persentase Pengembangan	%	89	89	1	4.051	89	3.578							96	7.629



Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Komunikasi Informasi dan mass media	Komunikasi Informasi dan Mass Media															
<b>Biro Administrasi Kerjasama</b>						<b>1.432</b>		<b>719</b>								<b>2.151</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	0	0	98,83	934	100	-							100	934
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	0	0	100	21	100	-							100	21
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan Keuangan yg baik	Dok	0	0	2	75	5	-							22	75
Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Manajemen Aset	Dok	0	0	1	8	1	-							5	8
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Kerjasama Pemerintahan dan Non Pemerintahan yang terjalin	%	0	0	150	394	-	-							100	394
Program Peningkatan Kerjasama Pemerintahan	Persentase Kerjasama Pemerintahan yang terjalin	%	0	0			100	172							100	172
Program Peningkatan Kerjasama Non Pemerintahan	Persentase Kerjasama Non Pemerintahan yang terjalin	%	0	0			100	160							100	160
Program Pengendalian Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang terevaluasi	%	0	0			100	387							100	387
<b>Dewan Perwakilan rakyat Daerah</b>						<b>73.354</b>		<b>70.043</b>								<b>143.397</b>

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
<b>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>						<b>73.354</b>		<b>70.043</b>								<b>143.397</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%			100	7.151	100	8.037							100	15.188
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur	%			100	5.022	100	3.805							100	8.828
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	%			100	315	100	87							100	402
Program Peningkatan Disiplin Aparatur					-			-								-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD	%			100	298	100	268							100	566
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah	%			100	29	100	26							100	54
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Cakupan Perda yang diinisiasi DPRD	%			21,43	60.538	41,18	57.821							41,09	118.359
	Cakupan Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif yang ditindaklanjuti	%			0,00		90	-							88	-
<b>Badan Penghubung Daerah</b>						<b>6.521</b>		<b>5.100</b>								<b>11.620</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%			97,32	3.583	100	3.162							100	6.744
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur	%			97,08	2.220	100	1.208							100	3.428

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendaanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendaanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	%			100,00	9	100	9							100	18
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD	%			95,62	128	100	119							100	247
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah	%			99,62	21	100	22							100	43
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Keala Daerah					92,92	103		39								142
Program Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan pada Anjungan Daerah NTB di Jakarta	Orang			67.488	458	37.000	540							193.000	998
<b>PENGAWASAN</b>						<b>13.792</b>		<b>14.882</b>								<b>28.675</b>
<b>Inspektorat</b>						<b>13.792</b>		<b>14.882</b>								<b>28.675</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan	%	0	53	59,5	2.397	65	2.003							80	4.399
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan	%	0	53	59	1.213	65	1.396							80	2.609
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan	%	0	53	59,5	2.657	65	3.623							80	6.280
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan	%	0	53	60	220	65	253							80	473

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendaanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendaanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan	%	0	53	90	38	65	43							80	81
Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	- Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	%	67	80	33,94	3.674	84	3.377							90	7.051
	- Persentase Penurunan Angka Kerugian Negara/Daerah (-)		29	39,17	2,17		25,17	-							4,17	-
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP PD Predikat BB-AA	%	4,44	11,11	93,48	566	40	795							100	1.360
Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Provinsi NTB	Persentase Peningkatan Level Maturitas OPD terdefinisi-terkelola dan terukur	%	22,22	22,22	60,87	2.557	53,33	188							100	2.745
Program Peningkatan Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	Integrate d (Level III)	Integrate d (Level III)	82,49	95	Integrate d (Level III)	321							Managed (Level IV)	416
	Persentase Auditor dan P2UPD bersertifikasi	%	54	52	55		57	-							63	-
Program Pencegahan Korupsi	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu	%	93,61	82,75	70,96	376	94	2.884							97	3.260
	Persentase PD Zona Integritas berpredikat WBK		4,44	0	0		13,33	-							26,66	-
	Persentase PD Zona Integritas berpredikat WBBM		0	0			8,88	-							22,22	-
<b>PERENCANAAN</b>						<b>23.902</b>		<b>18.516</b>								<b>42.418</b>

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendaanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendaanaannya		
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)	
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
<b>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>						<b>23.902</b>		<b>18.516</b>								<b>42.418</b>	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100,00	6.606	100	6.973								0,10	13.579
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor	%	100	100	100,00	1.595	100	378								0,10	1.973
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang meningkat kapasitasnya	%	60	60	99,82	20	70	97								0,07	117
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyelesaian Dokumen Program/Pelaporan	%	100	100	99,74	78	100	352								0,10	430
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Aset/Barang Milik Daerah	%	100	100	100,32	99	100	64								0,10	163
Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan data/informasi pembangunan tersedia	%	90	100	100,21	572	100	1.062								0,10	1.634
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan Program pada RPJMD dengan RKPDP	%	100	100	95,09	5.131	100	1.481								0,10	6.611
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase keselarasan Program pada RKPDP dengan Renja OPD bidang ekonomi	%	100	100	97,26	1.474	100	1.464								0,10	2.938



Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja OPD bidang sosial budaya	%	100	100	96,05	1.854	100	1.279							0,10	3.133
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase keselarasan Program pada RKPD dengan Renja OPD bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	%	100	100	92,00	5.933	100	4.906							0,10	10.839
Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Wilayah dan Pembangunan	%	-	50	99,87	541	0	-							0,06	541
Program Perencanaan Wilayah	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Wilayah dan Pembangunan	%	-	-	0,00		60	461							0,08	461
<b>KEUANGAN</b>						<b>89.804</b>		<b>77.616</b>								<b>167.420</b>
<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku SKPD</b>						<b>41.412</b>		<b>36.721</b>								<b>78.133</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	%	95	100	100	4.621,76	100	4.857							100	9.479
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelancaran tugas aparatur	%	95	100	100	2.533,61	100	1.152							100	3.686
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kompetensi aparatur	%	95	95	100	126,06	95	55							100	181
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rencana program	Dok	6	5	6	777,55	5	929							6	1.706

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendaanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendaanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen	2	2	1	97	1	69							1	166
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penetapan APBD Prov. NTB	Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	30.171,35	Tepat waktu	23.946							Tepat waktu	54.117
	Opini laporan keuangan Prov. NTB	Jenis	WTP	WTP	WTP		WTP	-							WTP	-
Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD Kab./Kota	Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	1.297	Tepat waktu	1.017							Tepat waktu	2.314
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Kontribusi retribusi aset terhadap PAD	%	-	-	0		PAD Meningkat	4.697							PAD Meningkat	4.697
<b>Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>						<b>48.391</b>		<b>40.895</b>								<b>89.286</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	95	95	15,52	13.712	100	15.237							100	28.949
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	%	95	95	14,82	10.802	100	5.787							100	16.588
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	%	85	85	20,92	515	100	414							100	929
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD	Dokumen	5	5	84,34	864	5	708							5	1.572
Program Peningkatan Kapasitas	Persentase BMD yang Tertib Administrasi	%	-	-	13,09	675	85	318							85	993

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Pengelolaan Keuangan Daerah																
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Diluar DAK)	%	45,54	45,42	49,88	21.824	49,33	18.432							56,52	40.256
<b>KEPEGAWAIAN</b>						<b>9.573</b>		<b>6.313</b>								<b>15.886</b>
<b>Badan Kepegawaian Daerah</b>						<b>9.573</b>		<b>6.313</b>								<b>15.886</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	2.134	100	1.745							100	3.879
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	3.191	100	561							100	3.751
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	6	100	7							100	13
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKJIP OPD		CC	B	100	197	BB	224							A	422
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	Dokumen	12	12	100	23	12	41							12	64
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Indeks Dimensi Kualifikasi Pendidikan ASN	Nilai Indeks	242%	2,43	100	3.810	2,45	3.528							2,50	7.338
	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	%	0,53	0,01			0,0053	-							0,005	-
	Kriteria Penilaian Kinerja ASN	Kriteria	BAIK	BAIK			BAIK	-							BAIK	-

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaannya	
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Program Peningkatan Transparansi Penyelenggara Negara	Persentase ASN yang Patuh LHKPN	%		97,00	100	213	100	207							100	420
<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>Indeks Pelayanan Publik</b>					<b>18.206</b>		<b>6.448</b>								<b>24.654</b>
<b>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah</b>						<b>18.206</b>		<b>6.448</b>								<b>24.654</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	3.276	100	2.991							100	6.267
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100	100	1.810	100	409							100	2.219
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	9	100	13							100	22
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Pegawai Yang Disiplin	%	100	100	-		100	-							100	-
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD	%	100	100	100	321	100	506							100	827
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Pejabat Pengelola asset daerah dan PPK	%	100	100	100	65	100	89							100	155
Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN	%	32,55	34,76	11,85	12.725	11,35	2.440							56,25	15.165
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>						<b>1.807</b>		<b>858</b>								<b>2.666</b>

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Kondisi eksisting 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendaannya								Target Kinerja dan Kerangka Pendaannya		
			2017	2018	Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)	
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
<b>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>						1.807		858								2.666	
Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	12	15	21	1.807	21	858								30	2.666



## 7.2. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Kerangka Pendanaan Pembangunan daerah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, selanjutnya diimplementasikan melalui Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, disusun untuk pelaksanaan tiga tahun (2021-2023) dari lima tahun tahapan rencana Pembangunan (2019-2023), seperti disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 7-3 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2023 Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019**

Kode	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi		
			2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>4,90</b>	<b>5.528.931.855.427,00</b>	<b>5.806.562.592.202,38</b>	<b>6.083.974.442.021,11</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>2,94</b>	<b>4.048.470.998.641,00</b>	<b>4.237.254.457.827,18</b>	<b>4.288.681.888.845,12</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	4,49	1.522.993.945.344,00	1.595.120.166.191,16	1.662.679.672.556,20
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	26,66	1.118.701.905.618,00	1.752.076.352.805,66	1.694.332.499.985,75
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Subsidi	41,92	1.631.860.720,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
5.1.5	Belanja Hibah	-16,52	1.396.221.410.359,00	867.984.388.830,36	909.596.166.303,17
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	56,89	8.921.876.600,00	19.073.550.000,00	19.073.550.000,00
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>10,27</b>	<b>774.061.414.582,00</b>	<b>770.889.865.488,14</b>	<b>932.332.884.607,71</b>
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>25,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>15.000.000.000,00</b>	<b>15.000.000.000,00</b>
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	25,00	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>10,37</b>	<b>696.399.442.204,00</b>	<b>783.418.268.887,06</b>	<b>847.959.668.568,29</b>
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	9,40	696.041.354.704,00	754.418.268.887,06	832.959.668.568,29
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	3.975,15	358.087.500,00	29.000.000.000,00	15.000.000.000,00
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>-40,91</b>	<b>-55.000.000.000,00</b>	<b>-10.000.000.000,00</b>	<b>-10.000.000.000,00</b>

**Tabel 7-4 Indikasi Rencana Kebutuhan Pendanaan Program Menurut Urusan Pemerintahan Provinsi NTB Tahun 2021-2023  
Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019**

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya	
			Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
<b>URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR</b>				1.502.143		1.476.886		3.511.941		3.663.842		3.691.139		10.861.147
<b>PENDIDIKAN</b>				428.267		483.242		1.967.462		2.064.832		2.144.628		6.176.922
<b>Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan</b>				428.267		483.242		1.967.462		2.064.832		2.144.628		6.176.922
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai					BB	1.426.269	BB	1.497.666	A	1.555.544	A	4.479.479
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN (Termasuk : Generasi Emas NTB, Re-Engineering SMK, PAUD HI, Ayo Bercita-Cita, 1000 Cendikia/Beasiswa, STIPark)	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%					99,15	473.403	99,95	496.806	100	516.005	100	1.486.214
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%					93,40		94,38		95,28		95,28	
	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	%					96,68		97,57		98,02		98,02	
	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%					69,4		70		70,6		70,6	
	Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%					1,01		1		1		1	
	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	%					1:18		1:18		18		18	
	Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB,	%					1:14		1:12		1:10		1:10	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM (Termasuk : Sekolah Aman Bencana)	Persentase Pengembangan Kurikulum	%					100	568	100	696	100	723	100	1.987
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SMA/SMALB yang	%					100	66.961	100	69.288	100	71.966	100	208.215

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya									
			Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
	memenuhi Kualifikasi S1/DIV													
	Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%					99,55		99,58		100		100	
	Persentase Kepala Sekolah bersertifikat	%					70,00		100		100		100	
	Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat	%					50,00		60,00		70,00		100	
	Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)						5,50		6,00		6,50		80,00	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	%					100	61	100	66	100	68	6,50	195
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA (Termasuk : Rumah Bahasa)	Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan	%					35	200	35	310	30	322	100	832
<b>KESEHATAN</b>				<b>525.598</b>			<b>515.489</b>		<b>646.399</b>		<b>712.650</b>		<b>768.650</b>	<b>2.127.698</b>
<b>Dinas Kesehatan</b>				<b>48.517</b>			<b>162.237</b>		<b>211.585</b>		<b>231.585</b>		<b>249.585</b>	<b>692.755</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah (Persen)	%					100	59.134	100	64.724	100	69.754	100	193.612
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Termasuk : Generasi Emas NTB, Jamban Keluarga/Stop BABS, Air Bersih/Air Minum Untuk Semua, SPAM Regional, Wisata Halal&Sehat, Desa Bersinar)	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%					85,00	150.430	85,00	163.526	85,00	176.236	85,00	490.193
	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%					97,00		97,00		97,00		97,00	
	Persentase RS yang memenuhi sarana	%					65,00		75,00		80,00		80,00	

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya	
			Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
	prasarana dan alat kesehatan yzng sesuai standar													
	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	%					100,00		100,00		100		100	
	Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80%	%					80,00		90,00		100		100	-
	Persentase Kualitas Lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%					94,00		97,00		100		100	-
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	%					100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase balita Wasting	%	14,41 (2018)				12,41		11,41		10,41		10,41	
	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi								1500		1500		1500	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (Termasuk: NTB Berolahraga)	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%					2,00	761	2,50	1.391	3,00	1.499	3,00	3.651
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat (Persen)	%					30,00	32	90,00	100	95,00	108	95,00	240
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (Termasuk : Revitalisasi Posyandu)	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (Persen)	%					50,00	1.228	70,00	1.844	100,00	1.987	80,00	5.060

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya	
			Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
<b>Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi</b>				<b>337.999</b>		<b>241.248</b>		<b>319.100</b>		<b>331.638</b>		<b>341.638</b>		<b>992.375</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai					B	266.642	A	277.119	A	285.475	A	829.235
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%					83,00	52.458	85,00	54.519	90,00	56.163	90,00	163.140
<b>Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi</b>				<b>30.678</b>		<b>32.023</b>		<b>55.118</b>		<b>68.832</b>		<b>79.832</b>		<b>203.781</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai					BB	42.179	BB	50.674	A	58.772	A	151.625
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%					73,81	7.479	75,00	10.339	76,19	11.992	76,19	29.810
	Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar	%					80,00		80,00		80,00		80,00	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								5.460		7.818		9.068		22.346
<b>Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir</b>				<b>108.403</b>		<b>79.981</b>		<b>60.596</b>		<b>80.596</b>		<b>97.596</b>		<b>238.787</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai					B	11.182	B	14.873	B	18.010	BB	44.064
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	70,00		72		75,00	36.664	78,00	48.765	80,00	59.051	80,00	144.479
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								12.750		16.958		20.535		50.243
<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				<b>282.136</b>		<b>279.577</b>		<b>516.564</b>		<b>587.201</b>		<b>466.201</b>		<b>1.564.189</b>
<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				<b>282.136</b>		<b>279.577</b>		<b>516.564</b>		<b>587.201</b>		<b>466.201</b>		<b>1.564.189</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100				100	47.330	100	51.342	100	56.022	100,00	154.694



Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya					
			Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)				
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)						
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kenaikan Areal Layanan Irigasi	%	74,15				74,55	172.161	75,37	78.749	76,28	91.491	76,28	342.401				
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan air minum	%	74,69		75		76,48	2.936	78,45	3.338	80,59	3.950	80,59	10.224				
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%	83,95				83,95	255.582	85,36	424.969	86,60	251.253	86,60	931.804				
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Prosentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	78,8				80,01	100	80,90	100	82,96	100	82,96	300				
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Luas Layanan Drainase	Km2	532,14				558,16	15.181	576,59	8.471	594,93	14.098	594,93	37.750				
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Terpadunya Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Kawasan	-				2,00	300	2,00	1.400	2,00	2.013	6,00	3.713				
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Daya Serap Jasa Konstruksi bersertifikat	%	-				9,00	543	7,00	617	7,00	1.290	7,00	2.449				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	88				89,07	681	89,69	892	90,31	1.444	90,31	3.018				
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengelolaan sampah	%	34,14				50,00	0	60,00	100	70,00	100	70,00	200				
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Daya tumbuh wilayah strategis	%	21,85				26,43	21.099	29,08	13.985	31,98	42.553	31,98	77.637				
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Daya tumbuh wilayah strategis	%	21,85				26,43	650	29,08	3.239	31,98	1.887	31,98	5.776				
<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>								<b>198.366</b>		<b>147.951</b>		<b>274.742</b>		<b>184.742</b>		<b>189.742</b>		<b>649.227</b>
<b>Dinas Perumahan dan Permukiman</b>								<b>198.366</b>		<b>147.951</b>		<b>274.742</b>		<b>184.742</b>		<b>189.742</b>		<b>649.227</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%					100	8.370	100	10.043	100	10.315	100	28.728				
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN (Termasuk : Rumah Layak Huni)	Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah	%					100	1.943	100	2.526	100	2.595	100	7.064				

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya	
			Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
	direhabilitasi dan direkonstruksi													
	Rumah tangga menempati hunian layak	%					98,81		98,86		98,91		98,91	-
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tangga dengan hunian layak pada kawasan permukiman	%					62,65	7.617	65,80	9.140	68,95	9.387	68,95	26.144
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Luas kawasan permukiman yang berkualitas	Ha					84.393	256.813	84.488	163.033	84.511	167.445	253.391	587.291
<b>KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				<b>31.797</b>		<b>16.963</b>		<b>28.919</b>		<b>34.063</b>		<b>40.063</b>		<b>103.046</b>
<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>				<b>3.733</b>		<b>2.997</b>		<b>18.350</b>		<b>21.994</b>		<b>25.994</b>		<b>66.337</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP PD	Nilai					BB	15.486	BB	18.061	BB	21.345	BB	54.892
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Termasuk: Bale Mediasi, Desa Bersinar)	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%	100,00		100,00		100,00	2.864	100,00	3.933	100,00	4.648	100,00	11.445
	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
<b>Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB</b>				<b>28.064</b>		<b>13.967</b>		<b>10.569</b>		<b>12.069</b>		<b>14.069</b>		<b>36.708</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai					BB	6.410	BB	7.320	A	8.533	A	22.263
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase terbentuknya DESTANA dan SMAB	%					25,48	4.159	32,78	4.750	40,09	5.537	40,09	14.445
	Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna	%					44,69		67,34		92,50		92,50	

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya	
			Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
<b>SOSIAL</b>				<b>35.978</b>		<b>33.665</b>		<b>77.855</b>		<b>80.355</b>		<b>81.855</b>		<b>240.065</b>
<b>Dinas Sosial</b>				<b>35.978</b>		<b>33.665</b>		<b>77.855</b>		<b>80.355</b>		<b>81.855</b>		<b>240.065</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai					BB	32.378	BB	33.417	A	34.041	A	99.837
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL (Termasuk : Melawan Kemiskinan dari Desa/Penanggulangan Kemiskinan)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial	%					100	12.504	100	12.906	100	13.147	100	38.557
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan Korban Tindak Kekerasan tertangani	%					100	764	100	789	100	803	100	2.356
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%					2,50	17.317	3,50	17.873	4,50	18.207	4,50	53.398
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL (Termasuk: Ramah Difabel)	Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%					100	12.091	100	12.480	100	12.713	100	37.284
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	%					100	2.446	100	2.525	100	2.572	100	7.543
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN)/Makam Pahlawan Nasional (MPN)	%					100	354	100	365	100	372	100	1.090
<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>				<b>109.070</b>		<b>79.274</b>		<b>250.478</b>		<b>282.123</b>		<b>322.088</b>		<b>854.562</b>
<b>TENAGA KERJA</b>				<b>7.446</b>		<b>5.216</b>		<b>23.235</b>		<b>26.118</b>		<b>30.084</b>		<b>79.438</b>
<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>				<b>7.446</b>		<b>5.216</b>		<b>23.235</b>		<b>26.118</b>		<b>30.084</b>		<b>79.438</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP OPD	Indeks					85	20.015	87	22.193	90	25.563	90	67.772

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya	
			Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%					75	85	85	100	90	115	90	300
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (Termasuk : Revitalisasi BLK)	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%					16,00	830	17,00	1.233	18,00	1.420	18,00	3.482
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%					44,71	992	51,09	1.115	57,48	1.284	57,48	3.391
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial	%					21,00	300	22,00	337	23,00	388	23,00	1.026
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%					21	1.014	22	1.140	23	1.313	23	3.466
<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				<b>3.786</b>		<b>3.277</b>		<b>11.790</b>		<b>13.413</b>		<b>16.265</b>		<b>41.468</b>
<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>				<b>3.786</b>		<b>3.277</b>		<b>11.790</b>		<b>13.413</b>		<b>16.265</b>		<b>41.468</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP/LKJIP	Nilai					BB	7.921	BB	8.722	BB	10.601	BB	27.244
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase PD yang menerapkan PPRG	%	13,04		26		52,17	1.769	52,17	2.022	65,28	2.440	65,28	6.231
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif	%			2		75,52	806	75,52	921	83,07	1.111	83,07	2.837
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Ketahanan Keluarga	%	4		4		5,00	381	5	435	5,50	525	15	1.341
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen Gender						1	35	1	75	1	91	1	201
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) (Termasuk: Kota Layak Anak)	Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	%	15,00		20		80,00	361	80,00	512	100,00	618	42,00	1.491

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya	
			Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA													
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%	1,00		1		518		728		878		2.124	
	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif													
<b>PANGAN</b>				<b>6.926</b>		<b>8.709</b>		<b>13.468</b>		<b>14.468</b>		<b>15.968</b>	<b>43.778</b>	
<b>Dinas Ketahanan Pangan</b>				<b>6.926</b>		<b>8.709</b>		<b>13.468</b>		<b>14.468</b>		<b>15.968</b>	<b>43.778</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP DKP NTB	Point					>70-80 (BB)	8.839	>70-80 (BB)	9.225	>70-80 (BB)	10.479	>70-80 (BB)	28.542
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN (Termasuk: Pertanian Lestari/Modern)	Persentase Lumbung Pangan yang termanfaatkan	%			9		71,97	215	79,62	301	86,62	255	86,62	771
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT (Termasuk : KRPL/P2L)	Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis	%	2331,40		2.409		100	3.517	100	3.779	100	4.170	100	11.466
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	%					5,77	358	5,77	358	4,77	425	3,77	1.142
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	%					80,00	539	85,00	679	90,00	639	90,00	1.857
<b>PERTANAHAN</b>				<b>209</b>		<b>75</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Sekretariat Daerah</b>				<b>209</b>		<b>75</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Biro Pemerintahan</b>				<b>209</b>		<b>75</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Cakupan fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	%												



Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya									
			Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Cakupan konflik pertanahan yang terselesaikan	%												
<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>26.839</b>		<b>23.581</b>		<b>86.166</b>		<b>91.092</b>		<b>99.603</b>		<b>276.861</b>
<b>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>				<b>26.839</b>		<b>23.581</b>		<b>86.166</b>		<b>91.092</b>		<b>99.603</b>		<b>276.861</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai					BB	79.510	BB	83.705	BB	91.525	A	254.740
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%					51,52	319	24,24	337	24,24	369	24,24	1.025
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi					10	882	10	933	10	1.020	30	2.835
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan taman kehati Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	lokasi					1	24	1	100	1	109	3	233
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	unit					210	23	210	100	210	109	210	232
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	usaha/ kegiatan					20	188	25	199	30	218	30	605
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas sekolah peduli lingkungan	%					10,00	197	10,00	208	10,00	228	10,00	632
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat	kelompok					-	-	-	-	-	-	-	-

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya	
			Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan					20	200	20	211	20	231	60	641
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (Termasuk : NTB Zero Waste/Pengolahan Sampah/Bank Sampah)	Persentase pengelolaan sampah	%					70	4.823	85	5.299	100	5.794	100	15.916
<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				<b>1.795</b>		<b>543</b>		<b>1.295</b>		<b>1.549</b>		<b>1.845</b>		<b>4.689</b>
<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil</b>				<b>1.795</b>		<b>543</b>		<b>1.295</b>		<b>1.549</b>		<b>1.845</b>		<b>4.689</b>
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per-satuan penduduk	%					98,70	243	98,80	291	98,90	346	98,90	880
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	%					100	181	100	216	100	257	100	654
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	%					100	871	100	997	100	1.182	100	3.050
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan profil kependudukan tingkat kab/kota	%							100	45	100	60	100	105
<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>				<b>7.147</b>		<b>4.188</b>		<b>16.177</b>		<b>19.346</b>		<b>23.050</b>		<b>58.573</b>
<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil</b>				<b>7.147</b>		<b>4.188</b>		<b>16.177</b>		<b>19.346</b>		<b>23.050</b>		<b>58.573</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP	Nilai					A	9.097	A	10.879	A	12.961	A	32.937
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada	%					15,00	48	20,00	100	25,00	119	25,00	267

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya	
			Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
	kawasan kawasan lingkaran hutan dan pesisir													
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Desa yang mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik	%	36				72,00	235	82,00	281	92,00	335	92,00	851
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Adat Aktif	%			55,00		60,00	6.798	80,00	8.086	100,00	9.635	100,00	24.519
	Persentase Bumdes Berprestasi	%			88,00		14,43		27,00		37,00		37,00	
	Persentase Pokja Posyandu aktif	%			14,00		60,00		80,00		100,00		100,00	
	Persentase Posyantek yang aktif	%			55,00		47,86		56,41		64,96		64,96	
<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>					<b>876</b>		<b>303</b>		<b>880</b>		<b>1.065</b>		<b>1.213</b>	<b>3.158</b>
<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>					<b>876</b>		<b>303</b>		<b>880</b>		<b>1.065</b>		<b>1.213</b>	<b>3.158</b>
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pendewasaan Usia Perkawinan	Tahun	20,23 (2018)					319		364		439		1.122
	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Poin	2,84		2,74		2,64		2,54		2,44		2,44	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need )	%	44 (2018)					276		375		381		1.032
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	12,88		12,58									
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		%	100,00					285		326		393		1.004

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya		
			Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
<b>PERHUBUNGAN</b>				<b>8.931</b>			<b>4.176</b>		<b>13.493</b>		<b>14.701</b>		<b>16.701</b>		<b>44.894</b>
<b>Dinas Perhubungan</b>				<b>8.931</b>			<b>4.176</b>		<b>13.493</b>		<b>14.701</b>		<b>16.701</b>		<b>44.894</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai						BB	8.493	BB	9.242	A	10.234	A	27.969
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	70,24		50,83		50,83	4.436	80,40	4.695	81,63	5.535	81,63	14.665	
	Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	92,31		91,67		94,37		98,59		100,00		100,00		
	Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik	%	0,00		55,00		30,00		35,00		40,00		40,00		
	Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	%	0,00		42,99		46,20		49,39		52,58		52,58		
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Penilaian Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik	%	0,00		59,39		59,39	564	61,61	764	66,06	932	66,06	2.261	
<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				<b>9.517</b>			<b>6.210</b>		<b>16.011</b>		<b>19.305</b>		<b>23.108</b>		<b>58.423</b>
<b>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</b>				<b>9.517</b>			<b>6.210</b>		<b>16.011</b>		<b>19.305</b>		<b>23.108</b>		<b>58.423</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LKJIP (SAKIP) OPD	Nilai						BB	9.659	BB	11.646	A	13.941	A	35.247
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (Termasuk: NTB Care, Sistem Informasi Aman Gangguan Bencana/SI-AGA, NTB Terkoneksi)	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	%			50		60,00	4.644	70,00	5.600	80,00	6.703	80,00	16.947	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA (Termasuk: SPBE, Kampung Digital, eNTeBe Plan/SIPD)	Persentase Layanan Berbasis TIK (%)	%			35		45,00	1.707	55,00	2.058	65,00	2.464	65,00	6.229	
<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>				<b>3.923</b>			<b>6.066</b>		<b>17.345</b>		<b>21.636</b>		<b>26.136</b>		<b>65.117</b>

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya	
			Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
<b>Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>				<b>3.923</b>		<b>6.066</b>		<b>17.345</b>		<b>21.636</b>		<b>26.136</b>		<b>65.117</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai					BB	11.295	BB	13.989	A	16.898	A	42.182
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi sehat	%					30,00	175	35,00	318	40,00	384	40,00	878
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Koperasi Yang Menerapkan Pola Syariah	Persentase Kesehatan Koperasi /Koperasi Syariah yang Berkualitas					30,00	1.050	35,00	1.310	35,00	1.582	35,00	3.942
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Kapasitas SDM Koperasi Yang Ditingkatkan	%					300	923	400	1.151	500	1.391	1200	3.465
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif dan Akuntabel	%					22,42	500	22,42	624	22,42	753	67,26	1.877
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) (Termasuk : UMKM Bersaing, Rumah Kemas)	Proporsi usaha kecil yang diperkuat menjadi wirausaha	%			5,63		5,99	1.280	6,35	1.597	6,71	1.929	6,71	4.807
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM (Termasuk : Bela Beli Produk Lokal/NTB Mall)	Proporsi usaha kecil yang Ditingkatkan manajemen dan kapasitas usahanya	%			47,11		50,32	2.122	53,53	2.647	56,75	3.198	56,75	7.967
<b>PENANAMAN MODAL</b>				<b>2.558</b>		<b>2.741</b>		<b>9.602</b>		<b>11.602</b>		<b>13.387</b>		<b>34.590</b>
<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>				<b>2.558</b>		<b>2.741</b>		<b>9.602</b>		<b>11.602</b>		<b>13.387</b>		<b>34.590</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NILAI LAKIP PERANGKAT DAERAH	Nilai					BB (72-79)	7.010	A (80-82)	8.471	A (83-85)	10.296	A (83-85)	25.777



Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya	
			Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL (Termasuk : Ramah Investasi/Online Service)	Perentase Peningkatan Minat Investasi	%					3,00	493	5,00	596	60,00	10	60,00	1.099
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL (Termasuk : Kawasan Samota)	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	%					100,00	715	100,00	864	100,00	1.050	100,00	2.629
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL (Termasuk : Mall Investasi & Pelayanan Publik)	Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan	%					87,00	531	90,00	642	93,00	780	93,00	1.954
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL (Termasuk: KEK Mandalika)	Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah	%					50,00	735	55,00	888	60,00	1.080	60,00	2.703
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	%					100,00	116	100,00	141	100,00	171	100,00	428
<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>				<b>12.993</b>		<b>5.534</b>		<b>20.151</b>		<b>23.662</b>		<b>27.662</b>		<b>71.474</b>
<b>Dinas Pemuda dan Olahraga</b>				<b>12.993</b>		<b>5.534</b>		<b>20.151</b>		<b>23.662</b>		<b>27.662</b>		<b>71.474</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip DISPORA	Nilai					BB (>70-80)	8.059	BB (>70-80)	9.511	A (>80-90)	11.119	A (>80-90)	28.689
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%					100	3.245	100	3.712	100	4.339	100	11.297
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%					100		100		100		100	
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Pembinaan Altlet Berprestasi	%					100	8.846	100	10.439	100	12.204	100	31.488
<b>STATISTIK</b>				<b>1.349</b>		<b>470</b>		<b>420</b>		<b>506</b>		<b>605</b>		<b>1.531</b>
<b>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</b>				<b>1.349</b>		<b>470</b>		<b>420</b>		<b>506</b>		<b>605</b>		<b>1.531</b>

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya	
			Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL (Termasuk: NTB Satu Data)	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (%)	%			15		20,00	420	25,00	506	30,00	605	30,00	1.531
<b>PERSANDIAN</b>				<b>272</b>		<b>344</b>		<b>409</b>		<b>493</b>		<b>590</b>		<b>1.492</b>
<b>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</b>				<b>272</b>		<b>344</b>		<b>409</b>		<b>493</b>		<b>590</b>		<b>1.492</b>
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah (%)	%			20		30,00	409	40,00	493	50,00	590	50,00	1.492
<b>KEBUDAYAAN</b>				<b>7.718</b>		<b>4.725</b>		<b>4.628</b>		<b>5.258</b>		<b>5.461</b>		<b>15.346</b>
<b>Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan</b>				<b>7.718</b>		<b>4.725</b>		<b>4.628</b>		<b>5.258</b>		<b>5.461</b>		<b>15.346</b>
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN (Termasuk : NTB Juara)	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	%					63,64	1.975	72,73	2.173	81,82	2.257	81,82	6.405
PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	%					100	390	100	509	100	529	100	1.427
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah	%					100	164	100	272	100	283	100	720
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								600		730		758		2.088
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman Provinsi	%					28,57	1.499	42,86	1.573	28,57	1.634	28,57	4.706
<b>PERPUSTAKAAN</b>				<b>6.192</b>		<b>2.708</b>		<b>15.104</b>		<b>17.504</b>		<b>19.948</b>		<b>52.556</b>
<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>				<b>6.192</b>		<b>2.708</b>		<b>15.104</b>		<b>17.504</b>		<b>19.948</b>		<b>52.556</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%					100	13.948	100	16.161	100	18.417	100	48.526
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN (Termasuk : Literasi Digital, Ayo Bercita - Cita)	Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%					100	977	100	1.135	100	1.294	100	3.406

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya	
			Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian Kckr Dan Naskah Kuno Milik Daerah	%					100	179	100	208	100	237	100	624
<b>KEARSIPAN</b>				<b>593</b>		<b>407</b>		<b>306</b>		<b>405</b>		<b>462</b>		<b>1.172</b>
<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>				<b>593</b>		<b>407</b>		<b>306</b>		<b>405</b>		<b>462</b>		<b>1.172</b>
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase peningkatan jumlah pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis	%					100	281	100	327	100	373	100	981
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase peningkatan jumlah arsip yang terselamatkan	%					100	24	100	78	100	89	100	191
<b>URUSAN PILIHAN</b>				<b>220.708</b>		<b>243.741</b>		<b>418.141</b>		<b>427.238</b>		<b>455.307</b>		<b>1.300.686</b>
<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				<b>20.565</b>		<b>19.386</b>		<b>44.304</b>		<b>48.301</b>		<b>54.798</b>		<b>147.404</b>
<b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b>				<b>20.565</b>		<b>19.386</b>		<b>44.304</b>		<b>48.301</b>		<b>54.798</b>		<b>147.404</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	Nilai					A	24.610	A	27.573	A	30.272	A	82.455
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (Termasuk : Industri Perikanan : Garam, Tepung Ikan, Penataan 3 Gili KLU dan Pulau-pulau Kecil)	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%	2,06		5		8,53	4.868	8,74	4.910	9,5	5.553	9,5	15.330
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	229.794		234.799		241.843	6.336	249.099	8.708	256.572	9.895	256.572	24.939
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (Termasuk : Budidaya Lobster, KRPL/P2L)	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.140.552		1.170.670		1.195.104	3.023	1.219.005	3.796	1.243.385	6.021	1.243.385	12.839
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%	70,00		70		99,91	4.852	99,92	1.963	99,93	2.129	99,93	8.943
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	0,55		1		213.130	616	214.373	1.353	215.700	929	215.700	2.897

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya	
			Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
<b>PARIWISATA</b>				<b>23.158</b>		<b>14.939</b>		<b>21.686</b>		<b>23.686</b>		<b>26.186</b>		<b>71.557</b>
<b>Dinas Pariwisata</b>				<b>23.158</b>		<b>14.939</b>		<b>21.686</b>		<b>23.686</b>		<b>26.186</b>		<b>71.557</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai					BB	13.226	BB	14.365	BB	15.881	BB	43.472
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA (Termasuk : Penataan 3 Gili KLU&Pulau-pulau Kecil, Penataan 99 Desa Wisata, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani&Tambora, Revitalisasi Islamic Centre)	Persentase desa wisata yang dikembangkan	%					65,66	4.993	85,85	5.503	100	6.084	100	16.580
	Persentase Geosite yang tertata	%					37,50		50,00		50,00		50,00	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA (Termasuk: Wisata Halal&Sehat)	Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	orang					4.650.000	2.240		2.447		2.705		7.392
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	%					30,21	165		210		232		607
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Termasuk : KEK Mandalika, Kawasan Samota)	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	%					60,00	1.063		1.161		1.283		3.506
<b>PERTANIAN</b>				<b>116.209</b>		<b>131.974</b>		<b>238.907</b>		<b>226.861</b>		<b>230.455</b>		<b>696.224</b>
<b>Dinas Pertanian dan Perkebunan</b>				<b>99.763</b>		<b>105.988</b>		<b>172.374</b>		<b>159.868</b>		<b>161.424</b>		<b>493.666</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Lakip OPD	Nilai					76	41.994	78	52.771	80,18	47.212	80,18	141.977
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (Termasuk: Pertanian Lestari/Modern, Industri Peternakan/Pakan Ternak)	Persentase Fasilitas Sarana Pertanian	%					1,93	20.209	1,99	19.956	2,05	24.040	2,05	64.205
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	Persentase Fasilitas Prasarana Pertanian	%	100		100		35,41	104.379	65,56	79.975	96,79	83.007	96,79	267.361

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya	
			Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
PERTANIAN (Termasuk: Industri Pangan dan Holtikultura, Industri Perkebunan, Irigasi Cukup)														
	Pengembangan industrialisasi pertanian	Unit/paket	1		3		2		2		2		10	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI	%	95,00		96		95,50	361	96,00	434	96,50	434	96,50	1.229
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN (Termasuk: KRPL/P2L, NTB Hijau)	Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok	%					50,00	5.432	70,00	6.731	100,00	6.731	100,00	18.895
<b>Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</b>				<b>16.447</b>			<b>25.986</b>	<b>66.533</b>		<b>66.993</b>		<b>69.031</b>		<b>202.558</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP OPD	NILAI					BB+	18.317	BB+	18.407	A	18.967	A	55.690
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (Termasuk : Industri Peternakan/Pakan Ternak, Pertanian Lestari/Modern, KRPL/P2L)	Pertumbuhan Populasi Ternak (Persen)	%					9	44.458	9,5	44.798	10	46.161	10	135.417
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (Termasuk : Kampung Unggas)	Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan (Persen)	%					100	561	100	565	100	582	100	1.708
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN TERNAK YANG TERINFEKSI PHMS (Persen)	%					< 1	2.779	< 1	2.800	< 1	2.885	< 1	8.464
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi (%)	%					100	420	100	423	100	436	100	1.279
<b>KEHUTANAN</b>				<b>30.009</b>			<b>31.977</b>	<b>25.202</b>		<b>26.642</b>		<b>29.132</b>		<b>80.976</b>
<b>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>				<b>30.009</b>			<b>31.977</b>	<b>25.202</b>		<b>26.642</b>		<b>29.132</b>		<b>80.976</b>



Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya	
			Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%					66,74	19.206	83,38	20.304	100	22.201	100	61.711
	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%					10		10		10		30	
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha					30.503	885	30.503	935	30.503	1.023	30.503	2.843
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%					13,27	661	17,70	699	17,70	765	48,67	2.125
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS					4	4.449	4	4.704	4	5.143	4	14.296
<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>				<b>10.214</b>		<b>6.226</b>	<b>13.189</b>	<b>15.226</b>	<b>18.726</b>	<b>47.140</b>				
<b>Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral</b>				<b>10.214</b>		<b>6.226</b>	<b>13.189</b>	<b>15.226</b>	<b>18.726</b>	<b>47.140</b>				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai					BB	10.184	BB	11.708	BB	14.399	BB	36.291
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN (Termasuk : Geopark - Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	Jumlah zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan	Zona					1	599	2	711	2	874	5	2.184
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA (Termasuk: Industri Pertambangan/Smelter&Industri Turunannya)	Persentase IUP yang melaksanakan kaidah usaha pertambangan yang baik dan benar	%					6,52	297	8,70	373	10,87	458	10,87	1.128
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	%					5,96	557	5,64	643	5,57	791	5,57	1.992

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya	
			Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN (Termasuk: Nusa Terang Banderang)	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	99,55		99,66		99,77	1.552	99,88	1.791	99,99	2.203	99,99	5.546
<b>PERDAGANGAN</b>				<b>10.839</b>		<b>20.026</b>		<b>28.493</b>		<b>26.136</b>		<b>27.591</b>		<b>82.221</b>
<b>Dinas Perdagangan</b>				<b>10.839</b>		<b>20.026</b>		<b>28.493</b>		<b>26.136</b>		<b>27.591</b>		<b>82.221</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai					BB	8.270	BB	8.547	A	8.982	A	25.798
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Pengawasan Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	%					60	280	70	290	80	305	80	874
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan Fasilitasi Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%					100	3.704	100	490	100	640	100	4.834
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	%					4	1.658	4	1.717	4	1.804	4	5.179
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	%					3	1.303	5	1.349	7	1.418	7	4.071
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (Termasuk: Rumah Kemasan)	Cakupan Penyelesaian Sengketa	%					80	1.253	85	1.298	90	1.364	90	3.915
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI (Termasuk : Bela Beli Produk Lokal/NTB Mall)	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	%					100	12.024	100	12.446	100	13.080	100	37.550
<b>PERINDUSTRIAN</b>				<b>9.570</b>		<b>19.171</b>		<b>46.160</b>		<b>60.160</b>		<b>68.160</b>		<b>174.481</b>
<b>Dinas Perindustrian</b>				<b>9.570</b>		<b>19.171</b>		<b>46.160</b>		<b>60.160</b>		<b>68.160</b>		<b>174.481</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelayanan pendukung kesekretariatan OPD	%					100	17.751	100	23.135	100	26.211	100	67.097
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI (Termasuk : Industri Motor Listrik, Industri	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan	%					100	27.070	100	35.280	100	39.972	100	102.322

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya	
			Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
Peralatan& Permesinan, Industri Pertambangan (Smelter) & Industri Turunannya, Rumah Kemas, Industri Pakaian: Busana Muslim, Tenun Ikat, STIPark, Re-Engineering SMK, Industri Perkebunan, Industri Pangan& Holtikultura, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK, Industri Peternakan/Pakan Ternak, UMKM Bersaing, Bela Beli Produk Lokal/NTB Mall)	Pembangunan Industri Provinsi													
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang Meningkat dari Kecil ke Menengah	%					2,69	799	3,14	1.041	3,55	1.179	3,55	3.018
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%					1,00	540	1,00	704	1,00	798	1,00	2.043
<b>TRANSMIGRASI</b>				<b>143</b>			<b>43</b>	<b>200</b>		<b>225</b>		<b>259</b>		<b>684</b>
<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>				<b>143</b>			<b>43</b>	<b>200</b>		<b>225</b>		<b>259</b>		<b>684</b>
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kawasan baru transmigrasi	%					100	93	100	104	100	120	100	316
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan kawasan transmigrasi yang dikembangkan	%					75	107	75	121	75	139	75	367
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kawasan transmigrasi yang dibangun	%					100		100		100		100	
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				<b>143.566</b>			<b>137.551</b>	<b>368.178</b>		<b>412.862</b>		<b>454.862</b>		<b>1.235.903</b>
<b>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>				<b>143.566</b>			<b>137.551</b>	<b>368.178</b>		<b>412.862</b>		<b>454.862</b>		<b>1.235.903</b>
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
Sekretariat Daerah				70.212			67.508	269.228		300.728		331.228		901.185
Biro Umum								159.613		178.288		196.370		534.272

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya									
			Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP PD	Nilai					B	159.613	B	178.288	B	196.370	B	534.272
<b>Biro Organisasi</b>								<b>1.874</b>		<b>2.093</b>		<b>2.305</b>		<b>6.272</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP PD	Nilai						726		811		893		2.429
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI (Termasuk : SAKIP Level A)	Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkat	%					80	1.148		1.282		1.412		3.842
<b>Biro Hukum</b>								<b>2.124</b>		<b>2.372</b>		<b>2.613</b>		<b>7.109</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP PD	Nilai						413		461		508		1.381
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM (Termasuk: Bale Mediasi)	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	%					100	1.711	100	1.911	100	2.105	100	5.728
	Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terasilitasi	%					100		100		100		100	-
	Persentase Produk Hukum Daerah yang terevaluasi	%					100		100		100		100	-
	Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada masyarakat	%					100		100		100		100	-
	Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	%					100		100		100		100	-
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Litigasi	%					100		100		100		100	-
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	%					100		100		100		100	-
<b>Biro Pemerintahan</b>								<b>3.312</b>		<b>3.700</b>		<b>4.075</b>		<b>11.088</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP PD	Nilai						479		535		589		1.603

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya	
			Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH (Termasuk: Tata Ruang Berkelanjutan, BUMDes Maju/Mahadesa, Mall Investasi&Pelayanan Publik, Ramah Investasi/Online Service)	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	%					100	2.834	100	3.165	100	3.486	100	9.485
<b>Biro Perekonomian</b>								<b>2.504</b>		<b>2.797</b>		<b>3.081</b>		<b>8.382</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP PD	Nilai						220		246		271		738
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (Termasuk : Mawar Emas, Mall Investasi&Pelayanan Publik)	Prosentase bahan kebijakan perekonomian Daerah	%					100	2.284	100	2.551	100	2.810	100	7.644
<b>Biro Administrasi Pembangunan</b>								<b>1.841</b>		<b>2.056</b>		<b>2.265</b>		<b>6.161</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP PD	Nilai						253		282		311		846
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan	%					30	1.588	35	1.774	40	1.954	40	5.315
<b>Biro Pengadaan Barang dan Jasa</b>								<b>4.610</b>		<b>5.149</b>		<b>5.671</b>		<b>15.430</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP PD	Nilai						218		243		268		729
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa						Level 3,3	4.392	Level 3,6	4.906	Level 4	5.403	Level 4	14.701
<b>Biro Kesejahteraan Rakyat</b>								<b>88.380</b>		<b>98.721</b>		<b>108.733</b>		<b>295.833</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP PD	Nilai						953		1.065		1.173		3.190
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT (Termasuk : 1000 Cendikia/Beasiswa, Rumah Bahasa, Revitalisasi Islamic Center)	Persentase Kesejahteraan Rakyat dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	%					100	87.427	100	97.656	100	107.560	100	292.643
<b>Biro Administasi Pimpinan</b>								<b>4.970</b>		<b>5.552</b>		<b>6.115</b>		<b>16.637</b>
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								4.970		5.552		6.115		16.637



Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya	
			Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
<b>Dewan Perwakilan rakyat Daerah</b>				73.354		70.043		98.950		112.134		123.634		334.718
<b>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>				73.354		70.043		98.950		112.134		123.634		334.718
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai					BB	56.053	BB	63.521	BB	70.036	BB	189.610
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%					100	42.897	100	48.613	100	53.598	100	145.108
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				149.813		114.851		954.255		1.000.690		1.103.698		3.059.693
<b>PERENCANAAN</b>				23.902		18.516		35.233		39.780		45.197		120.211
<b>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>				23.902		18.516		35.233		39.780		45.197		120.211
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Termasuk : NTB WTP)	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERANGKAT DAERAH	%					100	19.911	100	22.480	100	25.542	100	67.933
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (Termasuk : eNtBe Plan/SIPD, SAKIP Level A)	Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan	%					100	4.234	100	4.780	100	5.431	100	14.444
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Termasuk : NTB SDG's Center, Generasi Emas NTB, Tata Ruang Berkelanjutan, Melawan daru Desa/Penanggulangan Kemiskinan, KEK Mandalika, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani&Tambora, Kawasan Samota, Industri Pertambangan/Smelter dan Industri Turunannya)	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	%					100	11.089	100	12.520	100	14.225	100	37.833

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya	
			Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
<b>KEUANGAN</b>				<b>89.804</b>		<b>77.616</b>		<b>842.785</b>		<b>878.280</b>		<b>972.672</b>		<b>2.694.786</b>
<b>Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Selaku SKPD</b>				<b>41.412</b>		<b>36.721</b>		<b>739.521</b>		<b>769.680</b>		<b>858.072</b>		<b>2.368.324</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PERANGKAT DAERAH	Nilai					BB	26.075	A	27.149	A	30.249	A	83.473
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	%					100	711.669	100	739.589	100	824.559	100	2.275.817
	Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	%					100	1.050	100	1.093	100	1.202	100	3.344
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (Termasuk : NTB WTP)	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	%					60	1.777	70	1.849	75	2.062	75	5.689
<b>Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>				<b>48.391</b>		<b>40.895</b>		<b>103.264</b>		<b>108.599</b>		<b>114.599</b>		<b>326.463</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai					A	88.128	A	92.681	A	97.802	A	278.611
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Derajat Desentralisasi Fiskal	%					35,20	528	36,76	555	38,44	585	38,44	1.668
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	%					50,12	14.608	52,03	15.363	54,03	16.212	54,03	46.184
<b>KEPEGAWAIAN</b>				<b>9.573</b>		<b>6.313</b>		<b>30.955</b>		<b>34.162</b>		<b>32.278</b>		<b>97.394</b>
<b>Badan Kepegawaian Daerah</b>				<b>9.573</b>		<b>6.313</b>		<b>30.955</b>		<b>34.162</b>		<b>32.278</b>		<b>97.394</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai					BB	24.455	BB	27.012	A	24.413	A	75.879

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya	
			Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (Termasuk : Agen Perubahan, Manajemen Talenta, SAKIP Level A)	Nilai Aspek Sistem Informasi	Nilai					16	6.500	16	7.150	19	7.865	19	21.515
	Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan						80		80		80		80	
	Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi						88		88		115		135	
	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan						132		132		134		136	
	Nilai Aspek Sistem Informasi						16		16		19		19	
<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				<b>18.206</b>		<b>6.448</b>	<b>31.940</b>		<b>32.940</b>		<b>35.440</b>		<b>100.320</b>	
<b>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah</b>				<b>18.206</b>		<b>6.448</b>	<b>31.940</b>		<b>32.940</b>		<b>35.440</b>		<b>100.320</b>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	%					100	15.494	100	15.979	100	17.192	100	48.665
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (Termasuk : Manajemen Talenta, Agen Perubahan)	Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	%					0,09	16.446	0,09	16.961	0,10	18.248	0,10	51.655
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	%					0,03		0,04		0,04		0,04	
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis	%					0,13		0,14		0,15		0,15	
	Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi	%					0,55		0,59		0,62		0,62	
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				<b>1.807</b>		<b>858</b>	<b>3.789</b>		<b>4.278</b>		<b>4.860</b>		<b>12.927</b>	
<b>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>				<b>1.807</b>		<b>858</b>	<b>3.789</b>		<b>4.278</b>		<b>4.860</b>		<b>12.927</b>	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PERSENTASE KAJIAN KELITBANGAN DALAM	%					34,78	3.789	65,22	4.278	100	4.860	100	12.927

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya	
			Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
DAERAH (Termasuk : Research Based Policy, NTB Satu Peta, NTB Satu Data)	PERENCANAAN PEMBANGUNAN													
<b>PENGHUBUNG</b>				6.521		5.100		9.552		11.251		13.251		34.055
<b>Badan Penghubung Daerah</b>				6.521		5.100		9.552		11.251		13.251		34.055
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Termasuk: Ramah Investasi/Online Service)	Nilai SAKIP OPD	Nilai					B	9.552	B	11.251	B	13.251	B	34.055
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Angka kunjungan wisatawan pada Anjungan NTB TMII (orang)	Orang							41.000		43.000		43.000	
<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>				13.792		14.882		22.882		27.181		30.681		80.744
<b>PENGAWASAN</b>				13.792		14.882		22.882		27.181		30.681		80.744
<b>Inspektorat</b>				13.792		14.882		22.882		27.181		30.681		80.744
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Inspektorat	Kategori					A	16.173	A	19.211	AA	21.685	AA	57.069
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN (Termasuk : NTB WTP)	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	%					80	1.079	85	1.282	90	1.447	90	3.807
	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	%					40	2.119	44,44	2.517	48,89	2.841	48,89	7.478
	Persentase PD yang Meningkatkan Nilai Implementasi SAKIP-nya	%					84,44	827	91,11	982	100	1.108	100	2.917
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI (Termasuk: SAKIP Level A)	Persentase Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk SPIP	%					5,55	397	6,55	472	7,55	533	7,55	1.402
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu	%					95	1.571	96	1.866	97	2.106	97	5.542
	Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	%					17,77	717	22,22	851	26,66	961	26,66	2.529
<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>				11.198		8.639		16.392		18.152		48.152		82.696

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019		Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya								Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaannya	
			Kinerja	Rp (Juta)	2020		2021		2022		2023		Target	Rp (Juta)
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				<b>11.198</b>		<b>8.639</b>		<b>16.392</b>		<b>18.152</b>		<b>48.152</b>		<b>82.696</b>
<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>				<b>11.198</b>		<b>8.639</b>		<b>16.392</b>		<b>18.152</b>		<b>48.152</b>		<b>82.696</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai					A	6.733	A	7.456	A	8.278	A	22.468
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Termasuk : Sekolah Perjumpaan)	Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik	%	20		10		10,00	458	10,00	507	10,00	562	10,00	1.527
PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	50,00		75		80,00	4.654	90,00	5.153	100,00	33.721	100	43.528
PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Termasuk : Desa Bersinar)	Persentase Ormas yang aktif	%	83,33		78		79,66	489	81,35	541	83,01	601	83,01	1.631
PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	%	17,24		34		51,72	730	68,96	809	86,21	898	86,21	2.437
PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial (Termasuk : Kampung Madani&Sehat, Bale Mediasi)	Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	%	5,83		7		10,00	3.328	10,53	3.686	11,43	4.092	11,43	11.105



BAB

8



*Kinerja Penyelenggaraan  
Pemerintah Daerah*

## BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

### 8.1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah di Provinsi NTB sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut.

**Tabel 8-1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi NTB Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Kondisi 2019	Target Tahun			
			2020	2021	2022	2023
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah						
1	Indeks Kapasitas Daerah	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65
2	Persentase Kemantapan jalan	80,28	80,76	83,95	85,36	86,6
3	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	50,76	48,11	50,04	52,17	54,50
4	Persentase konektivitas transportasi publik	78,64	79,43	81,71	86,86	89,14
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi						
5	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	34,77	34,06	35,41	36,97	38,65
7	Nilai SAKIP	BB	BB (70,05-73,00)	BB (73,01 - 76,00)	BB (76,01 - 80,00)	A (80,01 - 90,00)
8	Indeks Profesionalisme ASN	0,54	0,66	0,68	0,70	0,72
9	Indeks Pelayanan Publik	3,63	3,93	4,23	4,53	4,55
Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah						
10	Angka Harapan Hidup	66,28	66,48	66,78	67,08	67,48
11	Persentase Balita Stunting	25,50	31,99	31,49	30,99	30,49
12	Harapan Lama Sekolah	13,57	13,62	13,68	13,73	13,79
13	Rata rata Lama Sekolah	7,27	6,98	7,01	7,04	7,07
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan						
14	Indeks Kualitas Air	40,23	42,73	42,83	42,93	43,03
15	Indeks Kualitas Udara	87,40	87,50	87,53	87,56	87,59
16	Indeks Kualitas Air Laut	-	69,69	70,29	70,89	71,48
17	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	65,67	66,70	67,70	68,70	69,70
18	Persentase Penanganan Sampah	34,91	40,00	50,00	60,00	70,00
19	Persentase Pengurangan Sampah	6,80	15,00	20,00	25,00	30,00
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi						
20	Nilai Realisasi Investasi	10.024	11.574	13.362	15.428	17.814
21	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	23,06	23,29	23,52	23,71	23,88
22	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	85,30	85,80	86,20	86,70	87,20
24	Cakupan Air Minum	72,59	75,74	76,48	78,45	80,59
25	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	78,80	79,36	80,10	80,91	82,46
26	Rasio Elektrifikasi	99,55	99,66	99,77	99,88	99,99

No	Indikator	Kondisi 2019	Target Tahun			
			2020	2021	2022	2023
27	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	56,35	59,50	62,65	65,80	68,95
28	Inflasi	1,87	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0
29	Pengeluaran per kapita	10.640,00	10.951,94	11.273,02	11.603,52	11.943,70
30	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	117,21	116,04	122,71	129,78	137,24
31	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	164,96	160,02	166,39	173,02	179,91
32	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,42	3,35	3,30	3,19	3,17
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan						
33	Persentase penurunan konflik sosial	46,15	14,29	16,67	20,00	0,00
34	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	4,88	5,13	5,41	5,72	6,07
35	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00
36	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	18,60	17,93	18,60	19,27	20,47
37	Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	40,00	40,00	60,00	80,00	100,00

## 8.2. Indikator Kinerja Daerah

Untuk Indikator Kinerja Daerah Provinsi NTB disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 8-2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi NTB**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target 2019	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018			2020	2021	2022	2023	
<b>A</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>										
1	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam	%	7,10	3,08	4,76	4,76	1,5-2,5	2,5-3,5	3,5-4,5	4,5-5,5	4,5-5,5
2	Inflasi	%	3,70	3,16	3,0 - 4,0	1,87	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0
3	Tingkat Kemiskinan	%	15,05	14,63	13,75	13,88	13,88	13,42	12,77	11,92	11,92
4	Gini Ratio	Point	0,378	0,372	0,367	0,379	0,379	0,353	0,329	0,297	0,297
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	66,58	67,3	68,07	68,14	68,44	68,84	69,39	70,09	70,09
<b>B</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>										
6	Indeks Kriminalitas	Point	18,05	17,25	16,45	12,71	15,65	14,85	14,05	13,25	13,25
7	Indeks Aksesibilitas	Point	73,69	74,6	76,02	76,02	77,14	78,56	79,84	81,17	81,17
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	56,99	75,16	57,09	64,56	67,74	67,98	68,22	68,46	68,46
9	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana	%	-	-	-	87,79	88,45	89,03	89,69	90,31	90,31
10	Indeks Risiko Bencana	Point	142,90	139,40	172,18	129,02	126,91	123,11	119,41	115,83	115,83
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	CC	CC	B	B	B	B	BB	BB	BB
12	Indeks Pelayanan Publik	Point	3,42	4,56	3,92	3,63	3,93	4,23	4,53	4,55	4,55
<b>C</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>1</b>	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>										
<b>1.01</b>	<b>Pendidikan</b>										
13	Indeks Pendidikan	Point	60,39	60,85	61,31	61,68	62,03	62,39	62,74	63,10	63,10
14	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,46	13,51	13,57	13,57	13,62	13,68	13,73	13,79	13,79
15	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,90	6,93	6,96	7,27	6,98	7,01	7,04	7,07	7,07
<b>1.02</b>	<b>Kesehatan</b>										
16	Indeks Kesehatan	Point	70,08	70,57	71,06	71,20	71,51	71,97	72,43	73,05	73,05



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018			2019	2020	2021	2022	
17	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	66,74	70,35	73,00	86,47	75,00	77,00	80,00	83,00	83,00
18	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	69,25	69,53	72,62	78,80	79,36	80,10	80,91	82,46	82,46
19	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,55	65,75	66,07	66,28	66,48	66,78	67,08	67,48	67,48
20	Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	37,20	33,49	32,49	25,50	31,99	31,49	30,99	30,49	30,49
21	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	100	100
<b>1.03</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>										
22	Persentase Kemantapan jalan	%	77,16	83,65	80,28	80,28	80,76	83,95	85,36	86,60	86,60
23	Cakupan Air Minum	%	-	70,48	72,59	72,59	75,74	76,48	78,45	80,59	80,59
24	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50,54	50,63	50,76	50,76	48,11	50,04	52,17	54,50	54,50
25	Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR)	%	0	0	0,00	0,00	0,00	9,09	18,18	27,20	27,20
<b>1.04</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>										
26	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	53,04	56,75	92,37	56,35	59,50	62,65	65,80	68,95	68,95
<b>1.05</b>	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>										
27	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	4,45	4,65	4,88	4,88	5,13	5,41	5,72	6,07	6,07
28	Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
30	Cakupan Desa Tangguh Bencana (434 Desa Rawan Bencana)	%	5,07	7,14	11,75	11,75	16,36	20,97	25,58	30,18	30,18
31	Indeks Kapasitas Daerah	%	0,53	0,55	0,57	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65	0,65
<b>1.06</b>	<b>Sosial</b>										
32	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33	Persentase PMKS yang tertangani	%	5,07	22,42	5,50	5,29	4,64	4,87	5,12	5,37	5,37
<b>2</b>	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>										
<b>2.01</b>	<b>Tenaga Kerja</b>										
34	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,32	3,72	3,39	3,42	3,35	3,30	3,19	3,17	3,17
<b>2.02</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>										
35	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	59,95	60,06	60,43	55,81	57,81	59,81	61,16	61,40	61,40
36	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Point	90,36	90,37	91,08	90,4	90,43	90,46	90,49	90,52	90,52
37	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan	Tahun	20,27	20,23	20,42	20,21	20,50	20,70	20,90	21,00	21,00
38	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	17,79	17,93	18,60	18,60	17,93	18,60	19,27	20,47	20,47
39	Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	0	10,00	40,00	40,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
<b>2.03</b>	<b>Pangan</b>										
40	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	77,80	78,30	78,80	85,30	85,80	86,20	86,70	87,20	87,20

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			2017	2018			2019	2020	2021	2022		2023
<b>2.04</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>											
41	Indeks Kualitas Air	Point	20,25	74,63	22,75	40,23	42,73	42,83	42,93	43,03	43,03	43,03
42	Indeks Kualitas Udara	Point	88,02	87,17	88,45	87,40	87,50	87,53	87,56	87,59	87,59	87,59
43	Indeks Kualitas Air Laut	Point	-	-	-	-	69,69	70,29	70,89	71,48	71,48	71,48
44	Neraca Pengelolaan Sampah (%)	%	-	-	60,00	41,71	55,00	70,00	85,00	100,00	100,00	100,00
45	Persentase Penanganan Sampah	%	-	-	34,91	34,91	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00	70,00
46	Persentase Pengurangan Sampah	%	-	-	6,80	35,91	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00	30,00
<b>2.05</b>	<b>Pertanahan</b>											
47	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2.06</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>											
48	Rasio Penduduk BerkTP Persatuan Penduduk	rasio	0,84	0,94	0,80	0,99	0,82	0,84	0,86	0,88	0,88	0,88
<b>2.07</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>											
49	Cakupan desa pesisir, dan lingkaran hutan yang diberdayakan	%	14,17	20,86	24,47	33,29	26,74	29,01	31,28	33,69	33,69	33,69
50	Persentase Desa dengan status berkembang, maju, dan mandiri	%	-	78,00	82,00	82,00	84,00	86,00	88,00	91,00	91,00	91,00
<b>2.08</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>											
51	Pertumbuhan Penduduk	%	1,21	1,17	1,13	1,13	1,08	1,04	1,00	0,95	0,95	0,95
<b>2.09</b>	<b>Perhubungan</b>											
52	Persentase konektivitas transportasi publik	%	73,72	74,76	76,7	78,64	79,43	81,71	86,86	89,14	89,14	89,14
<b>2.10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>											
53	Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah	Kualifikasi	N/A	N/A	Informatif	Informatif	Interaktif	Interaktif	Transaksi	Kolaborasi	Kolaborasi	Kolaborasi
54	Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	%	N/A	N/A	5	5	15	50	65	75	75	75
<b>2.11</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>											
55	Persentase Koperasi Aktif	%	61,91	60,00	62,00	61,77	63,00	65,00	67,00	70,00	70,00	70,00
<b>2.12</b>	<b>Penanaman Modal</b>											
56	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	11.280	14.000	16.000	10.024	11.574	13.362	15.428	17.814	17.814	68.202
<b>2.13</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>											
57	Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional	Medali	40	30	25	35	30	35	40	45	210	210
58	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	orang	15	15	15	23	15	15	15	15	15	15
59	Proporsi wirausaha muda	%	67,78	67,86	67,97	68	68,07	68,18	68,28	68,39	68,39	68,39
<b>2.14</b>	<b>Statistik</b>											
60	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data yang Berkualitas	%	N/A	N/A	10,00	10,00	15,00	30,00	50,00	65,00	65,00	65,00
<b>2.15</b>	<b>Persandian</b>											
61	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Level	I	I	I+	I+	II	II+	III	III+	III+	III+
<b>2.16</b>	<b>Kebudayaan</b>											
62	Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi	%	-	8,70	17,39	17,39	20,00	24,35	28,70	33,04	33,04	33,04
<b>2.17</b>	<b>Perpustakaan</b>											
63	Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas)	%	47,46	47,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64	Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul)	%	17,27	19,93	23,91	26,57	27,90	31,89	35,87	39,86	39,86	39,86
<b>2.18</b>	<b>Kearsipan</b>											



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018			2019	2020	2021	2022	
65	Persentase Arsip yang Terselamatkan	%	16,55	16,67	33,33	33,33	50,00	66,67	83,33	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>										
<b>3.01</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>										
66	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	%	4,77	4,76	4,76	4,57	4,76	4,75	4,75	4,74	4,74
67	Produksi Perikanan	Ton	1.207.076	1.297.325	-	1.370.346	1.405.469	1.436.947	1.468.104	1.499.957	1.499.957
68	Nilai Tukar Nelayan	%	112,25	118,00	-	108,89	>110	>110	>110	>110	>110
<b>3.02</b>	<b>Pariwisata</b>										
69	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	%	7,27	-4,59	-	-0,08	-0,10	1,50	3,00	4,50	4,50
70	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan	%	0,00	0,00	20,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
71	Rata-rata Lama Menginap	hari	2,64	1,50	2,75	2,05	2,95	3,10	3,25	3,35	3,35
72	Angka kunjungan wisatawan	orang	3.508.903	2.812.379	4.000.000	3.706.352	4.400.000	4.650.000	4.850.000	5.200.000	23.100.000
73	Persentase Geosites yang Tertata	%	0,03	0,06	10,00	0,06	12,50	25,00	37,50	50,00	50,00
74	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Milyar	112,36	76,13	113,43	117,21	116,04	122,71	129,78	137,24	137,24
<b>3.03</b>	<b>Pertanian</b>										
75	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	22,03	23,51	23,00	23,06	23,29	23,52	23,71	23,88	23,88
76	Nilai Tukar Petani	Point	107,63	111,21	>105	115,27	>105	>105	>105	>105	>105
<b>3.04</b>	<b>Kehutanan</b>										
77	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	61,27	66,56	60,03	65,67	66,70	67,70	68,70	69,70	69,70
78	Cakupan Luas Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Lainnya	%	0,08	0,08	0,08	2,13	5,08	10,08	15,08	20,08	20,08
<b>3.05</b>	<b>Energi dan Sumberdaya Mineral</b>										
79	Rasio Elektrifikasi	%	85,10	93,83	94,46	99,55	99,66	99,77	99,88	99,99	99,99
<b>3.06</b>	<b>Perdagangan</b>										
80	Indeks Daya Beli	Point	69,76	70,99	72,23	72,03	72,91	73,80	74,68	75,56	75,56
81	Pengeluaran per kapita	Rp.000	9.877	9.917	9.956	10.640	10.952	11.273	11.604	11.944	11.944
<b>3.07</b>	<b>Perindustrian</b>										
82	Pertumbuhan Industri	%	2,00	2,00	3,20	4,57	5,50	6,50	7,50	9,00	9,00
83	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Milyar	240,99	56,28	164,57	164,96	160,02	166,39	173,02	179,91	179,91
84	Persentase Industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah	%	0,57	1,13	1,68	1,90	2,20	2,69	3,14	3,55	3,55
<b>3.08</b>	<b>Transmigrasi</b>										
85	Cakupan Penempatan Transmigran	%	75	75	80	80	85	90	95	100	100
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>										
<b>4.01</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>										
86	Ranking Nasional LPPD	Ranking	10	3	-	3	4	7	5	3	3,0747
87	Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkualitas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
88	Persentase Fasilitas Pelayanan Keagamaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
89	Persentase unit pelayanan publik perangkat daerah	%	-	-	-	25,00	28,00	28,00	34,00	45,00	45,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018			2019	2020	2021	2022	
	yang menerapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)										
90	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Level	1	1	-	2	2	3	3	4	4
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>										
<b>5.01</b>	<b>Perencanaan</b>										
91	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	%	100,00	100,00	100,00	95,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>5.02</b>	<b>Keuangan</b>										
92	Opini BPK	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
93	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Point	0,46	0,45	0,47	0,50	0,48	0,50	0,52	0,54	0,54
94	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	32,15	33,77	34,39	34,77	34,06	35,41	36,97	38,65	38,65
<b>5.03</b>	<b>Kepegawaian</b>										
95	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,57	0,60	0,65	0,54	0,66	0,68	0,70	0,72	0,72
<b>5.04</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>										
96	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi	Point	NA	NA	NA	0,23	0,24	0,25	0,27	0,28	0,28
<b>5.05</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>										
97	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB)	%	12,00	15,00	18,00	21,00	21,00	24,00	27,00	30,00	30,00
<b>5.06</b>	<b>Penghubung</b>										
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>										
<b>6.01</b>	<b>Pengawasan</b>										
98	Nilai SAKIP	Kategori	B (>60 - 70)	B (62,53)	B	BB	BB (70,05-73,00)	BB (73,01 - 76,00)	BB (76,01 - 80,00)	A (80,01 - 90,00)	A (80,01 - 90,00)
<b>7</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>										
<b>7.01</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>										
99	Cakupan mediator bale mediati yang dilatih	%	0,00	0,00	3,52	1,98	7,05	4,46	4,67	4,89	4,89
100	Partisipasi Politik Masyarakat	%	78,44	77,5	-	82,80	82,80	83,74	84,57	85,20	85,20
101	Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter	%	0	0,41	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	50,00
102	Persentase penurunan konflik sosial	%	8,70	38,10	-	46,15	14,29	16,67	20,00	0,00	0,00
103	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0,40	0,50	0,60	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,00

BAB

9



*Perutup*

## **BAB IX PENUTUP**

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Daerah daerah sekitar. Dalam Menyusun RPJMD ini sudah melalui pendekatan perencanaan politis, teknokratis, *top down-bottom up*, dan partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Untuk keberhasilan pencapaian visi, misi, dan program yang sudah disusun, pelaksanaan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 menjadi tanggung jawab bersama, baik Pemerintah, dunia usaha/swasta, maupun masyarakat.

### **9.1. Pedoman Transisi**

Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2028, maka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

### **9.2. Kaidah Pelaksanaan**

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, RKPD Tahunan dan perencanaan penganggaran. RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD Provinsi NTB setiap tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban melaksanakan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
2. Gubernur berkewajiban mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk mewujudkan pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
3. Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan pembangunan sesuai



dengan tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;

4. Penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 sebagai landasan penyusunan KUA-PPAS dalam rangka menyusun RAPBD;
5. Bappeda berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
6. Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD berpedoman pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
7. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang dinilai tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
8. Gubernur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 kepada masyarakat
9. DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Gubernur dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

Mataram, 11 Februari 2021  
Gubernur Nusa Tenggara Barat

